



**BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 5 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta meningkatkan hasil pembangunan Daerah secara adil dan merata dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat Daerah sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa pelaksanaan pembangunan di Daerah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan Daerah sehingga dapat dilaksanakan secara sinergi dan selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Bupati;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 8 Agustus 1950);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Demak.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
18. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Daerah ke dalam struktur ruang dan pola ruang.
21. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029;
- b. pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai periode RPJMD;
- c. pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai periode RPJMD;

- d. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD; dan
- e. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai periode RPJMD.

Pasal 4

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah Tahun 2024.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
 - a. RPJPD;
 - b. RTRW;
 - c. RPJMN;
 - d. RPJMD Provinsi Jawa Tengah; dan
 - e. kajian lingkungan hidup strategis.
- (3) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah kabupaten/kota sekitar.

Bagian Kedua Sistematika

Pasal 5

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I : berisi pendahuluan;
 - b. Bab II : berisi gambaran umum daerah;
 - c. Bab III : berisi visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah;
 - d. Bab IV : berisi program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
 - e. Bab V : berisi penutup.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan RPJMD;

- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD.
- (3) Bupati mendelegasikan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
 - (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan Daerah dan nasional.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra-PD.

Pasal 8

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Perda.

Pasal 9

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan capaian sasaran tahunan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Dalam hal rencana pembangunan jangka menengah Daerah Tahun 2030-2034 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2030 berpedoman pada RPJPD pada tahapan 5 (lima) tahun kedua yaitu Tahun 2030-2034 serta mengacu pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RKPD sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI DEMAK,



EIST'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK



AKHMAD SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH : (5 - 137 / 2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Daerah berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah. Pembangunan daerah dilaksanakan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas bawah dan bawah-atas yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dokumen rencana pembangunan daerah terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (tahunan).

Rencana pembangunan jangka menengah ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Demak untuk periode 5 (lima) tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Demak dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah.

Untuk menjamin sinergitas perencanaan, RPJMD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratik, politis, serta *top-down* dan *bottom-up*, dengan berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selanjutnya, dokumen RPJMD dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan

tahunan, yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “merugikan kepentingan Daerah dan nasional” adalah apabila bertentangan dengan kebijakan daerah/nasional

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “goncangan politik” adalah situasi di mana ketidakstabilan dan konflik dalam sistem politik terjadi akibat terjadinya protes/demonstrasi, gerakan politik, perubahan kebijakan, kerusuhan dan kekerasan, dan penyelenggaraan pemilu ulang atau perubahan pemerintahan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DEMAK**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 5 TAHUN 2025**

RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

**KABUPATEN DEMAK
2025-2029**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I	1
	1.1 Latar Belakang	I	1
	1.2 Dasar Hukum	I	3
	1.3 Hubungan Antar Dokumen	I	7
	1.4 Maksud dan Tujuan	I	11
	1.5 Sistematika Penulisan	I	11
 BAB II	 GAMBARAN UMUM DAERAH	 II	 1
	2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II	1
	2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II	1
	2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah	II	1
	2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam	II	7
	2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	II	12
	2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	II	20
	2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas	II	23
	2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	II	26
	2.1.1.7 Demografi	II	32
	2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II	38
	2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi	II	38
	2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua	II	48
	2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata	II	50
	2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif	II	54
	2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	II	56
	2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	II	58
	2.1.3 Aspek Daya Saing	II	61
	2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia	II	61
	2.1.3.2 IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	II	62
	2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	II	68
	2.1.3.4 Transformasi Digital	II	71
	2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	II	72



2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	II	73
2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro	II	77
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum	II	78
2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berinteritas dan Adaptif	II	78
2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial	II	81
2.1.4.3 Daerah yang Berdaya Saing	II	83
2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah	II	84
2.2 Gambaran Umum Keuangan Daerah	II	109
2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	II	110
2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD	II	112
2.2.2 Neraca Daerah	II	135
2.2.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	II	147
2.2.3.1 Proporsi Penggunaan Anggaran	II	147
2.2.3.2 Analisis Pembiayaan	II	152
2.2.4 Kerangka Pendanaan	II	153
2.2.4.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah	II	154
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis	II	185
2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	II	185
2.3.2 Isu Strategis	II	205
2.3.2.1 Isu Global	II	206
2.3.2.2 Isu Strategis Nasional	II	208
2.3.2.3 Isu Strategis Regional	II	214
2.3.2.4 Isu Strategis Kabupaten Demak	II	242
BAB III		
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	III	1
3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	III	1
3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah	III	26
3.2.1 Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	III	26
3.2.1.1 Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Demak 2025-2029	III	35
3.2.2 Arah Kebijakan Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	III	46

	3.2.3 Program-Program Prioritas		
	Pembangunan Daerah dalam	III	52
	Pencapaian Tujuan dan Sasaran		
	RPJMD Tahun 2025-2029		
	3.2.4 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	III	92
BAB IV	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	IV	1
	4.1 Program Perangkat Daerah	IV	1
	4.2 Penetapan Indikator Kinerja	IV	17
	4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)	IV	17
	4.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)	IV	18
BAB V	PENUTUP	V	1
	5.1 Pedoman Transisi	V	1
	5.2 Kaidah Pelaksanaan	V	2

LAMPIRAN

- Program Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025 – 2029
- Metadata Indikator Kinerja

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya	I	7
Gambar II.1	Peta Administrasi Kabupaten Demak	II	3
Gambar II.2	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Demak 2011-2031	II	10
Gambar II.3	Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang- Demak	II	11
Gambar II.4	Skenario Daya Dukung Air Tahun 2023-2031	II	14
Gambar II.5	Skenario Daya Dukung Pangan Tahun 2023- 2031	II	17
Gambar II.6	Skenario Daya Dukung Lahan Terbangun Tahun 2023-2031	II	19
Gambar II.7	Skenario Sampah yang Terolah di Fasilitas Persampahan	II	20
Gambar II.8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	23
Gambar II.9	Peta Bencana Kabupaten Tahun 2024	II	26
Gambar II.10	Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	28
Gambar II.11	Indeks Resiko Bencana Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	28
Gambar II.12	Presentase Indeks Kerentanan Bencana Kabupaten Demak	II	30
Gambar II.13	Peta Kerentanan Kabupaten Demak	II	30
Gambar II.14	Piramida Penduduk Kabupaten Demak Tahun 2024	II	36
Gambar II.15	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Demak Tahun 2024	II	42
Gambar II.16	Kemiskinan Ekstrim Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024	II	43
Gambar II.17	PDRB Per Kapita (Jutaan Rupiah/Kapita) Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	44
Gambar II.18	Indeks Gini Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	47
Gambar II.19	Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Demak Tahun 2020- 2024	II	51
Gambar II.20	Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	55
Gambar II.21	Presentase Pelaku Usaha yang Terdaftar BPJS Ketennagakerjaan Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	56
Gambar II.22	Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Demak 2021-2024 (%)	II	58
Gambar II.23	Presentase Tenaga Kerja Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Demak Tahun 2024 (%)	II	63
Gambar II.24	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Demak Tahun 2020-2024 (Persentase)	II	64
Gambar II.25	Rasio Kewirausahaan (%) Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	65
Gambar II.26	Pelaku Usaha yang Mengajukan Sertifikasi Halal Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	66
Gambar II.27	<i>Return On Asset</i> Kabupaten Demak Tahun 2020- 2024	II	67
Gambar II.28	Pertumbuhan Nilai Ekspor Luar Negeri Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	72

Gambar II.29	Rasio Pajak Terhadap PDRB Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	77
Gambar II.30	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	78
Gambar II.31	Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020-2024 (Dalam Jutaan)	II	114
Gambar II.32	Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	114
Gambar II.33	Perkembangan Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020-2024 (%)	II	117
Gambar II.34	Rata-rata Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020-2024 (%)	II	118
Gambar II.35	Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Demak Tahun 2020-2024 (Juta)	II	118
Gambar II.36	Kontribusi Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Demak Tahun 2020-2024 (%)	II	119
Gambar II.37	Rata-Rata Kontribusi Komponen Dana Perimbangan Kabupaten Demak Tahun 2020-2024 (%)	II	120
Gambar II.38	Perkembangan Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Demak Tahun 2020-2024 (Juta)	II	120
Gambar II.39	Perkembangan Struktur Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	121
Gambar II.40	Perkembangan Belanja Kabupaten Demak Tahun 2020-2024 (juta)	II	124
Gambar II.41	Rata-rata Struktur Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	125
Gambar II.42	Rata-rata Struktur Belanja Operasi Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	126
Gambar II.43	Perkembangan Struktur Belanja Operasi Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	126
Gambar II.44	Perkembangan Struktur Belanja Modal Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	127
Gambar II.45	Perkembangan Komposisi Belanja Transfer kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	128
Gambar II.46	Perkembangan Komposisi Pembiayaan Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	131
Gambar II.47	Target Komposisi PAD Kabupaten Demak Tahun 2025-2030	II	161
Gambar II.48	Target Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Demak Tahun 2025-2030	II	162
Gambar II.49	Target Belanja Operasi Kabupaten Demak Tahun 2025-2030 (dalam juta)	II	167
Gambar II.50	Rata-rata Proporsi Komponen Belanja Modal Kabupaten Demak Tahun 2025-2030	II	168
Gambar II.51	Target Alokasi Komponen Belanja Modal Kabupaten Demak Tahun 2025-2030 (dalam juta)	II	168
Gambar II.52	Presentase Penduduk Miskin Wilayah Kedungsepur Tahun 2024	II	186
Gambar II.53	Pengeluaran Per Kapita Masyarakat wilayah Kedungsepur Tahun 2024	II	187
Gambar II.54	Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Kedungsepur Tahun 2024	II	189
Gambar II.55	Tingkat Pengangguran Terbuka Wilayah Kedungsepur Tahun 2024	II	190
Gambar II.56	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional	II	192
Gambar II.57	Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Kedungsepur Tahun 2024	II	198



Gambar II.58	Angka Harapan Hidup Wilayah Kedungsepur Tahun 2024	II	199
Gambar II.59	Isu Global/Internasional yang Berdampak ke Kabupaten Demak	II	206
Gambar II.60	Isu RPJMN 2025-2029 Wilayah Jawa	II	209
Gambar II.61	Logframe Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2025-2029	II	217
Gambar II.62	Keterkaitan Antar Pokok Visi RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2045	II	219
Gambar II.63	Konstelasi/Kedudukan Kabupaten Demak sebagai PKN	II	229
Gambar II.64	Ilustrasi Struktur Ruang Kabupaten Demak	II	230
Gambar II.65	Alokasi Olah Ruang di Kabupaten Demak	II	230
Gambar II.66	Fenomena <i>Urban Sprawl</i> di Kabupaten Demak	II	231
Gambar II.67	Isu Terkait Bencana Rob dan <i>Land Subsidence</i>	II	232
Gambar III.1	Keselarasan misi Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional	III	4
Gambar III.2	Peta Pengembangan Wilayah Jawa Tengah	III	101
Gambar III.3	Kawasan Pertumbuhan Kecamatan Sayung	III	113
Gambar III.4	Kawasan Pertumbuhan Kecamatan Karangtengah	III	116
Gambar III.5	Kawasan Pertumbuhan Kecamatan Demak	III	118
Gambar III.6	Kawasan Pertumbuhan Kecamatan Gajah	III	122
Gambar III.7	Kawasan Pertumbuhan Kecamatan Bonang	III	127
Gambar III.8	Kawasan Pertumbuhan Kecamatan Wonosalam	III	130
Gambar III.9	Kawasan Pertumbuhan Kecamatan Karanganyar	III	132
Gambar III.10	Kawasan Pertumbuhan Kecamatan Wedung	III	136

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Demak	II	2
Tabel II.2	Jumlah Hari Hujan dan Rata-rata Curah Hujan di Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	4
Tabel II.3	Unsur Iklim Menurut Bulan di Kabupaten Demak Tahun 2024	II	4
Tabel II.4	Luas Lahan Berdasarkan Penggunaan Lahan Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	7
Tabel II.5	Luas Daya Dukung Air Berbasis <i>Grid</i>	II	13
Tabel II.6	Skenario Daya Dukung Air Tahun 2023-2031	II	15
Tabel II.7	Daya Dukung Pangan Kabupaten Demak	II	16
Tabel II.8	Skenario Daya Dukung Pangan Tahun 2023-2031	II	17
Tabel II.9	Daya Dukung Lahan Terbangun	II	18
Tabel II.10	Skenario Daya Dukung Lahan Terbangun Tahun 2023-2031	II	19
Tabel II.11	Cakupan Akses Air Minum Layak di Kabupaten Demak Berdasarkan Sumber (2020-2024)	II	20
Tabel II.12	Daya Terpasang, Produksi Listrik, dan Listrik Terjual	II	21
Tabel II.13	Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Bulan di Kabupaten Demak 2020-2024	II	22
Tabel II.14	Ketahanan Pangan Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	23
Tabel II.15	Timbulan Sampah, Pengurangan Sampah, dan Penanganan Sampah Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	26
Tabel II.16	Rekapitulasi Kejadian Bencana Tahun 2020-2024	II	27
Tabel II.17	Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kabupaten Demak 2020-2024 (Ton CO ₂ eq)	II	31
Tabel II.18	Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Demak Tahun 2020-2024 (Gg CO ₂ eq)	II	31
Tabel II.19	Jumlah Penduduk Kabupaten Demak per Kecamatan Tahun 2020-2024	II	33
Tabel II.20	Kepadatan Penduduk Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	33
Tabel II.21	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Demak Tahun 2023-2024	II	34
Tabel II.22	Presentase Dokumen Kependudukan Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	35
Tabel II.23	Capaian Pelayanan Admindukcapil Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	35
Tabel II.24	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Demak berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024	II	36
Tabel II.25	Proyeksi Penduduk Kabupaten Demak Tahun 2025-2029	II	37
Tabel II.26	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Atas Dasar Harga Konstan berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	39
Tabel II.27	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Demak Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (persen) Tahun 2020-2024	II	40
Tabel II.28	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	41
Tabel II.29	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Demak Tahun 2024	II	43
Tabel II.30	Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	45

Tabel II.31	Persentase Penduduk Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	45
Tabel II.32	Indikator Pembangunan Manusia Kabupaten Demak menurut Indikator Pembentuk Tahun 2020-2024	II	47
Tabel II.33	Indikator Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	49
Tabel II.34	Jumlah Ketersediaan Tempat Tidur di Rumah Sakit di Kabupaten Demak 2024	II	49
Tabel II.35	Jumlah Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Demak 2024	II	49
Tabel II.36	Rasio Fasilitas Layanan Kesehatan Di Kabupaten Demak 2024	II	50
Tabel II.37	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan (per 1.000 Penduduk)	II	50
Tabel II.38	Literasi dan Numerasi Pendidikan Kabupaten Demak Tahun 2022-2024	II	52
Tabel II.39	Indikator Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	58
Tabel II.40	Indikator Pembangunan Kesenjangan Gender Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	59
Tabel II.41	Pemenuhan Perlindungan Anak Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	61
Tabel II.42	Penduduk Kabupaten Demak berdasarkan Kelompok Umur dan Rasio Beban Tanggungan, Tahun 2020-2024	II	62
Tabel II.43	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	63
Tabel II.44	Data Penghimpunan Dan Penyaluran ZIS Baznas Kabupaten Demak Tahun 2020 – 2024	II	66
Tabel II.45	Program Penyaluran ZIS Baznas Kabupaten Demak Tahun 2020 – 2024	II	66
Tabel II.46	Capaian Perekonomian Sektor Pertanian Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	68
Tabel II.47	Produktivitas Padi Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	69
Tabel II.48	Produksi Komoditas Peternakan Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	69
Tabel II.49	Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	71
Tabel II.50	Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	73
Tabel II.51	Pembangunan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	74
Tabel II.52	Jumlah Desa berdasarkan Status Desa Tahun 2020-2024	II	75
Tabel II.53	Jumlah dan Klasifikasi BUMDES Kabupaten Demak Tahun 2020 – 2024	II	75
Tabel II.54	Panjang Jalan menurut Kondisi dan Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	76
Tabel II.55	Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	79
Tabel II.56	Gangguan Trantibumlinmas dan Kejadian Konflik Sosial Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	81
Tabel II.57	Angka Kejadian Konflik Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	82
Tabel II.58	Data Rasio Fatalitas Kecelakaan Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	83

Tabel II.59	Indeks Daya Saing Daerah dan Pilar Penyusunnya	II	84
Tabel II.60	Kabupaten Demak Tahun 2023-2024 Capaian Indikator Kinerja Kunci (Permendagri 18 Tahun 2020) Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	84
Tabel II.61	Capaian Kinerja SPM Kabupaten Demak Tahun 2021-2024	II	95
Tabel II.62	Capaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	97
Tabel II.63	Skala Interval Otonomi Fiskal	II	111
Tabel II.64	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)	II	112
Tabel II.65	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020-2024 (dalam juta)	II	122
Tabel II.66	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020-2024 (dalam juta)	II	129
Tabel II.67	Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020-2024 (Dalam Jutaan)	II	132
Tabel II.68	Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	137
Tabel II.69	Rasio Lancar Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	142
Tabel II.70	Rasio Hutang Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	143
Tabel II.71	Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kabupaten Demak Tahun 2020-2024	II	144
Tabel II.72	Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Demak Tahun 2020 – 2024	II	145
Tabel II.73	Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Demak Tahun 2020 – 2024	II	147
Tabel II.74	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Demak Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)	II	148
Tabel II.75	Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Demak Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)	II	151
Tabel II.76	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Demak Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)	II	152
Tabel II.77	Nilai Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Demak Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)	II	153
Tabel II.78	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Demak Tahun 2025-2030 (dalam jutaan)	II	163
Tabel II.79	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2030 (dalam juta)	II	171
Tabel II.80	Proyeksi APBD Kabupaten Demak Tahun 2025-2030 (dalam juta)	II	174
Tabel II.81	Proyeksi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Kabupaten Demak Tahun 2025-2030 (dalam Jutaan)	II	179

Tabel II.82	Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2030 (dalam Jutaan)	II	182
Tabel II.83	Proyeksi Kapasitas Riil Pagu OPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2030 (dalam Jutaan)	II	183
Tabel II.84	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kabupaten Demak Tahun 2026-2030 (dalam Jutaan)	II	184
Tabel II.85	Permasalahan Per Urusan Kabupaten Demak	II	200
Tabel II.86	Highlight Indikasi Intervensi RPJMN terhadap Kabupaten Demak	II	210
Tabel II.87	Rekomendasi Arah Kebijakan	II	224
Tabel II.88	Perbandingan Antara Tujuan RTRW	II	227
Tabel II.89	Indikasi Program RTRW PJM ke 4 Tahun 2026-2031	II	233
Tabel II.90	Tabel Identifikasi Isu Strategis Kabupaten Demak	II	242
Tabel III.1	Rumusan Tujuan dan Indikator Tujuan RPJMD Tahun 2025-2030	III	5
Tabel III.2	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2025-2030	III	9
Tabel III.3	Hubungan Tujuan dan Sasaran Daerah dengan Perangkat Daerah Kabupaten Demak	III	14
Tabel III.4	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Demak 2025-2030	III	27
Tabel III.5	Tahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Demak 2026-2030	III	46
Tabel III.6	Pemetaan Program Prioritas Kabupaten Demak Periode 2025-2029	III	53
Tabel III.7	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Demak 2025-2029	III	89
Tabel III.8	Dukungan Kabupaten Demak terhadap Program Prioritas Nasional	III	93
Tabel III.9	Program Hasil Terbaik Cepat Nasional Tahun 2025 dan Dukungan Kabupaten Demak	III	99
Tabel III.10	Dukungan Kabupaten Demak terhadap Program Strategis Nasional	III	100
Tabel III.11	Dukungan Program Kabupaten Demak terhadap RPJMN 2025-2029	III	103
Tabel III.12	Dukungan Program Pembangunan Kabupaten Demak terhadap Program Delegasi Provinsi 2025-2029	III	104
Tabel IV.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Demak Tahun 2025-2030	IV	17
Tabel IV.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2030	IV	18
Tabel IV.3	Penetapan Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Demak Tahun 2025-2030	IV	25



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Demak memiliki keistimewaan historis yang menjadikannya pusat peradaban Islam di Jawa. Sebagai tempat berdirinya Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, wilayah ini telah memainkan peran penting dalam membentuk budaya dan agama di sekitarnya. Masjid Agung Demak yang didirikan oleh Walisongo menjadi bukti nyata dari sejarah tersebut. Lebih dari sekadar tempat ibadah, masjid ini berfungsi sebagai pusat dakwah dan penyebaran Islam, menjadikan Demak sebagai destinasi wisata religi yang menarik banyak pengunjung hingga kini. Hal ini menjadikan karakteristik masyarakat Kabupaten Demak sangat lekat dengan nilai-nilai Islam dan tradisi lokal.

Potensi utama Kabupaten Demak terletak pada sektor agraris dan kelautannya. Dengan lahan pertanian yang subur, Demak dikenal sebagai salah satu penghasil padi terbesar di Jawa Tengah. Posisi geografisnya di pesisir pantai utara Jawa juga memberikan keunggulan sumber daya laut, seperti perikanan dan tambak garam. Kedua sektor ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah yang terus berkembang. Dibutuhkan peningkatan infrastruktur untuk mendukung nilai tambah produk hasil agraris dan kelautan.

Dari aspek sosio kultural, perayaan budaya seperti Grebeg Besar, tradisi Megengan, Syawalan serta berbagai kegiatan keagamaan menjadi cerminan kentalnya budaya religiositas di Kabupaten Demak. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di Demak terus menunjukkan perkembangan positif, terutama di sektor industri dan perdagangan. Kabupaten Demak merupakan salah satu pusat industri di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa. Kombinasi antara warisan sejarah, kekayaan alam, dan dinamika masyarakat yang progresif menjadikan Demak sebagai daerah yang memiliki potensi besar untuk berkembang di berbagai sektor.

Pembangunan di Kabupaten Demak difokuskan pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dengan strategi yang terencana, pemerintah daerah berupaya menciptakan pemerataan pendapatan, membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat daya saing daerah. Dalam hal ini, penyusunan dokumen RPJMD 2025-2029 menjadi sangat penting sebagai pedoman utama bagi pemerintah daerah dalam merumuskan program-program prioritas yang mendukung



pembangunan berkelanjutan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Penyusunan rencana pembangunan daerah Kabupaten Demak merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu penyusunan rencana pembangunan ini juga memedomani peraturan lainnya, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan aturan tersebut, RPJMD harus disahkan dalam waktu paling lambat enam bulan setelah pelantikan kepala daerah. Dengan dilantiknya dr. Hj. Eisti'anah, S.E. sebagai Bupati dan Muhammad Badruddin, M.Pd. sebagai Wakil Bupati pada tanggal 20 Februari 2025, pemerintah daerah berkomitmen untuk segera mewujudkan visi dan misi pembangunan yang disusun dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029.

Dengan adanya Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka dalam penyusunan RPJMD dilakukan beberapa pendekatan yaitu teknokratik, partisipatif, politis, (*top-down*) atas-bawah dan (*bottom-up*) bawah-atas, holistik-tematik, integratif, dan spasial. Kemudian dalam pelaksanaan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 melalui beberapa tahapan yaitu (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan awal; (3) penyusunan rancangan; (4) pelaksanaan musrenbang; (5) perumusan rancangan akhir dan (6) penetapan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peranan krusial dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak. RPJMD berfungsi sebagai peta jalan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan yang secara sistematis menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan yang terukur dan realistis. Dengan adanya RPJMD, arah pembangunan menjadi jelas dan terfokus pada prioritas-prioritas yang telah ditetapkan berdasarkan aspirasi masyarakat dan potensi daerah. Dokumen ini memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Demak memiliki landasan yang kuat dan saling terintegrasi, sehingga sumber daya yang ada dapat dialokasikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil

yang optimal dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Demak berkomitmen untuk menjadikan lima tahun ke depan sebagai periode transformasi menuju keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Komitmen ini diwujudkan melalui pengintegrasian prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam setiap aspek perencanaan dan penganggaran daerah, dengan penekanan pada pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, penguatan daya saing ekonomi berbasis potensi lokal, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah juga akan mendorong partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk bersama-sama mengimplementasikan program-program strategis yang mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) pada skala lokal.

Lebih lanjut, RPJMD Kabupaten Demak menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Proses penyusunannya yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, DPRD, tokoh masyarakat, kelompok rentan, akademisi hingga dunia usaha, memastikan adanya partisipasi dan transparansi dalam perencanaan pembangunan. Dengan adanya indikator kinerja yang jelas dalam RPJMD, kemajuan pembangunan dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan, serta melakukan koreksi yang diperlukan demi tercapainya tujuan utama, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak melalui pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 2757);
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Nomor 3 tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8 Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
 - 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 12 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - 13 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 - 14 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 - 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
- 22 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 23 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
- 24 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
- 25 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor.....Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
- 26 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun

tingkatan pemerintahan. RPJMD harus mencerminkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih, sehingga penyusunannya melibatkan penjabaran aspirasi tersebut ke dalam rencana pembangunan yang konkret. Proses ini juga melibatkan acuan pada dokumen-dokumen seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi (RPJMD Provinsi). Dengan demikian, RPJMD berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kebijakan nasional dan provinsi dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan di tingkat daerah.

Berdasarkan Gambar 1.1 keterkaitan RPJMD Kabupaten Demak dengan dokumen perencanaan lainnya dijabarkan sebagai berikut:

a. Hubungan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan strategis dengan RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai pedoman pembangunan nasional. Dalam konteks ini, RPJMD Kabupaten Demak mengacu pada prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi lokal, serta perlindungan lingkungan hidup. Penyesuaian program, kegiatan, dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Demak bertujuan untuk memastikan sinergi dengan target nasional, sekaligus menjawab kebutuhan dan potensi daerah. Dengan demikian, RPJMD ini berfungsi sebagai alat implementasi RPJMN di tingkat daerah, mendukung tercapainya visi pembangunan Indonesia yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

b. Hubungan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 disusun selaras dengan RPJMD Jawa Tengah Tahun 2025-2029 untuk memastikan harmoni perencanaan pembangunan antara tingkat kabupaten dan provinsi. Sebagai bagian integral dari Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak mengacu pada prioritas pembangunan provinsi, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan daya saing ekonomi, pengembangan infrastruktur yang merata, dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. RPJMD Kabupaten Demak memetakan program-program strategis yang mendukung pencapaian sasaran RPJMD Jawa Tengah, dengan tetap memperhatikan kebutuhan lokal dan potensi daerah. Melalui hubungan ini, RPJMD Kabupaten Demak berkontribusi dalam mendukung terwujudnya visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang adil, makmur, dan berdaya saing.

c. Hubungan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2045

RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari tahapan implementasi RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2045, yang menjadi pedoman jangka panjang pembangunan daerah. Sebagai dokumen strategis lima tahunan, RPJMD 2025-2029 memuat langkah-langkah awal untuk mewujudkan visi dan misi jangka panjang RPJPD, yaitu pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing. RPJMD ini merinci prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan tujuan strategis dalam RPJPD, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, dan pelestarian lingkungan hidup. Dengan keterkaitan yang erat ini, RPJMD 2025-2029 berfungsi sebagai peta jalan menuju keberhasilan agenda pembangunan jangka panjang Kabupaten Demak, memastikan kesinambungan dan konsistensi arah pembangunan daerah.

d. Hubungan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Demak

RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 memiliki hubungan yang erat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Demak sebagai landasan spasial dalam perencanaan pembangunan daerah. RTRW berperan sebagai acuan untuk penentuan lokasi, pola pemanfaatan ruang, dan pengelolaan wilayah yang mendukung pelaksanaan program-program pembangunan dalam RPJMD. Seluruh program prioritas dalam RPJMD, seperti pengembangan infrastruktur, kawasan ekonomi strategis, dan pengelolaan lingkungan hidup, harus sesuai dengan arahan peruntukan ruang yang ditetapkan dalam RTRW. Hubungan ini memastikan pembangunan yang direncanakan dalam RPJMD berjalan selaras dengan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, dan pengelolaan tata ruang yang optimal, sehingga menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, sosial, dan pelestarian lingkungan di Kabupaten Demak.

e. Hubungan antara RPJMD Kabupaten Demak dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen operasional untuk melaksanakan kebijakan pembangunan daerah. Hubungan ini bersifat hierarkis, di mana Renstra Perangkat Daerah merinci program, kegiatan, dan indikator kinerja yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam RPJMD. Setiap perangkat daerah bertanggung jawab menyusun Renstra yang selaras dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD. Dengan

adanya keterpaduan ini, Renstra Perangkat Daerah menjadi instrumen pelaksanaan pembangunan yang efektif dan terarah, sehingga memastikan harmonisasi antar sektor dalam mencapai target pembangunan Kabupaten Demak secara menyeluruh.

f. Hubungan RPJMD Kabupaten Demak dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 memiliki hubungan erat dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai instrumen untuk memastikan integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan daerah. KLHS memberikan analisis mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta potensi dampak lingkungan dari program dan kegiatan yang direncanakan dalam RPJMD. Melalui KLHS, RPJMD dapat disusun dengan mempertimbangkan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi secara seimbang, sehingga setiap kebijakan dan prioritas pembangunan tidak hanya bertujuan untuk mencapai target pembangunan, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, hubungan ini memastikan bahwa RPJMD Kabupaten Demak mendukung pembangunan yang inklusif dan ramah lingkungan.

g. Hubungan RPJMD dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID)

RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 memiliki hubungan strategis dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) sebagai panduan untuk mengintegrasikan pengembangan IPTEK dalam pembangunan daerah. RIPJPID berperan sebagai dokumen yang menetapkan arah, prioritas, dan strategi pemanfaatan IPTEK untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Program dan kegiatan dalam RPJMD, seperti peningkatan daya saing ekonomi, pelayanan publik berbasis digital, dan pengelolaan sumber daya alam yang inovatif, dirancang selaras dengan arahan RIPJPID untuk memastikan optimalisasi teknologi dalam pembangunan. Hubungan ini memastikan bahwa RPJMD Kabupaten Demak tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas inovasi dan pemanfaatan IPTEK untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

h. Hubungan RPJMD Kabupaten Demak dengan Dokumen perencanaan Sektoral

RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 memiliki hubungan yang kuat dengan dokumen perencanaan sektoral, yang mencakup rencana-rencana strategis pada sektor tertentu seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi. Dokumen perencanaan sektoral menjadi bagian integral dari



pelaksanaan RPJMD, karena berisi program dan kegiatan rinci yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. RPJMD berfungsi sebagai dokumen induk yang menetapkan arah pembangunan secara makro, sementara dokumen sektoral merinci langkah-langkah operasional sesuai dengan kebutuhan spesifik sektor masing-masing. Hubungan ini memastikan adanya sinergi antar sektor dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Demak yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Demak dalam melaksanakan pembangunan selama (5) lima tahun ke depan. Dokumen ini berfungsi untuk merumuskan arah kebijakan, program prioritas, serta target pembangunan yang sesuai dengan visi dan misi kepala daerah yang telah ditetapkan. Tujuan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. RPJMD dirancang untuk menerjemahkan visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam strategi, kebijakan, dan langkah-langkah konkret pembangunan;
2. RPJMD bertujuan untuk memastikan keterpaduan dan sinergi antara perencanaan di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional, seperti RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah;
3. Dengan arah kebijakan yang jelas dan terukur, RPJMD bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam alokasi sumber daya serta pelaksanaan program pembangunan;
4. RPJMD memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya berdampak positif pada jangka pendek, tetapi juga mendukung keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan di masa mendatang;
5. Dokumen ini memberikan panduan untuk menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan untuk memantau, mengevaluasi, dan mengukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah;
6. Penyusunan RPJMD bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan, potensi, dan aspirasi masyarakat Kabupaten Demak, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan manfaatnya secara merata.

1.5 Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 disusun dengan



sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penyusunan RPJMD, landasan hukum, hubungan/keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan dokumen RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bagian ini menyajikan gambaran umum mengenai kondisi Kabupaten Demak secara menyeluruh yang menjadi dasar dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Beberapa aspek yang dijabarkan antara lain yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum. Selain itu, dalam bab ini juga memuat gambaran keuangan daerah, permasalahan dan isu strategis daerah.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan visi dan misi Kepala Daerah yang dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran yang dirumuskan untuk mendukung pencapaian visi dan misi. Selain itu, dalam bab ini dijabarkan strategi, arah kebijakan, serta program prioritas pembangunan daerah.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian ini merinci program-program perangkat daerah yang dilengkapi dengan indikator kinerja beserta target dan alokasi anggaran indikatif. Selain itu, bab ini juga memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD), sebagai alat evaluasi terhadap capaian pembangunan pemerintahan secara menyeluruh.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi arahan transisi untuk memastikan keberlanjutan pembangunan daerah. Selain itu, pedoman implementasi RPJMD 2025-2029 dijelaskan untuk menjaga keselarasan pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan.



BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki cita-cita luhur yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang adil dan berkualitas melalui pelaksanaan pembangunan. Beranjak dari hal tersebut, berbagai upaya dilaksanakan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan dalam pemanfaatan berbagai potensi sumber daya Kabupaten Demak. Sesuai Undang-Undang Dasar tahun 1945, keseluruhan potensi sumber daya tersebut akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat seperti yang dibunyikan dalam Pasal 33 Ayat 3 “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Demak terus berupaya untuk memberdayakan setiap elemen pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan sebuah proses yang kompleks di mana bertujuan untuk memedomani serta mengelola pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah dalam berbagai aspek. Esensi perencanaan pembangunan suatu daerah sendiri meliputi berbagai aspek yang penting guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek. Sehubungan dengan hal tersebut, perencanaan memiliki kekuatan dalam mewujudkan tujuan pembangunan suatu daerah dengan berpijak pada analisis hasil kebijakan pembangunan yang perlu dipahami dan dikaji secara mendalam sebagai gambaran kondisi daerah. Hal tersebut kemudian menjadi sebuah dasar bagi penetapan rumusan kebijakan pembangunan lima tahunan sehingga solusi permasalahan pembangunan tepat sasaran dalam menyejahterakan masyarakat.

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

A. Kondisi Geografi dan Wilayah Administrasi

Kabupaten Demak merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak pada koordinat 6°43’26”-7°09’43” LS dan 110°27’58”-110°48’47” BT. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031, Kabupaten Demak memiliki luas

wilayah 99.532 ha. Batas-batas administrasi Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

- sebelah Utara: Kabupaten Jepara dan Laut Jawa;
- sebelah Timur: Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan;
- sebelah Selatan: Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang;
- sebelah Barat: Kota Semarang.

Wilayah administratif Kabupaten Demak terdiri dari 14 kecamatan, 6 kelurahan, 243 desa, terbagi menjadi 786 dusun, 1.324 Rukun Warga (RW) dan 6.942 Rukun Tetangga (RT). Secara rinci, luas wilayah masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

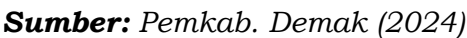
Tabel II.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Demak

No.	Kecamatan	Luas Kecamatan (km ²)	Jumlah Kelurahan/Desa	Persentase Luas (%)
1.	Mranggen	77,97	19	7,82
2.	Karangawen	82,87	12	8,31
3.	Guntur	63,06	20	6,33
4.	Sayung	84,39	20	8,46
5.	Karangtengah	58,00	17	5,82
6.	Bonang	87,26	21	8,75
7.	Demak	65,65	19	6,59
8.	Wonosalam	62,87	21	6,31
9.	Dempet	64,23	16	6,44
10.	Kebonagung	44,40	14	4,45
11.	Gajah	51,83	18	5,20
12.	Karanganyar	71,53	17	7,17
13.	Mijen	53,99	15	5,42
14.	Wedung	128,90	20	12,93
Jumlah		996,94	249	100,00

Sumber: Bapperida Kabupaten Demak (2025)

Kecamatan Wedung merupakan kecamatan terluas, yaitu dengan wilayah seluas 128,90 km² atau 12,93% dari luasan Kabupaten Demak. Kecamatan yang memiliki luasan wilayah terkecil adalah Kecamatan Kebonagung yakni 44,40 km² atau sebesar 4,45% dari luasan Kabupaten Demak. Semua wilayah kecamatan di Kabupaten Demak mudah dijangkau dan memiliki akses transportasi umum, terutama pusat-pusat perkembangan perekonomian daerah. Wilayah administrasi Kabupaten Demak dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar II.1



B. Topografi

Wilayah Kabupaten Demak terdiri atas dataran rendah, kawasan pantai/pesisir serta perbukitan, dengan rata-rata ketinggian permukaan antara 0-100 meter di atas permukaan air laut (mdpl). Berdasarkan letak ketinggian dari permukaan air laut, wilayah Kabupaten Demak dibatasi atas 3 region, sebagai berikut:

- a. Region A: 0-3 meter, meliputi sebagian besar Kecamatan Bonang, Demak, Karangtengah, Mijen, Sayung, dan Wedung;
- b. Region B: 3-10 meter, meliputi sebagian besar di tiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Demak; 10-25 meter, meliputi sebagian besar Kecamatan Dempet, Karangawen, dan Mranggen;
5-100 meter, meliputi sebagian besar Kec. Karangawen dan Mranggen;
- c. Region C: lebih dari 100 meter, meliputi sebagian kecil Kecamatan Karangawen, dan Mranggen.

Kemiringan lahan di Kabupaten Demak sebagian besar relatif datar, yaitu berada pada lahan dengan kemiringan 0-8%. Sedangkan pada bagian selatan Kabupaten Demak memiliki kemiringan lahan yang sangat bervariasi terutama di wilayah Desa Banyumeneng dan Sumberejo. Kedua desa ini memiliki lahan dengan kemiringan 0-2%, 2-8%, 8-15%, 15-40%, dan lebih besar dari 40%.

C. Klimatologi

Kabupaten Demak mengalami musim hujan pada bulan Desember sampai dengan Maret. Pada bulan-bulan tersebut, angin bertiup dari Asia dan Samudra

Pasifik. Pada bulan Juni sampai dengan September, angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga Kabupaten Demak mengalami musim kemarau. Di antara kedua musim tersebut, terdapat masa peralihan yaitu pada bulan Oktober-November dan April-Mei.

Tabel II.2
Jumlah Hari Hujan dan Rata-Rata Curah Hujan
di Kabupaten Demak Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Hari Hujan (hari)	Rata-rata Curah Hujan (mm)
2020	126	2.404
2021	122	2.567
2022	182	2.663
2023	120	1.904
2024	148	2.404

Sumber: BPS, diolah (2025)

Berdasarkan data tersebut di atas, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan jumlah hari hujan sebanyak 182 hari dan rata-rata curah hujan sebesar 2.663 mm.

Tabel II.3
Unsur Iklim menurut Bulan di Kabupaten Demak Tahun 2024

Bulan	Rata-rata			
	Suhu (°C)	Kelembaban (%)	Kecepatan Angin (knot)	Tekanan Udara (mbar)
Januari	28,3	84	3	1.010,0
Februari	28,2	83	4	1.011,0
Maret	28,5	83	4	1.009,8
April	29,2	79	4	1.008,5
Mei	30,0	73	4	1.009,1
Juni	28,9	76	4	1.010,1
Juli	28,2	69	12	1.012,5
Agustus	28,6	68	15	1.011,2
September	29,5	67	16	1.010,1
Oktober	29,9	71	13	1.010,1
November	29,2	75	14	1.008,7
Desember	28,2	82	13	1.007,8

Sumber: BPS Kabupaten Demak Dalam Angka (2025)

Suhu udara di Kabupaten Demak tahun 2024 berkisar antara 28,2°C sampai dengan 30,0°C. Sedangkan untuk kelembaban udara bervariasi dari 67% sampai dengan 84% selama tahun 2024 ini. Adapun kecepatan angin paling tinggi di bulan Oktober sebesar 16 knot dengan tekanan udara paling tinggi di bulan Agustus yang mencapai 1.012,5 mbar.

D. Geologi

Secara geologis, Kabupaten Demak terbagi beberapa jenis tanah, di antaranya: 1) Alluvial hidromorf, terdapat di sepanjang pantai; 2) Regosol, terdapat di sebagian besar Kecamatan Karangawen dan Mranggen; 3) Gromosol kelabu tua, terdapat di Kecamatan Bonang, Wedung, Kebonagung, Mijen, Karanganyar, Gajah, Demak, Wonosalam, Dempet, dan Sayung, dan 4) Mediteran, terdapat di sebagian besar Kecamatan Karangawen dan Kecamatan Mranggen.

Sebagian besar kondisi tanah di Kabupaten Demak pada musim kemarau menjadi keras dan retak-retak, sehingga tidak dapat ditanami secara intensif untuk pertanian. Ketika musim hujan, tanah bersifat lekat, volumenya membesar, serta lembap sehingga sulit ditanami dan memerlukan sistem drainase yang memadai. Pada beberapa daerah tertentu kondisi air tanah yang asin dapat mempengaruhi usaha pertanian. Gejala-gejala yang disebabkan oleh air tanah yang asin terutama terjadi pada wilayah dekat pantai dan sungai/saluran pembuangan yang pada musim kemarau dimasuki air laut.

Struktur geologi Kabupaten Demak terdiri dari: 1) Struktur Aluvium terdapat hampir semua Kecamatan di Kabupaten Demak yaitu di Kecamatan Mijen, Bonang, Demak, Gajah, Karanganyar, Wonosalam, Karangtengah, Dempet, Sayung, Guntur, Mranggen, dan Karangawen; 2) Miosen, fasies sedimen terdapat di sebagian Kecamatan Karangawen yaitu di Desa Jragung dan sebagian di Kecamatan Mranggen; 3) Pliosen, fasies sedimen terdapat di sebagian kecamatan Karangawen yaitu di Desa Jragung dan sebagian di Kecamatan Mranggen; 4) Plistosen, fasies gunung api terdapat di sebagian Kecamatan Karangawen (Desa Margohayu dan Wonosekar) dan terdapat di Kecamatan Mranggen (Desa Sumberejo); dan 5) Pliosen, fasies batu gamping yaitu hanya terdapat di Kecamatan Mranggen.

E. Hidrologi

Sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Demak terdiri atas sumber air prasarana sumber daya air. Sumber air meliputi air permukaan (sungai, embung, dan bendungan) dan air tanah pada cekungan air tanah. Kabupaten Demak dilewati 12 sungai yaitu Sungai Serang, Kali Wulan, Kali Kenceng, Kali Loben, Kali Jajar, Kali Tuntang, Kali Jragung, Kali Setu, Kali Dolog, Kali Daleman, Kali Mondoliko, dan Kali Babon. Cekungan air tanah yang terdapat di Kabupaten Demak yaitu cekungan air tanah Kudus dan cekungan air tanah Semarang-Demak. Namun demikian, rata-rata kualitas air tanah dangkal (sumur gali) dan air tanah dalam (sumur bor) di Demak kurang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai air minum. Hal tersebut akibat air tanah di Demak banyak mengandung

unsur besi dan pada musim kemarau kapasitasnya tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Prasarana sumber daya air terdiri atas sistem jaringan, sistem pengendalian banjir dan rob, jaringan untuk air bersih dan jaringan air bersih ke kelompok pengguna. Dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian, Kabupaten Demak pada tahun 2021 mulai mengembangkan Daerah Irigasi Suka Baru yang digunakan untuk mengairi areal persawahan Kecamatan Bonang. Hingga tahun 2024, Kabupaten Demak memiliki sistem jaringan irigasi yang berada di 13 daerah irigasi (DI) yaitu:

1. Daerah Irigasi Sedadi;
2. Daerah Irigasi Glapan Timur;
3. Daerah Irigasi Glapan Barat;
4. Daerah Irigasi Klambu Kiri;
5. Daerah Irigasi Jragung;
6. Daerah Irigasi Guntur;
7. Daerah Irigasi Pelayaran Sayung Batu;
8. Daerah Irigasi Penggaron;
9. Daerah Irigasi Sumberejo;
10. Daerah Irigasi Polder Batu;
11. Daerah Irigasi Gablok;
12. Daerah Irigasi Pelayaran Buyaran;
13. Daerah Irigasi Dolok.

F. Penggunaan Lahan

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pemerintah Kabupaten Demak tahun 2011-2031 menyebutkan bahwa berdasarkan kajian citra satelit, diketahui luas wilayah Kabupaten Demak yaitu 99.532 ha. Luas ini sedikit berbeda dari penghitungan sebelumnya, yaitu 89.743 ha. Sebagian besar lahan di Kabupaten Demak merupakan lahan sawah (58,85%). Lahan pertanian bukan sawah yang terdiri dari tegal/kebun, tambak dan hutan rakyat menempati 22,45% luas keseluruhan, sedangkan sisanya (18,70%) digunakan untuk perumahan-pemukiman, industri, perdagangan dan perkantoran serta prasarana umum lainnya.

Penggunaan lahan sawah mendominasi di Kabupaten Demak, karakteristik geografis berada di hilir DAS menyebabkan mempunyai jenis ekoregion dataran alluvial. Dataran alluvial memiliki tanah subur yang berasal dari endapan mineral dari tanah yang terbawa oleh aliran sungai. Selain itu, tanah alluvial mudah untuk penyerapan dan mengalirkan air. Aspek kesuburan tanah

dan ketersediaan air melimpah menyebabkan sesuai untuk tanaman semusim seperti padi. Hingga sampai saat ini, Kabupaten Demak menjadi salah satu penyangga pangan secara regional tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun nasional. Dengan demikian pemanfaatan lahan diperlukan dalam rangka peningkatan produktivitas dan produksi tanaman, khususnya tanaman padi.

Tabel II.4
Luas Lahan berdasarkan Penggunaan Lahan
Kabupaten Demak Tahun 2020-2024

Tahun	Penggunaan Lahan			Total Luas Lahan (Ha)
	Sawah	Pertanian Bukan Sawah	Bukan Pertanian	
2020	53.597	18.938	17.208	89.743
2021	52.761	20.759	16.223	89.743
2022	52.681	20.260	16.801	89.743
2023	52.813	20.149	16.782	89.743
2024	53.034	19.908	16.800	89.743

Sumber: Dinpertan Pangan Kabupaten Demak (2024)

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Pengembangan wilayah di Kabupaten Demak berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Demak Tahun 2011-2031. Perda Nomor 1 Tahun 2020 merupakan hasil peninjauan RTRW yang telah dilakukan sejak tahun 2016 dan telah ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2020 serta diundangkan pada tanggal 2 Maret 2020.

Dari hasil peninjauan RTRW, basis ruang wilayah di Kabupaten Demak mengalami pergeseran dari semula *berbasis sektor pertanian dan perikanan yang unggul didukung sektor perdagangan dan jasa, industri, usaha mikro kecil menengah, dan pariwisata* menjadi *berbasis sektor pertanian dan industri yang unggul didukung sektor perdagangan, jasa dan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan*. Perbedaan besar terletak pada sektor industri yang semula menjadi sektor pendukung menjadi sektor utama, serta penambahan klausul *berwawasan lingkungan yang berkelanjutan* sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Demak dalam mendukung capaian *Sustainable Development Goals (SDGs) 2030*.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011 – 2031 berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Demak meliputi:

1. pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif;
2. pengembangan komoditas pertanian yang prospektif;
3. pengembangan kawasan pesisir;
4. pengembangan pusat pelayanan;
5. pengembangan prasarana wilayah pada kawasan perkotaan dan perdesaan;
6. peningkatan pengelolaan kawasan lindung;
7. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
8. pengembangan kawasan industri yang mempertimbangkan efektivitas ruang; dan
9. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.

Rencana struktur ruang terdiri atas rencana sistem perkotaan dan rencana sistem jaringan prasarana. Kabupaten Demak berada di kawasan Kedungsepur (Kendal – Demak – Ungaran – Semarang - Salatiga - Purwodadi) dengan Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Demak dan Kecamatan Mranggen sebagai kawasan yang melayani kegiatan utamanya. Jaringan prasarana wilayah terdiri dari jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, sumber daya air dan jaringan prasarana lainnya.

Berdasarkan rencana pola ruang, Kabupaten Demak dibagi menjadi dua, yaitu kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budi daya. Dalam tinjauan RTRW, kawasan resapan air di Kabupaten Demak berada di Kecamatan Karangawen dan Mranggen dengan luas kurang lebih 322 ha. Kawasan perlindungan setempat terdiri atas sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan saluran irigasi sempadan embung dan ruang terbuka hijau yang tersebar di wilayah Kabupaten Demak dengan luas kurang lebih 1.776 ha.

Kawasan ekosistem mangrove dan kawasan lindung geologi disebutkan lebih spesifik. Kabupaten Demak saat ini memiliki 701 ha kawasan ekosistem mangrove yang terbentang di sepanjang pesisir pantai Kecamatan Bonang, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Sayung dan Kecamatan Wedung. Ekosistem mangrove perlu dipertahankan bahkan dikembangkan karena berperan besar dalam mencegah erosi dan abrasi pantai, salah satu ancaman lingkungan yang dihadapi Kabupaten Demak selama bertahun-tahun. Selain itu, ekosistem mangrove berfungsi sebagai filter bahan pencemar, menjadi habitat bagi spesies lain dan berpotensi menjadi kawasan wisata daerah.

Kawasan peruntukan budi daya dibagi ke dalam kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman dan kawasan pertahanan dan keamanan. Kawasan hutan produksi di Kabupaten Demak berada di Kecamatan Karangawen dan Mranggen dengan luas kurang lebih



3.278 Ha, di mana terdiri dari kawasan hutan produksi terbatas seluas 568 Ha yang berada di Kecamatan Karangawen dan kawasan hutan produksi tetap seluas 2.710 hektar di Kecamatan Karangawen dan Mranggen. Kawasan pertanian terdiri atas kawasan tanaman pangan dan kawasan hortikultura. Kawasan tanaman pangan Kabupaten Demak dengan luas kurang lebih 56.763 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan dan kawasan lahan pangan berkelanjutan kurang lebih 56.530 ha yang termasuk dalam kawasan tanaman pangan serta kawasan hortikultura dengan luas kurang lebih 1.556 Ha. Kawasan perikanan di Kabupaten Demak terdiri atas perikanan tangkap dan perikanan budi daya di mana budidaya tambak memiliki luasan total kurang lebih 6.062 Ha yang tersebar di Kecamatan Sayung, Karangtengah, Bonang, Mijen dan Wedung. Sedangkan pada perikanan tangkap meliputi fasilitas perikanan tangkap dan pengembangan pengolahan perikanan. Kawasan pertambangan dan energi di Kabupaten Demak berupa kawasan pertambangan minyak dan gas bumi yang termasuk Wilayah Kerja Blok Blora.

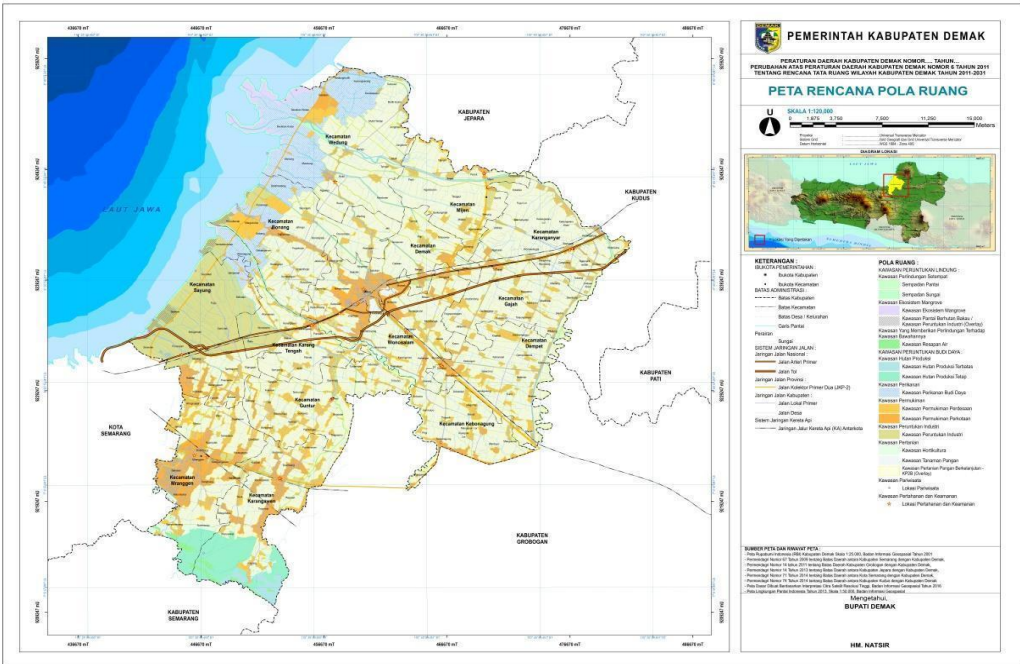
Kawasan peruntukan industri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 64 Perda RTRW Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 tersebar di sebagian besar wilayah Kabupaten Demak dengan luas kurang lebih 7.646 Ha. Alokasi kawasan peruntukan industri terbesar pada Kecamatan Sayung dan Karangtengah karena merupakan prioritas utama dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.

Kawasan pariwisata di Kabupaten Demak masih mengandalkan wisata religi Masjid Agung Demak dan Makam Sunan Kalijaga serta Makam Syekh Mudzakir yang berada di Pantai Morosari yang merupakan Kawasan Strategis Provinsi di dukung dengan wisata alam seperti Pantai Morosari maupun Pantai Tambakbulusan. Beberapa kawasan pariwisata lain yang juga memberikan kontribusi pembangunan seperti Pantai Morodemak, Pantai Surodadi, Hutan Wisata Wonosekar, Waduk Bengkah, dan Pantai Onggojoyo yang merupakan pariwisata alam. Dari sisi pariwisata budaya juga ada Museum Masjid Agung, Tradisi Grebeg Besar Demak dan Tradisi Sedekah Laut. Sedangkan pada pariwisata buatan, terdapat Bendung Gerak Kali Jajar, Bendung Karet Kali Jajar, Bendung Karet Kali Kumpulan, Taman Ria Kota Demak, Agrowisata Kebonbatur dan Agrowisata Jambu Lele.

Kawasan permukiman terdiri atas kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan dengan luas kurang lebih 19.055 Ha. Kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Demak terdiri atas Kantor Tentara Nasional Indonesia dan Kantor Kepolisian Republik Indonesia di seluruh kecamatan.

Gambar II.2

Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Demak 2011-2031



Sumber: Pemerintah Kabupaten Demak (2022)

Pada rencana struktur ruang wilayah pembangunan Kabupaten Demak terdiri dari rencana sistem perkotaan dan rencana sistem jaringan prasarana. Rencana sistem perkotaan terdiri dari struktur perkotaan dan sistem wilayah. Pada potensi pengembangan wilayah difokuskan pada struktur perkotaan di mana dapat dirincikan sebagai berikut:

1. PKN (Pusat Kegiatan Nasional) merupakan bagian dari kawasan perkotaan Kendal – Demak – Ungaran –Salatiga – Semarang – Purwodadi (Kedungsepur) berada di Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Demak dan Kecamatan Mranggen.
2. PKL (Pusat Kegiatan Lokal) meliputi kawasan perkotaan Demak dan kawasan perkotaan Mranggen. Kawasan perkotaan Sayung dan kawasan perkotaan Wedung didorong untuk berperan sebagai PKL.
3. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) meliputi kawasan perkotaan Gajah, Dempet, Guntur, Sayung, Karangtengah, Bonang, Wedung, Karangawen, Wonosalam, Karanganyar, Mijen, dan Kebonagung.
4. PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) meliputi:
 - a. Desa Tambirejo berada di Kecamatan Gajah,
 - b. Desa Dempet dan Desa Sidomulyo berada di Kecamatan Dempet,
 - c. Desa Pamongan berada di Kecamatan Guntur,
 - d. Desa Gemulak dan Desa Bulusari berada di Kecamatan Sayung,
 - e. Desa Pulosari dan Desa Karangsari berada di Kecamatan Karangtengah,
 - f. Desa Gebang dan Desa Bonangrejo berada di Kecamatan Bonang,
 - g. Desa Tlogorejo berada di Kecamatan Karangawen,

- h. Desa Kendaldoyong dan Desa Trengguli berada di Kecamatan Wonosalam,
- i. Desa Cangkring berada di Kecamatan Karanganyar,
- j. Desa Bakung berada di Kecamatan Mijen,
- k. Desa Werdoyo berada di Kecamatan Kebonagung, dan
- l. Desa Buko dan Desa Bungo berada di Kecamatan Wedung.

Dari sudut kepentingan ekonomi, maka sebagai wilayah yang masuk ke dalam kawasan strategis nasional Kedungsepur, Kabupaten Demak harus memperhatikan pembangunan pada lokasi kawasan sepanjang koridor jalan arteri primer yang melewati Kecamatan Sayung – Karangtengah – Demak – Wonosalam – Gajah – Karanganyar, kawasan industri terpadu Sayung, kawasan wisata pantai Surodadi di Kecamatan Sayung serta kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak di Kecamatan Bonang. Dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi kawasan rawan abrasi dan rob pantai di Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah dan Kecamatan Bonang dengan kegiatan berupa penanganan masalah rob dan abrasi, serta kawasan rawan sedimentasi dan tanah timbul di Kecamatan Wedung dengan kegiatan berupa identifikasi tanah Negara dan arahan pengelolaannya.

Dalam Perpres 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang; dan Perpres 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; Kabupaten Demak direncanakan mendapat proyek pembangunan Jalan Tol Tanggul Laut Semarang – Demak, peningkatan terminal tipe A, reaktivasi jalur KA Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak.

Gambar II.3
Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak



Sumber: Bapperida Kabupaten Demak, 2021



Selain itu, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru akan dilaksanakan setelah penyelesaian *exit* tol (Sayung dan Wonosalam) dan ditindaklanjuti pula dengan peningkatan konektivitas jaringan jalan. Adapun dalam pengembangan pariwisata, maka dilakukan pembangunan berbagai sarana prasarana pendukung seperti pembangunan Terminal Tipe A dan Reaktivasi Jalur Rel KA Semarang - Demak - Kudus- Pati -Rembang yang merupakan kegiatan nasional sesuai Perpres Nomor 79 Tahun 2019.

Rencana sistem jaringan prasarana meliputi sistem jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya. Sistem jaringan transportasi terdiri dari sistem jaringan transportasi darat, jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, serta jaringan transportasi laut. Sistem jaringan energi terdiri dari jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi serta ketenagalistrikan.

Jaringan telekomunikasi terbagi menjadi dua yakni jaringan tetap yang berupa pengembangan sistem prasarana jaringan kabel dan pembangunan rumah kabel berada di seluruh Kecamatan. Sistem jaringan prasarana telekomunikasi jaringan kabel sampai dengan tahun 2031 direncanakan sudah melayani seluruh ibukota Kecamatan. Sedangkan jaringan bergerak yang dimaksud adalah jaringan bergerak seluler berupa pembangunan menara telekomunikasi sistem nirkabel di seluruh wilayah.

Adapun sistem jaringan sumber daya air dibagi menjadi dua yakni sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten dan sistem jaringan sumber daya air kabupaten. Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten difokuskan pada peningkatan pengelolaan Wilayah Sungai Strategis Nasional Jratun Seluna. Sedangkan sistem jaringan sumber daya air kabupaten meliputi DAS Babon, DAS Tuntang, DAS Jragung, DAS Serang, DAS Dolok, DAS Kaliombo, dan DAS Setu.

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

A. Kapasitas Daya Dukung Lingkungan Hidup

Dalam melihat kondisi lingkungan hidup, diperlukan penjelasan pada muatan dasar Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang salah satunya meliputi kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup meliputi daya dukung pangan, air, dan lahan. Daya dukung lahan diuraikan dalam bentuk daya dukung terbangun dan fungsi lindung. Kapasitas daya tampung lingkungan hidup meliputi daya tampung lahan yang dituangkan dalam bentuk kemampuan lahan dan daya tampung air yang dituangkan dalam bentuk sebaran kualitas air. Berikut detail daya dukung dan daya tampung pada kondisi lingkungan hidup Kabupaten Demak.

a. **Daya Dukung Air Permukaan**

Daya dukung air dianalisis berdasarkan perhitungan kebutuhan dan ketersediaan air. Apabila ketersediaan air lebih tinggi dibandingkan kebutuhan maka masih belum terlampaui. Sebaliknya apabila kebutuhan lebih tinggi dibandingkan ketersediaan maka Terlampaui. Daya dukung air dibagi menjadi dua perhitungan yaitu ketersediaan dan kebutuhan air.

Ketersediaan Air diasumsikan dengan data jasa penyedia air dan potensi air Daerah Aliran Sungai maupun sumber air permukaan. Semakin tinggi nilai koefisien jasa lingkungan penyedia air dan potensi DAS maka semakin tinggi. Hasil perhitungan dari menunjukkan ketersediaan air di Kabupaten Demak berdasarkan metode grid sebesar 706.419.709 m3 per tahun. Kecamatan Wedung mempunyai ketersediaan air paling tinggi yaitu 76 juta m3 sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Kebonagung, yaitu hanya 35 juta m3. Kecamatan Wedung mempunyai luasan jasa penyedia air kelas sangat tinggi yaitu 6.276 hektar. Angka tersebut tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya sehingga tingkat ketersediaan airnya juga tinggi.

Daya dukung air dianalisis berdasarkan perhitungan kebutuhan dan ketersediaan air. Apabila ketersediaan air lebih tinggi dibandingkan kebutuhan maka masih belum terlampaui. Sebaliknya apabila kebutuhan lebih tinggi dibandingkan ketersediaan maka Terlampaui. Daya dukung air dibagi menjadi dua perhitungan yaitu ketersediaan dan kebutuhan air. Ketersediaan Air diasumsikan dengan data jasa penyedia air dan potensi air Daerah Aliran Sungai maupun sumber air permukaan. Semakin tinggi nilai koefisien jasa lingkungan penyedia air dan potensi DAS maka semakin tinggi. Hasil perhitungan dari menunjukkan ketersediaan air di Kabupaten Demak berdasarkan metode grid sebesar 706.419.709 m3 per tahun. Kecamatan Wedung mempunyai ketersediaan air paling tinggi yaitu 76 juta m3 sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Kebonagung, yaitu hanya 35 juta m3. Kecamatan Wedung mempunyai luasan jasa penyedia air kelas sangat tinggi yaitu 6.276 hektar. Angka tersebut tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya sehingga tingkat ketersediaan airnya juga tinggi.

Tabel II.5
Luas Daya Dukung Air Berbasis Grid

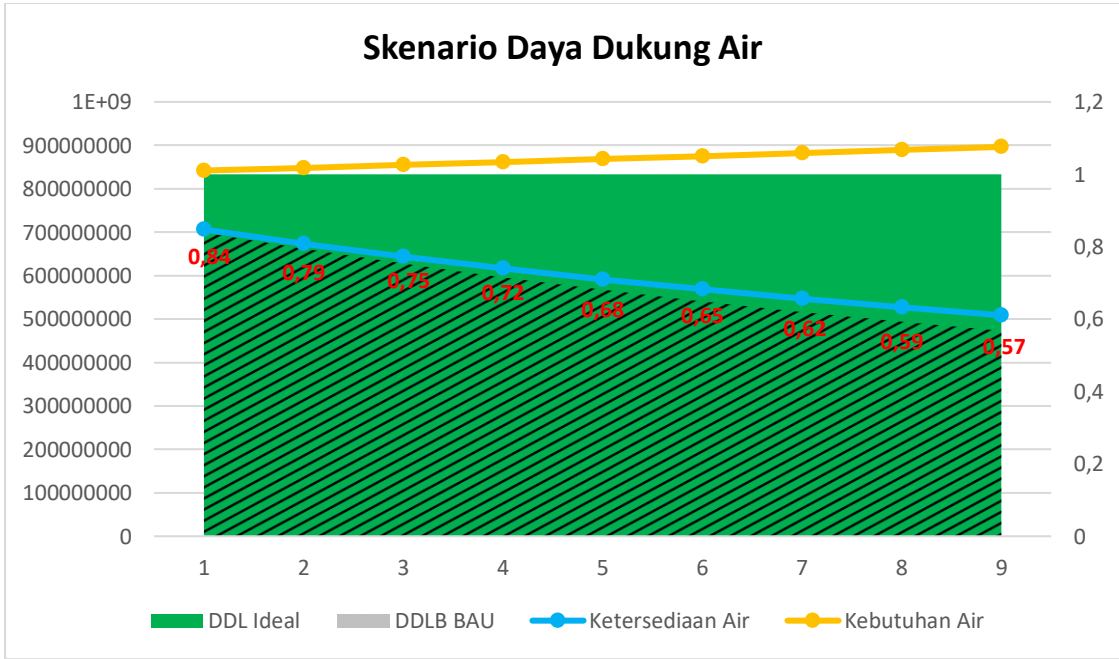
Kecamatan	Belum Terlampaui	%	Terlampaui	%	Total
Bonang	3.334,86	38,31	5.371,17	61,69	8.706,03
Demak	1.448,71	22,98	4.856,40	77,02	6.305,11
Dempet	1.137,26	17,79	5.256,75	82,21	6.394,01
Gajah	869,48	16,18	4.503,72	83,82	5.373,20
Guntur	1.533,78	23,86	4.894,35	76,14	6.428,13
Karang Tengah	1.931,34	34,22	3.712,55	65,78	5.643,88

Kecamatan	Belum Terlampaui	%	Terlampaui	%	Total
Karanganyar	855,01	12,24	6.132,47	87,76	6.987,48
Karangawen	4.267,93	52,24	3.902,67	47,76	8.170,60
Kebonagung	910,26	20,47	3.535,91	79,53	4.446,17
Mijen	727,99	13,24	4.771,91	79,53	5.499,90
Mranggen	3.359,29	43,29	4.400,20	56,71	7.759,49
Sayung	6.242,68	72,62	2.353,6	27,38	8.596,64
Wedung	3.457,48	26,71	9.484,82	73,29	12.942,30
Wonosalam	1.422,34	22,65	4.857,08	77,35	6.279,42
Total	31.498,40	31,65	68.033,95	68,35	99.532,35

Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Demak, 2023

Perhitungan daya dukung air dipengaruhi beberapa faktor di antaranya yaitu jumlah penduduk dan kebutuhan air. Berdasarkan skenario BAU daya dukung air Kabupaten Demak Tahun 2023 hingga tahun 2031, dapat diketahui bahwa daya dukung air Kabupaten Demak mengalami penurunan dan berada di bawah kondisi ideal daya dukung air. Kondisi ideal daya dukung air di suatu wilayah berada pada minimal 1. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh hasil bahwa pada tahun 2023 daya dukung air berada pada angka 0,84. Berdasarkan hasil proyeksi, pada tahun 2031 daya dukung air Kabupaten Demak menjadi 0,57.

Gambar II.4
Skenario Daya Dukung Air Tahun 2023-2031



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Demak, 2024

Kondisi tersebut dikarenakan meningkatnya angka kebutuhan air Kabupaten Demak, sedangkan ketersediaan air di wilayah Kabupaten Demak cenderung mengalami penurunan. Kondisi daya dukung air terus mengalami penurunan dalam kurun waktu 9 tahun, dengan demikian diperlukan upaya atau strategi untuk menghadapi hal tersebut di antaranya yaitu:

- Peningkatan kualitas air sungai agar layak dimanfaatkan sebagai sumber air baku dengan mengurangi beban cemar pada air dari kegiatan industri, rumah tangga, dan pertanian;
- Meningkatkan penangkapan air melalui pembangunan embung dan waduk
- Penerapan sistem produksi bersih pada kegiatan industri agar dapat menghemat penggunaan air;
- Penerapan insentif bagi kegiatan produksi baik pertanian maupun industri yang dapat menekan atau menghemat penggunaan air.

Tabel II.6
Skenario Daya Dukung Air Tahun 2023-2031

Daya Dukung Air	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DDL Ideal	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DDLBAU	0.84	0.79	0.75	0.72	0.68	0.65	0.62	0.59	0.57
Ketersediaan Air	706419 709.8	673704 396.9	643885 149.4	616593 713.3	591521 730.3	568409 036.5	547034 600.7	527209 433.5	508770 984.1
Kebutuhan Air	842070 102.5	847959 912.7	854715 870	861525 654.2	868389 693.9	875308 421.7	882282 273	889311 687.1	896397 106.8

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Demak, 2024

b. Daya Dukung Pangan

Komponen perhitungan daya dukung terdiri dari dua yaitu kebutuhan (*demand*) dan ketersediaan (*supply*). Kebutuhan dicerminkan oleh jumlah penduduk di suatu wilayah sedangkan produksi dan luas lahan pertanian menggambarkan ketersediaan. Rumus yang digunakan merujuk pada PermenLH nomor 17 tahun 2009 tentang penentuan daya dukung untuk penataan ruang. Rumus daya dukung pangan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan lahan.

Hasil perhitungan menunjukkan hampir semua kecamatan di Kabupaten Demak masih memiliki daya dukung untuk pangan. Hanya terdapat dua kecamatan yang sudah terlampaui yaitu Mranggen dan Sayung. Ketersediaan lahan pertanian dan jumlah penduduk yang masif menjadi salah satu alasan daya dukungnya sesudah terlampaui. Luas panen dua kecamatan tersebut paling rendah dibandingkan kecamatan lainnya di Kabupaten Demak. Luas panen di Kecamatan Sayung hanya 1.039 hektar sedangkan Mranggen 2.949 hektar, padahal kecamatan lainnya di atas 5.000 hektar. Selain itu jumlah penduduk di dua kecamatan tersebut relatif tinggi di Kabupaten Demak. Kecamatan Mranggen memiliki jumlah penduduk 177.837 jiwa, terbanyak se-kabupaten. Sedangkan Kecamatan Sayung sebanyak 106.503, tertinggi ke 4. Hal ini ada ketidakseimbangan antara kebutuhan pangan semakin naik, sedangkan lahan pertanian bertambah sempit.

Fenomena alih fungsi lahan perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Demak. Alih fungsi yang tidak terkontrol dapat mengurangi lahan sawah produktif di masa yang akan datang. Pengurangan lahan akan berdampak pada kemampuan mendukung memenuhi kebutuhan beras masyarakat. Padahal peran Demak sebagai wilayah penyuplai pangan cukup penting di tingkat regional.

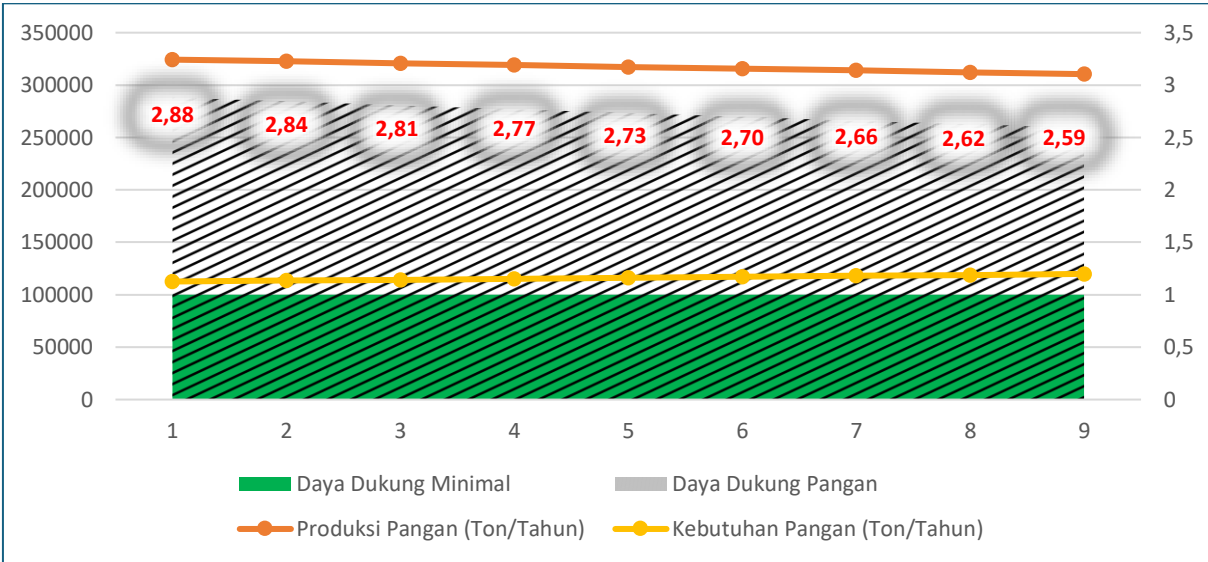
Tabel II.7
Daya Dukung Pangan Kabupaten Demak

Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Layak	Kebutuhan Lahan (Ha)	Selisih	Status
Demak	8.295	55,02	6632.89	111,576	113,48	1,909	6,386	Belum Terlampaui
Bonang	9.322	56,682	6080.49	107,915	113,48	2,014	7,308	Belum Terlampaui
Wonosalam	7.525	48,087	6390.31	86,638	113,48	1,539	5,986	Belum Terlampaui
Dempet	8.248	55,466	6724.76	60,921	113,48	1,028	7,22	Belum Terlampaui
Kebonagung	6.971	46,78	6710.64	41,955	113,48	709	6,262	Belum Terlampaui
Karangtengah	3.968	22,525	5676.58	70,154	113,48	1,402	2,566	Belum Terlampaui
Guntur	5.77	34,701	6014.06	88,228	113,48	1,665	4,105	Belum Terlampaui
Sayung	1.039	6,16	5928.70	106,503	113,48	2,039	1000	Terlampaui
Mranggen	2.949	18,948	6425.10	177,837	113,48	3,141	192	Terlampaui
Karangawen	5.285	33,683	6373.24	96,198	113,48	1,713	3,572	Belum Terlampaui
Mijen	6.894	44,086	6394.88	59,395	113,48	1,054	5,84	Belum Terlampaui
Wedung	10.585	67,209	6349.47	84,073	113,48	1,503	9,082	Belum Terlampaui
Gajah	8.782	57,676	6567.49	53,101	113,48	918	7,864	Belum Terlampaui
Karanganyar	10.224	67,924	6643.57	78,723	113,48	1,345	8,879	Belum Terlampaui

Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Demak, 2023

Perhitungan daya dukung pangan dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya angka produksi padi, angka konsumsi beras, dan jumlah penduduk di suatu wilayah. Berdasarkan perhitungan daya dukung pangan, dapat diketahui bahwa daya dukung pangan di Kabupaten Demak Tahun 2023 berada pada angka 2,88. Berdasarkan skenario BAU, daya dukung pangan di Kabupaten Demak terus mengalami penurunan mulai tahun 2023 hingga tahun 2031.

Gambar II.5
Skenario Daya Dukung Pangan Tahun 2023-2031



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Demak, 2024

Penurunan tersebut terjadi dikarenakan selama tahun 2023 hingga 2031 produksi pangan mengalami penurunan, sedangkan kebutuhan pangan mengalami kenaikan. Meskipun mengalami penurunan, kondisi daya dukung lahan pangan Kabupaten Demak masih berada di atas ambang batas daya dukung pangan. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa pada tahun 2023 hingga tahun 2031, Kabupaten Demak dapat berkontribusi atau memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Demak.

Tabel II.8
Skenario Daya Dukung Pangan Tahun 2023-2031

Daya Dukung LH	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Daya Dukung Minimal	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Produksi Pangan (Ton/Tahun)	324.272,87	322.545,44	320.817,99	319.090,56	317.363,13	315.635,70	313.908,26	312.180,83	310.453,39
Daya Dukung Pangan	2.88	2.84	2.81	2.77	2.73	2.70	2.66	2.62	2.59
Kebutuhan Pangan (Ton/Tahun)	112.621,59	113.409,31	114.312,88	115.223,65	116.141,67	117.067,01	117.999,71	118.939,85	119.887,48

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Demak, 2024

c. Daya Dukung Lahan Terbangun

Daya dukung lahan untuk kawasan terbangun Kabupaten Demak mempertimbangkan koefisien luas lahan terbangun, luas wilayah, dan luas lahan terbangun, berikut hasil perhitungannya:

Tabel II.9
Daya Dukung Lahan Terbangun

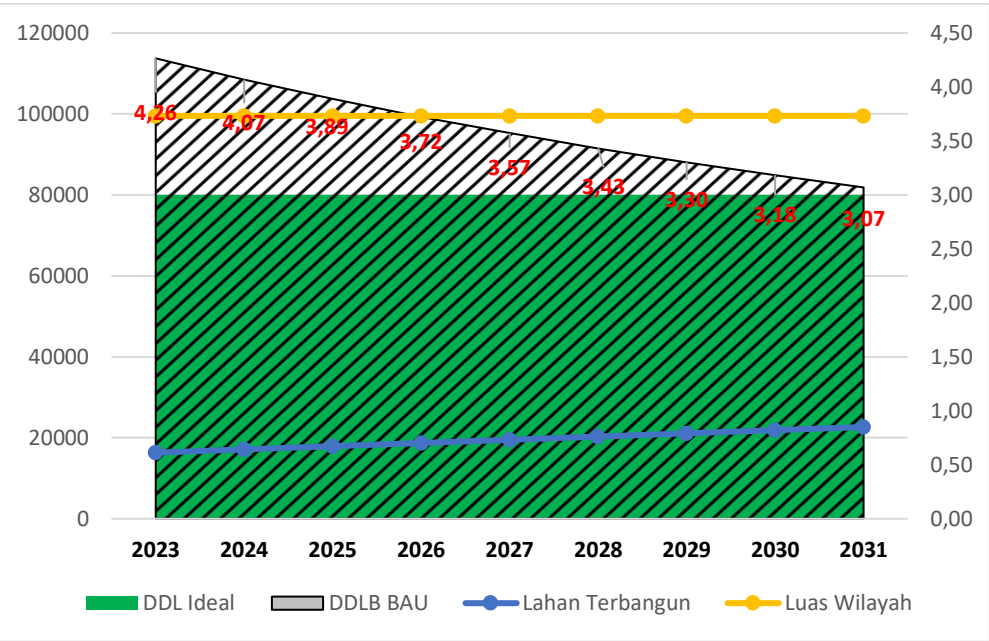
Keterangan	Luas	Satuan
Luas Wilayah	99.532,35	Ha
Luas Lahan Bangunan (LB)	15.787,63	Ha
Luas untuk Infrastruktur (20% LB)	-	Ha
Luas Lahan Terbangun (LTB)	15.787,63	Ha
Daya Dukung	4,41	Indeks

Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Demak, 2023

Jadi, DDLB Kabupaten Demak secara keseluruhan sebesar 4,41 yang termasuk dalam daya dukung lahan terbangun baik (>3). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ruang untuk pengembangan kegiatan terbangun, masih bisa dikembangkan kembali. Perlu adanya pembatasan lahan terbangun. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya degradasi lahan yang dapat terjadi apabila dilakukan pembangunan khususnya terkait lahan pertanian dan ruang terbuka hijau. Penurunan nilai daya dukung lahan terbangun dapat berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup khususnya terkait limpasan permukaan dan polusi udara. Oleh karena itu, keseimbangan antara jumlah penduduk dan kebutuhan lahan merupakan faktor yang harus diperhatikan.

Perhitungan daya dukung lahan terbangun menggunakan luasan lahan terbangun pada RTRW Kabupaten Demak, menunjukkan hasil bahwa pada tahun 2023 DDLB Kabupaten Demak sebesar 4,26 yang termasuk dalam kategori baik Berdasarkan skenario daya dukung lahan terbangun Kabupaten Demak Tahun 2021-2031, dapat diketahui tren daya dukung lahan total, tren daya dukung lahan terbangun BAU, dan tren lahan terbangun pada tahun 2023 hingga tahun 2031. Selama tahun 2023 hingga tahun 2031, tren daya dukung lahan terbangun BAU mengalami penurunan dari 4,26 pada tahun 2023 hingga menjadi 3,07 pada tahun 2031. Kondisi daya dukung lahan pada suatu wilayah dikatakan baik jika minimal berada pada angka 3. Penurunan tersebut terjadi dikarenakan luasan lahan terbangun di Kabupaten Demak yang semakin bertambah tiap tahunnya, sedangkan luas wilayah Kabupaten Demak berada dalam luasan yang stagnan. Penurunan tren daya dukung lahan terbangun BAU tersebut tidak terjadi secara signifikan. Kondisi daya dukung lahan terbangun mengalami penurunan hingga di bawah kategori ideal.

Gambar II.6
Skenario Daya Dukung Lahan Terbangun Tahun 2023-2031



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Demak, 2024

Tabel II.10
Skenario Daya Dukung Lahan Terbangun Tahun 2023-2031

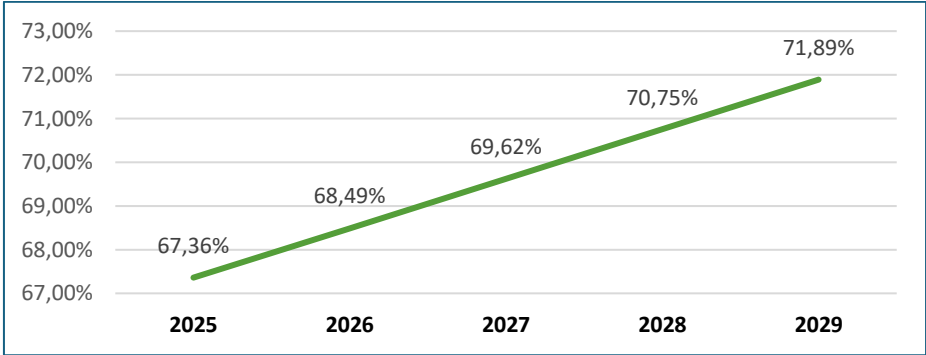
DDLB (SHP)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Luas Lahan Terbangun (Ha)	16336.14	17129.43	17922.72	18716.01	19509.3	20302.59	21095.88	21889.16	22682.45
DDL Ideal	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
DDLB BAU	4.26	4.07	3.89	3.72	3.57	3.43	3.30	3.18	3.07
Luas Wilayah (Ha)	99532.35	99532.35	99532.35	99532.35	99532.35	99532.35	99532.35	99532.35	99532.35

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Demak, 2024

c. Skenario Pengelolaan Sampah

Perkiraan layanan sampah di Kabupaten Demak secara total akan meningkat sangat kecil. Hal ini karena pelayanan pengelolaan sampah masih difokuskan pada kawasan perkotaan. Sementara perkembangan penduduk dan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan akan terus meningkat baik di perkotaan maupun di perdesaan. Skenario pengelolaan sampah yang dapat terolah di fasilitas persampahan terus meningkat setiap tahunnya mulai dari tahun 2025 hingga tahun 2029. Pada tahun 2025, pengelolaan sampah di Kabupaten Demak ditargetkan mencapai angka 67,36% dan pada tahun 2029 ditargetkan mencapai angka 71,89%. Berikut adalah skenario peningkatan pengelolaan sampah di Kabupaten Demak.

Gambar II.7
Skenario Sampah yang Terolah di Fasilitas Persampahan



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Demak, 2024

TPA di Demak seluruhnya telah habis usia teknisnya pada 2019, sehingga secara teknis sudah tidak dapat digunakan lagi.

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Ketersediaan air baku di Kabupaten Demak masih menjadi permasalahan yang harus diselesaikan sebagai upaya ketahanan air di masa depan. Kondisi geografi wilayah kabupaten Demak yang berada di daerah pesisir menjadi tempat bermuaranya beberapa sungai besar seperti Kali Tuntang, Kali Wulan, dan Kali Jajar. Namun, kualitas dan kuantitas air permukaan menjadi persoalan, mengingat air sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Demak memiliki tingkat sedimentasi yang tinggi dengan keberlangsungan debit andalan rendah terutama pada saat musim kemarau. Sementara di wilayah pesisir pantai, kadar salinitas air yang tinggi akibat adanya rob maupun intrusi air laut ke darat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan air baku.

Sampai saat ini, air tanah dan air permukaan (sungai) menjadi sumber air baku andalan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan untuk air bersih. Tantangan menjadi bertambah mengingat wilayah Kabupaten Demak termasuk Zona Merah untuk pengambilan air tanah, sementara ketersediaan air sungai tidak kontinu. Di sisi lainnya pemanfaatan air hujan (air permukaan) belum optimal karena belum adanya bendungan, waduk, atau penampungan air lainnya di Kabupaten Demak yang memiliki kapasitas cukup untuk keperluan pemenuhan air baku.

Tabel II.11
Cakupan Akses Air Minum Layak di Kabupaten Demak Berdasarkan Sumber (2020–2024)

Tahun	Cakupan Total Air Minum Layak (%)	PDAM (%)	Non-PDAM (%)
2020	80.08	16,82	63,26
2021	82,98	17,11	65,87
2022	85.58	18.09	67.49
2023	87.64	20.51	67.13
2024	92.26	20,22	72,04

Sumber: Dinputaru Kabupaten Demak (2025)

Cakupan akses air minum layak di Kabupaten Demak tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan dari 80,08% pada tahun 2020 menjadi 92,26% pada tahun 2024. Meskipun cakupan layanan dari PDAM mengalami sedikit fluktuasi, yakni meningkat dari 18,09% pada 2022 menjadi 20,51% pada 2023, lalu sedikit menurun menjadi 20,22% pada 2024. Capaian cakupan total air minum layak terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2020 hingga 2024, terjadi peningkatan sebesar 12,18%. Kontribusi utama peningkatan akses air minum layak berasal dari sumber non-PDAM. Cakupan air minum layak non-PDAM naik dari 67,49% pada 2022 menjadi 72,11% pada 2024. Hal ini mencerminkan peran penting sumber air alternatif, seperti sumur gali, sumur bor, atau sistem penyediaan air berbasis masyarakat, dalam memperluas akses air minum layak di wilayah Kabupaten Demak.

Kondisi energi di Kabupaten Demak mencerminkan kebutuhan energi, khususnya listrik, terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi, serta ekspansi sektor industri dan jasa. Konsumsi listrik menjadi salah satu indikator penting dalam menggambarkan tingkat pembangunan dan kualitas hidup masyarakat.

Tabel II.12
Daya Terpasang, Produksi Listrik, dan Listrik Terjual

Bulan	Daya Terpasang (VA)	Produksi Listrik (KWh)	Listrik Terjual (KWh)
Januari	649.479.388	135.158.945	111.130.616
Februari	651.328.338	128.979.956	105.606.265
Maret	653.498.138	136.817.725	115.055.935
April	653.613.388	124.610.958	98.711.081
Mei	658.032.438	150.427.215	124.888.248
Juni	662.228.738	147.020.363	118.858.570
Juli	665.953.288	151.453.634	132.492.639
Agustus	669.474.438	152.014.488	124.086.480
September	677.502.602	148.939.354	119.627.886
Oktober	680.184.388	162.948.453	129.260.856
November	683.754.388	158.820.537	124.239.097
Desember	691.755.188	154.793.323	125.310.284

Sumber: PLN UP3 Grobogan Kabupaten Demak

Data terkait daya terpasang, produksi listrik, listrik terjual, serta jumlah pelanggan listrik pada tahun 2024 mencerminkan kondisi sistem kelistrikan yang tidak hanya mencakup wilayah Kabupaten Demak, tetapi juga mencakup Kabupaten Grobogan. Hal ini disebabkan oleh sistem jaringan kelistrikan kedua kabupaten yang berada dalam satu wilayah layanan operasional dan pencatatan oleh pihak penyedia listrik, sehingga data yang tersedia merupakan hasil agregasi dari dua wilayah tersebut.

Sepanjang tahun 2024, Kabupaten Demak menunjukkan tren peningkatan kapasitas dan konsumsi listrik. Daya terpasang meningkat dari 649 juta VA pada Januari menjadi 691 juta VA pada Desember, mencerminkan bertambahnya kebutuhan listrik akibat pertumbuhan permukiman dan aktivitas ekonomi.

Produksi listrik juga cenderung naik, dengan puncaknya terjadi pada Oktober sebesar 162,9 juta KWh. Sementara itu, listrik yang terjual mencapai angka tertinggi pada Juli sebesar 132,4 juta KWh, mencerminkan tingginya konsumsi masyarakat pada periode tersebut. Data ini menunjukkan adanya dinamika positif dalam sektor kelistrikan yang perlu diimbangi dengan penguatan sistem distribusi dan efisiensi pemanfaatan energi.

Tabel II.13 .
Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Bulan
di Kabupaten Demak 2020-2024

Bulan	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	298.456	306.419	395.366	406.332	418.696
Februari	299.147	306.956	396.375	407.081	419.733
Maret	299.809	307.790	397.319	407.905	420.701
April	300.344	308.595	398.188	408.500	421.737
Mei	300.784	309.216	398.945	409.398	422.956
Juni	301.344	310.131	399.966	410.181	424.231
Juli	301.967	310.855	400.858	411.114	425.464
Agustus	302.551	311.925	401.864	412.455	427.020
September	302.950	312.701	402.721	413.759	428.246
Oktober	303.614	313.703	403.497	414.947	429.735
November	304.679	314.656	404.545	416.286	431.064
Desember	305.669	315.551	405.619	417.566	432.241

Sumber : PLN UP3 Grobogan Kabupaten Demak dan BPS Demak (2025)

Data jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Demak menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2022 hingga 2024. Pada Januari 2022 tercatat sebanyak 395.366 pelanggan, dan jumlah ini terus bertambah hingga mencapai 432.241 pelanggan pada Desember 2024. Pertumbuhan tersebut mencerminkan meningkatnya akses dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan listrik, seiring dengan perkembangan wilayah dan aktivitas sosial-ekonomi. Peningkatan yang stabil tiap bulan juga mengindikasikan kinerja distribusi dan penyambungan listrik yang cukup baik di daerah ini.

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemis dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.

Tabel II.14
Ketahanan Pangan Kabupaten Demak Tahun 2020-2024

Tahun	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
2020	8,02	85,04
2021	8,80	85,82
2022	9,00	87,38
2023	7,77	89,03
2024	7,59	90,47

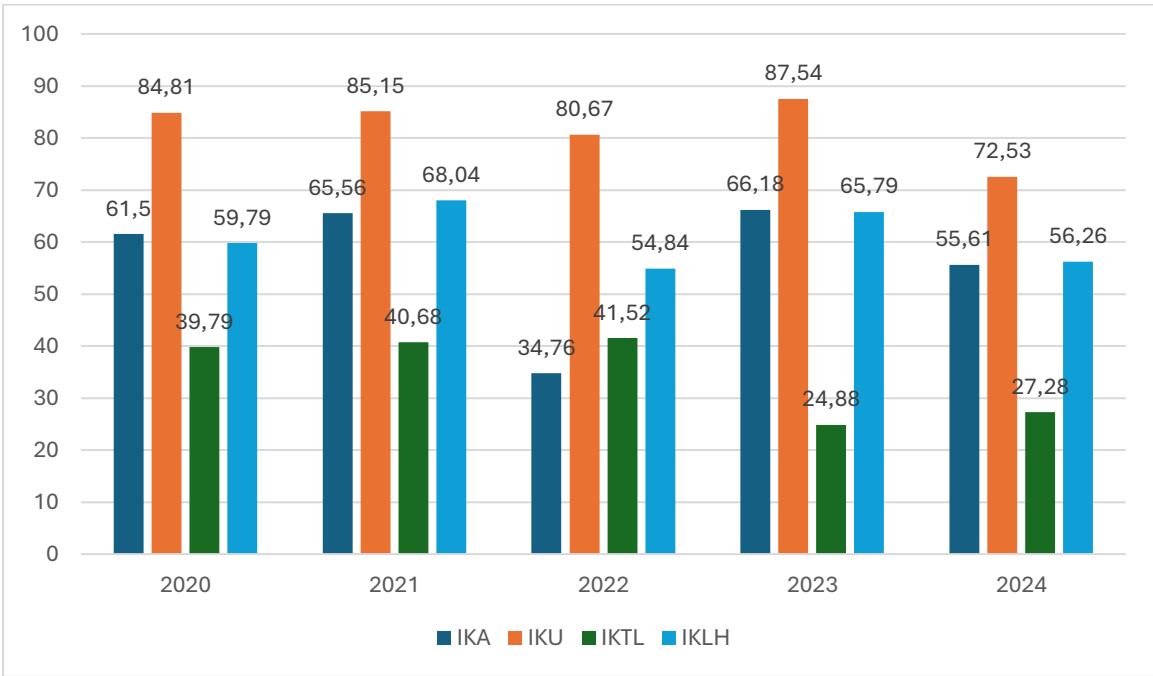
Sumber: BPS, Badan Pangan Nasional, 2024

Secara umum, kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Demak sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari capaian Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan yang mengindikasikan proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan pangan mengalami penurunan hingga mencapai 7,59 persen di tahun 2024. Selain itu, Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Demak juga mengalami peningkatan di setiap tahunnya hingga mencapai 90,47 pada tahun 2024.

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu dapat diketahui melalui **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** (IKLH). Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: indeks kualitas pencemaran air, indeks kualitas pencemaran udara, dan indeks tutupan lahan. Klasifikasi kualitas indeks lingkungan hidup berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup di antaranya: kondisi waspada berkisar <50, kondisi sangat kurang berkisar 50-58, kondisi kurang berkisar 58-66, kondisi cukup berkisar 66-72, kondisi baik berkisar 74-82, kondisi sangat baik berkisar 82-90, dan kondisi unggul berkisar lebih dari 90.

Gambar II.8
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak (2024)

Sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, IKLH Kab/Kota dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: $IKLH \text{ Kab/Kota} = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$. Diketahui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Demak tahun 2024 adalah 56,28. Angka tersebut menunjukkan adanya penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 dengan realisasi IKLH sebesar 65,79. Capaian IKLH Kabupaten Demak masih jauh di bawah capaian nasional yaitu 72,5.

Rendahnya realisasi disebabkan adanya perbedaan rumus penghitungan, pada awal perencanaan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Demak berdasarkan Permen LHK Nomor P.78/SETJEN/SET.1/9/2016. Namun setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan hidup, maka perhitungan dalam menentukan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berbeda.

Perhitungan IKLH untuk tahun 2022-2026 pada *input* data indikator/parameternya mengalami perubahan dalam jumlah, jenis, dan sistem perhitungannya, sehingga akan lebih rendah nilai IKLH dibandingkan dengan tahun 2016 – 2021. Beberapa komponen IKLH dihitung berdasarkan:

a. Indeks Kualitas Air (IKA)

Komponen pertama pada pengukuran IKLH adalah Indeks Kualitas Air (IKA). Tingkat pencemaran air tertinggi Kabupaten Demak tersebar di Kecamatan Sayung, Karangtengah, dan Mijen. Perkembangan Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami tren positif meningkat, hal ini dikarenakan kondisi iklim, pertumbuhan industri, dan aktivitas masyarakat 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang diimbangi dengan upaya pemerintah dalam mengendalikan pencemaran air. Meskipun mengalami peningkatan kualitas tiap tahunnya, klasifikasi kualitas IKA di kabupaten Demak termasuk kategori kurang. Capaian IKA Kabupaten Demak sebesar 55,61 pada tahun 2024. Angka capaian tersebut akan digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan pada rencana pembangunan tahun berikutnya guna mencapai IKA yang ideal.

b. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Komponen kedua pada pengukuran IKLH adalah Indeks Kualitas Udara (IKU). Tingkat pencemaran udara tertinggi berada di Kecamatan Sayung, Karangtengah, Karangawen, dan Mranggen. Sementara pada tahun 2020 – 2024, Indeks Kualitas Udara mengalami perubahan secara fluktuatif, dengan capaian tahun tertinggi 72,53 pada tahun 2024. Meskipun menurun akibat perubahan penghitungan, perbaikan kinerja pemerintah Kabupaten Demak dalam upaya

meningkatkan Indeks Kualitas Udara (IKU) perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kualitas udara di Kabupaten Demak.

c. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Komponen pengukuran IKLH selanjutnya adalah Indeks kualitas lahan (IKL). Meskipun IKLH Kabupaten Demak selama lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan, namun klasifikasi kualitas menunjukkan indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Demak adalah kurang. Indeks yang menyumbangkan angka terendah adalah Indeks Kualitas Lahan (IKL) dengan capaian 27,28 pada tahun 2024.

Dalam hal penanganan sampah dan sanitasi, Kabupaten Demak masih mengalami tantangan. Kondisi geografis Kabupaten Demak sebagian berupa pesisir dengan potensi penurunan tanah yang tinggi, potensi air baku di wilayah Kabupaten Demak cenderung payau, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses sanitasi karena topografi ataupun kondisi ekonomi

Tahun 2024, **Persentase rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi** sebesar 96,13 persen atau terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. **Capaian sanitasi aman** Kabupaten Demak tahun 2024 sebesar 5,78% meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 4,36 persen. Sedangkan **akses layanan air minum aman** mencapai 41,47 persen pada tahun 2023. Bantuan dana dari pemerintah pusat menjadi salah satu dukungan capaian. Pemerintah Kabupaten Demak berkomitmen meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama bidang air minum dan sanitasi.

Saat ini, pemerintah Kabupaten Demak telah berhasil mencapai ODF sejak bulan November 2022. Ke depan, pemerintah Kabupaten Demak akan memaksimalkan pelayanan sanitasi dengan memfokuskan kegiatan pada rumah tangga yang belum berakses sanitasi, mengajukan penganggaran baik di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat untuk mendukung peningkatan akses sanitasi dan pencapaian *Open Defecation Free* (ODF) Kabupaten Demak.

Masalah **sampah** adalah isu global yang berdampak besar terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan ekonomi. Untuk membantu mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah, maka diperlukan pengelolaan sampah yang baik. Kabupaten Demak melalui program pengelolaan sampah berkontribusi dalam meningkatkan capaian IKLH dengan cara mengelola sampah secara teratur dan efektif, sehingga dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk pencemaran air permukaan. Program ini mencakup tindakan seperti pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah. Pengelolaan sampah mampu menekan pencemaran air permukaan dan kualitas lingkungan hidup dapat terjaga.

Tabel II.15

- Di Kabupaten Demak, wilayah rawan bencana secara umum meliputi:
- a. wilayah rawan banjir yang tersebar di semua wilayah Kabupaten Demak.
 - b. wilayah rawan gelombang pasang dan abrasi tersebar di Kecamatan Sayung, Karangtengah, Bonang dan Wedung. Banjir dan rob di kawasan pesisir Sayung telah menenggelamkan beberapa desa yang kemudian menjadi kawasan kumuh.
 - c. wilayah rawan kekeringan juga terjadi di hampir seluruh Kabupaten Demak. Hal ini terjadi apabila musim kemarau panjang sampai mengakibatkan tanah persawahan menjadi retak-retak.
 - d. Wilayah rawan longsor meliputi, Kecamatan Mranggen dan Karangawen.

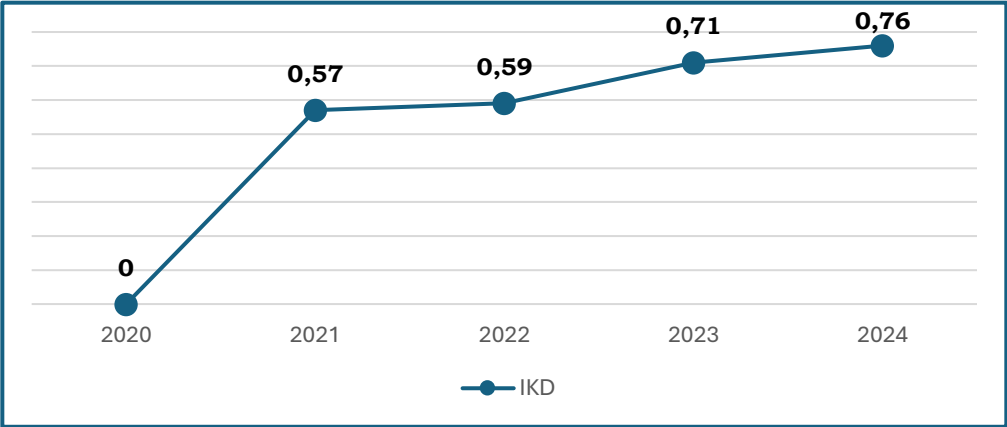
Bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Demak selama tahun 2020 hingga tahun 2024 adalah banjir, kebakaran, angin topan/puting beliung dan kekeringan. Intensitas bencana yang paling sering terjadi pada tahun 2024 adalah kekeringan. Meskipun demikian, pada awal tahun 2024 Kabupaten Demak mengalami banjir besar selama 10 tahun terakhir dengan 11 kecamatan dan 89 desa terdampak. Rincian bencana dan taksiran kerugian tertera dalam tabel berikut.

Tabel II.16
Rekapitulasi Kejadian Bencana Tahun 2020-2024

Jenis Bencana	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Banjir	Kejadian	16	22	8	12	2
Angin Puting Beliung / Pohon Tumbang / Angin Kencang	Kejadian	66	60	78	66	76
Kebakaran	Kejadian	43	37	39	80	60
Kekeringan	Kejadian	-	18	7	279	117
Kecelakaan Air	Kejadian	7	4	9	12	9
Tersambar Petir	Kejadian	4	1	2	2	-
Korban Terdampak	Jiwa	32.691	19.319	184.368	269.537	210.142
Meninggal Dunia	Jiwa	18	15	13	14	1
Taksiran kerugian	(Rp.000)	7.466.282	24.751.021	228.166.325	8.934.813	2.321.908.646.085

Sumber: BPBD Kab. Demak (2025)

Gambar II.10
Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020-2024



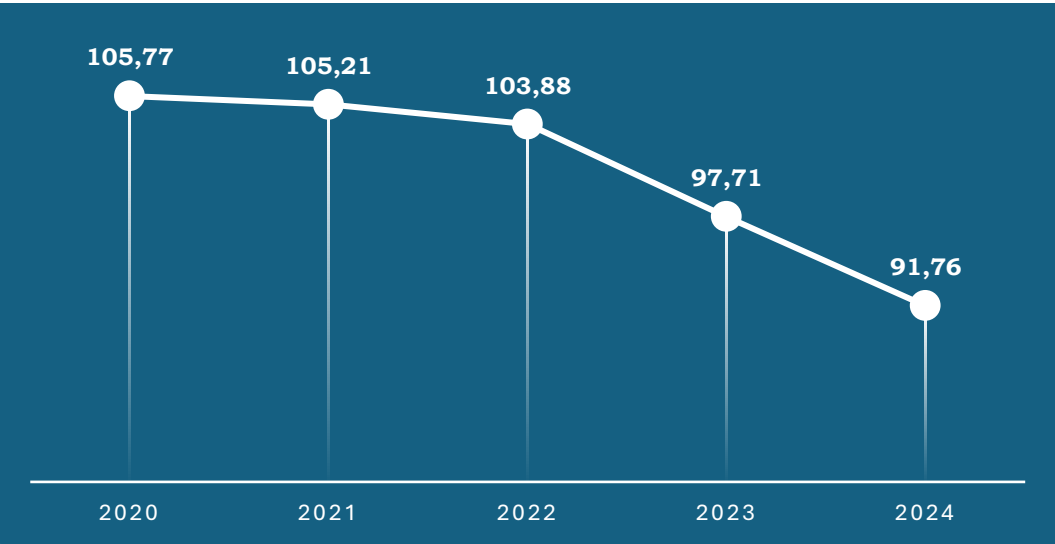
Sumber : BPBD Kab. Demak Tahun 2024

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Demak menunjukkan tren peningkatan yang cukup positif dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai IKD dari tahun ke tahun mengalami kenaikan signifikan. Tren kenaikan nilai IKD Kabupaten Demak merupakan capaian bersama semua pihak dalam mewujudkan Demak Tangguh menghadapi bencana sebagaimana yang tertuang dalam indikator penilaian IKD.

Meskipun data tahun 2020 belum tersedia, capaian IKD mulai tercatat pada 2021 dengan skor 0,57 dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada 2022, nilai IKD naik menjadi 0,59, kemudian melonjak signifikan menjadi 0,71 di tahun 2023, dan mencapai 0,76 pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Demak dalam memperbaiki tata kelola data, meningkatkan akurasi, serta mendorong pemanfaatan data yang lebih berkualitas untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

Capaian IKD Kabupaten Demak tahun 2020 – 2024 berpengaruh terhadap capaian Indeks Risiko bencana. Berikut data capaian IRBI tahun 2020 – 2024:

Gambar II.11
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Demak Tahun 2020-2024



Sumber: Buku IRBI BNPB (data diolah oleh BPBD Kabupaten Demak)



Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Demak mengalami progres penurunan secara gradual dari 105,77 di tahun 2020 menjadi 91,76 pada tahun 2024. Meskipun demikian, kategori risiko bencana Kabupaten Demak masih di level sedang. Menurunnya angka IRB tidak terlepas dari kerja sama dan koordinasi oleh pemerintah dengan sejumlah instansi vertikal, lembaga masyarakat (BBWS Pemali Juwana, PSDA dan sejumlah Relawan), terbentuknya 5 relawan yang tersebar di lima kecamatan, di antaranya: (1. Relawan Kalijaga di Kecamatan Karangawen, 2. Relawan Jakatingkir di Kecamatan Mijen, 3. Relawan Angling Kusumo di Kecamatan Mranggen, 4. Relawan Glagah Wangi di Kecamatan Sayung dan yang ke- 5, Relawan Demak Rescue di Kecamatan Demak) serta Relawan Desa yang terbentuk melalui Desa Tangguh Bencana yang sampai dengan Tahun 2022 sudah terbentuk 29 Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

Dalam rangka memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana, Pemerintah Kabupaten Demak terus mendorong pelaksanaan kegiatan pendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kebencanaan. Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana). Dari total 249 desa dan kelurahan yang ada, sebanyak 123 desa berada di wilayah rawan bencana. Namun hingga tahun 2024, baru 37 desa yang telah ditetapkan sebagai Destana.

Upaya pembentukan Destana akan terus ditingkatkan secara bertahap, dengan mengutamakan wilayah berisiko tinggi. Selain itu, penguatan kesiapsiagaan juga dilakukan melalui pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak dengan dukungan dari BPBD, guna memastikan satuan pendidikan memiliki sistem tanggap darurat yang memadai. Langkah strategis lainnya adalah pemasangan sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS) di wilayah-wilayah rawan, sebagai bagian dari sistem mitigasi struktural untuk mempercepat respon terhadap potensi bencana. Seluruh upaya ini menjadi bagian integral dalam mewujudkan ketahanan daerah terhadap bencana secara sistematis dan berkelanjutan.

Hasil kerentanan terhadap perubahan iklim di Kabupaten Demak didapatkan berdasarkan Indeks Kerentanan Adaptasi (IKA) dan Indeks Kerentanan Sosial (IKS). Indeks Kerentanan Adaptasi (IKA) dan Indeks Kerentanan Sosial (IKS) digunakan untuk mengukur tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim di Kab. Demak. IKA menunjukkan kemampuan adaptasi suatu wilayah, sedangkan IKS menunjukkan seberapa rentan suatu wilayah terhadap dampak perubahan iklim. Kombinasi kedua indeks ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap perubahan iklim. Kerentanan adalah kecenderungan

Gambar II.12

Persentase Indeks Kerentanan Bencana

A pie chart titled 'Persentase Indeks Kerentanan Bencana' (Percentage of Disaster Vulnerability Index). The chart is divided into five segments, with three labeled with their respective percentages: 13% (dark blue), 45% (orange), and 42% (dark green). The remaining two segments, light blue and purple, are not labeled with percentages. A legend at the bottom identifies the five categories: Sangat Tinggi (dark blue), Tinggi (orange), Sedang (dark green), Rendah (light blue), and Sangat Rendah (purple).

Kategori	Persentase
Sangat Tinggi	13%
Tinggi	45%
Sedang	42%
Rendah	-
Sangat Rendah	-

Tabel II.17
Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kabupaten Demak 2020-2024 (Ton CO₂eq)

Tahun	Capaian Tahunan	Penurunan Kumulatif
2020	18,4	18,4
2021	2,41	20,81
2022	17.265,00	17.285,81
2023	23.088,38	40.374,19
2024	61.970,97	102345,16

Sumber : Aplikasi AKSARA (2025)

Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Demak menunjukkan tren yang semakin progresif sepanjang periode 2020–2024. Pada awal periode, capaian tahunan masih relatif rendah, yaitu 18,4 ton CO₂ ekuivalen pada 2020 dan sedikit meningkat menjadi 2,41 ton pada 2021, menghasilkan penurunan kumulatif sebesar 20,81 ton. Namun demikian, lonjakan drastis terjadi pada tahun 2022 dengan capaian tahunan sebesar 17.265 ton, yang secara signifikan meningkatkan penurunan kumulatif menjadi 17.285,81 ton. Kenaikan tajam ini disebabkan oleh adanya perubahan dan penyempurnaan metode perhitungan dalam sistem AKSARA (Aplikasi Inventarisasi GRK Nasional) yang mulai mengakomodasi lebih banyak sektor emisi dan aksi mitigasi, termasuk dari sektor pertanian dan limbah. Tren peningkatan capaian berlanjut pada tahun 2023 dan 2024 dengan penurunan masing-masing sebesar 23.088,38 ton dan 61.970,97 ton, sehingga penurunan kumulatif mencapai 102.345,16 ton CO₂ ekuivalen pada akhir 2024. Data ini mencerminkan keberhasilan Kabupaten Demak dalam memperkuat aksi mitigasi lintas sektor secara konsisten dan terukur.

Emisi GRK dihasilkan dari berbagai sumber antara lain adalah penggunaan energi dari kegiatan transportasi, perubahan tutupan lahan, kegiatan pertanian, dan pengelolaan limbah baik padat maupun cair. Pengelolaan untuk mengendalikan GRK sangat penting dilakukan dalam rangka mewujudkan pembangunan rendah karbon yang menjadi bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Demak. Upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Demak adalah aksi mitigasi kepada kelompok-kelompok yang memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan maupun penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), seperti petani (baik sawah maupun kebun), pelaku transportasi, sektor industri, perusahaan, serta masyarakat umum. Kabupaten Demak yang memiliki dominasi pada sektor pertanian dan industri menjadikan kedua bidang tersebut sebagai sasaran utama dalam pengendalian emisi GRK secara terukur dan berkelanjutan.

Tabel II.18
Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Demak
Tahun 2020-2024 (Gg CO₂e_q)

Sektor	Emisi (Gg CO ₂ e _q)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengadaan dan Penggunaan Energi	788,94	757,33	855,21	895,18	749,67
Proses Industri dan Penggunaan Produk	27,22	28,67	29,41	32,11	37,5
Pertanian, Kehutanan, dan Penggunaan Lahan Lainnya	680,29	703,81	685,51	625,99	577,08
Pengelolaan Limbah	155,95	150,93	145,73	135,15	106,13
Total	1.652,41	1.640,73	1.715,86	1.688,43	1.470,37

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak (2024)

Data emisi gas rumah kaca (GRK) Kabupaten Demak tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan yang positif, total emisi menurun dari 1.652,41 Gg CO₂e_q pada tahun 2020 menjadi 1.470,37 Gg CO₂e_q pada tahun 2024. Penurunan ini terutama terjadi pada sektor pengelolaan limbah dan sektor pertanian, kehutanan, serta penggunaan lahan lainnya (AFOLU), yang masing-masing turun signifikan hingga mencapai level terendah selama lima tahun terakhir. Meskipun sektor energi sempat mengalami peningkatan emisi pada tahun 2022 dan 2023, pada tahun 2024 sektor ini berhasil ditekan hingga di bawah level tahun 2020. Penurunan emisi ini menunjukkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Demak yang semakin berpihak pada prinsip keberlanjutan dan rendah karbon, semakin rendah angka emisi yang dihasilkan, semakin baik pula kualitas pengelolaan lingkungan yang dilakukan.

2.1.1.7 Demografi

Aspek demografi dalam pembangunan Kabupaten Demak mencakup analisis dan pemahaman karakteristik populasi yang berpengaruh pada perencanaan pembangunan. Penduduk sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan wilayah merupakan salah satu potensi internal yang cukup penting dalam pengembangan wilayah itu sendiri, kualitas pengelolaan potensi dan kapasitas penduduk akan Skenario Pengelolaan Sampah menentukan tingkat keberhasilan pembangunan daerah.

A. Kependudukan

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, di samping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subyek dan obyek pembangunan. Selain itu penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila

disertai dengan kualitas yang tinggi, sebaliknya apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, 2025), jumlah penduduk Kabupaten Demak tahun 2024 sebanyak 1.252.970 jiwa, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel II.19
Jumlah Penduduk Kabupaten Demak per Kecamatan
Tahun 2020 – 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Mranggen	163.643	164.399	169.503	172.505	174.363
2.	Karangawen	94.656	95.175	98.253	99.221	100.107
3.	Guntur	86.160	86.937	89.795	91.563	92.346
4.	Sayung	105.481	105.525	107.761	108.372	108.828
5.	Karangtengah	69.307	69.803	71.808	72.751	73.297
6.	Wonosalam	84.000	84.778	87.595	88.655	89.739
7.	Dempet	59.674	59.928	61.545	61.620	62.149
8.	Gajah	51.684	51.877	53.548	53.849	54.118
9.	Karanganyar	76.763	77.362	79.431	79.899	80.349
10.	Mijen	58.572	58.730	60.384	61.015	61.287
11.	Demak	111.033	111.585	114.320	115.115	115.116
12.	Bonang	106.518	107.314	109.961	111.499	112.200
13.	Wedung	83.291	83.509	85.507	86.401	86.647
14.	Kebonagung	41.930	42.043	43.458	43.594	43.658
Jumlah		1.192.712	1.198.965	1.232.869	1.246.059	1.254.204

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Demak (2025)

Berdasarkan data tersebut, kepadatan rata-rata Kabupaten Demak pada tahun 2024 yaitu sekitar 1.258,05 jiwa/km². Kepadatan tertinggi berada di wilayah Kecamatan Mranggen (2.247,00 jiwa/km²). Tingkat kepadatannya mencapai lebih dari tiga kali lipat kepadatan Kecamatan Wedung yang merupakan kecamatan terendah kepadatannya di Kabupaten Demak (669,00 jiwa/km²). Hal ini dapat dijelaskan karena Kecamatan Mranggen berbatasan dengan Kota Semarang sehingga menarik minat kaum urban bermukim di daerah tersebut, sedangkan Kecamatan Wedung mempunyai karakteristik pesisir yang sebagian besar lahannya berupa tambak sehingga kepadatan penduduknya rendah.

Tabel II.20
Kepadatan Penduduk Kabupaten Demak Tahun 2020-2024

No.	Kecamatan	Luas	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km ²)
		(km ²)		
1.	Mranggen	77,59	174.363	2.247
2.	Karangawen	81,71	100.107	1.189
3.	Guntur	64,28	92.346	1.445
4.	Sayung	85,97	108.828	1.282
5.	Karangtengah	56,44	73.297	1.244
6.	Wonosalam	62,79	89.739	1.422
7.	Dempet	63,94	62.149	976
8.	Gajah	53,73	54.118	1.060
9.	Karanganyar	69,87	80.349	1.127

No.	Kecamatan	Luas	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km ²)
		(km ²)		
10.	Mijen	54,99	61.287	1.130
11.	Demak	63,05	115.116	1.735
12.	Bonang	87,06	112.200	1.261
13.	Wedung	129,42	86.647	669
14.	Kebonagung	44,47	43.658	962
2024		996,94	1.254.204	1.258,05
2023		995,32	1.246.059	1.251,92
2022		995,32	1.232.869	1.238,67
2021		995,32	1.198.965	1.204,60
2020		995,32	1.192.712	1.198,32

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Demak (2025)

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk sehingga akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk seperti fasilitas publik dan sebagainya. Terdapat dua metode perhitungan laju pertumbuhan penduduk, yaitu menggunakan data registrasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan data hasil proyeksi Sensus Penduduk *Long Form* 2020 oleh BPS. Pada pertumbuhan penduduk di bawah, menggunakan data hasil Proyeksi *Long Form* Sensus Penduduk 2020 oleh BPS. Pada tahun 2024, terjadi perlambatan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Demak yaitu menurun dari 1,09% (2023) menjadi 1,07% (2024).

Tabel II.21
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Demak
Tahun 2023-2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa) 2023	Jumlah Penduduk (jiwa) 2024	Laju Pertumbuhan Penduduk 2023 (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2024 (%)
1.	Mranggen	179.998	181.444	0,88	0,86
2.	Karangawen	97.572	98.566	1,11	1,09
3.	Guntur	89.845	91.123	1,55	1,52
4.	Sayung	107.555	108.177	0,63	0,62
5.	Karangtengah	71.284	72.140	1,31	1,28
6.	Wonosalam	88.179	89.384	1,49	0,82
7.	Dempet	61.922	62.686	1,34	1,31
8.	Gajah	54.126	54.948	1,66	1,62
9.	Karanganyar	79.809	80.582	1,06	1,03
10.	Mijen	60.323	61.019	1,26	1,23
11.	Demak	112.974	113.928	0,92	0,90
12.	Bonang	109.185	110.024	0,84	0,82
13.	Wedung	85.327	86.250	1,18	1,15
14.	Kebonagung	42.411	42.699	0,74	0,72
Demak		1.240.510	1.252.970	1,09	1,07

Sumber: Hasil Long Form Sensus Penduduk BPS (2020)

Metode proyeksi memiliki kelemahan yaitu tidak sepenuhnya menangkap kejadian-kejadian khusus yang terjadi di masyarakat, misalnya saat terjadi bencana alam, pandemi, maupun intervensi program. Namun, metode ini memiliki keunggulan dalam hal kecepatan penghitungan dan sangat berguna untuk daerah yang belum memiliki *database* yang memadai. Sebaliknya, data registrasi lebih mutakhir, tetapi perlu diperhitungkan kemungkinan belum semua dinamika kependudukan terekam di kantor pencatatan sipil.

Tabel II.22
Persentase Dokumen Kependudukan Kabupaten Demak
Tahun 2020-2024

No.	Tahun	2020	2022	2022	2023	2024
1	Persentase Penerbitan KK	99,43	99,79	99,92	98,73	98,83
2	Perekaman KTP Elektronik	98,21	97,91	97,87	99,65	98,70
3	Persentase Kepemilikan KIA	22,26	44,95	43,04	57,87	59,91
4	Persentase Kepemilikan Akta Kematian	100	100	100	100	100
5	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	95,75	96,66	98,01	98,30	98,65
6	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	100	100	100	100	100
7	Persentase Kepemilikan Akte Perceraian	100	100	100	100	100
8	Persentase Indofmasi Kependudukan	100	100	100	100	100

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Demak (2025)

Data Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada tahun 2020-2023 belum tersedia, karena Dindukcapil Kabupaten Demak belum melaksanakan kegiatan tersebut. Begitu pula dengan buku pokok pemakaman, pada tahun 2020 belum diterbitkan. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel II.23
Capaian Pelayanan Admindukcapil Kabupaten Demak Tahun 2020-2024

Jenis Pelayanan	2020	2021	2022	2023	2025
Penerbitan akta perkawinan	100%	100%	100%	100%	100%
Penerbitan akta perceraian	100%	100%	100%	100%	100%
Buku Pokok Pemakaman	n/a	18,07% 45 desa/kel	75,50% 188 desa/kel	100% 249 desa/kel	100% 249 desa/kel
Identitas Kependudukan Digital (IKD)	n/a	n/a	n/a	n/a	2,53%

Sumber: Dindukcapil Kab. Demak (2025)

B. Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan rasio yang membandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah. Indikator *sex ratio* berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Jumlah penduduk laki-laki di

Kabupaten Demak selama lima tahun terakhir selalu lebih banyak daripada perempuan, dengan *sex ratio* di atas 101 yang mengindikasikan bahwa terdapat sekitar 101-102 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Adapun terjadi penurunan *sex ratio* di tahun 2024 yang berarti pertumbuhan penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penduduk laki-laki.

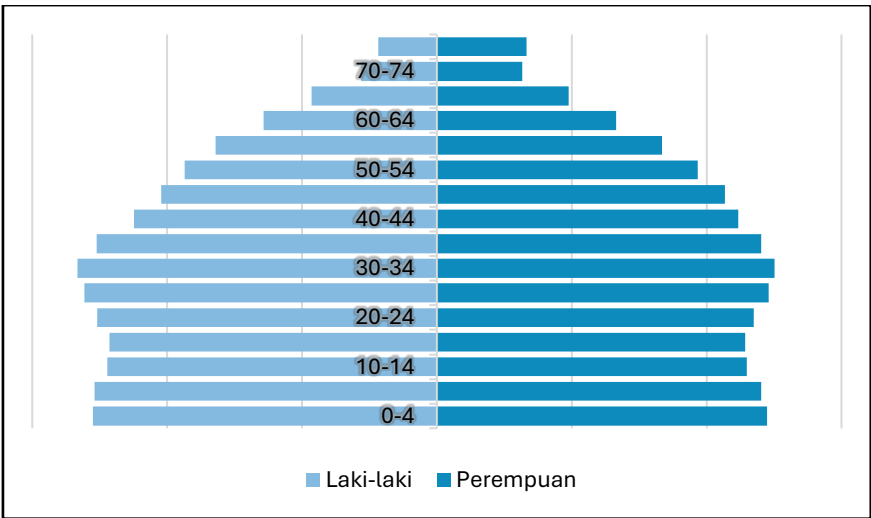
Tabel II.24
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Demak
berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (jiwa)	Sex Ratio
1	2024	632.049	620.921	1.252.970	102,00
2	2023	630.017	616.042	1.246.059	102,27
3	2022	621.789	611.080	1.232.869	101,75
4	2021	604.845	594.120	1.198.965	101,81
5	2020	587.080	577.845	1.164.925	101,60

Sumber: BPS Kabupaten Demak (2025)

C. Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur

Gambar II.14
Piramida Penduduk Kabupaten Demak Tahun 2024



Sumber: LFSP 2020 BPS Kabupaten Demak (2024)

Piramida penduduk Kabupaten Demak cenderung berkarakter stasioner yaitu jumlah penduduk di tiap kelompok umur hampir sama. Hal ini mengindikasikan bahwa pengendalian laju pertumbuhan penduduk di masa lalu sudah cukup baik. Meskipun demikian, terjadi tren kenaikan jumlah penduduk pada kelompok umur tua (>65 tahun) dalam tiga tahun terakhir. Keadaan ini perlu disikapi agar beban tanggungan penduduk tidak semakin bertambah.

Jika dilihat dari struktur piramida penduduk daerah, maka penduduk usia muda dan produktif memiliki porsi yang seimbang di mana akan menurun pada usia tua. Hal ini tentu saja menjadi suatu potensi yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah agar mampu memberdayakan generasi muda untuk berkreasi dan mengembangkan diri sehingga dapat bersaing di berbagai aspek kehidupan.

Selain potensi, kelemahan drastisnya penurunan pada kelompok usia tua adalah karena kurangnya derajat kesehatan masyarakat dikarenakan belum optimalnya penyelenggaraan layanan kesehatan.

D. Proyeksi Penduduk Kabupaten Demak

Proyeksi penduduk merupakan perkiraan tentang bagaimana jumlah penduduk suatu wilayah akan berubah dari waktu ke waktu, berdasarkan tren demografis yang ada pada saat ini. Proyeksi penduduk juga merupakan upaya untuk memprediksi bagaimana struktur umur dan ukuran populasi suatu wilayah sehingga dapat dijadikan acuan penyusunan kebijakan khususnya dalam hal perencanaan kebijakan publik, infrastruktur, ekonomi, hingga pendidikan dan kesehatan.

Penduduk di Kabupaten Demak diproyeksikan mengalami peningkatan dalam lima tahun mendatang. Penduduk yang diproyeksikan sejumlah 1.265,05 ribu jiwa pada tahun 2025 akan meningkat menjadi 1.308,75 ribu jiwa pada tahun 2029. Adapun jumlah penduduk laki-laki sebanyak 658,92 ribu jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 649,82 ribu jiwa sehingga rasio jenis kelamin mencapai 101,40. Penambahan penduduk di setiap tahunnya ini tentu saja meningkatkan kepadatan penduduk, pada tahun 2029 kenaikan kepadatan penduduk diperkirakan akan mencapai 1.314-1.315 jiwa per kilometer persegi.

Kabupaten Demak pada tahun 2025 hingga 2029 berada pada jendela bonus demografi dengan rasio ketergantungan selama lima tahun tersebut berada di bawah 50. Hal ini mengindikasikan bahwa angka ketergantungan penduduk usia non produktif berada di bawah setengah dari jumlah penduduk usia produktif. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dan isu yang harus ditindaklanjuti sehingga perlu adanya program prioritas khusus dalam pemberdayaan SDM sehingga mampu mengakselerasi pencapaian pembangunan yang lebih baik.

Tabel II.25
Proyeksi Penduduk Kabupaten Demak Tahun 2025-2029

Indikator Proyeksi Penduduk	2025	2026	2027	2028	2029
Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	1265,05	1276,68	1287,85	1298,55	1308,75
Laki-laki	637,95	643,59	648,97	654,08	658,92
Perempuan	627,1	633,1	638,89	644,46	649,82
Rasio Jenis Kelamin	101,73	101,66	101,58	101,49	101,40
Kepadatan Penduduk	1271,00	1282,68	1293,91	1304,66	1314,90
Rasio Ketergantungan	44,51	44,86	45,20	45,52	45,83
Kelompok Umur (Ribu Jiwa)					
0–14	294,57	294,62	294,38	293,82	292,91
15–64	875,40	881,32	886,98	892,34	897,43
65+	95,09	100,76	106,50	112,38	118,42

Sumber: BPS Kabupaten Demak, 2024 (Data diolah)

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, mencakup fokus kesejahteraan dan pemerataan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Beberapa kondisi kesejahteraan masyarakat selama tiga tahun terakhir ini cukup rentan sebagai dampak pandemi Covid-19. Hal ini cukup terlihat jelas dari adanya kontraksi pertumbuhan ekonomi hingga dampak negatif lainnya terhadap masyarakat dari ketenagakerjaan hingga sosial. Namun, pasca penanganan dan pemulihan pandemi, Kabupaten Demak mampu bangkit dan terus berupaya mengembalikan kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. Adapun penjabaran kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak dapat terlihat sebagai berikut.

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Fokus kesejahteraan ekonomi ini akan menjabarkan hasil pembangunan Kabupaten Demak utamanya terkait bidang perekonomian wilayah. Fokus ini akan mengkaji lebih dalam berbagai indikator-indikator perekonomian baik makro maupun mikro yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan esensi dari pergerakan roda perekonomian (pembangunan perekonomian) Kabupaten Demak. Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier. Oleh karena itu, penting adanya melihat berbagai indikator pada tujuan pembangunan tersebut demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Indikator-indikator utama yang akan digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Kabupaten Demak antara lain laju pertumbuhan ekonomi, ketimpangan kesejahteraan, kemiskinan hingga ketenagakerjaan masyarakat. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan provinsi hingga nasional.

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator makro yang digunakan untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang

dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Nilai PDRB Kabupaten Demak atas dasar harga konstan, mencapai 21.894,60 miliar rupiah pada tahun 2024. Angka tersebut meningkat dari 20.839,75 miliar rupiah pada tahun 2023. Dari kondisi tersebut, maka perekonomian Kabupaten Demak tahun 2024 mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 5,06%. Angka ini sedikit meningkat jika dibandingkan pencapaian pada tahun 2023 yang tercatat sebesar 5,01%.

Tabel II.26
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Atas Dasar Harga Konstan berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten Demak Tahun 2020-2024

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,49	-2,16	-0,51	-1,48	0,63
B	Pertambangan dan Penggalian	-19,13	2,97	-9,53	13,73	8,51
C	Industri Pengolahan	-3,08	4,65	6,84	5,03	4,77
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-2,66	11,12	6,73	5,46	6,23
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,42	3,70	0,46	4,96	2,20
F	Konstruksi	19,28	2,44	2,12	8,94	9,53
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-4,30	4,80	4,56	5,30	4,46
H	Transportasi dan Pergudangan	-27,90	1,14	56,45	9,63	5,46
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	- 3,70	3,55	11,83	12,13	7,29
J	Informasi dan Komunikasi	18,95	11,37	5,98	10,35	9,92
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,21	1,94	0,52	5,27	5,16
L	Real Estat	-0,06	0,49	4,66	7,02	6,34
M,N	Jasa Perusahaan	- 5,73	6,24	6,25	7,34	9,10
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	- 0,67	-0,56	2,62	5,42	8,12
P	Jasa Pendidikan	- 1,30	1,07	2,23	6,23	6,41
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,19	1,99	2,91	5,95	6,44
R,S,T,U	Jasa Lainnya	- 7,60	1,17	11,33	7,97	6,32
Laju PDRB (ADHK) (%)		-0,23	2,62	5,25	5,01	5,06

Sumber: BPS Kabupaten Demak (2025)

Dari sisi produksi, membaiknya kinerja perekonomian terjadi di 16 lapangan usaha. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang bernilai positif pada 16 lapangan usaha tersebut. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 9,92%. Lapangan usaha selanjutnya yang memiliki pertumbuhan tinggi yaitu Konstruksi, yaitu tumbuh mencapai 9,53%. Kemudian, lapangan usaha Jasa Perusahaan mengalami pertumbuhan sekitar 9,10%.

Struktur ekonomi Kabupaten Demak selama lima tahun terakhir tidak berubah, didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, yaitu: Industri Pengolahan, Pertanian Kehutanan dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Konstruksi, dan Jasa Pendidikan. Hal ini dapat

dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Demak.

Laju pertumbuhan ekonomi dapat pula dihitung berdasarkan PDRB menurut pengeluaran. Komponen yang digunakan dalam memperoleh nilai PDRB menurut pengeluaran adalah: pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT), pengeluaran konsumsi akhir lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (PKLNPRRT), pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PKP), pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTB), perubahan inventori dan ekspor neto. Pendekatan pengeluaran sejalan dengan perubahan struktur ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membeli barang dan jasa, demikian pula sebaliknya.

Laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan pengeluaran sejalan dengan LPE berdasarkan PDRB menurut lapangan usaha. Jika dilihat dari jenis pengeluarannya, pertumbuhan ekonomi tertinggi berada pada jenis pengeluaran konsumsi LNPRT yang mencapai 14,29 persen.

Tabel II.27
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Demak
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Persen)
Tahun 2020-2024

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-1,22	1,97	5,43	6,26	5,03
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-2,75	2,37	4,63	7,02	14,29
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,82	0,90	0,52	2,80	3,88
Pembentukan Modal Tetap Bruto	9,77	3,98	2,65	7,90	7,10
LPE	-0,23	2,62	5,25	5,01	5,06

Sumber: BPS Kabupaten Demak (2025)

B. Tingkat Kemiskinan

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah yaitu ketika pemerintah mampu menanggulangi masalah kemiskinan sebagai perwujudan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Terdapat berbagai pendekatan dalam mendefinisikan kemiskinan. BPS mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, yang kemudian batasan dari sisi pengeluaran ini disebut sebagai Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan. Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 (tiga) indikator kemiskinan yang digunakan yaitu:

1. Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan;
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan, yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan;
3. Indeks Keparahan Kemiskinan, yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Kondisi persentase penduduk miskin di Kabupaten Demak fluktuatif dari tahun 2020-2024, di mana pada tahun 2020 meningkat sebesar 0,68 poin dengan capaian jumlah penduduk miskin yang meningkat menjadi 146.870 jiwa sebagai akibat dari wabah pandemi yang memiliki dampak terhadap menurunnya perekonomian. Dampak negatif tersebut berlanjut di tahun 2021 dengan capaian tingkat kemiskinan sebesar 12,92% dan jumlah penduduk miskin sebanyak 151.740 jiwa. Dengan adanya penanganan dan pemulihan pandemi Covid-19, maka kemiskinan berangsur menurun di tahun 2022 dan 2023 dengan masing-masing tingkat kemiskinan mencapai 12,09% dan 12,01%. Dan pada tahun 2024 berhasil menurun menjadi 11,89%.

Tabel II.28
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan
Kabupaten Demak tahun 2020–2024

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Garis kemiskinan (Rp)
2020	1.173.592	146.870	12,54	432.533
2021	1.198.965	151.740	12,92	445.176
2022	1.227.634	143.010	12,09	471.818
2023	1.240.510	143.260	12,01	511.145
2024	1.252.970	142.910	11,89	535.134

Sumber: BPS Kabupaten Demak (2025)

Kemiskinan merupakan salah satu tujuan utama dalam *Sustainable Development Goals* (Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan), di mana beberapa program yang diupayakan Pemerintah Kabupaten Demak untuk mengentaskan kemiskinan di antaranya: pemberian BASIMDA SD-SMP dan Bansos untuk RTM/Disabilitas/Lansia. Diharapkan berbagai program pengentasan kemiskinan ini mampu menurunkan angka kemiskinan Kabupaten Demak di setiap periode pembangunan.

Dalam menganalisis kemiskinan, terdapat pula ukuran kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Adapun kondisi indeks

Kabupaten/Kota, sehingga memastikan kembali strategi penanggulangan kemiskinan sudah mengelaborasi strategi yang tertuang pada kedua peraturan tersebut serta disesuaikan dengan fokus pentapahan pembangunan per tahunnya. Upaya penanggulangan kemiskinan tersebut juga didukung oleh perbaikan tata kelola dan basis data serta fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan secara kolaboratif dan multisektor.

Di Indonesia, kemiskinan ekstrem ditentukan berdasarkan kriteria garis kemiskinan ekstrem yang merujuk pada standar global Bank Dunia sebesar USD 1,90 per kapita per hari (PPP). Namun, pengukuran ini juga dipadukan dengan pendekatan multidimensi melalui data mikro seperti tingkat pendidikan kepala keluarga, kondisi rumah, kepemilikan aset, dan keterpaduan program bantuan sosial. Upaya pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas nasional dan masuk dalam agenda percepatan penghapusan kemiskinan pada berbagai level pemerintahan.

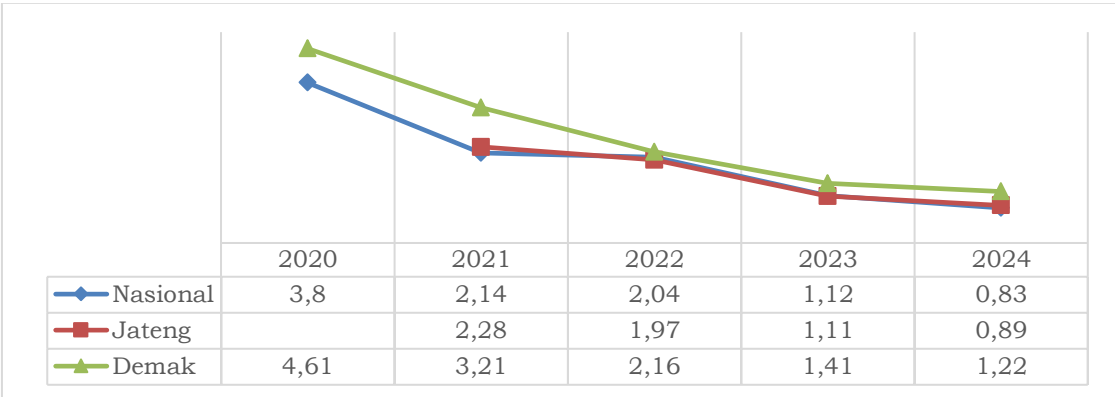
Pada tahun 2024, Kabupaten Demak termasuk salah satu Kabupaten/Kota dengan kemiskinan ekstrem sebesar 1,22 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 142.910 ribu jiwa (11,89 persen). Meskipun menurun dari tahun 2023, angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Demak masih berada di bawah capaian nasional (0,83 persen) dan provinsi (0,89 persen). Dengan demikian dibutuhkan keseriusan dan perbaikan kinerja pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Selengkapnya capaian kemiskinan ekstrem Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024:

Tabel II. 29
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Demak Tahun 2024

No.	Keterangan	Satuan	Demak	Jateng	Nasional
1	Tingkat Kemiskinan	%	11,89	10,77	9,36
2	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Jiwa	142,91	3.396,34	24.060
3	Tingkat Kemiskinan Ekstrem	%	1,22	0,89	0,83

Sumber: BPS Kab. Demak (2024), BPS Prov. Jateng (2024), BPS (2024)

Gambar II.16
Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 – 2024



Sumber: BPS Kab. Demak (2024), BPS Prov. Jateng (2024), BPS (2024)

Tabel II.30

Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Demak

Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angkatan kerja	orang	619.892	595.111	608.754	671.407	695.174
2	Bukan angkatan kerja	orang	268.280	303.462	300.203	277.490	265.513
3	Penduduk usia kerja	orang	888.172	898.573	908.957	948.897	960.687
4	Penduduk bekerja	orang	574.602	563.708	571.566	635.271	662.147
5	Jumlah Pengangguran	orang	45.290	31.403	37.188	36.136	33.027
6	Jumlah Penduduk	orang	1.200,87	1.214,42	1.227,63	1.240,51	1.252,97
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69,79	66,23	66,97	70,76	72,36
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,31	5,28	6,11	5,38	4,75

Sumber: Dinnakerind & BPS Kabupaten Demak (2025)

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dapat dihitung dengan mempersentasekan jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. Pada tahun 2024, TPAK Kabupaten Demak mencapai 72,36 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Demak pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 4,75 persen jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 5,38 persen. Sebagai tindaklanjut, Pemerintah Kabupaten Demak perlu mengevaluasi kinerjanya dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran terbuka, juga menurunkan potensi kerawanan sosial akibat pengangguran.

Adapun persentase penduduk bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada tahun 2021 hingga 2024 didominasi oleh penduduk yang berpendidikan SD ke Bawah, termasuk di dalamnya tidak bersekolah. Bahkan persentase terendah pendidikan tenaga kerja adalah penduduk yang berpendidikan diploma/universitas di mana pada tahun 2024 hanya sebesar 8,60 persen. Kondisi ini tentu menjadi perhatian mengingat kualitas tenaga kerja sangat menentukan kesejahteraan masyarakat.

Tabel II.31

Persentase Penduduk Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Demak Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
SD Ke Bawah	41,16	39,99	39,36	39,11	36,43
SMP	23,29	20,95	21,58	24,82	20,27
SMA	21,10	21,71	21,58	21,05	23,88
SMK	7,31	8,63	8,34	6,31	10,82
Diploma dan Universitas	7,14	8,72	9,13	8,71	8,60

Sumber: BPS Kabupaten Demak (2025)



Beberapa permasalahan dalam melihat ketenagakerjaan Demak dikarenakan masih rendahnya kualitas dan produktivitas pendidikan tenaga kerja dan pekerja, penempatan tenaga kerja di dalam negeri dan TKI ke luar negeri belum dapat dilakukan secara optimal, masih adanya angka pengangguran, terbatasnya kesempatan kerja, relatif rendahnya perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja/pekerja, serta relatif kurangnya peran dan fungsi lembaga ketenagakerjaan. Kualitas dan kompetensi angkatan kerja Kabupaten Demak masih belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan dunia kerja, ditandai dengan terbatasnya keterampilan vokasional, rendahnya akses pemagangan, serta belum optimalnya peran lembaga pelatihan, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penempatan tenaga kerja.

E. Indeks Gini

Selain perolehan PDRB dan inflasi dalam satu daerah, perlu diketahui juga pemerataan pendapatan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat. Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sebaliknya, ketimpangan sempurna ditandai dengan nilai Indeks Gini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- $0,00 < G < 0,35$: pemerataan tinggi / ketimpangan rendah;
- $0,35 < G < 0,50$: pemerataan / ketimpangan sedang;
- $G > 0,50$: pemerataan rendah / ketimpangan tinggi.

Kabupaten Demak telah melakukan upaya untuk mengurangi disparitas atau ketimpangan ekonomi di antaranya dengan meningkatkan investasi, mendorong UMKM, membangun infrastruktur seperti kawasan permukiman, sarana prasarana umum, irigasi, dan jalan penghubung. Nilai Indeks Gini Kabupaten Demak tahun 2024 sebesar 0,314 atau dalam kategori merata. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Demak cukup rendah sehingga pemerataan pembangunan sudah cukup terlihat. Meskipun begitu, capaian tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023 sehingga perlu perhatian agar tidak semakin tinggi ketimpangan kesejahteraan masyarakat Demak.

Gambar II.18



0,283

F. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang menunjukkan aspek-aspek peluang hidup panjang dan sehat, mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta hidup layak. Indeks tersebut dapat disederhanakan menjadi tiga dimensi, yaitu indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran. Indeks kesehatan dicerminkan melalui indikator Usia Harapan Hidup Saat Lahir (UHH). Indeks pendidikan dikonstruksi dari indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), sedangkan indeks pengeluaran digambarkan melalui indikator pengeluaran per kapita.

Tabel II.32

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,40	75,46	75,52	75,60	75,79
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,31	13,32	13,33	13,34	13,36
3	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,71	7,86	8,10	8,27	8,28
4	Pengeluaran per kapita	Rp.000	10.128	10.248	10.698	11.166	11.591
5	IPM	Angka	72,22	72,57	73,36	74,07	74,57

Sumber: BPS Kab. Demak (2025)

Secara nasional, IPM terus naik dari tahun ke tahun, tak terkecuali Kabupaten Demak yang meningkat hingga mencapai 74,57 pada tahun 2024. Tahun 2020, Posisi IPM Kabupaten Demak berhasil di atas Provinsi dan di atas capaian Nasional. Kabupaten Demak berada di peringkat ke-15 di tingkat provinsi. Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar, Demak masih berada di bawah rata-rata. Hal ini dikarenakan pembangunan kualitas SDM di Kabupaten Demak masih terkendala khususnya di bidang pendidikan, kesehatan maupun perekonomian masyarakat.

2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

Angka Harapan Hidup yang merupakan indikasi dari derajat kesehatan masyarakat, juga mengalami kenaikan di mana pada tahun 2024 mencapai 75,79 tahun. Capaian tersebut menunjukkan bahwa bayi yang dilahirkan pada tahun 2024 mempunyai harapan hidup mencapai umur 75-76 tahun, meningkat dibandingkan tahun 2023. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan menjadi indikator penentu Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) di Kabupaten Demak.

Keberhasilan pembangunan kesehatan di Kabupaten Demak ditunjukkan oleh tren penurunan jumlah kasus kematian ibu selama lima tahun terakhir, dari 18 kasus pada tahun 2021 menjadi 8 kasus pada tahun 2024. Secara proporsional, Angka Kematian Ibu (AKI) juga mengalami penurunan signifikan, dari 63,88 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2023 menjadi 48,50 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan ibu selama masa kehamilan dan persalinan. Namun demikian, tantangan masih dihadapi, khususnya terkait peningkatan Angka Kematian Bayi (AKB) yang naik dari 3,41 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2023 menjadi 7,46 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan intervensi kesehatan pada masa neonatal dan perbaikan layanan kesehatan dasar bagi bayi baru lahir.

Capaian Angka Kematian Balita (AKABa) di Kabupaten Demak pada tahun 2024 meningkat menjadi 6,12 per 1000 kelahiran hidup dari 5,6 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2023. Peningkatan angka tersebut disebabkan antara lain masih ditemukan kasus kekurangan gizi, stunting, dan penyakit menular. Pada tahun 2024 masih terdapat 3,82 % balita dengan gizi kurang, 0,05% balita dengan gizi buruk.

Selama kurun waktu 5 tahun, prevalensi stunting di Kabupaten Demak mengalami penurunan yang sangat signifikan. Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Demak sebesar 10,0 %, dari kondisi tahun 2020 yang mencapai 35,76% berdasarkan (Studi Status Gizi Balita di Indonesia (SSGBI) 2019).

Meskipun demikian, pemerintah Kabupaten Demak terus berupaya agar kasus stunting tidak ada lagi di wilayah Kabupaten Demak. Dalam upaya percepatan penanggulangan stunting, sejak tahun 2023 pemerintah Kabupaten Demak telah menetapkan lokasi prioritas intervensi program dan kegiatan. Pada tahun 2023 telah ditetapkan sebanyak 34 desa lokasi prioritas penanggulangan stunting yang kemudian berkurang menjadi 24 desa pada tahun 2025. Berkurangnya desa lokasi prioritas disebabkan karena berkurangnya kasus stunting di Kabupaten Demak.

Tabel II.33
Indikator Kesehatan Kabupaten Demak
Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Usia Harapan Hidup (AHH)	Tahun	75,4	75,46	75,52	75,6	75,79
Prevalensi Stunting	%	35,76*	25,5*	16,20*	9,5	10,0
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	%	4,9	3,8	3,73	3,41	7,46
Angka Kematian Balita (AKABa) per 1000 kelahiran hidup	%	5.8	4,5	4,76	5,6	6,12
Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	%	57,59	91,19	67,3	63,88	48,50
Jumlah Kasus Kematian Ibu (AKI)	Kasus	12	18	13	12	8

Sumber: Dinkesda Kabupaten Demak (2025)

*SSGI

Tabel II.34
Jumlah Ketersediaan Tempat Tidur di Rumah Sakit
di Kabupaten Demak 2024

No	Nama Rumah Sakit	Jumlah Tempat Tidur
1	RSUD Sunan Kalijaga Demak	298
2	RSUD Sultan Fattah Demak	168
3	RSI NU Demak	116
4	RS Pelita Augrah	163
5	RS Hj Fatimmah Sulhan PKU Muhammadiyah	50
6	Charlie Hospital	105
Jumlah		900

Sumber: Dinkesda Kabupaten Demak (2025)

Tabel II.35 .
Jumlah Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Demak 2024

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
Rumah Sakit		
1	Rumah Sakit Umum	6
2	Rumah Sakit Khusus	0
Puskesmas Dan Jaringannya		
1	Puskesmas Rawat Inap	15
	- Jumlah Tempat Tidur	144
2	Puskesmas Non Rawat Inap	12
3	Puskesmas Keliling	56
4	Puskesmas Pembantu	45
Sarana Pelayanan Lain		
1	Klinik Pratama	56
2	Klinik Utama	1
3	Tempat Praktik Mandiri Dokter	55
4	Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi	11
5	Tempat Praktik Mandiri Dokter Spesialis	0
6	Tempat Praktik Mandiri Bidan	414
7	Tempat Praktk Mandiri Perawat	11
8	Griya Sehat	0
9	Panti Sehat	0
10	Unit Transfusi Darah	1
11	Laboratorium Kesehatan	2

Sumber: Dinkesda Kabupaten Demak (2025)

Pada tahun 2024, sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Demak menunjukkan kapasitas yang cukup memadai dengan keberadaan 6 rumah sakit umum yang menyediakan total 900 tempat tidur, termasuk RSUD Sunan Kalijaga sebagai rumah sakit dengan kapasitas terbesar yakni 298 tempat tidur. Selain rumah sakit, terdapat pula 15 puskesmas rawat inap dengan total 144 tempat tidur, 12 puskesmas non rawat inap, serta jaringan layanan seperti puskesmas keliling (56 unit) dan puskesmas pembantu (45 unit). Sarana pelayanan kesehatan lainnya juga cukup beragam, termasuk 56 klinik pratama, 55 praktik mandiri dokter, dan 414 praktik mandiri bidan. Data ini mencerminkan upaya Pemerintah Kabupaten Demak dalam memperluas akses dan ketersediaan layanan kesehatan yang menjangkau masyarakat hingga ke tingkat kecamatan dan desa.

Tabel II.36
Rasio Fasilitas Layanan Kesehatan Di Kabupaten Demak 2024

Nama Faskes	Jumlah	Jumlah penduduk Tahun 2024	rasio per 100000 penduduk
Puskesmas	27	1.254.204	2,153
Rumah Sakit	6	1.254.204	0,478
Klinik Swasta	57	1.254.204	4,545

Sumber: Dinkesda Kabupaten Demak (2025)

Kapasitas daya tampung rumah sakit rujukan dari tahun 2020 hingga 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, rasio daya tampung berada pada angka 0,600 per 1.000 penduduk, kemudian meningkat 0,930 pada tahun 2024 meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022. Secara umum, tren ini menunjukkan adanya peningkatan aksesibilitas dan kapasitas pelayanan kesehatan rujukan, yang mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas infrastruktur kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

Tabel II.37
Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan (per 1.000 Penduduk)

2020	2021	2022	2023	2024
0,600	0,816	0,752	0,848	0,930

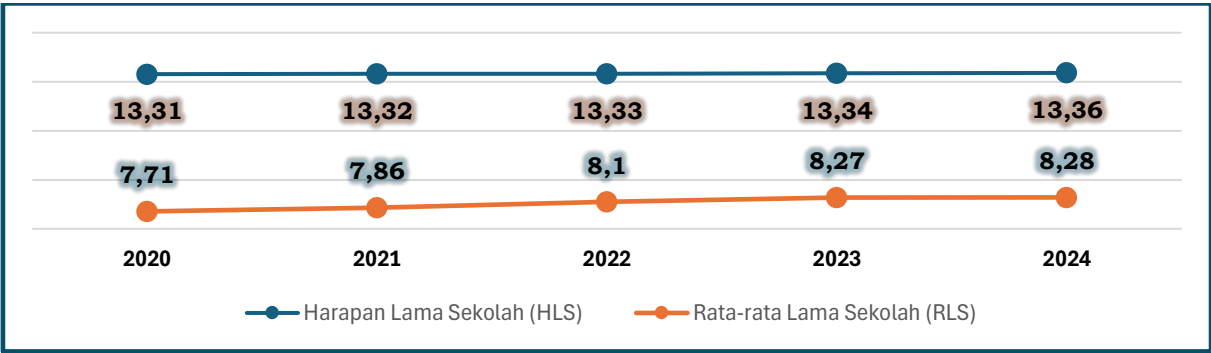
Sumber: Dinkesda Kabupaten Demak (2025)

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang dapat mencerminkan kualitas sumber daya manusia, khususnya dari segi penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Tingkat pendidikan yang dicapai oleh masyarakat menjadi tolok ukur sejauh mana suatu daerah mampu membangun kapasitas dan kompetensi warganya untuk menghadapi tantangan perkembangan zaman. Dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pendidikan diwakili oleh dua indikator utama, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) yang menunjukkan estimasi lamanya waktu yang diharapkan seseorang dapat

mengenyam pendidikan formal, serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang menggambarkan capaian aktual lamanya pendidikan yang telah diselesaikan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peluang dan capaian pendidikan di suatu wilayah, sekaligus mencerminkan kualitas investasi sumber daya manusia di masa kini dan masa mendatang. Data rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Kabupaten Demak Adalah sebagai berikut:

Gambar II.19
Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah (Tahun)
Kabupaten Demak Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kab. Demak, (2025)

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak usia 7 tahun ke atas di masa mendatang. Angka harapan lama sekolah (HLS) selama kurun waktu lima tahun terakhir meningkat setiap tahunnya pada kisaran 13 tahun, artinya anak usia 7 tahun berpeluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus SMA dan D1. Sementara itu, angka harapan lama sekolah (HLS) tahun 2024 sebesar 13,36 dan meningkat 0,02 poin dari tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Demak terus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi kehidupan secara luas dan jangka panjang. Namun, persepsi masyarakat tentang pendidikan yang diartikan hanya sebatas baca tulis dan hitung menjadi kendala yang sering ditemukan, kondisi ekonomi orang tua menjadi kendala selanjutnya.

Peran pemerintah guna meningkatkan angka harapan lama sekolah di antaranya: program Bantuan Siswa Miskin Daerah (BASIMDA), dana Bantuan operasional sekolah (BOS), Beasiswa *Ayo Sekolah Kembali*, Program Indonesia Pintar (PIP) dan program pemerintah lainnya yang mampu mengurangi beban biaya sekolah yang harus ditanggung orang tua siswa. Pemerintah Kabupaten Demak juga mengoptimalkan peran pendidikan kesetaraan dalam melayani pendidikan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang tidak mau sekolah di sekolah formal dan bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak untuk mengoptimalkan layanan pendidikan muadalarah bagi pondok pesantren yang tidak memiliki sekolah formal/tidak membolehkan santrinya tidak bersekolah formal.

Kondisi pembangunan pada aspek pendidikan dapat pula dilihat dari indikator **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)** penduduk di wilayah tersebut. RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. RLS digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam mengenyam pendidikan formal. RLS Kabupaten Demak tahun 2024 berada di angka 8,28 tahun atau meningkat 0,01 poin dari tahun sebelumnya, artinya rata-rata penduduk Demak usia di atas 25 tahun berhenti bersekolah formal di pertengahan kelas 8, atau kelas 2 SMP sederajat.

Kendala tertinggi capaian RLS adalah kemiskinan, sementara itu upaya pemerintah sejauh ini dalam meningkatkan RLS di antaranya pemberian bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH) Bantuan Siswa Miskin Daerah (BASIMDA) untuk pelajar dari keluarga tidak mampu, pendidikan gratis bagi warga miskin berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk Jenjang DIKDAS, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) yaitu BOP PAUD dan BOP Kesetaraan untuk Jenjang PAUD dan DIKMAS, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik melibatkan pihak ketiga (BAZDA, CSR) dalam pemberian bantuan pendidikan serta menerapkan gerakan orang tua asuh (GNOTA).

Literasi pendidikan merujuk pada kemampuan individu dalam memahami, mengevaluasi, menggunakan, dan berinteraksi dengan berbagai bentuk informasi yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam lingkungan pendidikan. Sedangkan **numerasi** adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan konsep serta keterampilan matematika dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Ini melibatkan lebih dari sekadar kemampuan dasar untuk menghitung. Pengembangan literasi maupun numerasi pendidikan yang kuat sangat penting untuk mempersiapkan individu menghadapi tantangan dunia modern dan berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Adapun pencapaian literasi maupun numerasi di Kabupaten Demak sudah cukup baik dan meningkat signifikan di mana capaian pada tahun 2024 pada literasi membaca SD/Sederajat mencapai 85,53; literasi membaca jenjang SMP/ sederajat sebesar 78,62; numerasi SD/ sederajat sebesar 78,82; dan numerasi SMP/ sederajat sebesar 74,42.

Tabel II.38
Literasi dan Numerasi Pendidikan Kabupaten Demak
Tahun 2022-2024

Indikator	2022	2023	2024
a. Literasi Membaca SD/Sederajat	56,36	65,39	85,53
b. Literasi Membaca SMP/Sederajat	64,02	70,72	78,62
c. Numerasi SD/Sederajat	43,72	53,68	78,82
d. Numerasi SMP/Sederajat	54,84	62,39	74,42

Sumber: Dindikbud Kabupaten Demak (2025)



Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Perpustakaan sebagai institusi layanan publik yang wajib memberikan layanan perpustakaan pada masyarakat, upaya membangun kualitas manusia budaya literasi perlu dijadikan fondasi yang kokoh bagi terwujudnya masyarakat berkualitas dan sejahtera. Literasi adalah bentuk *cognitive skill* memungkinkan manusia untuk mengidentifikasi, mengerti, memahami dan mencipta yang diperoleh dari kegiatan membaca yang kemudian ditransformasikan dalam kegiatan yang produktif yang memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan kesejahteraan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak sebagai *leading sector* pengembangan dan pembinaan dan kegemaran membaca diamanatkan untuk menjalankan sejumlah program terkait dengan pengembangan budaya literasi.

Nilai indeks pembangunan literasi masyarakat pada tahun 2024 adalah 64,88 atau meningkat 14,08 dari tahun 2023 yang mencapai angka 50,8. Meningkatnya angka indeks pembangunan literasi masyarakat tidak terlepas dari berbagai upaya pemerintah Kabupaten Demak, antara lain: adanya aplikasi iDemak (Perpustakaan digital), membuat taman baca integratif, mengadakan lomba minat baca (lomba pengunjung dan peminjaman tergiat), bangun gerakan giat membaca (melalui inklusi sosial), membentuk forum dan komunitas literasi dan mengadakan kegiatan inklusi sosial (seperti: pelatihan menulis, pelatihan membuat kue nastar, lomba menggambar, pelatihan sulam pita, membatik dan pelatihan *make up*).

Literasi dapat meningkatkan pengetahuan, memperluas wawasan dan memperoleh informasi baru dengan harapan mampu diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Dalam rangka menumbuhkan kembangkan budaya literasi, saat ini Dinperpusar telah melakukan kerja sama dengan perangkat daerah, di antaranya: Dindikbud mengenai peningkatan minat baca masyarakat melalui Taman Baca Masyarakat; dengan Dinpermades P2KB mengenai peningkatan sumber daya ekonomi masyarakat desa melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dan peningkatan kualitas pengelola perpustakaan desa serta dengan Dindagkop UKM mengenai pelatihan keterampilan usaha.

Nilai kegemaran membaca masyarakat adalah tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu. Pentingnya budaya kegemaran membaca



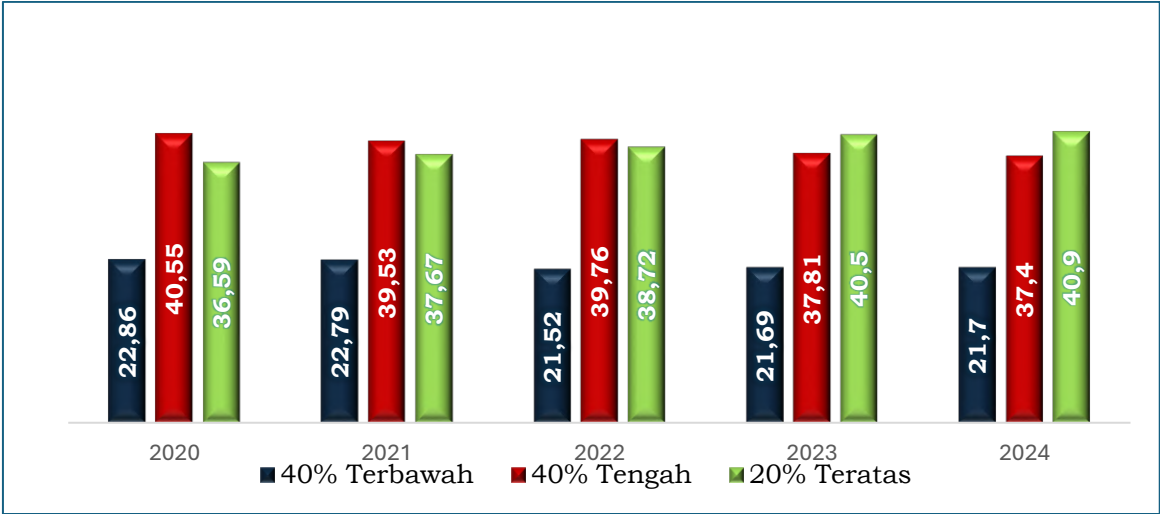
bagi masyarakat adalah tolok ukur masyarakat berpengetahuan (literat), maka pembudayaan kegemaran membaca terus didorong dan diupayakan secara berkelanjutan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat sesuai dengan pasal 48 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Metodologi yang digunakan adalah metode survei dengan pengukuran dimensi utama di antaranya frekuensi membaca, durasi membaca dan jumlah buku yang dibaca. Pada Tahun 2024 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat mencapai 75,26 yang mengalami peningkatan dari Tahun 2023 yang mencapai angka 66,72.

Dalam meningkatkan minat baca masyarakat, Pemerintah Kabupaten Demak memiliki program perpustakaan keliling dan meminjamkan buku secara gratis, lomba tentang menulis buku, menyediakan taman pojok baca di pusat keramaian masyarakat, dan melaksanakan layanan perpustakaan pada kegiatan *Car Free Day* di hari minggu.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Indikator lain yang dapat menunjukkan ketimpangan pendapatan adalah indikator pemerataan pendapatan versi Bank Dunia yang fokus menilai ketimpangan berdasarkan kelompok pendapatan dengan pendapatan 40 persen terendah. Semakin besar persentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok tersebut, maka distribusi pendapatan penduduknya semakin merata. Terlihat distribusi masyarakat yang memiliki pendapatan 20 persen teratas mengalami kenaikan sedangkan masyarakat dengan pendapatan 40 persen terbawah mengalami penurunan. Berdasarkan grafik pemerataan pendapatan versi Bank Dunia di Kabupaten Demak tahun 2020–2023, terlihat adanya kesenjangan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Kelompok 40% terbawah memiliki porsi pendapatan yang relatif kecil dan cenderung menurun dari 22,86% pada 2020 menjadi 21,69% pada 2023. Sebaliknya, kelompok 20% teratas justru mengalami peningkatan porsi pendapatan, dari 36,59% pada 2020 menjadi 40,50% pada 2023, yang menandakan terjadinya konsentrasi pendapatan pada kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Sementara itu, kelompok 40% menengah menunjukkan tren penurunan porsi pendapatan dari 40,55% pada 2020 menjadi 37,81% pada 2023. Pola ini mengindikasikan bahwa dalam empat tahun terakhir, kesenjangan pendapatan di Kabupaten Demak semakin melebar, dengan distribusi yang semakin berpihak pada kelompok berpendapatan tinggi, sedangkan kelompok menengah dan bawah mengalami penurunan proporsi pendapatan. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mendorong pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan.

Gambar II.20
Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia Kabupaten Demak
Tahun 2020-2024

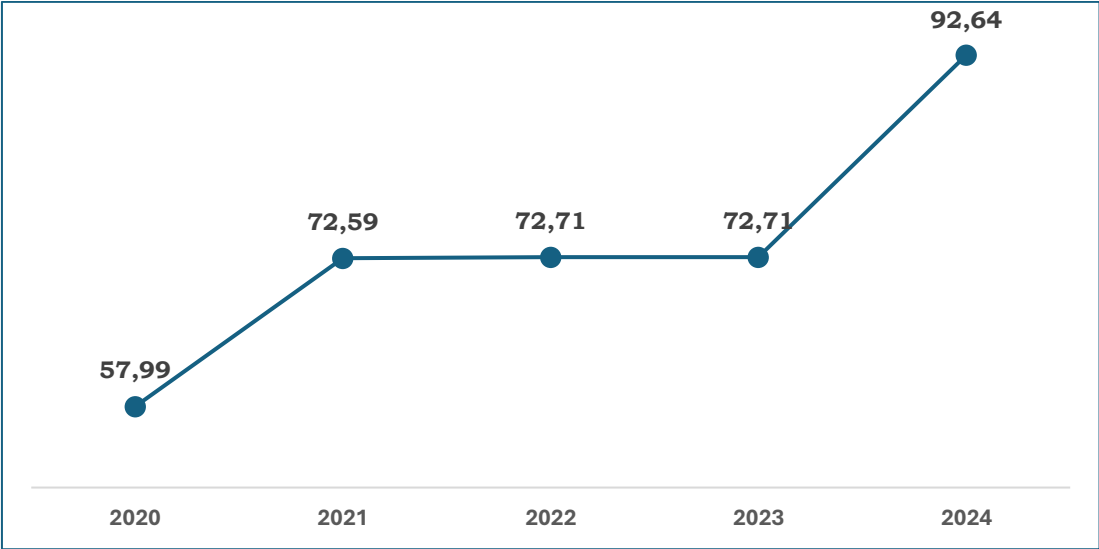


Sumber: BPS Kabupaten Demak (2025)

Tahun 2024, Kabupaten Demak mengalami dampak dari kejadian banjir besar akibat jebolnya tanggul di beberapa titik. Selain itu Kabupaten Demak juga mengalami kejadian bencana alam seperti kekeringan, kebakaran, angin puting beliung. Hal itu menyebabkan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) meningkat. Hal tersebut telah menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Demak untuk terus mengendalikan dampak bencana yang terjadi. Upaya – upaya pemerintah yang dilakukan Kabupaten Demak dalam meningkatkan daya jual beli masyarakat melalui program perlindungan dan jaminan sosial di antaranya:

- a. Program keluarga harapan;
- b. Program PBI JKN;
- c. Program Sembako;
- d. Bansos DBHCHT;
- e. Bansos Premi Asuransi;
- f. Bansos Bantuan Kematian DTKS;
- g. Program Pemberdayaan Ekonomi (Kube dan UEP);
- h. Program Rehabilitasi Sosial melalui pemberian bantuan sosial maupun pendampingan/pelatihan/pembinaan bagi PPKS;
- i. Program SOSH bagi Anak terlantar;
- j. Program Bantuan Sosial bagi korban bencana;
- k. Bantuan Sosial Permakanan, Sandang dan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Tuna Sosial.

Gambar II.21
Persentase Pelaku Usaha yang Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan
Kabupaten Demak Tahun 2020-2024



Sumber: Dinnakerind Kabupaten Demak, (2025)

Salah satu jaminan sosial ketenagakerjaan adalah BPJS Ketenagakerjaan yang menjamin bagi para tenaga kerja dalam pelaksanaan aktivitas pekerjaannya yang mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Adapun pelaku usaha yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Demak meningkat hingga mencapai 92,64 persen di tahun 2024 yang mengindikasikan meningkatnya jaminan sosial terhadap tenaga kerja dan kesadaran pada pelaku usaha untuk mendaftarkan tenaga kerjanya di BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Demak juga memiliki Program PEJANTAN TANGGUH (perlindungan tenaga kerja rentan yang tanggap dan menyeluruh) yaitu perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan pendanaan melalui APBD, CSR, dan BPJS Ketenagakerjaan.

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Kesejahteraan sosial budaya merujuk pada kondisi kesejahteraan yang mencakup aspek-aspek sosial dan budaya dalam suatu masyarakat. Kondisi ini melibatkan kesejahteraan dan pemberdayaan individu dalam konteks norma-norma, nilai-nilai, dan struktur sosial budaya. Pembangunan jangka menengah daerah tentu saja menjadi salah satu titik vital bagi perwujudan harmonisasi kesejahteraan masyarakat. Pendekatan kesejahteraan sosial budaya menekankan pentingnya memahami dan mempertimbangkan faktor-faktor budaya dalam merancang kebijakan dan program-program kesejahteraan. Ini mencerminkan pengakuan bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial dan budaya.

Arah pembangunan ini menjelaskan tentang penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral dan modal dasar pembangunan serta pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter serta memperteguh jati diri bangsa. Kabupaten Demak merupakan kabupaten dengan peninggalan sejarah budaya yang termasyhur di Nusantara. Sebagai pusat penyebaran Agama Islam pada masa lalu, Kabupaten Demak yang dahulu merupakan wilayah Kerajaan Demak memiliki banyak warisan seni dan budaya. Dalam upaya pelestarian warisan budaya, diselenggarakan pertunjukan seni dan budaya.

Kabupaten Demak secara konsisten menyelenggarakan festival seni dan budaya, salah satunya adalah grebek besar. Pada tahun 2020 terdapat 20 festival seni dan budaya yang diselenggarakan, pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 hanya menyelenggarakan 5 festival seni dan budaya. Hal ini terjadi akibat diberlakukannya pembatasan penyelenggaraan kegiatan akibat pandemi Covid-19 agar tidak menimbulkan kerumunan. Penyelenggaraan pertunjukan seni budaya kemudian mulai dialihkan menggunakan media elektronik dan *online* seperti *Youtube* ataupun bekerja sama dengan TVRI.

Sementara itu, gedung untuk menyalurkan ekspresi kesenian di Kabupaten Demak masih terbatas. Pemerintah Kabupaten Demak berhasil membangun panggung kesenian yang berlokasi di kawasan Tembiring pada tahun 2020. Dengan adanya panggung kesenian, harapannya akan lebih banyak seniman yang bermunculan dan mengekspresikan karya-karyanya.

Pembangunan kebudayaan merupakan proses yang bertujuan untuk memperkuat, melestarikan, dan mengembangkan warisan budaya suatu masyarakat. Proses ini melibatkan berbagai upaya untuk mempertahankan nilai-nilai, tradisi, seni, dan praktik budaya, serta memastikan bahwa budaya tersebut dapat terus hidup dan berkembang di tengah perubahan zaman. Pencapaian pembangunan kebudayaan di Kabupaten Demak terus ditingkatkan sebagai upaya menjaga warisan budaya bangsa maupun lokal. Adapun penanaman kecintaan dan penjagaan terhadap budaya dimulai sejak masa sekolah di mana sebanyak 80,23% satuan pendidikan di tahun 2023 memiliki guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan. Selain itu dari sisi objek budaya, maka sebanyak 18,15% Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) telah dilestarikan dan pengunjung tempat bersejarah juga meningkat hingga mencapai lebih dari dua juta orang pada tahun 2023, meskipun sempat menurun di tahun 2020 dan 2021 sebagai dampak Pandemi Covid-19 termasuk penurunan jumlah wisatawan mancanegara pada tahun yang sama. Dari sisi seni budaya juga terlihat adanya kenaikan pada kelompok kesenian yang aktif terlibat atau mengadakan pertunjukan kesenian dan kebudayaan dalam satu tahun terakhir (2023) hingga sebanyak 18,25%.

Kondisi kesetaraan gender dapat dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. Pemberdayaan perempuan dilaksanakan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan di Kabupaten Demak. Selain IPG, hasil/*outcome* pembangunan berperspektif gender juga dilihat pada capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Dalam mengukur capaian pemberdayaan gender, Kabupaten Demak menggunakan sebuah indeks komposit yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG dan IDG merupakan dua ukuran yang selalu digunakan untuk menilai keberdayaan perempuan dan kontribusi perubahan terhadap perempuan.

Berdasarkan data dari Dinsos P2PA, bahwa realisasi IPG tahun 2021 sama dengan realisasi tahun 2022, hal ini disebabkan data masih dalam proses BPS Provinsi Jawa Tengah. Realisasi IPG tahun 2022 mencapai 91,30 mengalami kenaikan dibanding tahun 2020. Dan pada tahun 2024 IPG mencapai 91,25 Kabupaten Demak telah menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hal tersebut didukung dengan capaian IPG tahun 2020 hampir mendekati angkut 100%, yaitu mencapai 90,90%. Artinya kualitas pemberdayaan manusia terpilah perempuan dan laki-laki di lihat dari gender dan sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi perempuan dan laki-laki hampir tidak ada kesenjangan.

Adapun pencapaian pemberdayaan gender di Kabupaten Demak mengalami kenaikan hingga mencapai 68,56 pada tahun 2023. Meskipun meningkat, namun secara umum capaian tersebut masih cukup rendah sehingga perlu adanya akselerasi dalam melaksanakan program pengarusutamaan gender di Kabupaten Demak secara komprehensif pada urusan pembangunan yang terkait.

Tabel II.40
Indikator Pembangunan Kesetaraan Gender Kabupaten Demak
Tahun 2020-2024

Tahun	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
2020	90,90	66,85	0,243
2021	91,16	66,83	0,453
2022	91,30	66,83	0,390
2023	91,17	68,56	0,244
2024	91,25	66,22	0,326

Sumber: BPS dan Dinsos P2PA Kabupaten Demak (2025)

Ketimpangan gender adalah perbedaan perlakuan, kesempatan, dan hak antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan ketidakadilan dalam

berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan partisipasi politik. Ketimpangan ini sering kali disebabkan oleh norma-norma sosial, budaya, dan kebijakan yang mendiskriminasi satu gender terhadap gender lainnya. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengurangi ketimpangan gender tersebut agar terealisasi kesetaraan gender yang berkualitas. Adapun capaian tersebut dapat terlihat dari Indeks Ketimpangan Gender di mana Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Demak cukup fluktuatif dengan pola menurun hingga tahun 2024 sebesar 0,326.

Pemenuhan hak anak dimaksudkan untuk memastikan kebutuhan anak untuk tumbuh dan berkembang secara jasmani, rohani, dan sosial dapat diwujudkan, sehingga ketika anak memasuki usia dewasa akan dapat terus berkembang menjadi sumber daya pembangunan. Situasi demikian akan mewujudkan kehidupan anak yang berkualitas dan sejahtera sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Kajian tentang kemajuan kesejahteraan anak telah dilakukan dengan membuat indeks komposit kesejahteraan anak. Indeks Komposit Kesejahteraan Anak terdiri dari 5 dimensi yaitu: (a) Dimensi kelangsungan hidup (*survival*), (b) Hak perlindungan (*protection*), (c) Hak tumbuh kembang (*development*), (d) Hak berpartisipasi (*participation*), (e) Hak anak atas identitas.

Metode Perhitungan IKKA menggunakan 2 tahapan kehidupan yaitu balita (0-4 tahun) dan anak (5-17 tahun). Perhitungan IKKA dilakukan oleh Kementerian PP dan PA RI bekerja sama dengan BPS Pusat, serta perhitungan terbaru yang menjadi dasar data oleh Kementerian PP dan PA RI adalah IKKA tahun 2018, yang dipublikasikan pada tahun 2020 sehingga data yang digunakan untuk capaian tahun 2022 adalah capaian IKKA tahun 2018. Semakin tinggi nilai IKKA & dimensi, serta semakin mendekati angka 100 menunjukkan pemenuhan hak anak semakin baik. Nilai IKKA Kabupaten Demak tahun 2022 (2018) mencapai 68,36 (menengah), dengan peringkat nomor 32 dari 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, sementara angka capaian IKKA Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,92. Berdasarkan angka tersebut, pemerintah Kabupaten Demak perlu melakukan evaluasi dan perbaikan dalam mengambil keputusan untuk tahun selanjutnya.

Selanjutnya, jumlah kasus kekerasan terhadap anak tahun 2023 dilaporkan sebanyak 31 kasus dan sepenuhnya telah terselesaikan, atau mengalami penurunan sebanyak 12 kasus dari tahun 2022. Kasus KDRT dan kekerasan terhadap anak diibaratkan seperti gunung es, yaitu kasus yang terjadi di masyarakat jauh lebih banyak dari kasus yang dilaporkan. Jika dilihat dari sisi positif, meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Sebagai Kabupaten Layak Anak Tingkat Pratama, Pemerintah Kabupaten Demak

berusaha meningkatkan status menjadi tingkat utama melalui: advokasi, pembinaan dan mengadakan sosialisasi Kabupaten Layak Anak, serta perbaikan pelayanan kepada masyarakat dan mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam melaporkan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tabel II.41
Pemenuhan Perlindungan Anak
Kabupaten Demak Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Komposit Kesejahteraan Anak	Angka	68,36	68,36	68,36	69,36	69,36
2	Skor Kabupaten Layak Anak	Angka	500	575,01	697,4	673,67	684,56
3	Jumlah penyelesaian kekerasan terhadap anak	Kasus	38	39	43	31	48

Sumber: Dinsos P2PA Kabupaten Demak (2025)

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengenyam pendidikan tinggi dan mempunyai keahlian serta menguasai teknologi yang dibutuhkan di dunia kerja. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Di samping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah.

Salah satu indikator untuk melihat daya saing sumber daya manusia adalah angka ketergantungan (*dependency rasio*). Angka ketergantungan Kabupaten Demak pada tahun 2024 yaitu sebesar 44,14 yang berarti 100 orang usia produktif menanggung setidaknya 44 orang non produktif. Meskipun masih di bawah 50, tetapi beban tanggungan menunjukkan tren kenaikan pada tahun sebelumnya yaitu 43,76.

Tabel II.42
Penduduk Kabupaten Demak berdasarkan
Kelompok Umur dan Rasio Beban Tanggungan, Tahun 2020-2024

Tahun	Umur 0-14 Tahun	Umur 15-64 Tahun	Umur >65 Tahun	% Usia Produktif	% Usia Tidak Produktif	Rasio Beban Tanggungan
2024*	294.216	869.278	89.476	69,38	30,62	44,14
2023*	293.630	862.875	84.005	69,56	30,44	43,76
2022	290.639	854.421	78.166	69,85	30,15	43,16
2021	297.230	829.661	72.074	69,20	30,80	44,51
2020	299.262	826.943	66.507	69,33	30,67	44,23

Sumber: Dindukcapil Kab. Demak (2025)
*LFSP2020

Kondisi rasio beban tanggungan di bawah 50 ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Demak berada pada jendela Bonus Demografi di mana beban tanggungan usia produktif terhadap usia non produktif cukup rendah. Bonus Demografi ini secara umum merupakan isu yang mampu mengakselerasi pelaksanaan pembangunan jika dipersiapkan dengan baik. Namun bonus demografi bisa menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan baik. Sebagai salah satu contoh, kurangnya lapangan kerja dapat berakibat pada naiknya tingkat pengangguran. Selain itu, banyaknya penduduk usia produktif yang tidak dibarengi dengan naiknya kualitas sumber daya manusia dapat mengakibatkan tingkat perekonomian masyarakat tidak mengalami eskalasi atau terjebak dalam kondisi *middle income trap*.

2.1.3.2 IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Arah pembangunan dalam rangka mewujudkan iptek dan inovasi di Kabupaten Demak menjadi pendorong untuk tidak hanya menjaga, melainkan juga mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi dalam jangka menengah maupun panjang.

Angka tingkat partisipasi angkatan kerja memberikan gambaran tentang sejauh mana orang-orang di dalam rentang usia produktif aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Jika tingkat partisipasi angkatan kerja tinggi, ini dapat menunjukkan tingkat keterlibatan ekonomi yang kuat di antara penduduk usia produktif. Sebaliknya, tingkat yang rendah mungkin mencerminkan tantangan ekonomi atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi keterlibatan dalam angkatan kerja. Adapun penduduk yang merupakan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dapat dihitung dengan memersentasekan jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. Pada

Produktivitas tenaga kerja adalah kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang produksi. Metode penghitungan adalah nilai tambah dibagi dengan jumlah tenaga kerja yang dibayar. Salah satu isu strategis pemerintah

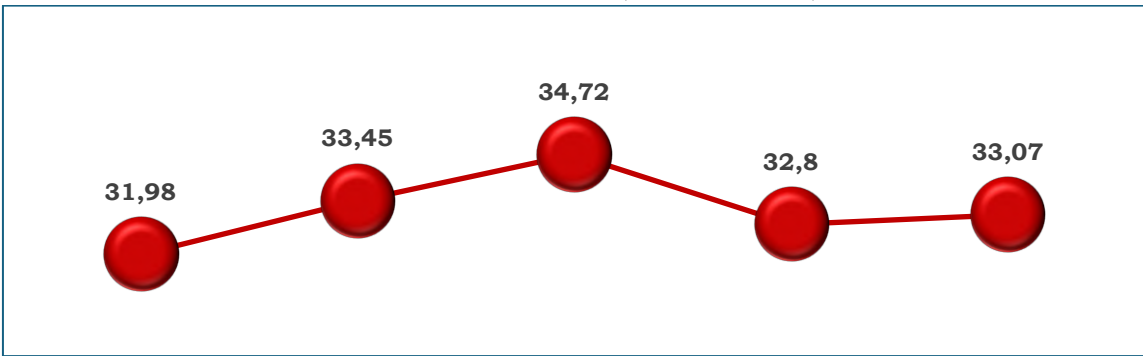
Gambar II.23

**Persentase Tenaga Kerja menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan
Kabupaten Demak Tahun 2024 (%)**



Kabupaten Demak pada tenaga kerja adalah rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Tingkat produktivitas tenaga kerja menunjukkan tren meningkat pada periode tahun 2020 (31,98%) menjadi 2022 (34,72%). Kenaikan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat produktivitas mencapai angka tertinggi dikarenakan adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi, serta mulai berjalannya kembali aktivitas industri dan perdagangan. Dengan adanya pengurangan tenaga kerja formal akibat pandemi di tahun sebelumnya, hal ini mendorong tenaga kerja untuk berwirausaha mandiri dan membuka lapangan kerja baru, sehingga produktivitas meningkat. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 32,80% yang disebabkan adanya keterbatasan daya serap tenaga kerja di sektor-sektor tertentu. Kondisi ini mengakibatkan produktivitas tidak dapat dipertahankan seperti tahun sebelumnya. Selanjutnya, tahun tingkat produktivitas pada tahun 2024 kembali naik tipis menjadi 33,07%. Hal ini menunjukkan adanya upaya perbaikan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi agar tenaga kerja dapat terserap sesuai kebutuhan industri, peningkatan investasi sektor industri, serta pemanfaatan teknologi.

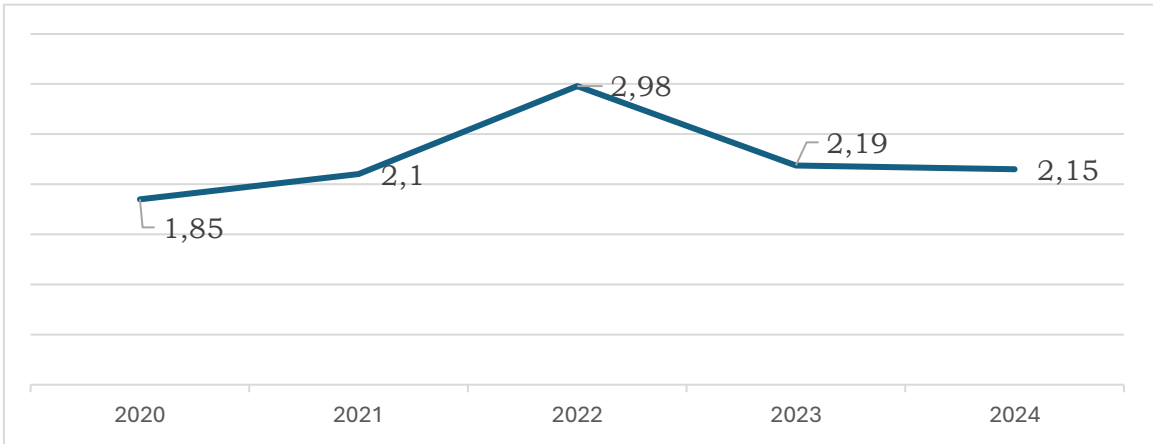
Gambar II.24
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Demak
Tahun 2020-2024 (persentase)



Sumber: BPS Kabupaten Demak (2025)

Dari sisi pembangunan kewirausahaan daerah, Kabupaten Demak cukup perhatian dalam meningkatkan kondisi kewirausahaan daerah, khususnya usaha mikro dan kecil. Pembangunan kewirausahaan sendiri adalah proses pengembangan dan penguatan kemampuan individu atau kelompok untuk memulai, menjalankan, dan mengembangkan usaha atau bisnis baru. Adapun pencapaian kewirausahaan daerah terlihat dari rasio kewirausahaan yang merupakan proporsi suatu wirausaha di suatu wilayah. Rasio kewirausahaan di Kabupaten Demak sendiri mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Rasio kewirausahaan sebesar 1,85 persen di tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19. Namun kondisi ini kembali pulih di mana terjadi peningkatan rasio kewirausahaan hingga tahun 2022 mencapai 2,98 persen, meskipun menurun kembali di tahun 2023 menjadi 2,19 persen. Dan menurun pada tahun 2024 menjadi 2,15 persen.

Gambar II.25
Rasio Kewirausahaan (%) Kabupaten Demak Tahun 2020-2024



Sumber: Dinnakerind dan BPS Kabupaten Demak (2024)

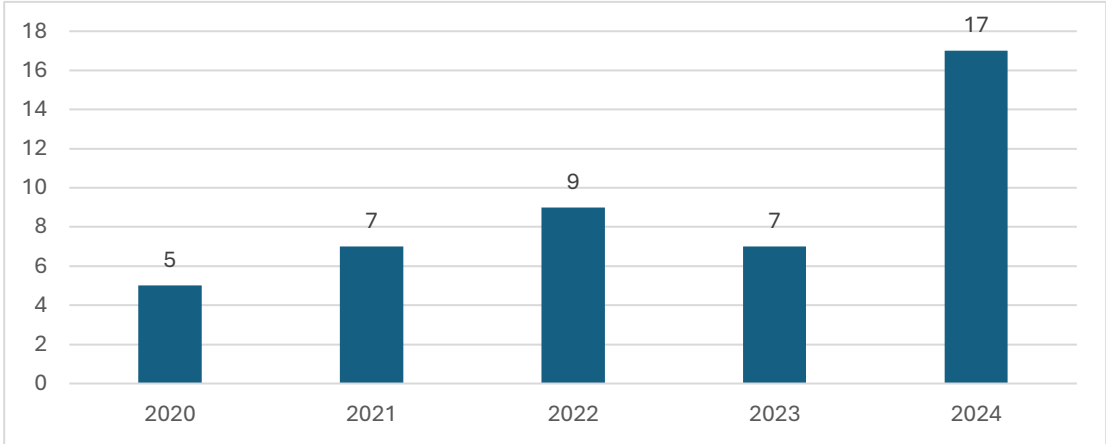
Berdasarkan data yang ditampilkan pada grafik, terlihat adanya peningkatan signifikan jumlah pelaku usaha yang memperoleh sertifikasi halal dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, tercatat hanya 5 pelaku usaha yang telah tersertifikasi halal. Angka ini meningkat menjadi 7 pelaku usaha pada tahun 2021 dan menjadi 9 pelaku usaha pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan mulai tumbuhnya kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya sertifikasi halal sebagai jaminan mutu dan kepercayaan konsumen. Namun, pada tahun 2023, jumlah pelaku usaha tersertifikasi halal mengalami penurunan menjadi 7, meskipun kemudian kembali mengalami peningkatan menjadi 17 pada tahun 2024. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika dalam proses sertifikasi, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan regulasi, kesiapan administratif pelaku usaha, dan dukungan fasilitasi dari pemerintah daerah. Sedangkan pada tahun 2025 tercatat 1188 produk yang sudah bersertifikat halal. Data produk bersertifikat halal tahun 2020-2024 tidak bisa ditampilkan karena pada kurun waktu tersebut Kabupaten Demak belum melaksanakan pendataan.

Peningkatan jumlah pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal mencerminkan adanya dorongan kuat dari pemerintah dalam mendukung penguatan ekosistem industri halal daerah. Sertifikasi halal tidak hanya menjadi aspek kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menjadi daya saing utama produk, khususnya di sektor makanan dan minuman. Dengan adanya sertifikat halal, pelaku usaha dapat menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk pasar nasional dan global yang memiliki preferensi terhadap produk halal.

Gambar II.26

Pelaku Usaha yang Mengajukan Sertifikasi Halal

Kabupaten Demak Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Demak, (2024)

Pemerintah Kabupaten Demak juga mendukung penuh penggunaan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) untuk pembangunan. Penyaluran dan pendayagunaan dana ZIS ditujukan untuk program Demak Peduli, Demak Sehat, Demak Cerdas, Demak Taqwa, serta Demak Makmur. Pada tahun 2024 dana ZIS juga berkontribusi terhadap APBD sebesar Rp200.000.000,00. Berikut data penghimpunan dan penyaluran ZIS.

Tabel II.44

Data Penghimpunan Dan Penyaluran ZIS Baznas

Kabupaten Demak Tahun 2020 – 2024

DANA ZIS	2020	2021	2022	2023	2024
Penghimpunan	4.530.425.539	4.600.398.945	8.437.763.869	8.888.428.031	8.992.844.983
Penyaluran	3.488.981.857	4.552.787.125	7.619.271.018	7.626.855.227	7.886.214.790
Penerima Manfaat	26.061	32.904	21.133	17.671	14.667

Sumber: Baznas Kab. Demak (2025)

Dana ZIS Kabupaten Demak disalurkan untuk pemberdayaan dan pembangunan berbagai macam bidang. Pada tahun 2020 jumlah penyaluran dana sesuai program sejumlah Rp3.488.981.857. Jumlah tersebut secara signifikan bertambah hingga pada tahun 2024 yaitu mencapai Rp7.886.214.790. Capaian ini menunjukkan bahwa penghimpunan dan penyaluran dana ZIS di Kabupaten Demak mengalami tren kenaikan positif.

Tabel II.45

Program Penyaluran ZIS Baznas Kabupaten Demak

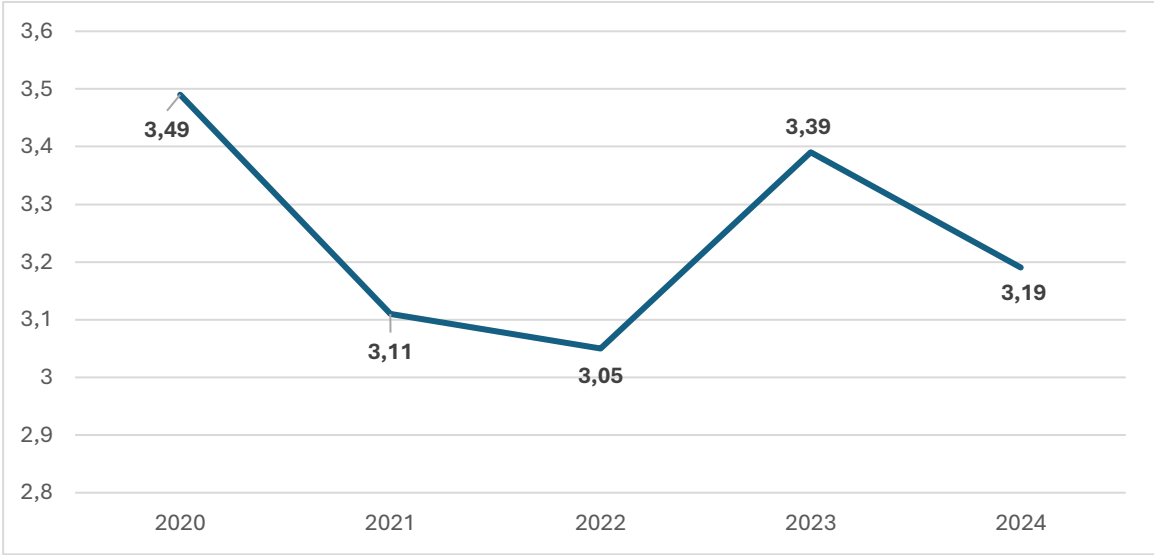
Tahun 2020 – 2024

NAMA PROGRAM	2020	2021	2022	2023	2024
Pendidikan	377.597.000	258.020.000	388.495.000	1.658.467.282	1.204.440.606
Kesehatan	62.942.857	68.872.700	218.807.000	274.458.000	139.992.076
Kemanusiaan	1.541.767.000	2.427.772.625	3.928.109.860	3.123.824.575	3.520.517.740
Ekonomi	756.475.000	606.271.600	780.831.000	1.218.378.000	1.783.323.000
Dakwah Advokasi	750.200.000	1.191.850.200	2.303.028.158	1.351.727.370	1.237.941.368
JUMLAH	3.488.981.857	4.552.787.125	7.619.271.018	7.626.855.227	7.886.214.790

Sumber: Baznas Kab. Demak (2025)

Return on Asset (ROA) adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan suatu daerah atau entitas dalam menghasilkan keuntungan dari total aset yang dimilikinya. Rasio ini menggambarkan efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan pendapatan, sehingga semakin tinggi nilai ROA, semakin baik kinerja pengelolaan aset tersebut. Berdasarkan data Kabupaten Demak tahun 2020–2024, nilai ROA berfluktuasi selama periode tersebut. Pada tahun 2020, ROA berada di angka tertinggi yaitu 3,49 sebelum menurun signifikan menjadi 3,11 pada tahun 2021 dan kembali turun ke titik terendah 3,05 pada tahun 2022. Kondisi ini kemudian membaik di tahun 2023 dengan kenaikan ke angka 3,39, namun kembali mengalami penurunan menjadi 3,19 pada tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya peningkatan kinerja aset, tantangan efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan aset masih perlu menjadi perhatian.

Gambar II.27
Return on Asset Kabupaten Demak Tahun 2020-2024



Sumber: Setda Kabupaten Demak (2024)

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemudahan dan keterjangkauan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan formal, seperti perbankan, koperasi, lembaga pembiayaan, dan produk jasa keuangan lainnya. IKAD memberikan gambaran sejauh mana infrastruktur, kebijakan, dan literasi keuangan mendukung inklusi keuangan di suatu daerah. Berdasarkan Surat Nomor 07727/D.03/PP.02.01/05/2025 dari Kementerian Bappenas, nilai IKAD Kabupaten Demak pada tahun 2024 tercatat sebesar 3,92. Capaian ini mencerminkan bahwa sebagian besar masyarakat telah memiliki akses terhadap layanan keuangan formal, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan, khususnya dalam memperluas jangkauan layanan di wilayah pedesaan, memperkuat literasi keuangan, serta mendorong partisipasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan ekonomi hijau dan biru di Kabupaten Demak terus diimplementasikan dalam pembangunan perekonomian daerah. Upaya ini dilaksanakan dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Dalam perjalanannya, penerapan ekonomi hijau dan biru di Kabupaten Demak dapat terlihat pada aktivitas perekonomian sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Untuk mendukung penerapan ekonomi hijau di Kabupaten Demak, program yang dilakukan antara lain penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah, peningkatan produktivitas pertanian melalui praktik-praktik ramah lingkungan, pengembangan pariwisata berbasis kelestarian alam dan budaya, serta percepatan transisi energi menuju energi baru terbarukan (EBT). Penerapan ekonomi hijau salah satunya diukur dari daya saing sektor pertanian dalam arti luas. Secara umum, terjadi penurunan daya saing sektor tersebut dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya yang terlihat pada penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap struktur ekonomi Kabupaten Demak. Penurunan terlihat dari kontribusi PDRB kategori pertanian, kehutanan dan perikanan di mana capaian pada tahun 2020 sebesar 22,14 persen menurun menjadi 18,56 persen pada tahun 2024. Penurunan ini juga terlihat dari pertumbuhan ekonomi sektor pertanian yang kontraksi pada tahun 2021 hingga 2023 dan hanya meningkat sedikit menjadi 0,63 persen di tahun 2024.

Tabel II.46
Capaian Perekonomian Sektor Pertanian
Kabupaten Demak Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	2,49	-2,16	-0,51	-1,48	0,63
Kontribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	22,14	20,88	19,81	19,01	18,56

Sumber: BPS Kabupaten Demak (2025)

Peningkatan pengembangan produktivitas pertanian di Kabupaten Demak dilihat melalui produktivitas padi. Pada tahun 2020 hingga 2024 terjadi fluktuasi dalam produktivitas padi di Kabupaten Demak. Meskipun terjadi peningkatan produktivitas, namun terjadi penurunan luas panen menyebabkan produksi padi ikut menurun menjadi 687.683 ton pada tahun 2020 menurun di tahun 2024 menjadi 643.898ton seiring meningkatnya luas panen dari tahun sebelumnya. Sempat terjadi penurunan produksi komoditas padi dikarenakan luas panen menurun disebabkan puso (gagal panen) akibat dampak pengaruh iklim ekstrem dengan curah hujan tinggi. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian juga

mengakibatkan penurunan produktivitas padi. Alih lahan fungsi tersebut digunakan untuk perumahan dan pemukiman. Tidak itu saja, alih fungsi lahan terjadi di wilayah pesisir yang mulai tergerus banjir rob. Di wilayah tersebut lahan pertanian mulai tidak produktif dan tidak bisa lagi ditanami padi. Tidak hanya itu saja, pembangunan jalan tol Sayung juga menyebabkan berkurangnya lahan pertanian produktif. Hal ini menjadi faktor yang mendorong turunnya produktivitas padi di Kabupaten Demak. Namun pada tahun 2024 terjadi peningkatan luas panen dan diikuti oleh peningkatan produksi padi.

Tabel II.47
Produktivitas Padi Kabupaten Demak Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Produksi Padi	Ton	687.683	677.610	614.946	609.291	643.898
2.	Luas panen padi	Ha	106.711	97.586	95.857	87.882	91.278
3.	Produktivitas	kw/ha	67,78	69,38	64,15	69,33	70,54

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kabupaten Demak (2024)

Dalam rangka mencukupi kebutuhan bibit ternak yang baik telah melaksanakan kegiatan pembibitan sapi dan pengembangan agribisnis peternakan. Untuk meningkatkan kualitas ternak telah dikembangkan teknologi Inseminasi Buatan (IB). Sedangkan dalam rangka pemberian fasilitas yang memadai bagi pemotongan dan jual beli ternak dilaksanakan perbaikan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan. Selain itu, untuk mencapai peningkatan derajat ternak dicapai pemerintah telah melakukan pengembangan pelayanan ternak berupa kegiatan pengobatan dan vaksinasi pelayanan hewan serta penanggulangan, disamping itu juga dilakukan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sehingga kasus PMK di Kabupaten Demak dapat dikendalikan.

Daya dukung pangan yang baik memastikan ketersediaan daging sebagai sumber protein hewani yang penting bagi masyarakat. Dengan demikian, peternakan yang efisien dan berkelanjutan dapat meningkatkan pendapatan peternak dan memberikan kontribusi positif pada perekonomian daerah. Tidak hanya pertanian, sektor peternakan juga menyumbang daya dukung pangan di Kabupaten Demak.

Tabel II.48
Produksi Komoditas Peternakan Kabupaten Demak Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Ternak Besar (Sapi & Kerbau)	Ton	703	648	924	817	814
2.	Ternak Kecil (Kambing & Domba)	Ton	911	934	1.448	1.122	1.016
3.	Unggas	Ton,	31.043	31.259	38.838	50.214	48.830

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kabupaten Demak (2024)

Berdasarkan data lima tahun terakhir, produksi ternak besar (sapi & kerbau) menunjukkan pola fluktuatif. Pada tahun 2020 produksi tercatat sebesar 703 ekor, kemudian menurun menjadi 648 ton pada 2021. Tahun 2022 terjadi lonjakan signifikan hingga mencapai 924 ton, namun pada 2023 turun menjadi 817 ton dan kembali turun tipis di 2024 menjadi 814 ton. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketersediaan pakan, kondisi kesehatan ternak, serta dinamika harga dan permintaan pasar.

Sementara itu, produksi ternak kecil (kambing & domba) mengalami variasi yang cukup tajam. Tahun 2020 produksi mencapai 911 ton dan naik menjadi 934 ton di 2021. Pada 2022 terjadi peningkatan drastis hingga 1.448 ton, namun pada 2023 turun menjadi 1.122 ton dan berlanjut turun pada 2024 menjadi 1.016 ton. Meskipun potensinya besar, keberlanjutan produksi ternak kecil juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca, harga pakan, dan penanganan kesehatan ternak.

Faktor pendorong perkembangan produksi antara lain ketersediaan pakan hijauan dan konsentrat yang memadai, adanya program pemerintah seperti inseminasi buatan, vaksinasi massal, dan bantuan bibit ternak unggul, serta permintaan pasar yang stabil. Dukungan infrastruktur peternakan, manajemen kesehatan ternak yang semakin baik, dan kemudahan akses pembiayaan juga menjadi penguat bagi peningkatan produksi.

Di sisi lain, terdapat faktor penghambat seperti fluktuasi harga pakan, ancaman wabah penyakit (PMK, LSD), perubahan iklim yang berdampak pada ketersediaan pakan alami, keterbatasan lahan penggembalaan, rendahnya regenerasi peternak, dan tantangan distribusi maupun pemasaran yang belum merata. Faktor-faktor ini memerlukan perhatian dan penanganan berkelanjutan agar produktivitas dapat terjaga dan ditingkatkan.

Dalam produktivitas sektor kelautan dan perikanan dapat dilihat melalui cakupan jaminan sosial untuk pekerja. Kolaborasi antar instansi dan peningkatan kesadaran masyarakat nelayan menjadi kunci untuk memperluas perlindungan ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan BPJS dan pemerintah daerah untuk memperluas perlindungan sosial nelayan dan pelaku usaha perikanan skala kecil, melalui program seperti Asuransi Nelayan dan BPJS Ketenagakerjaan. Di Kabupaten Demak, dari total 10.546 orang nelayan pada tahun 2024, baru 755 orang yang tercakup dalam Asuransi Nelayan dan 3.271 orang yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, menunjukkan masih perlunya perluasan cakupan perlindungan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak juga terus memperkuat penerapan prinsip ekonomi biru dalam kebijakan dan programnya, termasuk pemberdayaan kelompok nelayan yang saat ini berjumlah 233 kelompok.

Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, produksi perikanan tangkap dan budidaya menunjukkan tren yang meningkat selama periode 2020–2024. Produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan dari 7.109,58 ton pada tahun 2020 menjadi 9.108,00 ton pada tahun 2024, dengan capaian tertinggi pada tahun terakhir. Sementara itu, produksi perikanan budidaya juga mencatat perkembangan signifikan, dari 42.400,84 ton pada tahun 2020 menjadi 50.842,00 ton pada tahun 2024, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021. Peningkatan ini mencerminkan adanya penguatan kapasitas produksi serta pemanfaatan potensi sumber daya perikanan, baik tangkap maupun budidaya, yang diharapkan dapat terus dikelola secara berkelanjutan untuk mendukung perekonomian daerah.

Tabel II.49
Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya
Kabupaten Demak Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	7.109,58	7.929,16	7.967,38	7.619,83	9.108,00
Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	42.400,84	41.831,76	49.334,29	50.281,35	50.842,00

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak (2024)

2.1.3.4 Transformasi Digital

Transformasi digital memainkan peran penting dalam pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah, karena mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi pemerintahan, serta memperkuat daya saing global. Dengan mengadopsi teknologi digital, proses administrasi pemerintahan menjadi lebih transparan dan akuntabel, memungkinkan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.

Di sektor ekonomi, digitalisasi membuka peluang bagi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk berkembang melalui *e-commerce*, *fintech*, dan inovasi teknologi lainnya. Infrastruktur digital yang kuat juga mendukung peningkatan konektivitas antarwilayah, sehingga mempercepat distribusi informasi, barang, dan jasa. Selain itu, dalam bidang pendidikan dan kesehatan, teknologi digital memungkinkan akses yang lebih luas terhadap layanan berkualitas, baik melalui platform pembelajaran daring maupun sistem *telemedicine*. Pembangunan yang berbasis digital juga mendorong keberlanjutan dengan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam serta menciptakan solusi ramah lingkungan.

Belum sepenuhnya masyarakat di Kabupaten Demak memiliki akses terhadap internet yang merupakan infrastruktur transformasi digital. Sebanyak 84,96 persen rumah tangga di Kabupaten Demak memiliki akses internet. Angka

dan jasa, impor Kabupaten Demak mendominasi pada neraca perdagangan di mana distribusi net ekspor barang dan jasa bernilai negatif dan terus menurun hingga mencapai -17,39 persen pada tahun 2024.

Tabel II.50
Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Net Ekspor Barang dan Jasa
Kabupaten Demak Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)					
a. Pembentukan Modal Tetap Bruto	9,77	3,98	2,65	7,90	7,10
b. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
Distribusi PDRB (%)					
a. Pembentukan Modal Tetap Bruto	28,28	28,57	28,36	28,47	28,98
b. Net Ekspor Barang dan Jasa	-14,91	-15,16	-15,15	-16,43	-17,39

Sumber: BPS Kabupaten Demak (2025)

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pengembangan wilayah baik perkotaan dan perdesaan menjadi salah satu upaya pemerataan pembangunan di Kabupaten Demak. Pembangunan perkotaan sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju sekaligus menjadi kota yang inklusif dan berkelanjutan, serta pembangunan perdesaan mandiri yang memiliki keunggulan pada potensi daerah perlu diperhatikan secara seksama dalam pembangunan periode saat ini.

Sarana prasarana pembangunan merujuk pada fasilitas dan infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah atau negara. Sarana prasarana ini menjadi penting dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pengembangan sarana prasarana yang baik merupakan aspek kunci dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sarana dan prasarana yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan baik wilayah perkotaan maupun perdesaan adalah terkait perumahan dan kawasan permukiman. Perumahan dan Kawasan Permukiman diarahkan untuk meningkatnya kualitas infrastruktur daerah yang dilakukan dengan meningkatkan penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau. Adapun capaian luas kawasan kumuh yang tertangani sudah cukup baik dengan capaian di atas 100 hektar di setiap tahunnya sehingga penurunan kawasan kumuh pun juga meningkat dari tahun 2020 hingga 2024 meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2023 dan 2024. Terlihat pula peningkatan rumah tangga yang memiliki akses hunian layak sebesar 81,07 persen pada tahun 2024. Meskipun mengalami peningkatan,

namun adanya masyarakat yang memiliki hunian tidak layak perlu menjadi perhatian dalam pembangunan ke depan, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Demak.

Tabel II.51
Pembangunan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kabupaten Demak Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Luas kawasan kumuh yang belum tertangani	Ha	116,39	211,602*	174,125	159,514	108,88
Persentase penurunan kawasan kumuh	%	68,37	68,37	17,71	24,62	47,06
Jumlah RTLH yang tertangani	Unit	2.567	1.739	4.179	1.454	1.915
Persentase kawasan permukiman layak huni	%	74,97	79	99,09	99,16	96,63
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	25,027	27,074	1,294	1,490	3,04
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	n/a	n/a	37,08	69,03	81,07

**sesuai SK Nomor 475.26/ 120 Tahun 2021*
Sumber: Dinperkim Kabupaten Demak (2025)

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 78 disebutkan bahwa "Pembangunan Desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat." Sedangkan di Pasal 74 ayat (3) disebutkan "Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Peningkatan jumlah Desa Mandiri dapat menunjukkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa. Indeks Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Demak telah berupaya meningkatkan jumlah desa mandiri, hal ini terlihat dari persentase desa mandiri di Kabupaten Demak yang mengalami kenaikan cukup baik pada tahun 2024 menjadi sebanyak 45 desa mandiri dari 243 desa (18,52%). Adapun desa berstatus tertinggal juga mengalami

penurunan menjadi 3 desa di mana sebelumnya sebanyak 7 desa. Selain desa mandiri, desa berstatus maju juga meningkat menjadi 126 desa dan diharapkan tahun depan dapat meningkat status kembali menjadi desa mandiri. Belum optimalnya capaian jumlah desa mandiri mengindikasikan bahwa perlu dilakukan percepatan untuk meningkatkan jumlah desa yang naik status dari tertinggal dan berkembang menuju desa maju dan mandiri.

Tabel II.52
Jumlah Desa berdasarkan Status Desa
Tahun 2020-2024

No	Status	2020	2021	2022	2023	2024
1	Mandiri	1	10	25	30	45
2	Maju	30	88	101	116	126
3	Berkembang	164	128	107	90	69
4	Tertinggal	47	17	10	7	3
5	Sangat Tertinggal	1	0	0	0	0
Total		243	243	243	243	243
6	Persentase Desa Mandiri	0,41	4,12	10,29	12,35	18,52

Sumber: Dinpermades P2KB Kab. Demak (2025)

Salah satu komponen dari indeks Desa adalah indeks ketahanan ekonomi yang lihat dari pengembangan ekonomi desa secara mandiri melalui BUMDes. Di tahun 2024, jumlah BUMDes masih sama dengan tahun sebelumnya, akan tetapi terjadi peningkatan di klasifikasi BUMDesa berkembang dari 36 di tahun 2023, menjadi 59 di tahun 2024.

Tabel II.53
Jumlah dan Klasifikasi BUMDES Kabupaten Demak
Tahun 2020 – 2024

No	TAHUN	Jumlah Desa	Jumlah BUM Desa	Klasifikasi BUMDES				
				Dasar/Perintis	Tumbuh/Pemula	Berkembang	Maju	Tidak Ikut Pemeringkatan
1.	2024	243	214	93	30	59	6	26
2.	2023	243	214	129	43	36	6	0
3.	2022	243	204	99	94	9	2	0
4.	2021	243	191	111	67	7	0	6
5.	2020	243	145	1	139	5	0	0

Sumber: Dinpermades Kabupaten Demak (2025)

Pada tahun 2024, Kecamatan Karanganyar tercatat sebagai kecamatan dengan jumlah BUMDes terbanyak di Kabupaten Demak, mencerminkan tingginya partisipasi desa dalam pengembangan ekonomi lokal. Pada tahun 2024, dari total 243 desa di Kabupaten Demak, tercatat sebanyak 214 desa telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jumlah ini mencerminkan komitmen kuat desa-desa dalam mengembangkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal. Dari keseluruhan BUMDes yang ada, sebagian besar masih berada pada klasifikasi dasar/perintis sebanyak 93 unit, diikuti oleh 59 BUMDes berkembang, 30 BUMDes tumbuh/pemula, dan hanya 6 BUMDes yang masuk kategori maju. Sementara itu, terdapat 26 BUMDes yang belum mengikuti proses pemeringkatan.

Dari sisi kualitas sarana prasarana pekerjaan umum, percepatan pembangunan jalan dan jembatan menjadi salah satu program prioritas daerah. Sesuai SK Bupati Demak Nomor 620/473 Tanggal 29 Desember Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Demak Nomor 620/63 Tahun 2017 Tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Demak, semula jalan kabupaten dengan panjang 426,510 Km menjadi 909,584 Km, Kondisi tersebut menunjukkan terdapat penambahan ruas jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

Peningkatan kualitas infrastruktur terutama jalan sebagai aksesibilitas masyarakat menjadi tantangan dimasa depan. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, maka semakin baik kondisi infrastruktur jalan, maka semakin baik pula roda perekonomiannya. Jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap selama lima tahun terakhir relatif menunjukkan perkembangan positif, terlihat dari jalan baik yang meningkat menjadi sepanjang 387,7 Km dan panjang jalan rusak berat sepanjang 74,8 Km. Adapun pada tahun 2024, jenis permukaan jalan di Kabupaten Demak dari total panjang 909,58 Km didominasi oleh permukaan beton dengan panjang jalan 844,68 Km, permukaan aspal 16,44 Km, kerikil 25,77 Km, dan tanah 22,70 Km. Pada tahun 2024, panjang jalan dalam kondisi mantap mengalami penurunan menjadi 741,11 Km begitupun dengan persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan Kabupaten pun mengalami penurunan menjadi 81,48%. Artinya masih terdapat proporsi jalan yang perlu menjadi perhatian.

Tabel II.54
Panjang Jalan menurut Kondisi dan Jenis Permukaan Jalan
di Kabupaten Demak Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan	Km	426,51	426,51	853,52	909,58	909,58
-Baik	Km	370,53	372,06	783,5	534,68	387,7
-Sedang	Km	44,21	47,97	38,05	270,95	353,41
-Rusak	Km	9,57	5,28	14,33	53,49	93,67
-Rusak Berat	Km	2,2	1,2	17,64	50,46	74,8
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan	Km	426,51	426,51	853,52	909,58	909,58
-Aspal	Km	11,12	14,07	17,64	16,64	16,44
-Kerikil	Km	9,87	0	38,05	22,95	25,77
-Tanah	Km	6,8	9,83	14,33	24,3	22,7
-Beton	Km	NA	NA	783,5	845,69	844,68
-Lainnya	Km	398,72	402,61	NA	NA	NA
panjang jalan dalam kondisi Mantap	Km	414,74	420,03	821,55	805,63	741,11
Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten	persen	97,24	98,48	88,25	88,57	81,48

Sumber: Dinputaru Kabupaten Demak (2025)

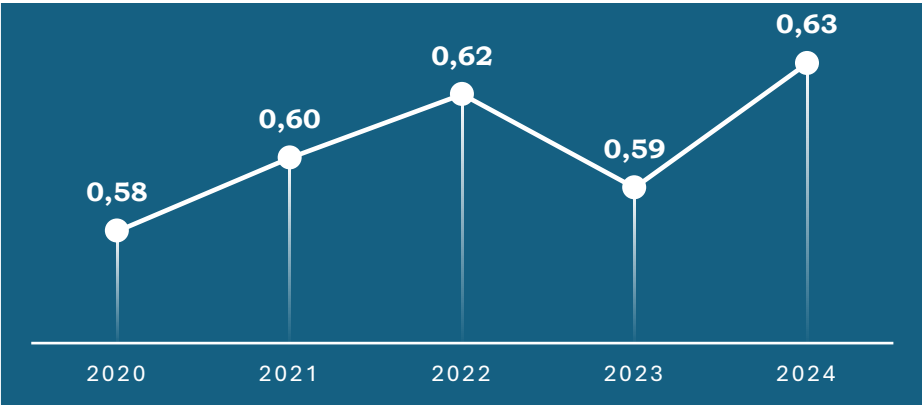
2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, serta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam mendukung kebijakan pro-stabilitas, pro-pertumbuhan dan pro-pemerataan. Stabilitas ekonomi makro juga merupakan fondasi utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan wilayah. Dengan kondisi ekonomi yang stabil, ditandai oleh inflasi yang terkendali, nilai tukar yang relatif stabil, serta defisit fiskal dan neraca perdagangan yang terkelola dengan baik, pemerintah memiliki ruang yang lebih luas untuk merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan secara konsisten dan berkelanjutan. Stabilitas ini menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan investor, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif.

Indikator lain yang menggambarkan daya saing ekonomi terdapat juga Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Daerah dibandingkan nilai PDRB Kabupaten Demak yang mencapai 4,55 persen dan Total Kredit pada Bank Milik Daerah dibandingkan nilai PDRB yang mencapai 4,84 persen pada tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2024, rasio Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Daerah dibandingkan nilai PDRB Kabupaten Demak sebesar 1,4%. Sedangkan Total Kredit pada Bank Milik Daerah dibandingkan nilai PDRB yang mencapai 1%.

Stabilitas ekonomi makro salah satunya dapat terlihat dari rasio pajak yang merupakan penerimaan pendapatan daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto yang merupakan *output* nilai tambah produksi pada setiap aktivitas ekonomi. Rasio pajak terhadap PDRB mengindikasikan pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah. Terlihat bahwa rasio pajak terhadap PDRB di Kabupaten Demak masih sangat minim dan sempat menurun di tahun 2023 dan kembali naik pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa penerimaan pajak masih cukup rendah dibandingkan dengan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan.

Gambar II.29
Rasio Pajak Terhadap PDRB
Kabupaten Demak Tahun 2020-2024



Sumber: BPKPAD dan BPS Kab. Demak, 2025 (data diolah)

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

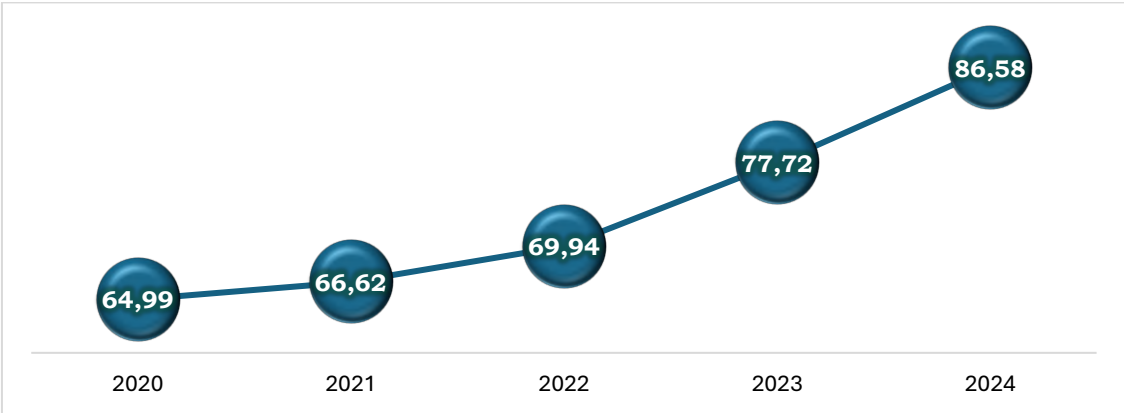
Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Demak dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif menjelaskan tentang kondisi tata kelola pemerintahan yang merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum yang berlaku.

Indeks Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, nilai Indeks RB Kabupaten Demak terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 – 2024, pada tahun 2024 nilai indeks RB yakni sebesar 86,58. Hal ini menunjukkan pemerintah telah berupaya dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan agar semakin baik.

Gambar II.30.
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Demak Tahun 2020-2024



Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Demak (2025)

Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Demak ini menunjukkan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik di setiap tahunnya. Salah satu poin penting dalam pemerintahan daerah adalah pelaksanaan pembangunan yang akuntabel dengan penilaian SAKIP sebagai indikator yang menunjukkan pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Adapun pencapaian SAKIP di Kabupaten Demak mengalami kenaikan di setiap tahunnya hingga mencapai 69,10 dengan predikat B pada tahun 2024, meningkat jika dibandingkan capaian 2020 sebesar 64,95.

Penggambaran keuangan daerah dapat dilihat dari Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kestinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan

sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai DOFD menunjukkan semakin kuat kemandirian pembiayaan pembangunan. Kabupaten Demak pada tahun 2021 memiliki Derajat Otonomi Fiskal sebesar 17,5 persen dan meningkat di tahun 2022 dan 2023 dengan capaian masing-masing sebesar 17,8 persen dan 21,02 persen. Penggunaan keuangan daerah pun juga memiliki opini Wajar Tanpa Pengecualian pada lima tahun terakhir.

Indikator lain yang memperlihatkan tata kelola keuangan daerah adalah Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Pencapaian IPKD di Kabupaten Demak juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir di mana pada tahun 2020 memiliki capaian 67,8421 dan meningkat di tahun 2024 mencapai 82,5258.

Tabel II.55
Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Demak
Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai SAKIP Daerah	-	64,95	66,4	68,96	69,08	69,10
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Derajat Otonomi Fiskal	Angka	18,84	17,5	17,8	21,02	22,00
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	angka	67,8421	69,8288	71,6441	76,807	82,5258
Indeks Profesionalitas ASN	Angka	74	74,99	75	90,17	83,08
Indeks Sistem Merit	Angka	0,664	0,675	0,690	0,705	0,705
Indeks Persepsi Korupsi	Angka	3,916	3,256	3,728	2,88	3,09
Indeks Integritas Nasional	Angka	n/a	81,4	74,56	71,94	77,39
Level Maturitas SPIP	Angka	3,037	2,951	3,043	3,014	3,023
Indeks Pelayanan Publik	Angka	n/a	3,79	3,99	4,26	4,47

Sumber: Setda, Inspektorat Daerah, BPKPAD, BKPSDM Kabupaten Demak (2025)

Dalam rangka mewujudkan percepatan reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang kepegawaian sebagai amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, memiliki sasaran yaitu terwujudnya penyelenggaraan sistem merit dalam manajemen ASN. Sistem merit adalah kebijakan dalam manajemen SDM aparatur negara yang berdasarkan kompetensi, kualifikasi dan kinerja secara adil dan wajar. Secara umum sistem merit di Kabupaten Demak mengalami kenaikan. Adapun setelah mengalami perubahan metodologi, capaian Indeks Sistem Merit di Kabupaten Demak mencapai 0,705 tahun 2024. Selain itu, terdapat indikator Indeks Profesionalitas ASN yang mengalami kenaikan hingga mencapai 90,17 pada tahun 2023 namun mengalami kontraksi sebesar 83,08 pada tahun 2024.



Indeks Persepsi Korupsi (IPK) merupakan survei eksternal kepada masyarakat terhadap persepsi korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah. Nilai Indeks Persepsi Korupsi menjadi komponen pembentuk Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Persepsi Korupsi pada komponen hasil Reformasi Birokrasi diukur dari Indeks Integritas, untuk Kabupaten Demak Indeks Integritas tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan pencapaian tahun 2021 dari 81,40 menjadi 74,56 pada tahun 2022 dengan nilai rata-rata nasional 72. Penurunan kembali terjadi di tahun 2023 dengan capaian Indeks Integritas Kabupaten Demak menjadi 71,94 dan berhasil meningkat pada tahun 2024 sebesar 77,39.

Survei Penilaian Integritas (SPI) bertujuan untuk memetakan risiko korupsi, menilai pengelolaan anggaran dan mengukur efektivitas pencegahan korupsi yang dilakukan masing-masing instansi. Semakin rendah nilai SPI, menunjukkan semakin tinggi risiko korupsinya. Hasil dari Indeks Persepsi Korupsi tahun 2022 jika dihitung dari konversi nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) yang berupa Indeks Integritas dengan skala 5 maka Indeks Persepsi Korupsi Kabupaten Demak adalah 3,728. Pada tahun 2024 capaian tersebut menurun menjadi 3,09.

Pembangunan hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih baik dan lebih adil. Proses ini mencakup berbagai aspek, termasuk pembaruan undang-undang, peningkatan akses terhadap keadilan, serta peningkatan kualitas penegakan hukum dan peradilan. Pembangunan hukum di Kabupaten Demak juga diupayakan peningkatannya di mana pada tahun 2024 memiliki capaian Indeks Reformasi Hukum sebesar 97,92.

Dari sisi pelayanan publik, terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari Indeks Pelayanan Publik yang meningkat di tahun 2023 sebesar 4,26 dibandingkan pada tahun 2021 yang mencapai 3,79. Selain itu, pelayanan umum yang dikelola oleh pemerintah dapat diintegrasikan ke dalam platform *e-Government* yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan secara *online* untuk dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterjangkauan layanan. Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan suatu metrik yang mengukur tingkat kesiapan dan kinerja pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan layanan kepada masyarakat. Capaian Indeks SPBE Kabupaten Demak pun juga mengalami peningkatan di mana capaian pada tahun 2023 sebesar 3,62 meningkat menjadi 3,93 pada tahun 2024.

Adanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat mempercepat peningkatan keterpaduan dan efisiensi dalam melaksanakan SPBE di dalam dan antar instansi pemerintah. Dengan SPBE akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan juga

berkinerja tinggi. Maka dari itu Indeks SPBE menjadi pilihan indikator kinerja utama Kabupaten Demak. Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai SPBE Kabupaten Demak antara lain:

- a. Menjalankan rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi, SPBE dari Kemenpan RB;
- b. Perlu melakukan reviu untuk Arsitektur dan Peta Rencana SPBE agar dapat menyesuaikan dan mengikuti kebijakan yang tetuang pada RPJMD;
- c. Melaksanakan forum konsultasi pemenuhan bukti dukung SPBE dengan melibatkan narasumber dari tim konsultasi SPBE KemenPAN RB dan konsultasi SPBE di luar Kementerian PAN RB;
- d. Perlu melakukan reviu Peraturan Bupati SPBE;
- e. Perlu melengkapi dengan menyusun pedoman untuk semua indikator pada domain manajemen;
- f. Mendorong pemanfaatan aplikasi umum pusat untuk menunjang SPBE di Kabupaten Demak.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Dalam pelaksanaan pembangunan, pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia. Sedangkan pembangunan demokrasi diarahkan pada terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat.

Pemerintah Kabupaten Demak telah berupaya untuk menurunkan potensi gangguan trantibumlinmas, dalam rangka meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Begitu pun dengan investor, jika keamanan terjaga maka investor akan lebih percaya untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut, sehingga meningkatkan PMTB. Penurunan potensi gangguan trantibumlinmas juga dapat memperbaiki citra daerah atau negara tersebut. Pada indikator ini, penyelesaian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat mencapai 100% pada tiga tahun terakhir. Selain itu, pada tahun 2023 menunjukkan tidak terjadi kejadian konflik sosial. Capaian ini perlu dipertahankan untuk menjaga kondusivitas wilayah.

Tabel II.56
Gangguan Trantibumlinmas dan Kejadian Konflik Sosial
Kabupaten Demak Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase kejadian gangguan trantibumlinmas yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100
2	Angka Kejadian Konflik Sosial	kejadian	0	0	0	0	0

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kab. Demak (2025)

Layanan kesatuan bangsa dan politik terutama untuk menjaga rasa nasionalisme, meningkatkan iklim demokrasi dan menjaga kondusivitas wilayah. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Demak berupaya melakukan operasionalisasi berbagai forum yaitu FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), FPK (Forum Pembauran Kebangsaan), FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat), Forum Kewaspadaan Daerah (FKD) serta pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan instansi vertikal yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Berdasarkan data dari Bakesbangpol, bahwa kinerja capaian pada tahun 2024 adalah:

- a. Kasus konflik antar/intra umat beragama adalah 0 atau tidak ada kasus dengan capaian 100 persen;
- b. Angka kejadian konflik sosial adalah 0 atau tidak ada kejadian dengan capaian 100 persen;
- c. Persentase Masyarakat yang paham terhadap politik realisasi sebesar 78,2 persen dengan capaian 101 persen;
- d. Persentase Masyarakat yang paham terhadap Kesatuan Bangsa terealisasi 82 persen dari target 81,2 persen dengan capaian 100,9 persen

Selengkapnya, berikut angka kejadian konflik Kabupaten Demak tahun 2020 – 2024:

Tabel II.57
Angka Kejadian Konflik Kabupaten Demak Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kasus konflik antar/intra umat beragama	Kasus/ Kejadian	0	0	0	0	0
2	Angka kejadian konflik sosial	Kasus/ Kejadian	0	0	0	0	0
3	Persentase Masyarakat yang paham terhadap Politik	Persen	73,4	73,4	75,3	77,06	78,2
4	Persentase Masyarakat yang paham terhadap Kesatuan Bangsa	Persen	78	78	80	82	83

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Demak (2025)

Dari capaian tersebut dapat diketahui bahwa sepanjang tahun 2024, di wilayah Kabupaten Demak selalu dalam kondisi kondusif tidak ada kejadian konflik sosial berupa pertikaian antar warga, antar pelajar dan terutama konflik antar umat beragama.

Tabel II.58
Data Rasio Fatalitas Kecelakaan Kabupaten Demak Tahun 2020-2024

No	Tahun	Korban Kecelakaan	Korban Meninggal Dunia	Kejadian Kecelakaan	Indeks Fatalitas	Rasio Fatalitas
1	2020	752	154	593	26%	20%
2	2021	378	131	570	23%	35%
3	2022	723	150	750	20%	21%
4	2023	1044	147	741	20%	14%
5	2024	1159	149	860	17%	13%

Sumber: Dinhub Kabupaten Demak (2025)

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa analisis indeks fatalitas (*severity index*) rerata dalam 5 tahun terakhir adalah 22%. Jumlah kecelakaan relatif berkurang di tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Sedangkan berdasarkan rasio fatalitas rerata 5 tahun adalah 22% yang berarti, bahwa dalam 5 tahun terakhir terdapat 22% korban kecelakaan yang meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas.

Dalam menilai kondisi ekonomi, sosial, budaya dan keberagamaan, Kabupaten Demak menggunakan Indeks Harmoni Indonesia (Ihai). Skor Ihai mencerminkan keharmonisan masyarakat, kohesifitas sosial, dan dinamika masyarakat. Indikator ini baru mulai dilakukan penghitungannya pada awal tahun 2025 oleh Kemendagri, nilai Kabupaten Demak yaitu 6,95 dari skala 9 yang masuk dalam kategori baik. Pada dimensi ekonomi, dimensi sosial dan dimensi budaya Kabupaten Demak mendapatkan kategori baik, sementara dimensi keberagaman dalam kondisi sangat baik. Hal ini mencerminkan kondisi sosial dan budaya yang relatif stabil dengan tingkat harmoni keagamaan yang tinggi.

2.1.4.3 Daerah yang Berdaya Saing

Daya saing daerah merupakan kemampuan suatu wilayah untuk bersaing dengan wilayah lain dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, inovasi, dan investasi. Hal ini melibatkan berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, regulasi, ketersediaan sumber daya alam, tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, serta infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi. Salah satu indikator yang cukup komprehensif dalam melihat daya saing daerah adalah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).

IDSD Kabupaten Demak pada tahun 2023 memiliki capaian 3,25 dan meningkat di tahun 2024 menjadi 3,67. Capaian tertinggi pada IDSD Kabupaten Demak berada di pilar institusi di mana terjadi kenaikan pada tahun 2024 menjadi 4,89 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun terjadi kenaikan IDSD, namun terdapat beberapa pilar yang mengalami penurunan capaian di antaranya

pilar pasar tenaga kerja menjadi sebesar 2,92; pilar sistem keuangan menjadi 2,04; dan pilar kapabilitas inovasi menjadi sebesar 1,95 sekaligus menjadi pilar dengan capaian terendah. Kondisi ini tentu menjadi perhatian pada pelaksanaan pembangunan ke depan mengingat daya saing daerah merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan akselerasi pembangunan berbasis tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya pada optimalisasi kinerja urusan tenaga kerja, keuangan baik swasta maupun daerah hingga perencanaan (khususnya penelitian dan pengembangan).

Tabel II.59
Indeks Daya Saing Daerah dan Pilar Penyusunnya
Kabupaten Demak Tahun 2023-2024

Nilai Indeks	2023	2024
Pilar Institusi	4,39	4,89
Pilar Infrastruktur	2,00	3,56
Pilar Adopsi TIK	4,35	4,42
Pilar Stabilitas Ekonomi Makro	3,23	3,65
Pilar Kesehatan	4,27	4,22
Pilar Keterampilan	3,41	3,89
Pilar Pasar Produk	2,58	3,49
Pilar Pasar Tenaga Kerja	3,06	2,92
Pilar Sistem Keuangan	2,42	2,04
Pilar Ukuran Pasar	4,41	4,43
Pilar Dinamisme Bisnis	2,55	4,60
Pilar Kapabilitas Inovasi	2,27	1,95
Indeks Daya Saing Daerah	3,25	3,67

Sumber: BRIN (2025)

2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah merupakan Indikator Kinerja Kunci yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan program pembangunan setiap urusan pemerintahan daerah. Adapun kinerja setiap urusan pemerintahan daerah Kabupaten Demak dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel II.60
Capaian Indikator Kinerja Kunci (Permendagri 18 Tahun 2020)
Kabupaten Demak Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar							
a) Pendidikan							
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	103,20	97,91	92,25	92,94	80,19
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	103,41	92,41	99,53	98,52	99,67

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	105,56	97,72	96,00	98,29	99,2
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	81,56	58,91	60,83	52,43	18,77
5	Iklim keamanan SD	angka	n/a	n/a	n/a	n/a	72,90
6	Iklim keamanan SMP	angka	n/a	n/a	n/a	n/a	66,07
7	Iklim kebhinekaan SD	angka	n/a	n/a	n/a	n/a	74,06
8	Iklim kebhinekaan SMP	angka	n/a	n/a	n/a	n/a	72,01
9	Iklim inklusivitas SD	angka	n/a	n/a	n/a	n/a	56,14
10	Iklim inklusivitas SMP	angka	n/a	n/a	n/a	n/a	55,35
11	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	%	n/a	59,21	80,03	82,31	77,91
b) Kesehatan							
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	Rasio (per 1.000 penduduk)	0,06246	0,0816	0,752	0,848	0,9305
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	75	60	100	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	100
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100	100
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	100
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	96,06	99,80	99,81	100	100
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100
I4	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	100
c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	94,16	94,90	100	0	57,51
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	94,16	94,90	100	0	43,79
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	94,16	94,90	94,90	96,37	97,11
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota	%	80,08	82,98	85,58	87,64	92,26
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	98,00	98,15	100	100	5,79
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	100	100	100	100	100
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	97,24	98,48	88,25	89,37	81,48
8	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	114,39	100	47,69	52,27	50

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100
d) Perumahan Rakyat							
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	%	100	100	100	100	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota	%	0	100	100	100	0
3	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	90,68	90,68	36,05	48,75	100
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	25,027	27,074	1,294	1,490	3,04
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	%	100	99,55	7,75	100	100
e) Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100
2	persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	853.535	560.250	100	100	100
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	853.555	560.250	100	100	100
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100
7	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	Menit	15	15	15	15	15
f) Sosial							
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan	%	76,57	98,32	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	dasarnya di luar panti (Indikator SPM)						
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	100	100	100	100	100
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar							
a) Tenaga Kerja							
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	75	75	78	90	75
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	51,93	52,07	38,33	34,84	49,92
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rp/Tenaga kerja	31,98	33,45	34,72	32,80	33,07
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	68,93	72,59	72,71	85,14	92,65
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	%	81,71	82,63	82,60	82,63	82,75
b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	96,41	34,02	17,51	27,49	27,66
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100	100	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	0	6,40	3,93	8,12	9,36
c) Pangan							
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	680,49	401,37	100	134,97	16,13
d) Pertanian							
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	100	95,27	0	0
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	%	100	100	95,27	100	100
4	Tersedianya Tanah Obyek <i>Landreform</i> (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	0	0	100	0	0
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	%	0	0	100	0	0
6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	0	100
e) Lingkungan Hidup							
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Angka	59,79	55,05	52,14	65,1	56,26
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	84,98	84,75	92,98	93,74	18,96
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	100	100	100	100	100
f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1	perekaman KTP elektronik	%	98,21	97,91	97,87	99,65	98,7
2	persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	22,257	44,953	43,038	57,868	59,91
3	kepemilikan akta kelahiran	%	95,72	96,664	98,012	98,3	98,653
4	jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	100	100	100	100	100
g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	%	77,73	63,83	41,18	30	57,14
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	0,61	7,81	11,72	4,67	44,44
h) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana							
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Nilai	2,08	2,08	2,03	2,02	2,02
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	%	79,01	79,11	72,82	73,46	73,77
3	Persentase kebutuhan ber-KB	%	7,89	6,25	7,18	6,89	6,23

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)						
i) Perhubungan							
1	Rasio konektivitas kabupaten / kota	Rasio	0,81	0,81	0,81	0,81	0,9
2.	Kinerja lalu lintas kabupaten / kota	Rasio	0,3	0,19	0,21	0,22	0,38
j) Komunikasi dan Informatika							
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara <i>online</i> dan terintegrasi	%	100	100	54,76	56,25	13,33
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%	100	100	100	100	100
k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	60,172	62,081	62,653	63,951	66,20
2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	13,952	28,100	27,246	56,844	62,56
l) Penanaman Modal							
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	%	78,810	123,910	17,980	13,380	12,53
m) Kepemudaan dan Olahraga							
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	26,010	26,059	26,263	26,308	26,63
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	26,774	27,984	29,775	29,778	30,00
3	Peningkatan prestasi olahraga	%	0	12	35	17	12
n) Statistik							
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi	%	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	pembangunan daerah						
o) Persandian							
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100	100	100	100	86,82
p) Kebudayaan							
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100	100	100	100	66,67
q) Perpustakaan							
1	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	Angka	68,31	52,76	55,62	66,72	75,26
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	66	62,75	77,12	50,8	64,88
r) Kearsipan							
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	79,06	85,06	90,41	91,13	91,65
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	75	81,67	81,83	83,33	83,33
Urusan Pilihan							
a) Kelautan dan Perikanan							
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	%	49.464,07	49.760,92	112,63	108,49	102,85
b) Pariwisata							
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	-97,18	-92,86	33,33	42,50	40,51
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	-79,10	171	151,62	28,94	42,53
3	Tingkat hunian akomodasi	%	78,91	79,02	79,57	66,08	50,07
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	8,88	9,01	10,26	10,70	2,37
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,13	0,221	0,73	0,745	1,2515

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
c) Pertanian							
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	605,09	598,35	628,97	595,27	614,41
2	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-21,523	-10,553	-3,015	-14,162	-13,146
3	Produksi daging	Ton	26.103,88	27.554,51	22.174,75	19.058,73	50.660,26
4	Produksi Telur	Ton	6.843,88	7.032,51	5.651,65	4.776.43	2.216,61
5	Produksi Ternak	AU (animal unit)	19.260,00	20.522,00	16.523,10	14.282,30	500.890,60
d) Perdagangan							
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	69,697	100	92,398	97,802	100
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	61,49	46,15	50,43	83,73	60,40
3	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	78,285	93,061	94,352	110,76	133,22
e) Perindustrian							
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	%	148,598	1,381	1,392	1,403	1,4132
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	100	100	95,97	98,8	131,31
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	100
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0	100	0	100
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri	%	100	0	100	0	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	(IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten / kota						
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	% (nilai maks 125%)	95	95	95	125	125
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan							
a) Perencanaan dan Keuangan							
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	8,991	10,946	7,759	7,641	7,614
2	Rasio PAD	%	1,657	1,611	19,861	21,022	22,00
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	angka	3,037	2,95	3,034	3,014	3,023
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	angka	3	3	3,08	3,04	3
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	62,765	65,072	62,941	65,086	67,524
6	Opini Laporan Keuangan	Opini	5	5	7	7	WTP
b) Pengadaan							
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	0	0
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	55,461	35,652	52,185	83,941	50,32
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	40,076	25,963	29,028	28,716	48,425
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	%	0	53,503	27,709	345	27,113
c) Kepegawaian							
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	138,83	189,522	56,489	61,979	65,481
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	75,412	86,507	18,614	17,419	15,88

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	2,363	2,41	17,981	29,9	38,22
d) Manajemen Keuangan							
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	0	2,12	1,539	2,808	0,67
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	0	11,177	5,667	10,028	22,80
3	Manajemen Aset	Jumlah	4	4	4	4	4
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	9,85	10,60	6,11	4,99	5,12
e) Transparansi dan Partisipasi Publik							
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	109,17	107,83	94,54	93,43	97,56
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	100	100	100

Indikator Produktivitas pertanian per hektar per tahun pada tahun 2021 mencapai angka yang cukup berbeda dari tahun lainnya. Hal ini disebabkan rumus penghitungan yang berbeda, yaitu menggunakan kwintal. Sedangkan pada tahun lainnya menggunakan ton. Sehingga capaian dihasilkan memiliki angka yang jauh berbeda secara *time series*.

Pada indikator Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B, tahun 2022 dan 2023 Dindikbud menghitung seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Demak. Pada tahun 2024, penghitungan mulai mengerucut hanya sekolah formal yang menjadi kewenangan kabupaten.

Data capaian Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota dan Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan sebelum tahun 2023, didapatkan dari BBWS Provinsi Jawa Tengah selaku lembaga yang memiliki kewenangan atas Wilayah Sungai (WS) di Kabupaten Demak untuk melengkapi data IKK. Sedangkan mulai tahun 2023, berdasarkan Pedoman LPPD Tahun 2023, dan hasil konsultasi dengan Pemprov Jawa Tengah, maupun sosialisasi dari Kemendagri, bahwa IKK yang tidak menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dapat diinput 0/1 dengan mengupload Surat Keterangan Nihil. Hal inilah yang melatarbelakangi capain 0 pada kedua rasio tersebut di tahun 2023.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM ditetapkan oleh pemerintah sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang menjadi kewenangannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum utama SPM adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta peraturan menteri teknis yang mengatur pelaksanaan SPM pada masing-masing urusan. SPM dilaksanakan pada enam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat serta Sosial.

Tabel II.61
Capaian Kinerja SPM Kabupaten Demak
Tahun 2021-2024

No.	Bidang/ Jenis Pelayanan Dasar	Capaian				Keterangan
		2021	2022	2023	2024	
1	Pendidikan	83,96	84,49	59,23	67,57	
a.	Pendidikan Anak Usia Dini	97,91	89,19	79,04	86,41	Belum Tercapai
b.	Pendidikan Dasar	95,06	98,28	87,05	99,51	Belum Tercapai
c.	Pendidikan Kesetaraan	58,91	66	11,59	16,78	Belum Tercapai
2	Kesehatan	99,84	99,99	100,00	100,00	
a.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	100	100	100	Tercapai
b.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	100	100	100	Tercapai
c.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	99,85	100	100	100	Tercapai
d.	Pelayanan Kesehatan Balita	100	100	100	100	Tercapai
e.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100	100	100	100	Tercapai
f.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	99,8	99,85	100	100	Tercapai
g.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	99,88	100	100	100	Tercapai
h.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	98,64	100	100	100	Tercapai
i.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100	100	100	100	Tercapai
j.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100	100	100	100	Tercapai
k.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100	100	100	100	Tercapai
l.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko HIV	100	100	100	100	Tercapai
3	Pekerjaan Umum	90,57	94,24	100,00	96,13	
a.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum	82,98	88,47	100	92,26	Belum Tercapai
b.	Penyediaan Pengolahan Air Limbah Domestik	98,15	100	100	100	Tercapai
4	Perumahan Rakyat	100	100	100	100	
a.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100	100	100	Tercapai
b.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	100	100	100	100	Tercapai

No.	Bidang/ Jenis Pelayanan Dasar	Capaian				Keterangan
		2021	2022	2023	2024	
5	Trantibumlinmas	100	100	100	100	
a.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100	100	100	100	Tercapai
b.	Pelayanan informasi rawan bencana	100	100	100	100	Tercapai
c.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	100	Tercapai
d.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100	Tercapai
e.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100	Tercapai
6	Sosial	91,51	100	100	100	
a.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	93,2	100	100	100	Tercapai
b.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	80,14	100	100	100	Tercapai
c.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	93,81	100	100	100	Tercapai
d.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	90,42	100	100	100	Tercapai
e.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100	100	100	Tercapai

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Demak, 2024 (diolah)



Tabel II.62
Capaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2020-2024

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	LPE	%	-0,23	2,62	5,25	5,01	5,06	BAPPELITBANGDA
2	LPE kategori Industri Pengolahan	%	-2,78	4,65	6,84	5,03	4,77	DINNAKERIND
3	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	2,49	-2,16	-0,51	-1,48	0,63	DINPERTAN PANGAN, DINLUTKAN
4	Persentase peningkatan PAD Sektor Pariwisata	%	N/A	77,51	240,21	198,42	8,96	DINPARTA
5	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	22,61	22,8	24,73	26,62	28,3	BAPPELITBANGDA
6	Indeks Gini	Angka	0,275	0,283	0,3	0,309	0,314	BAPPELITBANGDA
7	Tingkat Kemiskinan	%	12,54	12,92	12,09	12,01	11,89	BAPPELITBANGDA
8	IPM	Angka	72,22	72,57	73,36	74,07	74,57	BAPPELITBANGDA
9	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Angka	90,9	90,9	91,3	91,17	91,25	DINSOS P2PA
10	Indeks Pendidikan	Angka	0,627	0,632	0,64	0,645	0,647	DINDIKBUD
11	Indeks Kesehatan	Angka	0,852	0,8532	0,854	0,855	0,858	DINKES
12	Indeks Pengeluaran	Angka	0,705	0,709	0,72	0,735	0,746	DINDAGKOP UKM
13	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,31	13,32	13,33	13,34	13,36	DINDIKBUD
14	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,71	7,86	8,1	8,27	8,28	DINDIKBUD
15	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,4	75,4	75,52	75,6	75,79	DINKES
16	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah	Angka	84,86	83,1	86,36	87,23	88,48	SETDA
17	Persentase Angkatan Kerja yang Bekerja	%	92,69	94,72	93,89	94,62	95,25	DINNAKERIND
18	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,31	5,23	6,11	5,38	4,75	DINNAKERIND



NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM							
B.1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar							
PENDIDIKAN								
1	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	%	58,71	59,21	80,03	82,31	77,91	DINDIKBUD
KESEHATAN								
1	Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka	4,90	3,93	3,73	3,41	7,46	DINKES
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	57,59	98,16	67,3	63,88	48,50	DINKES
3	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal Madya	%	93,10	93,10	96,55	100	100	DINKES
4	Persentase Desa Siaga aktif mandiri	%	17	45	61,04	83	100	DINKES
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	Persentase penduduk yang terlayani akses air minum dan sanitasi	%	89,04	90,08	92,79	93,82	96,41	DINPUTARU
2	Persentase rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi	%	89,04	90,08	92,79	93,82	96,13	DINPUTARU
3	Rasio kemantapan jalan kabupaten	Angka	0,35	0,34	0,64	0,67	1,68	DINPUTARU
4	Rasio jaringan irigasi	Angka	9,75	10,48	11,24	11,96	13,07	DINPUTARU
5	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	80,71	86,31	89,03	90,12	90,12	DINPUTARU
PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN								
1	Persentase kawasan permukiman layak huni	%	99,39	99,39	99,09	99,16	99,41	DINPERKIM
2	Persentase penurunan kawasan kumuh	%	68,37	68,37	17,71	24,62	47,06	DINPERKIM



NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
1	Persentase penegakan Perda dan Perkada	%	100	100	100	100	100	SATPOL PP
2	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	SATPOL PP
3	Pertumbuhan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	%	15,79	18,18	31,82	45,45	68,18	BPBD
4	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana	%	26,19	30,95	34,52	38,1	44,05	BPBD
SOSIAL								
1	Persentase korban bencana yang sudah pulih fungsi sosialnya	%	100	100	100	100	100	DINSOS P2PA
2	Persentase PPKS yang mandiri	%	n/a	0,26	2,45	1,54	1,67	DINSOS P2PA
3	Persentase Penurunan PPKS	%	8,27	8,44	8,82	8,93	9,15	DINSOS P2PA
B,2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar							
TENAGA KERJA								
1	Persentase pelaku usaha yang menerapkan UMR	%	100	100	100	100	100	DINNAKERIND
2	Persentase pelaku usaha yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan	%	68,93	72,59	72,71	85,14	92,65	DINNAKERIND
3	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	81,71	82,63	82,69	82,63	82,75	DINNAKERIND
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	66,85	66,83	67,82	68,56	66,22	DINSOS P2PA
2	Indeks Komposit Kesejahteraan Anak	Angka	69,36	69,36	69,36	69,36	69,36	DINSOS P2PA
3	Skor Kabupaten Layak Anak	Angka	N/A	575,01	697,4	673,67	N/A	DINSOS P2PA



NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PANGAN								
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	92,3	92,4	87,8	95,8	94,4	DINPERTAN PANGAN
2	Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan	%	-0,52	0,4	29,23	5,55	2,32	DINPERTAN PANGAN
PERTANAHAN								
1	Persentase tanah Pemkab yang bersertifikat	%	82,23	N/A	92,13	94,74	96	DINPUTARU
LINGKUNGAN HIDUP								
1	Indeks Kualitas Udara	Angka	84,81	85,15	80,67	87,54	72,53	DINLH
2	Persentase penurunan pencemaran udara	%	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	DINLH
3	Indeks Kualitas Air	Angka	61,5	65,56	34,76	66,19	55,61	DINLH
4	Persentase penurunan pencemaran air permukaan	%	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	DINLH
5	Indeks Tutupan Lahan	Angka	39,75	40,63	41,52	24,88	32,39	DINLH
6	Rasio Luas Tutupan Lahan	Angka	18,34	18,75	18,42	11,04	14,37	DINLH
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
1	Indeks Kualitas Pelayanan Pengurusan Dokumen Adminduk	Angka	88,08	88,52	89,4	90,3	90,53	DINDUKCAPIL
2	Persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP elektronik	%	98,21	97,91	97,87	99,65	98,7	DINDUKCAPIL
3	Persentase penduduk yang memiliki akta catatan sipil	%	77,52	88,35	86,64	99,57	99,66	DINDUKCAPIL
4	Persentase instansi yang menyepakati dan memanfaatkan data kependudukan	%	100	100	100	100	100	DINDUKCAPIL



NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
1	Persentase Desa Mandiri	Angka	0,41	4,12	10,29	12,35	18,52	DINPERMADES P2KB
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	Angka	2,08	2,08	2,03	2,03	2,02	DINPERMADES P2KB
2	Prevalensi peserta KB Aktif	Angka	79,01	79,12	72,82	73,47	73,77	DINPERMADES P2KB
PERHUBUNGAN								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Transportasi	Angka	85,2	87,72	88,25	90,47	91,75	DINHUB
2	Kinerja lalu lintas kabupaten	Angka	0,3	0,3	0,21	0,22	0,38	DINHUB
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	Indeks SPBE	Angka	3,74	3,19	3,19	3,62	3,93	DINKOMINFO
2	Indeks Layanan SPBE	Angka	3,57	3,1	3,1	3,2	3,8	DINKOMINFO
3	Indeks tata kelola SPBE	Angka	3,85	3	3,85	4,14	43,6,51	DINKOMINFO
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
1	Persentase UMKM yang Naik Skala Usaha	%	2,51	2,33	1,84	3,69	4,6	DINDAGKOP UKM
2	Persentase Peningkatan Koperasi berkualitas	%	0,87	0,86	1,99	2,79	3,52	DINDAGKOP UKM
3	Persentase Peningkatan Omset UKM	%	0,07	0,1	0,35	3,06	3,63	DINDAGKOP UKM
PENANAMAN MODAL								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perizinan Penanaman Modal	Angka	85	85	88,28	90,95	91,02	DINPM PTSP
2	Rata - rata lama pengurusan perizinan berusaha	hari	3	3	3	3	1	DINPM PTSP



NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA	proyek	419	431	519	1.676	2.059	DINPM PTSP
4	Persentase Peningkatan Investasi	%	0,22	123,91	17,98	13,38	12,53	DINPM PTSP
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
1	Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi, nasional dan internasional terhadap nomor kejuaraan yang diikuti	Angka	0	28	47,69	47,81	48,31	DINPORA
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	26,01	26,04	26,26	26,3	26,63	DINPORA
3	Pertumbuhan wirausaha muda	%	12	12,5	13,79	15,5	15,12	DINPORA
4	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	26,77	27	29,77	29,77	30	DINPORA
5	Persentase peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	%	28	28,5	32,6	32,6	33	DINPORA
STATISTIK								
1	Tingkat ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi	%	N/A	N/A	100	100	100	DINKOMINFO
PERSANDIAN								
1	Indeks Keamanan Informasi	Angka	N/A	1	2	2,5	3	DINKOMINFO
KEBUDAYAAN								
1	Persentase peningkatan pelestarian warisan budaya	%	1,49	0	20	40	55,56	DINDIKBUD
PERPUSTAKAAN								
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	66	67	16,2	50,8	64,88	DINPERPUSAR



NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Angka	64,4	64,8	55,62	66,72	75,26	DINPERPUSAR
KEARSIPAN								
1	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Angka	85	77,8	85,05	77,56	82,38	DINPERPUSAR
2	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan arsip secara baku	%	88,1	88,2	100	90,24	100	DINPERPUSAR
B.3	Urusan Pemerintahan Pilihan							
KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1	LPE Sub kategori Perikanan	%	5,45	4,63	7,45	5,24	5,66	DINLUTKAN
2	Peningkatan Omset UKM Pengolahan hasil perikanan	%	7	7,77	7,44	8,1	8,6	DINLUTKAN
3	Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	Ton	49.464	49.761	57.301	57.901	59.950	DINLUTKAN
PARIWISATA								
1	Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	%	-72,1	77,51	240,21	198,42	8,96	DINPARTA
2	Pertumbuhan kunjungan wisatawan	%	-79,1	0,17	151,62	28,95	40,51	DINPARTA
PERTANIAN								
1	LPE subkategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	%	2,06	1,2	-1,68	-2,56	0,643	DINPERTAN PANGAN
2	Persentase peningkatan rata-rata produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	%	1,6	1,06	14,21	2,94	4,19	DINPERTAN PANGAN
PERDAGANGAN								



NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase harga bahan kebutuhan pokok yang terkendali	%	62,79	77,5	95,769	96,52	96,75	DINDAGKOP UKM
2	Pertumbuhan nilai ekspor perdagangan	%	1,1	-0,17	0,03291	0,15	0,23	DINDAGKOP UKM
INDUSTRI								
1	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	%	1,24	1,38	1,39	1,4	1,41	DINNAKERIND
2	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang aktif	%	80	81,05	82,01	85,19	86,01	DINNAKERIND
TRANSMIGRASI								
1	Jumlah calon transmigran yang terdaftar	KK	5	5	13	7	7	DINNAKERIND
B.4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan							
SEKRETARIAT DAERAH								
1	Nilai LPPD	Angka	3,5087	3,5087	3,51	3,478	3,406	SETDA
2	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai tinggi	%	67,97	67,99	70	70	75	SETDA
3	Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai tinggi	%	46,14	46,15	48	50	60,38	SETDA
SEKRETARIAT DPRD								
1	Indeks Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	Angka	84	86	86,06	86,13	86,19	SET DPRD



NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
B.5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan							
PERENCANAAN								
1	Indeks Perencanaan Pembangunan	Angka	75	80	75	78	87,5	BAPPELITBANGDA
2	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja daerah	%	100	100	100	100	100	BAPPELITBANGDA
KEUANGAN								
1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKPAD
2	Derajat Otonomi Fiskal	Angka	16,47	17,25	19,82	21,02	22	BPKPAD
3	Persentase tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai kaidah perundangan	%	100	100	100	100	100	BPKPAD
4	Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Mengelola Aset Dengan Baik	%	100	100	100	100	100	BPKPAD
KEPEGAWAIAN								
1	Indeks kepuasan ASN terhadap layanan kepegawaian	Angka	88,36	88,31	89,19	89,64	90,58	BKPP
2	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	74	74,99	75	90,17	83,08	BKPP
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
1	Persentase jabatan ASN yang sesuai dengan kompetensinya	%	80	80	92	83,46	100	BKPP
2	Rasio pelanggaran disiplin ASN	Angka	0,86	0,85	0,38	0,38	0,77	BKPP



NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
1	Indeks Inovasi Daerah	Angka	1731	30,5	56,18	35,19	55,67	BAPPELITBANGDA
2	Persentase komponen inovasi daerah yang mencapai target	%	20	40	50	60	70	BAPPELITBANGDA
B.6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan							
INSPEKTORAT DAERAH								
1	Indeks Integritas	Angka	77,14	81,4	74,56	71,94	77,39	INSPEKTORAT DAERAH
2	Level Kapabilitas APIP	Angka	3	3	3,08	3,04	3	INSPEKTORAT DAERAH
3	Level Maturitas SPIP	Angka	3,0375	2,9	3,043	3,014	3,02	INSPEKTORAT DAERAH
B.7	Unsur Kewilayahan							
KECAMATAN								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83,55	83,98	83,88	84,01	84,07	KEC. MRANGGEN
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82,72	83,17	83,12	94,84	94,94	KEC. KARANGAWEN
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80,68	81,18	81,38	81,61	83,12	KEC. GUNTUR
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	79,75	84	88,9	88,69	90	KEC. SAYUNG
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81,43	82	83,12	86,66	91,33	KEC. KARANGTENGAH
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	79	83	84	85,03	86,05	KEC. WONOSALAM
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	79,78	80,12	81,03	82,36	83,2	KEC. DEMPET
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80,79	80,94	83,62	83,77	84,56	KEC. GAJAH
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	84,82	89,5	86,75	87,89	85,75	KEC. KARANGANYAR
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	87,86	87,97	84,5	88,3	88,68	KEC. MIJEN
11	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83,09	84	85,25	85,59	91	KEC. DEMAK



NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88,85	89	93,05	90,06	91,36	KEC. BONANG
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82,53	82,5	84,4	85,9	88,57	KEC. WEDUNG
14	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	76,43	79,5	79	81,17	84,36	KEC. KEBONAGUNG
15	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	71,53	72,21	70,46	71,26	71,4	KEC. MRANGGEN
16	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	67,25	67,62	67,21	68,26	68,5	KEC. KARANGAWEN
17	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	67,25	67,62	68,51	69,21	69,51	KEC. GUNTUR
18	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	67,8	67,85	65,85	66,3	66,35	KEC. SAYUNG
19	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	74,27	74,27	73,95	75,5	75,6	KEC. KARANGTENGAH
20	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68	69,52	66,95	66,6	67,5	KEC. WONOSALAM
21	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	64,26	65,48	67,51	67,65	67,7	KEC. DEMPET
22	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	67,55	69,62	70,46	71,55	71,5	KEC. GAJAH
23	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	67,61	67,82	67,71	68,81	68,9	KEC. KARANGANYAR
24	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	74,06	74,95	73,8	72,55	75,3	KEC. MIJEN
25	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	70,49	70,49	71,2	71,8	72	KEC. DEMAK
26	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	74,69	75,68	73,55	74,16	74,25	KEC. BONANG
27	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	72,45	72,45	72,55	73,36	73,45	KEC. WEDUNG
28	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	71,54	71,55	71,46	69,81	69,35	KEC. KEBONAGUNG
B.8	Unsur Pemerintahan Umum							
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
1	Kasus konflik antar/intra umat beragama	kejadian	0	0	0	0	0	BAKESBANGPOL
2	Persentase Masyarakat yang paham terhadap politik	%	73,4	73,4	75,3	77,06	78,2	BAKESBANGPOL
3	Persentase Masyarakat yang paham terhadap Kesatuan Bangsa	%	78	78	80	82	83	BAKESBANGPOL



NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
C.	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	64,99	66,62	69,94	77,72	86,58	SETDA
2	Nilai SAKIP Daerah	Angka	64,95	66,4	68,96	69,08	69,1	SETDA
3	Indeks Persepsi Korupsi	Angka	3,916	3,256	3,728	2,88	3,09	INSPEKTORAT DAERAH
4	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	67,8421	69,8288	71,6441	76,807	82,526	BAPPELITBANGDA
5	Persentase kejadian gangguan trantibum linmas yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	SATPOL PP
6	Angka Kejadian Konflik Sosial	kejadian	0	0	0	0	0	BAKESBANGPOL
7	Tingkat Pertumbuhan Investasi (PMTB)	%	9,77	3,98	3,65	7,9	7,1	DPMPSTP
8	Pertumbuhan Nilai Ekspor Luar Negeri	%	0,01	0,04	0,02	0,05	0,23	DINDAGKOP UKM
9	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (PPP)	Rp. 000	10.128	10.248	10.698	11.166	11,591	DINDAGKOP UKM
10	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	juta/ orang	31,98	33,45	34,72	32,80	33,07	DINNAKERIND
11	Cakupan aksesibilitas antar wilayah	%	57,44	76,65	101,99	88	100,23	DINPUTARU
12	Indeks Desa Membangun	Angka	18,93	0,642	10,28	12,35	18,52	DINPERMADES P2KB
13	Ketaatan terhadap RTRW	%	61,9	61,95	62,08	62,25	62,41	DINPUTARU
14	Emisi GRK	Gg CO2eq	1.652,41	1640,73	1.715,86	1.688,43	1.470,37	DINLH
15	IKLH	Angka	59,79	55,05	52,14	65,1	56,26	DINLH
16	Indeks Risiko Bencana	Angka	105,77	105,21	103,88	97,71	91,76	BPBD



2.2 GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah dan ekonomi daerah memiliki hubungan yang erat dan saling memengaruhi. Keuangan daerah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan sebaliknya, ekonomi daerah yang kuat dapat meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini dikarenakan keuangan daerah menjadi sumber utama pendanaan bagi pembangunan daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lain yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku usaha, sehingga mendorong iklim investasi yang kondusif. Lebih jauh lagi keuangan daerah yang sehat dan stabil dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama dalam menghadapi gejolak ekonomi global.

Gejolak global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menjadi tantangan berat di hampir semua negara. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) menciptakan krisis multidimensi dan menyebabkan kontraksi ekonomi global sebesar 2,8 persen di 2020 yang merupakan resesi terburuk sejak *the Great Depression* 1930-an. Memasuki tahun 2021, ekonomi global mengalami pemulihan, namun menguatnya permintaan yang tidak diimbangi dengan kenaikan sisi suplai akibat gangguan rantai pasok menyebabkan peningkatan tekanan inflasi yang direspons dengan kebijakan pengetatan moneter di sejumlah negara maju. Konflik antara Rusia dan Ukraina di awal tahun 2022 semakin memperparah disrupsi sisi suplai, terutama pangan dan energi. Harga-harga komoditas global melonjak tajam sehingga menyebabkan semakin tingginya inflasi di banyak negara hingga mencapai rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Risiko kerawanan pangan dan energi juga meningkat di banyak negara khususnya negara berpendapatan rendah. Pengetatan kebijakan moneter menjadi semakin agresif, khususnya di Amerika Serikat (AS), yang menyebabkan semakin ketatnya likuiditas global, meningkatnya biaya utang serta gejolak pasar keuangan di banyak negara berkembang. Sebagai akibatnya, pemulihan ekonomi global mengalami perlambatan di tahun 2022 yang diperkirakan hanya tumbuh 3,4 persen, jauh dari perkiraan awal (Januari 2022) yang sebesar 4,4 persen. Lebih parah lagi dalam laporan laporan *World Economic Outlook* yang dirilis oleh *International Monetary Fund* (IMF) pada Januari 2024, pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan sebesar 2,9% untuk tahun 2024, dan diproyeksikan akan tumbuh 3,2% pada tahun 2025. Sedangkan World Bank memprediksi perekonomian global tahun 2025 tumbuh 2,7 persen. Proyeksi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi global



akan tetap stabil, dengan kecepatan yang sama seperti pada tahun 2024, di tengah penurunan inflasi dan suku bunga secara bertahap.

Berbagai lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia dan DBS *Group Research*, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di sekitar 5,1% pada tahun 2025. Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada tahun 2025. Optimisme proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 didasarkan pada beberapa pilar utama, yaitu ketahanan ekonomi domestik yang didukung oleh konsumsi kuat dan upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat, peningkatan investasi baik dari dalam maupun luar negeri khususnya di sektor strategis seperti infrastruktur dan energi terbarukan, reformasi kebijakan dan digitalisasi yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas, stabilitas sektor keuangan yang terjaga melalui kebijakan makroprudensial, serta kebijakan pemerintah yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat seperti kenaikan upah minimum dan pertumbuhan upah riil. Kombinasi dari faktor-faktor ini menciptakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, meskipun pemerintah tetap perlu mewaspadaikan ketidakpastian ekonomi global.

Dalam lingkup lokal, ekonomi makro Kabupaten Demak menunjukkan kinerja yang positif dalam beberapa tahun terakhir yang terutama ditopang oleh sektor pertanian industri pengolahan dan sektor perdagangan. Di sisi yang lain Kabupaten Demak memiliki potensi ekonomi melalui pengembangan pariwisata, industri kreatif dan investasi. Namun, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Saat ini Pemerintah Daerah Demak sedang melakukan berbagai upaya untuk mengatasi tantangan tersebut, seperti membangun infrastruktur yang lebih baik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan sektor-sektor unggulan, seperti pariwisata dan industri kreatif. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan perekonomian Kabupaten Demak dapat terus tumbuh dan berkembang sehingga kemudian dapat mendorong pendapatan daerah ke depan.

2.2.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu menggambarkan performa keuangan Daerah selama periode 5 (lima) tahun sebelumnya. Analisisnya mencakup berbagai aspek dari laporan keuangan Daerah yang digunakan untuk mengevaluasi kesehatan finansial dan kinerja entitas keuangan daerah tersebut selama periode waktu 5 (lima) tahun. Kinerja keuangan masa lalu dievaluasi dengan menganalisis data-data historis seperti laporan realisasi keuangan, neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Dari data tersebut, berbagai matrik

keuangan dapat dihitung dan dianalisis untuk memberikan gambaran tentang kinerja finansial entitas selama periode waktu 5 (lima) tahun.

Sebagai tahap awal dalam menganalisis kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu perlu diketahui kemampuan kemandirian pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat kemandirian fiskal mengacu pada tingkat kemandirian atau independensi pemerintahan daerah (kabupaten/kota) dalam mengelola keuangan dan anggarannya tanpa terlalu bergantung pada sumber pendapatan dari luar (khususnya provinsi dan nasional). Dalam konteks pemerintahan daerah (kabupaten/kota), sering kali mengacu pada kemampuan suatu pemerintah untuk menghasilkan pendapatan yang cukup dari sumber-sumber dalam daerah seperti pajak, cukai, dan sumber-sumber lainnya, sehingga tidak perlu terlalu bergantung pada bantuan atau transfer dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau sumber pendapatan luar lainnya.

Semakin tinggi derajat kemandirian fiskal maka semakin mandiri atau independen keuangan mereka. Hal ini dianggap penting karena tingkat kemandirian fiskal yang tinggi dapat memberikan stabilitas dan keberlanjutan finansial bagi Pemerintahan Daerah, mengurangi risiko ketergantungan pada pihak lain yang mungkin memiliki kepentingan politik atau ekonomi yang berbeda. Adapun klasifikasi DOFD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.63
Skala Interval Otonomi Fiskal

No.	Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
1	0,00-10,00	Sangat Kurang
2	10,01-20,00	Kurang
3	20,01-30,00	Sedang
4	30,01-40,00	Cukup
5	40,01-50,00	Baik
6	>50	Sangat Baik

Sumber: Litbang Mendagri, 1991; Wulandari, 2001

Kondisi kemandirian keuangan daerah Kabupaten Demak berdasarkan DOFD dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) terus mengalami tren positif yang menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah semakin baik. Di tahun 2020 DOFD Kabupaten Demak mencapai 18,84% dan terus meningkat hingga mencapai 22% di tahun 2024. Konsistensi peningkatan DOFD tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya secara konsisten Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kurun waktu 2020-2024. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kemandirian fiskal Kabupaten Demak terus bergerak positif dari kategori kurang di tahun 2020 dan telah masuk kategori Sedang pada tahun 2024. Agar

tingkat kemandirian fiskal ke depan bisa terus meningkat maka Pemerintah Kabupaten Demak perlu menjaga konsistensi tumbuhnya PAD dengan terus menggali sumber-sumber keuangan daerahnya khususnya mendorong tumbuhnya sektor pariwisata dan industri kreatif dengan cara yang lebih inovatif. Adapun perkembangan DOFD Kabupaten Demak periode tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.64
Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

No.	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Persentase
1	2020	439.694.424.386	2.333.738.996.799	18,84
2	2021	445.010.135.309	2.365.244.759.658	18,81
3	2022	477.198.401.099	2.402.717.869.624	19,86
4	2023	508.055.346.278	2.416.786.383.470	21,02
5	2024	594.887.868.035	2.704.168.334.636	22
Rata-Rata		492.969.235.021	2.444.531.268.837	20,11

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

Tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Demak sebesar 22% dalam skala interval otonomi daerah masih dalam kategori sedang namun belum mandiri. Diperlukan langkah-langkah optimalisasi PAD agar ketergantungan pada Dana Transfer semakin berkurang sehingga Kabupaten Demak semakin mandiri. Momentum perubahan skema Bagi Hasil Pajak menjadi Opsen bisa menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan PAD Kabupaten Demak. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Demak dapat meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Provinsi dalam optimalisasi opsen pajak kendaraan bermotor dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta untuk optimalisasi pemungutan pajak daerah salah satunya dengan Mengintensifkan pemungutan pajak terhadap objek pajak yang sudah terdaftar, memperbaiki sistem informasi pajak dan retribusi untuk mempermudah pemungutan serta melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan dan juga Retribusi daerah

2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja keuangan daerah diukur dari kinerja pelaksanaan APBD. Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengacu pada sejauh mana pemerintah daerah berhasil menjalankan anggaran yang telah disetujui dalam APBD. Kinerja ini dapat dinilai dari beberapa aspek, termasuk efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penggunaan dana



publik. Kinerja pelaksanaan APBD yang baik menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam mengelola keuangan publik, serta mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara efektif dan efisien. Untuk itu kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Demak akan dilihat dari kinerja pendapatan daerah, kinerja belanja daerah, dan kinerja pembiayaan daerah.

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Kebijakan pendapatan daerah perlu diterjemahkan melalui serangkaian langkah atau strategi yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan yang diperolehnya dari berbagai sumber, termasuk pajak, retribusi, dana perimbangan dari pemerintah pusat, hasil investasi, dan lain sebagainya.

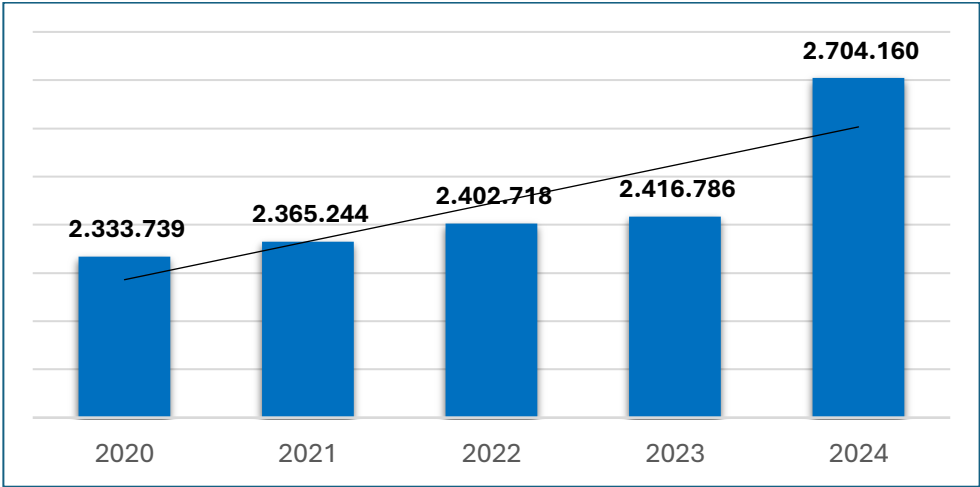
Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah terdiri dari:

- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- (2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa); dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan);
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya.

Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir perkembangan pendapatan Kabupaten Demak terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 3,85% di mana pendapatan tahun 2020 mencapai

Rp2,333 triliun menjadi Rp2,704 triliun di tahun 2024 yang terutama didorong oleh meningkatnya pendapatan transfer dan PAD.

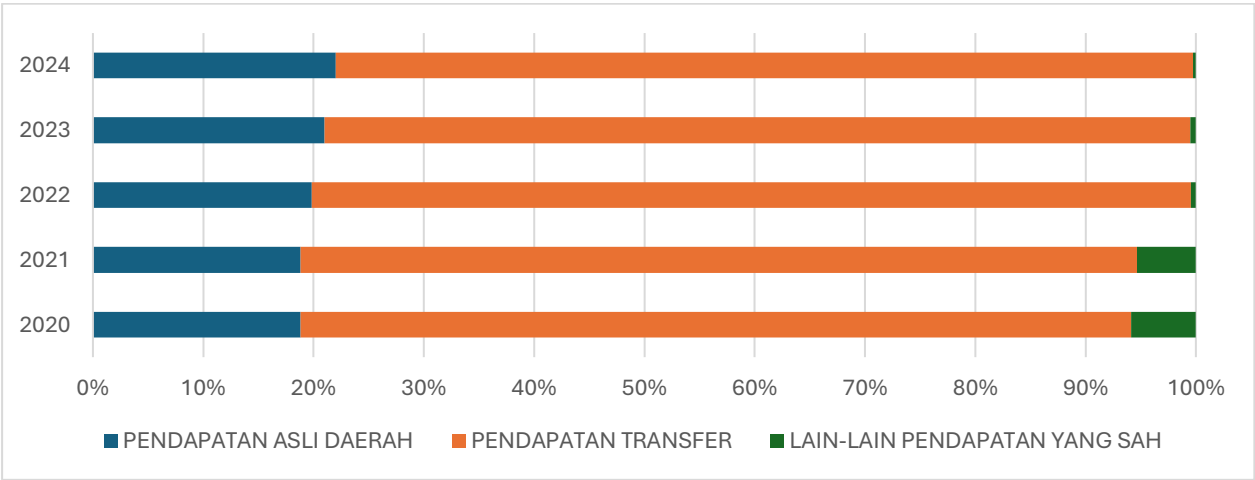
Gambar II.31
Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2020-2024 (dalam jutaan)



Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

Jika dilihat lebih dalam pada komponen pendapatan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024), terlihat bahwa baik pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan transfer mengalami rata-rata pertumbuhan positif cukup signifikan, secara berurutan sebesar 8% dan 4,7% per tahun. Sementara lain-lain pendapatan yang sah mengalami rata-rata kontraksi sebesar -33,78% dari Rp137,516 miliar menjadi hanya Rp6,426 miliar yang disebabkan turunnya sumber pendapatan hibah.

Gambar II.32
Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2020-2024



Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan

menjadi 4 (empat) yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah, dan Lain-lain PAD yang Sah.

1) Pajak daerah

Sebagaimana diatur Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan pemerintah kabupaten meliputi: pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak reklame, pajak air tanah dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yaitu PBJT Hotel, PBJT atas makanan dan minuman, PBJT atas tenaga listrik, PBJT kesenian dan hiburan, dan PBJT parkir. Selain itu juga dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Perkembangan pajak daerah mengalami kenaikan cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,05% dari Rp152,911 miliar (2020) menjadi Rp223,507 miliar (2024). Pertumbuhan pajak tersebut terutama didorong oleh Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Ada beberapa tantangan yang berkaitan dengan penerimaan pajak daerah yaitu masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya membayar pajak, masih banyak potensi sektor ekonomi yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, dan keterbatasan sumber daya untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap wajib pajak. Untuk lebih mengoptimalkan PAD dari pajak daerah ke depan, selain mengatasi tantangan-tantangan yang ada, penegakan perda pajak dan retribusi serta optimalisasi pungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

2) Retribusi Daerah

Dalam melakukan analisa tren perkembangan retribusi daerah kurun waktu 2020-2024 masih menggunakan regulasi lama sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 14 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi



Jasa Umum Pemerintah Daerah, bahwa Kabupaten Demak memungut retribusi jasa umum yang terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi dan/atau penyedotan kakus, retribusi pelayanan tera/tera ulang serta retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. Sementara berdasarkan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Retribusi daerah, yang termasuk Retribusi Jasa Usaha yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, serta retribusi penjualan produksi usaha daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupateb Demak nomor 16 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Retribusi Perijinan Tertentu terdiri atas retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek serta retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (MTA).

Pendapatan retribusi di Kabupaten Demak mengalami tren meningkat cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,30% dari Rp27,263 miliar (2020) menjadi Rp40,980 miliar (2024). Untuk lebih mengoptimalkan PAD retribusi ke depan, selain melalui penegakan perda pajak dan retribusi juga masih perlu dilakukan optimalisasi sumber retribusi berupa biaya layanan seperti parkir, izin usaha, atau pelayanan lainnya yang diberikan oleh pemerintah daerah.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

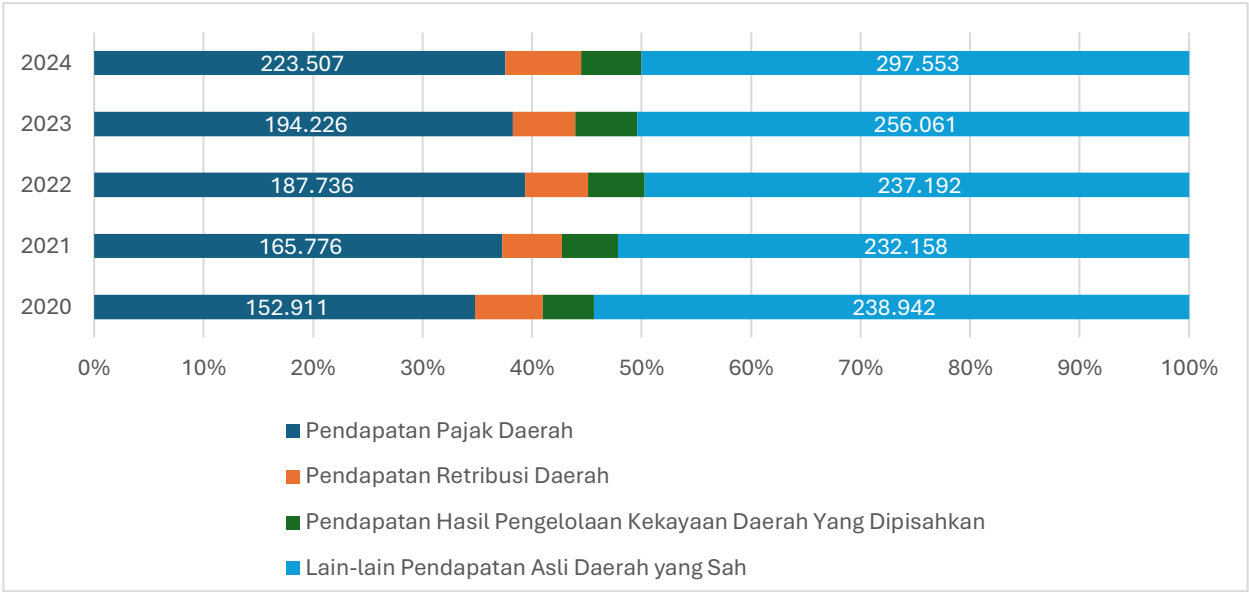
Perkembangan pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu sebesar 12,44% dari Rp20,579 miliar (2020) menjadi Rp32,847 miliar (2024). Pertumbuhan ini berasal dari deviden Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Demak pada lembaga keuangan, aneka usaha dan bidang air minum. BUMD yang memberikan deviden yaitu PT. LKM Demak Sejahtera, PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK) Demak, PT. BPR BKK Jawa Tengah, PT. Bank Jateng, PT. Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) Jateng, PT. Demak Sarana Sehat, PT. Demak Aneka Wira Usaha (Anwusa), PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah, dan Perumda Air Minum.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami tren positif yang konsisten dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,87% dari Rp238,942 miliar (2020) menjadi Rp297,553 miliar (2024). Tumbuhnya Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di antaranya didorong oleh Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Bank, Pendapatan BLUD.

Secara nominal, keseluruhan komposisi struktur PAD dapat dilihat pada gambar berikut:

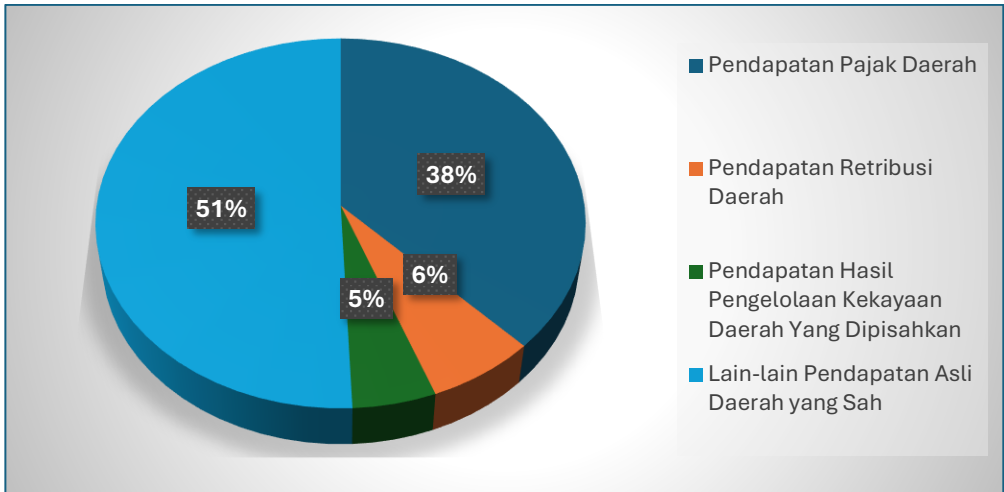
Gambar II.33
Perkembangan Komposisi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

Jika dilihat berdasarkan kontribusinya, Lain-lain PAD yang Sah dan Pendapatan Pajak Daerah memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan PAD Kabupaten Demak. Secara rata-rata kontribusi Lain-lain PAD yang Sah dalam 5 (lima) tahun terakhir mencapai 51% per tahun terutama dari BLUD, kemudian Pendapatan Pajak Daerah berkontribusi rata-rata 38% per tahun, berikutnya Hasil Retribusi Daerah kontribusinya sebesar 6% per tahun, dan terakhir Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan kontribusinya sebesar 5% per tahun. Oleh karena itu, untuk menguatkan kemandirian daerah maka penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dan Pendapatan Pajak Daerah perlu lebih dikuatkan dengan dibarengi penggalan sumber-sumber potensial untuk mengakselerasi penerimaan dari Hasil Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Gambar II.34
Rata-Rata Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2020-2024 (%)

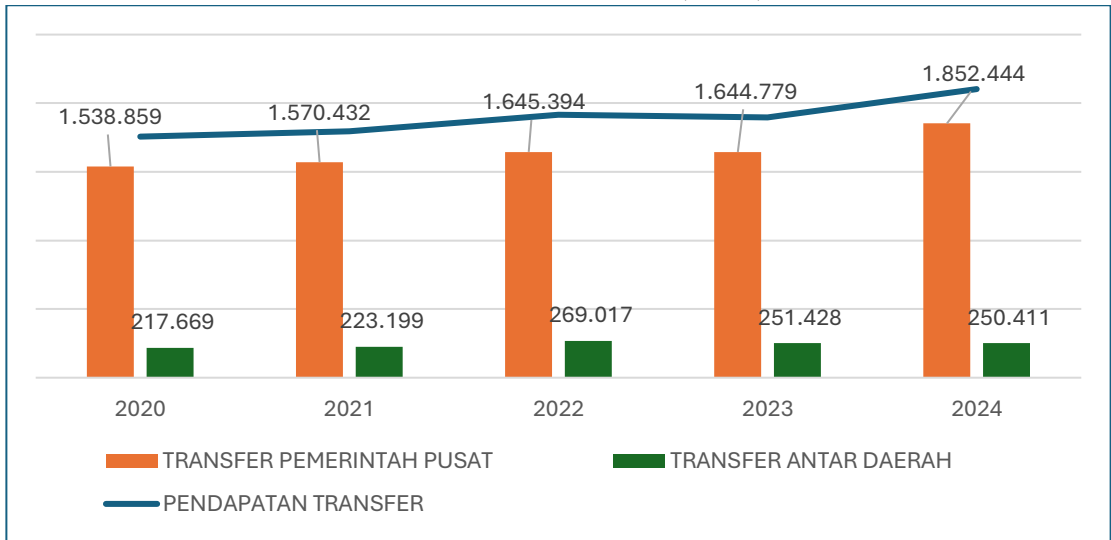


Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2024 (diolah)

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. transfer pemerintah pusat terdiri dari: dana perimbangan, dana insentif fiskal dan dana desa. Sementara transfer antar-daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Gambar II.35
Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Demak
Tahun 2020-2024 (juta)

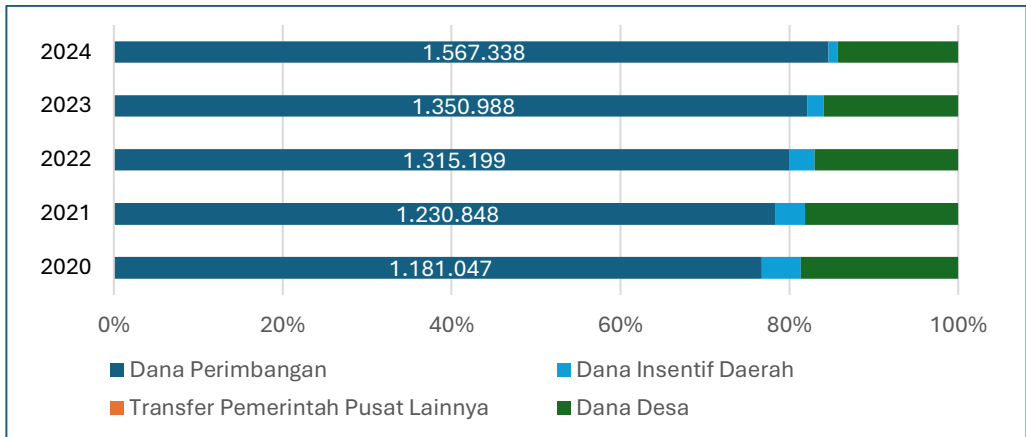


Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

Dalam 5 (lima) tahun terakhir pendapatan transfer Kabupaten Demak mengalami tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,70% dari Rp1,756 triliun (2020) menjadi Rp2,102 triliun (2024). Pada tahun 2024, pendapatan transfer tertinggi dari komponen DAU, DAK, dan pendapatan transfer antar daerah dari bagi hasil. Jika dilihat rata-rata kontribusinya, maka 87,2% pendapatan transfer disumbang oleh transfer pemerintah pusat. Jika melihat komponen utama pendapatan transfer pemerintah pusat dalam 5 (lima) tahun terakhir, maka rata-rata 80,4% disumbang oleh dana perimbangan sisanya dari dana insentif daerah dan dana desa.

Gambar II.36

Kontribusi Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Kabupaten Demak Tahun 2020-2024 (%)

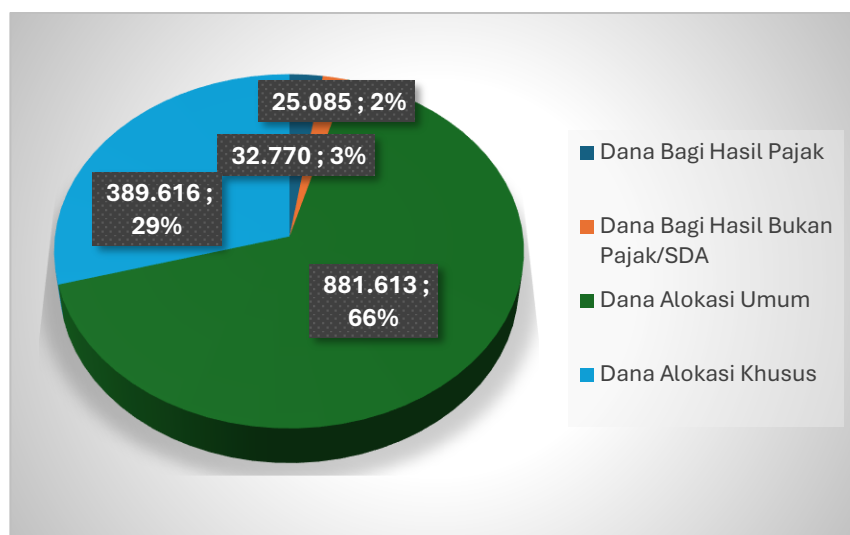


Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

Perkembangan Dana Perimbangan sendiri dalam 5 (lima) tahun terakhir telah tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,45% dari Rp1,181 triliun di tahun 2020 menjadi Rp1,567 triliun di tahun 2024. Dari komponen pembentuk dana perimbangan, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA mengalami tren pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu sebesar 482,30% per tahun kecuali pada tahun 2023 yang mengalami penurunan. Sementara itu Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga mengalami Peningkatan. DBH Pajak rata-rata meningkat 27,98% per tahun. Dana Alokasi Umum (DAU) rata-rata meningkat 2,90% per tahun dari Rp860,873 miliar (2019) menjadi Rp961,885 miliar (2024), DAK rata-rata meningkat sebesar 18,76% per tahun dari Rp277,020 miliar (2020) menjadi Rp540,791 miliar (2024).

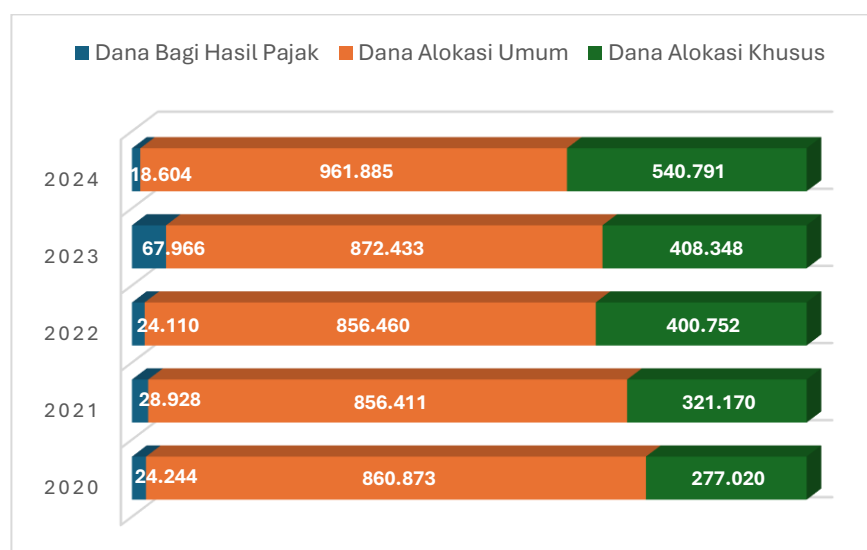
Dana Alokasi Umum (DAU) masih menjadi kontributor terbesar Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan rata-rata kontribusi sebesar 67% kemudian DAK sebesar 29%, DBH Pajak sebesar 3%, dan sisanya dari DBH Bukan Pajak/SDA sebesar 1%.

Gambar II.37
Rata-Rata Kontribusi Komponen Dana Perimbangan
Kabupaten Demak Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

Gambar II.38
Perkembangan Komposisi Dana Perimbangan
Kabupaten Demak Tahun 2020-2024 (juta)



Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

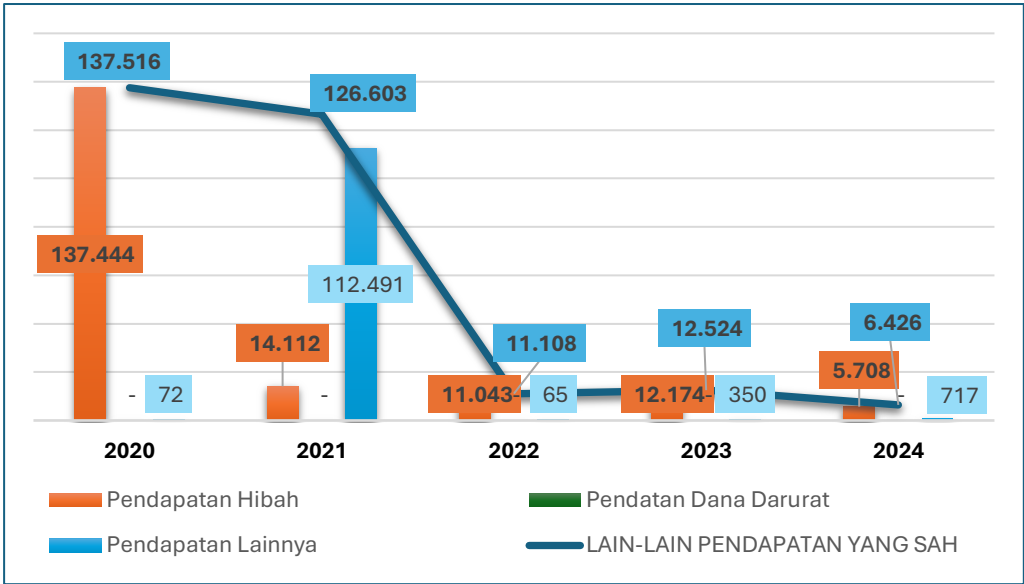
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencatatkan nilai yang menurun cukup signifikan dari Rp137,516 miliar (2020) menjadi hanya Rp6,426 miliar (2024) atau rata-rata menurun -33,78% per tahun. Pencapaian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tertinggi diperoleh pada tahun 2020 yang sebesar Rp137,516 miliar. Jika dilihat lebih detail dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagian besar Sumber Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diperoleh dari pendapatan

hibah yang nilainya menurun drastis dari Rp137,444 miliar (2020) menjadi Rp5,708 miliar (2024). Sementara sumber pendapatan lainnya meskipun trennya meningkat namun secara nominal nilainya tidak signifikan yaitu Rp72 juta (2019) menjadi Rp717 juta (2024). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pendapatan hibah merupakan penyumbang terbesar pada Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Gambar II.39
Perkembangan Struktur Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kabupaten Demak Tahun 2020-2024



Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

Jika dilihat dari perkembangan Pendapat Daerah dalam lima tahun terakhir maka beberapa kebijakan yang bisa diimplementasikan dalam mengelola pendapatan daerah:

- a. Peningkatan Efisiensi: pemerintah daerah dapat mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya, sehingga dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan dengan biaya yang lebih rendah.
- b. Diversifikasi Pendapatan: upaya untuk mencari sumber pendapatan tambahan di luar pajak dan retribusi, seperti pengembangan aset daerah, kerja sama dengan sektor swasta, atau pendapatan dari investasi.
- c. Pembangunan Infrastruktur: investasi dalam infrastruktur yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah dapat menghasilkan pendapatan tambahan dalam jangka panjang melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan nilai properti.
- d. Pengelolaan Utang: manajemen utang yang baik dapat membantu pemerintah daerah memperoleh sumber pendapatan tambahan melalui pinjaman yang diinvestasikan dalam proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan.

- e. Optimalisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK): memastikan penggunaan dana perimbangan dari pemerintah pusat sesuai dengan peruntukannya, serta mengoptimalkan penggunaan dana tersebut untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
- f. Pengembangan Sektor Ekonomi: mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang potensial di daerah, seperti pariwisata, pertanian, atau industri lokal, yang dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan penerimaan lainnya.
- g. Transparansi dan Akuntabilitas: memastikan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah serta akuntabilitas dalam penggunaannya agar masyarakat dapat memonitor dan mengawasi penggunaan pendapatan tersebut secara efektif.
- h. Kebijakan pendapatan daerah haruslah seimbang antara memastikan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah dan memperhatikan keadilan serta kepentingan masyarakat dalam penggunaan dan penyaluran pendapatan tersebut.

Secara keseluruhan perkembangan pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.65
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2020-2024 (dalam juta)

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertum- buhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	PENDAPATAN	2.333.739	2.365.244	2.402.718	2.416.786	2.704.160	3,85
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	439.694	445.010	477.198	508.055	594.880	8,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	152.911	165.776	187.736	194.226	223.507	10,05
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	27.263	24.230	27.533	28.944	40.972	12,30
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	20.579	22.845	24.738	28.825	32.847	12,44
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	238.942	232.158	237.192	256.061	297.553	5,87
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.756.529	1.793.631	1.914.411	1.896.207	2.102.855	4,70
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.538.859	1.570.432	1.645.394	1.644.779	1.852.444	4,85
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1.181.047	1.230.848	1.315.199	1.350.988	1.567.338	7,45
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	24.244	28.928	24.110	67.966	63.026	44,32
1.2.1.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	18.910	24.340	33.877	2.242	1.636	-13,13
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	860.873	856.411	856.460	872.433	961.885	2,90
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	277.020	321.170	400.752	408.348	540.791	18,76
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	70.723	55.120	50.226	31.244	20.070	-26,12

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertum- buhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.3	Dana Desa	287.089	284.463	279.969	262.546	265.035	-1,94
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	217.669	223.199	269.017	251.428	250.411	4,03
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	151.902	184.791	199.350	198.038	204.204	8,00
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	65.767	38.408	69.667	53.391	46.207	0,74
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	65.767	38.408	69.667	53.391	46.207	0,74
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	-	-	-	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	137.516	126.603	11.108	12.524	6.426	-33,78
1.3.1	Pendapatan Hibah	137.444	14.112	11.043	12.174	5.708	-38,59
1.3.2	Pendataan Dana Darurat	-	-	-	-	-	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	72	112.491	65	350	717	39156,56

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

2. Belanja Daerah

Belanja secara umum adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

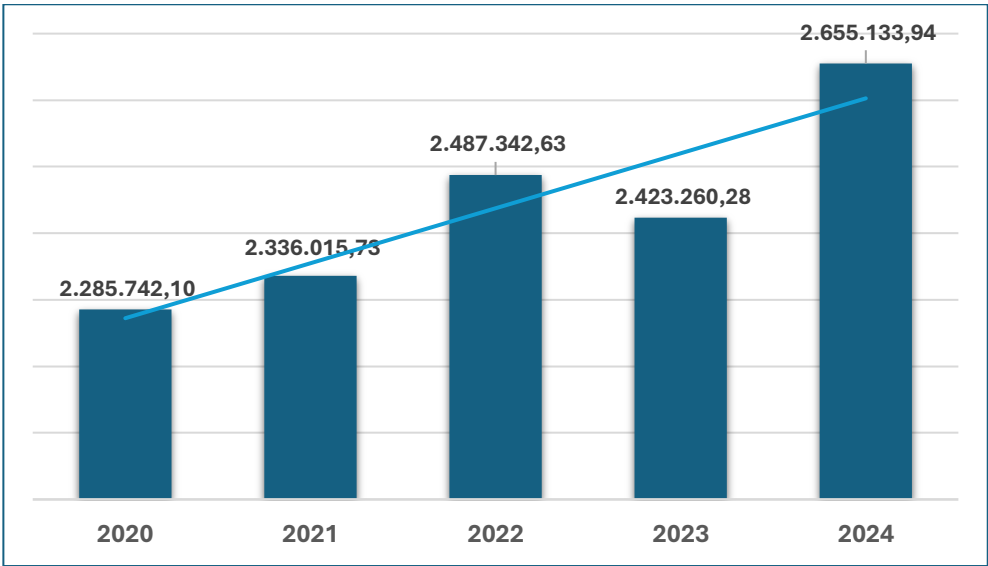
Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan sesuai amanat Pasal 50 ayat (2) jika daerah tidak memenuhi alokasi belanja sesuai kewenangannya maka dapat ditunda dan/atau dipotong dana transfer umum dari pemerintah pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri dari:

- 1) Belanja operasi
- Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- 2) Belanja modal
- Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- 3) Belanja tidak terduga
- Merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- 4) Belanja transfer
- Merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Demak dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024) dalam tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,92% per tahun. Fluktuasi belanja daerah terjadi di tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Daerah di tahun 2020 mencapai Rp2,285 triliun naik di tahun 2021 (Rp2,336 triliun) dan tahun 2022 menjadi sebesar Rp2,487 triliun kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi Rp2,423 triliun dan meningkat kembali pada tahun 2024 mencapai Rp2,655 triliun. Adapun fluktuasi di tahun 2023 lebih disebabkan kurang terserapnya anggaran belanja daerah khususnya yang berbentuk belanja modal.

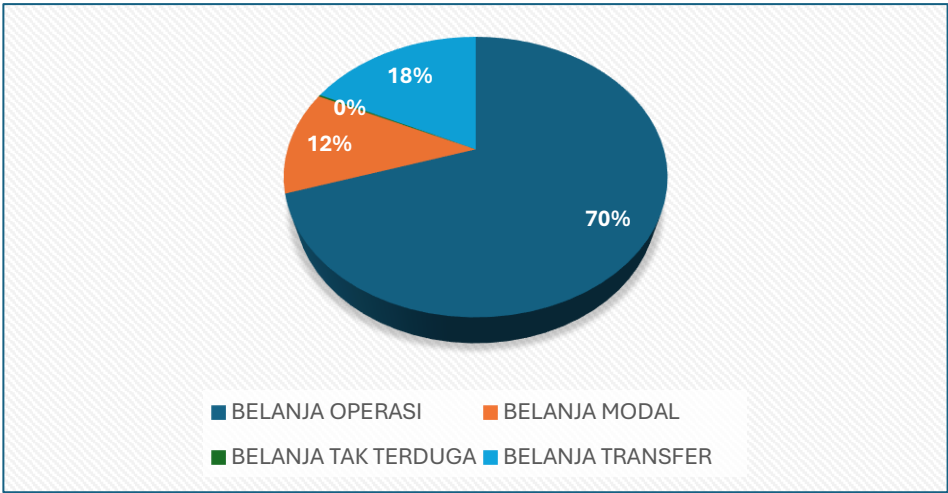
Gambar II.40
Perkembangan Belanja Kabupaten Demak Tahun 2020-2024 (juta)



Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

Jika dilihat lebih rinci, hampir semua jenis belanja daerah mengalami tren meningkat, kecuali belanja tak terduga yang mengalami penurunan cukup drastis yaitu dari Rp24,913 miliar (2020) menjadi Rp0 (2024). Belanja yang mengalami tren meningkat yaitu Belanja Operasi sebesar 6,03%, Belanja Modal sebesar 0,54% dan Belanja Transfer sebesar 0,11%. Jika dilihat dari komposisinya dalam 5 (lima) tahun terakhir maka terlihat bahwa rata-rata 70% Belanja Daerah digunakan untuk belanja operasi, kemudian 12% digunakan untuk belanja modal, dan 18% digunakan untuk belanja transfer dan kurang dari 1% digunakan untuk belanja tidak terduga.

Gambar II.41
Rata-rata Struktur Belanja Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2020-2024

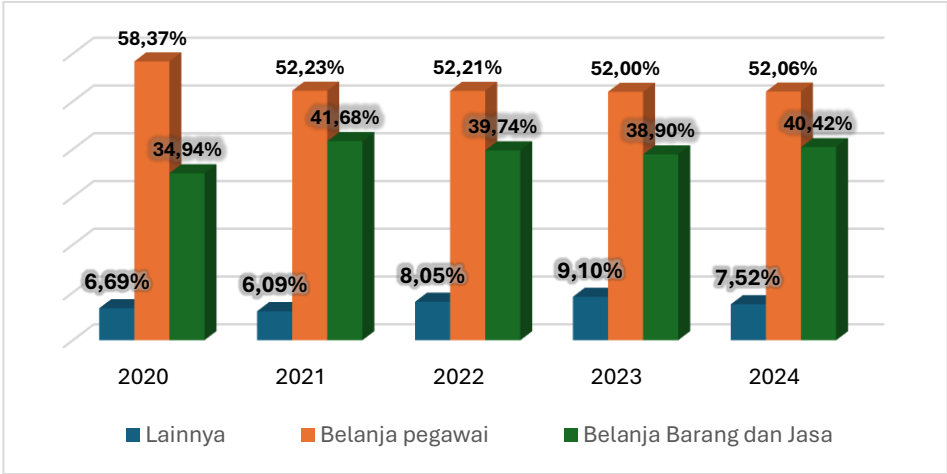


Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

a. Belanja Operasi

Dalam 5 (lima) tahun terakhir belanja operasi Kabupaten Demak telah tumbuh 6,03% per tahun dari Rp1,537 triliun (2020) menjadi Rp1,938 triliun (2024). Sebagian besar atau lebih dari separuh belanja operasi yang ada digunakan untuk belanja pegawai kemudian digunakan untuk belanja barang dan jasa. Jika dilihat perkembangannya, proporsi belanja pegawai terbesar terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar 58,37% dari total belanja operasi yang ada, kemudian terus ditekan hingga mencapai 52,06% di tahun 2024. Sebaliknya proporsi belanja barang dan jasa relatif terus meningkat setiap tahun dari 34,94% (2020) menjadi 40,42% (2024). Sementara belanja operasi lainnya (belanja hibah dan bantuan sosial) proporsinya tidak pernah lebih dari 10% dan tertinggi terjadi di tahun 2023 yang mencapai 9,10%.

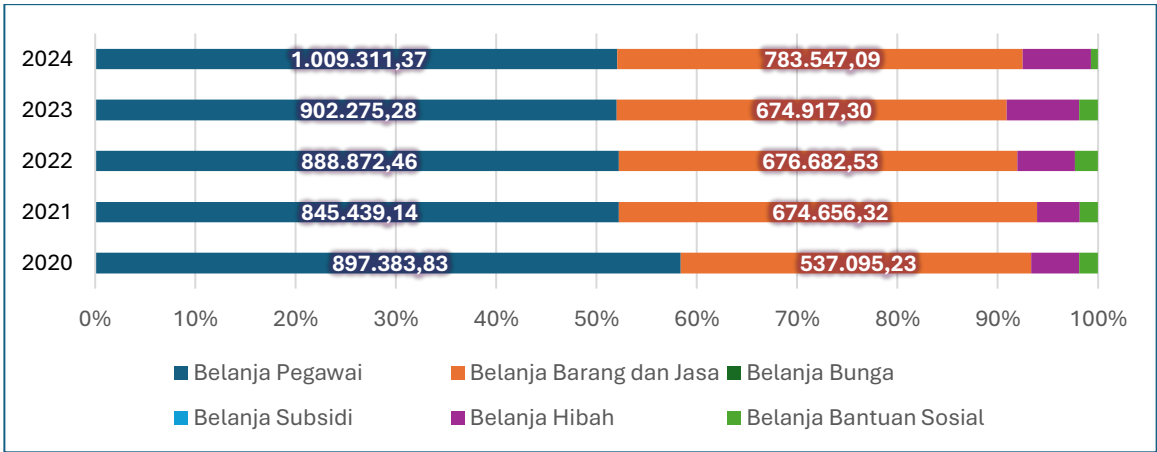
Gambar II.42
Rata-rata Struktur Belanja Operasi Kabupaten Demak
Tahun 2020-2024



Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

Meskipun secara proporsi belanja pegawai terus menurun, namun secara nominal nilainya terus mengalami peningkatan dari Rp897,383 miliar (2020) menjadi Rp.1,009 triliun (2024), peningkatan tersebut salah satunya karena bertambahnya CPNS dan PPPK. Berdasarkan UU nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, maka belanja pegawai ditargetkan di tahun 2027 paling besar adalah 30%. Untuk itu kondisi peningkatan nominal belanja pegawai ini perlu menjadi perhatian karena agar selain dapat memenuhi amanat undang-undang tersebut juga agar ke depan tidak mengganggu alokasi proporsi dan kualitas belanja publik khususnya yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Gambar II.43
Perkembangan Struktur Belanja Operasi Kabupaten Demak
Tahun 2020-2024



Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

b. Belanja Modal

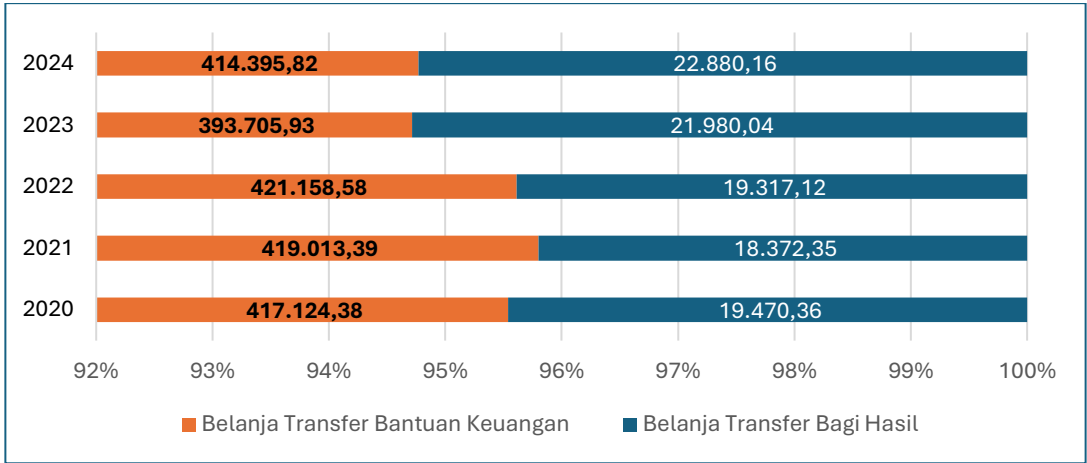
Dalam 5 (lima) tahun terakhir belanja modal Kabupaten Demak mengalami tren naik 0,54% per tahun dari Rp286,913 miliar (2020)

d. Belanja Transfer

Dalam 5 (lima) tahun terakhir belanja transfer Kabupaten Demak relatif meningkat sekitar 0,11% per tahun dari Rp436,594 miliar (2020) menjadi Rp437,275 miliar (2024). Kenaikan tersebut didorong oleh relatif meningkatnya belanja bagi hasil yang tumbuh 4,35% per tahun dari Rp19,470 miliar (2020) menjadi Rp22,880 miliar (2024). Belanja transfer bantuan keuangan sedikit fluktuatif, mengalami sedikit penurunan sebesar -0,07% per tahun. Adapun belanja transfer bantuan keuangan terbesar terjadi pada tahun 2022 yang sebesar Rp421,158 miliar.

Jika dilihat dari proporsinya maka rata-rata lebih dari 95% alokasi belanja transfer adalah untuk belanja transfer bantuan keuangan ke desa, dan sisanya untuk belanja bagi hasil khususnya bagi hasil pajak.

Gambar II.45
Perkembangan Komposisi Belanja Transfer Kabupaten Demak
Tahun 2020-2024



Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

Jika dilihat dari aspek surplus/defisit belanja, maka dalam 5 tahun terakhir defisit belanja hanya terjadi di tahun 2022 dan 2023 yang nilai defisitnya secara berturut-turut sebesar Rp84,624 miliar dan Rp6,473 miliar. Meskipun terjadi defisit belanja namun besaran defisit tersebut masih dapat ditutup SiLPA yang dapat digunakan di tahun 2022 dan 2023 yang secara berturut-turut sebesar Rp242,258 miliar dan 142,637 miliar. Adapun tahun 2020, 2021, dan 2024 terjadi surplus anggaran belanja.

Dengan melihat kinerja belanja daerah 5 (lima) tahun terakhir, maka masih diperlukan strategi untuk memastikan pengeluaran yang efisien dan efektif, serta mengoptimalkan manfaat yang diperoleh dari anggaran belanja yang tersedia. Beberapa strategi yang dapat diadopsi untuk di antaranya

- 1) Perencanaan Anggaran yang Cermat: Melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan dan prioritas daerah, serta menyusun anggaran dengan cermat. Ini termasuk mengidentifikasi area-area penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan masyarakat lainnya.

- 2) **Transparansi dan Akuntabilitas:** Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mengadopsi praktik akuntabilitas yang kuat. Ini mencakup publikasi anggaran secara terbuka, pelaporan keuangan yang jelas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan anggaran.
- 3) **Pengadaan Barang dan Jasa yang Efisien:** Memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan, kompetitif, dan efisien. Ini dapat mencakup penggunaan sistem lelang terbuka, kerja sama dengan pihak swasta, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi proses pengadaan.
- 4) **Pengelolaan Utang yang Bijaksana:** Mengelola utang daerah dengan bijaksana, termasuk pemantauan tingkat bunga dan jangka waktu, serta memastikan bahwa pinjaman digunakan untuk proyek-proyek yang menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
- 5) **Pengembangan Pendapatan Alternatif:** Mencari sumber pendapatan alternatif untuk meningkatkan anggaran belanja, meliputi pengembangan sektor pariwisata, pengembangan kawasan industri, atau kemitraan dengan sektor swasta untuk proyek-proyek investasi.
- 6) **Peningkatan Efisiensi Operasional:** Mengidentifikasi area-area di mana efisiensi operasional dapat ditingkatkan, termasuk pengurangan biaya administratif, penggunaan teknologi untuk otomatisasi proses, dan peningkatan produktivitas pegawai.
- 7) **Pemantauan dan Evaluasi yang Berkelanjutan:** Melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus terhadap pelaksanaan anggaran dan proyek-proyek yang didanai oleh belanja daerah. Ini membantu dalam mengidentifikasi area-area perbaikan dapat dilakukan dan memastikan bahwa dana digunakan secara efektif.

Secara keseluruhan perkembangan belanja daerah Kabupaten Demak tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.66
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020-2024 (dalam juta)

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertum- buhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2	BELANJA	2.285.742,10	2.336.015,73	2.487.342,63	2.423.260,28	2.655.133,94	3,92
2.1	BELANJA OPERASI	1.537.320,15	1.618.707,51	1.702.565,56	1.735.040,88	1.938.674,24	6,03
2.1.1	Belanja Pegawai	897.383,83	845.439,14	888.872,46	902.275,28	1.009.311,37	3,18
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	537.095,23	674.656,32	676.682,53	674.917,30	783.547,09	10,44

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertum- buhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	74.065,55	69.147,27	97.499,40	125.045,55	131.867,18	17,02
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	28.775,55	29.464,77	39.511,18	32.802,75	13.948,60	-9,49
2.1.7	Belanja keuangan	-	-	-	-	-	0,00
2.2	BELANJA MODAL	286.913,55	279.922,49	344.301,37	272.530,94	279.183,72	0,54
2.2.1	Belanja Tanah	286.913,55	-	-	-	1.650,00	0,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	-	114.105,96	101.121,67	87.781,01	75.084,34	-13,83
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	-	62.909,40	136.701,69	70.501,06	46.410,43	-41,30
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	98.920,70	101.011,83	106.231,14	148.336,83	22,40
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	3.986,41	5.466,17	8.017,73	7.543,18	20,38
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	158,93	0,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	24.913,66	-	-	2,49	-	
2.3.1	Belanja Tak Terduga	24.913,66	-	-	2,49	-	
2.4	BELANJA TRANSFER	436.594,73	437.385,73	440.475,70	415.685,97	437.275,97	0,11
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	19.470,36	18.372,35	19.317,12	21.980,04	22.880,16	4,35
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	19.470,36	15.291,09	16.577,61	18.901,65	22.880,16	5,50
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	-	0,00
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	3.081,26	2.739,51	3.078,40	-	-43,81
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	417.124,38	419.013,39	421.158,58	393.705,93	414.395,82	(0,07)
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	-	-	-	-	-
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	417.124,38	419.013,39	421.158,58	393.705,93	414.395,82	-0,07
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	47.996,90	29.228,28	(84.624,76)	(6.473,89)	49.026,25	-344,57

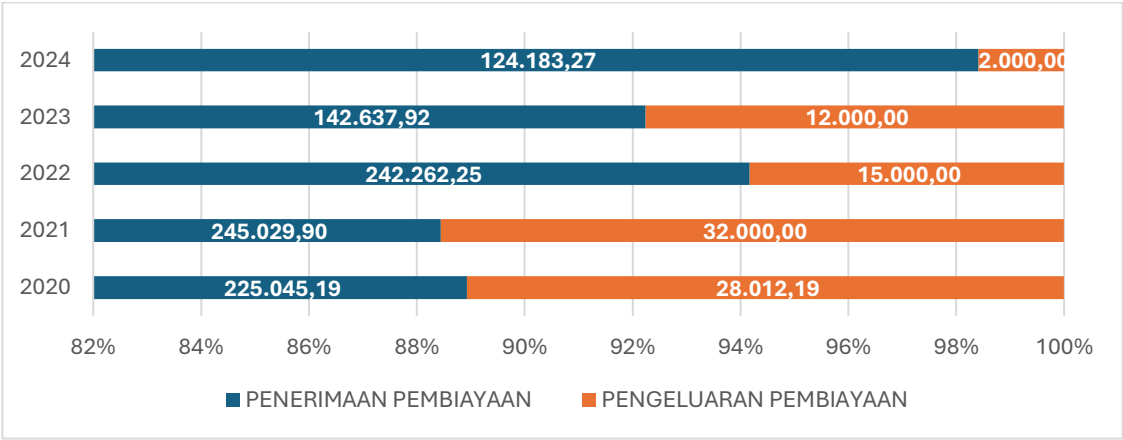
Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

3. Pembiayaan

Perkembangan pembiayaan netto dalam 5 tahun terakhir relatif mengalami fluktuasi penurunan -8,55% per tahun dari Rp197,033 miliar (2020) menjadi Rp122,183 miliar (2024). Menurunnya pembiayaan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya penerimaan pembiayaan dari sumber SiLPA

khususnya dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Sebenarnya jika dilihat lebih mendalam, SiLPA dari tahun 2019-2022 relatif mengalami peningkatan dan mulai menurun signifikan di tahun 2023 dan 2024. Hal itu menunjukkan ada peningkatan efektivitas penyerapan anggaran kegiatan di tahun 2023 dan 2024. Sementara dari pos pengeluaran pembiayaan juga mengalami fluktuasi penurunan. Pengeluaran pembiayaan meningkat dari tahun 2020-2021 kemudian mulai menurun di tahun 2022 sampai 2024. Fluktuasi pengeluaran pembiayaan tersebut disebabkan oleh adanya penyertaan modal untuk meningkatkan pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Gambar II.46
Perkembangan Komposisi Pembiayaan Kabupaten Demak
Tahun 2020-2024



Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

Secara keseluruhan perkembangan realisasi APBD Kabupaten Demak tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel II.67

Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020-2024 (Dalam Jutaan)

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	PENDAPATAN	2.333.739,00	2.365.244,01	2.402.717,87	2.416.786,38	2.704.160,19	3,85
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	439.694,42	445.010,14	477.198,40	508.055,35	594.879,72	8,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	152.910,87	165.776,09	187.735,57	194.225,84	223.506,94	10,05
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	27.262,66	24.230,49	27.532,63	28.944,22	40.972,04	12,30
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	20.579,32	22.845,41	24.738,04	28.824,61	32.847,40	12,44
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	238.941,58	232.158,14	237.192,16	256.060,68	297.553,34	5,87
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.756.528,53	1.793.631,27	1.914.411,16	1.896.206,75	2.102.854,87	4,70
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.538.859,15	1.570.431,80	1.645.394,24	1.644.778,51	1.852.443,80	4,85
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1.181.046,80	1.230.848,49	1.315.198,93	1.350.988,40	1.567.338,13	7,45
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	24.244,29	28.927,54	24.110,06	67.965,58	63.026,39	44,32
1.2.1.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	18.909,52	24.339,87	33.876,91	2.241,63	1.635,97	-13,13
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	860.873,47	856.411,41	856.459,97	872.433,48	961.884,93	2,90
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	277.019,53	321.169,67	400.751,99	408.347,73	540.790,85	18,76
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	70.722,86	55.119,93	50.226,20	31.244,23	20.070,25	-26,12
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.3	Dana Desa	287.089,49	284.463,39	279.969,12	262.545,88	265.035,42	-1,94
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	217.669,38	223.199,47	269.016,92	251.428,24	250.411,07	4,03
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	151.902,44	184.791,23	199.350,33	198.037,62	204.204,25	8,00
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	65.766,93	38.408,24	69.666,59	53.390,62	46.206,82	0,74
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	65.766,93	38.408,24	69.666,59	53.390,62	46.206,82	0,74
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	-	-	-	0,00



No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	137.516,05	126.602,60	11.108,31	12.524,29	6.425,60	-33,78
1.3.1	Pendapatan Hibah	137.444,07	14.112,04	11.043,31	12.174,14	5.708,11	-38,59
1.3.2	Pendatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	71,98	112.490,57	65,00	350,15	717,49	39156,56
2	BELANJA	2.285.742,10	2.336.015,73	2.487.342,63	2.423.260,28	2.655.133,94	3,92
2.1	BELANJA OPERASI	1.537.320,15	1.618.707,51	1.702.565,56	1.735.040,88	1.938.674,24	6,03
2.1.1	Belanja Pegawai	897.383,83	845.439,14	888.872,46	902.275,28	1.009.311,37	3,18
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	537.095,23	674.656,32	676.682,53	674.917,30	783.547,09	10,44
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	74.065,55	69.147,27	97.499,40	125.045,55	131.867,18	17,02
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	28.775,55	29.464,77	39.511,18	32.802,75	13.948,60	-9,49
2.1.7	Belanja keuangan	-	-	-	-	-	0,00
2.2	BELANJA MODAL	286.913,55	279.922,49	344.301,37	272.530,94	279.183,72	0,54
2.2.1	Belanja Tanah	286.913,55	-	-	-	1.650,00	0,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	-	114.105,96	101.121,67	87.781,01	75.084,34	-13,83
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	-	62.909,40	136.701,69	70.501,06	46.410,43	-41,30
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	98.920,70	101.011,83	106.231,14	148.336,83	22,40
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	3.986,41	5.466,17	8.017,73	7.543,18	20,38
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	158,93	0,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	24.913,66	-	-	2,49	-	
2.3.1	Belanja Tak Terduga	24.913,66	-	-	2,49	-	
2.4	BELANJA TRANSFER	436.594,73	437.385,73	440.475,70	415.685,97	437.275,97	0,11
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	19.470,36	18.372,35	19.317,12	21.980,04	22.880,16	4,35
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	19.470,36	15.291,09	16.577,61	18.901,65	22.880,16	5,50
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	-	0,00
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	3.081,26	2.739,51	3.078,40	-	-43,81



No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	417.124,38	419.013,39	421.158,58	393.705,93	414.395,82	(0,07)
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	-	-	-	-	-
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	417.124,38	419.013,39	421.158,58	393.705,93	414.395,82	-0,07
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	47.996,90	29.228,28	(84.624,76)	(6.473,89)	49.026,25	-344,57
3	PEMBIAYAAN	197.033,00	213.029,90	227.262,25	130.637,92	122.183,27	-8,55
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	225.045,19	245.029,90	242.262,25	142.637,92	124.183,27	-11,58
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	225.039,22	245.029,90	242.258,94	142.637,49	124.164,03	-11,58
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0,00
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	-	-	-	-	-	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-	0,00
3.1.5	penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5,97	-	3,31	0,43	19,25	2146,87
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-	-	-	-	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	28.012,19	32.000,00	15.000,00	12.000,00	2.000,00	-35,56
3.2.1	pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	-	-	-	-	-	0,00
3.2.2	penyertaan modal daerah;	28.012,19	32.000,00	15.000,00	12.000,00	2.000,00	-35,56
3.2.3	pembentukan Dana Cadangan;	-	-	-	-	-	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-	0,00
3.2.5	pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	197.033,00	213.029,90	227.262,25	130.637,92	122.183,27	-8,55

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

2.2.2 Neraca Daerah

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti Kepala Daerah dan Kepala Bagian Keuangan serta Kepala dinas), pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada waktu tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

1) Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya.

Secara agregat nilai aset Kabupaten Demak dari tahun 2020-2024 relatif mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan mencapai 0,67% per tahun dari Rp5,697 triliun (2020) menjadi Rp5,851 triliun (2024). Adapun jenis aset yang rata-rata pertumbuhannya positif dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah investasi jangka panjang (8,01% per tahun), dan aset lainnya (10,27% per tahun). Sementara yang mengalami penurunan adalah aset lancar yang mengalami penurunan nilai dengan rata-rata penurunan sebesar -5,57% per tahun dan aset tetap mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar -0,84% per tahun. Jika dilihat proporsinya maka rata-rata lebih dari 87% nilai total aset yang ada berasal dari jenis aset tetap.

2) Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jenis kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten Demak dalam kurun waktu tahun 2020-2024 berupa kewajiban jangka pendek. Nilai kewajiban jangka pendek tersebut cukup berfluktuatif namun relatif mengalami tren

meningkat cukup signifikan sebesar 28,87% per tahun dari Rp16,183 miliar (2020) menjadi Rp44,631 miliar (2024). Jika dilihat lebih dalam maka nilai kewajiban jangka pendek terbesar disumbangkan oleh utang beban yang trennya juga relatif meningkat sebesar 34,35% per tahun dari Rp12,032 miliar (2020) menjadi Rp39.199 miliar (2024).

3) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Semakin besar nilai ekuitas dana maka akan semakin bagus juga kondisi keuangan suatu daerah. Ekuitas dana terbagi menjadi tiga kategori yakni ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Kategori dana tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya.

Nilai ekuitas dana Kabupaten Demak berfluktuasi dari tahun ke tahun, namun secara agregat sedikit mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,55% per tahun, pada tahun 2020 sebesar Rp5,680 Triliun menjadi Rp5,807 Triliun di tahun 2024. Ekuitas dari tahun 2020-2021 nilainya mengalami peningkatan, kemudian mulai menurun nilainya di tahun 2022 hingga 2024. Penurunan nilai ekuitas dapat memiliki dampak signifikan pada kesehatan keuangan suatu entitas, mengurangi kemampuannya untuk memperoleh pembiayaan tambahan, berinvestasi dalam proyek-proyek baru, atau bahkan mempertahankan keseimbangan keuangan yang sehat. Oleh karena itu, manajemen risiko dan pengelolaan keuangan yang hati-hati penting untuk memitigasi risiko penurunan nilai ekuitas. Ada beberapa strategi untuk menekan penurunan nilai ekuitas antara lain: mencegah dan menekan kerugian investasi, mencegah dan menekan penurunan nilai aset, mencegah dan menekan kerugian operasional di mana pendapatan menurun atau biaya meningkat, serta membatasi pinjaman baru atau peningkatan utang lainnya.

Secara keseluruhan neraca Kabupaten Demak disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel II.68

Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	152.620.003.994	149.527.520.102	91.006.926.416	88.992.475.224	128.691.915.934	-4,17
Kas di Bendahara Penerimaan	5.410.000		-	49.963.543	8.148.534	10,78
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.725.533	9.192.000	-	122.131		-100,00
Kas di BLUD	83.004.122.827	105.572.114.569	49.362.311.832	34.183.817.019	41.040.045.644	-16,15
Kas di Bendahara FKTP						
Kas di Bendahara BOS	9.400.366.933	4.535.176.971	2.268.254.719	351.151.381	163.825.936	-63,67
Kas dana BOK Puskesmas				586.497.193	1.313.738.923	124,00
Kas Lainnya						
Setara Kas						
Investasi Jangka Pendek						
Piutang Pendapatan						
Piutang Pajak	33.732.350.335	38.125.386.605	40.057.188.808	41.446.749.542	51.798.598.825	11,32
<i>Penyisihan Piutang Pajak</i>	(18.016.582.977)	(19.654.759.875)	(17.999.002.136)	(12.293.220.451)	(16.902.823.277)	-1,58
Piutang Retribusi	2.891.581.157	3.131.888.167	3.963.292.057	4.204.373.237	5.424.302.615	17,03
<i>Penyisihan Piutang Retribusi</i>	(1.856.407.165)	(2.260.738.857)	(2.640.988.767)	(3.684.713.323)	(4.458.370.073)	24,49
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan						
<i>Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan</i>						
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	45.304.187.336	41.291.312.261	28.289.564.750	34.498.245.393	41.330.083.758	-2,27



Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
<i>Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah</i>	(8.358.677.625)	(10.031.100.020)	(8.334.914.974)	(13.884.400.399)	(15.934.100.617)	17,50
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	2.431.356.838				13.356.424.448	53,09
<i>Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat</i>					(66.782.122)	
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	18.210.868.637	4.706.680.913	1.789.751.413	7.675.519.958		-100,00
<i>Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</i>				(38.377.600)		-100,00
Beban Dibayar Dimuka	350.346.115	318.983.348	239.428.322	166.417.227	92.193.804	-28,38
Persediaan	36.892.991.148	40.390.824.760	51.992.843.938	48.758.854.069	37.674.477.966	0,53
Jumlah Aset Lancar	356.613.643.085	355.662.480.944	239.994.656.377	231.013.474.144	283.531.680.298	-5,57
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Non Permanen	-	-	-	-	-	
Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	
Dana Bergulir	439.441.007	439.441.007				-100,00
<i>Penyisihan Investasi Jangka Panjang</i>	(439.441.007)	(439.441.007)				-100,00
Jumlah Investasi Non Permanen	-	-	-	-	-	
Investasi Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	279.056.874.262	340.918.859.827	357.985.963.322	375.396.489.085	379.725.078.100	8,01



Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Jumlah Investasi Permanen	279.056.874.262	340.918.859.827	357.985.963.322	375.396.489.085	379.725.078.100	8,01
Jumlah Investasi Jangka Panjang	279.056.874.262	340.918.859.827	357.985.963.322	375.396.489.085	379.725.078.100	8,01
ASET TETAP						
Tanah	1.468.257.140.565	1.658.719.429.887	1.654.245.759.088	1.634.013.271.381	1.643.348.018.201	2,86
Peralatan dan Mesin	652.310.417.193	759.003.789.718	847.012.418.267	927.337.762.884	998.769.393.492	11,24
Gedung dan Bangunan	1.455.291.130.814	1.516.087.048.343	1.656.458.725.735	1.506.624.737.910	1.572.125.561.474	1,95
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.961.603.402.995	3.083.935.667.433	3.194.214.215.497	3.258.945.627.713	3.422.321.246.729	3,68
Aset Tetap Lainnya	72.073.364.690	74.986.700.505	78.647.253.264	83.763.368.405	87.243.674.117	4,89
Konstruksi dalam Pengerjaan	20.559.868.450	20.978.591.350	60.725.284.770	24.753.471.310	12.524.217.020	-11,65
Akumulasi Penyusutan	(1.599.583.488.609)	(1.915.911.666.330)	(2.239.530.820.655)	(2.527.300.345.978)	(2.873.465.596.173)	15,77
Jumlah Aset Tetap	5.030.511.836.098	5.197.799.560.905	5.251.772.835.965	4.908.137.893.625	4.862.866.514.859	-0,84
PROPERTI INVESTASI						
Properti Investasi					322.203.815.720	
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi					(42.119.163.527)	
Jumlah Properti Investasi					280.084.652.193	
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
Jumlah Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
ASET LAINNYA						
Tagihan Penjualan Angsuran						
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah			245.442.505	245.442.505	245.442.505	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	738.125.000	2.578.130.302	3.006.205.302	3.006.205.302	3.006.205.302	42,06
Aset Tak Berwujud	8.433.461.756	9.457.146.856,00	11.091.233.011	14.000.481.621	17.271.575.857	19,63



Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(2.151.882.040)	(2.844.343.922)	(3.737.361.102)	(4.716.575.757)	(5.733.304.718)	27,76
Aset Lain-Lain	23.918.659.896	11.070.858.644	13.240.145.787	44.430.218.209	44.830.842.832	17,01
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain					(13.872.078.738)	
Jumlah Aset Lainnya	30.938.364.612	20.261.791.880	23.845.665.503	56.965.771.880	45.748.683.040	10,27
JUMLAH ASET	5.697.120.718.057	5.914.642.693.556	5.873.599.121.167	5.571.513.628.734	5.851.956.608.490	0,67
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1.725.533	17.385.066.000				-100,00
Pendapatan Diterima Dimuka	4.149.394.490	4.244.204.432	4.619.677.894	4.511.281.092	5.431.660.649	6,96
Utang Beban	12.032.199.224	13.383.051.597	18.595.065.222	25.959.176.166	39.199.222.781	34,35
Utang Jangka Pendek Lainnya					429.888	
Pendapatan Lain - Lain PAD yang Sah Diterima Dimuka						
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	16.183.319.247	35.012.322.029	23.214.743.116	30.470.457.258	44.631.313.318	28,87
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	-	-	-			
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-			
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-			

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank						
Utang Dalam Negeri - Obligasi						
Utang Jangka Panjang Lainnya						
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	
JUMLAH KEWAJIBAN	16.183.319.247	35.012.322.029	23.214.743.116	30.470.457.258	44.631.313.318	28,87
EKUITAS						
EKUITAS						
Equitas	5.680.937.398.810	5.879.630.371.527	5.850.384.378.051	5.811.684.568.182	5.807.325.295.172	0,55
Sisa Kas BLUD						
Sisa Kas JKN						
JUMLAH EKUITAS	5.680.937.398.810	5.879.630.371.527	5.850.384.378.051	5.811.684.568.182	5.807.325.295.172	0,55
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5.697.120.718.057	5.914.642.693.556	5.873.599.121.167	5.842.155.025.440	5.851.956.608.490	0,67

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

4) **Rasio Keuangan**

Untuk menganalisis kondisi keuangan Kabupaten Demak periode tahun 2020-2024 digunakanlah beberapa analisis rasio keuangan. Rasio keuangan pemerintah daerah diukur dengan menggunakan analisis terhadap rasio likuiditas, solvabilitas dan aktivitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Rasio Likuiditas**

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah mampu memenuhi kewajibannya maka pemerintah daerah tersebut likuid, sedangkan jika pemerintah daerah tidak mampu memenuhi kewajibannya maka pemerintah daerah tersebut tidak likuid. Ada beberapa rasio likuiditas yang dapat digunakan untuk menganalisis namun di sini pendekatan yang dipakai adalah rasio lancar (current ratio). Rasio ini juga dikenal sebagai rasio aset cepat atau rasio acid-test. Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa harus menjual persediaan. Pada umumnya, rasio lancar di atas 2 telah dianggap baik.

Rasio lancar Pemerintah Kabupaten Demak tahun 2020-2024 cukup berfluktuatif namun trennya semakin menurun dari nilai 22,04 (2020) menjadi 6,35 (2024). Hal ini menunjukkan bahwa aset lancar di tahun 2020 nilainya 22-23 kali lipat dibandingkan total kewajiban lancar yang dibebankan. Sementara di tahun 2024 nilai aset lancarnya 6-7 kali lipat dibandingkan total kewajiban lancar yang ada di tahun 2024. Dari nilai rasio lancar 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan bahwa Kabupaten Demak memiliki tingkat likuiditas yang cukup tinggi meskipun mengalami penurunan. Untuk itu yang perlu dijaga adalah membatasi jumlah kewajiban lancarnya agar membesar atau bahkan tidak melebihi nilai aset lancar yang ada

Berikut ini terlihat fluktuatifnya rasio lancar Kabupaten Demak Tahun 2020-2024.

Tabel II.69
Rasio Lancar Kabupaten Demak Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
ASET LANCAR	356.613.643.085	355.662.480.944	239.994.656.377	231.013.474.144	283.531.680.298
KEWAJIBAN LANCAR	16.183.319.247	35.012.322.029	23.214.743.116	30.470.457.258	44.631.313.318
RASIO LANCAR	22,04	10,16	10,34	7,58	6,35

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

2. Rasio Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi seluruh hutang dengan memakai semua aset. Dengan kata lain aset menjadi penjamin utang yang menjadi konsep dasar akuntansinya. Solvabilitas pemerintah daerah penting untuk diketahui supaya tahu kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi atau membayar semua pinjaman melalui jumlah aktiva yang dimiliki yang memengaruhi jenis-jenis laporan keuangan. Atau secara singkat bisa dimaknai kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi.

a) Total Debt to Equity Ratio (Rasio Hutang terhadap Ekuitas)

Kesehatan pengelolaan keuangan pemda bisa diukur dari perspektif keuangan internal. Salah satunya dengan pengukuran rasio utang terhadap modal atau dengan istilah yang lebih dikenal sebagai *debt to equity ratio*. *Debt to Equity Ratio* (rasio utang terhadap modal) atau yang bisa disingkat DER adalah rasio hutang terhadap ekuitas. Bisa juga disebut dengan rasio hutang modal. Pengertian dari *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas yang menunjukkan kemampuan modal sendiri dari entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Semakin rendah rasio ini, semakin sedikit ketergantungan perusahaan pada utang dan semakin stabil keuangannya.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap ekuitas Kabupaten Demak dari tahun 2020-2024 berfluktuatif tapi cenderung naik secara agregat. Nilai rasio terendah terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar 0,003 dan yang tertinggi terjadi di tahun 2024 sebesar 0,008. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rasio terbaik (terendah) terjadi di tahun 2020 di mana nilai kewajiban yang ada jumlahnya hanya sekitar 0,28% dari total ekuitas yang ada. Sementara nilai rasio tertinggi (terburuk) terjadi di tahun 2024 di mana jumlah total kewajiban yang ada jumlahnya hanya sekitar 0,77% dari total ekuitas yang ada.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah kewajiban kurun waktu 2020-2024 nilainya jauh lebih kecil dibandingkan ekuitas yang dimiliki sehingga dapat dikatakan kemampuan Kabupaten Demak cukup untuk menjamin pembayaran hutang yang ada masih sangat baik.

Tabel II.70
Rasio Hutang Kabupaten Demak Tahun 2020 – 2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
KEWAJIBAN	16.183.319.247	35.012.322.029	23.214.743.116	30.470.457.258	44.631.313.318
EKUITAS	5.680.937.398.810	5.879.630.371.527	5.850.384.378.051	5.811.684.568.182	5.807.325.295.172
TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO	0,003	0,006	0,004	0,005	0,008

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

b) Total Debt to Total Asset Ratio (Rasio Hutang terhadap Total Aktiva)

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang (baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang) dengan jumlah seluruh aktiva (aset). Secara akuntansi rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang. Atau menunjukkan proporsi total aset yang dibiayai oleh hutang. Semakin rendah rasio ini, semakin sedikit risiko perusahaan terhadap perubahan suku bunga dan pembayaran bunga.

Pada dasarnya rasio ini tidak berbeda dengan rasio sebelumnya (Rasio Hutang terhadap Ekuitas). Bedanya rasio ini yang menjadi perbandingan total hutang ialah nilai total aset tanpa dikurangi kewajiban yang ada. Oleh karena itu rasionya akan sedikit lebih kecil.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap total aktiva (total aset) Kabupaten Demak dari tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif di mana angka rasio tertinggi (terburuk) terjadi di tahun 2024 dengan nilai rasio 0,0076 dan yang terendah (terbaik) terjadi di tahun 2020 dengan nilai rasio 0,0028. Oleh karena itu secara keseluruhan Kabupaten Demak tidak memiliki risiko gagal bayar kewajiban yang ada. Artinya secara keseluruhan nilai total aset daerah nilainya jauh lebih besar daripada jumlah hutang yang ada di Kabupaten Demak.

Tabel II.71
Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kabupaten Demak
Tahun 2020 – 2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
KEWAJIBAN	16.183.319.247	35.012.322.029	23.214.743.116	30.470.457.258	44.631.313.318
AKTIVA	5.697.120.718.057	5.914.642.693.556	5.873.599.121.167	5.571.513.628.734	5.851.956.608.490
TOTAL DEBT TO ASSET RATIO	0,0028	0,0059	0,0040	0,0055	0,0076

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

3. Rasio Aktivitas

Secara akuntansi rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen dalam menggunakan sumber daya ekonomis untuk menghasilkan penjualan yang menguntungkan.

a) Perputaran aktiva tetap (fixed assets turn over)

Adalah rasio antara penjualan dengan aktiva tetap yang mengukur efisiensi penggunaan aktiva tetap atau perputaran aktiva tetap. Rasio ini menunjukkan bagaimana perusahaan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Demak menggunakan aktiva tetapnya seperti tanah, gedung, jalan, kendaraan, mesin-mesin, perlengkapan kantor dll. untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan

Asli Daerah (PAD). Semakin besar rasionya maka semakin baik pula manajemen sumber daya ekonomis tersebut dalam memperoleh keuntungan/ penerimaan daerah.

Perkembangan rasio perputaran aktiva tetap Kabupaten Demak dalam kurun waktu 2020-2024 memiliki tren sedikit berfluktuasi namun terus meningkat. Rasio tahun 2020 mencapai 0,087 dan terus meningkat hingga 0,122 di tahun 2024 hanya terjadi sedikit penurunan pada tahun 2021 yaitu 0,086. Itu artinya kinerja Pemerintah Kabupaten Demak dalam memanfaatkan aset tetapnya semakin membaik di mana pada tahun 2020 dari Rp5,030 triliun nilai aset yang ada mampu mendorong dan menghasilkan keuntungan (PAD) sebesar Rp439,694 miliar atau 8,74% dari nilai aset tetap dan pada tahun 2024 berkinerja lebih baik lagi di mana dengan memanfaatkan aset senilai Rp4,862 triliun mampu mendorong dan menghasilkan keuntungan (PAD) sebesar Rp594,887 miliar atau 12,23% dari nilai aset. Jika dilihat kinerjanya, maka secara umum perbandingan pemanfaatan aset tetap terhadap perolehan PAD masih sangat kecil. Oleh karena itu efektivitas pendayagunaan aset masih perlu dioptimalkan.

Tabel II.72
Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Demak Tahun 2020 – 2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PAD	439.694.424.386	445.010.135.309	477.198.401.099	508.055.346.278	594.887.868.035
AKTIVA TETAP (Aset Tetap)	5.030.511.836.098	5.197.799.560.905	5.251.772.835.965	4.908.137.893.625	4.862.866.514.859
RASIO PERPUTARAN AKTIVA TETAP	0,087	0,086	0,091	0,104	0,122

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

b) Perputaran total aktiva (*total assets turn over*)

Hampir mirip dengan perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva juga digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan total aset daerah untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain semakin tinggi rasionya semakin efisien pemerintah daerah dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan PAD. Sebaliknya Rasio Perputaran Aset yang rendah menandakan kurang efisiennya manajemen dalam menggunakan asetnya dan kemungkinan besar adanya masalah manajemen ataupun produksinya.

Rasio perputaran total aktiva Kabupaten Demak dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami perkembangan positif dimana dari nilai rasio 0,077 di tahun 2020 menjadi 0,102 di tahun 2024. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemanfaatan total aset di tahun 2020 mampu memberikan keuntungan PAD sebesar 7,72% dari nilai total aset itu sendiri. Kinerja

pemanfaatan total aset di tahun 2024 semakin membaik hingga mampu menghasilkan 10,17% keuntungan dari nilai total aset yang ada.

Secara keseluruhan dari tahun 2020-2024 rata-rata nilai total aset daerah terbilang memiliki kinerja semakin membaik namun ke depan masih perlu ditingkatkan melalui beberapa strategi antara lain:

- a) Pengembangan Aset Komersial: Menggunakan aset tetap seperti tanah kosong, bangunan tidak terpakai, atau properti komersial untuk dikembangkan menjadi pusat perbelanjaan, pusat hiburan, atau kompleks perkantoran yang bisa disewakan kepada pihak swasta. Dengan cara ini, pemerintah daerah dapat menghasilkan pendapatan sewa yang signifikan.
- b) Penyediaan Infrastruktur: Membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, tol, atau pusat logistik yang dapat menarik investasi dan meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Pemerintah daerah dapat memberikan izin operasi atau kontrak kepada pihak swasta yang akan membayar sejumlah uang kepada pemerintah daerah sebagai imbalan.
- c) Pemanfaatan Sumber Daya Alam: Jika daerah memiliki sumber daya alam seperti hutan, tambang, atau lahan pertanian yang luas, pemerintah daerah dapat menjual hak pengelolaannya kepada pihak swasta dengan cara lelang atau kontrak konsesi. Pendapatan dari penjualan hak pengelolaan ini dapat menjadi sumber PAD yang signifikan.
- d) Pembangunan Properti Publik: Membangun properti publik seperti gedung perkantoran, pusat pemerintahan, atau fasilitas publik lainnya yang dapat disewakan kepada pihak swasta atau digunakan untuk kegiatan komersial. Pendapatan sewa dari properti ini dapat menjadi sumber pendapatan tetap bagi pemerintah daerah.
- e) Kemitraan Publik-Privat (KPP): Melakukan kemitraan dengan pihak swasta untuk mengembangkan atau mengelola aset tetap. Dalam kemitraan ini, pemerintah daerah dapat memberikan izin pengelolaan atau kontrak kepada pihak swasta dengan imbalan bagi hasil atau pembayaran sewa.
- f) Peningkatan Efisiensi Operasional: Memastikan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah dikelola dengan efisien dan optimal. Hal ini mencakup pemeliharaan rutin, penggunaan energi yang efisien, dan manajemen biaya operasional secara keseluruhan.
- g) Pengembangan Wisata: Pemerintah daerah dapat mengembangkan aset tetap seperti pantai, bukit/gunung, benda sejarah dan lainnya menjadi destinasi wisata yang menarik. Pendapatan dari sektor pariwisata dapat menjadi sumber PAD yang signifikan.

- h) Pengelolaan Aset Digital: Memanfaatkan teknologi informasi untuk mengoptimalkan pengelolaan aset tetap, termasuk pemantauan dan pemeliharaan, serta menghasilkan data yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

Tabel II.73

Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Demak Tahun 2020 – 2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PAD	439.694.424.386	445.010.135.309	477.198.401.099	508.055.346.278	594.887.868.035
TOTAL AKTIVA (Jumlah Aset)	5.697.120.718.057	5.914.642.693.556	5.873.599.121.167	5.571.513.628.734	5.851.956.608.490
RASIO PERPUTARAN TOTAL AKTIVA	0,077	0,075	0,081	0,091	0,102

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

2.2.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan penggunaan anggaran dan baik untuk belanja maupun pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Demak 2020-2024 tergambar pada dua aspek penting yaitu proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan. Fokus analisis dilakukan pada orientasi alokasi belanja daerah dan pembiayaan daerah pada kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan. Oleh karena itu berbagai belanja aparatur perlu ditekan seefisien mungkin agar dapat meningkatkan belanja publik.

2.2.3.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran menguraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan realisasi belanja. Oleh karena itu proporsi penggunaan anggaran dilakukan melalui analisis sebagai berikut:

- a. Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;
- b. Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Belanja pemenuhan aparatur terdiri dari belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan serta belanja pegawai lainnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama terdiri dari seluruh biaya yang harus dikeluarkan baik itu berupa belanja maupun pengeluaran pembiayaan yang wajib untuk dibayarkan.

Proporsi belanja pemenuhan untuk pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif dengan rata-rata persentasenya sebesar 37,01%. Proporsi belanja aparatur terbesar terjadi di tahun 2020 yang mencapai 38,78% sedangkan capaian terakhir tahun 2024 sebesar 37,98%. Jika dilihat dari keseluruhan perkembangan proporsinya, belanja pegawai tidak pernah lebih dari 39%, sehingga dapat dikatakan belanjanya masih cukup sehat. Meskipun begitu pemerintah daerah tetap harus memperhatikan proporsi belanja aparatur agar tidak melebihi batas yang dapat memengaruhi keseimbangan anggaran dan keberlanjutan keuangan jangka panjang. Dalam beberapa kasus, peningkatan belanja pegawai yang signifikan tanpa pertumbuhan yang sesuai dalam pendapatan bisa menjadi beban fiskal yang besar bagi pemerintah, sehingga memerlukan pengelolaan dan perencanaan yang cermat agar belanja publiknya bisa dijaga kualitas maupun kuantitasnya. Rincian proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Demak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.74
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Demak
Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)

No.	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (%)
1	2020	897.383,83	2.313.754,28	38,78%
2	2021	845.439,14	2.368.015,73	35,70%
3	2022	888.872,46	2.502.342,63	35,52%
4	2023	902.275,28	2.435.260,28	37,05%
5	2024	1.009.311,37	2.657.133,94	37,98%
Rata-Rata		908.656,42	2.455.301,37	37,01%

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

Untuk menghitung kemampuan belanja daerah, maka diperlukan analisis terhadap pengeluaran Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat serta Prioritas Utama. Pada dasarnya analisis terhadap realisasi pengeluaran Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama bertujuan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari dan ditunda sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran pemerintah daerah seperti: gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dibayarkan. Total Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

Realisasi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama selama tahun 2020-2024 cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,71% per tahun dari Rp1,489 triliun (2020) menjadi Rp1,594 triliun (2024). Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh naiknya belanja pegawai dari Rp897,383 miliar (2020) menjadi Rp1,009 triliun (2024) dan belanja hibah dari Rp74,065 miliar (2020) menjadi Rp131,867 miliar (2024). Jika dikaitkan dengan rata-rata belanja daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir sebesar Rp2,437 triliun, maka rata-rata proporsi Total Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas mencapai 61,27%. Artinya masih ada ruang fiskal untuk belanja publik sekitar 38,73%. Hal ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah agar ruang fiskal untuk belanja publik ke depan bisa ditingkatkan kembali. Oleh karena itu diperlukan strategi khususnya untuk menekan biaya aparatur antara lain:

- 1) **Evaluasi Kebutuhan Pegawai:** Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan pegawai di setiap unit organisasi termasuk peninjauan terhadap struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, serta kinerja pegawai yang sudah ada. Dengan memahami kebutuhan yang sebenarnya, pemerintah dapat menghindari pengadaan pegawai yang tidak perlu.
- 2) **Optimalisasi Produktivitas:** Mendorong produktivitas pegawai dengan memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan, menggunakan teknologi informasi dan sistem manajemen kinerja yang efisien, serta menerapkan praktik kerja yang efektif. Dengan meningkatkan produktivitas, pemerintah daerah dapat mencapai hasil yang lebih baik dengan jumlah pegawai yang lebih sedikit.
- 3) **Pengendalian Pengadaan Pegawai Baru:** Mengendalikan pengadaan pegawai baru dengan membatasi jumlah penerimaan pegawai baru atau memperlambat proses rekrutmen. Pemerintah dapat memprioritaskan pengisian posisi yang kritis atau strategis, sambil mempertimbangkan opsi untuk menutup atau menggabungkan posisi yang tidak terlalu penting.
- 4) **Peningkatan Efisiensi Administrasi:** Mengurangi birokrasi dan proses administrasi yang berlebihan yang dapat menghambat efisiensi pelayanan publik. Memperkenalkan inovasi dalam sistem administrasi seperti penggunaan teknologi informasi untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin atau integrasi layanan online dapat membantu mengurangi belanja pegawai.
- 5) **Pengendalian Tunjangan dan Insentif:** Mengkaji ulang dan menyesuaikan tunjangan dan insentif yang diberikan kepada pegawai, seperti tunjangan kinerja atau bonus. Memastikan bahwa insentif tersebut sesuai dengan



kinerja dan kontribusi yang sebenarnya, serta terkait dengan pencapaian tujuan organisasi.

- 6) Penghapusan atau Penyederhanaan Jabatan: Melakukan peninjauan terhadap struktur jabatan dan mempertimbangkan untuk menghapus atau menyederhanakan jabatan yang tidak lagi relevan atau diperlukan. Ini dapat membantu mengurangi jumlah pegawai secara keseluruhan.

Secara keseluruhan perkembangan pengeluaran Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel II.75
Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama
Kabupaten Demak Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Belanja Operasi Wajib dan Mengikat	1.000.224,93	944.051,18	1.025.883,04	1.060.123,58	1.155.127,16	3,67
1.1	Belanja Pegawai	897.383,83	845.439,14	888.872,46	902.275,28	1.009.311,37	2,98
1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
1.4	Belanja Hibah	74.065,55	69.147,27	97.499,40	125.045,55	131.867,18	15,51
1.5	Belanja Bantuan Sosial	28.775,55	29.464,77	39.511,18	32.802,75	13.948,60	-16,56
1.6	Belanja keuangan	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Transfer	436.594,73	437.385,73	440.475,70	415.685,97	437.275,97	-0,01
2.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	19.470,36	18.372,35	19.317,12	21.980,04	22.880,16	-
2.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	417.124,38	419.013,39	421.158,58	393.705,93	414.395,82	-0,37
3	Belanja Tak Terduga	24.913,66	-	-	2,49	-	-100
4	Pengeluaran Pembiayaan	28.012,19	32.000,00	15.000,00	12.000,00	2.000,00	-48,31
4.1.	pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	-	-	-	-	-	-
4.2	penyertaan modal daerah;	28.012,19	32.000,00	15.000,00	12.000,00	2.000,00	-48,31
4.3.	pembentukan Dana Cadangan;	-	-	-	-	-	-
4.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-	-
4.5.	pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-
	Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas	1.489.745,51	1.413.436,92	1.481.358,74	1.487.812,04	1.594.403,13	1,71

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

2.2.3.2 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan menguraikan sekurang-kurangnya mengenai besaran nilai penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran daerah. Defisit riil anggaran terjadi jika pendapatan yang ada tidak sebanding dengan nilai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang ada pada tahun yang sama. Oleh karena itu besaran defisit riil anggaran daerah juga harus memperhatikan besaran nilai pembiayaan netto yang dapat digunakan untuk menutupnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah.

Dalam lima tahun terakhir (2020-2024) defisit riil anggaran terjadi pada tahun 2021-2023 di mana defisit riil pada tahun tersebut secara berturut-turut sebesar Rp 2,77 miliar, Rp99,624 miliar dan Rp18,473 miliar. Sementara pada tahun 2020 dan 2024 terjadi surplus anggaran.

Tabel II.76
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Demak
Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2.333.739,00	2.365.244,01	2.402.717,87	2.416.786,38	2.704.160,19
	dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	2.285.742,10	2.336.015,73	2.487.342,63	2.423.260,28	2.655.133,94
3	Pengeluaran Pembiayaan	28.012,19	32.000,00	15.000,00	12.000,00	2.000,00
	(Defisit Riil)	19.984,71	-2.771,72	-99.624,76	-18.473,89	47.026,25

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

Jika dibandingkan antara defisit riil anggaran daerah dan komponen penutupnya diketahui bahwa semua defisit riil anggaran yang terjadi di tahun 2021-2023 dapat ditutup semua oleh SiLPA pada tahun 2021-2023 yang secara berturut-turut sebesar Rp 245,029 miliar, Rp242,262 miliar dan Rp142,637 miliar. Dari hal ini dapat dikatakan bahwa target defisit riil yang ditetapkan masih sangat aman bahkan masih bisa dimaksimalkan selama tidak melebihi target SiLPA atau komponen penutup lainnya yang ditetapkan.

Tabel II.77

Nilai Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Demak Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	225.039,22	245.029,90	242.258,94	142.637,49	124.164,03
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-
penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5,97	-	3,31	0,43	19,25
Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-
Total Komposisi Penutup Defisit	225.045,19	245.029,90	242.262,25	142.637,92	124.183,27

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

Jika dilihat dari sumber SiLPA di Kabupaten Demak dari tahun 2020-2024 terlihat bahwa nilai SiLPA tersebut berasal dari Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa sisa penghematan belanja atau akibat lainnya merupakan komponen utama penutup defisit rill anggaran yang ada di Kabupaten Demak.

2.2.4 Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan RPJMD hingga tahun 2030. Dalam konteks kemandirian fiskal, kemungkinan besar penerimaan dana transfer akan semakin berkurang. Oleh karena itu penggunaan ruang fiskal daerah ke depan harus lebih mengedepankan asas efektivitas dan efisiensi.

Pendapatan daerah, terutama dari PAD dan transfer pusat, sering kali tidak cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan, khususnya proyek infrastruktur strategis, revitalisasi kawasan, dan program layanan publik berskala besar. Sehingga memerlukan pembiayaan diluar APBD daerah maupun APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN. Untuk mengoptimalkan pendanaan pembangunan daerah di luar APBD, Pemerintah Kabupaten Demak dapat memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan alternatif. Salah satunya melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR), yaitu dana tanggung jawab sosial yang disalurkan oleh BUMN, BUMD, maupun perusahaan swasta. Dana ini

dapat digunakan untuk mendukung program sosial, pendidikan, lingkungan, dan infrastruktur dasar.

Selain itu, tersedia skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang memungkinkan kemitraan publik–swasta dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik. Skema ini dapat berbentuk konsesi, sewa guna, maupun bangun guna serah (BOT/BTO), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 4 Tahun 2015.

Instrumen lain yang dapat dimanfaatkan adalah Dana Bergulir dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang berfungsi sebagai dana usaha untuk mendukung unit pelayanan publik seperti rumah sakit, UPT pertanian, dan lembaga pendidikan. Skema ini dapat dikembangkan menjadi pembiayaan mandiri dan efisien, misalnya melalui pembiayaan modal petani oleh UPT pertanian untuk penyediaan sarana produksi seperti pupuk.

Di samping itu, pemerintah daerah memiliki opsi untuk memperoleh pinjaman daerah yang digunakan dalam pembiayaan pengeluaran kas, pembangunan infrastruktur, pengelolaan portofolio utang daerah, maupun penerusan pinjaman dan penyertaan modal kepada BUMD. Dengan memadukan berbagai sumber pembiayaan tersebut, percepatan pembangunan daerah dapat tercapai tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD.

Pada bagian kerangka pendanaan ini akan diberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan, Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Proyeksi belanja wajib dan mengikat yang kemudian akan dihitung seberapa besar kapasitas riil daerah untuk pendanaan indikatif pada tahun 2025 hingga 2030.

2.2.4.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Proyeksi Pendapatan

Proyeksi pendapatan daerah adalah perkiraan atau estimasi pendapatan yang akan diperoleh pemerintah daerah dalam periode tahun 2025-2030. Proyeksi ini penting untuk perencanaan keuangan serta untuk memastikan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah. Ada beberapa acuan yang dipakai dalam rangka memproyeksikan pendapatan daerah antara lain:

- 1) Analisis Historis: Melakukan analisis terhadap data historis pendapatan daerah untuk menentukan tren dan pola pengeluaran. Ini dapat melibatkan peninjauan data pendapatan tahun sebelumnya serta faktor-faktor yang memengaruhi perubahan pendapatan dari waktu ke waktu.
- 2) Analisis Ekonomi: Mengkaji kondisi ekonomi baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi,

- tingkat pengangguran, inflasi, dan kebijakan fiskal dapat berpengaruh pada pendapatan daerah.
- 3) Perkiraan Pertumbuhan Pendapatan: Berdasarkan data historis dan analisis ekonomi, membuat proyeksi tentang pertumbuhan pendapatan masa depan khususnya mencakup pendapatan pajak, pendapatan dari investasi, dan sumber-sumber pendapatan lainnya.
 - 4) Analisis Demografi: Memahami demografi penduduk daerah dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi permintaan layanan publik dan ketersediaan sumber daya. Misalnya, pertumbuhan populasi dapat menghasilkan peningkatan pendapatan dari pajak properti dan pajak penjualan.
 - 5) Perencanaan Sensitivitas: Mengidentifikasi risiko-risiko potensial dan mengembangkan skenario alternatif berdasarkan variabel-variabel yang mungkin berubah, seperti perubahan kebijakan pajak atau fluktuasi ekonomi dan apakah proyeksi tersebut realistis dan konservatif.
 - 6) Evaluasi Kinerja: Melakukan evaluasi berkala terhadap proyeksi pendapatan dengan pendapatan yang sebenarnya untuk mengetahui keberhasilan proyeksi dan mengidentifikasi area-area di mana penyesuaian mungkin diperlukan.
 - 7) Peningkatan Pengelolaan Keuangan: Mengimplementasikan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik, seperti pengendalian biaya dan diversifikasi sumber pendapatan, untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.
 - 8) Tahun dasar proyeksi yang digunakan adalah angka realisasi APBD tahun 2024 dan/atau target APBD tahun 2025 dan/atau RKPD 2026.

Berdasarkan data beberapa tahun sebelumnya, anggaran pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Demak masih bertumpu pada dana transfer pemerintah pusat khususnya dari sumber dana perimbangan. Kenyataan ini membuat Pemerintah Kabupaten Demak masih sangat tergantung pada pemerintah pusat dalam membiayai pembangunannya, sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan dalam APBD benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang ditempuh dalam mencapai target tersebut serta dasar hukum penerimaannya. Dalam memproyeksi pendapatan, proyeksi lebih difokuskan pada penerimaan yang bersumber dari daerah sendiri (PAD) dengan melihat berbagai variabel yang berkaitan dengannya. Langkah - langkah optimalisasi PAD untuk mengurangi ketergantungan pada Dana Transfer agar Kabupaten Demak semakin mandiri sudah dilakukan melalui berbagai inovasi akselerasi peningkatan pendapatan

asli daerah termasuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan pajak dan retribusi daerah. Dengan adanya arahan tentang sinergi pemungutan pajak daerah, pemerintah Kabupaten Demak saat ini tidak hanya bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, namun juga telah melaksanakan sinergi tripartit pemungutan pajak antara Pemerintah Kabupaten Demak dengan Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

Sinergitas dengan Pemerintah Provinsi dalam optimalisasi opsen pajak kendaraan bermotor dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor juga dilakukan secara intensif dilakukan melalui strategi:

- Peran serta dalam program sengkuyung, Pendataan Informasi dan Tunggakan pajak serta sosialisasi pembayaran piutang pajak kendaraan bermotor
- Dukungan operasional berupa penyediaan mobil layanan, biaya operasional Pendataan tunggakan pajak
- Sosialisasi kebijakan – kebijakan yang berhubungan dengan PKB dan BBKBN secara massif ke masyarakat
- Dukungan lainnya berupa support ATK, media sosialisasi dan kebutuhan lainnya yang mendukung
- Sinergitas dengan pemerintah Provinsi dituangkan dalam Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Demak dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pertumbuhan Pendapatan Daerah kabupaten Demak tahun 2025-2030 diproyeksikan hanya tumbuh $\pm 0,33\%$ per tahun dari Rp2,582 triliun (2025) menjadi Rp2,625 triliun (2030). Proyeksi ini cukup realistis karena pada kondisi/realisasi pendapatan daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir yang tumbuh 3,85% per tahun. Untuk menjaga kualitas perencanaan anggaran yang lebih realistis maka fokus pertumbuhan Pendapatan Daerah ini akan didongkrak oleh target tumbuhnya PAD beberapa komponen pendapatan transfer. Sementara beberapa sumber pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah akan diproyeksikan sedikit menurun dari angka realisasi tahun 2025 dan dengan tingkat pertumbuhan 0% atau flat sama nilai tahun 2027 sampai tahun 2030.

Untuk PAD sendiri dengan mempertimbangkan realisasi pertumbuhan rata-rata dalam 5 (lima) tahun terakhir yang sebesar 8% per tahun, maka proyeksi PAD tahun 2025-2030 diproyeksikan tumbuh $\pm 2,18\%$ per tahun dari Rp633,040 miliar (2025) menjadi Rp705,233 miliar (2030). Dari seluruh komponen sumber PAD ditargetkan tumbuh sebesar 2,12% per tahun untuk Pendapatan Pajak Daerah, 2,45% per tahun untuk Pendapatan Retribusi

Daerah, 1,83% per tahun untuk Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan -4,06% per tahun untuk Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Perhitungan proyeksi pendapatan dalam RPJMD Kabupaten Demak sudah mempertimbangkan penerimaan pajak dari opsen PKB dan opsen BBNKB. Proyeksi pertumbuhan Pajak Daerah yang sebesar 2,12% per tahun dari Rp283,397 miliar (2025) menjadi Rp314,800 miliar (2030), proyeksi ini sudah mempertimbangkan pada rata-rata realisasi pertumbuhan pajak daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir yang tumbuh $\pm 10,05\%$ per tahun serta memperhitungkan proyeksi opsen PKB dan opsen BBNKB pada komponen Pajak Daerah yang selaras dengan perhitungan proyeksi yang diperhitungkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan memperhatikan rata-rata ketercapaiannya sehingga belanja daerah dapat berjalan dengan optimal. Adapun target minimal proyeksi pertumbuhan pajak daerah tersebut dilakukan melalui serangkaian kebijakan utama yaitu:

- 1) Penilaian Properti yang Akurat: Memastikan penilaian properti yang akurat dapat membantu pemerintah daerah mengenakan pajak properti khususnya NJOP yang sesuai dengan nilai aktualnya. Ini dapat dilakukan dengan melakukan pembaruan teratur terhadap data properti dan menggunakan teknologi seperti sistem informasi geografis (SIG) untuk membantu dalam proses penilaian.
- 2) Peningkatan Kepatuhan: Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban mereka dapat menjadi langkah penting. Pemberian informasi yang jelas dan mudah dimengerti tentang kewajiban pajak, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, dapat membantu meningkatkan tingkat kepatuhan.
- 3) Diversifikasi Sumber Pajak: Selain pajak properti, pemerintah daerah dapat mengembangkan sumber-sumber pendapatan lainnya seperti pajak penjualan, pajak hotel, atau bahkan pajak atas industri tertentu yang signifikan di Kabupaten Demak. Diversifikasi ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada satu jenis pajak saja.
- 4) Inisiatif Peningkatan Layanan: Meningkatkan kualitas layanan publik seperti infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan transportasi dapat membuat masyarakat lebih rela membayar pajak jika mereka melihat manfaat yang diterima dari pajak yang mereka bayar.
- 5) Kemitraan Publik-Swasta: Bermitra dengan sektor swasta untuk mengembangkan proyek-proyek infrastruktur atau pengembangan properti yang dapat meningkatkan nilai properti dan pendapatan pajak daerah.

- 6) **Peninjauan Kembali Insentif Pajak:** Meninjau kembali insentif pajak kepada industri atau pemilik properti tertentu untuk mendorong investasi atau pengembangan. Namun, jika insentif ini tidak memberikan manfaat yang diharapkan, maka perlu dievaluasi kembali untuk memastikan bahwa pajak yang diterima oleh pemerintah daerah sebanding dengan manfaat yang diberikan.
- 7) **Evaluasi Kebijakan Pajak:** Melakukan evaluasi terhadap kebijakan pajak yang ada secara berkala untuk memastikan kebijakan pajak masih relevan dan efektif dalam menghasilkan pendapatan yang dibutuhkan.
- 8) **Peningkatan Pengawasan dan Transparansi:** Membangun sistem pengawasan yang kuat dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah yang dapat membantu mencegah kebocoran dan penyalahgunaan potensi pajak daerah, sehingga memastikan bahwa semua potensi pendapatan pajak yang ada dapat dipungut dengan efisien dan efektif.
- 9) **Sinergi Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak.** Bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sinergi ini merupakan amanat dari UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan PP Nomor 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diturunkan dalam Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 dan juga di turunkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 10) **Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah** berdasarkan penyusunan perundang-undangan yang disesuaikan dengan UU HKPD No.1 tahun 2022, diantaranya kegiatan penilaian obyek-obyek pajak, pendataan obyek-obyek pajak, optimalisasi penagihan piutang pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui kegiatan pemeriksaan pajak, peningkatan kualitas pelayanan Publik sehingga bisa meningkatkan penerimaan dari retribusi Daerah, dan mengoptimalkan pengelolaan BUMD.

Proyeksi pertumbuhan Retribusi Daerah tahun 2025-2030 ditargetkan tumbuh $\pm 2,45\%$ per tahun dari Rp306,878 miliar (2025) menjadi Rp346,352 miliar (2030) sementara realisasi rata-rata pertumbuhan retribusi daerah 5 (lima) tahun terakhir tumbuh 12,30% per tahun dengan capaian tertinggi ada di tahun 2024 yang sebesar Rp40,972 miliar. Berikut ini strategi untuk memaksimalkan pendapatan retribusi daerah agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan melalui:

- 1) **Analisis Potensi Sektor dan Layanan:** Identifikasi sektor dan layanan yang memiliki potensi besar untuk menghasilkan retribusi. Ini bisa termasuk

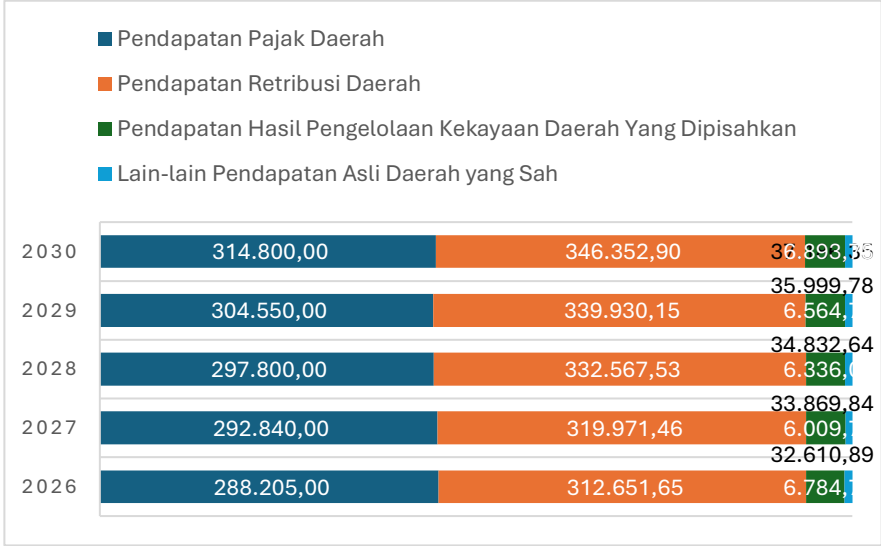
- sektor pariwisata, terminal, perizinan usaha, parkir, pasar, pelayanan persampahan dan sebagainya.
- 2) Perbaikan Sistem Pungutan Retribusi: Memastikan bahwa sistem pungutan berjalan efisien dan transparan. Meminimalkan birokrasi, mempercepat proses, dan memperbarui peraturan serta tarif yang sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.
 - 3) Pengawasan dan Penegakan Hukum: Memastikan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran retribusi. Ini mencakup pemeriksaan secara rutin, sanksi yang tegas terhadap pelanggar, dan penggunaan teknologi untuk mendeteksi kecurangan.
 - 4) Pengembangan Infrastruktur: Meningkatkan infrastruktur yang mendukung pengumpulan retribusi, seperti sistem pembayaran online, terminal parkir yang canggih, atau perangkat lunak manajemen pajak yang efisien.
 - 5) Promosi dan Pemasaran: Melakukan promosi aktif terhadap layanan dan fasilitas yang dikenakan retribusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menarik lebih banyak pengguna atau pelanggan.
 - 6) Kemitraan Swasta: Membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk mengelola beberapa layanan atau fasilitas, dengan mempertimbangkan kontrak yang menguntungkan pihak daerah dalam hal pendapatan retribusi.
 - 7) Diversifikasi Pendapatan: Tidak hanya mengandalkan satu sumber pendapatan, tapi mencari cara untuk mendiversifikasi pendapatan daerah, termasuk eksplorasi potensi baru dan inovasi dalam pengumpulan retribusi.
 - 8) Evaluasi dan Penyesuaian: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem pengumpulan retribusi, mengevaluasi keberhasilan strategi yang diterapkan, dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan.
 - 9) Peningkatan Kualitas Layanan: Menawarkan layanan yang berkualitas kepada pelanggan, sehingga mereka merasa nilai yang mereka bayarkan sebanding dengan layanan yang mereka terima.
 - 10) Edukasi Masyarakat: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi dan dampak positifnya bagi pembangunan dan penyediaan layanan publik.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2025-2030 diproyeksikan tumbuh $\pm 1,83\%$ per tahun dari Rp33,959 miliar (2025) menjadi Rp37,186 miliar (2030). Target ini sudah mempertimbangkan pertumbuhan masa lalu yang rata-rata tumbuh $12,44\%$ per tahun. Untuk mencapai target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan maka perlu didorong BUMD dan Swasta yang terdapat penyertaan modal di dalamnya agar dapat lebih produktif melalui:

- 1) Mendorong Penyusunan Rencana Bisnis yang Komprehensif: BUMD dan swasta yang terkait harus menyusun rencana bisnis yang jelas dan komprehensif yang mencakup target keuangan jangka pendek dan jangka panjang, strategi pemasaran, pengelolaan risiko, dan lain-lain.
- 2) Mendorong Pengelolaan Efisiensi Operasional: Memastikan operasional khususnya BUMD berjalan dengan efisien, termasuk pengelolaan biaya yang efektif, optimalisasi proses produksi, dan manajemen rantai pasok yang baik.
- 3) Mendorong Inovasi Produk dan Layanan: Mengembangkan produk dan layanan baru yang memenuhi kebutuhan pasar dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Inovasi dapat mencakup peningkatan kualitas, fitur baru, atau pendekatan yang berbeda dalam pemasaran.
- 4) Mendorong Peningkatan Kualitas Produk dan Layanan: Fokus pada peningkatan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan khususnya oleh BUMD untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan menarik pelanggan baru.
- 5) Mendorong Ekspansi Pasar: Mencari peluang untuk memperluas pasar khususnya BUMD, baik secara regional maupun nasional. Ini bisa melalui ekspansi geografis, diversifikasi produk, atau penetrasi pasar yang lebih dalam.
- 6) Mendorong Kemitraan Strategis: Membangun kemitraan strategis dengan perusahaan swasta atau entitas lain yang dapat mendukung pertumbuhan dan pengembangan BUMD, seperti dalam hal teknologi, distribusi, atau pemasaran.
- 7) Mendorong Manajemen Risiko yang Efektif: Mengelola risiko dengan baik untuk menghindari kerugian yang tidak perlu dan memastikan keberlanjutan operasional. Ini termasuk manajemen risiko finansial, operasional, dan reputasi.
- 8) Mendorong Pengembangan Sumber Daya Manusia: Melakukan investasi dalam pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kesuksesan BUMD.
- 9) Pemantauan dan Evaluasi Berkala: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja keuangan dan operasional BUMD, serta melakukan penyesuaian strategis jika diperlukan.
- 10) Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas: Menjaga transparansi dalam pengelolaan keuangan dan operasional BUMD, serta memastikan akuntabilitas kepada pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya.

Proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah kurun waktu 2025-2030 ditargetkan turun -4,78% per tahun dari Rp8,805 miliar (2025) menjadi Rp6,893 miliar (2030).

Gambar II.47
Target Komposisi PAD Kabupaten Demak Tahun 2025-2030



Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

Pendapatan Daerah Kabupaten Demak masih didominasi oleh sumber Pendapatan Transfer khususnya DAU yang besar kecilnya terutama sangat dipengaruhi oleh kemampuan keuangan negara. Besaran pendapatan transfer tidak dapat diperkirakan. Dalam proyeksi pendapatan transfer, digunakan asumsi:

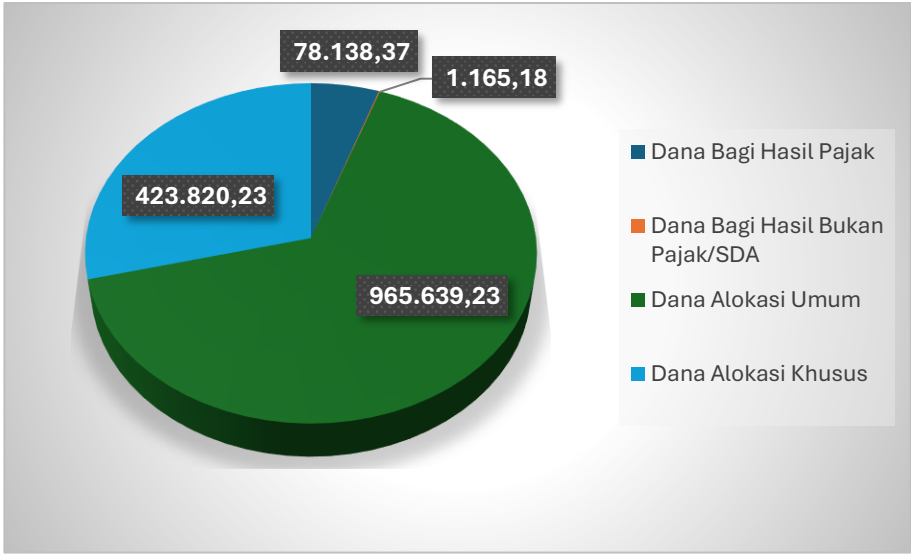
- DBH baik Pajak dan Non Pajak/SDA diproyeksikan tetap sebagaimana target APBD 2025
- DAU diproyeksikan sedikit ada kenaikan yaitu 0,04% per tahun
- DAK diproyeksikan sedikit ada kenaikan yaitu 0,13% per tahun
- Dana Insentif Daerah (Insentif Fiskal) diproyeksikan sedikit ada kenaikan yaitu 0,05% per tahun
- Dana Desa diproyeksikan tetap sebagaimana target APBD 2025
- Pendapatan Bagi Hasil diproyeksikan -2,64% per tahun
- Bantuan Keuangan Provinsi ditargetkan tetap sebagaimana target APBD 2025 untuk tahun 2026 yaitu sebesar Rp52,594 miliar sementara untuk tahun 2027 sampai 2030 diproyeksikan tetap sebesar Rp46,172 miliar.
- Pendapat Hibah tidak diproyeksikan

Komponen pendapatan transfer ditargetkan sedikit mengalami penurunan mencapai rata-rata -0,20% per tahun dari Rp1,939 triliun (2025) menjadi Rp1,919 triliun (2030). Proyeksi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ditargetkan tumbuh 0,05% tiap tahun, sehingga Dana Perimbangan juga ditargetkan tumbuh 0,06% per tahun. Transfer antar daerah untuk bagi hasil pada 2024 sebesar Rp 204,204 miliar turun menjadi Rp141 miliar pada target

2025 dikarenakan adanya perubahan rekening dari bagi hasil PKB dan BBNKB menjadi Opsen sehingga pencatatan pendapatan tidak lagi masuk di dana transfer antar daerah. Proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sudah mempertimbangkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/87 Tahun 2025 tentang Pembebasan Tunggakan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor. Sehingga Pembebasan pajak tersebut tidak berdampak pada realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah maupun opsen PKB dan BBNKB. Pada 2027-2029 target tetap di angka Rp169,545 Miliar karena proyeksi penerimaan tahun yang akan datang tidak bisa di prediksi sehingga memakai target tahun terakhir.

Dana Perimbangan ditargetkan sedikit mengalami pertumbuhan yaitu 0,06% per tahun dengan DBH Pajak dan DBH bukan Pajak/SDAditargetkan tumbuh 0% per tahun sedangkan DAU, dan DAK diproyeksikan sedikit mengalami pertumbuhan yaitu 0,04% (DAU) dan 0,13% (DAK). Pada sumber Lain-lain Pendapatan yang Sah diproyeksikan sebesar Rp0 tiap tahun (2026-2030).

Gambar II.48
Target Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Demak
Tahun 2025-2030



Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

Adapun perincian proyeksi pendapatan Kabupaten Demak tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.78

Proyeksi Pendapatan Kabupaten Demak Tahun 2025-2030 (dalam jutaan)

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan 2020-2024 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	P-RKPD	Proyeksi					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	PENDAPATAN	3,85	0,33	2.582.164,68	2.567.187,25	2.572.494,56	2.591.339,75	2.606.848,16	2.625.036,52	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	8	2,18	633.040,86	640.252,28	652.691,07	671.536,27	687.044,68	705.233,03	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	10,05	2,12	283.397,82	288.205,00	292.840,00	297.800,00	304.550,00	314.800,00	
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	12,3	2,45	306.878,09	312.651,65	319.971,46	332.567,53	339.930,15	346.352,90	
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12,44	1,83	33.959,70	32.610,89	33.869,84	34.832,64	35.999,78	37.186,35	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5,87	-4,78	8.805,25	6.784,74	6.009,77	6.336,10	6.564,75	6.893,78	
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	4,7	-0,2	1.939.267,43	1.926.934,96	1.919.803,49	1.919.803,49	1.919.803,49	1.919.803,49	
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	4,85	0,05	1.745.673,16	1.750.221,77	1.750.258,35	1.750.258,35	1.750.258,35	1.750.258,35	
1.2.1.1	Dana Perimbangan	7,45	0,06	1.468.763,02	1.473.311,62	1.473.311,62	1.473.311,62	1.473.311,62	1.473.311,62	
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	27,98	0	78.138,37	78.138,37	78.138,37	78.138,37	78.138,37	78.138,37	
1.2.1.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	482,3	0	1.165,18	1.165,18	1.165,18	1.165,18	1.165,18	1.165,18	
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	2,9	0,04	965.639,23	967.489,72	967.489,72	967.489,72	967.489,72	967.489,72	
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	18,76	0,13	423.820,23	426.518,35	426.518,35	426.518,35	426.518,35	426.518,35	
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	-26,12	0,05	14.887,11	14.887,11	14.923,70	14.923,70	14.923,70	14.923,70	
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0	0	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	0	0	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	0	0	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.4	Dana Desa	-1,94	0	262.023,04	262.023,04	262.023,04	262.023,04	262.023,04	262.023,04	
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	4,03	-2,62	193.594,27	176.713,20	169.545,14	169.545,14	169.545,14	169.545,14	
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	8	-2,64	141.000,27	124.119,20	123.372,90	123.372,90	123.372,90	123.372,90	
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	0,74	-2,57	52.594,00	52.594,00	46.172,24	46.172,24	46.172,24	46.172,24	

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan 2020-2024 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	P-RKPD	Proyeksi				
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	PENDAPATAN	3,85	0,33	2.582.164,68	2.567.187,25	2.572.494,56	2.591.339,75	2.606.848,16	2.625.036,52
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,74	-2,57	52.594,00	52.594,00	46.172,24	46.172,24	46.172,24	46.172,24
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	0	0	-	-	-	-	-	-
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-33,78	-100	9.856,38	-	-	-	-	-
1.3.1	Pendapatan Hibah	-38,59	0	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Pendataan Dana Darurat	0	0	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya	39156,56	-100	9.856,38	-	-	-	-	-

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

b. Proyeksi Belanja Daerah

Belanja daerah mengacu pada pendekatan yang direncanakan dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah untuk mengelola anggaran belanja dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta asas kepatutan dan kewajiban. Untuk itu pemerintah daerah harus memiliki rencana anggaran yang matang yang mencakup identifikasi kebutuhan, prioritas, dan alokasi dana yang tepat untuk setiap program pembangunan. Diharapkan dapat menjamin seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan pengalokasian belanja daerah yang pertama adalah menetapkan pada belanja yang wajib di luar pagu OPD antara lain belanja transfer, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia (penerimaan) dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun kebijakan perencanaan pagu indikatif OPD diarahkan pada:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Demak yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah yaitu:
 - a. Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok fungsi OPD
 - b. Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan OPD dan



program/kegiatan prioritas yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Demak

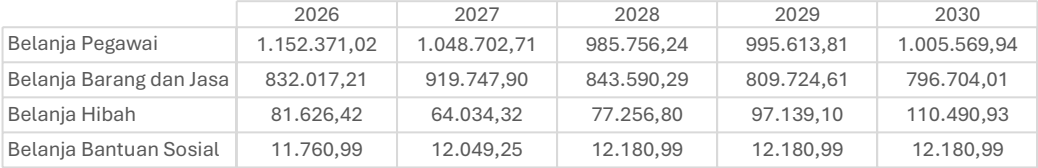
5. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Demak akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kabupaten Demak, termasuk investasi bidang pendidikan, keuangan persewaan & jasa perusahaan, perdagangan, hotel & restoran.

Belanja Daerah Kabupaten Demak dalam 5 (lima) tahun ke depan diproyeksikan sedikit mengalami penurunan dengan rata-rata penurunannya sebesar -0,32% per tahun dari Rp2,753 triliun (2025) menjadi Rp2,709 triliun (2030).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk meningkatkan kualitas belanja publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah khususnya dari sisi PAD, maka proporsi belanja modal khususnya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan investasi akan ditingkatkan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan jenis belanja lainnya terus ditekan atau diminimalkan.

Untuk Belanja Operasi secara agregat juga ditekan/diturunkan bahkan lebih kecil dibandingkan target APBD tahun 2025. Adapun belanja operasi mulai tahun 2025 akan ditargetkan sedikit mengalami penurunan yaitu -1,38% per tahun dari Rp2,077 triliun (2025) menjadi Rp1,938 triliun (2030). Dalam komposisi Belanja Operasi, jenis belanja Hibah diproyeksikan cukup berfluktuasi menyesuaikan kondisi dan proyeksi kebutuhan hibah yaitu terjadi penurunan pada tahun 2026 (Rp64,034 miliar) dari tahun 2025 (Rp81,626 miliar) ini sebabkan karena belanja BOS belum dirinci ke dalam rekening hibah, menunggu kepastian TKD dari pusat, kemudian hibah pada tahun 2028 dan 2029 diproyeksikan meningkat cukup signifikan karena pada tahun 2028 sekitar 40% dari hibah akan diberikan kepada KPU dan Bawaslu dalam rangka persiapan Pilkada kemudian pada tahun 2029 sekitar 60% dari hibah akan diberikan KPU dan Bawaslu serta kepada Polres dan Kodim dalam rangka penyelenggaraan Pilkada yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada tahun 2029, proyeksi ini berdasarkan realisasi hibah pada tahun 2023 dan tahun 2024 yang juga melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pilkada. Belanja pegawai pada tahun 2026 diproyeksikan menurun terhadap belanja pegawai pada tahun 2025 karena selama ini jasa pelayanan BLUD diinput sebagai belanja pegawai untuk selanjutnya belanja jasa pelayanan BLUD akan dimasukan sebagai belanja jasa. Proyeksi belanja pegawai dari tahun 2027 sampai tahun 2030 akan mengalami sedikit peningkatan. Peningkatan tersebut

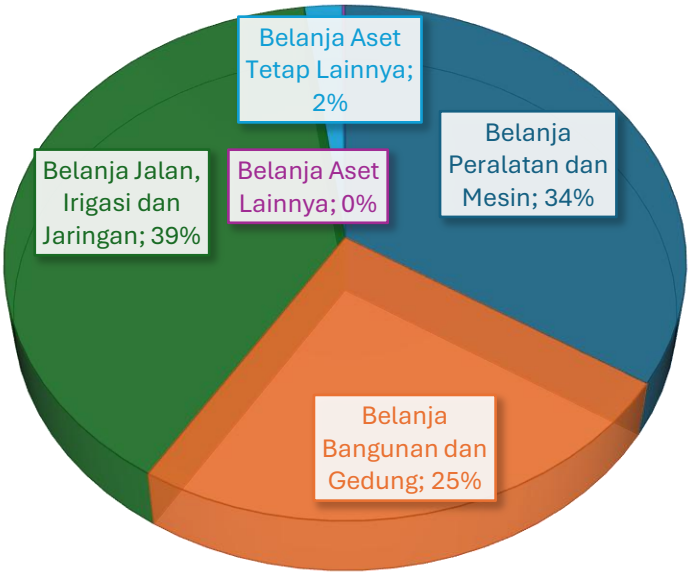
Gambar II.49
Target Belanja Operasi Kabupaten Demak
Tahun 2025-2030 (dalam juta)



Dalam meningkatkan layanan infrastruktur publik serta menarik investasi daerah, porsi belanja modal akan ditingkatkan dengan rata-rata pertumbuhan $\pm 6,86\%$ per tahun dari Rp230,401 miliar (2025) menjadi Rp321,063 miliar (2030). Porsi Belanja Modal terbesar diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan jalan irigasi dan jaringan (39%), kemudian belanja peralatan dan mesin (34%), kemudian belanja bangunan dan Gedung (25%) dan sisanya belanja aset tetap lainnya (2%), sebagai catatan pada tahun 2028 diproyeksikan terjadi peningkatan belanja tanah yang akan digunakan dalam persiapan pembangunan RSUD baru/pengalihan kantor kecamatan/PKM yg selama ini menempati aset pemdes. Arah pembangunan jalan, irigasi dan jaringan difokuskan/diprioritaskan pada wilayah yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi wilayah. Untuk itu sasaran pembangunannya juga harus jelas dan spesifik. Sedangkan belanja peralatan

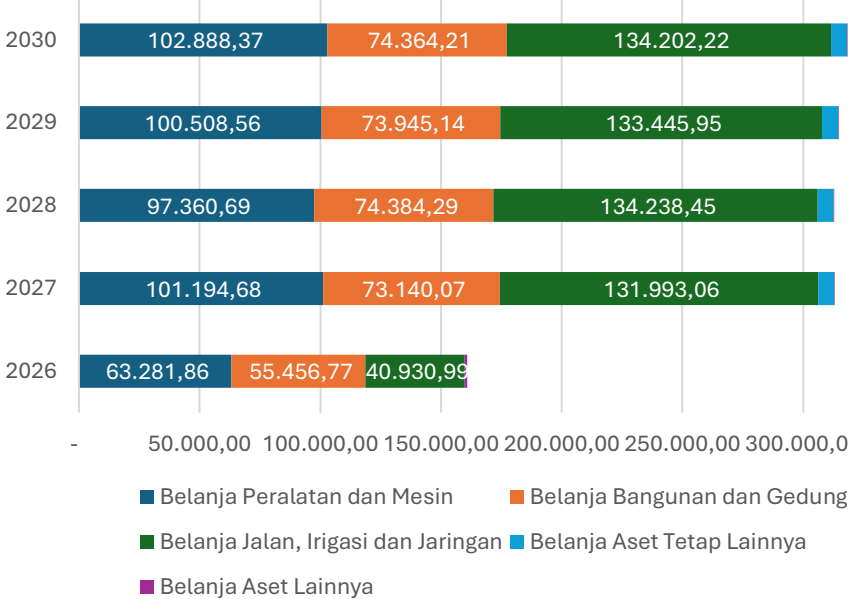
Secara rinci target tahunan komponen belanja Modal dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar II.50



Gambar II.51

**Target Alokasi Komponen Belanja Modal Kabupaten Demak
Tahun 2025-2030 (dalam juta)**



GAMBARAN UMUM DAERAH | II-168

Belanja Tak Terduga tahun 2006-2030 ditargetkan konstan sebagaimana target RKPD yaitu sebesar Rp5 miliar per tahun. Penggunaan Belanja Tak Terduga ini dialokasikan untuk kejadian mendesak dan darurat seperti penanganan bencana banjir yang butuh waktu respon cepat dan sejenisnya.

Untuk meningkatkan porsi belanja pembangunan, kebijakan target Belanja Transfer diproyeksikan tumbuh tidak terlalu besar yaitu hanya 0,09% per tahun berdasarkan target APBD 2025 yaitu dari Rp443,205 miliar (2025) menjadi Rp445,221 miliar (2030). Untuk proyeksi Transfer Bagi Hasil Pajak ditargetkan tumbuh sebesar 7,03% dari Rp22,415 miliar tahun 2025 menjadi Rp31,480 miliar tahun 2030. Transfer Bagi Hasil Retribusi ditargetkan turun sebesar -7,34% dari Rp4,448 miliar (2025) menjadi Rp3,038 miliar (2030).

Pemerintah Kabupaten Demak terus berupaya secara optimal untuk mendukung tercapainya target kinerja tahun 2030 melalui program pengelolaan pendapatan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan belanja mengenai optimalisasi pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sudah dianggarkan lebih dari 0,75% dari penerimaan dan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan optimalisasi Pajak dan Opsen Pajak sebagaimana tercantum dalam PKS. Sedangkan belanja bagi hasil lainnya tidak ditargetkan. Untuk jenis belanja transfer selain belanja transfer bagi hasil yaitu belanja transfer bantuan keuangan ditargetkan sedikit menurun yaitu -0,27% per tahun dari Rp416,341 miliar(2025) menjadi Rp410,702 miliar (2030)

Dengan melihat semakin tertekannya ruang fiskal daerah maka kualitas belanja daerah perlu menjadi prinsip utama. Untuk itu diperlukan kebijakan strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah melalui:

- 1) **Pengelolaan Anggaran yang Teliti:** Pemerintah daerah harus membuat anggaran yang realistis dan teliti, dengan memprioritaskan pengeluaran yang penting dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Hal ini melibatkan peninjauan secara menyeluruh terhadap setiap pos anggaran, mengidentifikasi area-area di mana penghematan dapat dicapai, dan memastikan bahwa dana dialokasikan sesuai dengan kebutuhan yang mendesak.
- 2) **Transparansi dan Akuntabilitas:** Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat membantu mencegah penyalahgunaan dan memungkinkan partisipasi publik dalam pengawasan pengeluaran. Pemerintah daerah harus memberikan laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami kepada masyarakat serta memperkuat



sistem akuntabilitas untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara bertanggung jawab.

- 3) **Pengadaan Barang dan Jasa yang Efisien:** Proses pengadaan barang dan jasa merupakan area penting untuk mencapai efisiensi belanja daerah. Pemerintah daerah harus menggunakan mekanisme pengadaan yang transparan dan kompetitif, serta melakukan negosiasi harga yang baik dengan pemasok untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien.
- 4) **Penggunaan Teknologi Informasi:** Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam pengelolaan anggaran, pemantauan pengeluaran, dan pelaporan keuangan. Sistem informasi keuangan yang canggih dapat membantu mengurangi birokrasi, meningkatkan akurasi, dan mempercepat proses pengambilan keputusan.
- 5) **Kebijakan Penghematan Biaya:** Pemerintah daerah dapat mengadopsi kebijakan penghematan biaya, seperti pengurangan pengeluaran yang tidak penting, efisiensi dalam penggunaan energi dan sumber daya lainnya, serta restrukturisasi program-program yang kurang efisien atau tidak memberikan manfaat yang signifikan kepada masyarakat.
- 6) **Kolaborasi dan Konsolidasi:** Kolaborasi antar pemerintah daerah atau konsolidasi layanan publik dapat membantu mengurangi biaya administratif dan meningkatkan efisiensi dalam penyediaan layanan. Misalnya, berbagi sumber daya dengan pemerintah daerah lain atau menggabungkan layanan yang serupa untuk mencapai skala ekonomis.
- 7) **Pengembangan Sumber Daya Manusia:** Investasi dalam pengembangan SDM yang berkualitas dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pelatihan dan pengembangan pegawai pemerintah yang kompeten dalam manajemen keuangan dan pengadaan dapat membantu mengoptimalkan penggunaan dana publik.
- 8) **Evaluasi dan Pemantauan Berkelanjutan:** Pemerintah daerah harus secara teratur mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan yang diterapkan, serta melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap pengeluaran dan kinerja keuangan daerah untuk mengidentifikasi area-area di mana perbaikan lebih lanjut dapat dilakukan.

Secara keseluruhan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Demak tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.79

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2030 (dalam juta)

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan 2020-2024 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	RKPD P	Proyeksi				
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	BELANJA	3,92	-0,32	2.753.382,35	2.659.687,25	2.662.494,56	2.681.399,75	2.696.848,16	2.715.036,52
2.1	BELANJA OPERASI	6,03	-1,38	2.077.775,64	2.044.534,18	1.918.784,32	1.914.658,50	1.925.257,30	1.938.705,91
2.1.1	Belanja Pegawai	3,18	-2,49	1.152.371,02	1.048.702,71	985.756,24	995.613,80	1.005.569,94	1.015.625,64
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10,44	-0,03	832.017,21	919.747,90	843.590,29	809.724,61	797.015,44	830.595,59
2.1.5	Belanja Hibah	17,02	-0,33	81.626,42	64.034,32	77.256,80	97.139,10	110.490,93	80.303,69
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-9,49	0,7	11.760,99	12.049,25	12.180,99	12.180,99	12.180,99	12.180,99
2.2	BELANJA MODAL	0,54	6,86	230.401,19	160.758,15	305.860,16	318.277,90	317.454,10	326.109,26
2.2.1	Belanja Modal (Tanah)	0	0,55	-	-	2.600,30	10.000,00	2.628,92	2.643,82
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	-42,26	2,35	91.600,68	63.281,86	91.276,60	94.668,50	100.508,56	102.888,37
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	-60,14	6,6	54.023,46	55.456,77	73.140,07	74.384,29	73.945,14	79.410,07
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-18,06	11,34	78.446,14	40.930,99	131.993,07	132.238,45	133.445,95	134.202,22
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-19,29	2,99	5.790,91	123,53	6.599,65	6.711,92	6.672,30	6.710,11
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0	-13,96	540	965	250,47	254,73	253,22	254,66
2.3	BELANJA TAK TERDUGA		20,11	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	-100	20,11	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.4	BELANJA TRANSFER	0,11	0,09	443.205,51	449.394,92	432.850,07	443.403,34	449.136,76	445.221,35
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	4,35	5,14	26.863,71	31.712,55	32.147,71	32.700,98	33.434,40	34.518,99
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	0,94	7,03	22.415,69	28.905,00	29.284,00	29.780,00	30.455,00	31.480,00
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	0	-7,34	4.448,02	2.807,55	2.863,71	2.920,98	2.979,40	3.038,99
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-43,37	0	-	-	-	-	-	-
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	-0,07	-0,27	416.341,80	417.682,37	400.702,37	410.702,36	415.702,36	410.702,36
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke	-	0	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan 2020-2024 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	RKPD P	Proyeksi				
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Provinsi								
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	0	0	-	-	-	-	-	-
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	-0,07	-0,27	416.341,80	417.682,37	400.702,37	410.702,36	415.702,37	410.702,37
	SURPLUS / (DEFISIT)	-344,6	-13,08	-171.217,67	-92.500,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00

Sumber: Bapperida Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

3. **Proyeksi Pembiayaan**

Arah kebijakan pembiayaan daerah pada proyeksi pembiayaan Kabupaten Demak tahun 2025-2030 adalah dengan menekan dan menurunkan SiLPA sebagai sumber penerimaan Daerah sekaligus menekan seluruh bentuk pengeluaran pembiayaan. Hasil yang ingin dicapai adalah bagaimana menciptakan pembiayaan netto bernilai positif agar dapat menutup defisit anggaran yang ada.

Secara keseluruhan terdapat beberapa arah kebijakan pembiayaan terkait kondisi surplus atau defisit anggaran. Kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

1. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan surplus maka akan dilakukan pemberdayaan kas sebagai investasi jangka pendek dalam bentuk deposito sehingga akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pendapatan bunga deposito
2. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan defisit maka akan dilakukan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya untuk menutup defisit. Untuk menutup defisit maka akan dilakukan rasionalisasi belanja program dan kegiatan yang diusulkan oleh OPD.

Adapun proyeksi pembiayaan dan keseluruhan APBD Kabupaten Demak tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.80

Proyeksi APBD Kabupaten Demak Tahun 2025-2030 (dalam juta)

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan 2020-2024 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	P-RKPD	Proyeksi				
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	PENDAPATAN	3,85	0,33	2.582.164,68	2.567.187,25	2.572.494,56	2.591.339,75	2.606.848,16	2.625.036,52
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	8	2,18	633.040,86	640.252,28	652.691,07	671.536,27	687.044,68	705.233,03
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	10,05	2,12	283.397,82	288.205,00	292.840,00	297.800,00	304.550,00	314.800,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	12,3	2,45	306.878,09	312.651,65	319.971,46	332.567,53	339.930,15	346.352,90
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12,44	1,83	33.959,70	32.610,89	33.869,84	34.832,64	35.999,78	37.186,35
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5,87	-4,78	8.805,25	6.784,74	6.009,77	6.336,10	6.564,75	6.893,78
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	4,7	-0,2	1.939.267,43	1.926.934,96	1.919.803,49	1.919.803,49	1.919.803,49	1.919.803,49
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	4,85	0,05	1.745.673,16	1.750.221,77	1.750.258,35	1.750.258,35	1.750.258,35	1.750.258,35
1.2.1.1	Dana Perimbangan	7,45	0,06	1.468.763,02	1.473.311,62	1.473.311,62	1.473.311,62	1.473.311,62	1.473.311,62
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	27,98	0	78.138,37	78.138,37	78.138,37	78.138,37	78.138,37	78.138,37
1.2.1.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	482,3	0	1.165,18	1.165,18	1.165,18	1.165,18	1.165,18	1.165,18
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	2,9	0,04	965.639,23	967.489,72	967.489,72	967.489,72	967.489,72	967.489,72
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	18,76	0,13	423.820,23	426.518,35	426.518,35	426.518,35	426.518,35	426.518,35
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	-26,12	0,05	14.887,11	14.887,11	14.923,70	14.923,70	14.923,70	14.923,70
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0	0	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	0	0	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	0	0	-	-	-	-	-	-
1.2.1.4	Dana Desa	-1,94	0	262.023,04	262.023,04	262.023,04	262.023,04	262.023,04	262.023,04
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	4,03	-2,62	193.594,27	176.713,20	169.545,14	169.545,14	169.545,14	169.545,14
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	8	-2,64	141.000,27	124.119,20	123.372,90	123.372,90	123.372,90	123.372,90
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	0,74	-2,57	52.594,00	52.594,00	46.172,24	46.172,24	46.172,24	46.172,24



No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan 2020-2024 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	P-RKPD	Proyeksi					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,74	-2,57	52.594,00	52.594,00	46.172,24	46.172,24	46.172,24	46.172,24	
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	0	0	-	-	-	-	-	-	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-33,78	-100	9.856,38	-	-	-	-	-	
1.3.1	Pendapatan Hibah	-38,59	0	-	-	-	-	-	-	
1.3.2	Pendataan Dana Darurat	0	0	-	-	-	-	-	-	
1.3.3	Pendapatan Lainnya	39156,56	-100	9.856,38	-	-	-	-	-	
2	BELANJA	3,92	-0,32	2.753.382,35	2.659.687,25	2.662.494,56	2.681.399,75	2.696.848,16	2.715.036,52	
2.1	BELANJA OPERASI	6,03	-1,38	2.077.775,64	2.044.534,18	1.918.784,32	1.914.658,50	1.925.257,30	1.938.705,91	
2.1.1	Belanja Pegawai	3,18	-2,49	1.152.371,02	1.048.702,71	985.756,24	995.613,80	1.005.569,94	1.015.625,64	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10,44	-0,03	832.017,21	919.747,90	843.590,29	809.724,61	797.015,44	830.595,59	
2.1.5	Belanja Hibah	17,02	-0,33	81.626,42	64.034,32	77.256,80	97.139,10	110.490,93	80.303,69	
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-9,49	0,7	11.760,99	12.049,25	12.180,99	12.180,99	12.180,99	12.180,99	
2.2	BELANJA MODAL	0,54	6,86	230.401,19	160.758,15	305.860,16	318.277,90	317.454,10	326.109,26	
2.2.1	Belanja Modal (Tanah)	0	0,55	-	-	2.600,30	10.000,00	2.628,92	2.643,82	
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	-42,26	2,35	91.600,68	63.281,86	91.276,60	94.668,50	100.508,56	102.888,37	
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	-60,14	6,6	54.023,46	55.456,77	73.140,07	74.384,29	73.945,14	79.410,07	
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-18,06	11,34	78.446,14	40.930,99	131.993,07	132.238,45	133.445,95	134.202,22	
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-19,29	2,99	5.790,91	123,53	6.599,65	6.711,92	6.672,30	6.710,11	
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0	-13,96	540	965	250,47	254,73	253,22	254,66	
2.3	BELANJA TAK TERDUGA		20,11	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2.3.1	Belanja Tak Terduga	-100	20,11	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2.4	BELANJA TRANSFER	0,11	0,09	443.205,51	449.394,92	432.850,07	443.403,34	449.136,76	445.221,35	
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	4,35	5,14	26.863,71	31.712,55	32.147,71	32.700,98	33.434,40	34.518,99	
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	0,94	7,03	22.415,69	28.905,00	29.284,00	29.780,00	30.455,00	31.480,00	



No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan 2020-2024 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	P-RKPD	Proyeksi					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	0	-7,34	4.448,02	2.807,55	2.863,71	2.920,98	2.979,40	3.038,99	
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-43,37	0	-	-	-	-	-	-	
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	-0,07	-0,27	416.341,80	417.682,37	400.702,37	410.702,36	415.702,36	410.702,36	
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	0	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	0	0	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	-0,07	-0,27	416.341,80	417.682,37	400.702,37	410.702,36	415.702,37	410.702,37	
	SURPLUS / (DEFISIT)	-344,6	-13,08	-171.217,67	-92.500,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	
3	PEMBIAYAAN	-8,55	-13,08	171.217,67	92.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-11,58	-12,08	171.217,67	92.500,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	-11,58	-12,08	171.217,67	92.500,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	-	-	-	-	-	-	
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	0	0	-	-	-	-	-	-	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah;	0	0	-	-	-	-	-	-	
3.1.5	penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2146,87	0	-	-	-	-	-	-	
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	0	0	-	-	-	-	-	-	
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-35,56	0	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3.2.1	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	0	0	-	-	-	-	-	-	
3.2.2	Penyertaan modal daerah;	-35,56	0	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan 2020-2024 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	P-RKPD	Proyeksi				
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan;	0	0	-	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	0	0	-	-	-	-	-	-
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan	0	0	-	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	-8,55	-13,08	171.217,67	92.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERKENAAN	-4,33	0	-	-	-	-	-	-

Sumber: Bapperida Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

4. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk memperoleh kapasitas riil yang digunakan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas program dan kegiatan pembangunan. Pada dasarnya Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah diperoleh dari proyeksi penerimaan dikurangi dengan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas. Untuk itu, maka perlu diidentifikasi terlebih dahulu Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas.

Dalam melakukan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka yang harus dihitung di awal ialah proyeksi besaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dari komponen belanja operasi (belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial), belanja transfer (belanja transfer bagi hasil dan belanja transfer bantuan keuangan), dan belanja tak terduga serta pengeluaran pembiayaan yang ada.

Sebagaimana hasil analisis masing-masing pos Belanja Daerah dan Pembiayaan yang telah dijelaskan sebelumnya maka diproyeksikan Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas tahun 2026-2030 akan sedikit mengalami kenaikan dari Rp1,579 triliun (2025) menjadi Rp1,563 triliun (2030).

Adapun perincian proyeksi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Kabupaten Demak tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.81

Proyeksi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Kabupaten Demak Tahun 2025-2030 (dalam Jutaan)

No	Uraian	P-RKPD 2025	Proyeksi				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	Belanja Operasi	1.245.758,44	1.124.786,27	1.075.194,03	1.104.933,89	1.128.241,86	1.108.110,32
1.1	Belanja Pegawai	1.152.371,02	1.048.702,71	985.756,24	995.613,81	1.005.569,94	1.015.625,64
1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
1.4	Belanja Hibah	81.626,42	64.034,32	77.256,80	97.139,10	110.490,93	80.303,69
1.5	Belanja Bantuan Sosial	11.760,99	12.049,25	12.180,99	12.180,99	12.180,99	12.180,99
2	Belanja Transfer	443.205,51	449.394,92	432.850,07	443.403,34	449.136,76	445.221,35
2.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	26.863,71	31.712,55	32.147,71	32.700,98	33.434,40	34.518,99
2.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	416.341,80	417.682,37	400.702,37	410.702,36	415.702,36	410.702,36
3	Belanja Tak Terduga	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.	pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	-	-	-	-	-	-
4.2	penyertaan modal daerah;	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.3.	pembentukan Dana Cadangan;	-	-	-	-	-	-
4.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-	-
4.5.	pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-
	Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas	1.690.963,95	1.579.181,19	1.518.044,10	1.558.337,23	1.587.378,62	1.563.331,67

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)



Analisis Kapasitas riil keuangan Daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang dihitung dengan mengurangi total penerimaan Daerah dengan pengeluaran pembiayaan dan belanja tidak langsung. Namun perlu dipahami bahwa dengan adanya PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur yang kemudian dimutakhirkan melalui Kemendagri 050-3708 tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka kapasitas riil perlu dimaknai berbeda. Sebelum beberapa aturan tersebut, kapasitas riil dapat dimaknai secara sederhana sebagai alokasi anggaran riil untuk belanja langsung program/kegiatan pembangunan. Namun dengan adanya PP 12 tahun 2019, Permendagri 90 tahun 2019 dan Kemendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, sebagian besar belanja periodik yang wajib dan mengikat serta prioritas seperti belanja pegawai (gaji, tunjangan, dll), bansos dan belanja hibah masuk dalam komponen belanja program/kegiatan/subkegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka kapasitas riil perlu didefinisikan dengan dua metode berbeda. Untuk itu agar tidak bias maka dalam dokumen ini akan dirumuskan kapasitas riil keuangan daerah dan kapasitas riil pagu belanja program/keg/subkeg OPD.

Hasil analisis kapasitas riil keuangan daerah mengalami fluktuasi. Kemampuan belanja pembangunan dan/atau belanja publik untuk masyarakat di tahun 2025 sebesar Rp1,062 triliun kemudian naik pada tahun 2026 menjadi Rp1,080 triliun dan meningkat pada tahun 2027 menjadi Rp1,159 triliun kemudian menurun pada tahun 2028 menjadi Rp1,132 triliun dan tahun 2029 kembali menurun menjadi Rp1,114 triliun kemudian pada tahun 2030 kembali naik menjadi Rp1,151 triliun. Dengan kemampuan belanja pembangunan/publik yang terbatas maka efisiensi dan efektivitas belanja pembangunan/publik harus dilandasi prinsip efektivitas, efisiensi, prioritas dan kinerja dampak yang dihasilkan.

Hasil analisis kapasitas riil pagu belanja OPD juga mengalami sedikit fluktuasi yaitu Rp2,308 triliun (2025), Rp2,205 triliun (2026), Rp2,234 triliun (2027), Rp2,237 triliun (2028), Rp2,242 triliun (2029), Rp2,259 triliun (2030).

Dari proyeksi kapasitas riil pagu OPD tersebut kemudian perlu didistribusikan berdasarkan prioritas pemanfaatannya antara lain:

- a. Prioritas I. digunakan untuk alokasi pembangunan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.



- b. Prioritas II. digunakan untuk dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah.
- c. Prioritas III. digunakan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya

Pembagian pendanaan untuk program prioritas di atas secara lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.82

Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2030 (dalam Jutaan)

No.	Uraian	P-RKPD 2025	Proyeksi				
			2026	2027	2028	2029	2030
1.	Pendapatan	2.582.164,68	2.567.187,25	2.572.494,56	2.591.339,75	2.606.848,16	2.625.036,52
2.	Penerimaan Pembiayaan	171.217,67	92.500,00	104.918,08	99.672,18	94.688,57	89.954,14
	TOTAL PENERIMAAN						
	(Dikurangi):						
3.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	1.690.963,95	1.579.181,19	1.518.044,10	1.558.337,24	1.587.378,62	1.563.331,67
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.062.418,40	1.080.506,05	1.159.368,53	1.132.674,69	1.114.158,11	1.151.658,99

Sumber: Bapperida Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

Tabel II.83

Proyeksi Kapasitas Riil Pagu OPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2030 (dalam Jutaan)

No.	Uraian	P-RKPD 2025	Proyeksi				
			2026	2027	2028	2029	2030
1.	Pendapatan	2.582.164,68	2.567.187,25	2.572.494,56	2.591.339,75	2.606.848,16	2.625.036,52
2.	Penerimaan Pembiayaan	171.217,67	92.500,00	104.918,08	99.672,18	94.688,57	89.954,14
	TOTAL PENERIMAAN	2.753.382,35	2.659.687,25	2.677.412,64	2.691.011,93	2.701.536,73	2.714.990,66
	(Dikurangi):						
3	Belanja Transfer	443.205,51	449.394,92	432.850,07	443.403,34	449.136,76	445.221,35
4	Belanja Tak Terduga	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Kapasitas Riil Pagu OPD	2.308.176,84	2.205.292,33	2.234.562,56	2.237.608,58	2.242.399,97	2.259.769,31

Sumber: Bapperida Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

Tabel II.84

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kabupaten Demak Tahun 2026-2030 (dalam Jutaan)

No	Uraian	Proyeksi Kapasitas Pagu OPD					2030
		P-RKPD 2025	2026	2027	2028	2029	
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan OPD	2.308.176,84	2.205.292,33	2.234.562,56	2.237.608,58	2.242.399,97	2.259.769,31
2	Prioritas I	1.283.807,96	1.226.583,59	1.242.863,70	1.244.557,89	1.247.222,86	1.256.883,69
3	Prioritas II	692.453,05	661.587,70	670.368,77	671.282,58	672.719,99	677.930,79
4	Prioritas III	331.915,83	317.121,04	321.330,10	321.768,11	322.457,11	324.954,83
	JUMLAH	2.308.176,84	2.205.292,33	2.234.562,56	2.237.608,58	2.242.399,97	2.259.769,31

Sumber: Bapperida Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selalu memiliki dinamika permasalahan dan isu yang selalu mengiringi. Permasalahan merupakan *gap* antara rencana dan realisasi, dapat dikatakan belum tercapainya tujuan dari perencanaan pembangunan daerah. Dalam merumuskan permasalahan dan isu perlu adanya identifikasi dan analisis dari evaluasi pencapaian-pencapaian pembangunan sebelumnya, sebagai gambaran apa yang menjadi sumber/akar masalah dan bagian mana yang harus diperbaiki. Perumusan permasalahan dan isu pembangunan merupakan bagian penting dalam perencanaan. Dengan identifikasi permasalahan yang tepat akan memberikan arah pijakan dalam perencanaan untuk menyusun dan merumuskan arah kebijakan yang tepat sasaran. Sehingga kebijakan daerah sebagai tindaklanjut permasalahan mampu mengatasi permasalahan dengan efektif dan efisien. Selain permasalahan pembangunan, dalam perencanaan pembangunan perlu adanya antisipasi isu strategis baik berupa ancaman maupun peluang yang berdampak besar dalam pembangunan daerah.

Dengan memahami permasalahan yang serta dinamika dan gejolak pembangunan dengan memperhatikan isu yang berpotensi akan dihadapi oleh Kabupaten Demak. Maka dalam mengidentifikasi isu perlu menelaah isu strategis Internasional, Nasional, dan daerah serta masukan dari masyarakat sebagai satu kesatuan utuh dalam penyelenggaraan pembangunan. Dengan memperhatikan dari seluruh aspek, maka diharapkan pembangunan bisa lebih responsif dan adaptif. Dengan ini diharapkan permasalahan dan isu strategis mampu menjadi pijakan yang tepat dalam merumuskan kebijakan dan menentukan tujuan dan sasaran pembangunan.

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Dengan berbagai analisis yang telah dijabarkan pada bab gambaran umum daerah maka dalam merumuskan permasalahan pembangunan daerah, dapat identifikasi faktor-faktor yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah sesuai dengan kondisi objektif daerah, terdapat 5 (lima) permasalahan pokok sebagai berikut:

Permasalahan utama dan permasalahan pokok pembangunan daerah Kabupaten Demak diuraikan sebagai berikut.

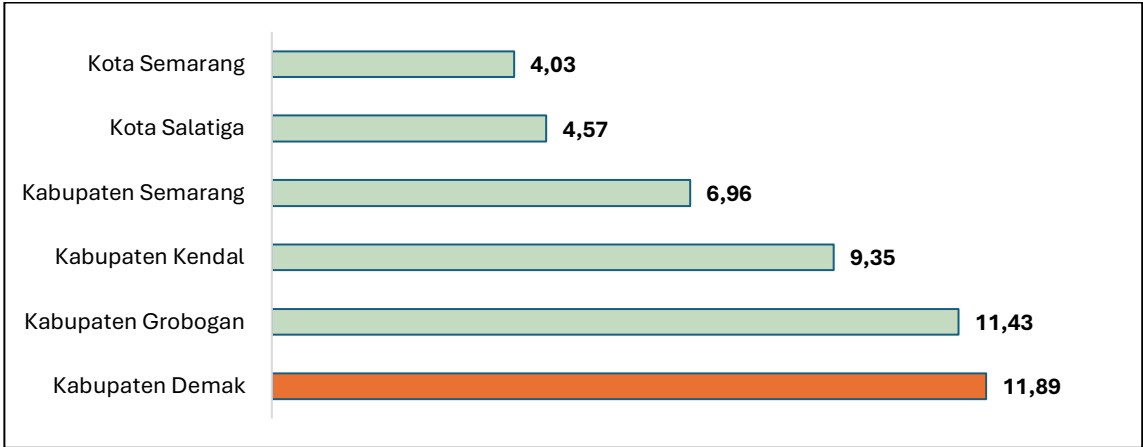
1. Tingginya Tingkat Kemiskinan Kabupaten Demak

Tingkat kemiskinan yang tinggi masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan di Kabupaten Demak. Kemiskinan dapat dipicu

oleh berbagai faktor kompleks, termasuk rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses ke lapangan kerja yang layak, infrastruktur yang kurang memadai, serta ketimpangan ekonomi antarwilayah. Meskipun berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kenyataannya masih banyak warga Kabupaten Demak, terutama di daerah pedesaan, yang hidup di bawah garis kemiskinan. Faktor lain seperti rendahnya produktivitas sektor pertanian, keterbatasan akses layanan kesehatan yang berkualitas, serta minimnya peluang kerja di sektor formal turut memperparah kondisi ini. Berdasarkan data tahun 2024, tingkat kemiskinan di Kabupaten Demak tercatat sebesar 11,89%. Meskipun angka ini menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi angka tersebut masih cukup tinggi dan mencerminkan tantangan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Jika dibandingkan dengan daerah lain di wilayah Kedungsepur (Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Kabupaten Grobogan), tingkat kemiskinan Kabupaten Demak masih tergolong yang tertinggi. Berdasarkan data tahun 2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Demak sebesar 11,89% melampaui rata-rata wilayah Kedungsepur, menandakan adanya ketertinggalan dalam pengurangan angka kemiskinan dibandingkan daerah sekitar.

Gambar II.52
Persentase Penduduk Miskin Wilayah Kedungsepur Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2025)

Tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Demak berhubungan erat dengan rendahnya pengeluaran per kapita masyarakat Demak. Pada tahun 2024, pengeluaran per kapita masyarakat Demak tercatat sebesar Rp11,591 ribu/tahun atau Rp11,591,000/tahun, yang merupakan terendah kedua di wilayah Kedungsepur setelah Kabupaten Grobogan yang mencatat pengeluaran per kapita sebesar Rp11,548 ribu/tahun. Jika dibandingkan dengan Kota Semarang dan Kota Salatiga, pengeluaran per kapita masyarakat Demak

terpaut cukup jauh. Kota Semarang mencatat pengeluaran per kapita sebesar Rp16,990 ribu/tahun, sedangkan Kota Salatiga mencatat pengeluaran tertinggi di wilayah Kedungsepur, yaitu sebesar Rp17,096 ribu/tahun. Rendahnya pengeluaran per kapita ini mencerminkan daya beli masyarakat yang lemah dan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, sehingga berkontribusi pada stagnasi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Demak memiliki potensi ekonomi di sektor pertanian dan perikanan, namun belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Gambar II.53
Pengeluaran Per Kapita Masyarakat wilayah Kedungsepur
Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2025)

Masih rendahnya Tingkat pendapatan Masyarakat di Kabupaten Demak dapat disebabkan oleh masih rendahnya kualitas daya saing tenaga kerja yang dapat dilihat pada persentase penduduk bekerja menurut Pendidikan tertinggi yang ditamatkan ditahun 2024 pada Tingkat SD ke bawah (36,43%) masih memiliki proporsi yang lebih besar daripada pekerja dengan pendidikan SMP (20,27%); SMA (23,88%); SMK (10,82%) dan Diploma/Universitas (8,60%). Hal ini menunjukkan penyerapan tenaga kerja masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan rendah yaitu SMP ke bawah dengan persentase lebih dari 56 persen. Dengan tingkat pendidikan seperti ini, pada umumnya masyarakat Kabupaten Demak bekerja pada sektor pertanian karena pada umumnya sektor tersebut tidak membutuhkan kualifikasi pendidikan tertentu.

Dengan permasalahan ini, upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Demak memerlukan pendekatan yang lebih terarah dan komprehensif, termasuk peningkatan akses lapangan kerja, pengembangan infrastruktur ekonomi dan sosial, serta pemberdayaan sektor pertanian dan UMKM guna meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu,

peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai juga menjadi kunci untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

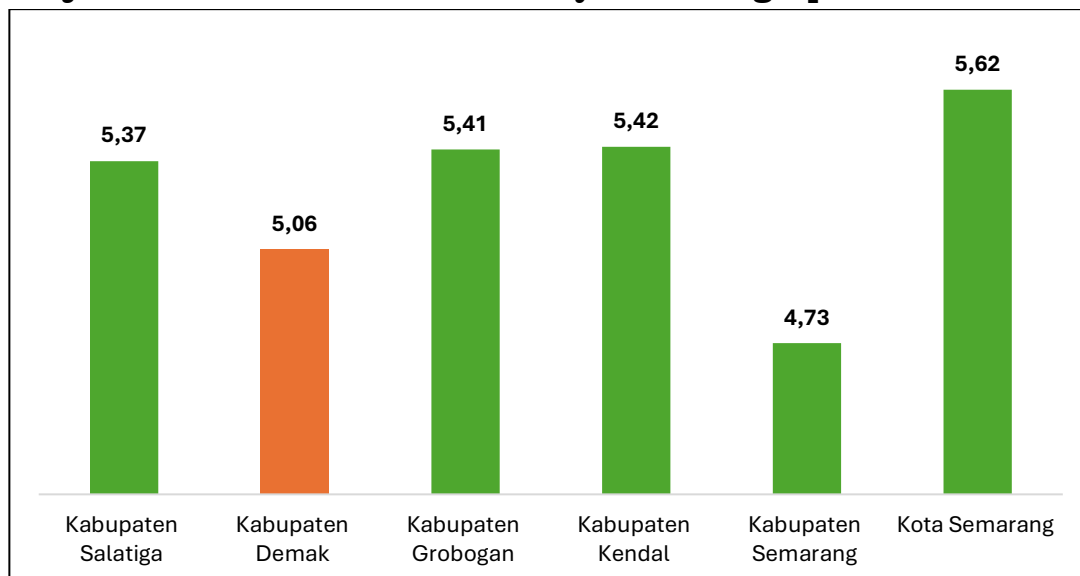
2. Rendahnya daya saing ekonomi daerah

Kabupaten Demak menghadapi tantangan signifikan dalam meningkatkan daya saing ekonominya. Meskipun memiliki potensi sumber daya alam dan letak geografis yang strategis, berbagai faktor seperti infrastruktur yang belum optimal, kualitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan, serta adopsi teknologi yang masih rendah menjadi penghambat utama. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian daerah belum sepenuhnya berdaya saing akibat keterbatasan akses permodalan, pelatihan, dan pasar. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi cenderung lambat dan kurang mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Berdasarkan data laju pertumbuhan riil PDRB ADHK menunjukkan belum optimalnya ketahanan ekonomi yang produktif di Kabupaten Demak dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) yang mengalami penurunan di beberapa sektor lapangan usaha ditahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Sektor PDRB yang mengalami penurunan ditahun 2024 yaitu pada sektor pertambangan dan penggalan; sektor industri pengolahan; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; sektor perdagangan besar dan eceran; sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor informasi dan komunikasi; sektor *real estate*; dan sektor jasa lainnya. Jadi Sebagian besar beberapa lapangan usaha di Kabupaten Demak mengalami penurunan ditahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan kinerja pada beberapa sektor ekonomi. Fenomena ini menjadi perhatian penting karena dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Kemungkinan penyebab penurunan ini bersifat multifaktor, meliputi faktor internal daerah maupun eksternal. Secara internal, potensi penurunan produktivitas akibat perubahan iklim yang mempengaruhi sektor pertanian dan perikanan, kendala dalam rantai pasok dan distribusi, atau perubahan preferensi pasar lokal dapat menjadi pemicu. Sementara itu, faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas global, perubahan kebijakan perdagangan, atau kondisi ekonomi nasional yang kurang kondusif juga dapat memberikan tekanan pada sektor-sektor tertentu di Kabupaten Demak.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi (Laju Pertumbuhan Ekonomi/LPE), Kabupaten Demak mencatat pertumbuhan sebesar 5,06% pada tahun 2024, angka ini lebih rendah dibandingkan Grobogan (5,41%), Kendal (5,42%), dan Kota Salatiga (5,37%). Dengan capaian ini menunjukkan adanya dinamika ekonomi yang cukup positif meskipun belum mampu menyamai capaian Kabupaten Semarang dan Kota Semarang yang cenderung lebih stabil dan tinggi.

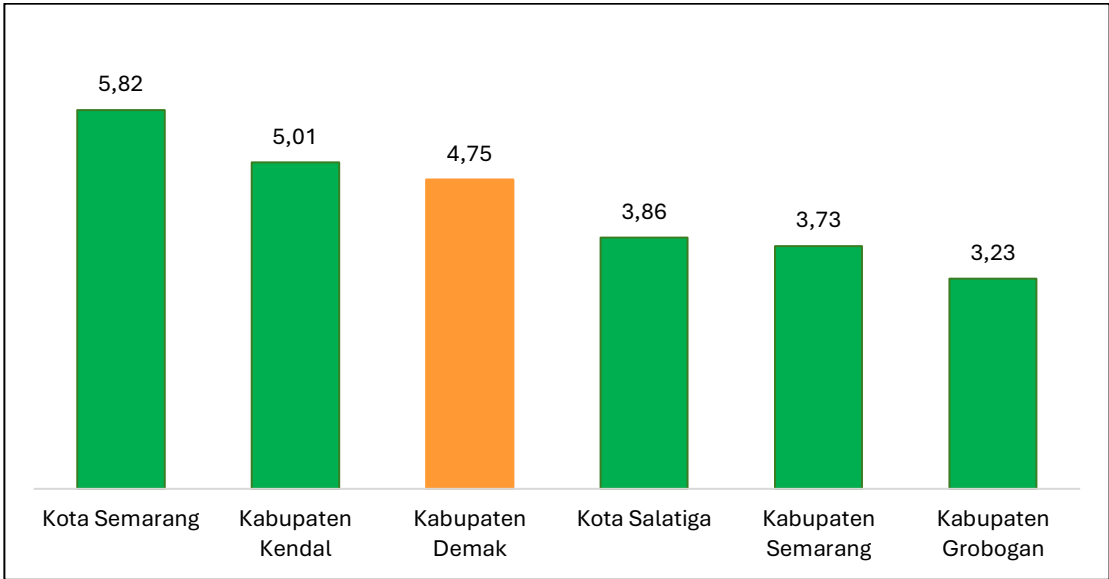
Gambar II.54
Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Kedungsepur Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2025)

Selain itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Demak juga masih tergolong tinggi, yaitu sebesar 4,75%, lebih tinggi dari Kabupaten Grobogan (3,23%) dan Kabupaten Semarang (3,73%), namun masih lebih baik dibandingkan Kota Semarang (5,82%) dan Kabupaten Kendal (5,01%). Hal ini mencerminkan adanya ketidakselarasan antara ketersediaan lapangan kerja dan kemampuan penyerapan tenaga kerja yang masih terbatas, sehingga memperkuat urgensi peningkatan ketahanan ekonomi yang lebih produktif melalui pengembangan sektor unggulan dan peningkatan kualitas tenaga kerja.

Gambar II.55
Tingkat Pengangguran Terbuka Wilayah Kedungsepur Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2025)

Permasalahan rendahnya daya saing ini diperparah oleh regulasi dan birokrasi yang terkadang kurang efisien, menghambat investasi dan inovasi. Ketergantungan pada sektor-sektor tertentu yang rentan terhadap perubahan pasar dan iklim juga menjadi perhatian serius. Memahami permasalahan ini ke depannya perlu adanya upaya terintegrasi yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat secara keseluruhan. Peningkatan kualitas infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, dukungan terhadap UMKM, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif menjadi kunci utama untuk mendorong daya saing ekonomi Kabupaten Demak.

3. **Meningkatnya intensitas kerusakan lingkungan hidup yang berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat**

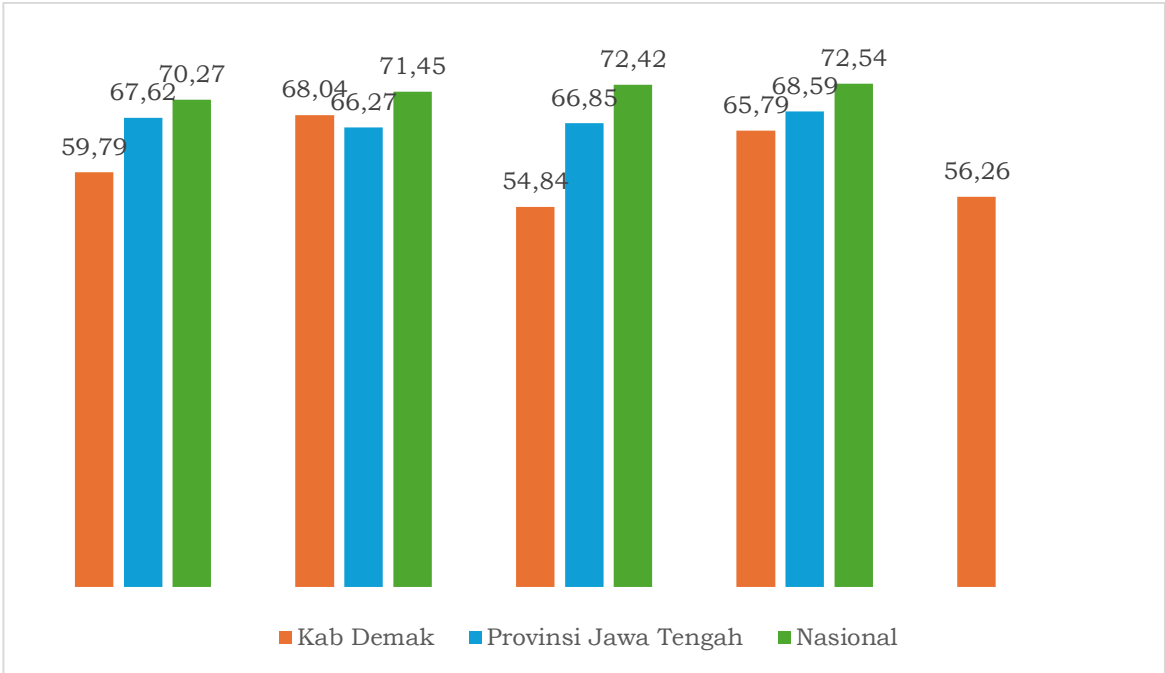
Meningkatnya intensitas kerusakan lingkungan hidup merupakan masalah serius yang berdampak luas pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Di banyak daerah, termasuk Kabupaten Demak, kerusakan lingkungan terutama disebabkan oleh tata guna lahan yang tidak berkelanjutan, polusi air dan udara, serta perubahan iklim. Dampak dari kerusakan lingkungan ini dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat melalui penurunan kualitas air dan tanah, rusaknya habitat alami, serta peningkatan risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Hal ini tidak hanya mengancam mata pencaharian petani dan nelayan, tetapi juga merugikan sektor pariwisata dan industri lainnya yang bergantung pada keberlangsungan lingkungan hidup yang sehat. Selain itu, kerusakan lingkungan juga dapat mengakibatkan peningkatan biaya sosial ekonomi, seperti biaya kesehatan akibat polusi udara dan air, serta biaya

pemulihan dan rehabilitasi setelah bencana alam. Tingkat pengangguran juga bisa meningkat karena hilangnya sumber mata pencaharian tradisional, sementara penurunan produksi pertanian dapat mengancam ketahanan pangan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penanganan kerusakan lingkungan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah, dengan mengadopsi praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan, melindungi ekosistem alami, serta memperkuat kebijakan perlindungan lingkungan yang ketat. Dengan demikian, upaya-upaya tersebut tidak hanya akan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

Kualitas lingkungan hidup dapat dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: indeks kualitas pencemaran air, indeks kualitas pencemaran udara, dan indeks tutupan lahan. Klasifikasi kualitas indeks lingkungan hidup berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup di antaranya: kondisi waspada berkisar <50, kondisi sangat kurang berkisar 50-58, kondisi kurang berkisar 58-66, kondisi cukup berkisar 66-72, kondisi baik berkisar 74-82, kondisi sangat baik berkisar 82-90, dan kondisi unggul berkisar lebih dari 90.

IKLH Kabupaten Demak masih berada pada kategori kurang dengan nilai capaian pada tahun 2024 sebesar 56,26. Dengan melihat capaian pada tahun 2023 (65,1) terlihat adanya penurunan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Demak. Hal ini terlihat juga pada penurunan yang terjadi pada beberapa komponen IKLH yang mengalami penurunan yaitu pada Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara.

Gambar II.56
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dibandingkan
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional



Kerusakan lingkungan di Kabupaten Demak juga diindikasikan dari bertambahnya kejadian bencana yang dialami oleh Kabupaten Demak. Bencana yang sering dialami oleh Kabupaten Demak adalah bencana hidrometeorologi, yaitu bencana yang diakibatkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur, angin dan kelembapan, di antaranya kekeringan, banjir, kebakaran lahan, tanah longsor, dan angin kencang/puting beliung. Kejadian kekeringan dan kebakaran menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya. Selain itu, bencana banjir masih menjadi ancaman tahunan di Kabupaten Demak.

Selain bencana di atas, fenomena alam yang menjadi perhatian khusus adalah banjir yang terjadi akibat naiknya permukaan air laut atau dikenal dengan istilah banjir rob. Kejadian rob dialami di hampir semua kabupaten/kota yang berada di pesisir pantai utara Jawa, termasuk Kabupaten Demak. Sampai dengan tahun 2021, garis pantai Kabupaten Demak yaitu 101,94 km, sementara pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 102,03 km. Hal ini menunjukkan terjadinya penambahan panjang garis pantai yang diakibatkan oleh abrasi. Naiknya permukaan air laut ini menjadi masalah yang sangat kompleks. Beberapa hipotesis yang mengemuka yaitu adanya penurunan muka tanah (*land subsidence*) akibat pengambilan air tanah yang terus menerus, dan adanya perubahan iklim sehingga mengakibatkan permukaan air laut meningkat.

Perubahan iklim juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pembahasan kerusakan lingkungan. Salah satu penyebab perubahan iklim yaitu peningkatan emisi gas rumah kaca. Faktor penyebab terjadi peningkatan

berasal dari limbah; *Agriculture, Forestry and Other Land Use* (AFOLU), *industrial process and production use* (IPPU), dan Energi. Penyumbang terbesar untuk emisi rumah kaca adalah AFOLU sebesar 44% dan Energi sebesar 49%. Pada tahun 2022 capaian Emisi Gas Rumah Kaca di Kabupaten Demak adalah sebesar 1.500,21 Gg CO₂ yang mengalami peningkatan sebesar 10,72% dibandingkan tahun 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh emisi dari sumber energi yang semakin bertambah.

4. Pemenuhan infrastruktur yang belum merata

Permasalahan infrastruktur yang belum merata ini memerlukan perhatian dan solusi yang komprehensif. Investasi yang lebih besar dan terarah pada pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal menjadi krusial. Selain itu, perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat akan memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Infrastruktur yang kurang berkualitas dan tidak memadai dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah, akses terhadap layanan publik, dan pertumbuhan ekonomi. Di Kabupaten Demak, terutama di daerah pedesaan, masih terdapat keterbatasan akses terhadap jalan yang baik dan air bersih. Hal ini tidak hanya membatasi mobilitas masyarakat dan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, tetapi juga menghambat pengembangan sektor ekonomi lokal.

Selain itu, infrastruktur yang kurang berkualitas juga dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan, baik melalui biaya operasional yang tinggi maupun kerugian produktivitas. Misalnya, jalan yang rusak dapat meningkatkan biaya transportasi barang dan mengurangi daya saing produk lokal di pasar regional. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan investasi yang lebih besar dalam pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan terkelola dengan baik. Hal ini termasuk pembangunan jalan yang baik, sistem irigasi yang efisien, yang dapat diandalkan. Dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur pembangunan, diharapkan Kabupaten Demak dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pembangunan infrastruktur dasar di daerah perlu disesuaikan dengan kebutuhan dasar masyarakat, mengingat posisi Kabupaten Demak yang berada di pesisir pantai utara Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan ibu kota Provinsi Jawa Tengah maka kebutuhan dasar masyarakatnya adalah air bersih

dan penataan wilayah. Penataan wilayah dibutuhkan untuk memudahkan akses dan mobilitas masyarakat.

Kondisi geografi wilayah Kabupaten Demak yang terletak di pesisir pantai utara menjadi tempat bermuaranya beberapa sungai besar seperti Kali Tuntang, Kali Wulan, dan Kali Jajar. Namun, kualitas dan kuantitas air permukaan menjadi persoalan, mengingat air sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Demak memiliki tingkat sedimentasi yang tinggi dengan keberlangsungan debit andalan rendah terutama pada saat musim kemarau. Sementara di wilayah pesisir pantai, kadar salinitas air yang tinggi akibat adanya rob maupun intrusi air laut ke darat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan air baku.

Air tanah dan air permukaan (sungai) menjadi sumber air baku andalan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan untuk air bersih di Kabupaten Demak. Tantangan menjadi bertambah mengingat wilayah Kabupaten Demak termasuk Zona Merah untuk pengambilan air tanah, sementara ketersediaan air sungai tidak kontinu. Di sisi lainnya, pemanfaatan air hujan (air permukaan) belum optimal karena di Kabupaten Demak belum ada bendungan, waduk, atau penampungan air lainnya yang memiliki kapasitas cukup untuk keperluan pemenuhan air baku.

Kebutuhan air bersih di Kabupaten Demak belum terpenuhi sepenuhnya. Jumlah warga yang terlayani kebutuhan pokok air minum sehari-hari pada tahun 2024 baru mencapai 92,26 persen kepala keluarga yang artinya masih terdapat 7,74 persen keluarga yang kebutuhan air bersihnya belum tercukupi. Hal ini tentunya menjadi perhatian penuh mengingat kondisi geografis Kabupaten Demak yang memiliki dampak terhadap ketersediaan air baku. Pada aspek akses terkait penataan wilayah, posisi Kabupaten Demak yang berbatasan langsung dengan ibu kota Provinsi Jawa Tengah memerlukan perhatian khusus.

Salah satu masalah utama adalah rata-rata penurunan muka tanah yang mencapai -5,1694 cm per tahun hingga tahun 2022. Penurunan ini mengindikasikan bahwa masalah *land subsidence* atau amblesan tanah menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan sumber air dan stabilitas infrastruktur.

Penanganan masalah rob dan banjir juga menjadi kendala besar. Mahalnya biaya penanganan rob, keterbatasan anggaran, dan sulitnya relokasi warga yang terdampak, semakin menyulitkan upaya mitigasi. Kondisi ini menyebabkan penanganan banjir dan rob tidak dapat dilakukan secara optimal, mengakibatkan banyak wilayah yang terus-menerus terendam air dan merusak infrastruktur.

Selain itu, Kabupaten Demak juga menghadapi masalah kawasan kumuh yang membutuhkan perhatian. Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya memiliki kewenangan penanganan kawasan kumuh dengan luas kurang dari 10 Ha. Sebagaimana Surat Keputusan Bupati Demak nomor 475.26/120 tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Demak bahwa luas wilayah kumuh yang menjadi kewenangan kabupaten mencapai 6,380 Ha. Namun pada tahun 2023, baru 3,110 Ha yang berhasil ditangani.

Masalah infrastruktur jalan juga menjadi perhatian. Terjadi penurunan persentase proporsi jalan dalam kondisi mantap, yang disebabkan oleh penambahan ruas jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten dari 426,510 km menjadi 925,403 km. Dengan perluasan jaringan jalan yang signifikan, banyak jalan yang belum mendapatkan perawatan yang memadai, sehingga kualitas infrastruktur jalan menurun. Hal ini juga dapat dilihat pada Panjang jalan menurut kondisi jalan kondisi rusak berat di Kabupaten Demak pada tahun 2024 sebanyak 74,8 Km dengan total Panjang jalan 909,58 Km.

Selain jalan, pembangunan jembatan di Kabupaten Demak masih belum optimal, yang ditunjukkan adanya penurunan jumlah jembatan dalam kondisi baik. Berdasarkan data jembatan dalam kondisi baik ditahun 2021 sebanyak 168 unit menjadi 5 unit di tahun 2024. Beberapa capaian pembangunan infrastruktur di Kabupaten Demak juga masih belum optimal yang terlihat pada persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman ditahun 2024 masih mencapai 5,79 persen dan persentase rumah tangga dengan akses internet ditahun 2024 masih mencapai 84,96 persen yang artinya masih 15,04 persen rumah tangga yang belum terakses internet. Kemudian status persentase desa mandiri di Kabupaten Demak tergolong masih rendah dengan capaian 18,52 yang artinya desa mandiri di Kabupaten Demak masih di bawah 50% dari total jumlah desa. Selain itu terkait perumahan dan pemukiman pada indikator persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak ditahun 2024 masih mencapai 80,32 yang artinya masih adanya 19,68 persen, rumah tangga dengan akses hunian tidak layak.

Dengan permasalahan ini, ke depan perlu adanya kebijakan yang difokuskan pada peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur secara berkelanjutan. Dengan adanya perbaikan dan pembangunan jalan serta jembatan yang menghubungkan wilayah produksi dengan pasar, pembangunan dan pemeliharaan sistem pengendali banjir rob seperti tanggul dan polder, serta perluasan jaringan air bersih dan sanitasi. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pembangunan infrastruktur yang lebih efisien dan ramah lingkungan akan didorong, serta peningkatan koordinasi antar instansi dan

pelibatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur menjadi kunci keberhasilan kebijakan di Kabupaten Demak.

5. Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Demak

Tata kelola pemerintahan di Kabupaten Demak masih menghadapi berbagai tantangan. Hal ini terlihat dari Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Demak Tahun 2024 yang mencapai 86,58. Dengan capaian ini terlihat adanya peningkatan namun jika melihat lebih mendalam terdapat beberapa permasalahan yang terlihat dari belum optimalnya capaian SAKIP tahun 2024 sebesar 69,10 dengan kategori B. Kemudian pada Indeks Profesionalitas ASN yang mengalami penurunan dari 90,17 (2023) menjadi 83,08 ditahun 2024, pada indikator Indeks Persepsi Korupsi juga mengalami penurunan ditahun 2024. Selanjutnya pada indikator indeks integritas dan level maturitas SPIP yang mengalami penurunan.

Dengan beberapa indikasi permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa praktik-praktik birokrasi lama yang masih terjadi di antaranya inefisiensi tata laksana, pelayanan publik kurang responsif, dan tingkat inovasi yang masih rendah. Secara eksternal, tantangan birokrasi yaitu semakin banyaknya tuntutan masyarakat maupun instansi vertikal yang harus diselesaikan dengan cepat, sementara jumlah pegawai cenderung stagnan. Sebagai tindak lanjut atas permasalahan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Demak, diperlukan langkah strategis yang menitikberatkan pada penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan. Pemerintah daerah perlu mendorong transparansi dan akuntabilitas melalui penerapan *e-government* yang terintegrasi, memperbaiki mekanisme koordinasi antar perangkat daerah, serta memperkuat partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Upaya perbaikan tata kelola ini juga harus diiringi dengan evaluasi kinerja secara berkala, pembenahan regulasi daerah, serta pembinaan berkelanjutan guna menciptakan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

6. Masih rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia

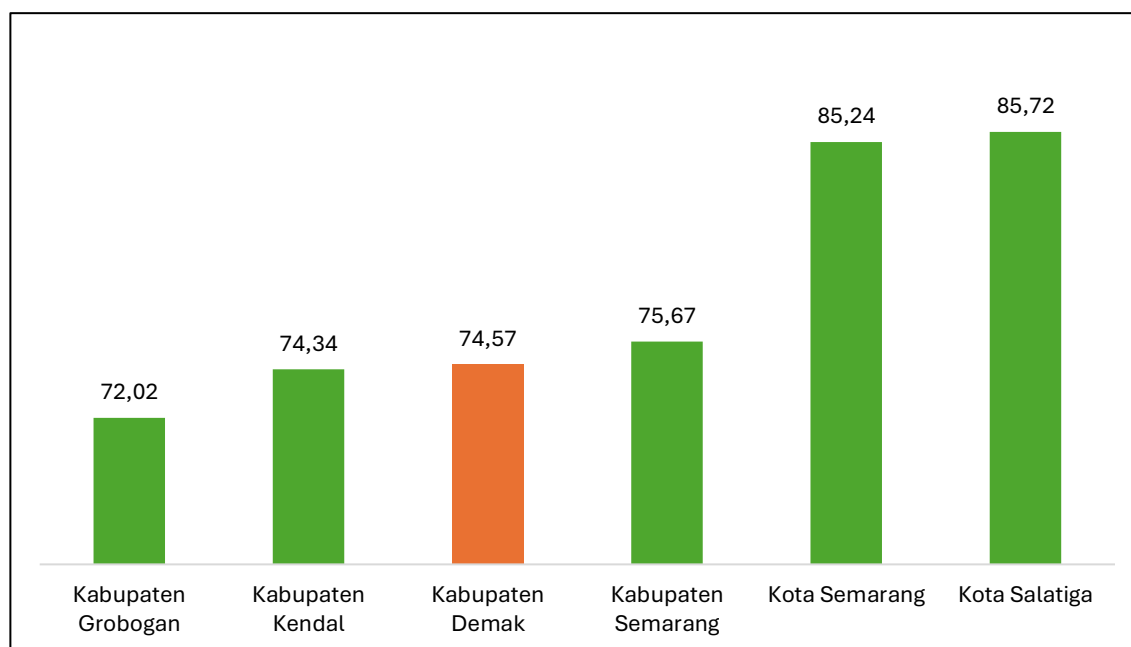
Kabupaten Demak menghadapi tantangan signifikan dalam meningkatkan daya saing daerah yang salah satunya berakar pada kualitas sumber daya manusianya yang masih perlu ditingkatkan. Indikator seperti tingkat pendidikan, keterampilan kerja, dan kesehatan masyarakat secara

umum menunjukkan adanya disparitas dibandingkan dengan daerah lain yang lebih maju. Situasi ini menghambat kemampuan Demak untuk menarik investasi berkualitas tinggi, mengembangkan industri berbasis pengetahuan, dan menciptakan lapangan kerja yang produktif dan berdaya saing. Rendahnya penguasaan teknologi, minimnya inovasi, serta akses terbatas pada pelatihan dan pengembangan diri menjadi faktor-faktor yang berkontribusi pada kondisi ini, yang pada akhirnya memengaruhi produktivitas dan potensi pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.

Di sektor pendidikan, tantangan seperti disparitas kualitas tenaga pendidik dan fasilitas belajar antar wilayah, terutama antara perkotaan dan perdesaan, masih menjadi isu krusial. Akses terhadap pendidikan berkualitas, terutama pada jenjang pendidikan menengah dan kejuruan, juga belum sepenuhnya merata, yang berpotensi menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, di bidang kesehatan, akses terhadap layanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas masih belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Demak.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Demak. Peningkatan kualitas SDM sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu indikator utama yang mencerminkan kualitas hidup masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang disusun berdasarkan tiga komponen utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Berdasarkan data tahun 2024, IPM Kabupaten Demak tercatat sebesar 74,57. Angka ini berada di bawah Kabupaten Semarang (75,67), Kota Semarang (85,24), dan Kota Salatiga (85,72), meskipun masih lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Grobogan (72,02) dan Kabupaten Kendal (74,34). Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas SDM di Kabupaten Demak masih menghadapi tantangan dalam mencapai standar hidup yang layak dan daya saing regional.

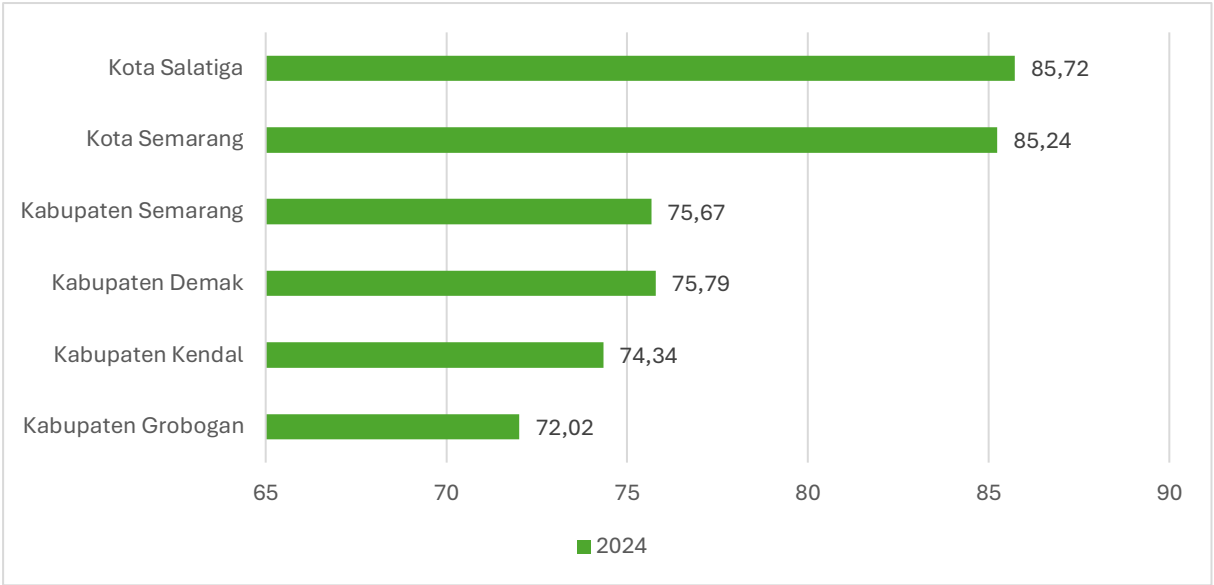
Gambar II.57
Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Kedungsepur Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2025)

Tingkat kualitas hidup masyarakat juga tercermin dari angka harapan hidup sebagai salah satu elemen penyusun IPM. Pada tahun 2024, angka harapan hidup di Kabupaten Demak tercatat sebesar 75,79 tahun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Grobogan (72,02 tahun) dan Kabupaten Kendal (74,34 tahun), Kabupaten Semarang (75,67 tahun), namun masih tertinggal dari Kota Semarang (85,24 tahun), dan Kota Salatiga (85,72 tahun). Perbedaan yang cukup signifikan dengan daerah perkotaan seperti Kota Semarang dan Kota Salatiga mengindikasikan bahwa ketimpangan dalam akses terhadap layanan kesehatan dan kualitas hidup masih menjadi permasalahan utama yang perlu diatasi. Kemudian pada capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten Demak masih mencapai 8,28 tahun yang artinya Masyarakat Kabupaten Demak sebagian besar rata-rata penduduk Demak telah menyelesaikan pendidikan dasar dan hampir menyelesaikan pendidikan menengah pertama. Angka ini memberikan mengenai potensi sumber daya manusia di Kabupaten Demak. Rata-rata lama sekolah menunjukkan adanya kemajuan dalam akses dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Namun, di sisi lain, masih terdapat sebagian penduduk yang belum menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMP, yang bisa menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan dan daya saing di pasar kerja yang semakin kompetitif.

Gambar II.58
Angka Harapan Hidup Wilayah Kedungsepur Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2025)

Permasalahan kesehatan ini juga terlihat pada angka kematian balita yang meningkat ditahun 2024 dengan capaian 6,12 jika dibandingkan capaian ditahun 2023 sebesar 5,6. Kemudian pada Tingkat kematian karena tuberculosis ditahun 2023 meningkat hingga mencapai 3,40 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 1,2.

Permasalahan kualitas hidup layak ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Demak dibandingkan dengan wilayah Kedungsepur lainnya. Belum optimalnya akses terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan menjadi faktor yang memengaruhi capaian kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Demak memerlukan strategi yang terarah, termasuk peningkatan infrastruktur kesehatan, pemerataan akses pendidikan, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Permasalahan daerah di atas dikonstruksi dari permasalahan-permasalahan yang ada di bawahnya. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat dijabarkan ke dalam tiap urusan yang kemudian akan diintervensi oleh Perangkat Daerah. Permasalahan pembangunan per urusan tersebut tersaji pada tabel sebagai berikut.

Tabel II.85

Permasalahan Per Urusan Kabupaten Demak

Urusan Pemerintahan	Permasalahan
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	
Pendidikan	Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan masih belum optimal
	Kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan belum optimal
	Tata kelola kelembagaan belum optimal
Kesehatan	Masih ditemukannya kasus <i>stunting</i> dan kekurangan gizi
	Kurangnya kesadaran masyarakat akan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
	Belum optimalnya standardisasi dan jaminan pelayanan kesehatan keluarga, khususnya masyarakat miskin
	Belum optimalnya mutu serta sistem tata kelola kesehatan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum optimalnya pemenuhan pelayanan publik terkait pekerjaan umum seperti air minum bersih, sanitasi, hingga drainase
	Belum optimalnya kualitas dan pemerataan infrastruktur jalan
	Kurangnya ketersediaan air untuk kebutuhan air baku dan irigasi
	Semakin tingginya permasalahan banjir rob
	Tingginya potensi limpasan air dan longsoran tanggul, khususnya pada musim hujan
	Tingginya alih fungsi lahan yang tidak sesuai RTRW
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih banyaknya rumah tidak layak huni
	Belum optimalnya pemenuhan dan kelayakan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk perumahan dan permukiman
	Belum optimalnya penanganan pemukiman kumuh



Urusan Pemerintahan	Permasalahan
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Masih adanya pelanggaran PERDA
	Belum optimalnya mitigasi dan penanganan bencana, khususnya bencana kebakaran dan banjir
Sosial	Pelayanan rehabilitasi sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih kurang
	Belum menyeluruhnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial PMKS/PPKS
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	
Tenaga Kerja	Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja
	Belum meratanya kualitas lapangan usaha
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum optimalnya peran, partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan
	Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
	Belum optimalnya pemenuhan hak anak
Pangan	Masih adanya daerah rawan pangan
	Konsumsi pangan belum beragam, bergizi seimbang dan aman
Pertanahan	Pengelolaan aset tanah milik pemerintah Kabupaten Demak belum optimal
Lingkungan Hidup	Potensi kerusakan sebagai dampak aktivitas ekonomi meningkat
	Kualitas air dan tutupan lahan masih rendah
	Belum optimalnya pengelolaan sampah
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan registrasi terkait kondisi kependudukan
	Belum dimanfaatkannya data kependudukan secara optimal baik oleh pemerintahan maupun masyarakat luas

Urusan Pemerintahan	Permasalahan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat
	Belum optimalnya upaya kemandirian desa
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kurangnya akses dan pelayanan terkait KB
	Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas kesejahteraan keluarga
Perhubungan	Menurunnya jumlah penumpang umum dan meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi
	Terdapat titik-titik rawan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas
	Belum optimalnya terminal tipe C untuk melayani penumpang
Komunikasi dan Informatika	Belum optimalnya layanan dan jangkauan jaringan telekomunikasi
	Aplikasi <i>e-government</i> belum optimal penggunaannya dan integrasi antar aplikasi
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Belum optimalnya keaktifan dan pemenuhan regulasi koperasi secara menyeluruh
	Masih kurangnya permodalan, kapasitas usaha, hingga pemasaran koperasi dan UMKM
	Kualitas SDM pelaku koperasi dan UMKM masih rendah
Penanaman Modal Daerah	Belum optimalnya kondusivitas iklim investasi daerah
	Belum optimalnya pelayanan perizinan dan non perizinan usaha berbasis IT
	Belum optimalnya pengendalian/pengawasan penanaman modal
Kepemudaan dan Olahraga	Daya saing pemuda dalam perekonomian dan pembangunan belum optimal
	Masih minimnya prestasi keolahragaan, khususnya pada tingkat provinsi atau nasional

Urusan Pemerintahan	Permasalahan
	Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dan keolahragaan
Statistik	Belum optimalnya penyediaan data yang valid dan tepat waktu
	Belum optimalnya implementasi Satu Data Indonesia di Pemerintah Kabupaten Demak
Persandian	Belum optimalnya jaringan keamanan informasi
Kebudayaan	Pelestarian warisan budaya belum optimal
	Belum optimalnya sarana dan prasarana dalam mengimplementasikan aktivitas seni budaya
Perpustakaan	Masih rendahnya minat baca masyarakat
	Belum optimalnya pelayanan dan pengelolaan perpustakaan di Kabupaten Demak
Kearsipan	Belum optimalnya layanan dan pengelolaan kearsipan
Urusan Pemerintahan Pilihan	
Kelautan dan Perikanan	Belum optimalnya peningkatan kualitas masyarakat pesisir dalam pengelolaan potensi sumber daya ikan dan pesisir
Pariwisata	Masih minimnya promosi pariwisata daerah
	Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata
	Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif pada potensi produk unggulan daerah
Pertanian	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pertanian
	Belum optimalnya pengolahan dan nilai tambah hasil pertanian
	Belum optimalnya rantai distribusi hasil pertanian
	Belum optimalnya mekanisasi pertanian dan peningkatan SDM pertanian
	Masih kurangnya ketersediaan lahan untuk pertanian

Urusan Pemerintahan	Permasalahan
Perdagangan	Belum optimalnya pengelolaan pasar tradisional/pasar rakyat
	Belum optimalnya pengelolaan perdagangan berbasis ekspor
	Belum optimalnya sarana prasarana pengendalian harga dan barang kebutuhan pokok
Perindustrian	Belum optimalnya pengembangan sentra-sentra industri berbasis produk unggulan daerah
	Masih kurangnya produk industri kecil dan menengah yang memenuhi standardisasi, tersertifikasi dan ijin resmi
Transmigrasi	Kurangnya kuota transmigran dari pemerintah pusat
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	
Sekretariat Daerah	Belum optimalnya sinergitas kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah
	Belum optimalnya penataan organisasi dan tata kelola dalam menjawab tantangan regulasi pemerintah pusat dan tuntutan reformasi birokrasi
	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Kabupaten Demak
Sekretariat DPRD	Belum optimalnya tata kelola kesekretariatan DPRD dalam meningkatkan capaian kinerja Anggota Dewan
Perencanaan Pembangunan	Belum optimalnya integrasi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi pembangunan
Keuangan Daerah	Belum optimalnya kemandirian fiskal dalam membiayai pelaksanaan pembangunan
	Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan penganggaran, pengelolaan anggaran hingga evaluasi secara efektif dan efisien
Kepegawaian	Pengembangan karier ASN belum sepenuhnya menggunakan penilaian kinerja

Urusan Pemerintahan	Permasalahan
	Penempatan pegawai belum sesuai kompetensi dan kualifikasi ASN
	Belum optimalnya kualitas ASN, termasuk di dalamnya rasio ASN dengan kebutuhan yang belum ideal
Pendidikan dan Pelatihan	Belum optimalnya peningkatan dan pengembangan kompetensi fungsional dan manajerial ASN Kabupaten Demak
Penelitian dan Pengembangan	Belum optimalnya kualitas penelitian dan pengembangan di Kabupaten Demak
	Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan yang ada
Pengawasan	Belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Demak
	Belum optimalnya kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Unsur Kewilayahan (Kecamatan)	Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat
	Masih rendahnya kualitas lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan dan penguatan warga, khususnya kelompok rentan
	Belum optimalnya pelayanan publik, administrasi kependudukan, perijinan, hingga ketersediaan data dan informasi level kecamatan dan desa/kelurahan
	Belum optimalnya tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN di kecamatan
Kesatuan Bangsa dan Politik	Tingginya potensi penurunan kualitas pemahaman ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
	Belum optimalnya pendidikan politik yang baik di masyarakat

2.3.2.Isu Strategis

Isu-isu strategis mencakup berbagai urgensi dalam pembangunan daerah yang menjadi *early warning system* pada Tingkat global, nasional, dan regional karena relevansinya terhadap kondisi dan perihal yang sangat penting dalam pembangunan daerah, baik pada masa kini maupun masa mendatang. Oleh karena itu, penting untuk memandang isu-isu strategis sebagai panduan

utama dalam merancang program kegiatan yang menjadi prioritas dalam pembangunan jangka panjang. Hal ini bertujuan agar pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat dilakukan secara terstruktur, tepat, dan efisien. Rumusan isu strategis melibatkan identifikasi isu global, isu nasional, dan isu regional yang saling terkait dan terintegrasi. Dengan demikian, kita dapat memahami kompleksitas isu-isu tersebut dan merancang strategi yang holistik untuk menghadapinya. Dengan memahami pentingnya isu-isu strategis, kita dapat memanfaatkan peluang dan meminimalkan risiko kegagalan, sehingga mendorong kemajuan yang berkelanjutan dalam pembangunan daerah.

2.3.2.1 Isu global

Isu strategis global merupakan dinamika internasional yang memiliki pengaruh signifikan terhadap arah pembangunan nasional dan daerah. Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, isu strategis global menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan di Kabupaten Demak. Sebagai daerah yang memiliki potensi besar untuk pengembangan industri, Kabupaten Demak perlu merespons isu-isu global seperti geopolitik dan geoekonomi, dampak perubahan iklim, perkembangan teknologi Industri 5.0, dan pergeseran budaya akibat teknologi informasi. Telaah isu strategis global berikut akan menjelaskan bagaimana dinamika global tersebut dapat memengaruhi pengembangan sektor industri di Kabupaten Demak:

Gambar II.59
Isu Global/Internasional yang Berdampak ke Kabupaten Demak



Sumber: RPJMN 2025-2029

1. Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang terus berkembang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi dan iklim investasi di Kabupaten

Demak. Ketegangan politik antarnegara, konflik regional, dan perubahan kebijakan perdagangan internasional dapat berdampak langsung pada iklim investasi dan arus modal masuk ke sektor industri. Kabupaten Demak yang memiliki keunggulan geografis di jalur pantai utara Jawa (Pantura) memiliki potensi besar untuk menarik investasi industri, terutama dalam sektor pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan manufaktur. Selain itu, adanya pelabuhan di wilayah sekitar serta konektivitas jalan nasional yang melintasi Demak memberikan keunggulan dalam distribusi logistik dan akses pasar. Untuk memanfaatkan peluang ini, diperlukan kebijakan yang mendorong kemudahan investasi, penyediaan lahan industri, dan insentif bagi investor. Diversifikasi industri, termasuk pengembangan industri berbasis ekspor, juga menjadi strategi penting dalam menghadapi ketidakpastian pasar global akibat dinamika geopolitik dan geoekonomi.

2. Dampak Perubahan Iklim Global

Perubahan iklim global menjadi tantangan signifikan bagi pengembangan sektor industri di Kabupaten Demak, terutama karena wilayah ini rentan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir rob dan intrusi air laut. Kondisi ini dapat mengganggu aktivitas produksi, merusak infrastruktur industri, dan meningkatkan biaya operasional perusahaan. Oleh karena itu, adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi kebutuhan mendesak dalam pengembangan kawasan industri di Kabupaten Demak. Penerapan konsep *green industry* dengan pengurangan emisi karbon, pengelolaan limbah industri yang ramah lingkungan, dan optimalisasi penggunaan energi terbarukan menjadi strategi utama untuk meningkatkan ketahanan industri terhadap dampak perubahan iklim. Selain itu, pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan peningkatan kapasitas sistem drainase kawasan industri juga menjadi prioritas dalam menjaga keberlangsungan aktivitas produksi.

3. Perkembangan Teknologi Industri 5.0

Revolusi Industri 5.0 yang ditandai dengan integrasi kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), big data, dan otomatisasi produksi membuka peluang besar bagi pengembangan industri di Kabupaten Demak. Adopsi teknologi dalam proses produksi dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing industri lokal. Kabupaten Demak memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan berbasis teknologi. Pemanfaatan teknologi otomatisasi dalam proses pengolahan produk pertanian dan perikanan, pengembangan sistem logistik berbasis IoT, serta implementasi *smart manufacturing* di kawasan industri menjadi strategi utama dalam menghadapi era Industri 5.0. Namun, tantangan utama yang dihadapi

adalah keterbatasan infrastruktur teknologi dan rendahnya literasi digital di kalangan tenaga kerja industri. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur digital, pelatihan tenaga kerja industri berbasis teknologi, dan kerja sama dengan perguruan tinggi serta pelaku industri menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesiapan Kabupaten Demak menghadapi revolusi Industri 5.0.

4. Pergeseran Budaya akibat Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah menyebabkan perubahan pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat di Kabupaten Demak. Keterbukaan informasi dan arus globalisasi telah mendorong peningkatan permintaan terhadap produk-produk inovatif dan berbasis teknologi. Dalam konteks pengembangan sektor industri, pergeseran budaya ini membuka peluang bagi pengembangan industri kreatif dan industri berbasis teknologi di Kabupaten Demak. Pengembangan produk dengan nilai tambah tinggi, branding produk lokal berbasis digital, dan pemasaran melalui platform e-commerce menjadi strategi utama dalam meningkatkan daya saing industri lokal. Namun, di sisi lain, pengaruh budaya asing juga berpotensi menyebabkan penurunan minat terhadap produk lokal dan tergerusnya identitas budaya dalam proses produksi. Oleh karena itu, penguatan identitas lokal dalam pengembangan produk industri dan promosi produk unggulan berbasis kearifan lokal menjadi strategi penting untuk menghadapi pergeseran budaya akibat teknologi informasi.

2.3.2.2 Isu Strategis Nasional

Keselarasan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak 2025–2029 merupakan langkah krusial untuk memastikan visi, misi, dan program pembangunan daerah dapat berjalan seiring dengan kebijakan yang ada di tingkat nasional dan provinsi. Dokumen ini akan menjadi pedoman dalam menentukan prioritas pembangunan yang mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang akan dijalankan dalam tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Sebagai bagian dari upaya tersebut, telah dilakukan kajian mendalam terhadap Rancangan RPJMN 2025–2029, yang mencakup isu-isu penting, visi, misi, dan arah pembangunan. Dalam rancangan tersebut, terdapat enam isu utama yang menjadi fokus pembangunan wilayah Jawa, yang akan menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Demak.

Gambar II.60
Isu RPJMN 2025-2029 Wilayah Jawa



Sumber: RPJMN 2025-2029, diolah (2025)

1. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Perubahan struktur kelas masyarakat di wilayah Jawa, termasuk di Kabupaten Demak, dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan perubahan pola konsumsi. Peningkatan pendapatan masyarakat dan pergeseran dari sektor tradisional ke sektor industri dan jasa memunculkan kebutuhan baru dalam pengelolaan sumber daya manusia dan pemerataan ekonomi. Kabupaten Demak perlu merespons perubahan ini dengan memperkuat akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri lokal.

2. Rendahnya Produktivitas

Tingkat produktivitas yang masih rendah menjadi tantangan utama dalam pengembangan sektor industri di Kabupaten Demak. Faktor seperti kurangnya inovasi, keterbatasan teknologi, dan minimnya keterampilan tenaga kerja menjadi penyebab utama. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan teknologi industri, dan pemberian insentif bagi pelaku usaha menjadi strategi penting untuk mendorong produktivitas.

3. Resiliensi dan Prospek Perekonomian yang Positif

Ketidakpastian ekonomi global dan nasional menuntut Kabupaten Demak untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Peningkatan daya saing sektor industri, diversifikasi ekonomi, dan penguatan sektor UMKM akan menjadi

kunci dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, penguatan investasi dan kerja sama antar daerah juga menjadi faktor penting untuk memperkuat daya saing ekonomi Kabupaten Demak.

4. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel menjadi landasan penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Demak perlu meningkatkan efektivitas birokrasi, memperkuat pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan, dan mempercepat proses perizinan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Digitalisasi layanan publik juga menjadi strategi utama untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

5. Potensi Sumber Daya Manusia dan Modal Manusia

Pengembangan potensi sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam mendukung transformasi ekonomi dan pengembangan sektor industri di Kabupaten Demak. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri akan menciptakan tenaga kerja yang terampil dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui program kewirausahaan dan pengembangan UMKM akan memperkuat struktur ekonomi daerah.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Kabupaten Demak termasuk dalam wilayah prioritas pengembangan kawasan industri dan pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi dengan wilayah metropolitan Semarang (WM Semarang) dan Kawasan Pengembangan Industri Kendal-Semarang-Demak-Kudus. Kebijakan kewilayahan ini diarahkan untuk meningkatkan konektivitas, memperkuat daya saing industri, dan mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan penjabaran sebagai berikut:

Tabel II.86
Highlight Indikasi Intervensi RPJMN
terhadap Kabupaten Demak

Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
WM Semarang dan Kawasan Pengembangan Industri Kendal-Semarang-Demak-Kudus	• Pembangunan Jalan Tol Semarang–Demak • Pembangunan Jalan Tol Demak–Kudus–Pati–Rembang–Tuban • Pembangunan TPST Regional Semarang–Demak

Sumber: RPJMN 2025-2029



Sebagai bagian dari kawasan strategis industri di Jawa Tengah, Kabupaten Demak memiliki peranan penting dalam mendukung pengembangan sektor industri dan konektivitas di tingkat regional. Pembangunan infrastruktur seperti Jalan Tol Semarang–Demak dan Jalan Tol Demak–Kudus–Pati–Rembang–Tuban diharapkan dapat mempercepat arus distribusi barang dan jasa, meningkatkan daya saing industri lokal, serta menarik investasi baru di sektor manufaktur dan perdagangan. Selain itu, pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional Semarang–Demak akan memperkuat pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, menciptakan ekosistem industri yang bersih dan ramah lingkungan. Dengan pengembangan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan yang terintegrasi, Kabupaten Demak berpotensi menjadi pusat industri yang berdaya saing tinggi di wilayah Jawa Tengah, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Visi RPJMN 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" mencerminkan komitmen nasional untuk mewujudkan kemajuan Indonesia dalam rangka mencapai puncak kejayaan pada tahun 2045. Untuk mencapai visi tersebut, misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita dituangkan dalam bentuk Prioritas Nasional yang menjadi landasan utama dalam RPJMN 2025-2029. Prioritas Nasional ini berfungsi sebagai tujuan strategis dan sasaran pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029, yang mencakup berbagai sektor penting seperti pembangunan sumber daya manusia, pemerataan ekonomi, ketahanan pangan, energi berkelanjutan, dan transformasi digital. Dengan mengacu pada Prioritas Nasional tersebut, Kabupaten Demak dapat menyusun program pembangunan yang terarah, berbasis pada kebutuhan lokal namun tetap sejalan dengan tujuan besar pembangunan nasional. Dengan 8 asta cita sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat bergama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

➤ RPJMN menyebutkan terdapat 17 program prioritas sebagai berikut:

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi
5. Pemberantasan kemiskinan
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah



17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga

➤ Adapun terdapat 8 *quick wins* sebagai berikut:

1. Memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
2. menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap Kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh) TNI/Polri dan pejabat negara
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

Kabupaten Demak memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi RPJMN 2025-2029, "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045," melalui kontribusinya dalam Asta Cita, program prioritas, dan *quick wins*. Dengan potensi unggulan di sektor pertanian, perikanan, dan industri kreatif, Kabupaten Demak dapat mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan penguatan kewirausahaan lokal, sekaligus memperkuat pemerataan ekonomi dan ketahanan pangan. Pemanfaatan sektor agromaritim serta hilirisasi perikanan dapat meningkatkan produktivitas dan membuka lapangan kerja baru, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat infrastruktur desa dan penyediaan rumah murah yang bersanitasi baik. Melalui program-program prioritas dan *quick wins*, seperti penyediaan makanan bergizi sehat, pengembangan sekolah unggul, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung generasi milenial, Kabupaten Demak dapat berperan aktif dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

2.3.2.3 Isu Strategis Regional

1. RPJMD Provinsi Jawa Tengah

Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah, Kabupaten Demak memiliki posisi strategis dalam mendukung pencapaian target pembangunan di tingkat provinsi. Sebagai salah satu daerah dengan potensi industri yang besar dan didukung oleh konektivitas yang terus berkembang, Kabupaten Demak diharapkan mampu berkontribusi dalam menjawab isu-isu strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Jawa Tengah. Berikut penjabaran isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah:

1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan

Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan Kabupaten Demak. Sebagai bagian dari Kawasan Pengembangan Industri Kendal-Semarang-Demak-Kudus (KSD-K), Demak memiliki potensi besar untuk menarik investasi di sektor industri dan manufaktur. Pengembangan infrastruktur strategis seperti pembangunan Jalan Tol Semarang–Demak dan Jalan Tol Demak–Kudus–Pati–Rembang–Tuban akan mempercepat arus distribusi barang dan jasa, meningkatkan efisiensi logistik, dan memperkuat daya saing industri lokal. Selain itu, penguatan sektor pertanian dan perikanan melalui penerapan teknologi modern juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Demak.

2. Penurunan tingkat kemiskinan

Penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Demak dapat dicapai melalui pengembangan sektor ekonomi yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan konektivitas melalui pembangunan tol akan membuka peluang ekonomi baru, terutama di sektor perdagangan, jasa, dan industri. Selain itu, pengembangan UMKM dan pemberdayaan masyarakat dalam sektor pertanian dan perikanan akan menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Dengan memperkuat akses terhadap pendidikan, pelatihan kerja, dan modal usaha, masyarakat Demak diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.

3. Ketahanan pangan yang berkelanjutan

Kabupaten Demak memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan di Jawa Tengah, terutama sebagai penghasil padi, hasil laut, dan komoditas hortikultura. Modernisasi sektor pertanian melalui penerapan teknologi irigasi, pengelolaan lahan yang ramah lingkungan, dan penguatan rantai distribusi akan meningkatkan produktivitas pertanian di Demak. Selain

itu, pengembangan sistem perikanan tangkap dan budidaya yang berkelanjutan juga akan memperkuat ketahanan pangan daerah. Upaya ini akan memastikan ketersediaan bahan pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau bagi masyarakat Demak dan sekitarnya.

4. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

Peningkatan kualitas prasarana dan sarana di Kabupaten Demak menjadi fondasi utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan Jalan Tol Semarang–Demak dan Jalan Tol Demak–Kudus–Pati–Rembang–Tuban akan memperkuat konektivitas antarwilayah, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta membuka akses ke kawasan industri dan pariwisata. Di sisi lain, pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional Semarang–Demak akan menjadi solusi dalam pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, sekaligus mendukung kebersihan dan kenyamanan lingkungan di Demak.

5. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana

Kabupaten Demak menghadapi tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan menghadapi risiko bencana, terutama banjir dan rob akibat perubahan iklim dan penurunan muka tanah. Upaya mitigasi bencana melalui pembangunan tanggul laut, penguatan sistem drainase, dan rehabilitasi mangrove menjadi langkah strategis dalam melindungi wilayah pesisir dari ancaman abrasi dan banjir rob. Pengelolaan tata ruang yang berkelanjutan dan penerapan konsep pembangunan hijau juga diharapkan mampu menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mendukung ketahanan ekologi di Demak.

6. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia

Peningkatan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Demak menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang produktif dan berdaya saing. Penguatan sektor pendidikan melalui penyediaan fasilitas sekolah yang memadai, peningkatan kualitas guru, dan pengembangan pendidikan vokasi akan menciptakan tenaga kerja yang terampil dan siap bersaing di pasar kerja. Selain itu, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan penyediaan fasilitas publik yang memadai akan mendukung terciptanya masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera.

7. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat

Kabupaten Demak memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang menjadi karakter dan identitas masyarakat. Tradisi keagamaan seperti Grebeg Besar dan potensi wisata religi di Masjid Agung Demak menjadi daya tarik utama dalam

memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pelestarian seni, tradisi lokal, dan pengembangan desa wisata berbasis budaya akan memperkuat identitas masyarakat Demak, sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal. Dukungan terhadap komunitas budaya dan generasi muda dalam melestarikan tradisi juga menjadi bagian penting dalam menjaga jati diri masyarakat Demak.

8. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berintegritas

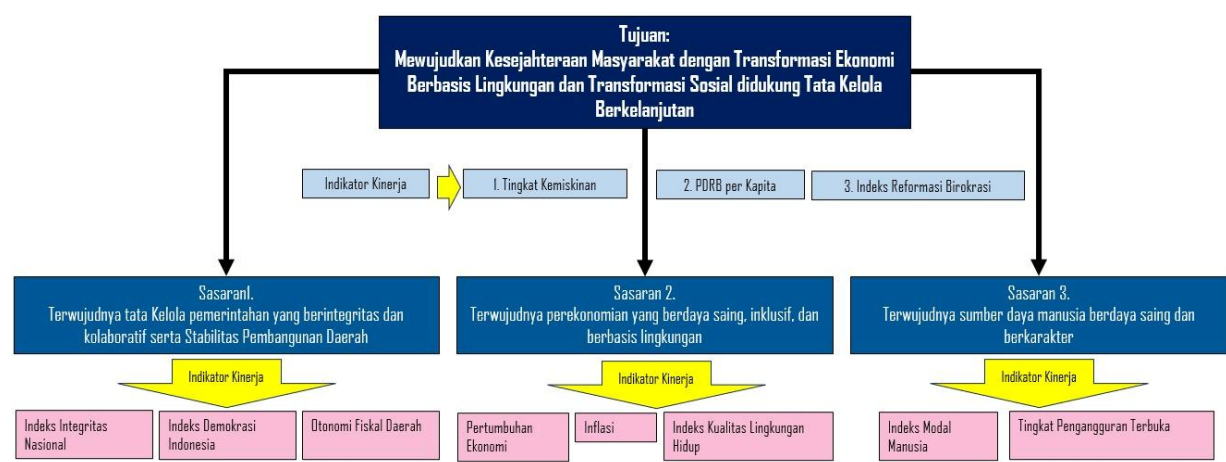
Penguatan tata kelola pemerintahan yang dinamis di Kabupaten Demak menjadi kunci dalam menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-governance) akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan kebijakan serta mempercepat pelayanan publik. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan juga perlu ditingkatkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan partisipatif. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan penguatan sistem pengawasan juga menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola yang bersih dan profesional di Kabupaten Demak.

Rencana pembangunan jangka menengah daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 atau RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan pengejawantahan dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode tahun 2025-2030 yang tertuang dalam Blue Print Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Penjabaran visi dan misi daerah berdasarkan pada filosofi cita-cita Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah untuk “NGOPENI. NGLAKONI. Dengan landasan filosofis tersebut, maka ditetapkan visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 adalah:

“JAWA TENGAH SEBAGAI PROVINSI MAJU YANG BERKELANJUTAN UNTUK MENUJU INDONESIA EMAS 2045”

Jawa Tengah maju dan berkelanjutan akan terwujud dilandasi dengan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan dinamis guna mendukung perwujudan perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan, dalam rangka mencapai kondisi sosial Masyarakat yang lebih baik ditunjukkan dengan terwujudnya sumber daya manusia Jawa Tengah berdaya saing dan berkarakter. Keberhasilan pencapaian visi pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2025- 2029 berdasarkan logframe tersebut diukur dengan indikator kinerja pembangunan daerah yaitu sebagai berikut:

Gambar II.61
Logframe Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029



Visi RPJMD Jawa Tengah 2025–2029, yaitu "Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045," menegaskan komitmen dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berfokus pada kemajuan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Adapun misi RPJMD Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas;
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan;
6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Kabupaten Demak memiliki peranan strategis dalam mendukung pencapaian visi tersebut, terutama sebagai bagian dari kawasan pengembangan industri dan pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi dengan wilayah metropolitan Semarang (WM Semarang) dan Kawasan Pengembangan Industri Kendal-Semarang-Demak-Kudus (KSD-K). Dalam aspek sosial, Demak berperan dalam menjaga ketahanan pangan melalui pengembangan sektor pertanian dan perikanan, yang berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dan ketahanan ekonomi daerah. Demak juga memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata religi dan budaya, terutama melalui keberadaan Masjid Agung Demak yang menjadi ikon sejarah dan pusat kegiatan keagamaan di Jawa Tengah. Dengan memperkuat sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang, Kabupaten Demak diharapkan mampu menjadi pilar utama dalam mewujudkan Jawa Tengah sebagai provinsi maju yang berkelanjutan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.

2. Telaah RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2045

Memahami bahwa pelaksanaan pembangunan jangka panjang dilakukan melalui pembangunan jangka menengah, maka perlu dalam penyusunan RPMJD memperhatikan poin-poin urgensi dan kebijakan yang tertuang pada dokumen RPJPD. Berikut beberapa hal dalam RPJPD yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJMD.

a. Permasalahan Pembangunan Daerah dalam dokumen RPJPD adalah sebagai berikut:

1. Masih Rendahnya Kesejahteraan Masyarakat
2. Meningkatnya Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Belum Optimalnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar
4. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan
5. Masih Rendahnya Daya Saing Sumber Daya Manusia

b. Isu Strategis Kabupaten Demak dalam dokumen RPJPD adalah sebagai berikut:

- A. Aspek Geografi dan Demografi
 1. Pemenuhan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Air
 2. Bencana Rob dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 3. Pergeseran Demografi Masyarakat
- B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 1. Kemiskinan dan Kesempatan Kerja
 2. Kemandirian Pangan menuju Hilirisasi Industri yang Berkelanjutan
 3. Kemandirian Desa sebagai Basis Pemberdayaan Masyarakat
- C. Aspek Daya Saing Daerah
 1. Peningkatan Potensi Investasi Daerah Berbasis Komoditas Unggulan Lokal
 2. Penataan Wilayah dan Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas yang Inklusif dan Berkelanjutan
 3. Penguatan Daya Saing Wisata yang Berbasis Kearifan Lokal/Budaya, Ekonomi Kreatif, dan Sektor Unggulan Daerah

4. Penciptaan dan Pemanfaatan Teknologi
5. Sumber Daya Manusia yang Berakhlak
6. Transisi Epidemiologi

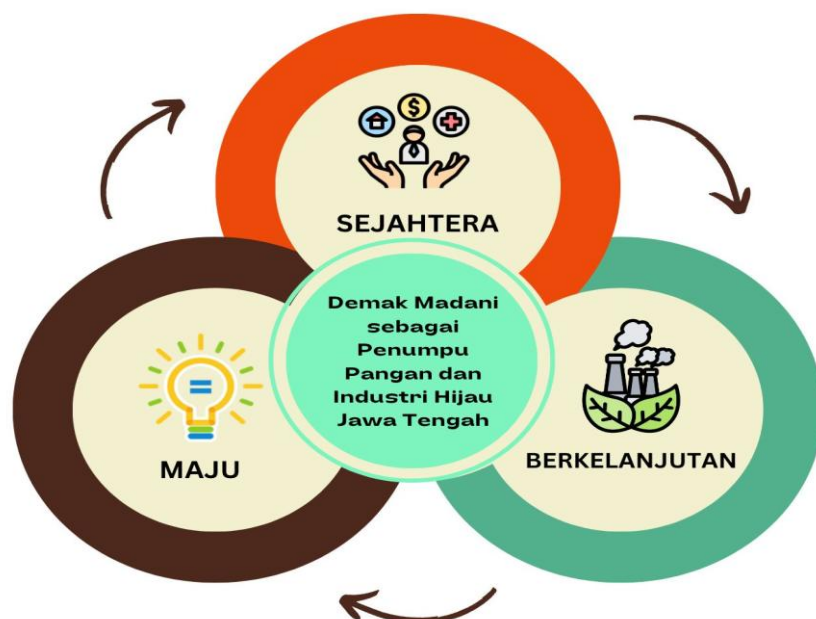
c. Visi RPJPD Kabupaten Demak

Dalam RPJPD Kabupaten Demak, visi dan misi pembangunan jangka panjang dengan menghimpun aspirasi dari masyarakat yang telah dibahas di dalam berbagai forum pembahasan dan telah disepakati, rumusan visi RPJPD Kabupaten Demak 2025-2045 adalah sebagai berikut:

“Demak Madani sebagai Penumpu Pangan dan Industri Hijau Jawa Tengah yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”

Kalimat visi yang telah dirumuskan ini menunjukkan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Demak dalam satu tema khusus yaitu Demak Madani sebagai penumpu pangan dan industri hijau Jawa Tengah dengan tiga pokok visi yaitu Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Keterkaitan antar pokok visi di atas dapat dijelaskan melalui diagram berikut ini:

Gambar II.62.
Keterkaitan Antar Pokok Visi RPJPD Kabupaten Demak
Tahun 2025-2045



Untuk dapat menjelaskan dengan lebih komprehensif, berikut adalah penjelasan atas tema khusus dan pokok visi RPJPD Kabupaten Demak,

Tema Khusus: Demak sebagai Penumpu Pangan dan Industri Hijau Jawa Tengah

Madani dapat diartikan sebagai suatu kondisi masyarakat yang cerdas, sehat dan berperadaban dengan kondisi ekonomi yang kuat berlandaskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya daerah. Pokok visi ini juga

didasarkan kepada kondisi Kabupaten Demak yang mengedepankan kemampuan lokal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada seluruh aspek kehidupan. Basis nilai ini akan tetap dipertahankan dengan membangun masyarakat yang cerdas berlandaskan nilai moral dan integritas yang kuat.

Kemudian terkait dengan tema khusus yang mendukung Demak Madani yaitu Penumpu Pangan dan Industri Hijau Jawa Tengah dapat dipahami sebagai inisiatif yang bertujuan untuk mengembangkan sektor industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, terutama dalam konteks produksi pangan. Tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan, seperti pertanian organik atau penggunaan energi terbarukan dalam proses produksi. Dalam konteks Demak Madani, Pusat Industri Hijau dan Pangan akan menjadi target utama masyarakat Demak dalam pengembangan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi produksi pangan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sehingga dapat menyokong ketahanan pangan dan industri hijau di Jawa Tengah.

1. Maju

Maju adalah kondisi di mana kondisi masyarakat Kabupaten Demak telah mencapai keunggulan dalam berbagai aspek kehidupan. Keunggulan ini mencakup seluruh aspek yang berkomplementasi dengan kondisi wilayah yang aman secara sosial dan pemerintahan yang tangguh dan andal. Dengan demikian, pokok visi ini akan diarahkan kepada pembangunan Kabupaten Demak yang modern, inovatif, dan memiliki tingkat daya saing sumber daya manusia yang tinggi, sembari tetap secara sinergis mempertahankan identitas serta nilai-nilai lokal.

2. Sejahtera

Masyarakat Demak di masa depan akan menjadi masyarakat yang sejahtera perekonomiannya ditandai dengan peningkatan pendapatan masyarakat yang diiringi dengan pemerataan dan pengurangan kemiskinan. Kesejahteraan ekonomi tersebut diwujudkan dalam perekonomian yang terus tumbuh, berdaya saing, inovatif, mandiri, dan dipastikan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak. Kesejahteraan harus dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga angka kemiskinan dapat diturunkan secara signifikan.

3. Berkelanjutan

Berkelanjutan adalah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi seimbang dengan pembangunan sosial, kelestarian lingkungan hidup dan tangguh bencana. Pada masa-masa mendatang, pembangunan di Kabupaten Demak harus mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan. Berkelanjutan dimaknai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan seimbang dengan

pembangunan sosial tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan hidup. Kabupaten Demak memiliki ancaman rob yang cukup serius di kawasan pesisir. Pembangunan berkelanjutan juga akan diarahkan pada pembangunan yang memperhatikan mitigasi bencana sehingga terwujud kondisi lingkungan dan masyarakat yang tangguh bencana.

d. Misi

Dalam rangka mencapai visi RPJPD maka perlu adanya misi sebagai upaya mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Demak yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berketahanan Sosial Budaya
2. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan
3. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Masyarakat yang Inklusif
4. Mewujudkan Transformasi Sosial yang Berkeadilan
5. Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan Berbasis Ketahanan Ekologi dan Pemerataan Pembangunan Kewilayahan

e. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan bagian pelaksanaan RPJPD pada tahap I. Sesuai yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Demak, pada tahap I pembangunan Kabupaten Demak memiliki tema pembangunan, **“Penguatan Fondasi Transformasi”** dengan beberapa arah kebijakan sebagai berikut.

- 1) Pemenuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan
- 2) Pemenuhan pembangunan daerah yang memperhatikan kualitas sosial budaya masyarakat
- 3) Kelembagaan dan regulasi tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, digitalisasi pelayanan publik
- 4) Inisiasi penerapan ekonomi hijau serta penguatan riset, inovasi, dan digitalisasi untuk mendorong peningkatan produktivitas
- 5) Pemenuhan perlindungan sosial yang adaptif
- 6) Pemenuhan infrastruktur penanggulangan rob dan bencana

Sementara itu, sasaran pokok yang akan dicapai pada RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2045 yaitu:

- 1) Terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas dan sehat
- 2) Meningkatnya aspek kebudayaan dalam pengembangan daya saing dan ketahanan sosial budaya masyarakat
- 3) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Responsif dan Adaptif
- 4) Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Daerah
- 5) Meningkatnya pendapatan masyarakat
- 6) Menurunnya Angka Kemiskinan Diiringi Pemerataan Kesejahteraan



- 7) Terwujudnya Pembangunan yang Ramah Lingkungan dan Mengarusutamakan Pembangunan Berkelanjutan
- 8) Terbangunnya Infrastruktur Dasar, Ekonomi dan Sosial yang Berkualitas
- 9) Terciptanya kondisi lingkungan dan masyarakat yang tangguh bencana

3. Telaah KLHS RPJMD Kabupaten Demak

Berdasarkan hasil analisis indikator TPB di Kabupaten Demak menunjukkan bahwa sebanyak 21 indikator atau sebesar 15% TPB dalam status (SBT), yaitu indikator TPB sudah dilaksanakan dalam RPJMD tetapi belum tercapai. Kemudian sebanyak 67 indikator atau sebesar 46% indikator berstatus (SST) yang berarti bahwa indikator TPB sudah dilaksanakan dalam RPJMD dan sudah tercapai. Sementara itu, sebanyak 37 indikator atau sebesar 25% indikator menunjukkan bahwa tidak/belum ada data terkait indikator tersebut (TAD). Indikator TPB yang belum dilaksanakan dalam RPJMD dan sudah maupun belum mencapai target nasional (TBC) sebesar 14% atau sebanyak 21 indikator. Dengan data capaian yang ada, terdapat isu strategis dan rekomendasi kebijakan yang harus diimplementasikan dalam dokumen RPJMD dengan penjabaran sebagai berikut.

- a) Isu Pemenuhan kebutuhan air minum dan air baku belum tercukupi, dengan rekomendasi peningkatan akses kepada layanan air minum dan air baku yang berkelanjutan dengan rekomendasi berupa peningkatan kapasitas pelayanan air minum layak dan berkelanjutan terhadap rumah tangga, peningkatan kapasitas air permukaan melalui pembangunan embung dan waduk sebagai sumber air baku yang didukung instalasi pengolahan air, meningkatkan infrastruktur penyediaan air minum, dan melakukan kegiatan pergiliran tanam agar air untuk kegiatan pertanian tetap tercukupi dan tidak mengganggu kebutuhan air untuk rumah tangga
- b) Isu Masih rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia, dengan rekomendasi Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan rekomendasi berupa pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar dalam pendidikan dan kesehatan, pemantapan peran dan fungsi agama sebagai landasan etika dan moral dalam pembangunan, meningkatkan rata-rata lama sekolah untuk penduduk usia > 15 tahun, sosialisasi anti kekerasan terutama pada anak dan remaja, meningkatkan pemerataan mutu pendidikan (sarana, prasarana, tenaga pendidik, kurikulum), mengembangkan pendidikan dan budaya untuk meningkatkan kesetaraan gender, meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari tindak

kekerasan, meningkatkan upaya pengendalian pernikahan dini, peningkatan pelayanan pendidikan dengan memberikan akses pendidikan yang terjangkau bagi semua kalangan disertai pembebasan biaya pendidikan bagi jenjang pendidikan dasar.

- c) Isu Masih rendahnya kualitas kesehatan Masyarakat, dengan rekomendasi meningkatkan edukasi dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kehidupan sehat dan sejahtera, meningkatkan upaya preventif munculnya pola penyakit baru dengan pendekatan baru yang inovatif, meningkatkan pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat, peningkatan kapasitas pelayanan sanitasi layak dan berkelanjutan terhadap rumah tangga, menurunkan angka kurang gizi pada balita, pengembangan sistem layanan kesehatan dan meningkatkan infrastruktur pelayanan kesehatan, menurunkan malnutrisi pada anak di bawah umur lima tahun, mencegah dan menurunkan kasus kematian akibat keracunan, meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas, sosialisasi budaya stop buang air besar sembarangan, melakukan pengadaan jamban sehat, dan penurunan jumlah desa/kelurahan dengan budaya BABS, peningkatan sosialisasi dan peningkatan fasilitas untuk cuci tangan dengan sabun dan air, peningkatan pelayanan pengelolaan lumpur tinja pada rumah tangga di Kabupaten Demak, dan Sanitasi Total Berbasis Peningkatan Masyarakat (STBM) pada desa/kelurahan.
- d) Isu Kerusakan lingkungan hidup dan risiko bencana dengan rekomendasi meningkatkan mitigasi bencana di Kabupaten Demak dengan perencanaan jalur dan lokasi evakuasi, peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dan dampak bencana dengan pemberian sosialisasi, serta upaya lainnya, melakukan penyusunan Indeks Risiko Bencana (IRB) sebagai baseline indikator dalam pengelolaan risiko bencana yang *diupdate* secara berkala, melakukan penyusunan dokumen strategi pengurangan risiko bencana sesuai karakteristik bencana yang terjadi di Kabupaten Demak, meningkatkan pengelolaan air permukaan dalam hal perlindungan, pemanfaatan, dan pemeliharaan untuk mitigasi bencana kekeringan, meningkatkan pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS, melakukan pembangunan sistem peringatan dini bencana yang terjadi di Kabupaten Demak terutama banjir serta melaksanakan pelatihan, simulasi, dan uji sistem serta prosedur peringatan dini bencana secara berkala untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bencana di Kabupaten Demak, penguatan kebijakan yang berkaitan dengan kebencanaan untuk memperkuat mitigasi bencana di Kabupaten Demak, memperketat perizinan dan mengawasi kegiatan pertambangan di

- Kabupaten Demak, memperketat pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan kebijakan tata ruang yang telah berlaku, penyusunan masterplan jangka panjang untuk penanganan banjir dan banjir rob di daerah Sayung Kabupaten Demak, meningkatkan koordinasi dan integrasi pengelolaan das antar sektor dan antar wilayah sekitar Kabupaten Demak, memperhatikan penggunaan air untuk kegiatan pertanian dan memperbaiki pola tanam yang boros air untuk mencapai daya dukung air yang optimal, dan mendukung keberadaan kawasan strategis agrikultur Jragung-Tuntangсарang-Lusi dan Juwana dan Kawasan Perkotaan Metropolitan Semarang dalam setiap dokumen perencanaan dan kebijakan terutama yang berkaitan dengan lingkungan hidup serta kebencanaan.
- e) Isu Tingkat kemiskinan yang masih tinggi, dengan rekomendasi Meningkatkan besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek, melakukan peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal di Kabupaten Demak, meningkatkan kontribusi tenaga kerja lokal pada sektor industri manufaktur di Kabupaten Demak, meningkatkan kapasitas ketahanan keluarga terutama masyarakat miskin, pengembangan penguatan Sumber Daya Manusia dalam rangka meningkatkan sektor produktivitas sentra ekonomi kemasyarakatan, mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat terkait dengan peningkatan skill, keterampilan, dan kemandirian untuk berusaha, mempermudah izin dan memfasilitasi kegiatan UMKM termasuk pembentukan UMKM baru di Kabupaten Demak, mengupayakan pembelanjaan pemerintah yang terfokus pada pengusaha lokal dan badan usaha dalam Kabupaten Demak, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petani dan nelayan dalam hal IPTEK.

Selain isu, KLHS RPJMD juga merekomendasikan kebijakan sebagai berikut

Tabel II.87
Rekomendasi Arah Kebijakan

Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rekomendasi
Pemenuhan kebutuhan air minum dan air baku belum tercukupi	Peningkatan akses kepada layanan air minum dan air baku yang berkelanjutan	• Peningkatan kapasitas pelayanan air minum layak dan berkelanjutan terhadap rumah tangga • Peningkatan kapasitas air permukaan melalui Pembangunan embung dan waduk sebagai sumber air baku yang didukungInstalasi Pengolah Air • Meningkatkan infrastruktur penyediaan air minum • Melakukan kegiatan pergiliran tanam agar air untuk kegiatan pertanian tetap tercukupi dan tidak

Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rekomendasi
		mengganggu kebutuhan air untuk rumah tangga
Masih Rendahnya Daya Saing dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)	• Pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar dalam pendidikan dan kesehatan • Pemantapan peran dan fungsi agama sebagai landasan etika dan moral dalam pembangunan • Meningkatkan rata-rata lama sekolah untuk penduduk usia > 15 tahun • Sosialisasi anti kekerasan terutama pada anak dan remaja • Meningkatkan pemerataan mutu pendidikan (sarana, prasarana, tenaga pendidik, kurikulum) • Mengembangkan Pendidikan dan budaya untuk meningkatkan kesetaraan gender • Meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan • Meningkatkan upaya pengendalian pernikahan dini • Peningkatan pelayanan pendidikan dengan memberikan akses pendidikan yang terjangkau bagi semua kalangan disertai pembebasan biaya pendidikan bagi jenjang pendidikan dasar
Masih Rendahnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Demak	• Meningkatkan edukasi dan partisipasi Masyarakat untuk mewujudkan kehidupan sehat dan Sejahtera • Meningkatkan upaya preventif munculnya pola penyakit baru dengan pendekatan baru yang inovatif • Meningkatkan pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat • Peningkatan kapasitas pelayanan sanitasi layak danberkelanjutan terhadap rumah tangga • Menurunkan angka kurang gizi pada balita • Pengembangan sistem layanan kesehatan dan meningkatkan infrastruktur pelayanan kesehatan • Menurunkan malnutrisi pada anak di bawah umur lima tahun • Mencegah dan menurunkan kasus kematian akibat keracunan • Meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas • Sosialisasi budaya stop buang air besar sembarangan, melakukan pengadaan jamban sehat, dan penurunan jumlah desa/kelurahan dengan budaya BABS • Peningkatan sosialisasi dan peningkatan fasilitas untuk cuci tangan dengan sabun dan air • Peningkatan pelayanan pengelolaan lumpur tinja pada rumah tangga di Kabupaten Demak

Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rekomendasi
		Sanitasi Total Berbasis Peningkatan Masyarakat (STBM) padadesa/kelurahan
Kerusakan lingkungan hidup dan risiko bencana	Pengurangan risiko bencana dan kerusakan lingkungan hidup	- Meningkatkan mitigasi bencana di Kabupaten Demak dengan perencanaan jalur dan lokasi evakuasi, peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dan dampak bencana dengan pemberian sosialisasi, serta upaya lainnya. - Melakukan penyusunan Indeks Risiko Bencana (IRB) sebagai baseline indikator dalam pengelolaan risiko bencana yang diupdate secara berkala - Melakukan penyusunan dokumen strategi pengurangan risiko bencana sesuai karakteristik bencana yang terjadi di Kabupaten Demak - Meningkatkan pengelolaan air permukaan dalam hal perlindungan, pemanfaatan, dan pemeliharaan untuk mitigasi bencana kekeringan - Meningkatkan pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS - Melakukan pembangunan sistem peringatan dini bencana yang terjadi di Kabupaten Demak terutama banjir serta melaksanakan pelatihan, simulasi, dan uji sistem serta prosedur peringatan dini bencana secara berkala untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bencana di Kabupaten Demak. - Penguatan kebijakan yang berkaitan dengan kebencanaan untuk memperkuat mitigasi bencana di Kabupaten Demak. - Memperketat perizinan dan mengawasi kegiatan pertambangan di Kabupaten Demak - Memperketat pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan kebijakan tata ruang yang telah berlaku - Penyusunan masterplan jangka panjang untuk penanganan banjir dan banjir rob di daerah Sayung Kabupaten Demak - Meningkatkan koordinasi dan integrasi pengelolaan DAS antar sektor dan antar wilayah sekitar Kabupaten Demak - Memperhatikan penggunaan air untuk kegiatan pertanian dan memperbaiki pola tanam yang boros air untuk mencapai daya dukung air yang optimal - Mendukung keberadaan Kawasan Strategis Agrikultur Jragung-TuntangSarang-Lusi dan Juwana dan Kawasan Perkotaan Metropolitan Semarang dalam setiap dokumen perencanaan dan kebijakan terutama yang berkaitan dengan lingkungan hidup serta kebencanaan
Tingkat Kemiskinan yang Masih Tinggi	Penurunan angka kemiskinan menjadi 5%	- Meningkatkan besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek - Melakukan peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal di Kabupaten Demak - Meningkatkan kontribusi tenaga kerja lokal pada sektor industri manufaktur di Kabupaten Demak

Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rekomendasi
		• Meningkatkan kapasitas ketahanan keluarga terutama masyarakat miskin • Pengembangan penguatan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan sektor produktifitas sentra ekonomi kemasyarakatan • Mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat terkait dengan peningkatan skill , keterampilan, dan kemandirian untuk berusaha. • Mempermudah izin dan memfasilitasi kegiatan UMKM termasuk pembentukan UMKM baru di Kabupaten Demak • Mengupayakan pembelanjaan pemerintah yang tefokus pada pengusaha lokal dan badan usaha dalam Kabupaten Demak • Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petani dan nelayan dalam hal IPTEK

Sumber : Dokumen KLHS

4. Telaah RTRW Kabupaten Demak

Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Kabupaten Demak tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak RTRW Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak tahun 2011-2031, maka, tujuan RTRW Kabupaten Demak adalah:

“Mewujudkan ruang wilayah Daerah berbasis sektor pertanian dan industri yang unggul didukung sektor perdagangan jasa dan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan”

Apabila merujuk pada tujuan RTRW Kabupaten Demak dalam Perda No. 6 tahun 2011 fokus utama pengembangan wilayah Kabupaten Demak tertuju pada sektor Pertanian dan Sektor Perikanan yang didukung oleh Perdagangan dan Jasa dan Industri. Namun, mengacu pada Perda Nomor 1 tahun 2020, maka tujuan pengembangan wilayah difokuskan pada sektor pertanian dan sektor industri sebagai komponen mendasar yang didukung oleh sektor perdagangan, jasa dan pariwisata.

Tabel II.88
Perbandingan Antara Tujuan RTRW

	PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RANCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031	PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031
TUJUAN PENATAAN RUANG	Mewujudkan ruang wilayah daerah berbasis sektor pertanian dan perikanan yang unggul didukung sektor perdagangan dan jasa, industri, usaha mikro kecil menengah, dan pariwisata	Mewujudkan ruang wilayah daerah berbasis sektor pertanian dan industri yang unggul didukung sektor perdagangan, jasa dan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan



Dari kerangka di atas, dapat dipahami bahwa fokus penataan ruang hingga tahun 2031 mendatang adalah pengembangan wilayah yang terfokus pada sektor pertanian dan juga sektor industri. Hal ini tentunya menjadi pertimbangan penting bagi penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Demak tahun 2025-2029 di mana aspek penataan ruang perlu menjadi bagian integral agar sektor kewilayahan dapat menjadi pengungkit arah pembangunan Kabupaten Demak.

Dalam hal penelaahan terhadap RTRW, terdapat tiga aspek mendasar yang perlu digarispawahi, yaitu struktur tata ruang, pola ruang dan kawasan strategis. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Kawasan strategis terdiri atas kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala provinsi. Dan Kawasan strategis daerah adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala daerah.

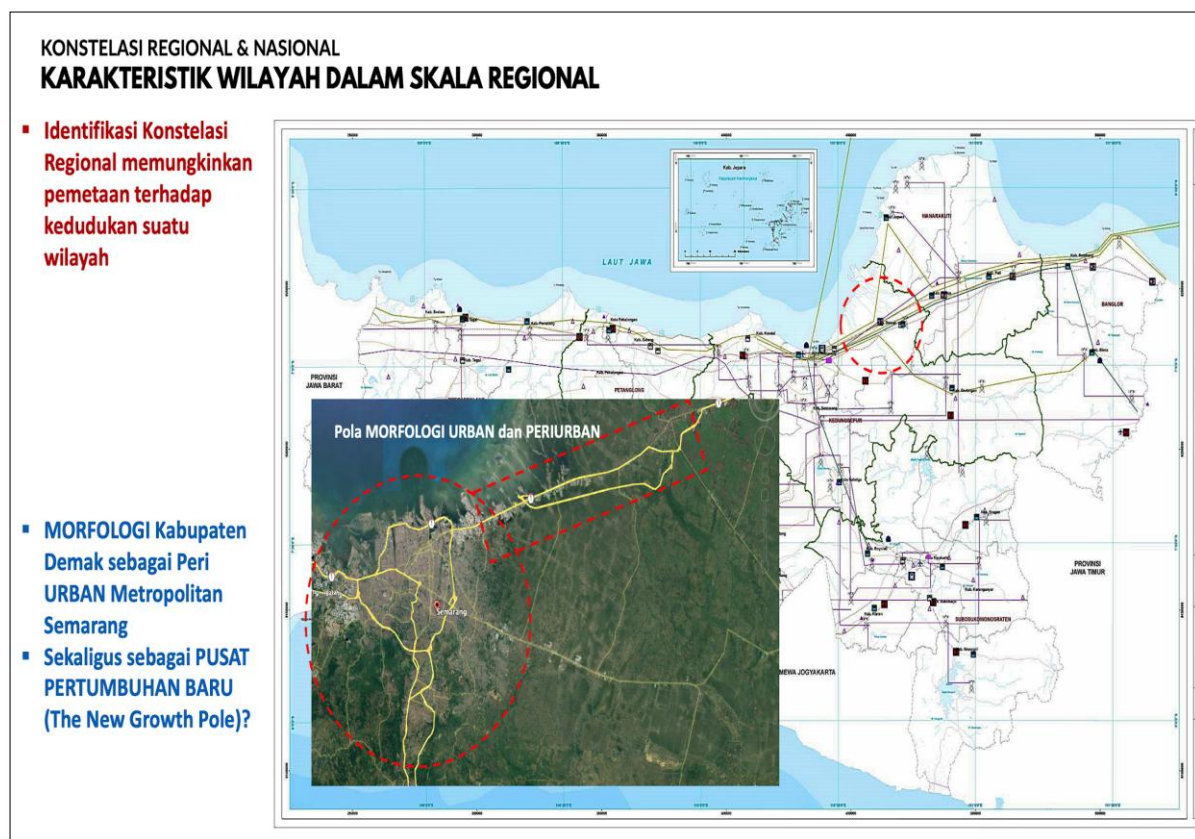
Secara struktur ruang, Kabupaten Demak digambarkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang berada dalam aglomerasi Regional Kedungsepur. Adapun hierarki struktur ruang Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

1. PKN merupakan bagian dari kawasan perkotaan Kendal – Demak – Ungaran – Salatiga – Semarang – Purwodadi (Kedungsepur) berada di Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Demak dan Kecamatan Mranggen.

Kabupaten Demak berada pada koridor yang menghubungkan langsung dengan Kota Semarang di wilayah bagian barat. Meskipun dari sisi perkembangan perkotaan, Kabupaten Demak lebih condong sebagai periurban, namun potensi kesinambungan secara morfologis

memungkinkan adanya potensi interaksi aktivitas antar kedua wilayah tersebut.

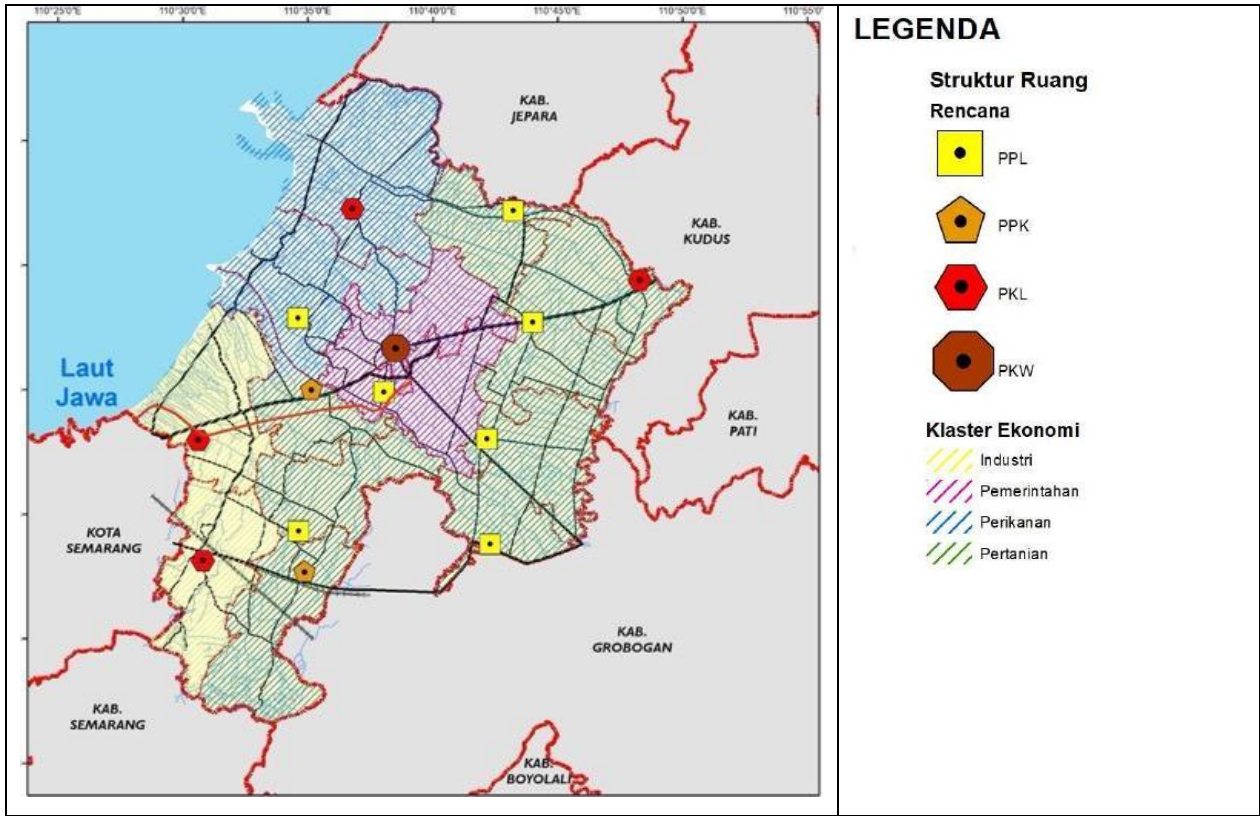
Gambar II.63
Konstelasi/Kedudukan Kabupaten Demak sebagai PKN



2. PKL meliputi:
 - a) Kawasan Perkotaan Demak; dan
 - b) Kawasan Perkotaan Mranggen.
3. PPK, meliputi:
 - a) Kawasan Perkotaan Gajah;
 - b) Kawasan Perkotaan Dempet;
 - c) Kawasan Perkotaan Guntur;
 - d) Kawasan Perkotaan Sayung;
 - e) Kawasan Perkotaan Karangtengah;
 - f) Kawasan Perkotaan Bonang;
 - g) Kawasan Perkotaan Wedung;
 - h) Kawasan Perkotaan Karangawen;
 - i) Kawasan Perkotaan Wonosalam;
 - j) Kawasan Perkotaan Karanganyar;
 - k) Kawasan Perkotaan Mijen; dan
 - l) Kawasan Perkotaan Kebonagung.

Gambar II.64

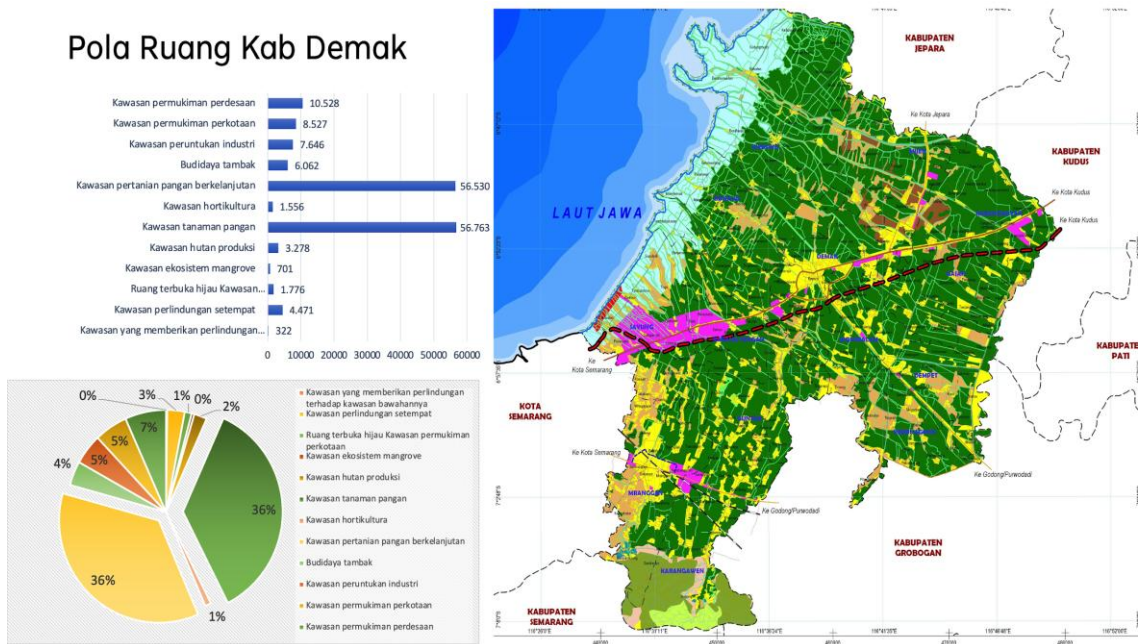
Ilustrasi Struktur Ruang Kabupaten Demak



Selanjutnya, dari sisi Pola Ruang yang merupakan wadah bagi terselenggaranya tujuan pengembangan wilayah dan implementasi dari struktur ruang wilayah. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Gambar II.65

Alokasi Pola Ruang di Kabupaten Demak

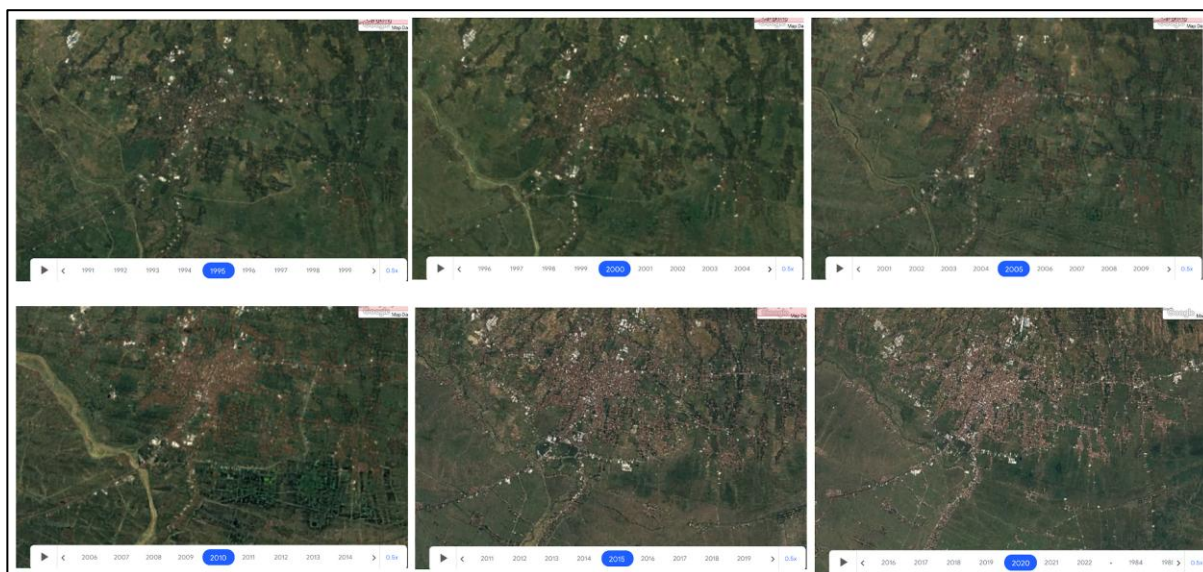


Pola Ruang Kabupaten Demak pada dasarnya didominasi oleh Kawasan Pertanian Pangan berkelanjutan atau sekitar 36 persen dari okupansi pola

ruang di Kabupaten Demak. Selanjutnya, alokasi pola ruang terbesar pada kawasan tanaman pangan dengan persentase yang hampir sama (36 persen).

Pola Ruang Kabupaten Demak selanjutnya tersusun atas alokasi pola ruang permukiman perdesaan (7 persen) dan perkotaan. (5 persen). Hal ini juga turut menandai adanya fenomena *urban sprawl* (pertumbuhan kota yang tidak terpadu, tersebar tidak merata) di Kabupaten Demak sehingga berpengaruh terhadap efisiensi sarana dan prasarana.

Gambar II.66
Fenomena *Urban Sprawl* di Kabupaten Demak

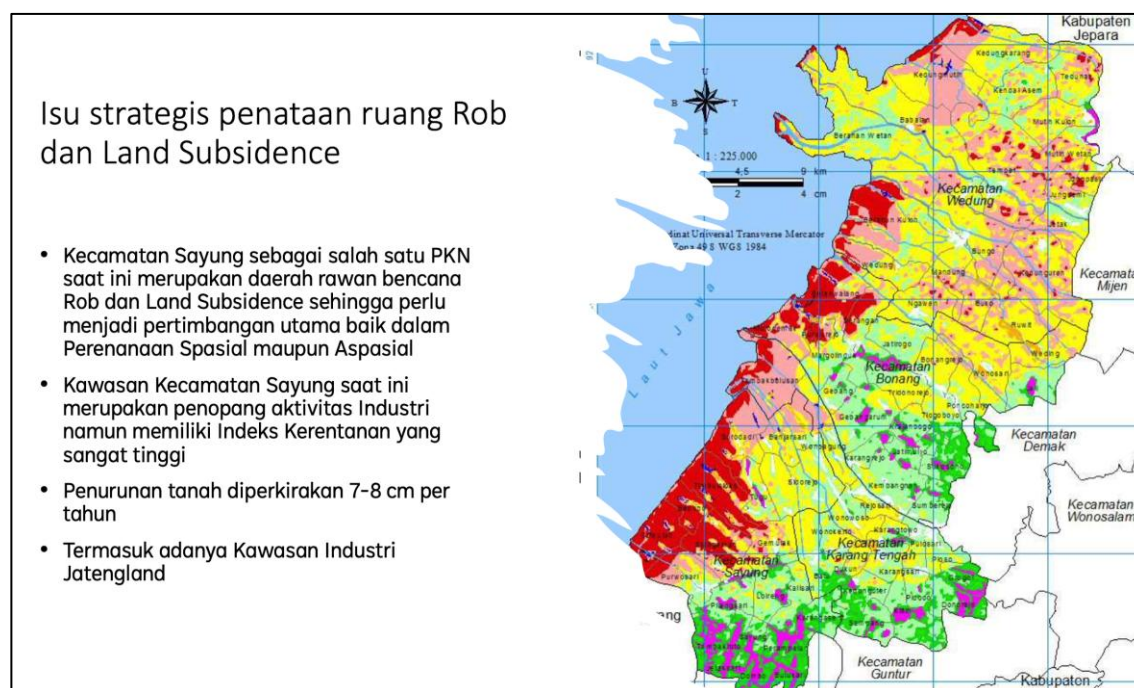


Lebih lanjut, Kabupaten Demak juga merupakan rumah bagi sektor industri di Jawa Tengah. Secara peruntukan ruang terdapat 7.646 kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan industri di Kabupaten Demak. Selain itu saat ini juga terdapat Kawasan Industri Sayung (PT. Jatengland) dengan luas mencapai 300 Ha.

Isu penting dari sisi penataan ruang Kabupaten Demak adalah kondisi geografis Kabupaten Demak yang merupakan salah satu wilayah pesisir yang terletak di utara Jawa. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang dan berada pada koridor ekonomi Pulau Jawa menyebabkan perkembangan wilayah ini sangat cepat. Penambahan lahan terbangun ini memberikan beban tambahan pada tanah, padahal kondisi tanah pada wilayah ini adalah tanah yang masih muda. Tanah seperti ini masih belum terkonsolidasi dengan baik sehingga penambahan beban di atasnya menyebabkan terjadinya pemampatan. Selain itu, keberadaan kawasan permukiman dan industri juga menyebabkan meningkatnya aktivitas pemompaan air tanah, terutama pada kawasan industri dikarenakan kebutuhan airnya yang cukup banyak. Adanya beban di atas tanah dan rongga tanah akibat pengambilan air tanah kemudian memicu terjadinya fenomena penurunan muka tanah. Penurunan tanah di wilayah pesisir ini menyebabkan

meningkatnya tinggi genangan akibat banjir pasang. Peningkatan permukaan air laut di Kabupaten Demak hingga tahun 2010 mencapai rata-rata 3,2 mm per tahunnya sejak 1993. Kenaikan permukaan air laut menyebabkan tergenangnya lahan basah dan lahan rendah, erosi pantai, intrusi air tanah sehingga menimbulkan genangan banjir rob yang telah menyebabkan dampak negatif yang besar karena menghambat aktivitas ekonomi yang ada di Kabupaten Demak.

Gambar II.67
Isu Terkait Bencana Rob dan *Land Subsidence*



Oleh karenanya, dalam konteks integrasi antara rencana tata ruang wilayah dan RPJMD, Isu bencana pesisir perlu diangkat, sehingga tercermin dalam salah satu misi ataupun program prioritas (sehingga dapat mengungkit efek lainnya). Isu strategis mengenai infrastruktur *mitigative* atas permasalahan yang terjadi di Kabupaten Demak perlu menjadi program utama dengan skema pembiayaan APBN karena lintas wilayah. Pada saat tanggul terbangun maka dapat memicu aktivitas industri, industri kelautan, dan kawasan terbangun lainnya. Diharapkan bahwa pengembangan di Kabupaten Demak juga mengedepankan *Infill Development*: membangun pada daerah yang aman dan tidak menggusur (terutama perumahan) dalam konteks pesisir.

Selain hal di atas, hasil kajian sektoral sebelumnya menunjukkan bahwa *Urban Sprawl* kota Demak sudah mencapai 7 km, perlu kota satelit pendukung dengan tematik masing-masing misalnya kota pendidikan di sisi barat Sport Center, dan kota jasa dan logistik di selatan mendekati terminal. Lahan tersisa di dalam radius <5 km dari inti kota terbatas, sebaiknya untuk alokasi perumahan skala menengah dan besar, sehingga kota tetap harmoni dan menyumbang pendapatan yang tinggi. Dengan adanya *exit tol* di radius 3 km,

akan semakin mempercepat naiknya kebutuhan pembangunan perumahan di Kota Demak.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan dokumen perencanaan yang mengatur penggunaan ruang di suatu wilayah untuk kurun waktu tertentu. RTRW menjadi dasar bagi pengembangan wilayah dan penataan ruang yang berkelanjutan. Dalam dokumen RTRW juga merumuskan program yang sudah dijabarkan di masing-masing periode. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Demak adalah mewujudkan ruang wilayah daerah berbasis sektor pertanian dan industri yang unggul didukung sektor perdagangan jasa dan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam mendukung tujuan penataan ruang wilayah dirumuskan matriks indikasi program utama Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

Tabel II.89
Indikasi Program RTRW PJM ke 4 Tahun 2026-2031

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
C	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG			
I	Perwujudan Pusat Kegiatan			
	a. Perwujudan sistem perkotaan dilakukan melalui program :			
	1. Program Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional			
	2. Program Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal			
	- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan	- Kawasan Perkotaan Demak - Kawasan Perkotaan Mranggen - Kawasan Perkotaan Wedung	APBD	Dinas PUTARU
	- Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan		APBD	- Bappeda Litbang - Dinas PUTARU
	- Penyusunan peraturan zonasi	- Kawasan Perkotaan Demak - Kawasan Perkotaan Mranggen - Kawasan Perkotaan Wedung	APBD	Dinas PUTARU
	- Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	- Kawasan Perkotaan Demak - Kawasan Perkotaan Mranggen - Kawasan Perkotaan Wedung	APBD	Dinas PUTARU
	- Pengendalian kegiatan komersial/ perdagangan, mencakup pertokoan, pusat belanja, dan sejenisnya	- Kawasan Perkotaan Demak - Kawasan Perkotaan Mranggen - Kawasan Perkotaan Wedung	APBD	Dinas PUTARU
	3. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan			
	- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan	- IKK Gajah - IKK Dempet - IKK Guntur - IKK Sayung - IKK Karangtengah - IKK Bonang - IKK Dempet - IKK Gajah - IKK Karanganyar - IKK Mijen - IKK Kebonagung	APBD	- Bappeda Litbang - Dinas PUTARU
	- Penyusunan peraturan zonasi	- IKK Gajah - IKK Dempet - IKK Guntur - IKK Sayung - IKK Karangtengah - IKK Bonang - IKK Dempet	APBD	- Bappeda Litbang - Dinas PUTARU

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
		- IKK Gajah - IKK Karanganyar - IKK Mijen - IKK Kebonagung		
	- Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	- IKK Gajah - IKK Dempet - IKK Guntur - IKK Sayung - IKK Karangtengah - IKK Bonang - IKK Dempet - IKK Gajah - IKK Karanganyar - IKK Mijen - IKK Kebonagung	APBD	- Bappeda Litbang - Dinas PUTARU
	- Pengendalian kegiatan komersial/perdagangan, mencakup pertokoan dan pusat belanja	- IKK Gajah - IKK Dempet - IKK Guntur - IKK Sayung - IKK Karangtengah - IKK Bonang - IKK Dempet - IKK Gajah - IKK Karanganyar - IKK Mijen - IKK Kebonagung	APBD	- Bappeda Litbang - Dinas PUTARU
	b. Perwujudan sistem perdesaan dilakukan melalui program: 1. Penyusunan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan Pengembangan pusat pelayanan perdesaan	Seluruh Kabupaten	APBD	- Bappeda Litbang - Dinas PUTARU
II	Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi			
2.1	Sistem Jaringan Transportasi Jalan			
	a. Program pengembangan sistem prasarana jalan			
	3. Peningkatan jalan kabupaten	Seluruh Kabupaten	APBD	Dinas PUTARU
	4. Pengembangan dan peningkatan jalan lingkungan di seluruh wilayah Kabupaten	Seluruh Kabupaten	APBD	Dinas PUTARU
	5. Pengembangan ruang terbuka hijau jalur dan pulau jalan	Seluruh Kabupaten	APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	b. Pengembangan prasarana angkutan umum:			
	3. Peningkatan terminal tipe C	- Kawasan Perkotaan Mranggen - Kawasan Perkotaan Wedung - Ibukota Kecamatan Wonosalam - Ibukota Kecamatan Gajah - Ibukota Kecamatan Karanganyar - Ibukota Kecamatan Mijen - Ibukota Kecamatan Bonang - Ibukota Kecamatan Sayung - Ibukota Kecamatan Karangtengah - Ibukota Kecamatan Guntur - Ibukota Kecamatan Dempet - Ibukota Kecamatan Karangawen - Ibukota Kecamatan Kebonagung	APBD	Dinas Perhubungan
	4. Pengembangan terminal angkutan barang	Kecamatan Sayung	APBD	Dinas Perhubungan
	c. Pengembangan sarana angkutan umum			
	1. Studi kelayakan sistem angkutan		APBD	Dinas Perhubungan
	2. Penyediaan pemberhentian untuk angkutan umum bus maupun non-bus yang memadai		APBD	Dinas Perhubungan
	3. Penataan ulang dan pengembangan fungsi terminal serta fungsi pelayanan terminal		APBD	Dinas Perhubungan

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
2.2	Sistem Jaringan Transportasi Kereta Api			
	1. Peningkatan jalur perlintasan kereta api	▪ jalur kereta api cepat Jakarta – Surabaya; ▪ jalur Utara menghubungkan Jakarta – Semarang – Surabaya; ▪ pengembangan kereta api regional Semarang – Kudus ▪ Pati – Juwana – Rembang ▪ Lasem – Jatirogo – Bojonegoro; dan pengembangan jaringan kereta api perkotaan Kedungsepur ▪ Jalur Khusus	APBN Swasta	- Kementerian Perhubungan - Swasta
2.3	Sistem Jaringan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan			
	- Pembangunan dan peningkatan dermaga	▪ Kecamatan Sayung ▪ Kecamatan Karangtengah ▪ Kecamatan Bonang	APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Perhubungan - Dinas pariwisata - Dinas Kelautan dan Perikanan
2.4	Jaringan Transportasi Laut			
	- Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kecamatan Bonang	APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Perhubungan - Dinas Kelautan dan Perikanan
	- Peningkatan Pelabuhan Perikanan	▪ Kecamatan Sayung ▪ Kecamatan Karangtengah ▪ Kecamatan Wedung	APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Kelautan dan Perikanan
	- Pembangunan prasarana listrik yang bersumber dari energi alternatif	Seluruh Kabupaten	APBN APBD	- Kementerian ESDM - Dinas PUTARU
	- Pengaturan pembangunan SPBU dan SPBE	Seluruh Kabupaten	APBD	- Dinas PUTARU
V	Perwujudan Sistem Sumber Daya Air			
	- Peningkatan pengelolaan DAS	DAS Jratun Seluna		
	- Normalisasi sungai dan saluran irigasi	Seluruh sungai dan 15 D.I	APBN APBD Prov APBD	- Kementerian PUPR - Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah - Dinas PUTARU
	- Pembangunan dan perbaikan operasional prasarana jaringan irigasi	15 D.I	APBN APBD Prov APBD	- Kementerian PUPR - Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah - Dinas PUTARU
	- Pembangunan embung	▪ Kecamatan Karangawen ▪ Kecamatan Guntur ▪ Kecamatan Dempet ▪ Kecamatan Mijen ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Bonang ▪ Kecamatan Wedung	APBN APBD Prov APBD	- Kementerian PUPR - Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah - Dinas PUTARU
	- Pelestarian sumber mata air dan konservasi daerah resapan air	Seluruh Kabupaten	APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	- Pengawasan dan penertiban sumber air yang berasal dari sumber air tanah dalam	▪ Kecamatan Sayung ▪ Kecamatan Karangtengah ▪ Kecamatan Demak ▪ Kecamatan Bonang ▪ Kecamatan Wedung	APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	- Penetapan kawasan imbuhan air tanah untuk menjadi kawasan lindung	Seluruh Kabupaten	APBD	- Dinas Lingkungan Hidup
	- Penyusunan daya tampung sungai dan air permukaan	Seluruh Kabupaten	APBD	- Dinas Lingkungan Hidup
	- Monitoring dan pengawasan terhadap buangan limbah industri dan rumah tangga untuk memastikan daya tampung sungai dalam status baik	Seluruh Kabupaten	APBD	- Dinas Lingkungan Hidup
VI	Perwujudan Sistem Prasarana Lainnya			
	a. Sistem Persampahan			
	- Peningkatan dan pengembangan TPA	Seluruh Kabupaten	APBN APBD	- Kementerian PUPR - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	- Peningkatan dan pengembangan TPS dan/atau	Seluruh Kabupaten	APBD	- Dinas PUTARU

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
	TPST			- Dinas Lingkungan Hidup
	- Program pengelolaan sampah 3R	Seluruh Kabupaten	APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	- Penyediaan tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan non-organik di kawasan perkotaan	Seluruh Kawasan Perkotaan	APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	- Studi kelayakan manajemen pengelolaan sampah terpadu	Seluruh Kabupaten	APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	- Usaha reduksi melalui pengomposan, daur ulang dan pemilahan antara sampah organik dan non-organik	Seluruh Kabupaten	APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	- Kajian teknologi pemanfaatan energi dari sampah TPA	Seluruh Kabupaten	APBD	- - Dinas Lingkungan Hidup
	- Pembangunan instalasi energi dari sampah di tingkat TPA	Seluruh Kabupaten	APBD	- - Dinas Lingkungan Hidup
	b. Sistem Jaringan Air Minum			
	- Penambahan kapasitas dan revitalisasi sambungan rumah (SR)	Seluruh Kabupaten	APBD	- Dinas PUTARU - PDAM
	- Pengembangan jaringan distribusi utama;	Seluruh Kabupaten	APBD	- Dinas PUTARU - PDAM
	- Penambahan kapasitas dan revitalisasi jaringan perdesaan di seluruh kecamatan	Seluruh Kabupaten	APBD	- Dinas PUTARU - PDAM
	- Pembangunan reservoir	Seluruh Kawasan Perkotaan	APBD	- Dinas PUTARU - PDAM
	c. Sistem Jaringan Air Limbah			
	- Pembangunan instalasi pengolahan limbah pada kawasan industri	▪ Kecamatan Sayung ▪ Kecamatan Karangtengah ▪ Kecamatan Mijen ▪ Kecamatan Mranggen ▪ Kecamatan Karangawen ▪ Ibukota Kecamatan Gajah ▪ Ibukota Kecamatan Karanganyar ▪ Ibukota Kecamatan Mijen ▪ Ibukota Kecamatan Bonang ▪ Ibukota Kecamatan Sayung ▪ Ibukota Kecamatan Karangtengah ▪ Ibukota Kecamatan Guntur ▪ Ibukota Kecamatan Dempet ▪ Ibukota Kecamatan Karangawen ▪ Ibukota Kecamatan Kebonagung	APBD Swasta	- - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - Swasta
	- Pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja berbasis masyarakat (sanitas) dan rumah tangga perkotaan	Seluruh Kawasan IKK	APBN APBD Provinsi APBD	- Kementerian PUPR - Dinas PUSDATARU Prov. Jawa Tengah - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	- Pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan	Seluruh Kabupaten	APBN APBD Provinsi APBD	- Kementerian PUPR - Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	d. Sistem Jaringan Drainase			
	- Penyusunan masterplan drainase	Seluruh Kabupaten	APBD	Dinas PUTARU
	- Pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan	Seluruh Kabupaten	APBD	Dinas PUTARU
	- Normalisasi peningkatan saluran primer dan sekunder	Seluruh Kabupaten	APBD	Dinas PUTARU
	- Normalisasi saluran sungai	Seluruh Kabupaten	APBN APBD Provinsi APBD	- Kementerian PUPR - Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah - Dinas PUTARU
	- Memantapkan rencana pengembangan dan pengelolaan saluran drainase	Seluruh Kawasan Perkotaan	APBD	- Dinas PUTARU

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
	di seluruh kawasan perkotaan			
	e. Sistem Evakuasi Bencana			
	- Pengembangan jalur evakuasi bencana	▪ Kecamatan Mranggen ▪ Kecamatan Guntur ▪ Kecamatan Sayung ▪ Kecamatan Karangtengah ▪ Kecamatan Bonang ▪ Kecamatan Wedung ▪ Kecamatan Demak ▪ Kecamatan Wonosalam ▪ Kecamatan Karangawen ▪ Kecamatan Karanganyar	APBD	- Dinas PUTARU - BPBD
	- Pengembangan ruang evakuasi bencana		APBD	- Dinas PUTARU - BPBD
D	PERWUJUDAN POLA RUANG			
I	Perwujudan Kawasan Lindung			
	a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	▪ Kecamatan Karangawen ▪ Kecamatan Mranggen		
	- Pengendalian kegiatan atau hal-hal yang bersifat menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	- Pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan lahan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang dimiliki masyarakat		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	- Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	b. Kawasan perlindungan setempat	Seluruh kecamatan yang berada di kawasan perlindungan setempat		
	1. Arahan perlindungan sempadan sungai dan saluran dilakukan melalui program			
	- Penetapan sempadan sungai dan irigasi di kawasan perkotaan dan perdesaan		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	- Penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai dan irigasi		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	- Penertiban bangunan diatas saluran irigasi		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - Satpol PP
	- Penghijauan		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	2. Arahan perlindungan sempadan pantai dilakukan melalui program	▪ Kecamatan Sayung ▪ Kecamatan Karangtengah ▪ Kecamatan Bonang ▪ Kecamatan Wedung	APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Kelautan dan Perikanan
	- Penetapan batas sempadan pantai		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Kelautan dan Perikanan
	- Pengelolaan kawasan tanah timbul		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Kelautan dan Perikanan
	- Penetapan batas kawasan pasang surut		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Kelautan dan Perikanan
	- Penghijauan		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	3. Arahan perlindungan sempadan embung			
	- Penetapan batas sempadan embung		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	- Penertiban pemanfaatan ruang di sekitar embung		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	- Pengelolaan embung		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	4. Arahan perlindungan		APBD	- Dinas PUTARU

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
	terhadap ruang terbuka hijau			- Dinas Lingkungan Hidup
	- Penetapan ruang terbuka hijau		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	- Pengelolaan ruang terbuka hijau		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	- Penertiban bangunan di sekitar ruang terbuka hijau		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	c. Perwujudan RTH			
	- Pengembangan taman lingkungan		APBD	- Dinas PUTARU
	- Pengembangan jalur hijau jalan dan pulau jalan		APBD	- Dinas PUTARU
	- Pengembangan ruang terbuka hijau pengaman lingkungan		APBN APBD Provinsi APBD	- Kementerian PUPR - Dinas Perkim Prov. Jawa tengah - Dinas PUTARU - Dinas Perkim
	- Penghijauan makam		APBD	Dinas PUTARU
	- Pengembangan sabuk hijau untuk memisahkan antar kawasan yang rawan konflik fungsi		APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	d. Kawasan Ekosistem Mangrove			
	Arahan perlindungan kawasan ekosistem mangrove dilakukan melalui program :			
	- Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya		APBD	- Dinas Lingkungan Hidup - Dinas kelautan & Perikanan
	- Percepatan reboisasi kawasan cagar alam yang telah rusak		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas kelautan & Perikanan
	- Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas kelautan & Perikanan
	e. Kawasan Cagar Budaya			
	Arahan perlindungan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilakukan melalui program	- Masjid Agung Demak - Makam Sunan Kalijaga Kadilangu - Cagar budaya lainnya yang ditetapkan Bupati		
	- Pelestarian bangunan cagar budaya		APBD	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Pariwisata
	- Penetapan kawasan inti dan kawasan penyangga		APBD	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Pariwisata
	f. Kawasan Bencana Alam			
	1. Arahan perlindungan kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi dilakukan melalui program			
	- Pembangunan tanggul penahan abrasi	- Kecamatan Sayung - Kecamatan Karangtengah - Kecamatan Bonang - Kecamatan Wedung	APBN APBD Provinsi APBD	- Kementerian PUPR - Dinas PUSDATARU Prov. Jawa Tengah - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - BPBD
	- Penghijauan tepi pantai		APBD	- Dinas Lingkungan Hidup - Dinas kelautan dan Perikanan
	2. Arahan perlindungan kawasan rawan banjir dilakukan melalui program			
	- Pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya	- Kecamatan Mranggen - Kecamatan Guntur - Kecamatan Sayung - Kecamatan Karangtengah - Kecamatan Bonang - Kecamatan Mijen - Kecamatan Karanganyar - Kecamatan Kebonagung	APBN APBD Provinsi APBD	- Kementerian PUPR - Dinas PUSDATARU Prov. Jawa Tengah - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
		Kecamatan Dempet Kecamatan Gajah Kecamatan Wedung Kecamatan Demak Kecamatan Wonosalam Kecamatan Karangawen		- BPBD
	- Pengembangan jalur ruang evakuasi		APBN APBD Provinsi APBD	- Kementerian PUPR - Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - BPBD
	- Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan banjir		APBD	- BPBD
	3. Arahan perlindungan kawasan rawan kekeringan dilakukan melalui program			
	- Pembangunan sumur dalam	Kecamatan Bonang Kecamatan Demak Kecamatan Dempet Kecamatan Gajah Kecamatan Guntur Kecamatan Karanganyar Kecamatan Karangawen Kecamatan Karangtengah Kecamatan Kebonagung Kecamatan Mijen Kecamatan Mranggen Kecamatan Sayung Kecamatan Wedung Kecamatan Wonosalam	APBN APBD Provinsi APBD	- Kementerian PUPR - Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - BPBD
	- Pengembangan bangunan penyimpan air		APBN APBD Provinsi APBD	- Kementerian PUPR - Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - BPBD
	- Pengembangan kegiatan dan/atau komoditas pertanian hemat air		APBN APBD Provinsi APBD	- Kementerian PUPR - Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - BPBD
	4. Arahan perlindungan kawasan rawan angin topan dilakukan melalui program			
	- Pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya	Kecamatan Bonang Kecamatan Demak Kecamatan Dempet Kecamatan Gajah Kecamatan Guntur Kecamatan Karanganyar Kecamatan Karangawen Kecamatan Karangtengah Kecamatan Kebonagung Kecamatan Mijen Kecamatan Mranggen Kecamatan Sayung	APBD	- Dinas PUTARU - BPBD
	- Pengembangan jalur ruang evakuasi		APBD	- Dinas PUTARU - BPBD
	- Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan angin topan	Kecamatan Wedung Kecamatan Wonosalam	APBD	- BPBD
	g. Kawasan Lindung Geologi			
	- Pengendalian kegiatan yang dapat menghalangi meresapnya air hujan ke kawasan resapan air tanah	Seluruh Kabupaten	APBD	Dinas PUTARU
	- Pengawasan dan perlindungan terhadap kawasan plasma nutfah	Seluruh Kabupaten	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	- Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya	Seluruh Kabupaten	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
II	Perwujudan Kawasan			

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
	Budidaya			
	a. Perwujudan Kawasan Hutan Produksi			
	1. Penetapan kawasan dan strategi penanganan Kawasan hutan produksi berdasarkan kesesuaian tanahnya	▪ Kecamatan Karangawen ▪ Kecamatan Mranggen	APBD	Dinas Pertanian dan Pangan
	2. Pemberian bantuan bibit tanaman tahunan pada lahan yang berkelerengan 25-40% yang dikuasai masyarakat;	▪ Kecamatan Karangawen ▪ Kecamatan Mranggen	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	b. Perwujudan Kawasan Pertanian			
	1. Penetapan Kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional;	Seluruh Kabupaten	APBD Provinsi APBD	- Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah - Dinas Pertanian dan Pangan
	2. Pengembangan tanaman semusim produktif di kawasan pertanian hortikultura	Seluruh Kabupaten	APBD Provinsi APBD	- Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah - Dinas Pertanian dan Pangan
	3. Peningkatan produksi tanaman perkebunan dan buah-buahan	Seluruh Kabupaten	APBD Provinsi APBD	- Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah - Dinas Pertanian dan Pangan
	4. Pengembangan peternakan unggas, ternak kecil dan ternak besar	Seluruh Kabupaten	APBD Provinsi APBD	- Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah - Dinas Pertanian dan Pangan
	c. Perwujudan Kawasan Perikanan			
	1. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi penetapan zona penangkapan ikan		APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
	2. Peningkatan tempat sandar perahu dan fasilitas TPI	▪ Kecamatan Sayung ▪ Kecamatan Karangtengah ▪ Kecamatan Bonang ▪ Kecamatan Wedung	APBD	- Dinas Perhubungan - Dinas Kelautan dan Perikanan
	3. Pengembangan produksi perikanan tambak		APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
	5. Peningkatan budidaya pengelolaan ikan air tawar		APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
	6. Pengembangan UMKM pengolah hasil perikanan		APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
	d. Perwujudan Kawasan Pertambangan			
	e. Perwujudan Kawasan Industri			
	1. Mengarahkan kegiatan industri ke Kawasan industri	Seluruh Kabupaten	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
	2. Pengembangan industri berbasis pertanian (agroindustri)	Seluruh Kabupaten	APBD	Dinas Pertanian dan Pangan
	3. Penetapan daya dukung dan tamping lingkungan hidup pada setiap Kawasan industri	Seluruh Kabupaten	APBD	- Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Dinas Lingkungan Hidup
	4. Penyediaan prasarana dan sarana Kawasan industri (termasuk penyediaan air untuk kepentingan industri)	Seluruh Kabupaten	APBD	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	5. Peningkatan kualitas SDM lokal untuk mendukung penyediaan tenaga kerja	Seluruh Kabupaten	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	f. Perwujudan Kawasan Pariwisata			
	1. Pengembangan atraksi wisata	Kecamatan yang memiliki kawasan wisata	APBD	Dinas Pariwisata
	2. Pengembangan pusat informasi wisata	Kecamatan yang memiliki potensi pengembangan kawasan wisata	APBD	- - Dinas Pariwisata kabupaten Demak
	4. Pengembangan destinasi wisata alam berbasis konservasi pada Kawasan lindung yang memiliki potensi wisata	Kecamatan yang memiliki potensi pengembangan kawasan wisata	APBD	Dinas Pariwisata
	g. Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan			
	1. Penyediaan Sarana dan prasarana permukiman perkotaan	Seluruh Kabupaten	APBN APBD Provinsi APBD	- Kementerian PUPR - Dinas Perakim Prov. Jawa Tengah - Dinas PUTARU

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				- Dinas Perkim
	2. Pembangunan dan pengembangan rumah susun	Kecamatan Tertentu	APBN APBD Provinsi APBD	- Kementerian PUPR - Dinas Perakim Prov. Jawa Tengah - Dinas PUTARU - Dinas Perkim
	3. Mengembangkan fasilitas ruang publik dan ruang terbuka hijau kota	Seluruh Kabupaten	APBN APBD Provinsi APBD	- Kementerian PUPR - Dinas Perakim Prov. Jawa Tengah - Dinas PUTARU - Dinas Perkim
	4. Penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan Kawasan perkotaan	Seluruh Kabupaten	APBN APBD Provinsi APBD	- Kementerian PUPR - Dinas Perakim Prov. Jawa Tengah - Dinas PUTARU - Dinas Perkim
	h. Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan			
	1. Pengembangan Kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian.	Seluruh Kabupaten	APBN APBD Provinsi APBD	- Kementerian PUPR - Dinas Perakim Prov. Jawa Tengah - Dinas PUTARU - Dinas Perkim
	2. Pengembangan Kawasan perdesaan melalui: ➤ pembentukan PPL; dan pengembangan keterkaitan sosial ekonomi antara PPL dengan wilayah pelayanannya	Seluruh Kabupaten	APBD	- Bappeda Litbang
	3. Penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan Kawasan perdesaan berada di Kompleks Pelabuhan Morodemak	Seluruh Kabupaten	APBN APBD Provinsi APBD	- Kementerian PUPR - Dinas Perakim Prov. Jawa Tengah - Dinas PUTARU - Dinas Perkim
E	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS			
	a. Perwujudan Kawasan sepanjang koridor jalan arteri primer yang melewati Kecamatan Sayung – Kecamatan Karangtengah – Kecamatan Demak - Kecamatan Gajah – Kecamatan Karanganyar:			
	- Pengaturan pengembangan pengendalian pemanfaatan ruang;	▪ Kecamatan Sayung ▪ Kecamatan Karangtengah ▪ Kecamatan Demak ▪ Kecamatan Gajah ▪ Kecamatan Karanganyar	APBD	- Dinas PUTARU - Bappeda Litbang
	- Penyediaan fasilitas dan prasarana perkotaan		APBD	- Dinas PUTARU - Bappeda Litbang
	- Pengembangan sektor ekonomi perkotaan baik formal dan informal dalam satu kesatuan pengembangan		APBD	- Dinas PUTARU - Bappeda Litbang
	- Peningkatan pengelolaan kawasan peruntukan industri		APBD	- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	b. Perwujudan Kawasan wisata pantai Surodadi berada di Kecamatan Sayung			
	- Pembangunan sarana tambat perahu/kapal	Kecamatan Sayung	APBD	- Dinas PUTARU - Bappeda Litbang - Dinas Kelautan dan Perikanan
	- Pengembangan kegiatan wisata bahari		APBD	- Dinas PUTARU - Bappeda Litbang - Dinas Kelautan dan Perikanan
	- Pembangunan sarana pendukung wisata utama		APBD	- Dinas PUTARU - Bappeda Litbang - Dinas Kelautan dan Perikanan
	c. Perwujudan Kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak berada di Kecamatan Bonang			
	- Peningkatan akses menuju kawasan Pelabuhan	Kecamatan Bonang	APBD	- Dinas PUTARU

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
	Perikanan Pantai Morodemak			- Dinas Kelautan dan Perikanan
	- Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak dari sedimentasi		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Kelautan dan Perikanan
	- Peningkatan fasilitas dan prasarana ke pelabuhan; dan		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Kelautan dan Perikanan
	- Peningkatan sarana wisata di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Pariwisata - Dinas Kelautan dan Perikanan
	d. Kawasan rawan abrasi dan rob pantai berada di Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, dan Kecamatan Bonang			
	- Pembangunan sarana penahan gelombang	▪ Kecamatan Sayung ▪ Kecamatan Karangtengah ▪ Kecamatan Bonang	APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Kelautan dan Perikanan
	- Penghijauan kawasan pantai		APBD	- Dinas PUTARU - DLH - Dinas Kelautan dan Perikanan
	- Rehabilitasi tanah-tanah bekas terkena abrasi		APBD	- Dinas PUTARU - DLH - Dinas Kelautan dan Perikanan
	e. Kawasan rawan sedimentasi dan tanah timbul berada di Kecamatan Wedung			
	- Pendataan lokasi dan luas tanah timbul	Kecamatan Wedung	APBD	- Dinas PUTARU - DLH - Dinas Kelautan dan Perikanan
	- Pengelolaan tanah timbul bersama masyarakat		APBD	- Dinas PUTARU - DLH - Dinas Kelautan dan Perikanan

2.3.2.4 Isu Strategis Kabupaten Demak

Isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah. Isu strategis menjadi hal krusial karena pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada pembangunan masa mendatang. Berdasarkan identifikasi dari berbagai permasalahan pembangunan, kemudian isu baik internasional, nasional maupun regional/daerah dapat diidentifikasi isu strategis untuk Kabupaten Demak yang di sajikan pada tabel dan dijabarkan masing-masing isu sebagai berikut:

Tabel II.90
Tabel Identifikasi Isu Strategis Kabupaten Demak

PERMASALAHAN	ISU KLHS DEMAK	ISU NASIONAL	ISU PROVINSI JATENG	ISU STRATEGIS DEMAK
Tingginya Tingkat Kemiskinan Kabupaten Demak	Tingkat kemiskinan yang masih tinggi	Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat	Penurunan tingkat kemiskinan	Kemiskinan dan kesempatan kerja

PERMASALAHAN	ISU KLHS DEMAK	ISU NASIONAL	ISU PROVINSI JATENG	ISU STRATEGIS DEMAK
Rendahnya daya saing ekonomi daerah		Resiliensi dan Prospek Perekonomian yang Positif	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Peningkatan nilai ekonomi sektor unggulan daerah
		Rendahnya Produktivitas	Ketahanan pangan yang berkelanjutan	Penumpu pangan di Jawa Tengah
				Inisiasi Ekonomi hijau
Meningkatnya intensitas kerusakan lingkungan hidup yang berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat	Kerusakan lingkungan hidup dan resiko bencana	Resiliensi dan Prospek Perekonomian yang Positif	Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana	Kerusakan lingkungan Hidup
				Penanganan Rob dan bencana
Pemenuhan infrastruktur yang belum merata	Pemenuhan kebutuhan air minum dan air baku belum tercukupi	Resiliensi dan Prospek Perekonomian yang Positif	Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Pemenuhan Kualitas Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan
Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Demak		Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Penguatan tata kelola pemerintahan yang dinamis
Masih rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia	Masih rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia	Potensi Sumber Daya Manusia dan Modal Manusia	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Sumber Daya Manusia yang Berdaya saing
	Masih rendahnya kualitas kesehatan Masyarakat		Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat	

Berdasarkan identifikasi isu strategis yang tertuang diatas, berikut penjelasan dan penjabarannya.

1) Sumber Daya Manusia yang Berdaya saing

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung percepatan pembangunan daerah, termasuk di Kabupaten Demak. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, transformasi digital, serta dinamika pasar kerja yang terus berkembang, Pemerintah Kabupaten Demak menaruh perhatian besar pada peningkatan kualitas dan

kapasitas SDM. Upaya tersebut diwujudkan melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan formal maupun nonformal, pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan pasar, serta pengembangan kompetensi melalui sertifikasi profesi. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan institusi pendidikan terus diperkuat guna menciptakan sinergi dalam mencetak tenaga kerja yang adaptif, inovatif, serta memiliki etos kerja dan keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman.

Di samping penguatan aspek teknis dan keahlian, pembangunan SDM di Kabupaten Demak juga diarahkan untuk membentuk karakter yang unggul melalui penanaman nilai-nilai integritas, tanggung jawab, dan semangat kewirausahaan. Hal ini menjadi fondasi dalam menciptakan masyarakat yang tidak hanya kompeten secara individu, tetapi juga mampu berkontribusi secara kolektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Program-program pemberdayaan pemuda, peningkatan peran perempuan dalam dunia kerja, serta penguatan peran komunitas lokal menjadi bagian integral dalam strategi peningkatan daya saing SDM. Dengan komitmen yang kuat dan strategi yang terintegrasi, Kabupaten Demak optimis mampu mencetak SDM unggul yang menjadi motor penggerak pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

2) Penguatan tata kelola pemerintahan yang dinamis

Penguatan tata kelola pemerintahan yang dinamis di Kabupaten Demak merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan pemerintahan yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Pemerintah Kabupaten Demak menyadari bahwa tata kelola pemerintahan yang efektif tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap regulasi semata, tetapi juga oleh kemampuan birokrasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, dinamika sosial, dan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, berbagai langkah strategis telah ditempuh, mulai dari penyederhanaan proses birokrasi, digitalisasi layanan publik, hingga peningkatan kapasitas aparatur sipil negara. Reformasi birokrasi yang dilaksanakan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat guna menciptakan sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan terpercaya.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Demak juga berkomitmen membangun kolaborasi lintas sektor sebagai bagian dari tata kelola yang inklusif dan adaptif. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat, pemerintah daerah berupaya menciptakan ekosistem pembangunan yang saling memperkuat. Dinamika tata kelola ini diwujudkan dalam bentuk forum komunikasi pembangunan daerah, pemanfaatan data terintegrasi untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti

(*evidence-based policy*), serta penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Demak diharapkan mampu menjadi daerah yang tangguh dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin prima dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

3) Peningkatan nilai ekonomi sektor unggulan daerah

Peningkatan nilai ekonomi sektor unggulan daerah di Kabupaten Demak merupakan salah satu poin penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kabupaten Demak memiliki potensi unggulan di sektor pertanian, perikanan, dan industri pengolahan, yang secara historis telah menjadi pilar perekonomian daerah. Pemerintah daerah berupaya mengakselerasi nilai tambah dari sektor-sektor ini melalui peningkatan produktivitas, diversifikasi komoditas, serta penguatan kapasitas kelembagaan pelaku usaha. Dalam sektor pertanian misalnya, dilakukan optimalisasi lahan melalui penerapan teknologi pertanian presisi dan penyediaan infrastruktur irigasi yang memadai. Sementara itu, sektor perikanan diperkuat melalui pengembangan budidaya perikanan air tawar dan pesisir, serta modernisasi sarana distribusi hasil tangkap agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas dengan kualitas yang terjaga.

Lebih lanjut, dalam upaya memperkuat daya saing sektor unggulan, Pemerintah Kabupaten Demak juga mendorong integrasi hulu-hilir melalui pengembangan kawasan industri berbasis potensi lokal dan dukungan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini diwujudkan melalui penyediaan fasilitas inkubasi bisnis, kemitraan dengan sektor swasta, serta perluasan akses pembiayaan produktif. Selain itu, pelatihan vokasional dan pendampingan berkelanjutan bagi pelaku usaha lokal turut menjadi fokus agar sumber daya manusia dapat bersaing dalam pasar yang semakin kompetitif. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah, membuka lapangan kerja baru, serta menciptakan struktur ekonomi yang lebih kokoh dan adaptif terhadap dinamika global. Dengan demikian, peningkatan nilai ekonomi sektor unggulan tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat Kabupaten Demak secara menyeluruh.

4) Penunjang pangan di Jawa Tengah

Kabupaten Demak memiliki peran strategis sebagai salah satu penyangga utama ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah. Letaknya yang berada di



wilayah pesisir utara dengan bentang alam berupa dataran rendah yang subur menjadikan Demak sangat potensial dalam pengembangan sektor pertanian, khususnya sub sektor tanaman pangan. Luas lahan sawah yang mencapai puluhan ribu hektare menjadi modal utama dalam menghasilkan komoditas strategis seperti padi dan jagung dalam jumlah yang signifikan. Dengan produktivitas padi yang tinggi dan sistem irigasi teknis yang relatif baik, Demak secara konsisten menjadi salah satu kontributor terbesar produksi beras di Jawa Tengah. Ketersediaan tenaga kerja pertanian yang melimpah dan budaya agraris yang kuat turut memperkuat posisi Kabupaten Demak sebagai daerah lumbung pangan yang andal dan berkelanjutan.

Selain potensi lahannya, dukungan kebijakan dari pemerintah daerah dalam bentuk program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, pemanfaatan teknologi pertanian modern, serta peningkatan kapasitas petani telah mempercepat transformasi sektor pangan di Demak. Upaya ini didukung oleh penguatan infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani, gudang penyimpanan hasil panen, serta jaringan distribusi yang efisien menuju pasar regional maupun nasional. Tidak hanya fokus pada produksi, Pemerintah Kabupaten Demak juga mendorong hilirisasi produk pertanian melalui pengembangan industri pengolahan berbasis pangan lokal, yang pada gilirannya meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani. Strategi hilirisasi tersebut akan difokuskan pada peningkatan industri pengolahan pangan dengan memperhatikan kualitas, diversifikasi produk, pemasaran, kerjasama dan juga implementasi teknologi.

Dengan posisi geografis yang strategis, komitmen pemerintah daerah, dan sinergi antar pemangku kepentingan, Kabupaten Demak terus memperkuat perannya sebagai penunpu utama ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah.

5) Inisiasi Ekonomi hijau

Kabupaten Demak, sebagai salah satu daerah pesisir yang kaya akan sumber daya alam dan potensi pertanian, mulai menunjukkan komitmen kuat dalam menginisiasi pendekatan Ekonomi Hijau sebagai arah pembangunan masa depan yang berkelanjutan. Langkah ini ditandai dengan integrasi prinsip-prinsip ramah lingkungan dalam berbagai sektor pembangunan, terutama sektor pertanian, perikanan, dan energi. Pemerintah Kabupaten Demak menyadari bahwa pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hanya akan menciptakan kerentanan jangka panjang, baik terhadap perubahan iklim, bencana alam, maupun menurunnya produktivitas lahan. Oleh karena itu, melalui pengembangan pertanian organik, pengelolaan kawasan pesisir berbasis ekosistem, serta

pemanfaatan energi terbarukan, Demak mulai menggeser paradigma pembangunan dari eksploitasi menuju optimalisasi berkelanjutan yang menjunjung nilai konservasi.

Inisiasi Ekonomi Hijau di Kabupaten Demak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha, serta lembaga pendidikan dan riset. Kolaborasi lintas sektor ini mendorong terciptanya inovasi lokal yang adaptif terhadap tantangan lingkungan, seperti teknologi irigasi hemat air, budi daya ikan ramah lingkungan, hingga pengolahan sampah menjadi energi atau kompos. Upaya ini sejalan dengan visi pembangunan daerah yang menempatkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat sebagai fondasi utama. Dengan mengedepankan pendekatan holistik dan inklusif, Kabupaten Demak diharapkan mampu menjadi percontohan bagi daerah lain dalam mengimplementasikan Ekonomi Hijau, sekaligus memperkuat ketahanan wilayah terhadap tekanan ekologis maupun sosial di masa mendatang.

Sebagai bagian integral dari inisiasi Ekonomi Hijau, Kabupaten Demak juga mulai memperkuat upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara terpadu dan berbasis potensi lokal. Penurunan emisi ini dilakukan melalui serangkaian langkah yang saling terkait, seperti penerapan praktik pertanian rendah emisi, pengurangan penggunaan bahan bakar fosil melalui pemanfaatan energi surya dan biogas, serta rehabilitasi kawasan mangrove yang berperan sebagai penyerap karbon alami di wilayah pesisir. Selain itu, pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan peningkatan efisiensi energi pada sektor rumah tangga dan industri kecil turut mendukung tercapainya target pengurangan emisi. Integrasi strategi ini tidak hanya mendukung komitmen nasional terhadap Perjanjian Paris, tetapi juga memperkuat daya adaptif Demak terhadap risiko perubahan iklim, khususnya banjir rob dan abrasi yang semakin meningkat. Pendekatan kolaboratif dan partisipatif dalam penurunan emisi GRK menjadi bukti nyata bahwa transformasi menuju pembangunan rendah karbon di Demak berjalan seiring dengan upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6) Pemenuhan Kualitas Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan

Pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan menjadi kunci dalam memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Demak. Sebagai bagian dari wilayah strategis di Jawa Tengah, Demak mendapatkan keuntungan dari pembangunan infrastruktur utama seperti Jalan Tol Semarang–Demak dan Jalan Tol Demak–Kudus–Pati–

Rembang–Tuban yang memperkuat konektivitas antarwilayah dan mempercepat distribusi barang dan jasa. Peningkatan kualitas jalan, jembatan, dan sarana transportasi umum di tingkat kabupaten dan desa juga terus diupayakan untuk memastikan akses yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok disabilitas dan masyarakat di daerah terpencil.

Selain pengembangan infrastruktur transportasi, pembangunan sistem drainase, penyediaan air bersih, dan fasilitas sanitasi yang layak juga menjadi prioritas dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Kabupaten Demak terus berupaya meningkatkan pengelolaan tata ruang dan memperkuat regulasi terkait pembangunan infrastruktur untuk memastikan bahwa pengembangan wilayah berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Dengan pengembangan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan, Kabupaten Demak diharapkan mampu memperkuat daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7) Kemiskinan dan Kesempatan Kerja

Pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja menjadi tantangan utama dalam pembangunan Kabupaten Demak. Pemerintah Kabupaten Demak terus mendorong pengembangan sektor ekonomi lokal, termasuk sektor pertanian, perikanan, dan industri pengolahan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Program padat karya dan pemberdayaan masyarakat berbasis desa terus diperluas untuk memberikan kesempatan kerja bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin. Selain itu, pengembangan keterampilan melalui pelatihan kerja, bimbingan usaha, dan dukungan modal usaha menjadi strategi utama dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.

Pemerintah Kabupaten Demak juga memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga keuangan untuk memperluas akses pembiayaan dan mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Peningkatan kesempatan kerja di sektor formal dan informal diharapkan dapat menekan angka pengangguran dan mempercepat penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Demak. Dengan strategi tersebut, diharapkan tercipta ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Demak.

8) Kerusakan lingkungan Hidup

Kabupaten Demak, yang secara geografis terletak di kawasan pesisir utara Provinsi Jawa Tengah, tengah menghadapi persoalan serius terkait kerusakan lingkungan hidup yang semakin kompleks dari tahun ke tahun.



Salah satu isu utama yang mencuat adalah abrasi pantai yang terjadi secara masif, terutama di wilayah pesisir utara seperti Kecamatan Sayung dan Wedung. Fenomena ini telah menggerus daratan hingga puluhan meter setiap tahunnya, menyebabkan hilangnya lahan pertanian, pemukiman, serta infrastruktur publik. Abrasi diperparah oleh degradasi ekosistem mangrove yang seharusnya berfungsi sebagai benteng alami terhadap gelombang laut. Selain itu, aktivitas penambangan pasir ilegal dan alih fungsi lahan secara tidak terkendali turut mempercepat proses kerusakan lingkungan. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan implementasi regulasi yang berkelanjutan dari pihak terkait.

Di sisi lain, pencemaran lingkungan akibat limbah domestik dan industri juga semakin mengancam kualitas hidup masyarakat Demak. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah ini, seperti Sungai Dombo dan Sungai Tuntang, mengalami penurunan kualitas air akibat pembuangan limbah rumah tangga serta limbah dari sentra industri kecil yang tidak memiliki instalasi pengolahan limbah yang memadai. Hal ini menyebabkan terganggunya ekosistem air, matinya biota sungai, serta berpotensi menimbulkan masalah kesehatan masyarakat. Kerusakan lingkungan ini tidak hanya berdampak pada sektor ekologi, tetapi juga mengancam keberlanjutan sosial dan ekonomi, terutama bagi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam merumuskan kebijakan perlindungan lingkungan yang bersifat inklusif dan berorientasi jangka panjang.

9) Penanganan Rob dan bencana

Penanganan rob dan bencana di Kabupaten Demak menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah, mengingat wilayah ini termasuk dalam kawasan pesisir yang rentan terhadap perubahan iklim dan kenaikan muka air laut. Rob yang terjadi secara berkala telah mengganggu aktivitas sosial ekonomi masyarakat, merusak infrastruktur, serta mengancam keberlanjutan kawasan permukiman dan pertanian. Pemerintah Kabupaten Demak, melalui koordinasi lintas sektor dengan instansi vertikal dan pemerintah provinsi, telah melaksanakan berbagai upaya mitigasi, seperti pembangunan tanggul laut, rehabilitasi dan peninggian jalan yang terdampak, serta revitalisasi drainase kawasan rawan banjir. Selain itu, pendekatan berbasis ekosistem juga terus digalakkan, salah satunya melalui penanaman

mangrove di sepanjang garis pantai sebagai upaya perlindungan alami yang berkelanjutan.

Dalam aspek penanggulangan bencana secara umum, Kabupaten Demak telah mengintegrasikan kebijakan pengurangan risiko bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik jangka menengah maupun tahunan. Penanggulangan bencana daerah berperan penting dalam membangun sistem peringatan dini, meningkatkan kapasitas masyarakat melalui edukasi kebencanaan, serta memperkuat jejaring kemitraan dengan lembaga kemanusiaan dan komunitas lokal. Pemerintah daerah juga terus mendorong pengembangan teknologi informasi untuk pemantauan kondisi cuaca dan air pasang, serta memperkuat sistem logistik bencana guna mempercepat respon saat terjadi keadaan darurat.

Sebagai pelengkap dari strategi tersebut, upaya penyelamatan ekosistem pesisir dari ancaman bencana hidrometeorologi menjadi langkah yang tak terpisahkan. Pemerintah Kabupaten Demak mendorong rehabilitasi kawasan pesisir yang rusak, seperti pemulihan hutan mangrove, pemanfaatan sabuk hijau alami, serta pengendalian alih fungsi lahan yang tidak ramah lingkungan. Pendekatan ini dipadukan dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan pelestarian dan adaptasi berbasis ekosistem, sehingga tercipta ketahanan lingkungan yang mendukung perlindungan jangka panjang dari dampak banjir rob, abrasi, dan badai tropis. Dengan demikian, Demak terus berupaya membangun ketangguhan wilayah secara menyeluruh, baik dari aspek fisik, sosial, maupun ekologis.



BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

Kabupaten Demak sebagai salah satu daerah di Pesisir Utara Pulau Jawa memiliki berbagai permasalahan dan isu strategis. Untuk menjawab hal tersebut, dibutuhkan suatu upaya terarah dan terukur yang dituangkan dalam visi dan misi pembangunan daerah. Visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025–2029 merupakan kerangka strategis untuk mengelola dan memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Demak.

Kabupaten Demak memiliki peran penting dalam keberlangsungan pembangunan bagi daerah di sekitarnya yang terintegrasi dalam wilayah KEDUNGSEPUR (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi). Dengan potensi sumber daya alamnya yang melimpah, termasuk potensi pertanian, perikanan, dan pariwisata yang memberikan landasan kuat dalam mendukung pembangunan daerah menjadi peluang bagi Kabupaten Demak untuk mengoptimalkan pemerataan kesejahteraan sosial bagi masyarakatnya. Selanjutnya dalam mengupayakan pencapaian visi dan misi maka dirumuskan tujuan dan sasaran untuk memperkuat dan mempertajam apa yang ingin dicapai dalam waktu jangka menengah. Melalui pendekatan ini, RPJMD berperan sebagai peta jalan yang dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

3.1 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Visi merupakan keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, di mana visi dalam RPJMD merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yaitu dr. Hj. Eisti'anah, S.E. dan Muhammad Badruddin, M.Pd.

Visi yang hendak dicapai dalam periode 2025–2029 adalah:

“DEMAK SEMAKIN BERMARTABAT, MAJU, DAN SEJAHTERA”

Dalam visi ini terkandung tiga rumusan pokok visi yakni **“Bermartabat, Maju, Sejahtera”**. Kata **Semakin** merupakan penekanan untuk menjadi lebih baik dari kondisi yang telah diwujudkan Bupati dan Wakil Bupati periode sebelumnya.

Ketiga rumusan pokok visi merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Adapun filosofi dan penjabaran makna pokok visi RPJMD Kabupaten Demak dijelaskan sebagai berikut.

1. **Bermartabat**, mencerminkan upaya membangun Kabupaten Demak yang dihormati dan dihargai, baik oleh masyarakatnya sendiri maupun oleh daerah lain. Martabat tersebut tercermin dalam kualitas hidup warga, tata kelola pemerintahan yang baik, serta penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dan agama. Bermartabat juga berarti menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, integritas, dan kehormatan dalam seluruh aspek kehidupan.
2. **Maju**, menandakan adanya pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun internasional. Kemajuan ini meliputi penerapan teknologi, peningkatan kualitas infrastruktur dan ekonomi, serta pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, industri, UMKM, dan pariwisata.
3. **Sejahtera**, menekankan tercapainya kesejahteraan sosial yang adil, merata, dan berkelanjutan. Seluruh lapisan masyarakat berhak memiliki akses yang setara terhadap layanan dasar dan kesempatan ekonomi, serta dapat menikmati lingkungan hidup yang aman, nyaman, dan layak.

Misi adalah langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dengan memerhatikan visi serta mempertimbangkan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka misi pembangunan sebagai berikut:

MISI 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berakhlak

Misi ini dilaksanakan terutama untuk mewujudkan pokok visi “Semakin Bermartabat”. Kualitas sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pembangunan daerah. Sumber daya manusia yang berdaya saing dimaknai dengan kualitas yang sehat, cerdas, produktivitas tinggi, dan berwawasan luas. Sumber daya manusia yang berakhlak diwujudkan melalui pembangunan kualitas karakter manusia yang religius dan berbudaya.

MISI 2: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berintegritas

Perwujudan masyarakat yang “Semakin Bermartabat” diupayakan pula melalui keteladanan kepemimpinan dan penguatan tata kelola pemerintahan. Pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas akan melahirkan kepercayaan

publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan.

MISI 3: Mengembangkan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan dan Berbasis Potensi Lokal

Pokok visi “Semakin Maju” yang ditandai dengan peningkatan daya saing daerah, tidak terlepas dari peningkatan daya saing ekonomi. Dalam menguatkan perekonomian daerah, perlu didorong pemanfaatan potensi-potensi lokal sebagai motor penggerak perekonomian. Potensi lokal seperti pertanian, perikanan, industri, UMKM, dan pariwisata perlu diberikan dukungan teknologi, sarana produksi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelolanya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi hendaknya tidak mengorbankan aspek sosial dan lingkungan sehingga dalam pelaksanaannya harus tetap menjaga prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

MISI 4: Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

“Semakin Maju” dalam hal perekonomian harus ditopang dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas. Kemajuan harus dirasakan merata oleh seluruh masyarakat Demak tanpa ada yang tertinggal. Akses terhadap infrastruktur berkualitas tidak hanya bermakna merata secara kewilayahan tetapi juga merata secara kelas sosial dan ekonomi.

MISI 5: Memperkuat Ketahanan Sosial dan Lingkungan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan pokok visi “Semakin Sejahtera”, diperlukan penguatan ketahanan sosial dan lingkungan. Ketahanan sosial mencakup perlindungan kesejahteraan sosial terutama kepada golongan marginal, ketahanan pangan, ketahanan keluarga dan kemandirian desa. Sejahtera harus dapat dinikmati dalam kondisi lingkungan yang aman, nyaman, layak, dan berkelanjutan. Keamanan lingkungan diperoleh dengan menjaga kondusivitas wilayah, menjaga nilai-nilai toleransi dan kebangsaan. Lingkungan yang nyaman, layak, dan berkelanjutan diperoleh dengan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi risiko bencana.

Penyusunan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Demak bukan hanya dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Demak semata, namun juga sebagai langkah strategis yang mendukung pembangunan di tingkat provinsi maupun nasional. Oleh karena itu, 5 misi pembangunan Kabupaten Demak diselaraskan dengan 8 misi pembangunan nasional yang dikenal dengan *asta cita* dan misi RPJMD provinsi Jawa tengah. Keselarasan misi

Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar III.1
Keselarasan misi Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional



TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama lima tahun yang selaras dengan RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029. Sasaran diturunkan dari tujuan yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Perumusan tujuan dan sasaran RPJMD disusun dengan: (1) kalimat kondisi; (2) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; (3) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami; (4) bersifat makro dan lintas urusan serta merupakan *ultimate outcome*; dan (5) menurunkan kinerja sampai diperoleh program prioritas.

Merujuk dari berbagai penjelasan di atas dan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 maka dirumuskan tujuan dan indikator beserta target sebagai berikut:

Tabel III.1

Rumusan Tujuan dan Indikator Tujuan RPJMD Tahun 2025-2030

VISI: DEMAK SEMAKIN BERMARTABAT, MAJU, DAN SEJAHTERA						
POKOK VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET PEMBANGUNAN	
					2025	2030
Mewujudkan Demak “Semakin Bermartabat”	Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berakhlak	Tujuan 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	75,42	79,21
	Misi 2: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berintegritas	Tujuan 2: Meningkatkan tata kelola pemerintah yang adaptif dan berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	87,00	89,50
			Indeks Integritas Nasional	Angka	78,50	78,75
Mewujudkan Demak “Semakin Maju”	Misi 3: Mengembangkan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan dan Berbasis Potensi Lokal	Tujuan 3: Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,85-5,32	7,90-8,30
	Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Tujuan 4: Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan	Indeks Layanan Infrastruktur Daerah	Angka	35,55	46,76
Mewujudkan Demak “Semakin Sejahtera”	Misi 5: Memperkuat Ketahanan Sosial dan Lingkungan yang Inklusif dan Berkelanjutan	Tujuan 5: Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, aman dan nyaman	Tingkat kemiskinan	Angka	11,64-10,39	8,40-7,79
			Indeks Harmoni Indonesia	Angka	6,95	7,07
			Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton Co2eq	1.399.991,0	4.408.439,5

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Kabupaten Demak dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Merujuk

dari berbagai penjelasan di atas dan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah maka sasaran beserta indikator pada tiap tujuan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan pertama, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berkarakter

Membangun Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat, dan berkarakter merupakan tujuan utama dari pembangunan Kabupaten Demak untuk mewujudkan Demak yang semakin bermartabat. Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Demak, tujuan ini diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia dan akan dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat; dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata – Rata Lama Sekolah (RLS).

Sasaran 2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; dengan indikator Usia Harapan Hidup.

Sasaran 3 Meningkatnya pemajuan kebudayaan; dengan indikator Nilai Kinerja Kebudayaan.

2. Tujuan Kedua, Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas

Visi Pembangunan daerah akan semakin mudah dicapai dengan memperkuat tata kelola pemerintahan. Perkembangan yang semakin cepat membutuhkan birokrasi pemerintahan yang adaptif dan berintegritas untuk memaksimalkan potensi daerah. Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Demak, tujuan ini diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Integritas Nasional. Tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

Sasaran 4 Meningkatnya pengendalian internal pemerintah; dengan indikator Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sasaran 5 Meningkatnya kualitas pelayanan berbasis digital; dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik.

Sasaran 6 Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dengan indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

Sasaran 7 Meningkatnya kinerja aparatur; dengan indikator Indeks Sistem Merit.

3. Tujuan Ketiga, Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan

Perekonomian daerah yang mandiri merupakan modal untuk mempercepat pembangunan. Hal ini sesuai dengan visi Kabupaten Demak Semakin Maju sehingga Pemerintah Kabupaten Demak berkomitmen untuk mewujudkan



perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. Tujuan ini diukur melalui Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi. Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Demak, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

Sasaran 8 Meningkatnya sektor unggulan daerah yang berkelanjutan; dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Daerah (Pertanian, Industri, Perdagangan, serta Penyediaan Akomodasi, dan Makan Minum).

Sasaran 9 Meningkatnya investasi daerah; dengan indikator Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Sasaran 10 Meningkatnya pendapatan masyarakat; dengan indikator PDRB per Kapita.

4. Tujuan Keempat, Meningkatkan Infrastruktur Berkualitas, Inklusif dan Berkelanjutan

Visi pembangunan Demak Semakin Maju didukung dengan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur diharapkan mampu menopang dinamika sosial dan perekonomian masyarakat Kabupaten Demak secara inklusif dan optimal. Tujuan ini diukur melalui Indikator Indeks Layanan Infrastruktur Daerah. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Demak, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

Sasaran 11 Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan merata; dengan indikator Indeks Kinerja Infrastruktur Daerah.

5. Tujuan Kelima, Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Aman dan Nyaman

Visi Demak Semakin Sejahtera memiliki arti memberikan kesejahteraan sosial kepada seluruh lapisan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat didukung dengan pengentasan kemiskinan serta pembangunan lingkungan yang aman dan nyaman. Lingkungan yang aman dan nyaman digambarkan dengan lingkungan yang kondusif serta tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim. Tujuan ini diukur melalui Indikator Tingkat Kemiskinan, Indeks Harmoni Indonesia, dan Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Demak, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

Sasaran 12 Meningkatnya pengentasan kemiskinan dan kehidupan yang berkualitas; dengan indikator Indeks Gini;

Sasaran 13 Terwujudnya keluarga berkualitas dan penduduk yang tumbuh seimbang; dengan indikator Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga).



- Sasaran 14** Meningkatnya kondusivitas wilayah; dengan indikator Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) yang Dapat Diselesaikan dan Angka Kejadian Konflik Sosial.
- Sasaran 15** Meningkatnya kemandirian desa; dengan indikator Indeks Desa.
- Sasaran 16** Meningkatnya kualitas lingkungan hidup; dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.
- Sasaran 17** Menurunnya dampak risiko bencana; dengan indikator Indeks Risiko Bencana;

Dengan rumusan tujuan, sasaran dan indikator di atas maka keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran beserta targetnya yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel III.2
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2025-2030

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	BASELINE	TARGET PEMBANGUNAN					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
VISI: DEMAK SEMAKIN BERMARTABAT, MAJU, DAN SEJAHTERA MISI 1: MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING DAN BERAKHLAK MISI 2: MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERINTEGRITAS MISI 3: MENGEMBANGKAN EKONOMI DAERAH YANG BERKELANJUTAN DAN BERBASIS POTENSI LOKAL	Tujuan 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter		Indeks Pembangunan Manusia	Angka	74,57	75,42	75,94	76,60	77,54	78,72	79,21
		Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah (HLS)*	Tahun	13,36	14,00	14,17	14,27	14,37	14,47	14,57
			Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,28	9,37	9,50	9,64	9,77	9,91	10,04
		Sasaran 2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup*	Tahun	75,79	75,91	76,08	76,30	76,59	77,11	77,43
	Sasaran 3 Meningkatnya pemajuan kebudayaan	Nilai Kinerja Kebudayaan	Angka	57,78	58,28	58,88	59,43	59,98	60,53	61,08	
	Tujuan 2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas		Indeks Reformasi Birokrasi*	Angka	86,58	87,00	87,50	88,80	89,00	89,30	89,50
			Indeks Integritas Nasional*	Angka	77,39	78,50	78,55	78,60	78,65	78,70	78,75
		Sasaran 4 Meningkatnya pengendalian internal pemerintah	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Angka	3,023	3,070	3,075	3,080	3,100	3,120	3,140



VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	BASELINE	TARGET PEMBANGUNAN					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
MISI 4: MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR BERKUALITAS YANG MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISI 5: MEMPERKUAT KETAHANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN		Sasaran 5 Meningkatnya kualitas pelayanan berbasis digital	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88,48	88,60	88,65	88,70	88,75	88,80	88,85
			Indeks Pelayanan Publik*	Angka	4,47	3,50	3,70	4,10	4,30	4,50	4,75
		Sasaran 6 Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Angka	69,10	69,20	70,00	70,30	70,50	70,70	71,00
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Angka	82,53	82,60	82,70	82,80	82,90	83,00	83,10
		Sasaran 7 Meningkatnya kinerja aparatur	Indeks Sistem Merit	Angka	0,705	0,705	0,650	0,650	0,660	0,660	0,670
	Tujuan 3. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,06	4,85-5,32	5,10-6,00	6,50-7,10	7,00-7,80	7,50-8,00	7,90-8,30
		Sasaran 8 Meningkatnya sektor unggulan daerah yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan daerah (Pertanian, Industri, Perdagangan, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	%	3,72	3,76	3,80	3,86	3,91	3,99	4,07
		Sasaran 9 Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto)	%	7,10	7,11	7,12	7,13	7,14	7,15	7,16



VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	BASELINE	TARGET PEMBANGUNAN					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Sasaran 10 Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB per Kapita*	Juta Rp/ Tahun	28,30	29,58-29,99	31,96-32,51	34,87-35,73	38,04-39,27	41,50-43,16	45,28-47,43
	Tujuan 4. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan		Indeks Layanan Infrastruktur Daerah	Angka	34,83	35,55	37,25	40,30	42,67	44,05	46,76
		Sasaran 11 Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan merata	Indeks Kinerja Infrastruktur Daerah	Angka	86,92	85,44	86,73	87,48	88,23	88,98	89,72
	Tujuan 5. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, aman dan nyaman		Tingkat Kemiskinan*	%	11,89	11,64-10,39	11,38-10,04	10,56-9,35	9,74-8,83	8,92-8,31	8,40-7,79
			Indeks Harmoni Indonesia	Angka	N/A	6,95	6,98	7,00	7,02	7,04	7,07
			Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif*	Ton Co2eq	102.378,04	1.399.991,0	2.001.680,7	2.603.370,4	3.205.060,1	3.806.749,8	4.408.439,5
		Sasaran 12 Meningkatnya pengentasan kemiskinan dan kehidupan yang berkualitas	Indeks Gini	Angka	0,314	0,264-0,292	0,299-0,313	0,297-0,312	0,296-0,311	0,294-0,310	0,293-0,309

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	BASELINE	TARGET PEMBANGUNAN					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Sasaran 13 Terwujudnya keluarga berkualitas dan penduduk yang tumbuh seimbang	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)*	Angka	64,32	64,32	65,50	66,70	67,80	68,90	69,90
		Sasaran 14 Meningkatnya kondusivitas wilayah	Angka Kejadian Konflik Sosial	Kejadian	0	0	0	0	0	0	0
			Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) yang Dapat Diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100
		Sasaran 15 Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa	Angka	0,7458	0,7533	0,7608	0,7684	0,7761	0,7838	0,7917
		Sasaran 16 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah*	Angka	56,26	72,60	72,64	72,69	72,73	72,77	72,82
		Sasaran 17 Menurunnya dampak risiko bencana	Indeks Risiko Bencana*	Angka	91,76	89,03-87,77	87,90-86,11	86,76-84,45	85,63-82,79	84,49-81,13	83,36-79,47

Keterangan: *Indikator Utama Pembangunan (IUP)



Memahami bahwa Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki indikator tujuan dan sasaran jangka menengah yang harus didukung oleh pencapaian kinerja perangkat daerah. Maka hal ini menjadi elemen krusial dalam mencapai target pembangunan yang terintegrasi dan efektif. RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang menjadi pedoman utama bagi seluruh sektor pembangunan di tingkat daerah. Indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD diturunkan secara spesifik ke dalam rencana pembangunan perangkat daerah agar setiap Perangkat Daerah (PD) memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam mendukung pencapaian target pembangunan. Hal ini menciptakan kesinambungan antara kebijakan strategis daerah dan implementasinya di tingkat teknis melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terukur. Keterpaduan ini memastikan bahwa setiap sasaran perangkat daerah mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan. Indikator kinerja di tingkat perangkat daerah harus selaras dengan indikator RPJMD agar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan berjalan terarah dan terukur.



Tabel III.3
Hubungan Tujuan dan Sasaran Daerah dengan
Perangkat Daerah Kabupaten Demak

Pokok Visi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Demak Semakin Bermartabat	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	- Harapan Lama Sekolah (HLS), - Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pendidikan Institusional	- Literasi Membaca SD/Sederajat; - Numerasi SD/Sederajat; - Literasi Membaca SMP/Sederajat; - Numerasi SMP/Sederajat	Terwujudnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) Usia 7-12 Tahun,	DINDIKBUD
								APM Usia 13-15 Tahun	
					Meningkatkan Kualitas Pemuda dan Prestasi Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	Meningkatnya Mutu Pembelajaran	Persentase Sekolah yang Terakreditasi Minimal B	DINPORA
							Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	
						Rasio Prestasi Olahraga di Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional terhadap Nomor Kejuaraan yang Diikuti	Meningkatnya Prestasi Olah Raga	Jumlah Perolehan Medali di Tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional terhadap Nomor Kejuaraan yang Diikuti	

Pokok Visi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Meningkatkan Budaya Literasi di Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Meningkatnya Peran Perpustakaan Daerah dalam Mewujudkan Budaya Gemar Membaca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	DINPERPUSAR
			Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Menurunnya Kematian dan Kesakitan	Jumlah Kematian Balita	DINKESDA
								Jumlah Kasus Kematian Ibu	
								Prevalensi <i>Stunting</i>	
								Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM)	
								Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM)	
			Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan	Nilai Kinerja Kebudayaan	Memajukan Kebudayaan Daerah	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	Melestarikan Kebudayaan Daerah	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	DINDIKBUD



Pokok Visi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi Indeks Integritas Nasional	Meningkatnya Pengendalian Internal Pemerintah	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintah	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Korupsi	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	INSPEKTORAT DAERAH
							Meningkatnya Kualitas Kapabilitas APIP	Level kapabilitas APIP	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Berbasis Digital	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Layanan Digital	Indeks SPBE/ Indeks Pemerintah Digital	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	DINKOMINFO
							Meningkatnya Kualitas Layanan Sistem Elektronik	Indeks Tata Kelola SPBE	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Pelayanan Publik	Meningkatkan Inovasi Daerah	Kapabilitas Inovasi	Menguatnya Iklim Inovasi	Indeks Inovasi Daerah	BAPPERIDA
					Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	DINDUKCAPIL
							Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Catatan Sipil	Persentase Penduduk yang Memiliki Akta Catatan Sipil	
					Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatnya Responsivitas Pelayanan Publik	Persentase Aduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	KECAMATAN



Pokok Visi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Meningkatkan Tata Kelola Kearsipan	Nilai Pengawasan Kearsipan	Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Pengawasan Kearsipan >80	DINPERPUSAR
					Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanganan Bencana Kebakaran	Persentase Ketepatan Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) Penanganan Kebakaran	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kebakaran	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Laporan Kejadian Kebakaran	SATPOL PP
					Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Pelayanan Publik Sekretariat DPRD	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat DPRD	Persentase Agenda DPRD yang Terselesaikan Tepat Waktu	SET DPRD
			Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan	- Nilai SAKIP Pemerintah Daerah;	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Indeks Perencanaan Pembangunan	Terpenuhinya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan	



Pokok Visi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Pemerintahan Daerah	- Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)			Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset	Persentase Pemanfaatan Hasil Riset untuk Perencanaan	
					Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Laporan Keuangan	Terpenuhinya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	BPKPAD
								Persentase Penatausahaan Keuangan Sesuai Regulasi	
								Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	
								Indeks Pengelolaan Aset Daerah	
								Derajat Otonomi Fiskal	
					Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	SETDA

Pokok Visi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Setda	
							Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Setda	
			Meningkatnya Kinerja Aparatur	Indeks Sistem Merit	Meningkatkan Kompetensi Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	Meningkatnya Kualitas Aparatur	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	BKPSDM
							Meningkatnya Pengembangan Karir Aparatur	Persentase ASN yang Sesuai dengan Kompetensinya	
Demak Semakin Maju	Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Sektor Unggulan Daerah yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Daerah (Pertanian, Industri, Perdagangan, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Meningkatkan Perekonomian Sektor Pertanian	Pertumbuhan Ekonomi Subkategori Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Jasa Pertanian	Meningkatnya Produksi Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	Rata-Rata Pertumbuhan Produksi Komoditas Strategis Pertanian	DINPERTAN PANGAN
								Rata-Rata Pertumbuhan Produksi Komoditas Strategis Perkebunan	

Pokok Visi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Rata-Rata Pertumbuhan Produksi Komoditas Strategis Peternakan	DINLUTKAN
					Meningkatkan Perekonomian Sektor Perikanan	Pertumbuhan Ekonomi sub Kategori Perikanan	Meningkatnya produksi perikanan Tangkap dan Budidaya	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	
							Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Pertumbuhan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	
					Meningkatkan Perekonomian Sektor Perdagangan, Koperasi, dan UMKM	Pertumbuhan Ekonomi Kategori Perdagangan	Meningkatnya Perekonomian Sektor Perdagangan	Kontribusi Kategori Perdagangan dalam PDRB	DINDAGKOP UMKM
							Meningkatnya Perekonomian Sektor Koperasi	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	
							Meningkatnya Perekonomian Sektor UMKM	Pertumbuhan Nilai Produksi UMKM	
					Meningkatkan Perekonomian Sektor Industri	Pertumbuhan Ekonomi Kategori Industri	Meningkatnya Industri Kecil Menengah (IKM)	Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)	DINNAKERIND



Pokok Visi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Meningkatkan Perekonomian Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan Ekonomi Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata Daerah	Rata-rata Pengeluaran Wisatawan	DINPARTA
							Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	
			Meningkatnya Investasi Daerah	Pertumbuhan PMTB	Meningkatkan Investasi Daerah	Pertumbuhan PMTB	Meningkatnya Nilai Investasi	Pertumbuhan PMA dan PMDN	DPMPTSP
							Meningkatnya Pelayanan Kemudahan Investasi	Indeks Pelayanan Publik	
			Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	PDRB per Kapita	Mengurangi Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Rasio Kesempatan Kerja	DINNAKERIND
					Meningkatkan Penghidupan yang Layak bagi Pekerja	Persentase Pelaku Usaha yang Menerapkan UMK	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	DINNAKERIND
	Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas, Inklusif dan Berkelanjutan	Indeks Layanan Infrastruktur Daerah	Meningkatnya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	Indeks Kinerja Infrastruktur Daerah	Meningkatkan Pemenuhan Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Penurunan Kawasan Permukiman Kumuh	DINPERKIM
							Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak	Peningkatan Jumlah Rumah Layak Huni	



Pokok Visi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Meningkatkan Kualitas Layanan Jalan	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Jalan Kewenangan Kabupaten	Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik	DINPUTARU
					Meningkatkan Kualitas Layanan Sumber Daya Air	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten	DINPUTARU
								Luas Wilayah Rawan Banjir yang Tertangani	
							Meningkatnya Daya Tampung Drainase	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	
							Meningkatnya Pelayanan Air Minum dan Sanitasi untuk Masyarakat	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	
								Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Akses Air Minum Layak	
					Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	DINPUTARU

Pokok Visi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Meningkatnya Kualitas Penataan Bangunan Gedung	Rasio Bangunan Berizin	
							Meningkatnya Kualitas Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Partisipasi Tenaga Kerja Konstruksi dalam Pembangunan	
					Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah	Rasio Konektivitas	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Transportasi	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	DINHUB
Demak Semakin Sejahtera	Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Aman dan Nyaman	- Tingkat Kemiskinan; - Indeks Harmoni Indonesia; - Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Meningkatnya Pengentasan Kemiskinan dan Kehidupan yang Berkualitas	Indeks Gini	Meningkatkan Kemandirian PPKS	Persentase PPKS yang Mandiri Memenuhi Kebutuhan Dasarnya	Meningkatnya Layanan PPKS	Persentase PPKS yang Terakses Layanan Sosial Dasar	DINSOS P2PA
					Meningkatkan Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Berkelanjutan dan Berkualitas	Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	DINPERTAN PANGAN
								Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	
								Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU)	

Pokok Visi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Penduduk yang Tumbuh Seimbang	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Mengurangi Ketimpangan Gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Mewujudkan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Skor Kabupaten Layak Anak	DINSOS P2PA
							Meningkatkan Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender	DINSOS P2PA
					Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Menjaga Angka Kelahiran	Total Fertility Rate (TFR)	DINPERMADES P2KB
							Meningkatnya Kualitas Keluarga	Persentase Keluarga Berisiko Stunting	
			Meningkatnya Kondusivitas Wilayah	Persentase Gangguan Ketenteraman Ketertiban Umum (Trantibum) yang Dapat Diselesaikan	Meningkatkan Ketertiban dan Ketenteraman Kehidupan Bermasyarakat	Persentase Gangguan Ketenteraman Ketertiban Umum (Trantibum) yang Dapat Diselesaikan	Meningkatnya Perlindungan terhadap Masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP
				Angka Kejadian Konflik Sosial	Meningkatkan Stabilitas Sosial pada Kehidupan Masyarakat	Angka Kejadian Konflik Sosial	Meningkatnya Pemahaman Ideologi Pancasila dan Demokrasi	Persentase Konflik Sosial yang Dapat Dicegah	BAKESBANGPOL
			Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa	Mewujudkan Keberdayaan Desa	Persentase Desa Mandiri	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Persentase Desa yang Naik Status	DINPERMADES P2KB

Pokok Visi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Desa	Persentase Perkembangan Bumdes	
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Air	DLH
								Indeks Kualitas Udara	
								Indeks Tutupan Lahan	
							Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	DLH
							Meningkatnya Penerapan Ekonomi Hijau	Kontribusi Penurunan GRK Kumulatif Pendukung Ekonomi	DLH
			Menurunnya Dampak Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Meningkatkan Ketangguhan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya Ketangguhan Bencana Sampai Level Desa	Peningkatan Desa Tangguh Bencana	BPBD

3.2 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan dalam RPJMD menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan terarah, terukur, dan berkelanjutan. Strategi yang matang memungkinkan identifikasi prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah, sementara arah kebijakan menjadi panduan normatif yang memastikan seluruh program pembangunan selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Dengan demikian, RPJMD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai sinergi antar-sektor, efisiensi alokasi sumber daya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

3.2.1 Strategi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Strategi memegang peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Strategi memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang pembangunan. Strategi dirancang untuk menjembatani antara misi yang bersifat jangka panjang dengan kebijakan dan program konkret yang dapat diimplementasikan, sehingga setiap langkah pembangunan berjalan terarah dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Dalam RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2045, fokus pembangunan periode RPJMD Tahun 2025-2029 adalah penguatan fondasi transformasi. Hal ini dilakukan melalui pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, Pemenuhan pembangunan daerah yang memperhatikan kualitas sosial budaya masyarakat, Kelembagaan dan regulasi tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, digitalisasi pelayanan publik, Inisiasi penerapan ekonomi hijau dan biru serta penguatan riset, inovasi, dan digitalisasi untuk mendorong peningkatan produktivitas, Pemenuhan infrastruktur dan ketaatan penataan ruang wilayah dalam penanggulangan rob dan bencana, serta Pemenuhan perlindungan sosial yang adaptif. Strategi yang dapat disusun dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Demak adalah sebagai berikut.



Tabel III. 4
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Demak 2025-2030

Misi	Tujuan	Strategi dan Arah Kebijakan
MISI 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berakhlak	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berkarakter	1. Pemenuhan pelayanan pendidikan - Pemenuhan wajib belajar 13 tahun melalui perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi - Pemerataan akses dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan - Fasilitasi pengembangan pondok pesantren meliputi pendidikan, dakwah & pemberdayaan masyarakat - Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan - Penguatan kurikulum pendidikan yang berbasis kearifan dan budaya lokal, pengembangan talenta dan karakter
		2. Peningkatan kualitas pemuda dan keolahragaan daerah - Pemberdayaan pemuda melalui penguatan kapasitas, kemandirian dan kemampuan dalam pengambilan keputusan - peningkatan partisipasi dan prestasi pemuda di berbagai bidang - Peningkatan dukungan prestasi atlet daerah menuju kancah nasional dan internasional dan pembudayaan olahraga kepada masyarakat
		3. Pemenuhan pelayanan kesehatan - Perluasan upaya promotif-preventif melalui imunisasi dan deteksi dini, peningkatan literasi kesehatan, pembudayaan perilaku hidup sehat, dan peningkatan kesehatan lingkungan - Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan - Pengendalian penyakit tidak menular serta percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan - Percepatan penuntasan <i>stunting</i> dan permasalahan gizi



Misi	Tujuan	Strategi dan Arah Kebijakan
		e. Pemenuhan jumlah dan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan berkualitas f. Pemenuhan dan perluasan cakupan jaminan kesehatan
		4. Pemenuhan pembangunan daerah yang memperhatikan pemajuan budaya daerah a. Penguatan penanaman nilai-nilai budaya Jawa sejak dini dengan edukasi budaya Jawa mulai dari keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat terkecil b. Pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, kearifan lokal, tradisi, kesenian sebagai salah satu sumber perekonomian daerah, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat c. Penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama sebagai landasan spiritual, etika, dan moral dalam kehidupan masyarakat d. Peningkatan budaya literasi di masyarakat
MISI 2: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berintegritas	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas	1. Penguatan riset, inovasi, dan digitalisasi a. Penguatan budaya, iklim, dan karakter ilmiah b. peningkatan kerja sama riset dan inovasi dengan akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah lainnya, dan media c. Penguatan inkubasi hasil riset dan inovasi, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hak paten atas hasil riset dan inovasi. d. Penguatan sumber daya manusia melalui peningkatan literasi, keahlian, dan kompetensi digital e. Penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) f. Penguatan keamanan siber
		2. Kelembagaan dan regulasi tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, digitalisasi pelayanan publik a. Penguatan kelembagaan yang efektif b. Peningkatan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi berbasis kinerja dan manajemen risiko



Misi	Tujuan	Strategi dan Arah Kebijakan
		c. Penguatan manajemen pemerintahan yang adaptif, partisipatif, berorientasi pada hasil, berbasis riset, dan risiko d. Akselerasi peningkatan kompetensi ASN melalui penguatan manajemen ASN dan manajemen talenta secara efektif dan efisien e. Penguatan pelayanan publik yang cepat, tepat, berbasis digital, terintegrasi, serta keterbukaan pelayanan pengaduan masyarakat (<i>open government</i>) f. Penguatan layanan kependudukan dan catatan sipil sebagai dasar dalam penyusunan rumusan kebijakan kependudukan g. Pelaksanaan reforma agraria yang berkualitas h. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah serta peningkatan kualitas belanja daerah i. Penguatan integritas setiap penyelenggara pemerintahan dan pembudayaan anti korupsi di masyarakat j. Peningkatan kualitas digitalisasi manajemen kearsipan dan arsiparis yang berkompeten k. Peningkatan kualitas kebijakan berbasis Satu Data Indonesia l. Penguatan Layanan Adminduk yang Responsif, Inklusif, dan Berkualitas m. Peningkatan Integrasi Data dan Pemanfaatan Data Kependudukan
MISI 3: Mengembangkan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan dan Berbasis Potensi Lokal	Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	1. Inisiasi penerapan ekonomi hijau dan biru a. Penguatan aksi pembangunan rendah karbon termasuk dalam praktik pertanian, perikanan dan industri b. Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau dan biru c. Inisiasi penerapan ekonomi sirkuler dengan penekanan pada efisiensi sumber daya, pengurangan timbulan limbah dan emisi gas rumah kaca, perluasan kebijakan menuju 10 R (<i>refuse, rethink, reduce, reuse, recycle, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, and recover</i>)



Misi	Tujuan	Strategi dan Arah Kebijakan
		2. Peningkatan produktivitas tenaga kerja a. Penguatan pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri b. Penguatan sistem perlindungan tenaga kerja c. Penyediaan informasi pasar kerja dalam jangkauan luas berbasis digital terintegrasi dengan dunia usaha dunia industri 3. Peningkatan produktivitas potensi lokal daerah dan penguatan posisi global a. Penguatan riset dan inovasi di semua sektor pembangunan untuk meningkatkan produktivitas b. Penguatan <i>branding</i> daerah sebagai penumpu pangan dan industri hijau c. Peningkatan kontribusi dan produktivitas sektor industri pengolahan dan perdagangan d. Peningkatan mutu dan daya saing produk sektor unggulan e. Mendorong investasi dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif f. Peningkatan infrastruktur dasar berusaha g. Penguatan pengendalian inflasi daerah h. Peningkatan produktivitas dan efisiensi BUMD i. Pembangunan citra dan karakter kota untuk meningkatkan daya tarik pariwisata j. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis pemberdayaan masyarakat dan berkelanjutan k. Pengembangan pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan l. Akselerasi perwujudan Koperasi Desa untuk peningkatan ekonomi kerakyatan m. Peningkatan kelas UMKM melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku UMKM



Misi	Tujuan	Strategi dan Arah Kebijakan
		n. Pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan <i>halal value chain</i> o. Pengembangan kebijakan ekosistem halal
MISI 4: Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas, Inklusif dan Berkelanjutan	1. Pemenuhan infrastruktur, penguatan ketahanan air dan ketaatan penataan ruang wilayah a. Pemantapan jalan dan jembatan sesuai standar merata di seluruh wilayah b. Pemenuhan pelayanan transportasi umum untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah c. Percepatan penyediaan dan pemerataan kawasan permukiman dan rumah hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik wilayah d. Penguatan penyediaan sarana sanitasi aman bagi masyarakat e. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi f. Pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan peningkatan manajemen penggunaan air g. Penguatan implementasi penataan ruang terutama dalam perwujudan struktur ruang
MISI 5: Memperkuat Ketahanan Sosial dan Lingkungan yang Inklusif dan Berkelanjutan	Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Aman dan Nyaman	1. Pemenuhan perlindungan sosial yang adaptif a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin melalui peningkatan bantuan sosial, perluasan penyediaan jaminan sosial, pemberian subsidi layanan dasar, bantuan pendidikan, dan menjaga stabilitas harga b. Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin melalui penguatan usaha mikro dan kecil, perluasan akses permodalan, serta peningkatan kesempatan kerja, kapabilitas SDM, dan produktivitas sektor unggulan, yang didukung oleh keterbukaan informasi dan kebijakan investasi guna mendorong penanaman modal, membuka lapangan kerja, dan menurunkan pengangguran, khususnya bagi penduduk miskin



Misi	Tujuan	Strategi dan Arah Kebijakan
		c. Pengurangan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan infrastruktur dasar khususnya bagi kelompok penduduk rentan, menumbuhkan pusat perekonomian baru, mengurangi risiko bencana, pemanfaatan satu data kemiskinan, keterbukaan informasi mengenai akses modal dan kesempatan kerja, pengarusutamaan perencanaan dan penganggaran pengentasan kemiskinan d. Sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui pemanfaatan satu data kemiskinan dan pengarusutamaan perencanaan dan penganggaran pengentasan kemiskinan
		2. Penguatan ketahanan pangan a. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan b. Penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan
		3. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat yang inklusif a. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal b. Peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan anak c. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
		4. Perwujudan kondusivitas wilayah a. Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas b. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.
		5. Penguatan peran desa dalam pembangunan daerah a. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa b. Penguatan pemberdayaan masyarakat desa



Misi	Tujuan	Strategi dan Arah Kebijakan
		c. Penguatan kerja sama antar desa sebagai upaya pemerataan pertumbuhan ekonomi
		6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup a. Pengelolaan sampah terintegrasi hulu hilir dan berbasis masyarakat b. Mengembangkan tempat pengolahan akhir (TPA) sebagai penampungan residu dari TPST serta mengembangkan teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) dan teknologi lain yang dapat mereduksi sampah di TPA c. Penerapan 20% Ruang Terbuka Hijau Publik pada kawasan perkotaan d. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup e. peningkatan keindahan wilayah dengan memperhatikan pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan f. Pendekatan pertanian rendah karbon dan adaptif terhadap Perubahan Iklim untuk sektor pertanian (pengurangan emisi GRK dari kegiatan pertanian), seperti Peningkatan Cadangan Karbon Tanah Melalui Penggunaan Pupuk Organik Sebagai Dampak Penggunaan UPPO, Penggunaan Pupuk Organik, Sistem Pemupukan Berimbang, Penurunan Emisi CH₄ dari Lahan Sawah – <i>System Of Rice Intensification</i> (SRI), Penurunan Emisi CH₄ dari Lahan Sawah - Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), Penurunan Emisi CH₄ dari Lahan Sawah - Penggunaan Varietas Rendah Emisi;
		7. Peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim a. Penguatan mitigasi struktural dan non struktural dalam rangka adaptasi perubahan iklim dan membentuk masyarakat yang tangguh bencana b. Peningkatan upaya perlindungan pesisir dan mitigasi penurunan tanah



Misi	Tujuan	Strategi dan Arah Kebijakan
		8. Penanganan rob dengan pendekatan <i>incremental planning</i> a. penanganan rob skala kawasan yang melibatkan kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, dengan rencana aksi: - Pembangunan tanggul laut; - Pembangunan <i>hybrid sea wall</i>; - Peningkatan jalan utama; - Normalisasi sungai. b. penanganan rob skala <i>neighbourhood</i>, dengan rencana aksi: - Peningkatan layanan air minum dan sanitasi; - Revitalisasi kawasan permukiman; - Perbaikan rumah terdampak rob; - Relokasi warga terdampak. c. pengembangan kawasan rob, dengan rencana aksi: - Bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat pesisir; - Revitalisasi vegetasi mangrove; - Revitalisasi fasilitas umum (pasar, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, RTH, dsb); - Pengembangan pariwisata pesisir.

3.2.1.1 Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Demak 2025-2029

Pencapaian misi pembangunan daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas dan fokus pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah pada setiap misi pembangunan daerah Kabupaten Demak dijabarkan sebagai berikut:

MISI 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berakhlak

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berakhlak adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Pelayanan Pendidikan

Pemenuhan pelayanan pendidikan merupakan langkah strategis utama dalam mendukung misi “Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia” bagi pembangunan Kabupaten Demak. Pendidikan yang merata, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan zaman menjadi fondasi dalam mencetak generasi yang cerdas, terampil, dan berdaya saing tinggi. Pemerintah Kabupaten Demak menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas pembangunan jangka menengah dan panjang, dengan memastikan bahwa setiap warga, tanpa terkecuali, memiliki akses yang setara terhadap layanan pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah. Selain itu, pelayanan pendidikan yang berkualitas juga diiringi dengan pemenuhan kesejahteraan tenaga pendidikan. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pemenuhan wajib belajar 13 tahun melalui perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi
- b. Pemerataan akses dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
- c. Fasilitasi pengembangan pondok pesantren meliputi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat
- d. Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan
- e. Penguatan kurikulum pendidikan yang berbasis kearifan dan budaya lokal, pengembangan talenta dan karakter.

2. Peningkatan kualitas pemuda dan keolahragaan daerah

Pemuda adalah aset penting dalam pembangunan daerah. Dengan membina dan mengembangkan potensi pemuda secara sistematis, Kabupaten Demak dapat mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara fisik, berkarakter, dan memiliki jiwa kompetitif yang sehat. Pemkab Demak memprioritaskan pembangunan dan revitalisasi sarana-prasarana olahraga, pembinaan atlet melalui klub dan sekolah olahraga, serta penyelenggaraan *event* olahraga daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat sekaligus menjaring bibit atlet berprestasi.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan pemuda melalui penguatan kapasitas, kemandirian dan kemampuan dalam pengambilan keputusan
- b. Peningkatan partisipasi dan prestasi pemuda di berbagai bidang
- c. Peningkatan dukungan prestasi atlet daerah menuju kancah nasional dan internasional dan pembudayaan olahraga kepada masyarakat.

3. Pemenuhan pelayanan kesehatan

Kesehatan yang baik adalah prasyarat utama bagi setiap individu untuk menjalankan aktivitas sosialnya, termasuk untuk mengakses pendidikan maupun bekerja. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Demak berkomitmen memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang merata, terjangkau, dan berkualitas, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Perluasan upaya promotif-preventif melalui imunisasi dan deteksi dini, peningkatan literasi kesehatan, pembudayaan perilaku hidup sehat, dan peningkatan kesehatan lingkungan
 - b. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan
 - c. Pengendalian penyakit tidak menular serta percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan
 - d. Percepatan penuntasan *stunting* dan permasalahan gizi
 - e. Pemenuhan jumlah dan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan berkualitas
 - f. Pemenuhan dan perluasan cakupan jaminan kesehatan.
- ## 4. Pemenuhan pembangunan daerah yang memperhatikan pemajuan budaya daerah

Pemajuan budaya daerah merupakan salah satu strategi Pemerintah Kabupaten Demak untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di

Kabupaten Demak. Hal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga kearifan budaya lokal di tengah pembangunan yang terus menyesuaikan perkembangan zaman. Pembangunan yang selaras dengan pelestarian dan pengembangan budaya daerah tidak hanya memperkuat identitas masyarakat, tetapi juga menumbuhkan karakter, etika, dan rasa kebanggaan terhadap warisan lokal. Budaya menjadi bagian penting dalam membentuk SDM yang berintegritas, berdaya saing, dan memiliki jati diri yang kokoh di tengah arus globalisasi. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penguatan penanaman nilai-nilai budaya Jawa sejak dini dengan edukasi budaya Jawa mulai dari keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat terkecil
- b. Pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, kearifan lokal, tradisi, kesenian sebagai salah satu sumber perekonomian daerah, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat
- c. Penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama sebagai landasan spiritual, etika, dan moral dalam kehidupan masyarakat
- d. Peningkatan budaya literasi di masyarakat.

MISI 2: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berintegritas

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Penguatan riset, inovasi, dan digitalisasi

Perkembangan zaman yang semakin pesat menuntut pemerintah untuk terus melakukan riset, inovasi, dan digitalisasi sehingga pelayanan publik dan pembangunan daerah dapat berjalan secara optimal. Penguatan riset, inovasi, dan digitalisasi merupakan langkah strategis penting dalam mewujudkan misi *“Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berintegritas”* di Kabupaten Demak. Tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas memerlukan landasan kebijakan yang berbasis data dengan didukung inovasi pelayanan publik, serta penerapan teknologi digital yang mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penguatan budaya, iklim, dan karakter ilmiah
- b. Peningkatan kerja sama riset dan inovasi dengan akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah lainnya, dan media
- c. Penguatan inkubasi hasil riset dan inovasi, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hak paten atas hasil riset dan inovasi



- d. Penguatan sumber daya manusia melalui peningkatan literasi, keahlian, dan kompetensi digital
 - e. Penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
 - f. Penguatan keamanan siber.
2. Kelembagaan dan regulasi tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, digitalisasi pelayanan publik

Reformasi birokrasi untuk mewujudkan lembaga pemerintahan yang efektif selalu menjadi isu yang harus diselesaikan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang optimal. Peningkatan efektivitas kelembagaan dilakukan melalui penataan struktur organisasi perangkat daerah yang selaras dengan kebutuhan pembangunan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penyusunan regulasi yang jelas, operasional, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Hal ini juga harus didukung dengan peningkatan kompetensi dan kualitas ASN sebagai motor/ penggerak birokrasi pemerintahan.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penguatan kelembagaan yang efektif
- b. Peningkatan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi berbasis kinerja dan manajemen risiko
- c. Penguatan manajemen pemerintahan yang adaptif, partisipatif, berorientasi pada hasil, berbasis riset, dan risiko
- d. Akselerasi peningkatan kompetensi ASN melalui penguatan manajemen ASN dan manajemen talenta secara efektif dan efisien
- e. Penguatan pelayanan publik yang cepat, tepat, berbasis digital, terintegrasi, serta keterbukaan pelayanan pengaduan masyarakat (*open government*)
- f. Penguatan layanan kependudukan dan catatan sipil sebagai dasar dalam penyusunan rumusan kebijakan kependudukan
- g. Pelaksanaan reforma agraria yang berkualitas
- h. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah serta peningkatan kualitas belanja daerah
- i. Penguatan integritas setiap penyelenggara pemerintahan dan pembudayaan anti korupsi di masyarakat
- j. Peningkatan kualitas digitalisasi manajemen kearsipan dan arsiparis yang berkompeten
- k. Peningkatan kualitas kebijakan berbasis Satu Data Indonesia
- l. Penguatan Layanan Adminduk yang Responsif, Inklusif, dan Berkualitas



m. Peningkatan Integrasi Data dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

MISI 3: Mengembangkan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan dan Berbasis Potensi Lokal

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka Mengembangkan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan dan Berbasis Potensi Lokal adalah sebagai berikut:

1. Inisiasi penerapan ekonomi hijau dan biru

Inisiasi penerapan ekonomi hijau dan biru merupakan langkah strategis untuk mewujudkan misi “Mengembangkan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan dan Berbasis Potensi Lokal” dalam rangka mencapai visi “Demak yang semakin maju”. Ekonomi hijau menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya daratan secara berkelanjutan, seperti pertanian, kehutanan, dan energi terbarukan, sedangkan ekonomi biru berfokus pada pemanfaatan potensi kelautan dan perairan, termasuk perikanan, pariwisata bahari, serta perlindungan ekosistem pesisir. Melalui inisiasi penerapan ekonomi hijau dan biru yang terintegrasi, Kabupaten Demak diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penguatan aksi pembangunan rendah karbon termasuk dalam praktik pertanian, perikanan dan industri
- b. Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau dan biru
- c. Inisiasi penerapan ekonomi sirkuler dengan penekanan pada efisiensi sumber daya, pengurangan timbulan limbah dan emisi gas rumah kaca, perluasan kebijakan menuju 10 R (*refuse, rethink, reduce, reuse, recycle, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, and recover*)

2. Peningkatan produktivitas tenaga kerja

Produktivitas tenaga kerja yang tinggi menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi yang kompetitif. Pemerintah Kabupaten Demak memprioritaskan program pelatihan vokasi, sertifikasi profesi, dan pendampingan kewirausahaan bagi angkatan kerja, khususnya generasi muda. Selain itu, penguatan kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan menjadi langkah penting untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan pasar. Melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja yang terencana dan berkesinambungan, diharapkan tercipta SDM yang mampu mengelola potensi

lokal secara optimal, menghasilkan produk dan layanan berkualitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penguatan pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri
- b. Penguatan sistem perlindungan tenaga kerja
- c. Penyediaan informasi pasar kerja dalam jangkauan luas berbasis digital terintegrasi dengan dunia usaha dunia industri

3. Peningkatan produktivitas potensi lokal daerah dan penguatan posisi global

Kabupaten Demak memiliki berbagai potensi lokal yang dapat ditingkatkan produktivitasnya khususnya di bidang pertanian, perikanan, industri pengolahan, maupun pariwisata. Dengan keunggulan berbagai potensi tersebut yang dipadukan dengan budaya yang ada di Kabupaten Demak diharapkan dapat memperkuat daya saing Kabupaten Demak di kancah global. Strategi ini diarahkan pada peningkatan produktivitas melalui modernisasi proses produksi, penggunaan teknologi tepat guna, penguatan riset dan inovasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha. Selain itu, pemasaran produk lokal akan diperluas melalui pemanfaatan platform digital, promosi terpadu, dan pengembangan jejaring kemitraan baik di tingkat nasional maupun internasional. Melalui strategi ini, potensi lokal tidak hanya menjadi penggerak utama ekonomi daerah, tetapi juga mampu menembus pasar global.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penguatan riset dan inovasi di semua sektor pembangunan untuk meningkatkan produktivitas
- b. Penguatan *branding* daerah sebagai penunjang pangan dan industri hijau
- c. Peningkatan kontribusi dan produktivitas sektor industri pengolahan dan perdagangan
- d. Peningkatan mutu dan daya saing produk sektor unggulan
- e. Mendorong investasi dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif
- f. Peningkatan infrastruktur dasar berusaha
- g. Penguatan pengendalian inflasi daerah
- h. Peningkatan produktivitas dan efisiensi BUMD
- i. Pembangunan citra dan karakter kota untuk meningkatkan daya tarik pariwisata
- j. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis pemberdayaan masyarakat dan berkelanjutan



- k. Pengembangan pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan
- l. Akselerasi perwujudan Koperasi Desa untuk peningkatan ekonomi kerakyatan
- m. Peningkatan kelas UMKM melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku UMKM
- n. Pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan *halal value chain*
- o. Pengembangan kebijakan ekosistem halal

MISI 4: Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan infrastruktur, penguatan ketahanan air dan ketaatan penataan ruang wilayah

Infrastruktur yang memadai, didukung sistem pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan serta tata ruang yang tertib, menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang terencana, merata, dan berkelanjutan. Strategi ini mencakup pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, fasilitas publik, serta infrastruktur pendukung sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Dengan penerapan strategi ini, Kabupaten Demak diharapkan mampu menciptakan infrastruktur yang tidak hanya memperlancar konektivitas dan distribusi ekonomi, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan dan mengurangi risiko bencana. Langkah ini akan memperkuat daya saing daerah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menjadi pilar utama bagi terwujudnya “Demak semakin maju”.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pemantapan jalan dan jembatan sesuai standar merata di seluruh wilayah
- b. Pemenuhan pelayanan transportasi umum untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah
- c. Percepatan penyediaan dan pemerataan kawasan permukiman dan rumah hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik wilayah
- d. Penguatan penyediaan sarana sanitasi aman bagi masyarakat
- e. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi
- f. Pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan peningkatan manajemen penggunaan air



- g. Penguatan implementasi penataan ruang terutama dalam perwujudan struktur ruang

MISI 5: Memperkuat Ketahanan Sosial dan Lingkungan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka Memperkuat Ketahanan Sosial dan Lingkungan yang Inklusif dan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan perlindungan sosial yang adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif berarti sistem perlindungan yang mampu merespons cepat perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan, termasuk menghadapi risiko bencana alam, krisis ekonomi, maupun guncangan sosial, sehingga masyarakat tetap terlindungi hak-hak sosialnya. Strategi ini mencakup penguatan basis data terpadu kesejahteraan sosial untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran, pengembangan program bantuan sosial yang fleksibel terhadap kondisi darurat, serta peningkatan kapasitas kelembagaan

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin melalui peningkatan bantuan sosial, perluasan penyediaan jaminan sosial, pemberian subsidi layanan dasar, bantuan pendidikan, dan menjaga stabilitas harga
- b. Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin melalui penguatan usaha mikro dan kecil, perluasan akses permodalan, serta peningkatan kesempatan kerja, kapabilitas SDM, dan produktivitas sektor unggulan, yang didukung oleh keterbukaan informasi dan kebijakan investasi guna mendorong penanaman modal, membuka lapangan kerja, dan menurunkan pengangguran, khususnya bagi penduduk miskin
- c. Pengurangan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan infrastruktur dasar khususnya bagi kelompok penduduk rentan, menumbuhkan pusat perekonomian baru, mengurangi risiko bencana, pemanfaatan satu data kemiskinan, keterbukaan informasi mengenai akses modal dan kesempatan kerja, pengarusutamaan perencanaan dan penganggaran pengentasan kemiskinan
- d. Sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui pemanfaatan satu data kemiskinan dan pengarusutamaan perencanaan dan penganggaran pengentasan kemiskinan

2. Penguatan ketahanan pangan

Ketahanan pangan tidak hanya memastikan ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi seluruh masyarakat, tetapi juga menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas sosial, meningkatkan kualitas kesehatan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Dengan strategi penguatan ketahanan pangan ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Demak memiliki akses yang berkelanjutan terhadap pangan yang berkualitas. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan
- b. Penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan

3. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat yang inklusif

Keluarga yang berkualitas dan sejahtera menjadi wadah utama pembentukan karakter, pendidikan, dan nilai-nilai sosial. Kesetaraan gender memastikan setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang setara untuk berperan dalam pembangunan.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
- b. Peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan anak
- c. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.

4. Perwujudan kondusivitas wilayah

Kondusivitas wilayah mencakup terciptanya stabilitas keamanan, ketertiban, dan harmoni sosial yang menjadi prasyarat bagi kelancaran pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Wilayah yang aman dan tertib akan mendorong partisipasi aktif masyarakat serta mampu menarik investasi di suatu daerah. Pemerintah Kabupaten Demak juga mendorong peningkatan kesadaran hukum, pendidikan kebangsaan, dan pelibatan generasi muda dalam kegiatan positif yang memperkuat rasa persatuan.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas
- b. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.

5. Penguatan peran desa dalam pembangunan daerah

Desa memiliki potensi sumber daya alam, sosial, budaya, dan ekonomi yang bila dikelola secara optimal akan memberikan kontribusi signifikan terhadap

kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Melalui penguatan peran desa, pembangunan Kabupaten Demak akan lebih merata dan inklusif. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat
- b. Penguatan pemberdayaan masyarakat desa
- c. Penguatan kerja sama antar desa sebagai upaya pemerataan pertumbuhan

6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Peningkatan kualitas lingkungan hidup menjadi salah satu langkah strategis yang esensial dalam menjalankan misi “*Memperkuat Ketahanan Sosial dan Lingkungan yang Inklusif dan Berkelanjutan*” untuk mewujudkan visi “*Demak semakin sejahtera*”. Lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari merupakan fondasi penting bagi kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan ekonomi, dan ketahanan sosial daerah. Strategi ini diarahkan pada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pelestarian ekosistem pesisir dan darat, serta pengelolaan sumber daya alam secara bijak. Upaya seperti rehabilitasi lahan kritis, penguatan pengelolaan sampah berbasis *reduce, reuse, recycle* (3R), peningkatan ruang terbuka hijau, dan normalisasi daerah aliran sungai menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Demak.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan sampah terintegrasi hulu hilir dan berbasis masyarakat
- b. Mengembangkan tempat pengolahan akhir (TPA) sebagai penampungan residu dari TPST serta mengembangkan teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dan teknologi lain yang dapat mereduksi sampah di TPA
- c. Penerapan 20% Ruang Terbuka Hijau Publik pada kawasan perkotaan
- d. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- e. Peningkatan keindahan wilayah dengan memperhatikan pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan
- f. Pendekatan pertanian rendah karbon dan adaptif terhadap Perubahan Iklim untuk sektor pertanian (pengurangan emisi GRK dari kegiatan pertanian), seperti Peningkatan Cadangan Karbon Tanah Melalui Penggunaan Pupuk Organik Sebagai Dampak Penggunaan UPPO, Penggunaan Pupuk Organik, Sistem Pemupukan Berimbang, Penurunan Emisi CH₄ dari Lahan Sawah – *System of Rice Intensification* (SRI), Penurunan Emisi CH₄ dari Lahan Sawah - Pengelolaan Tanaman



Terpadu (PTT), Penurunan Emisi CH₄ dari Lahan Sawah - Penggunaan Varietas Rendah Emisi.

7. Peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

Kabupaten Demak memiliki kerentanan yang cukup tinggi terhadap berbagai ancaman bencana, seperti banjir, rob, abrasi pantai, serta dampak perubahan iklim yang mempengaruhi pola curah hujan dan produktivitas pertanian. Strategi peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim menjadi langkah strategis penting dalam mendukung misi “Memperkuat Ketahanan Sosial dan Lingkungan yang Inklusif dan Berkelanjutan” demi mewujudkan pokok visi “Demak semakin sejahtera”.

Pendekatan ini diarahkan pada penguatan kapasitas pemerintah daerah, desa, dan masyarakat dalam mitigasi serta adaptasi terhadap risiko bencana. Langkah yang diambil meliputi pengembangan sistem peringatan dini yang terintegrasi, peningkatan kualitas infrastruktur tahan bencana, rehabilitasi ekosistem seperti hutan mangrove untuk meredam gelombang, serta penataan tata ruang yang berbasis mitigasi risiko. Selain itu, edukasi publik dan pelatihan kesiapsiagaan bencana digencarkan agar masyarakat memiliki kemampuan adaptif, tangguh, dan cepat pulih pasca bencana.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penguatan mitigasi struktural dan non struktural dalam rangka adaptasi perubahan iklim dan membentuk masyarakat yang tangguh bencana
- b. Peningkatan upaya perlindungan pesisir dan mitigasi penurunan tanah

8. Penanganan rob dengan pendekatan *incremental planning*

Penanganan rob di Kabupaten Demak dengan pendekatan *incremental planning* menjadi langkah strategis yang krusial dalam mewujudkan misi “Memperkuat Ketahanan Sosial dan Lingkungan yang Inklusif dan Berkelanjutan” serta pokok visi “Demak semakin sejahtera”. Rob yang terus melanda wilayah pesisir Demak tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada degradasi lingkungan, kerusakan infrastruktur, dan penurunan kualitas hidup. Pendekatan *incremental planning* diterapkan dengan perencanaan bertahap yang realistis, adaptif, dan berkesinambungan.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. penanganan rob skala kawasan yang melibatkan kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, dengan rencana aksi:
 - Pembangunan tanggul laut;
 - Pembangunan *hybrid sea wall*;

- Peningkatan jalan utama;
 - Normalisasi sungai.
- b. penanganan rob skala *neighbourhood*, dengan rencana aksi:
- Peningkatan layanan air minum dan sanitasi;
 - Revitalisasi kawasan permukiman;
 - Perbaikan rumah terdampak rob;
 - Relokasi warga terdampak.
- c. pengembangan kawasan rob, dengan rencana aksi:
- Bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat pesisir;
 - Revitalisasi vegetasi mangrove;
 - Revitalisasi fasilitas umum (pasar, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, RTH, dsb);
 - Pengembangan pariwisata pesisir.

3.2.2 Arah Kebijakan Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Demak tahun 2026-2030 akan semakin optimal dengan didukung oleh arah kebijakan yang akan dijabarkan menjadi arah kebijakan pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan tahunan ini akan menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan setiap tahun untuk penentuan tema dan prioritas daerah setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan setiap tahunnya dirumuskan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran, strategi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tabel III. 5
Tahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Demak 2026-2030

Tema RPJMD Tahap I				
Tema Tahap I Tahun 2026	Tema Tahap II Tahun 2027	Tema Tahap III Tahun 2028	Tema Tahap IV Tahun 2029	Tema Tahap V Tahun 2030
Menguatkan posisi Demak sebagai Penumpu Pangan Jawa Tengah	Menguatkan sektor unggulan daerah sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi	Inisiasi ekonomi hijau untuk mendukung ekonomi berkelanjutan	Meningkatkan daya saing daerah menuju Demak bermartabat, maju, dan sejahtera	Perwujudan Demak Semakin Bermartabat, Maju, dan Sejahtera
Pengembangan pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan	Penguatan daya saing produk unggulan daerah berbasis teknologi, riset dan inovasi, dan ramah lingkungan	Penguatan aksi pembangunan rendah karbon	Penguatan riset dan inovasi di semua sektor pembangunan untuk meningkatkan produktivitas	Pemenuhan pelayanan pendidikan

Tema RPJMD Tahap I				
Tema Tahap I Tahun 2026	Tema Tahap II Tahun 2027	Tema Tahap III Tahun 2028	Tema Tahap IV Tahun 2029	Tema Tahap V Tahun 2030
Penerapan praktik pertanian rendah karbon melalui integrasi program prioritas penurunan emisi GRK dalam program peningkatan produksi pangan	Peningkatan penyediaan infrastruktur pendukung perekonomian	Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau	Penguatan <i>branding</i> daerah sebagai penumpu pangan dan industri hijau	Peningkatan kualitas pemuda
Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi hulu-hilir	Penguatan IKM dan UMKM berbasis potensi lokal	Peningkatan ekonomi sirkular dengan penekanan pada efisiensi sumber daya, pengurangan timbulan limbah dan emisi gas rumah kaca, perluasan kebijakan menuju 10 R (<i>refuse, rethink, reduce, reuse, recycle, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, and recover</i>)	Peningkatan mutu dan daya saing produk sektor unggulan.	Pemenuhan pelayanan kesehatan
Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi untuk ekspor	Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia terutama yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, UMKM, industri dan pariwisata	Akselerasi tata kelola persampahan meliputi aspek regulasi kelembagaan, pendanaan serta pengelolaan sampah di hulu dan hilir	Hilirisasi industri	Pemenuhan pembangunan daerah yang memperhatikan pemajuan budaya daerah
Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani dan nelayan guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi	Fasilitasi perluasan akses pasar, kemitraan, modal/pembiayaan inovatif, kemasan, standar produk, dan manajemen usaha	Sinkronisasi, integrasi, dan penyelarasan perencanaan serta pelaksanaan pembangunan industri dengan nasional dan provinsi	Penguatan citra dan karakter kota untuk meningkatkan daya tarik pariwisata	penguatan riset, inovasi, dan digitalisasi
Penyediaan infrastruktur esensial terintegrasi yang mendukung produktivitas pertanian dan perikanan serta daya saing produk pertanian dan perikanan	Penguatan koperasi sebagai konsolidator UMKM	Peningkatan penyediaan infrastruktur pendukung industri pengolahan ramah lingkungan	Penanganan rob skala kawasan yang melibatkan kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat	Kelembagaan dan regulasi tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, digitalisasi pelayanan publik
Penyediaan sarana pertanian dan perikanan yang modern dan ramah lingkungan	Pengembangan citra dan karakter kota untuk meningkatkan daya tarik pariwisata	Penguatan integrasi rantai pasok antar industri	Penanganan rob skala <i>neighbourhood</i>	Inisiasi penerapan ekonomi hijau dan biru

Tema RPJMD Tahap I				
Tema Tahap I Tahun 2026	Tema Tahap II Tahun 2027	Tema Tahap III Tahun 2028	Tema Tahap IV Tahun 2029	Tema Tahap V Tahun 2030
Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah, serta pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan	Mendorong pariwisata berkelanjutan serta <i>multiplier effect</i>	Penerapan prinsip-prinsip industri hijau	Pengembangan kawasan rob	peningkatan produktivitas tenaga kerja
Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian dan perikanan	Peningkatan kualitas event dan destinasi wisata dengan perbaikan sarana prasarana dan pemenuhan konektivitas antar destinasi wisata	Penguatan implementasi penataan ruang terutama dalam perwujudan struktur ruang		peningkatan produktivitas potensi lokal daerah dan penguatan posisi global
Pengembangan petani dan nelayan muda agar terjadi regenerasi secara berkelanjutan	Pengembangan dan penguatan jejaring komunitas kreatif	Penguatan perekonomian desa melalui pemberdayaan masyarakat desa		Pemenuhan infrastruktur, penguatan ketahanan air dan ketaatan penataan ruang wilayah
Pengembangan urban farming	Pengembangan pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan			Pemenuhan perlindungan sosial yang adaptif
Korporasi pertanian dan perikanan melalui perluasan kelembagaan ekonomi petani/nelayan yang berbadan hukum dan sinergis dengan pembiayaan dan badan usaha lainnya	Korporasi pertanian dan perikanan melalui perluasan kelembagaan ekonomi petani/nelayan yang berbadan hukum dan sinergis dengan pembiayaan dan badan usaha lainnya			penguatan ketahanan pangan
pengendalian dan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan	Mendorong investasi dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif			Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat yang inklusif
Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan	Pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan halal <i>value chain</i>			Perwujudan kondusivitas wilayah
Penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan				Penguatan peran desa dalam pembangunan daerah
Pencegahan pemborosan pangan (<i>food loss and waste</i>)				Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Tema RPJMD Tahap I				
Tema Tahap I Tahun 2026	Tema Tahap II Tahun 2027	Tema Tahap III Tahun 2028	Tema Tahap IV Tahun 2029	Tema Tahap V Tahun 2030
Peningkatan kinerja sistem irigasi				Peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim
Pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan peningkatan manajemen penggunaan air				

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025-2029 dijabarkan sebagai berikut:

ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2026

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 diarahkan dengan tema pembangunan daerah **“Menguatkan posisi Demak sebagai Penumpu Pangan Jawa Tengah”** dengan prioritas daerah meliputi:

- a. Pengembangan pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan
- b. Penerapan praktik pertanian rendah karbon melalui integrasi program prioritas penurunan emisi GRK dalam program peningkatan produksi pangan
- c. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi hulu-hilir
- d. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi untuk ekspor
- e. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani dan nelayan guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi
- f. Penyediaan infrastruktur esensial terintegrasi yang mendukung produktivitas pertanian dan perikanan serta daya saing produk pertanian dan perikanan
- g. Penyediaan sarana pertanian dan perikanan yang modern dan ramah lingkungan
- h. Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah, serta pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan
- i. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian dan perikanan
- j. Pengembangan petani dan nelayan muda agar terjadi regenerasi secara berkelanjutan
- k. Pengembangan *urban farming*



- l. Korporasi pertanian dan perikanan melalui perluasan kelembagaan ekonomi petani/nelayan yang berbadan hukum dan sinergis dengan pembiayaan dan badan usaha lainnya
- m. pengendalian dan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan
- n. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan
- o. Penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan
- p. Pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*)
- q. Peningkatan kinerja sistem irigasi
- r. Pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan peningkatan manajemen penggunaan air

ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2027

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027 diarahkan dengan tema pembangunan daerah **“Menguatkan sektor unggulan daerah sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi”** dengan prioritas daerah meliputi:

- a. Penguatan daya saing produk unggulan daerah berbasis teknologi, riset dan inovasi, dan ramah lingkungan
- b. Peningkatan penyediaan infrastruktur pendukung perekonomian
- c. Penguatan IKM dan UMKM berbasis potensi lokal
- d. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia terutama yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, UMKM, industri dan pariwisata
- e. Fasilitasi perluasan akses pasar, kemitraan, modal/pembiayaan inovatif, kemasan, standar produk, dan manajemen usaha
- f. Penguatan koperasi sebagai konsolidator UMKM
- g. Pengembangan citra dan karakter kota untuk meningkatkan daya tarik pariwisata
- h. Mendorong pariwisata berkelanjutan serta *multiplier effect*
- i. Peningkatan kualitas *event* dan destinasi wisata dengan perbaikan sarana prasarana dan pemenuhan konektivitas antar destinasi wisata
- j. Pengembangan dan penguatan jejaring komunitas kreatif
- k. Pengembangan pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan
- l. Korporasi pertanian dan perikanan melalui perluasan kelembagaan ekonomi petani/nelayan yang berbadan hukum dan sinergis dengan pembiayaan dan badan usaha lainnya
- m. Mendorong investasi dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif
- n. Pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan *halal value chain*



ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2028

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2028 diarahkan dengan tema pembangunan daerah **“Inisiasi ekonomi hijau untuk mendukung ekonomi berkelanjutan”** dengan prioritas daerah meliputi:

- a. Penguatan aksi pembangunan rendah karbon
- b. Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau
- c. Peningkatan ekonomi sirkular dengan penekanan pada efisiensi sumber daya, pengurangan timbulan limbah dan emisi gas rumah kaca, perluasan kebijakan menuju 10 R (*refuse, rethink, reduce, reuse, recycle, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, recover*)
- d. Akselerasi tata kelola persampahan meliputi aspek regulasi kelembagaan, pendanaan serta pengelolaan sampah di hulu dan hilir
- e. Sinkronisasi, integrasi, dan penyelarasan perencanaan serta pelaksanaan pembangunan industri dengan nasional dan provinsi
- f. Peningkatan penyediaan infrastruktur pendukung industri pengolahan ramah lingkungan
- g. Penguatan integrasi rantai pasok antar industri
- h. Penerapan prinsip-prinsip industri hijau
- i. Penguatan implementasi penataan ruang terutama dalam perwujudan struktur ruang
- j. Penguatan perekonomian desa melalui pemberdayaan masyarakat desa

ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2029

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2029 diarahkan dengan tema pembangunan daerah **“Meningkatkan daya saing daerah menuju Demak bermartabat, maju, dan sejahtera”** dengan prioritas daerah meliputi:

- a. Penguatan riset dan inovasi di semua sektor pembangunan untuk meningkatkan produktivitas
- b. Penguatan *branding* daerah sebagai penumpu pangan dan industri hijau
- c. Peningkatan mutu dan daya saing produk sektor unggulan.
- d. Hilirisasi industri
- e. Penguatan citra dan karakter kota untuk meningkatkan daya tarik pariwisata
- f. Penanganan rob skala kawasan yang melibatkan kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat
- g. Penanganan rob skala *neighbourhood*
- h. Pengembangan kawasan rob



ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2030

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2030 diarahkan dengan tema pembangunan daerah **“Perwujudan Demak Semakin Bermartabat, Maju, dan Sejahtera”** dengan prioritas daerah meliputi:

- a. Pemenuhan pelayanan pendidikan
- b. Peningkatan kualitas pemuda
- c. Pemenuhan pelayanan kesehatan
- d. Pemenuhan pembangunan daerah yang memperhatikan pemajuan budaya daerah
- e. penguatan riset, inovasi, dan digitalisasi
- f. Kelembagaan dan regulasi tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, digitalisasi pelayanan publik
- g. Inisiasi penerapan ekonomi hijau dan biru
- h. peningkatan produktivitas tenaga kerja
- i. peningkatan produktivitas potensi lokal daerah dan penguatan posisi global
- j. Pemenuhan infrastruktur, penguatan ketahanan air dan ketaatan penataan ruang wilayah
- k. Pemenuhan perlindungan sosial yang adaptif
- l. penguatan ketahanan pangan
- m. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat yang inklusif
- n. Perwujudan kondusivitas wilayah
- o. Penguatan peran desa dalam pembangunan daerah
- p. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
- q. Peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

3.2.3 Program–Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

a. Program Prioritas Pembangunan Daerah Penerjemahan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati

Program prioritas pembangunan daerah sebagai penerjemahan kinerja dari visi-misi Bupati-Wakil Bupati merupakan rangkaian program yang diturunkan kinerjanya dari visi-misi dan tujuan-sasaran daerah menjadi program perangkat daerah. Adapun program-program tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel III.6

Pemetaan Program Prioritas Kabupaten Demak Periode 2025-2029

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKAT KAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING DAN BERAKHLAK	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	- Harapan Lama Sekolah (HLS) - Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pendidikan Institusional	- Literasi Membaca SD/Sederajat; - Numerasi SD/Sederajat; - Literasi Membaca SMP/Sederajat; - Numerasi SMP/Sederajat	Terwujudnya Aksesibilitas Pendidikan	- Angka Partisipasi Murni (APM) Usia 7-12 Tahun; - Angka Partisipasi Murni (APM) 13-15 Tahun	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
										Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar		
										Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama		
										Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi dalam		

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										Pendidikan Kesetaraan		
							Meningkatnya Mutu Pembelajaran	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Meningkatnya Kapasitas dan Daya Saing Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikat Profesi	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
										Indeks Distribusi Guru		
									Meningkatnya Kurikulum Berbasis Karakter	Persentase Muatan Lokal yang Telah Memiliki Silabus dan Kurikulum	Program Pengembangan Kurikulum	
					Meningkatkan Kualitas Pemuda dan Prestasi Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Cakupan Organisasi Kepemudaan yang Dibina	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
									Meningkatnya Kapasitas Kepramukaan	Persentase Organisasi Pramuka Aktif	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	
						Rasio Prestasi Olahraga di Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional terhadap Nomor Kejuaraan yang Diikuti	Meningkatnya Prestasi Olah Raga	Jumlah Perolehan Medali di Tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional terhadap Nomor Kejuaraan yang Diikuti	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Jumlah Atlet Berprestasi	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
					Meningkatkan Budaya Literasi di Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Meningkatnya Peran Perpustakaan Daerah dalam	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar	Rasio Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							Mewujudkan Budaya Gemar Membaca Masyarakat	Masyarakat (TGM)	Nasional Perpustakaan			DINAS KESEHATAN DAERAH
									Meningkatnya Ketersediaan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Peningkatan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	
			Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Menurunnya Kematian dan Kesakitan	- Jumlah Kematian Balita - Jumlah Kasus Kematian Ibu - Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita - Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM) - Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM)	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Wasting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
										Rata-rata Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Urusan Kesehatan Masyarakat		
										Rata-rata Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Urusan Pengendalian Penyakit		
										Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna		
										Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		
										Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan		

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										Pelayanan Sesuai Standar		
										Prevalensi Obesitas > 18 Tahun		
										Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis		
										Persentase Depresi yang Mendapatkan Layanan pada Usia ≥ 15 Tahun		
										Cakupan Penemuan Kasus TB		
										Angka Keberhasilan Pengobatan TB (<i>treatment success rate</i>)*		
									Meningkatnya Kualitas Tenaga Kesehatan dan Pelayanan Fasilitas	Persentase Tenaga Kesehatan Berkompetensi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	DINAS KESEHATAN DAERAH
										Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis Terhadap Populasi		
									Meningkatnya Jaminan Keamanan, Kualitas Ketersediaan Farmasi, Alat	Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan	DINAS KESEHATAN DAERAH

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
									Kesehatan dan Makanan Minuman	Serta Sarana Produksi Makanan dan Minuman Sesuai Ketentuan	Makanan Minuman		
									Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar				
									Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Dari Lintas Sektor yang Ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah				
										Meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Promosi Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Rumah Tangga PHBS (Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat)	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	DINAS KESEHATAN DAERAH
											Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup		
											Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan	Nilai Kinerja Kebudayaan	Memajukan Kebudayaan Daerah

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						dan Cagar Budaya yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan				Benda yang Dilestarikan	Pengelolaan Cagar Budaya	
									Meningkatnya Tata Kelola Museum	Persentase Peningkatan Kunjungan Museum	Program Pengelolaan Permuseuman	
									Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan	Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/ Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir	Program Pengembangan Kebudayaan	
MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERINTEGRITAS	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas	- Indeks Reformasi Birokrasi - Indeks Integritas Nasional	Meningkatnya Pengendalian Internal Pemerintah	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintah	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Korupsi	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Meningkatnya Kualitas Pendampingan Dan Asistensi	Indeks Manajemen Risiko	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	INSPEKTORAT DAERAH
							Meningkatnya Kualitas Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan	Tindakanlanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran Sebelumnya	Program Penyelenggaraan Pengawasan	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Berbasis Digital	- Indeks Kepuasan Masyarakat - Indeks Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Layanan Digital	Indeks Pemerintah Digital	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi Publik	Indeks PPID	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
										Indeks Satu Data Indonesia	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
									Meningkatnya Kualitas Layanan Sistem Elektronik	Persentase Aplikasi E-Government yang Terintegrasi dengan Portal Daerah	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Indeks Keamanan Informasi	Program Penyelenggara an Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
					Meningkatkan inovasi daerah	Kapabilitas inovasi	Menguatnya iklim inovasi	Indeks Inovasi Daerah	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan Perangkat Daerah dalam berinovasi	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dan perangkat daerah dalam berinovasi	Program Riset Dan Inovasi Daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
									Meningkatnya inovasi yang mendapatkan HAKI	Persentase inovasi yang mendapatkan HAKI	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
					Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Meningkatnya Tata Kelola Data Kependudukan	Persentase Penduduk Wajib KTP Yang Memiliki KTP Elektronik	Program Pendaftaran Penduduk	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
									Menyediakan Data Kependudukan yang Valid dan <i>Reliable</i>	Persentase Institusi/ Lembaga/ Badan Hukum yang Difasilitasi Pemanfaatan Data Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
							Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Catatan Sipil	Persentase Penduduk yang Memiliki Akta Catatan Sipil	Meningkatnya Tata Kelola Data Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Balita	Program Pencatatan Sipil	
										Cakupan Kepemilikan Akta Nikah		
										Cakupan Kepemilikan Akta Cerai		

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										Cakupan Kepemilikan Akta Kematian		
					Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik PD	Meningkatnya Responsivitas Pelayanan Publik	Persentase Aduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	KECAMATAN
									Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan yang Aktif	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
									Meningkatnya Keamanan Wilayah	Cakupan Keamanan Wilayah	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
									Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
									Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Meningkatkan Tata Kelola Kearsipan	Nilai Pengawasan Kearsipan	Meningkatnya Tata Kelola Kearsipan Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Pengawasan Kearsipan >80	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Aplikasi Pengolahan Arsip Digital	Program Pengelolaan Arsip	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	
					Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanganan Bencana Kebakaran	Persentase Ketepatan Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) Penanganan Kebakaran	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kebakaran	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Lapor Kejadian Kebakaran	Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi Dan Edukasi Rawan Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulang an, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
									Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		
					Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Pelayanan Publik Sekretariat DPRD	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan Tepat Waktu	Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
								Indeks Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		
			Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Nilai SAKIP Pemerintah Daerah - IPKD	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Indeks Perencanaan Pembangunan	Terpenuhinya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan	Terpenuhinya Keselarasan RKPD dengan RPJMD	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN , RISET DAN INOVASI DAERAH

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
									Terpenuhinya Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah dengan Dokumen Perencanaan PD	Persentase Kesesuaian Renstra - Renja dan RKPD - Renja Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			
										Persentase Kesesuaian Renstra - Renja dan RKPD - Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				
									Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset	Persentase Pemanfaatan Hasil Riset untuk Perencanaan	Terlaksananya Riset Sesuai Rencana Induk Riset		Persentase Riset yang Dilaksanakan Sesuai Rencana Induk Riset	Program Penelitian dan Pengembangan an Daerah
											Tersusunnya Hasil Riset yang Menjadi Rekomendasi Kebijakan		Persentase Hasil Riset yang Menjadi Rekomendasi Kebijakan	Program Riset dan Inovasi Daerah
						Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Laporan Keuangan	Terpenuhinya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	Terpenuhinya Keselarasan Proses Perencanaan dan Penganggaran	Skor Kesesuaian Pagu Program Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		
									Persentase Penatausaha an Keuangan	Terpenuhinya Penatausahaan dan Pertanggung	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintahan			

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
								Sesuai Regulasi	Jawaban Keuangan yang Baik	Daerah Sesuai Kaidah Perundangan		SEKRETARIAT DAERAH		
								Laporan Keuangan Sesuai SAP	Terselesaikan nya Laporan Keuangan SKPD Sesuai SAP	Persentase Laporan SKPD yang Telah Diselesaikan Sesuai SAP				
								Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dimanfaatkan			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
								Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Derajat Otonomi Fiskal	Meningkatnya Realisasi PAD			Deviasi Realisasi PAD terhadap Target PAD dalam APBD	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
							Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Persentase Kebijakan Bidang Administrasi Tata Pemerintahan yang Difasilitasi	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
													Persentase Kerjasama Daerah yang Difasilitasi	
													Indeks Reformasi Hukum	
													Indeks Kualitas Kebijakan	
					Nilai Aksi HAM Daerah									
					Persentase Fasilitasi Kebijakan Urusan									

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										Kesejahteraan Rakyat		
							Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Setda	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Urusan Perekonomian yang Difasilitasi	Program Perekonomian dan Pembangunan	SEKRETARIAT DAERAH
										Persentase Kebijakan Urusan SDA yang Difasilitasi		
										Persentase Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD yang Difasilitasi		
										Capaian Progres Pekerjaan Konstruksi Daerah		
										Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)		
							Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Setda	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Lingkup Setda	IKM Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Setda)	SEKRETARIAT DAERAH
										Persentase Kegiatan Pimpinan yang Terfasilitasi		
									Meningkatnya Perencanaan di Sekretariat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersusun		
									Meningkatnya Kematangan Organisasi	Nilai Kematangan Organisasi		

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									Meningkatnya Kualitas Kinerja PD	Persentase Kualitas Pelaporan Kinerja PD Kategori "Baik"		
									Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki IPP Kategori "Pelayanan Prima" pada PEKPP Mandiri		
			Meningkatnya Kinerja Aparatur	Indeks Sistem Merit	Meningkatkan Kompetensi Aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	Meningkatnya Kualitas Aparatur	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Terlaksananya Rencana Pengembangan Kompetensi	Persentase Implementasi Rencana Program Pengembangan Kompetensi	Program Pengembangan an Sumber Daya Manusia	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Meningkatnya Pengembangan Karier Aparatur	Persentase ASN yang Sesuai dengan Kompetensinya	Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karier ASN	Persentase Pengembangan Karier ASN Sesuai dengan Kompetensinya	Program Kepegawaian Daerah	
								Terpenuhinya Kebutuhan Formasi ASN	Persentase Formasi Kebutuhan ASN yang Terisi			
								Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya			
								Meningkatnya Pembinaan Disiplin Pegawai	Persentase Tingkat Kedisiplinan			

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
MENGEMBANGKAN EKONOMI DAERAH YANG BERKELANJUTAN DAN BERBASIS POTENSI LOKAL	Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Sektor Unggulan Daerah yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Daerah (Pertanian, Industri, Perdagangan, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Meningkatkan Perekonomian Sektor Pertanian	Pertumbuhan Ekonomi sub Kategori Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Jasa Pertanian	Meningkatnya Produksi Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	- Rata-Rata Pertumbuhan Produksi Komoditas Strategis Pertanian - Rata-Rata Pertumbuhan Produksi Komoditas Strategis Perkebunan - Rata-Rata Pertumbuhan Produksi Komoditas Strategis Peternakan	Tersedianya Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)	Persentase Alsintan Pertanian dalam Kondisi Baik	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
										Persentase Alsintan Perkebunan dalam Kondisi Baik			
										Persentase Alsintan Peternakan dalam Kondisi Baik			
									Tersedianya Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		
									Terkendalinya Hama Penyakit Ternak	Jumlah Kasus Penyakit Hewan yang Terkonfirmasi	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		
									Terkendalinya dan Tertanggulangnya Bencana Pertanian	Persentase Luas Puso Pertanian yang Dikendalikan	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		
					Meningkatnya Kapasitas SDM Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang Dibina	Program Penyuluhan Pertanian						
				Meningkatkan Perekonomian Sektor Perikanan	Pertumbuhan Ekonomi Sub Kategori Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan	Pertumbuhan Produksi Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							Tangkap dan Budidaya	Tangkap dan Budidaya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				
									Meningkatnya Kepatuhan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan				
									Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Pertumbuhan Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan		Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
							Meningkatkan Perekonomian Sektor Perdagangan, Koperasi, dan UMKM	Pertumbuhan Ekonomi Kategori Perdagangan	Meningkatnya Perekonomian Sektor Perdagangan	Kontribusi Kategori Perdagangan dalam PDRB	Meningkatnya Kemudahan Perizinan bagi Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase Toko Swalayan yang Direkomendasi	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
											Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase Kualitas Sarana Distribusi Perdagangan dalam Kondisi Baik	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
													Persentase PKL yang Ditata		
					Meningkatnya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Disparitas Harga	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting								
					Meningkatnya Pertumbuhan	Pertumbuhan Nilai Ekspor Luar Negeri	Program Pengembang an Ekspor								

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
									Ekspor Perdagangan					
									Meningkatnya Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen			
									Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha yang Telah Mengikuti Sosialisasi Produk Legal Dalam Negeri	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri			
									Meningkatnya Perekonomian Sektor Koperasi	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Meningkatnya Kualitas Koperasi		Persentase Koperasi yang Berkualitas	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
									Meningkatnya Perekonomian Sektor UMKM	Pertumbuhan Nilai Produksi UMKM	Meningkatnya Jumlah UMKM		Pertumbuhan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
											Meningkatnya Fasilitasi Sertifikasi Halal		Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	
											Meningkatnya UMKM yang Naik Kelas		Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	Program Pengembangan an UMKM
					Meningkatkan Perekonomian Sektor Industri	Pertumbuhan Ekonomi Kategori Industri	Meningkatnya Industri Kecil Menengah (IKM)	Pertumbuhan Jumlah IKM	Tersedianya Dokumen Perencanaan Industri	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN		

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									Meningkatnya Pemantauan Perkembangan Industri	Rasio Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil Dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	
									Tersedianya Informasi Perkembangan Industri	Persentase Ketersediaan Informasi Industri yang Lengkap dan Terkini	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
					Meningkatkan Perekonomian Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan Ekonomi Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata Daerah	Rata-rata Pengeluaran Wisatawan	Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	DINAS PARIWISATA
										Jumlah Tamu Wisatawan Nusantara		
										Persentase Kegiatan Kalender Event yang Dipromosikan ke Luar Daerah	Program Pemasaran Pariwisata	
										Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Pengembangan Sub Sektor Ekonomi Kreatif	Persentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Dibina	Program Pengembangan an Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Meningkatnya Investasi Daerah	Pertumbuhan PMTB	Meningkatkan Investasi	Pertumbuhan PMTB	Meningkatnya Nilai Investasi	Pertumbuhan PMA dan PMDN	Meningkatnya Iklim Investasi	Jumlah Nilai Investasi PMDN dan PMA (Miliar)	Program Pengembangan an Iklim Penanaman Modal	
									Meningkatnya Jumlah Investasi	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota	Program Promosi Penanaman Modal	
									Adanya Pendampingan Kepatuhan LKPM	Persentase Perusahaan yang Telah Dilakukan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
									Tersedianya Data Investasi Daerah	Persentase Data Investasi Daerah yang Dipublikasikan	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
									Meningkatnya Pelayanan Kemudahan Investasi	Indeks Pelayanan Publik	Program Pelayanan Penanaman Modal	
			Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	PDRB per Kapita	Mengurangi Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Rasio Kesempatan Kerja	Tersedianya Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	DINAS TENAGA KERJA DAN

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									Mikro dan Makro	Mikro dan Makro		PERINDUSTRIAN
									Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	Program Penempatan Tenaga Kerja	
									Meningkatnya Layanan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar (KK)	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	
									Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Diberi Pelatihan	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
					Meningkatkan Penghidupan yang Layak Bagi Pekerja	Persentase Pelaku Usaha yang Menerapkan UMK	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
									Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Perkara Perselisihan Perusahaan-Pekerja yang terselesaikan	Program Hubungan Industrial	
									Meningkatnya Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan		
MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR BERKUALITAS YANG MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERA	Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas, Inklusif dan Berkelanjutan	Indeks Layanan Infrastruktur Daerah	Meningkatnya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	Indeks Kinerja Infrastruktur Daerah	Meningkatkan Pemenuhan Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Penurunan Kawasan Permukiman Kumuh	Berkurangnya Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani	Program Kawasan Permukiman	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
									Meningkatnya Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani	Program Perumahan dan Kawasan	DINAS PERUMAHAN DAN

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
AN MASYARAKAT									Akses Rumah Layak Huni		Permukiman Kumuh	KAWASAN PERMUKIMAN
							Meningkatnya Pertumbuhan Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak	Peningkatan Jumlah Rumah Layak Huni	Tersedianya Perumahan Rumah Layak Huni dan Terjangkau bagi Korban Bencana	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Akibat Bencana	Program Pengembangan Perumahan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
									Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Dibangun atau Ditingkatkan PSU nya	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
					Meningkatkan Kualitas Layanan Jalan	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Kualitas Jalan Kewenangan Kabupaten	Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik	Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan	Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	Program Penyelenggaraan Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					Meningkatkan Kualitas Layanan Sumber Daya Air	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
								Luas Wilayah Rawan Banjir yang Tertangani		Persentase Sarana Prasarana Pengendali Banjir dalam Kondisi Baik		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Meningkatnya Daya Tampung Drainase	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	Meningkatnya Kinerja Drainase Perkotaan	Persentase Drainase Perkotaan	Program Pengelolaan dan Pengembangan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										yang Tertangani	an Sistem Drainase	PENATAAN RUANG
							Meningkatnya Pelayanan Air Minum dan Sanitasi untuk Masyarakat	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	Meningkatnya Layanan Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Akses Sanitasi Layak	Program Pengelolaan dan Pengembangan an Sistem Air Limbah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
								Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Akses Air Minum Layak	Meningkatnya Layanan Akses Air Minum Perpipaan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (PDAM dan Non PDAM)	Program Pengelolaan dan Pengembangan an Sistem Penyediaan Air Minum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya Kepatuhan Penataan Ruang	Persentase Kepatuhan Terhadap Rencana Tata Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
									Meningkatnya Penatagunaan Tanah Aset Pemkab	Persentase Tanah Pemkab yang Bersertifikat	Program Penatagunaan Tanah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
									Meningkatnya Sinkronisasi dan Koordinasi Reforma Agraria	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Gugus Tugas Reforma Agraria	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Meningkatnya Kualitas Penataan	Rasio Bangunan Berizin	Meningkatnya Kepatuhan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan Persetujuan Bangunan	Program Penataan Bangunan Gedung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							Bangunan Gedung			Gedung (PBG) Kabupaten		PENATAAN RUANG
							Meningkatnya Penataan Bangunan dan Lingkungannya		Luas Kawasan Bangunan dan Lingkungan yang Tertata Dengan Baik	Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya		
							Meningkatnya Kualitas Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Partisipasi Tenaga Kerja Konstruksi dalam Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Konstruksi	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah	Rasio Konektivitas	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Transportasi	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	DINAS PERHUBUNGAN
MEMPERKUAT KETAHANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN	Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Aman dan Nyaman	- Tingkat Kemiskinan - Indeks Harmoni Indonesia - Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Meningkatnya Pengentasan Kemiskinan dan Kehidupan yang Berkualitas	Indeks Gini	Meningkatkan Kemandirian PPKS	Persentase PPKS yang Mandiri Memenuhi Kebutuhan Dasarnya	Meningkatnya Layanan PPKS	Persentase PPKS yang Terakses Layanan Sosial Dasar	Meningkatnya Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan Penduduk Miskin yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
								Meningkatnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang Diberdayakan	Program Pemberdayaan Sosial		
								Meningkatnya Rehabilitasi Sosial PPKS	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia	Program Rehabilitasi Sosial		

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti		
									Meningkatnya Pemulihan Sosial dan Perlindungan Korban Bencana	Persentase Korban Bencana yang Pulih Fungsi Sosialnya	Program Penanganan Bencana	
									Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terkelola Dengan Baik	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
					Meningkatkan Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Berkelanjutan dan Berkualitas	-PPH Ketersediaan -PPH Konsumsi -Prevalensi Ketidak-cukupan Konsumsi Pangan (PoU)	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Strategis	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
									Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Kemandirian Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	
									Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Keamanan Pangan Segar dari Bahan Pangan yang Diuji	Program Pengawasan Keamanan Pangan	

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									Menurunnya Daerah Rawan Pangan	Persentase Desa Rawan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	
			Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Penduduk yang Tumbuh Seimbang	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Mengurangi Ketimpangan Gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Mewujudkan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Skor Kabupaten Layak Anak	Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Pelantaran, Perkawinan, dan Perlakuan Salah Lainnya terhadap Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten	Program Perlindungan Khusus Anak	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
									Terjaminnya Pemenuhan Hak Anak secara Komprehensif	Persentase Sekolah yang Lulus Evaluasi Sekolah Ramah Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
									Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Meningkatkan Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender	Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Program Perlindungan Perempuan	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
									Meningkatnya Peran Kelembagaan Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Aktif	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					Mengendalik kan Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Menjaga Angka Kelahiran	Total Fertility Rate (TFR)	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR);	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
										Persentase Kebutuhan ber KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)		
									Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan Kependudukan	Angka Kelahiran Remaja Umur 15 - 19 Tahun (ASFR 15 - 19 Tahun)	Program Pengendalian Penduduk	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
									Meningkatnya Kualitas Keluarga	Persentase Keluarga Berisiko Stunting	Program Pemberdayaan dan Peningkatan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
									Meningkatnya Masyarakat	Persentase Desa/ Kelurahan yang Memiliki Kelompok		

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Ketahanan Keluarga	Keluarga Sejahtera (KS)	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Meningkatnya Kondusivitas Wilayah	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	Meningkatkan Ketertiban dan Ketenteraman Kehidupan Bermasyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	Meningkatnya Perlindungan terhadap Masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
				Angka Kejadian Konflik Sosial	Meningkatkan Stabilitas Sosial pada Kehidupan Masyarakat	Angka Kejadian Konflik Sosial	Meningkatnya Pemahaman Ideologi Pancasila dan Demokrasi	Persentase Konflik Sosial yang Dapat Dicegah	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
									Meningkatnya Pembinaan tentang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Masyarakat yang Telah Mendapatkan Pembinaan Tentang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	
									Meningkatnya Kewaspadaan Terhadap Konflik Sosial	Persentase Potensi Konflik Sosial yang Teridentifikasi	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	
									Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan	Program Penguatan Ideologi Pancasila	

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
									Karakter Kebangsaan	Karakter Kebangsaan	dan Karakter Kebangsaan				
									Meningkatnya Kesadaran Berpolitik yang Baik	Rasio Masyarakat yang Mendapatkan Pendidikan Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik				
			Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa	Mewujudkan Keberdayaan Desa	Persentase Desa Mandiri	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Persentase Desa yang Naik Status	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
										Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Desa	Persentase Perkembangan Bumdes	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
												Meningkatnya Kerja Sama Desa	Peningkatan Jumlah Kerja Sama Desa yang Difasilitasi	Program Peningkatan Kerjasama Desa	

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, dan Tutupan Lahan	- Indeks Kualitas Air - Indeks Kualitas Udara - Indeks Tutupan Lahan	Meningkatnya Pengendalian dan Pemantauan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Frekuensi Kejadian Pencemaran Lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
									Meningkatnya Kualitas Perencanaan Lingkungan Hidup	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	
									Meningkatnya Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Indeks Hijau Biru Indonesia (IHBI)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
							Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan yang Terpadu dan Berkelanjutan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
									Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	
							Meningkatnya Penerapan Ekonomi Hijau	Kontribusi Penurunan GRK Kumulatif Pendukung Ekonomi	Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan	Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan,	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									yang Diterbitkan	Izin PPLH dan PUU LH	dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
									Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	
			Menurunnya Dampak Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Meningkatkan Ketangguhan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya Ketangguhan Bencana Sampai Level Desa	Peningkatan Desa Tangguh Bencana	Meningkatnya Kualitas Mitigasi dan Penanggulangan Bencana	Persentase Masyarakat yang Menerima Pelayanan Informasi serta Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Program Penangu- langan Bencana	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
							Meningkatnya Penanganan Bencana pada Saat Tanggap Darurat	Persentase Tanggap Darurat Bencana				
							Meningkatnya Penanganan Bencana pada Saat Pasca Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana				

b. Program Prioritas Daerah Penerjemahan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati

Program Prioritas pembangunan RPJMD 2025-2029 memuat Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati. Program Prioritas diterjemahkan menjadi beberapa Kegiatan Prioritas dan Aksi Prioritas yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Program Prioritas Penerjemahan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati digunakan untuk menentukan prioritas daerah selama lima tahun ke depan melalui kegiatan-kegiatan strategis.

1. Demak Cerdas dan Berkarakter

Pendidikan adalah fondasi utama untuk menciptakan masyarakat yang berdaya saing dan berakhlak. Program ini memastikan bahwa generasi muda Demak tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki nilai-nilai moral budaya yang kuat. Tantangan globalisasi dan teknologi, menuntut penyiapan sumber daya manusia Demak dengan keterampilan yang relevan. Tanpa pendidikan dan ketrampilan yang memadai, sulit bagi masyarakat untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Selain pendidikan, untuk mendukung sumber daya manusia berdaya saing tinggi, diperlukan pula tubuh dan jiwa yang sehat. Anak-anak yang tumbuh sehat, bergizi cukup, masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat akan menjadi modal kuat SDM yang tangguh di masa depan.

Kegiatan Prioritas pada program Demak Cerdas dan Berkarakter meliputi:

- a. Peningkatan Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan (melalui Pelatihan dan Transformasi Digital). Melalui kegiatan ini, guru akan mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik, pendidikan karakter, etika profesi, teknologi pendidikan, dan kemampuan mengajar yang relevan dengan perkembangan zaman.
- b. Peningkatan Sarana & Prasarana Teknologi Informasi Sekolah. Sarana dan prasarana teknologi informasi di sekolah akan ditingkatkan untuk memastikan seluruh siswa dan tenaga pendidik bisa memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran.
- c. Sekolah Unggulan sebagai Model Pendidikan Berkualitas. Setiap kecamatan akan memiliki minimal satu sekolah unggulan SD dan satu sekolah unggulan SMP yang berfungsi sebagai pusat percontohan pendidikan berkualitas, dilengkapi dengan fasilitas lengkap, tenaga pendidik berkualitas, serta kurikulum yang mendorong inovasi dan kreativitas siswa.

- d. Program Apresiasi "Demak Pintar" untuk Siswa Berprestasi. Kegiatan ini merupakan wujud fasilitasi dan apresiasi kepada siswa-siswa yang memiliki prestasi dan membawa nama baik Demak ke ajang yang lebih tinggi.
- e. Pengembangan Kurikulum Berbasis Karakter. Kurikulum ini akan memadukan pendidikan formal dengan nilai-nilai moral dan etika, menekankan pada pengembangan karakter jujur, tanggung jawab, gotong royong, dan kemandirian. Kurikulum ini disusun menggunakan nilai-nilai kearifan Demak untuk melestarikan karakter dan budaya baik yang ada di dalamnya.
- f. Fasilitasi dan Pengembangan Kapasitas Tenaga Kerja. Angkatan kerja akan mendapatkan pelatihan vokasional yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, seperti keterampilan teknis di bidang manufaktur, pertanian modern, dan teknologi informasi. Pelatihan juga dapat berupa pelatihan non teknis seperti kewirausahaan, manajemen, dan keuangan. Tenaga kerja juga dipertemukan dengan pasarnya melalui bursa kerja atau fasilitasi lainnya yang memungkinkan.
- g. Pengembangan Inkubasi Inovasi dan Teknologi Tepat Guna Berbasis Komunitas. Kegiatan ini akan membina inovator lokal dalam menciptakan produk berbasis teknologi yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Inovator didorong dan didukung menciptakan teknologi-yang mampu meningkatkan produktivitas dan mengembangkan potensi lokal.
- h. Gerakan "Demak Aktif" – Pemberdayaan Pemuda & Perempuan. Organisasi pemuda dan perempuan akan diberdayakan melalui pelatihan kepemimpinan, wirausaha, dan keterampilan teknis. Hal ini untuk memastikan mereka berperan aktif dalam pembangunan daerah dan ekonomi. Kegiatan ini juga memberikan apresiasi bagi pemuda dan perempuan yang telah memberikan kontribusinya pada kemajuan daerah.
- i. Peningkatan Prestasi Olahraga. Dalam rangka meningkatkan iklim sportivitas, kegiatan ini dirancang untuk memberikan pembinaan dan penghargaan bagi atlet dan pelatih yang telah mendedikasikan dirinya membawa nama baik Demak ke pentas olah raga yang lebih tinggi.
- j. Peningkatan Gizi Masyarakat. Untuk mendukung sumber daya manusia yang tangguh, diperlukan penjaminan dan peningkatan kualitas gizi masyarakat.

2. Demak Religius

Sebagai Kota Wali, Demak memiliki sejarah dan akar budaya yang sangat religius. Program ini sangat penting untuk menjaga dan memperkuat identitas religius yang telah menjadi bagian integral dari masyarakat Demak. Program dirancang untuk memperkuat nilai-nilai agama sekaligus menjawab

tantangan modern dengan pendekatan yang lebih kreatif. Dengan memperkuat nilai-nilai agama, masyarakat Demak akan memiliki landasan moral yang kokoh untuk menghadapi tantangan kehidupan modern yang kompleks. Hal ini merupakan bagian perwujudan misi: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berakhlak.

Kegiatan prioritas pada program Demak Religius meliputi:

- a. Tambahan Kesejahteraan Bagi Guru Madin/TPQ/Ponpes (Demak Barokah). Guru agama di Madrasah Diniyah, TPQ, dan Pondok Pesantren akan mendapatkan insentif atau tunjangan kesejahteraan untuk meningkatkan motivasi dalam mengajar dan mendidik generasi muda.
- b. Festival Kreativitas Santri “Santri Bangkit”. Festival ini dirancang sebagai ajang untuk menampilkan karya kreatif santri, seperti seni kaligrafi, nasyid, sastra, atau kreativitas lainnya. Pada ajang ini juga diberikan apresiasi kepada santri berprestasi. Festival ini juga dapat digunakan sebagai sarana mempererat tali silaturahmi antar pesantren. melalui talkshow, seminar, bazar atau kegiatan lain sejenis.
- c. Bantuan Tempat Ibadah, Organisasi Keagamaan dan Lembaga Keagamaan. Bantuan akan diberikan untuk pembangunan atau renovasi tempat ibadah, seperti masjid dan mushola, serta dukungan bagi organisasi keagamaan yang berperan dalam kehidupan sosial masyarakat.
- d. Beasiswa “Demak Qur’ani” – Hafizh Al-Qur’an. Beasiswa ini akan diberikan kepada para penghafal Al-Qur'an sebagai bentuk apresiasi, dengan tujuan memotivasi generasi muda untuk terus mendalami ajaran agama dan memperkuat hafalan Al-Qur'an.
- e. Forum Silaturahmi & Sinergi Ulama–Umaro’. Forum ini akan menjadi wadah diskusi antara ulama dan pemerintah (umaro’) untuk membahas dan merumuskan kebijakan keagamaan serta sosial yang selaras dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat.
- f. Peringatan Hari Besar Keagamaan. Kegiatan keagamaan besar seperti pengajian akbar, tabligh akbar, dan peringatan hari besar Islam akan mendapatkan dukungan dalam rangka memperkuat nilai-nilai spiritual masyarakat.

3. Demak *Smart Governance*

Program Demak *Smart Governance* ini penting untuk menciptakan pemerintahan yang responsif dan transparan, meminimalkan korupsi, serta memberikan pelayanan yang cepat dan efisien kepada masyarakat. Digitalisasi diterapkan pada tata kelola pemerintahan untuk mendukung akuntabilitas dan juga pada pelayanan publik untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. ASN sebagai motor penggerak perlu dikuatkan melalui prinsip-prinsip meritokrasi.

Smart governance juga perlu diterapkan sampai ke level desa melalui konsep Smart Village yang akan membantu desa-desa di Demak untuk lebih mandiri, meningkatkan produktivitas, dan menjangkau pasar yang lebih luas. Sinergi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa diharapkan juga mampu mengurangi potensi-potensi *fraud* dalam pelaksanaan pembangunan. **POLITIK**

Kegiatan prioritas pada program Demak *Smart Governance* di antaranya:

- a. Digitalisasi Birokrasi (Transformasi Digital Pelayanan Publik & Administrasi). Seluruh layanan birokrasi akan didigitalisasi agar masyarakat dapat mengakses pelayanan publik secara cepat dan efisien melalui aplikasi atau platform daring, mengurangi birokrasi yang berbelit-belit dan meminimalkan korupsi. Salah satu upaya yang perlu dilakukan yaitu penguatan *programmer* untuk membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik yang handal.
 - b. Penguatan Meritokrasi ASN "Memimpin Tanpa Menekan". Aparatur Sipil Negara (ASN) dipilih dan diangkat berdasarkan merit (kinerja dan kompetensi). Pembinaan pegawai dilakukan secara humanis tanpa tekanan. Sistem ini diharapkan akan meningkatkan profesionalisme ASN.
 - c. Layanan Keliling Terpadu "Demang Ngantor Deso". Pemerintah akan menyediakan layanan keliling untuk memberikan pelayanan administrasi dan publik secara langsung di desa-desa, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke pusat pemerintahan.
 - d. Smart Village - Desa Berbasis Digital. Desa-desa akan dilengkapi dengan teknologi informasi untuk mempermudah akses informasi, pemasaran produk lokal, dan layanan administrasi desa yang terintegrasi secara daring.
 - e. Penguatan Sinergi Pemerintah Daerah & Pemerintah Desa. Pemerintah daerah akan memperkuat sinergi program-program Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa, sehingga pelaksanaan pembangunan saling mendukung dan melengkapi. Pemerintah Daerah juga akan mendampingi tata kelola desa terutama dalam hal perencanaan, pengelolaan anggaran, serta pelaksanaan program pembangunan agar semakin banyak desa yang berstatus Desa Anti Korupsi.
4. Demak Produktif dan Mandiri

Perekonomian daerah yang kuat adalah kunci untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Program Demak Produktif dan Mandiri bertujuan menciptakan ekonomi yang lebih produktif dan mandiri melalui peningkatan kapasitas UMKM, IKM, pertanian, perikanan, dan pariwisata. Bantuan stimulan bagi pelaku usaha tersebut sangat penting karena kelompok ini merupakan tulang punggung ekonomi lokal. Melalui pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, program ini tidak hanya

membuka peluang baru untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga mempromosikan potensi Demak ke dunia luar. Demikian pula investasi yang ditingkatkan akan menarik modal dan teknologi baru, yang pada akhirnya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan prioritas pada program Demak Produktif dan Mandiri di antaranya:

- a. Bantuan Stimulan Produksi dan Pemasaran. Stimulan berupa alat produksi dan pelatihan akan diberikan untuk membantu petani, nelayan, UMKM, dan IKM meningkatkan hasil produksi mereka. Pemasaran juga akan diperluas baik melalui cara konvensional dengan pameran-pameran maupun melalui penguatan branding digital.
 - b. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Penguatan Daya Tarik Wisata dan Infrastruktur Wisata). Potensi pariwisata daerah akan dioptimalkan melalui penataan kawasan wisata Segitiga Emas Tembiring-Kadilangu-Masjid Agung. Pengembangan destinasi baru, promosi wisata, dan pemberdayaan masyarakat lokal sebagai pelaku wisata juga dioptimalkan melalui penguatan dan pembentukan desa wisata. Di samping itu, ekonomi kreatif akan ditingkatkan dengan mendukung industri seperti kerajinan tangan, kuliner khas, dan seni lokal.
 - c. Peningkatan investasi. Pemerintah daerah akan menciptakan iklim yang kondusif bagi investor dengan mempermudah perizinan dan menyediakan insentif bagi mereka yang ingin berinvestasi di sektor strategis, seperti pertanian, pariwisata, dan manufaktur.
5. Demak Mantap

Pembangunan infrastruktur adalah tulang punggung bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Pembangunan infrastruktur yang merata akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program Demak Mantap menggarisbawahi pentingnya infrastruktur yang baik untuk memajukan seluruh wilayah Demak, tidak hanya di kota tetapi juga di desa-desa. Tanpa jalan yang baik, jembatan yang kuat, serta irigasi yang lancar, perekonomian lokal akan terganggu. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dasar menjadi sangat penting untuk memastikan distribusi hasil pertanian dan aksesibilitas antar wilayah berjalan lancar. Pengembangan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan olahraga juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan penataan perkotaan dan penerangan jalan utama, Demak akan menjadi lebih aman dan nyaman untuk ditinggali.



Kegiatan prioritas pada program Demak Mantap di antaranya:

- a. Pembangunan & Perbaikan Infrastruktur Penunjang Pangan. Kabupaten Demak sebagai salah satu penunjang pangan di Jawa Tengah perlu mempertahankan posisinya, salah satunya dengan menjaga kualitas infrastruktur. Pembangunan difokuskan pada lokasi-lokasi produksi dan prasarana penghubung ke daerah pemasaran. Infrastruktur tersebut di antaranya peningkatan jalan strategis kabupaten, rehabilitasi irigasi, jalan produksi dan jalan usaha tani/tambak.
 - b. Rehabilitasi dan Penataan Jalan Kabupaten Terintegrasi. Pada tahun-tahun mendatang, pembangunan infrastruktur terutama pembangunan jalan kabupaten dilakukan secara terintegrasi dan tidak parsial. Pembangunan/rehabilitasi pada satu lokasi, harus dituntaskan baik dari jalan, talud, drainase, trotoar, dan penerangan jalan umum, termasuk rambu-rambu dan marka jalannya.
 - c. Pengembangan Fasilitas Kesehatan - Demak Sehat. Fasilitas kesehatan semakin dilengkapi dengan alat-alat kesehatan dan didekatkan kepada penerima layanan. Puskesmas dan Puskesmas Pembantu akan dikembangkan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
 - d. Pengembangan Fasilitas Pendidikan - Demak Cerdas. Fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan akan dilakukan revitalisasi. Demikian pula sarana pembelajaran akan ditambah untuk menunjang kegiatan pendidikan di sekolah formal maupun non formal.
 - e. Pengembangan Fasilitas Olahraga - Demak Bugar dan Berprestasi. Stadion dan GOR Kabupaten akan terus dilengkapi fasilitasnya. Fasilitas olahraga di sekolah pun akan ditambah peralatannya. Selain itu, kampanye-kampanye olahraga di masyarakat, termasuk olahraga-olahraga rekreasi dan aktivitas fisik massal akan diperbanyak.
 - f. Pengembangan Pasar Tradisional - Demak Rame Pasare. Fasilitas pada pasar tradisional akan diperbaiki dan ditambah event-event untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
 - g. Penataan Kawasan Perkotaan dan Penerangan Jalan Utama -Demak Terang Benderang. Pembangunan di kawasan perkotaan dilakukan dengan menata ruang publik dan meningkatkan penerangan di jalan-jalan utama untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat.
 - h. Penataan Kawasan Perkotaan “Terakota Demak”. Wajah kota akan dipercantik dan dikuatkan sisi sosio-kulturalnya sebagai warisan Kerajaan Demak dengan mengangkat tema terakota.
6. Demak Tangguh dan Lestari



Ketahanan sosial dan lingkungan adalah aspek kunci yang tidak boleh diabaikan dalam pembangunan. Program Demak Tangguh dan Lestari akan membantu Kabupaten Demak agar lebih tangguh dalam menyelesaikan permasalahan sosial, tangguh dalam menghadapi bencana dan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan. Pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses layanan dasar merupakan langkah penting untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal. Perlindungan terhadap kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, yatim-piatu, dan lansia menunjukkan bahwa pemerintah memiliki perhatian pada seluruh lapisan masyarakat. Program pengelolaan sampah terpadu dan mitigasi bencana sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan, terutama mengingat Demak sering menghadapi masalah banjir, rob, dan kekeringan. Rehabilitasi kawasan pesisir dan pengembangan ruang terbuka hijau akan membantu menciptakan lingkungan yang sehat, sekaligus menjaga keanekaragaman hayati.

Kegiatan prioritas pada program Demak Tangguh dan Lestari di antaranya:

- a. Pengentasan Kemiskinan melalui Akses Layanan Dasar Terintegrasi. Program ini mencakup pemberian akses yang lebih luas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, perumahan yang layak, dan bantuan sosial terutama bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.
- b. Perlindungan dan Pemberdayaan Kelompok Rentan dan Marginal. Kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, anak yatim-piatu, korban kekerasan domestik akan mendapatkan perhatian khusus melalui program pemberdayaan dan bantuan sosial.
- c. Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat - Demak Resik. Sistem pengelolaan sampah yang komprehensif akan dikembangkan untuk mengurangi polusi dan menjaga kebersihan lingkungan, termasuk melalui daur ulang dan pengolahan sampah organik.
- d. Mitigasi dan Penanggulangan Banjir, Rob dan Kekeringan - Demak Siaga Iklim. Pemerintah akan berfokus pada upaya mitigasi bencana alam dengan membangun infrastruktur yang dapat mengurangi risiko banjir dan rob, serta menangani masalah kekeringan. Tidak hanya infrastruktur, upaya juga dilakukan dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- e. Rehabilitasi Ekosistem Pesisir & Penguatan Komunitas - Demak Ijo Royo-Royo. Kawasan pesisir yang mengalami kerusakan akan direhabilitasi melalui penghijauan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan untuk melindungi ekosistem laut dan pesisir.

- f. Pengembangan dan Pemanfaatan RTH Publik & Edukatif. Taman kota, jalur hijau, dan area rekreasi publik akan dikembangkan untuk menciptakan ruang yang ramah lingkungan serta menjadi tempat bagi masyarakat berinteraksi dan berolahraga.

Keterkaitan Program Prioritas dengan isu strategis, misi dan tujuan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.7
Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Demak 2025-2029

ISU STRATEGIS	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	PROGRAM PRIORITAS (PP)	KEGIATAN PRIORITAS (KP)	PENANGGUNG JAWAB
Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berakhlak	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berkarakter	Demak Cerdas dan Berkarakter		
				Peningkatan Kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan (melalui Pelatihan dan Transformasi Digital)	Dindikbud
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Sekolah	Dindikbud
				Sekolah Unggulan sebagai Model Pendidikan Berkualitas	Dindikbud
				Program Apresiasi "Demak Pintar" untuk Siswa Berprestasi	Dindikbud
				Pengembangan Kurikulum Berbasis Karakter di Sekolah	Dindikbud
				Fasilitasi dan Pengembangan Kapasitas Tenaga Kerja	Dinnakerind
				Pengembangan Inkubasi Inovasi dan Teknologi Tepat Guna Berbasis Komunitas	Bapperida
				Gerakan “Demak Aktif” – Pemberdayaan Pemuda dan Perempuan	Bapperida
				Peningkatan Prestasi Olahraga	Dinpora
				Peningkatan Gizi Masyarakat	Dinkesda
			Demak Religius		
				Tambahan Kesejahteraan Bagi Guru MADIN/TPQ/ PONPES - Demak Barokah	Bag Kesra SETDA

ISU STRATEGIS	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	PROGRAM PRIORITAS (PP)	KEGIATAN PRIORITAS (KP)	PENANGGUNG JAWAB
				Festival Kreativitas Santri “Santri Bangkit”	Bag Kesra SETDA
				Bantuan Tempat Ibadah, Organisasi Keagamaan dan Lembaga Keagamaan	Bag Kesra SETDA
				Beasiswa “Demak Qur’ani” – Hafizh Al-Qur’an	Bag Kesra SETDA
				Forum Silaturahmi dan Sinergi Ulama–Umaro’	Bag Kesra SETDA
				Peringatan Hari Besar Keagamaan	Bag Kesra SETDA
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berintegritas	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan Berintegritas	Demak Smart Governance		
				Digitalisasi Birokrasi (Transformasi Digital Pelayanan Publik dan Administrasi)	Dinkominfo
				Penguatan Meritokrasi ASN "Memimpin Tanpa Menekan"	BKPSDM
				Layanan Keliling Terpadu “Demang Ngantor Deso”	Bag. Pemerintahan SETDA
				Smart Village - Desa Berbasis Digital	Dinpermades P2KB
				Penguatan Sinergi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa	Dinpermades P2KB
Peningkatan Nilai Ekonomi Sektor Unggulan Daerah; Penumpu Pangan di Jawa Tengah; Inisiasi Ekonomi Hijau	Mengembangkan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan dan Berbasis Potensi Lokal	Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Demak Produktif dan Mandiri		
				Bantuan Stimulan Produksi dan Pemasaran	Bapperida
				Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Penguatan Daya Tarik Wisata dan Infrastruktur Wisata)	Dinparta
				Penguatan Ekonomi Kreatif Terintegrasi dengan Wisata	Dinparta
				Peningkatan Investasi dan Daya Saing Daerah	DPM PTSP
Pemenuhan Kualitas Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan	Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas, Inklusif dan Berkelanjutan	Demak Mantap		
				Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur Penumpu Pangan	Dinputaru
				Rehabilitasi dan Penataan Jalan Kabupaten Terintegrasi	Dinputaru

ISU STRATEGIS	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	PROGRAM PRIORITAS (PP)	KEGIATAN PRIORITAS (KP)	PENANGGUNG JAWAB
				Pengembangan Fasilitas Kesehatan – Demak Sehat	DINKES
				Pengembangan Fasilitas Pendidikan – Demak Cerdas	Dindikbud
				Pengembangan Fasilitas Olahraga – Demak Bugar dan Berprestasi	Dinpora
				Pengembangan Pasar Tradisional – Demak Rame Pasare	Dindagkop UKM
				Penataan Kawasan Perkotaan dan Penerangan Jalan Utama - Demak Terang Benderang	Dinputaru
				Penataan Kawasan Perkotaan “Terakota Demak”	Dinputaru
Kemiskinan dan Kesempatan Kerja; Kerusakan Lingkungan Hidup; Penanganan Rob dan Bencana	Memperkuat Ketahanan Sosial dan Lingkungan yang Inklusif dan Berkelanjutan	Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Aman dan Nyaman	Demak Tangguh dan Lestari		
				Pengentasan Kemiskinan melalui Akses Layanan Dasar Terintegrasi	Bapperida
				Perlindungan dan Pemberdayaan Kelompok Rentan dan Marginal	Dinsos P2PA
				Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat – Demak Resik	DLH
				Mitigasi dan Penanggulangan Banjir, Rob dan Kekeringan – Demak Siaga Iklim	BPBD
				Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Penguatan Komunitas – Demak Ijo Royo-Royo	DLH
				Pengembangan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik dan Edukatif	DLH

c. Program Prioritas Daerah Kolaborasi dengan Dunia Usaha

Selain Program Prioritas di atas, terdapat Rencana Program Prioritas di Kabupaten Demak yang akan dikolaborasikan dengan dunia usaha melalui skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Program-program tersebut adalah:

No	Bidang	Program Prioritas
1	Pendidikan	• Peningkatan sarana prasarana pendidikan/rehabilitasi sekolah • Bantuan perlengkapan sekolah

		• Bantuan biaya pendidikan bagi anak yang kurang mampu di lingkungan sekitar perusahaan
2	Kesehatan	• Jamban sehat • Program JKN dalam mendukung pencapaian UHC
3	Olahraga	• Bantuan sarana prasarana olah raga • Bantuan pelaksanaan kegiatan keolahragaan
4	Sosial Keagamaan	• Bantuan sosial kepada masyarakat sekitar perusahaan • Bantuan sosial bagi korban bencana • Program JKN dan JKM bagi pekerja rentan • Bantuan penyelenggaraan kegiatan keagamaan • Rehabilitasi RTLH • Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana
5	Perekonomian Rakyat, UKM, dan Koperasi	• Bantuan modal bagi UMKM
6	Lingkungan	• Pembuatan RTH • Pemeliharaan Taman Kota • Penyediaan sarana prasarana kebersihan lingkungan • Pembuatan saluran air/sanitasi • PJU di sekitar jalan pantura
7	Lain-lain	• Perayaan HUT RI di lingkungan kecamatan dan kabupaten

3.2.4 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Kebijakan kewilayahan merupakan pendekatan strategis dalam perencanaan pembangunan daerah yang digunakan sebagai pedoman pemanfaatan potensi ruang, pemerataan pembangunan, dan peningkatan konektivitas antar wilayah. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan struktur wilayah yang lebih seimbang, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta mempercepat pertumbuhan kawasan-kawasan strategis melalui pengelolaan ruang yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan kewilayahan disusun dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, keterkaitan antar kawasan, serta potensi dan permasalahan yang spesifik di setiap wilayah. Kebijakan kewilayahan juga mengintegrasikan aspek potensi kewilayahan untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru. Dalam pengembangan kewilayahan, Kabupaten Demak mengacu pada dokumen RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan Potensi kewilayahan per kecamatan.

A. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Berdasarkan RPJMN 2025-2029

Pembangunan daerah Kabupaten Demak turut mendukung Asta Cita 2025-2029 sebagai bentuk keselarasan pembangunan Kabupaten Demak dengan pembangunan nasional. Bentuk dukungan Kabupaten Demak terhadap Asta Cita adalah sebagai berikut:

Tabel III.8
Dukungan Kabupaten Demak terhadap Program Prioritas Nasional

No.	PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM KABUPATEN	PD PELAKSANA
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Bakesbangpol
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Bakesbangpol
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinkominfo
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinkominfo
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinpertan Pangan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinpertan Pangan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinpertan Pangan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinpertan Pangan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinpertan Pangan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinpertan Pangan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinpertan Pangan
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinpertan Pangan
		Program Penyuluhan Pertanian	Dinpertan Pangan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinlutkan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinlutkan
		Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Dinlutkan

No.	PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM KABUPATEN	PD PELAKSANA
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinlutkan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinputaru
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinputaru
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinputaru
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinputaru
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	DLH
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	DLH
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	DLH
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DLH
		Program Pengelolaan Persampahan	DLH
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	DLH
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinputaru
		Program Penataan Bangunan Gedung	Dinputaru
		Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya	Dinputaru
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinputaru
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinnakerind
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinnakerind
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Dinnakerind
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dindagkop UKM
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dindagkop UKM

No.	PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM KABUPATEN	PD PELAKSANA
		Program Pengembangan UMKM	Dindagkop UKM
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinparta
		Program Pemasaran Pariwisata	Dinparta
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinparta
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Program Pengelolaan Pendidikan	Dindikbud
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dindikbud
		Program Pengembangan Kurikulum	Dindikbud
		Program Pembinaan Perpustakaan	Dinperpusar
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Dinperpusar
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinkes
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinkes
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinkes
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinpermades P2KB
		Program Pengendalian Penduduk	Dinpermades P2KB
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinpermades P2KB
		Program Perlindungan Khusus Anak	Dinsos P2PA
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinsos P2PA
		Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinsos P2PA
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Dinsos P2PA
		Program Perlindungan Perempuan	Dinsos P2PA
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinsos P2PA
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinpora
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinpora

No.	PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM KABUPATEN	PD PELAKSANA
		Program Riset dan Inovasi Daerah	Bapperida
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bapperida
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinnakerind
		Program Hubungan Industrial	Dinnakerind
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinpora
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinnakerind
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinnakerind
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinnakerind
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
		Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPTSP
		Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Dindagkop UKM
		Program Pengembangan Ekspor	Dindagkop UKM
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Dindagkop UKM
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dindagkop UKM
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinsos P2PA
		Program Pemberdayaan Sosial	Dinsos P2PA
		Program Rehabilitasi Sosial	Dinsos P2PA
		Program Penanganan Bencana	Dinsos P2PA
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinsos P2PA
		Program Penatagunaan Tanah	Dinputaru
		Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Dinputaru
		Program Pendaftaran Penduduk	Dindukcapil

No.	PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM KABUPATEN	PD PELAKSANA
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dindukcapil
		Program Pencatatan Sipil	Dindukcapil
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinkominfo
		Program Kawasan Permukiman	Dinperkim
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinperkim
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinperkim
		Program Pengembangan Perumahan	Dinperkim
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinputaru
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinhub
		Program Penataan Desa	Dinpermades P2KB
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinpermades P2KB
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Dinpermades P2KB
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Dinpermades P2KB
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Setda
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat Daerah
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Semua PD
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Setda
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Set DPRD
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan
		Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan

No.	PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM KABUPATEN	PD PELAKSANA
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinkominfo
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
		Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bapperida
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bapperida
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPAD
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPAD
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPAD
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dindagkop UKM
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dindagkop UKM
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dindikbud
		Program Pengelolaan Permuseuman	Dindikbud
		Program Pengembangan Kebudayaan	Dindikbud
		Program Pengelolaan Arsip	Dinperpusar
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Dinperpusar
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Bakesbangpol
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Bakesbangpol
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Bakesbangpol
		Program Penanggulangan Bencana	BPBD

Selain Asta Cita, terdapat pula 8 Program Hasil Terbaik Cepat Presiden-Wapres Prabowo-Gibran yang perlu diselaraskan dengan perencanaan daerah. Dukungan Kabupaten Demak terhadap delapan program tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.9
Program Hasil Terbaik Cepat Nasional Tahun 2025 dan Dukungan Kabupaten Demak

No	Program Hasil Terbaik Cepat	Dukungan Kabupaten Demak	Pelaksana
1	Memberikan Makan Bergizi Gratis di Sekolah dan Pesantren, serta Bantuan Gizi untuk Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak Balita	– Dukungan koordinatif pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi; – Memastikan ketersediaan dan keamanan bahan baku; – Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin untuk Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak Balita – Pemberian Tablet Tambah Darah untuk Ibu Hamil, Ibu Menyusui	DINDIKBUD, DINPERTAN PANGAN, DINKESDA, DINPERMADES P2KB
2	Menyelenggarakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Menuntaskan Kasus TBC dan Membangun Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	– Cek Kesehatan Gratis di semua Puskesmas dan sekolah – Kerja sama dengan APINDO untuk Cek Kesehatan Gratis di Perusahaan – Pelaksanaan kegiatan promotif, preventif dan kuratif TBC; – Penyediaan tenaga kesehatan yang berkualitas	DINKESDA
3	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional	– Penyediaan prasarana dan sarana pertanian (JUT, JITUT, dam parit, sumur dangkal, alsintan, bibit/benih berkualitas dan pupuk) – Pembinaan pengelola lumbung pangan; – Pemberian bantuan stimulan gabah kepada lumbung pangan	DINPERTAN PANGAN
4	Membangun sekolah unggul dan revitalisasi sekolah	– Pengembangan sekolah unggulan setiap kecamatan – rehabilitasi sekolah/madrasah – penyediaan akses internet bagi sekolah	DINDIKBUD, DINKOMINFO, DINPUTARU
5	Melanjutkan dan menambah program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut	– Beasiswa Demak Pintar – Beasiswa Penghafal Al Quran – Penambahan kepesertaan BPJS tenaga kerja rentan	DINDIKBUD, SETDA, DINSOS P2PA, DINNAKERIND
6	Menaikkan gaji ASN, (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI	– Tambahan kesejahteraan bagi guru madin/TPQ/Ponpes; – Pemberian tambahan penghasilan kepada ASN	SETDA, BKPSDM, BPKPAD
7	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	– memenuhi alokasi ADD dan memberikan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa – rehabilitasi RTLH – Penyediaan rumah untuk korban bencana dan terdampak rob	DINPERMADES P2KB, BPKPAD, DINPERKIM
8	Optimalisasi penerimaan negara	– optimalisasi opsen pajak	BPKPAD

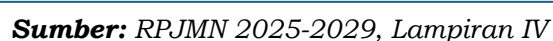
Terdapat arahan dari Surat Edaran Bersama Nomor 100.2.4/3207/SJ dan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Program Strategis Nasional Tahun 2025–2029 pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan kepada seluruh kepala daerah untuk mengakomodasi Program Strategis Nasional (PSN) ke dalam dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Dukungan Pemerintah Kabupaten Demak terhadap arahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel III.10
Dukungan Kabupaten Demak terhadap Program Strategis Nasional

ARAHAN PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL		DUKUNGAN DAERAH	
Program Strategis Nasional	Proyek/Kegiatan	Program (Nomenklatur)	OPD
Penanggulangan Kemiskinan	Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinsos P2PA
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinsos P2PA
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SETDA
	Sekolah rakyat	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINDIKBUD
	Pembangunan 3 juta rumah	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	DINPERKIM
Ketahanan pangan dengan proyek/kegiatan pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DINPERTAN PANGAN
Kesehatan untuk semua dengan proyek/kegiatan	Jaminan kesehatan nasional	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINKESDA
	Makan bergizi gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINKESDA
Perluasan akses pendidikan dengan proyek/kegiatan pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINDIKBUD
Pertumbuhan ekonomi dengan proyek/kegiatan	Pengendalian inflasi	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SETDA
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dindagkop UKM
	Percepatan pembentukan koperasi	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Dindagkop UKM

Sumber: Diolah, 2025

Gambar III.2.
Peta Pengembangan Wilayah Jawa Tengah





Kabupaten Demak mendapatkan highlight intervensi oleh Pemerintah Pusat sebagai berikut:

A. Pengembangan Kawasan Industri

Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Demak dapat didukung dengan highlight indikasi intervensi sebagai berikut:

1. Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak
2. Pembangunan Jalan Tol Demak-Kudus-Pati-Rembang-Tuban
3. Pembangunan TPST Regional Semarang-Demak
4. Perencanaan dan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat (HST) Jakarta-Surabaya
5. Pengembangan koridor industri Kendal-Semarang-Kudus (sektor industri prioritas: industri kimia, industri mesin dan perlengkapan, industri makanan dan minuman, industri tekstil dan alas kaki).
6. Pengembangan kawasan sentra produksi dan/atau industri garam
7. Pembangunan tanggul pantai/laut Kendal-Semarang-Demak dan pengembangan kawasan pesisir Semarang-Demak
8. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi serta produktivitas tenaga kerja melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja

B. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi:

Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi di Kabupaten Demak dapat didukung dengan *highlight* indikasi intervensi sebagai berikut:

1. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat pada D.I Jragung
2. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah
3. Peningkatan daya guna lahan pertanian
4. Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani
5. Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura
6. Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan pada DAS Jragung
7. Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau
8. Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar.
9. Pengembangan pusat/ laboratorium riset pertanian

Dalam rangka mendukung pelaksanaan *highlight* intervensi oleh Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Kabupaten Demak akan memberikan dukungan sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.11
Dukungan Program Kabupaten Demak terhadap RPJMN 2025-2029

No	Highlight Intervensi	Dukungan Program Nomenklatur	OPD Pelaksana	Lokus
1	Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kec. Sayung, Kec. Karangtengah
2	Pembangunan Jalan Tol Demak-Kudus-Pati-Rembang-Tuban	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kec. Wonosalam, Kec. Demak, Kec. Gajah
3	Pembangunan TPST Regional Semarang-Demak	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	Kec. Wedung
4	Pengembangan koridor industri Kendal-Semarang-Demak-Kudus (sektor industri prioritas: industri kimia, industri mesin dan perlengkapan, industri makanan dan minuman, industri tekstil dan alas kaki)	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	Kec. Sayung
5	Pengembangan kawasan sentra produksi dan atau industri garam di Demak	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kec. Wedung
6	Pembangunan tanggul pantai/laut Kendal-Semarang-Demak dan pengembangan kawasan pesisir Semarang-Demak	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kec. Bonang, Kec. Sayung, Kec. Guntur, Kec. Karangtengah, Kec. Kebonagung
7	Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat antara lain D.I Jragung	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kec. Karangawen
8	Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada area tangkapan air (<i>catchment area</i>) di wilayah DAS Jragung	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kec. Karangawen
9	Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Jragung	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kec. Karangawen

No	Highlight Intervensi	Dukungan Program Nomenklatur	OPD Pelaksana	Lokus
10	Pembangunan Bendungan Dolog	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kec. Mranggen

B. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Berdasarkan RPJMD Provinsi 2025-2029

Pengembangan wilayah Kabupaten Demak bukan hanya diselaraskan dengan pembangunan nasional, namun juga diselaraskan dengan pembangunan di tingkat provinsi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengamanatkan 35 program yang didelegasikan pada seluruh kota dan kabupaten di Jawa Tengah. Bentuk dukungan Kabupaten Demak terhadap program delegasi Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel III.12
Dukungan Program Pembangunan Kabupaten Demak terhadap Program Delegasi Provinsi 2025-2029

NO	PROGRAM DELEGASI	PROGRAM NOMENKLATUR	DUKUNGAN KABUPATEN	OPD
1	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan <i>sport center</i>)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Lokus penyelenggaraan pelatihan UMKM/ wirausaha	Kecamatan
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan,	Penyelenggaraan pelatihan UMKM bagi wirausaha muda pemula,	Dinpora
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pemenuhan sarana prasarana oleh raga di kecamatan.	Dinpora
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pembangunan RTH di kecamatan.	DLH
2	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Dinperkim
		Program Pengembangan Perumahan	Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi korban bencana alam	Dinperkim
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembuatan <i>Sport center</i> mini dan peningkatan <i>Sport center</i> sesuai standar nasional	Dinpora

NO	PROGRAM DELEGASI	PROGRAM NOMENKLATUR	DUKUNGAN KABUPATEN	OPD
3	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK & KPK	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Pelaksanaan Workshop Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK & KPK serta Bimbingan Teknis dengan Pemerintah Desa sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi	Inspektorat Daerah
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pemberian materi antikorupsi berbasis ISO 37001 dalam orientasi P3K dan Latsar CPNS sebagai upaya penguatan integritas dan pencegahan tindak pidana korupsi	BKPSDM
4	Puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Dinkesda
			Penyediaan layanan Pos Kesehatan Desa	Dinkesda
			Pengadaan Puskesmas Keliling Roda 2 dan Roda 4 di Puskesmas untuk mempermudah akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Demak	Dinkesda
			Pelaksanaan Program <i>Spelling</i> (Spesialis Keliling)	Dinkesda
5	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pelatihan dan pembinaan Budidaya Ikan Nila di Tambak dan bantuan bibit serta pakan ikan nila	Dinlutkan
6	Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerja sama dengan Pihak Sekolah Swasta	-	-	bukan kewenangan kabupaten
7	Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan	Program Perlindungan Khusus Anak	Konsolidasi Pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan Disabilitas	Dinsos P2PA
8	Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru	Program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata	Pembinaan dan penambahan Desa Wisata	Dinparta
9	BUMDES Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap Bumdes di Jateng)	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Fasilitasi pendaftaran badan hukum BUMDES untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendapatkan legalitas produk.	Dinpermades P2KB

NO	PROGRAM DELEGASI	PROGRAM NOMENKLATUR	DUKUNGAN KABUPATEN	OPD
10	Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	- Pemberian Pelatihan bagi masyarakat dan pembentukan Tim Reaksi Cepat Bencana Kabupaten - Peningkatan kapasitas relawan	BPBD
11	Cek Kesehatan Gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program CKG	Dinkesda
12	Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	Penyediaan layanan kesehatan di puskesmas pembantu selama 5 hari dalam seminggu yang didukung oleh 1 Perawat, 1 Bidan dan 2 Kader untuk Dokter Umum terjadwal 1 minggu sekali	Dinkesda
13	Melahirkan Pemerintahan yang <i>Good Clear Government</i> dan <i>Collaborative Governance</i> melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kompetensi ASN melalui pendidikan dan bimbingan teknis untuk menciptakan <i>good clear government</i>	BKPSDM
		Program Kepegawaian Daerah	Pelaksanaan <i>Assesment</i> ASN untuk meningkatkan profesionalitas dan kualitas ASN	BKPSDM
14	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pemberian bantuan hukum bagi guru, penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan masyarakat miskin sebagai upaya mewujudkan ketahanan sosial dan pemenuhan hak dasar	Bagian Hukum Setda
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pemberian pendidikan dan latihan Teknis bagi Guru	BKPSDM
15	Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Penyusunan Rencana Induk LLAJ dan Masterplan Kelengkapan Jalan	Dinhub
			Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten (kelengkapan jalan dan PJU)	Dinhub
16	Pelindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	Program Pemberdayaan Sosial	Pemberian perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan termasuk pemberian BPJS ketenagakerjaan	Dinsos P2PA
17	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Forum Ulama-Umaro'	Bagian Kesra
18	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri	Program Pemberdayaan UMKM	Sosialisasi, Pendampingan, dan Fasilitasi Sertifikasi Halal	Dindagkop UKM bekerja sama dengan LPPOM MUI

NO	PROGRAM DELEGASI	PROGRAM NOMENKLATUR	DUKUNGAN KABUPATEN	OPD
	Rumah Tangga) secara Gratis		Peningkatan Kualitas Produk UMKM melalui Sosialisasi Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)	Dindagkop UKM
			Sosialisasi dan Fasilitasi HAKI	Dindagkop UKM
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Pemeriksaan sampel P-IRT, pendampingan pemenuhan tindakan perbaikan, Monev CAPA dengan pelaku usaha P-IRT, dan Penyuluhan Keamanan Pangan P-IRT	Dinkesda
19	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan serta pemberian pelatihan dan sertifikasi juru sembelih halal untuk menciptakan rantai produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab	Dinpertan Pangan
20	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan <i>go international</i> , Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengembangan Sistem Informasi Desa untuk meningkatkan kualitas desa di Kabupaten Demak	Dinkominfo
		Program Penanggulangan Bencana	Penyelenggaraan <i>training water rescue</i> sebagai upaya mewujudkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana banjir dan rob	BPBD
		Program Penanggulangan Bencana	Penambahan jumlah Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Demak	BPBD
21	Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan bio gas, hydro, maupun tenaga surya	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembentukan Unit Pengolah Pupuk Organik untuk memanfaatkan limbah ternak, termasuk pembuatan biogas	Dinpertan Pangan
22	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan	Program Penyuluhan Pertanian	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan ketahanan pangan	Dinpertan Pangan
23	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelatihan pengelola desa wisata untuk meningkatkan dan memasarkan potensi desa wisata	Dinparta
24	Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM	Program Pengembangan UMKM	Pendampingan UMKM	Dindagkop UKM
25	Menyusun peraturan daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Inisiasi penyusunan rencana aksi ekonomi hijau	DLH

NO	PROGRAM DELEGASI	PROGRAM NOMENKLATUR	DUKUNGAN KABUPATEN	OPD
26	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pembangunan RTH Kabupaten Demak	DLH
27	Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk Ormas, tokoh masyarakat dan pelajar	Bakesbangpol
			Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui safari upacara pimpinan daerah	Bakesbangpol
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Forum Ulama-Umaro	Bagian Kesra Setda
28	Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	penyelenggaraan Fasilitasi Forum Ulama-Umaro Kabupaten untuk memberikan pandangan dan saran terhadap pelaksanaan Pembangunan yang lebih optimal	Bagian Kesra Setda
			Kegiatan Halaqah untuk menanamkan nilai agama pada kehidupan masyarakat Kabupaten Demak	Bagian Kesra Setda
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Pelaksanaan Fasilitasi Forum Ulama-Umaro di Kecamatan untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama di lingkup Kecamatan	Bakesbangpol
			Pemberian hibah FKUB	Bakesbangpol
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pemberian hibah FPK untuk kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi etnis minoritas	Bakesbangpol
29	Peningkatan operasional kader Posyandu	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Peningkatan operasional kader Posyandu	Dinpermades P2KB
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan kompetensi kader posyandu	Dinkesda
30	Peningkatan kualitas hidup lansia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyelenggaraan Senam bersama lansia tingkat kabupaten untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran lansia	Dinkesda
			Seminar Kesehatan Lansia	Dinkesda
			Pembinaan Teknis dan Penguatan Puskesmas Santun Lansia dan Perawatan Jangka Panjang Lansia	Dinkesda
			Pemberdayaan Lansia di kelompok organisasi	Dinkesda

NO	PROGRAM DELEGASI	PROGRAM NOMENKLATUR	DUKUNGAN KABUPATEN	OPD
31	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pengiriman Calon Wirausaha Muda	Dinpora
32	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro	Penguatan Keuangan Dan Pengembangan Usaha	Dindagkop UKM
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Peningkatan Kelembagaan & SDM Koperasi	Dindagkop UKM
			Peningkatan Inovasi Dan Teknologi Koperasi Desa/Kelurahan	Dindagkop UKM
			Pelatihan Akuntansi	Dindagkop UKM
33	Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pemberian penghargaan bagi atlet dan pelatih yang berprestasi di tingkat Daerah dan Provinsi	Dinpora
34	Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan	Program Pengelolaan Pendidikan	inisiasi pembentukan sekolah inklusif yang memberikan kesetaraan hak pada seluruh siswa di setiap kecamatan	Dindikbud
35	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Pemasangan <i>Early Warning System</i> untuk mengantisipasi kerugian akibat bencana	BPBD

Selain itu, kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah terkait implementasi episentrum pertumbuhan ekonomi baru di WP Kedungsepur yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Demak, di antaranya:

1. Pengembangan Kawasan Industri Kendal – Demak – Semarang (Tekstil, Daging, Jamu, dan Pengolahan Ikan)
- a. Mendorong peningkatan investasi dan ekosistem industri antar Kawasan Industri di Kota Semarang, Demak dan Semarang, Kawasan Industri Kendal (KIK) dan KI Seafer;

b. Penguatan kolaborasi perizinan dan penanaman modal dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota dan Dunia Usaha;

c. Menyiapkan sistem Pendidikan menengah untuk menciptakan kesesuaian Pendidikan Pra-Kerja melalui membangun *link and match* SMK/SMA sederajat dengan dunia industri;

d. Mendorong percepatan penyelesaian pembangunan Jalan Tol Semarang Demak dan inisiasi proses rencana penyiapan rencana pembangunan Jalan Tol Demak-Kudus-Pati-Rembang- Perbatasan Jawa Timur;

e. Mendorong integrasi antarmoda kereta api (peningkatan efisiensi logistik);

f. Peningkatan kondisi dan kinerja serta optimalisasi Terminal Tipe B sebagai simpul perekonomian pada Terminal Penggaron (simpul integrasi Trans



- Jateng, Trans Semarang dan *Feeder* Trans Semarang) serta mendorong revitalisasi Terminal Tipe C yang dilalui koridor angkutan umum aglomerasi perkotaan;
- g. Pengembangan sentra industri hijau;
 - h. Pengembangan ekspor produk unggulan;
 - i. Pendampingan dan fasilitasi sertifikasi SNI dan merek.
2. Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: padi, jagung, bawang merah, tanaman perkebunan, susu, kedelai, garam dan perikanan tangkap)
- a. Peningkatan produksi pertanian, melalui:
 - 1) Fasilitasi sarana prasarana pada daerah potensi produksi pertanian; penyediaan benih/bibit berkualitas; penjaminan kualitas pakan ternak; pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); dan pengembangan ternak lokal berbasis potensi melahirkan bibit ternak khas Jawa; korporasi pertanian; pemanfaatan urban farming; pencegahan alih fungsi lahan pertanian; pengembangan pelabuhan perikanan; bantuan sarana prasarana penangkapan ikan dan garam; serta pengelolaan kawasan konservasi;
 - 2) Fasilitasi sarana prasarana pada daerah potensi produksi pertanian;
 - 3) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi);
 - 4) Mendorong rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada DI Glapan, DI Sedadi, DI Klambu, DI Jragung, DI Dumpil, DI Sidorejo, DI Gemblong;
 - b. Hilirisasi pertanian, melalui:
 - 1) Penggunaan teknologi dalam pengolahan pertanian berbasis inovasi dan kolaborasi, fasilitasi pelatihan pengolahan produk pertanian; Pemasaran dan *branding* produk; penjaminan keamanan pangan produk hewan melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha produk hewan;
 - 2) fasilitasi diversifikasi, kemasan, dan jejaring pemasaran produk olahan ikan, serta pengembangan pojok UMKM hasil olahan ikan;
 - 3) Peningkatan promosi produk industri agro melalui fasilitasi pameran.

C. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Berdasarkan RTRW Kabupaten Demak

• Kebijakan Kewilayahan Per Kecamatan

Kebijakan kewilayahan per kecamatan di Kabupaten Demak merupakan salah satu instrumen strategis dalam perencanaan pembangunan daerah yang



disusun secara spesifik dan terarah untuk masing-masing kecamatan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengarahkan pengembangan wilayah secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan keselarasan antara kepentingan lokal dan kepentingan daerah secara umum.

Dalam penyusunannya, kebijakan kewilayahan mempertimbangkan berbagai aspek yang meliputi potensi sumber daya alam dan manusia, permasalahan pembangunan yang dihadapi, karakteristik fisik dan sosial wilayah, serta peran dan fungsi strategis masing-masing kecamatan dalam struktur ruang Kabupaten Demak. Hal ini mencakup penguatan pusat-pusat pertumbuhan, konektivitas antarwilayah, pengelolaan kawasan rawan bencana, serta pelestarian kawasan lindung dan budidaya.

1. Kecamatan Sayung

Kecamatan Sayung merupakan salah satu wilayah kecamatan di Kabupaten Demak yang terletak di 6°56'31.4" - 6°57'08.2" Lintang Selatan dan 110°29'26.4" - 110°31'33.2" Bujur Timur. Wilayah Kecamatan ini terdiri atas 20 Desa di mana Desa yang paling luas adalah Desa Bedono sebesar 7,39 km² dan Desa yang luasnya paling kecil yaitu Desa Dombo sebesar 1,32 km².

A. Kedudukan Hierarki Struktur Ruang

Struktur ruang terbentuk melalui sistem pusat-pusat permukiman dan jaringan prasarana wilayah yang saling terhubung dan membentuk suatu tatanan hierarkis. Hierarki struktur ruang ditetapkan untuk mendukung pola distribusi kegiatan sosial, ekonomi, dan pelayanan secara efisien dan merata. Hierarki ini mengacu pada tingkat pelayanan, jangkauan pengaruh, serta fungsi strategis masing-masing wilayah.

Berdasarkan Rencana Struktur Ruang Kabupaten Demak, Kecamatan Sayung ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yaitu pusat permukiman yang memiliki peran strategis dalam melayani kegiatan berskala internasional, nasional, maupun antarprovinsi. Penetapan ini didasarkan pada posisi geografis Kecamatan Sayung yang berada pada koridor strategis antara Semarang dan kawasan Pantura Timur, serta didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan potensi ekonomi yang berkembang pesat, khususnya di sektor industri, logistik, dan perdagangan.

Sebagai PKN, Kecamatan Sayung diorientasikan untuk menjadi simpul utama dalam jaringan struktur ruang Kabupaten Demak, sekaligus berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah. Fungsi PKN yang disandang Sayung juga mengharuskan adanya dukungan pengembangan infrastruktur berskala makro, penyediaan kawasan industri terintegrasi, peningkatan kapasitas



sumber daya manusia, serta penguatan sistem transportasi dan logistik yang menghubungkan kawasan ini dengan pusat-pusat pertumbuhan regional lainnya. Dalam konteks kebijakan penataan ruang, status Kecamatan Sayung sebagai PKN memiliki implikasi penting terhadap penataan fungsi lahan, alokasi investasi strategis, serta perlunya sinergi lintas sektor dan lintas wilayah guna memastikan terwujudnya keterpaduan pembangunan yang mendukung daya saing wilayah Kabupaten Demak dalam skala nasional dan global.

Selain ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Kecamatan Sayung juga memiliki peran penting dalam struktur pelayanan wilayah di Kabupaten Demak sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Kecamatan Sayung menyediakan pelayanan sosial, ekonomi, dan infrastruktur dasar yang menjangkau skala kecamatan dan beberapa desa sekitarnya. Fungsi ini tercermin dalam keberadaan fasilitas pendidikan menengah, layanan kesehatan tingkat kecamatan, pasar induk, serta pusat administrasi pemerintahan kecamatan yang melayani kebutuhan lintas desa. Lebih lanjut, Kecamatan Sayung juga memuat beberapa titik fungsi sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), yaitu pusat-pusat aktivitas yang melayani kebutuhan masyarakat dalam lingkup antar-desa. Fungsi ini diwujudkan melalui penyediaan sekolah dasar, layanan kesehatan primer, pasar lingkungan, serta sarana sosial-keagamaan di tingkat komunitas. Ketiga peran tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Sayung memiliki posisi strategis yang berlapis dalam struktur ruang Kabupaten Demak, yang harus dikelola secara terpadu dan berkelanjutan agar dapat mengoptimalkan fungsi ruangnya di berbagai skala pelayanan, mulai dari lokal hingga nasional.

B. Rencana Kawasan Strategis

Rencana Kawasan Strategis adalah bagian dari perencanaan tata ruang yang memberikan arah pengembangan secara lebih rinci pada kawasan yang dinilai memiliki nilai strategis, baik pada skala nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Kecamatan Sayung ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak karena memiliki posisi geografis, fungsi ekonomi, serta potensi pengembangan yang signifikan bagi skala kabupaten, regional, hingga nasional. Penetapan ini juga sejalan dengan status Sayung sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang menjadi simpul penting dalam jaringan logistik dan industri di koridor Pantura Jawa Tengah.

Di dalam dokumen RTRW Kabupaten Demak, diamanatkan bahwa dalam hal penetapan kawasan strategis, Kecamatan Sayung masuk ke dalam Kawasan Strategis Daerah yang meliputi:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi



- a. kawasan sepanjang koridor jalan arteri primer

Kawasan ini dinilai strategis karena mendekati akses utama menuju Kota Semarang, menjadikannya titik potensial untuk pengembangan industri, logistik, dan perdagangan. Pemanfaatan kawasan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

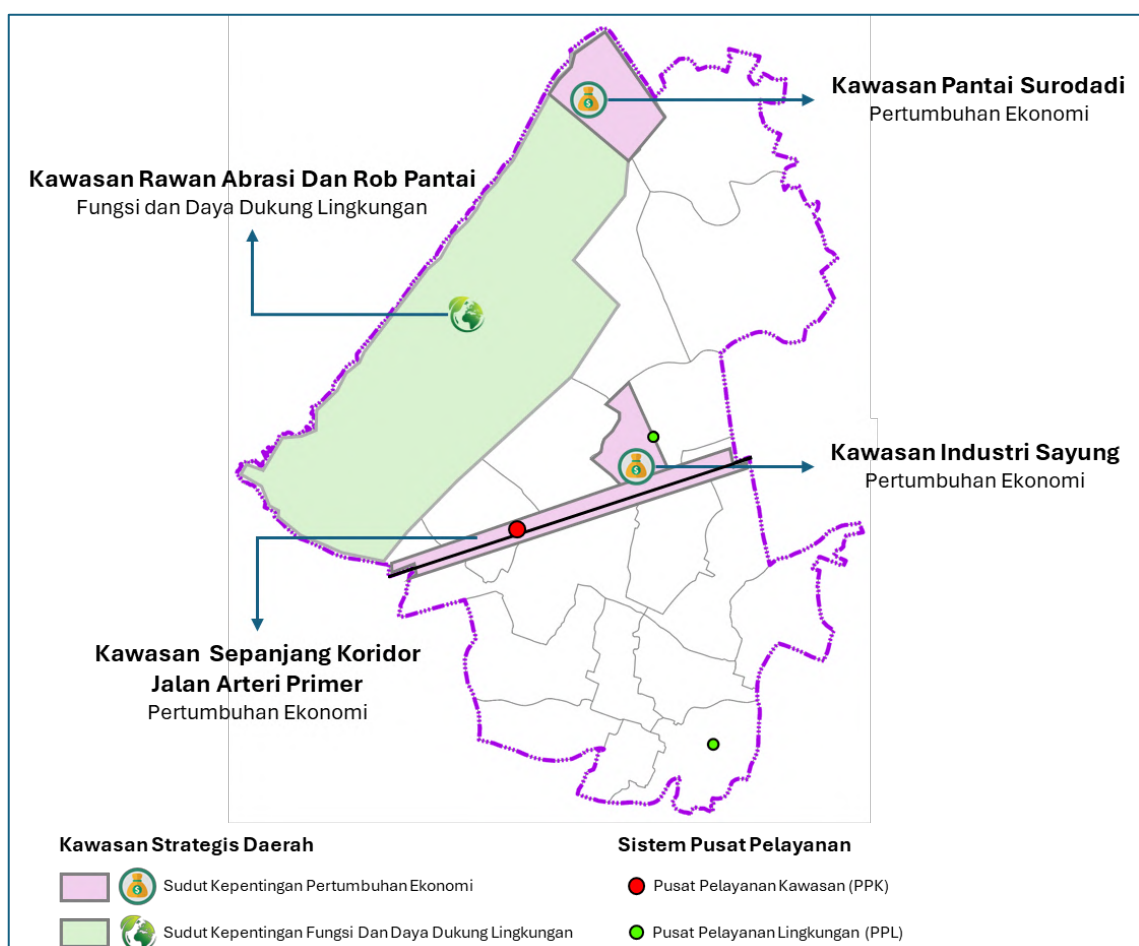
- b. kawasan industri terpadu Sayung

- c. kawasan wisata Pantai Surodadi

2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan yang berupa kawasan rawan abrasi dan rob pantai

Sebagian besar wilayah pesisir Kecamatan Sayung ditandai sebagai kawasan yang difokuskan untuk penanganan abrasi dan rob. Hal ini mencerminkan urgensi pembangunan infrastruktur pengendali abrasi, penguatan tanggul laut, serta upaya konservasi mangrove dan pemulihan ekosistem pesisir untuk menjaga keberlanjutan wilayah pesisir Sayung.

Gambar III.3.
Kawasan Pertumbuhan Kecamatan Sayung



2. Kecamatan Karangtengah

Karangtengah sebagai salah satu kecamatan di kabupaten Demak terletak pada 6°51'42,4"-6°56'44" LS dan 110°30'48"-110°38'22,5"BT. Sebelah Utara berbatasan dengan laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan

Demak, kecamatan Wonosalam dan kecamatan Bonang, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Guntur, serta sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Sayung.

Kecamatan Karangtengah memiliki luas 51,54 km². Kecamatan Karangtengah memiliki 17 desa dengan Desa Batu yang memiliki wilayah terluas, yaitu sebesar 11,06 km². Sedangkan desa yang luasnya paling kecil adalah Desa Karangtowo sebesar 2,81 km².

A. Kedudukan Hierarki Struktur Ruang

Kedudukan hierarki struktur ruang adalah urutan tingkatan pusat-pusat kegiatan dan jaringan prasarana dalam suatu wilayah, yang disusun berdasarkan skala pelayanan, cakupan wilayah pengaruh, dan peran strategisnya dalam mendukung sistem ruang wilayah.

Dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Demak, Kecamatan Karangtengah memiliki kedudukan kawasan strategis. Berdasarkan dokumen perencanaan tersebut, Karangtengah ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yang artinya wilayah ini memiliki peran penting dalam melayani kegiatan berskala nasional, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dalam lingkup yang lebih luas, bahkan lintas daerah. Lebih lanjut, Kecamatan Karangtengah juga mengemban fungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), yaitu pusat kegiatan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat pada skala kecamatan atau beberapa desa di sekitarnya. Selain itu, wilayah ini juga memiliki peran sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang lebih bersifat lokal dan melayani kebutuhan dasar antar desa. Fungsi PPL ini terkonsentrasi di Desa Karangsari dan Desa Pulosari, yang menjadi simpul pelayanan dan aktivitas masyarakat di tingkat lingkungan.

Dengan kombinasi peran sebagai PKN, PPK, dan PPL, Kecamatan Karangtengah memainkan peran ganda dalam mendukung keterpaduan pembangunan wilayah, baik dari skala nasional hingga lokal. Kedudukan ini menuntut adanya pengelolaan ruang yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mendukung optimalisasi fungsi-fungsi tersebut.

B. Rencana Kawasan Strategis

Rencana Kawasan Strategis merupakan salah satu elemen penting dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang menetapkan wilayah-wilayah tertentu dengan nilai kepentingan tinggi dan pengaruh signifikan terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan. Suatu kawasan dikategorikan sebagai strategis apabila keberadaannya memiliki dampak besar terhadap aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan, serta fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Oleh karena itu, kawasan strategis

diprioritaskan untuk mendapatkan perhatian khusus dalam pengelolaan dan pengembangannya.

Dalam konteks perencanaan ruang di Kabupaten Demak, Kecamatan Karangtengah merupakan wilayah yang memiliki posisi strategis dan masuk ke dalam dua kategori perencanaan kawasan strategis, yakni:

a. Rencana Kawasan Strategis Nasional

Kecamatan Karangtengah termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) melalui keterlibatannya dalam kawasan aglomerasi Kedungsepur (Kendal – Demak – Ungaran – Salatiga – Semarang – Purwodadi). Kawasan ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan kawasan perkotaan dan konektivitas antarwilayah di Jawa Tengah. Dalam kerangka ini, Karangtengah memiliki peran penting dalam mendukung integrasi ekonomi regional, pengembangan infrastruktur metropolitan, serta peningkatan pelayanan publik lintas kabupaten/kota.

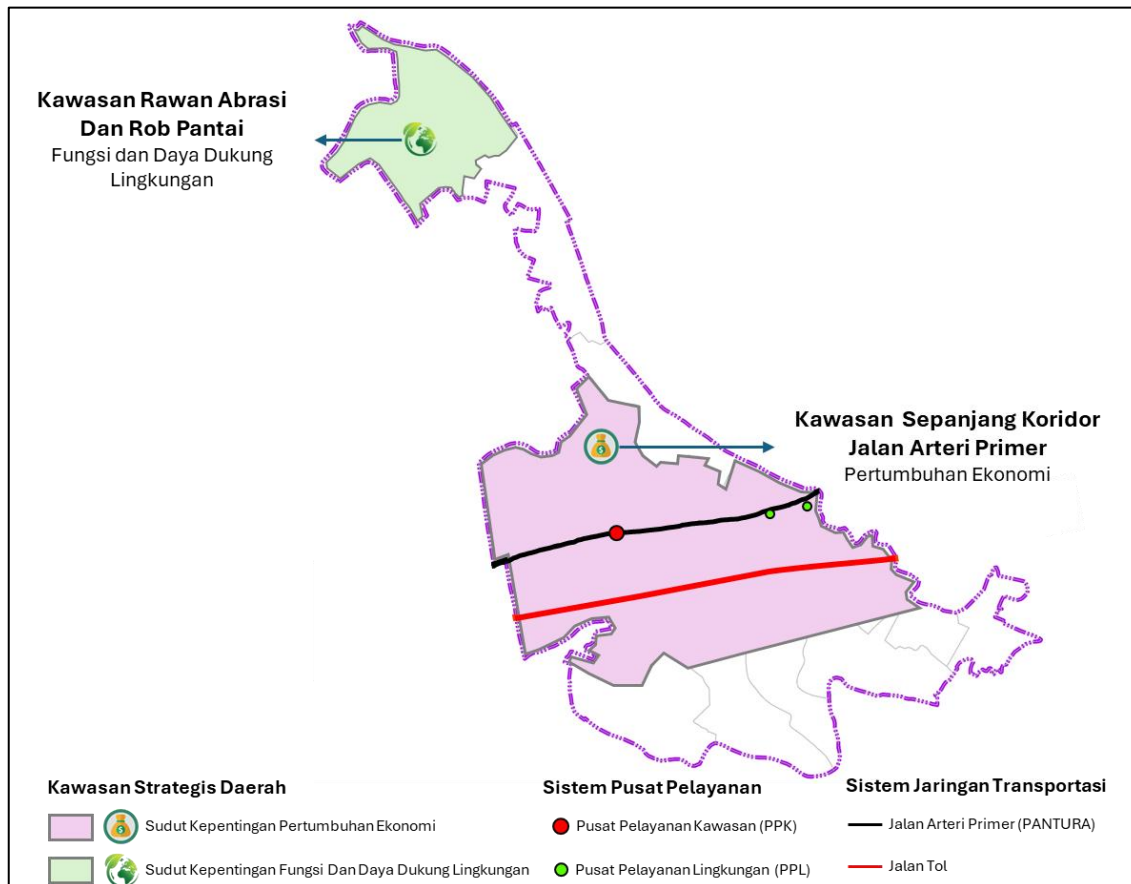
b. Rencana Kawasan Strategis Daerah

Dalam lingkup Kabupaten Demak, Kecamatan Karangtengah ditetapkan sebagai bagian dari dengan dua fokus utama, yaitu:

- Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi
Wilayah ini termasuk dalam koridor pengembangan ekonomi yang berada di sepanjang jalur jalan arteri primer, yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan di wilayah Demak dan sekitarnya. Arah pengembangan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor perdagangan, jasa, serta aktivitas ekonomi lainnya yang bersifat lintas wilayah. Pengembangan difokuskan pada:
 - Kawasan industri, pergudangan, dan logistik.
 - Pusat perdagangan dan jasa yang terintegrasi dengan jaringan jalan utama.
 - Peningkatan aksesibilitas kawasan menuju kota-kota di sekitarnya.
- Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

Kecamatan Karangtengah juga ditetapkan sebagai kawasan strategis lingkungan karena menghadapi tekanan ekologis berupa kerawanan abrasi dan rob pantai. Oleh karena itu, kawasan ini memerlukan pengelolaan ruang yang berwawasan lingkungan, termasuk penguatan sistem perlindungan pesisir, pemanfaatan ruang yang adaptif terhadap perubahan iklim, serta pelestarian ekosistem pesisir sebagai bagian dari strategi mitigasi dan adaptasi bencana.

Gambar III.4.
Kawasan Pertumbuhan Kecamatan Karangtengah



3. Kecamatan Demak

Kecamatan Demak, secara geografis terletak di bagian selatan Kabupaten Demak yaitu di $6^{\circ}51'42.4''$ - $6^{\circ}56'44''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}30'48''$ - $110^{\circ}38'22.5''$ Bujur Timur. Kecamatan Demak memiliki luas $61,56 \text{ km}^2$ atau 6,81% dari luas wilayah Kabupaten Demak, Kecamatan Demak memiliki 19 desa dengan desa yang paling luas adalah Desa Turirejo sebesar $6,28 \text{ km}^2$ dan desa yang luasnya paling kecil yaitu Kelurahan Singorejo sebesar $0,87 \text{ km}^2$.

Kecamatan Demak di sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Bonang, Kecamatan Wedung, dan Kecamatan Mijen, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Gajah dan Kecamatan Karanganyar, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Wonosalam, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Karangtengah.

A. Kedudukan Hierarki Struktur Ruang

Kedudukan Hierarki Struktur Ruang merujuk pada tingkatan atau jenjang pusat-pusat kegiatan dalam sistem struktur ruang suatu wilayah, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Hierarki ini menggambarkan hubungan fungsional antara pusat-pusat permukiman, pusat pelayanan, dan jaringan infrastruktur yang saling mendukung dalam rangka mendorong pertumbuhan wilayah secara merata dan terpadu. Dengan kata lain, hierarki struktur ruang menentukan bagaimana suatu kawasan berperan dan berfungsi

dalam sistem ruang yang lebih luas, baik sebagai pusat pertumbuhan utama, pendukung, maupun penghubung.

Dalam tatanan hierarki struktur ruang Kabupaten Demak, wilayah Kecamatan Demak memiliki kedudukan sebagai:

a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

Kecamatan Demak ditetapkan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional, yang memiliki fungsi untuk melayani aktivitas berskala nasional hingga internasional, serta menjadi bagian dari kawasan aglomerasi metropolitan Kedungsepur. Fungsi ini mencakup pelayanan dalam bidang pemerintahan, perdagangan, transportasi, serta pusat pelayanan sosial dan ekonomi berskala besar. Kedudukannya sebagai PKN menjadikan Kecamatan Demak sebagai simpul strategis dalam sistem jaringan kota di Jawa Tengah, yang mendukung pertumbuhan wilayah lintas kabupaten bahkan provinsi.

b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Selain sebagai PKN, Kecamatan Demak juga berperan sebagai Pusat Kegiatan Lokal, yakni pusat kegiatan yang memberikan pelayanan dalam lingkup kabupaten atau beberapa kecamatan sekitarnya. Fungsi ini lebih menekankan pada penyediaan pelayanan dasar seperti pasar rakyat, pusat pendidikan, fasilitas kesehatan, serta aktivitas ekonomi masyarakat lokal.

B. Rencana Kawasan Strategis

Rencana Kawasan Strategis merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menetapkan wilayah tertentu yang memiliki arti penting dan prioritas tinggi dalam pembangunan karena pengaruhnya terhadap aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kawasan strategis dipilih dan direncanakan secara khusus karena perannya yang vital terhadap keberlangsungan pembangunan wilayah secara keseluruhan, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Penetapan kawasan strategis biasanya didasarkan pada kriteria tertentu, seperti potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi (misalnya kawasan industri, pelabuhan, atau pariwisata unggulan), keberadaan aset lingkungan yang harus dilindungi (seperti kawasan konservasi dan daerah resapan air), nilai historis dan budaya yang signifikan (misalnya kawasan cagar budaya), atau sensitivitas terhadap bencana (seperti kawasan rawan longsor dan banjir). Setiap kawasan strategis direncanakan dengan pendekatan yang terpadu, lintas sektor, dan berbasis spasial, agar fungsi strategis yang dimiliki dapat dimaksimalkan secara optimal dan berkelanjutan.

Di wilayah Kecamatan Demak, perencanaan pengembangan kawasan strategis mencakup dua tingkatan, yaitu kawasan strategis tingkat provinsi dan

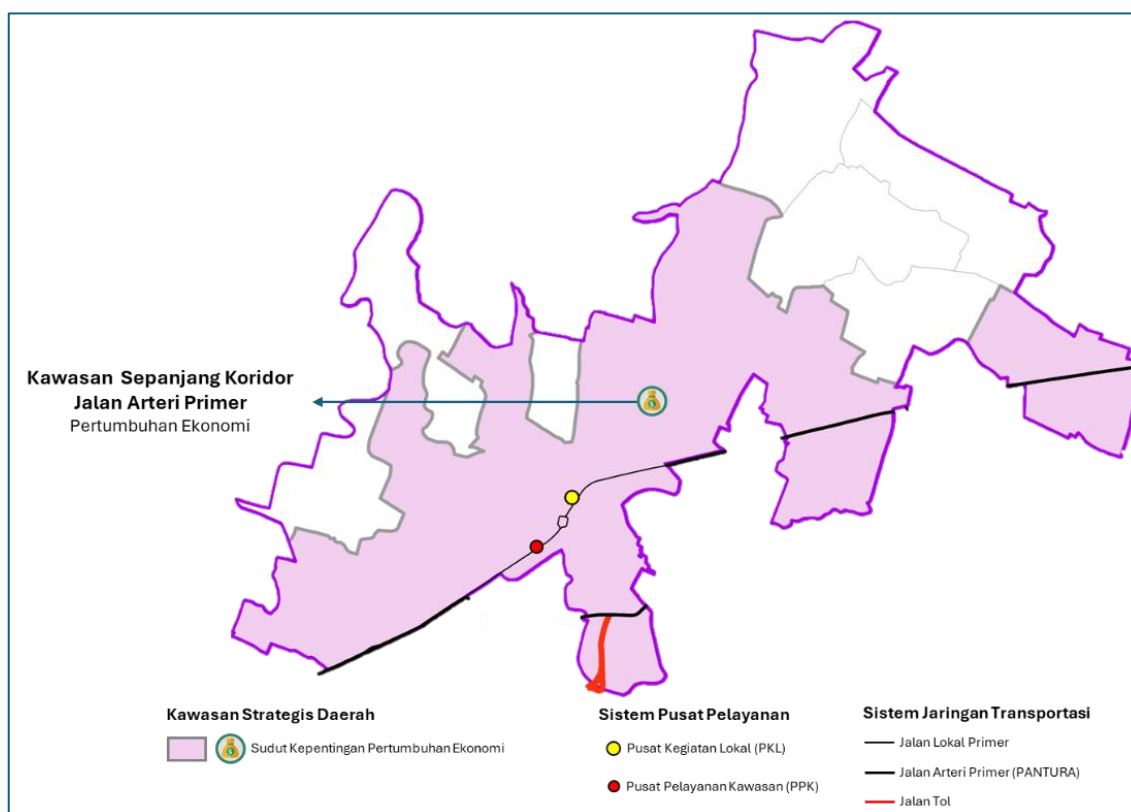
kawasan strategis tingkat daerah. Pada skala provinsi, terdapat Kawasan Strategis Provinsi yang memiliki nilai penting dari aspek sosial dan budaya, yakni Kawasan Masjid Agung Demak, yang menjadi simbol warisan sejarah dan pusat aktivitas keagamaan.

Sementara itu, Kawasan Strategis Daerah ditetapkan berdasarkan pertimbangan pertumbuhan ekonomi, yang berlokasi di sepanjang koridor jalan arteri primer. Kawasan ini melintasi sebagian besar wilayah Kecamatan Demak dan ditetapkan sebagai prioritas dalam pembangunan sektor ekonomi, khususnya perdagangan dan jasa.

Pengembangan kawasan ini diarahkan pada:

- Penyediaan ruang usaha dan pusat perdagangan modern.
- Pengembangan kawasan layanan publik, perkantoran, dan fasilitas pendukung ekonomi.
- Revitalisasi kawasan pusat kota dan penguatan sektor informal.

Gambar III.5.
Kawasan Pertumbuhan Kecamatan Demak



Jalur-jalur yang melewati wilayah Kecamatan Demak memperkuat peran wilayah ini sebagai simpul konektivitas utama antara kawasan pesisir selatan, pusat kota Demak, hingga koridor ekonomi timur dan barat kabupaten. Integrasi jaringan transportasi ini menjadi krusial dalam menggerakkan aktivitas ekonomi dan mempermudah distribusi hasil produksi perikanan maupun perdagangan lainnya.

4. Kecamatan Mranggen

Kecamatan Mranggen merupakan salah satu bagian dari Kabupaten Demak dengan luas wilayah sebesar 72,22 km². Kecamatan Mranggen memiliki 19 desa dengan desa yang paling luas adalah Desa Sumberejo sebesar 8,89 km² dan desa yang luasnya paling kecil yaitu Desa Brumbung sebesar 1,68 km².

Kecamatan Mranggen berbatasan langsung dengan Kecamatan Sayung di sebelah Utara, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Karangawen, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah barat berbatasan dengan Kota Semarang.

A. Kedudukan Hierarki Struktur Ruang

Kedudukan hierarki struktur ruang merujuk pada susunan tingkatan pusat-pusat kegiatan dan jaringan prasarana dalam sistem tata ruang suatu wilayah. Hierarki ini menentukan peran fungsional masing-masing wilayah berdasarkan skala pelayanan, jangkauan pengaruh, serta kontribusinya terhadap sistem ruang secara keseluruhan — baik dalam lingkup nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Secara prinsip, hierarki struktur ruang bertujuan untuk:

- Mengarahkan pemerataan pembangunan antarkawasan.
- Meningkatkan efisiensi distribusi pelayanan publik dan kegiatan ekonomi.
- Memperkuat konektivitas antar pusat kegiatan dan simpul transportasi.

Dalam konteks Rencana Struktur Ruang Kabupaten Demak, Kecamatan Mranggen memegang peranan strategis yang cukup signifikan dalam sistem pengembangan wilayah. Kedudukan wilayah ini tercermin dalam dua level hierarki struktur ruang, yaitu sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan sekaligus sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

Kecamatan Mranggen ditetapkan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional, yaitu pusat kegiatan yang melayani aktivitas berskala internasional, nasional, atau lintas provinsi. Hal ini sejalan dengan posisi Kecamatan Mranggen yang termasuk dalam wilayah aglomerasi metropolitan Kedungsepur (Kendal-Demak-Ungaran-Salatiga-Purwodadi), sebuah kawasan strategis nasional yang berperan penting dalam mendukung konektivitas dan pertumbuhan kawasan perkotaan di Jawa Tengah bagian tengah.

Peran Mranggen sebagai PKN memperkuat posisinya sebagai:

Simpul jaringan transportasi regional, dengan kedekatannya ke Kota Semarang dan akses ke jalur utama nasional.

- Wilayah penyangga kegiatan ekonomi metropolitan, yang potensial untuk pengembangan permukiman, perdagangan, jasa, dan logistik.



- Wilayah penghubung antar kabupaten/kota, yang mendukung integrasi kegiatan antarsektor lintas daerah.

b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Selain sebagai PKN, Kecamatan Mranggen juga diklasifikasikan sebagai Pusat Kegiatan Lokal, yang memiliki fungsi untuk melayani aktivitas masyarakat dalam lingkup kabupaten atau beberapa kecamatan di sekitarnya. Sebagai PKL, Mranggen menyediakan berbagai fasilitas pelayanan dasar, seperti:

- Pusat perdagangan lokal (pasar rakyat, pusat grosir, dan layanan UMKM).
- Fasilitas pendidikan dan kesehatan skala kabupaten.
- Sarana transportasi dan perhubungan lokal.

5. Kecamatan Gajah

Kecamatan Gajah merupakan salah satu wilayah kecamatan di Kabupaten Demak yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kudus. Kecamatan Gajah memiliki luas 47,84 km². Kecamatan Gajah memiliki 18 desa dengan desa yang paling luas adalah Desa Kedondong sebesar 4,57 km² dan desa yang luasnya paling kecil yaitu Desa Mojosimo sebesar 1,69 km².

A. Kedudukan Hierarki Struktur Ruang

Hierarki struktur ruang adalah sistem pengorganisasian ruang berdasarkan tingkatannya dalam mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik. Hierarki ini menunjukkan susunan pusat-pusat kegiatan dari skala kecil hingga besar, yang saling terhubung melalui jaringan transportasi dan infrastruktur pendukung.

Berdasarkan amanat dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Demak, Kecamatan Gajah ditetapkan memiliki fungsi strategis dalam struktur ruang perkotaan Kabupaten. Kecamatan ini menempati posisi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), yaitu pusat kegiatan yang dirancang untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam cakupan skala kecamatan maupun beberapa desa di sekitarnya. Selain itu, Kecamatan Gajah juga berperan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), yakni pusat pelayanan dengan jangkauan yang lebih kecil, yaitu antar desa, yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat setempat.

Penetapan Kecamatan Gajah sebagai PPK dan PPL menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki potensi dan kapasitas untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai simpul pelayanan publik, distribusi barang dan jasa, serta aktivitas sosial-ekonomi yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pengembangan infrastruktur, aksesibilitas, dan fasilitas umum di Kecamatan Gajah perlu diarahkan sesuai dengan peran tersebut agar mampu

menjalankan fungsi strategisnya secara optimal dalam sistem struktur ruang Kabupaten Demak.

B. Rencana Kawasan Strategis

Rencana Kawasan Strategis adalah bagian dari rencana tata ruang yang menetapkan wilayah-wilayah tertentu yang memiliki pengaruh penting terhadap pertumbuhan wilayah, pemerataan pembangunan, kelestarian lingkungan, atau keamanan dan pertahanan. Kawasan ini ditetapkan karena karakteristik, potensi, atau perannya yang strategis baik dalam lingkup nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

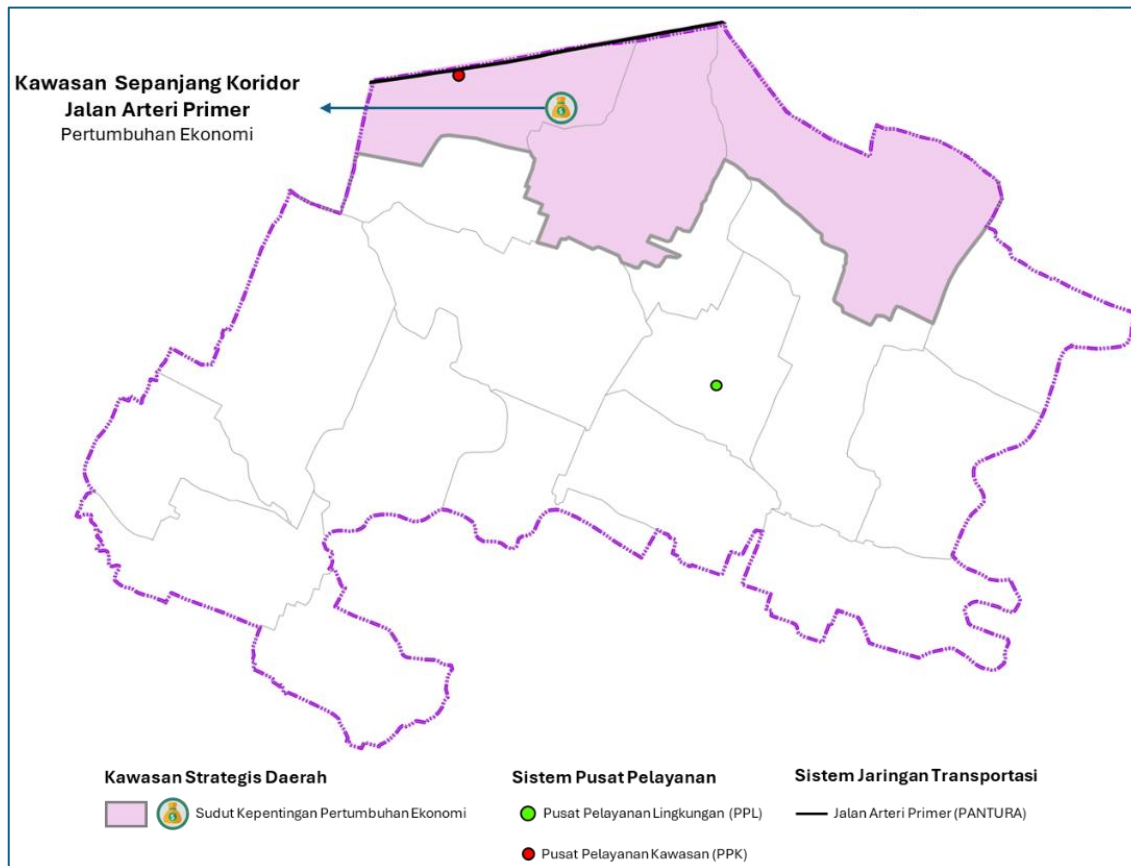
Dalam konteks RTRW Kabupaten Demak, Kecamatan Gajah telah ditetapkan sebagai bagian dari Rencana Kawasan Strategis Daerah, khususnya sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Penetapan ini didasarkan pada letak geografis Kecamatan Gajah yang dilalui oleh koridor jalan arteri primer, yakni Jalur Pantura Jawa, yang merupakan salah satu jalur transportasi dan distribusi barang utama di Pulau Jawa.

Kawasan ini memiliki potensi besar sebagai simpul kegiatan ekonomi yang dapat mendorong tumbuhnya perdagangan, jasa, serta sektor industri berskala kecil dan menengah. Oleh karena itu, pengembangan Kecamatan Gajah diarahkan pada penyediaan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi, peningkatan aksesibilitas wilayah, serta penciptaan ruang-ruang usaha yang kondusif untuk pertumbuhan sektor informal maupun formal.

Penetapan Kecamatan Gajah dalam kawasan strategis ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan konektivitas antarwilayah di sepanjang jalur Pantura,
- b. Mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal,
- c. Menyebarkan pusat-pusat kegiatan ekonomi secara lebih merata,
- d. Serta mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan produktif berbasis potensi wilayah.

Gambar III.6.
Kawasan Pertumbuhan Kecamatan Gajah



6. Kecamatan Dempet

Kecamatan Dempet merupakan salah satu dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Demak. Luas kecamatan ini adalah 61,62 km² yang terbagi menjadi 16 wilayah desa dengan desa terluas adalah Desa Kunir (5,66 km²) dan Desa Botosengon (1,59 km²). Secara geografis, Kecamatan Dempet terletak di 6°54'56" hingga 7°1'8" Lintang Selatan dan 110°41'19" hingga 110°47'11" Bujur Timur. Kecamatan Dempet juga merupakan salah satu wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan kabupaten lain yaitu Kabupaten Grobogan. Batas administrasi Kecamatan Dempet adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Gajah
Sebelah Timur : Kabupaten Grobogan
Sebelah Selatan : Kecamatan Kebonagung
Sebelah Barat : Kecamatan Wonosalam

A. Kedudukan Hierarki Struktur Ruang

Hierarki struktur ruang perkotaan merupakan sistem pengorganisasian wilayah berdasarkan tingkat pelayanan dan peran fungsionalnya terhadap kawasan sekitarnya. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan keterpaduan pembangunan antarwilayah, efisiensi pelayanan publik, serta distribusi aktivitas sosial dan ekonomi secara merata. Kedudukan dalam hierarki struktur ruang

ditentukan oleh seberapa luas cakupan pelayanan dan intensitas aktivitas yang terjadi di suatu wilayah.

Dalam konteks Kabupaten Demak, Kecamatan Dempet memiliki kedudukan penting dalam struktur ruang, yakni sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Sebagai PPK, Kecamatan Dempet memiliki tanggung jawab untuk melayani kegiatan skala kawasan yang mencakup beberapa desa di sekitarnya. Fungsinya meliputi penyediaan fasilitas pendidikan menengah, layanan kesehatan tingkat kecamatan, pasar tradisional berskala besar, serta fasilitas perkantoran dan layanan pemerintahan yang menunjang aktivitas masyarakat lintas desa.

Sementara itu, sebagai PPL, Kecamatan Dempet juga memiliki peran untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat di tingkat antar desa. Ini mencakup penyediaan fasilitas layanan primer seperti pendidikan dasar, layanan kesehatan dasar, fasilitas ibadah, dan ruang publik komunitas. Fungsi ganda sebagai PPK dan PPL menjadikan Kecamatan Dempet sebagai simpul pelayanan yang strategis, yang dapat mendorong pertumbuhan kawasan sekitar sekaligus menjaga kesinambungan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

Dengan peran tersebut, pengembangan Kecamatan Dempet diarahkan untuk memperkuat kapasitas pelayanannya, meningkatkan aksesibilitas antarwilayah, serta memperluas fungsi-fungsi ekonomi lokal yang mampu menstimulasi pertumbuhan wilayah secara merata dan berkelanjutan.

7. Kecamatan Guntur

Kecamatan Guntur merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Demak. Secara geografis, Kecamatan Guntur terletak di antara 110°32'50" hingga 110°40'29" Bujur Timur dan 6°56'2" hingga 7°1'21" Lintang Selatan. Kecamatan Guntur memiliki luas wilayah sebesar 57,52 km² yang terbagi menjadi 20 wilayah desa dengan desa yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Desa Temuroso sebesar 5,22 km² dan desa yang luasnya paling kecil yaitu Desa Sarirejo sebesar 1,46 km².

Batas administrasi Kecamatan Guntur adalah sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Karangtengah, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Wonosalam, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Karangawen dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sayung.

A. Kedudukan Hierarki Struktur Ruang

Kedudukan dalam hierarki struktur ruang perkotaan merupakan representasi dari tingkat peran dan fungsi suatu wilayah dalam mendukung kegiatan sosial, ekonomi, serta pelayanan publik di sekitarnya. Hierarki ini disusun secara berjenjang, mulai dari skala lokal hingga regional, untuk



memastikan pemerataan pembangunan dan efisiensi pengelolaan ruang. Dalam sistem ini, wilayah diklasifikasikan ke dalam beberapa pusat pelayanan, seperti Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), hingga Pusat Kegiatan Wilayah atau Pusat Kegiatan Nasional tergantung pada luas cakupan pelayanan dan intensitas kegiatan yang berlangsung.

Kecamatan Guntur menempati posisi strategis dalam hierarki struktur ruang perkotaan di Kabupaten Demak, dengan kedudukan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sekaligus Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Sebagai PPK, Kecamatan Guntur berperan menyediakan layanan dan mendukung aktivitas sosial-ekonomi dalam cakupan wilayah yang lebih luas, yaitu meliputi skala kecamatan atau beberapa desa di sekitarnya. Fungsi ini mencerminkan pentingnya Kecamatan Guntur sebagai simpul pelayanan yang menopang pertumbuhan kawasan, baik dari aspek mobilitas, ekonomi, maupun infrastruktur dasar.

Sementara itu, dalam kapasitasnya sebagai PPL, Kecamatan Guntur juga memiliki tanggung jawab melayani kegiatan dengan skala antar desa. Peran ini menjadikan Kecamatan Guntur sebagai titik sentral dalam mendistribusikan pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas penunjang ekonomi, bagi desa-desa di sekitarnya. Kedudukan ganda sebagai PPK dan PPL menunjukkan bahwa Kecamatan Guntur memiliki potensi yang cukup besar dalam mendorong integrasi antarwilayah dan pemerataan pembangunan, sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan lokal yang mendukung perwujudan tata ruang yang efektif, efisien, dan berkelanjutan di Kabupaten Demak.

8. Kecamatan Bonang

Secara geografis, Kecamatan Bonang terletak di antara 6°47'40" hingga 6°54'42" Lintang Selatan dan 110°31'18" hingga 110°39'55" Bujur Timur. Luas wilayah Kecamatan Bonang adalah 83,24 km² atau sebesar 9,28% dari luas wilayah Kabupaten Demak. Wilayah Kecamatan Bonang terbagi atas 21 desa di mana desa dengan wilayah terluas adalah Desa Purworejo yaitu seluas 7,41 km² dan desa dengan luas wilayah terkecil yaitu Desa Margolinduk dengan luas wilayah sebesar 0,95 km². Secara administrasi, Kecamatan Bonang berbatasan langsung dengan Kecamatan Wedung di bagian utara, Kecamatan Demak di bagian timur, Kecamatan Karang Tengah di bagian selatan dan Laut Jawa di bagian barat.

A. Kedudukan Hierarki Struktur Ruang

Hierarki struktur ruang adalah sistem pengelompokan wilayah berdasarkan peran, fungsi, dan tingkat pelayanannya terhadap kawasan sekitarnya. Konsep ini



berfungsi untuk menciptakan keterpaduan pengembangan wilayah, efisiensi pelayanan publik, serta distribusi aktivitas sosial, ekonomi, dan infrastruktur secara merata. Penetapan kedudukan dalam hierarki ini mempertimbangkan luas cakupan layanan dan intensitas kegiatan yang berlangsung di suatu wilayah, baik pada tingkat lokal maupun regional.

Dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Demak, Kecamatan Bonang diklasifikasikan sebagai salah satu wilayah dengan peran ganda dalam sistem struktur ruang, yakni sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

a. Kecamatan Bonang sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Sebagai PPK, Kecamatan Bonang memiliki tanggung jawab utama dalam mendukung penyediaan layanan skala kawasan yang mencakup sejumlah desa di sekitarnya. Fungsi ini mencakup pelayanan administrasi pemerintahan, kegiatan ekonomi skala menengah, fasilitas kesehatan tingkat kecamatan, lembaga pendidikan menengah, serta pusat distribusi barang dan jasa. Kedudukan Bonang sebagai PPK menjadikannya simpul pertumbuhan lokal yang strategis dan aksesibilitasnya terhadap pusat-pusat ekonomi lainnya di Kabupaten Demak. Dengan intensitas kegiatan yang cukup tinggi dan jaringan infrastruktur yang relatif memadai, Kecamatan Bonang memainkan peran penting dalam menopang dinamika sosial dan ekonomi di wilayah utara Kabupaten Demak.

b. Kecamatan Bonang sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Selain berfungsi sebagai PPK, Kecamatan Bonang juga ditetapkan sebagai PPL, yaitu pusat pelayanan dengan cakupan yang lebih terbatas pada skala antar desa. Dalam konteks ini, Kecamatan Bonang menyediakan layanan dasar seperti pendidikan dasar, fasilitas kesehatan tingkat desa/puskesmas pembantu, serta pelayanan administratif untuk kebutuhan masyarakat setempat. Fungsi PPL ini secara spesifik terkonsentrasi di dua desa utama, yaitu Desa Gebang dan Desa Bonangrejo, yang masing-masing memiliki potensi strategis dan dukungan infrastruktur untuk menyelenggarakan layanan kepada desa-desa di sekitarnya.

Kedua desa tersebut memiliki fasilitas dan jaringan yang relatif lebih lengkap dibanding desa lainnya di Kecamatan Bonang, menjadikannya sebagai titik pelayanan primer dalam lingkup lokal. Hal ini didukung pula oleh konektivitas jalan, kedekatan dengan area permukiman padat, serta potensi ekonomi lokal seperti pertanian, perdagangan kecil-menengah, dan jasa.

Kedudukan ganda sebagai PPK dan PPL mencerminkan tingginya intensitas kegiatan serta potensi wilayah yang dimiliki Kecamatan Bonang, yang perlu terus dikembangkan secara terintegrasi melalui penyediaan infrastruktur dasar,

peningkatan aksesibilitas, serta penguatan fungsi-fungsi pelayanan publik dan ekonomi wilayah.

B. Rencana Kawasan Strategis

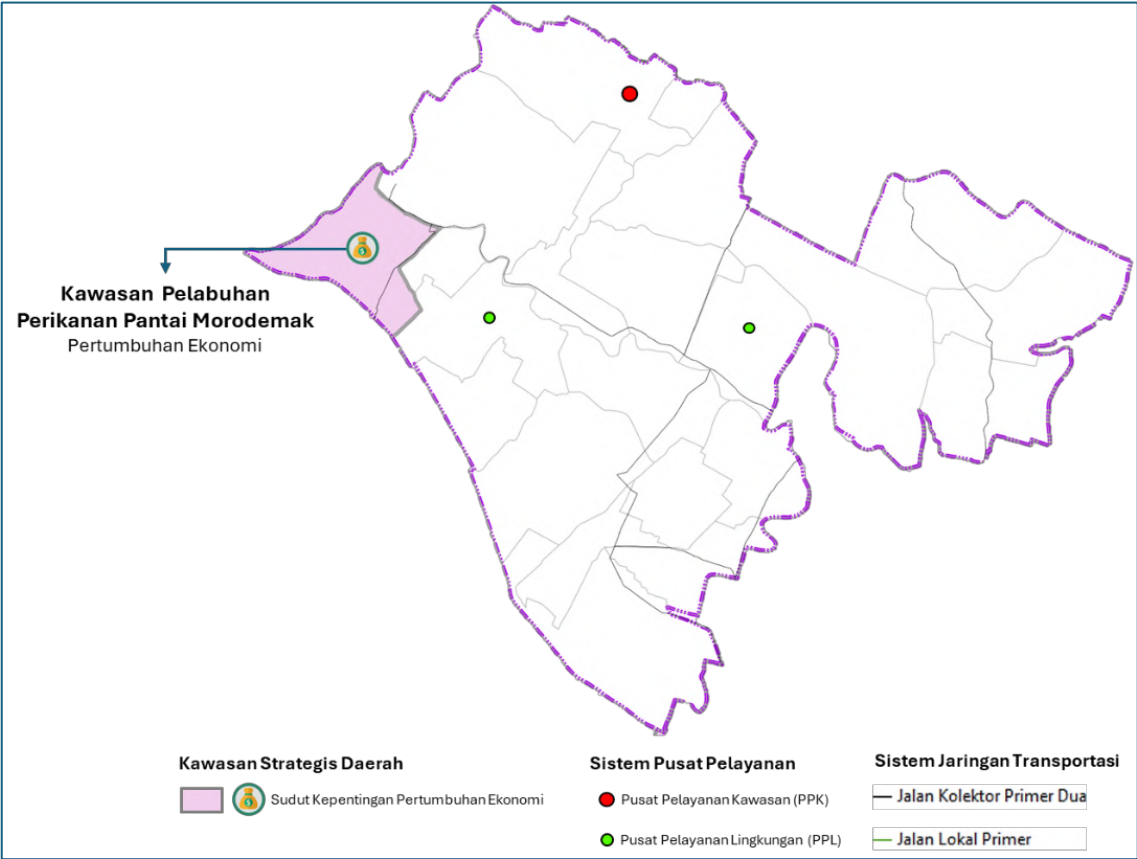
Rencana Kawasan Strategis adalah bagian dari rencana tata ruang yang mengarahkan pembangunan di kawasan tertentu yang memiliki kepentingan strategis bagi daerah atau negara, misalnya karena berpotensi menggerakkan ekonomi, memiliki nilai penting untuk kelestarian lingkungan, atau berada di wilayah perbatasan.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Demak, Kecamatan Bonang ditetapkan sebagai bagian dari Rencana Kawasan Strategis Daerah, terutama dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Penetapan Kecamatan Bonang sebagai kawasan strategis lingkungan didasarkan pada kondisi eksisting kawasan yang tergolong rawan terhadap bencana abrasi pantai dan genangan rob yang terjadi secara periodik. Fenomena tersebut telah berdampak signifikan terhadap penurunan kualitas lingkungan, hilangnya lahan produktif, serta meningkatnya kerentanan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Selain itu, perubahan garis pantai yang cukup masif juga mengancam keberlangsungan infrastruktur dan permukiman di wilayah pesisir Bonang.

Dalam konteks perencanaan wilayah dan penataan ruang, keberadaan kawasan yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana lingkungan perlu mendapatkan perhatian khusus. Oleh karena itu, pengembangan Kecamatan Bonang sebagai kawasan strategis daerah diarahkan tidak hanya untuk mengatasi persoalan lingkungan, tetapi juga untuk mendorong pengelolaan ruang yang adaptif terhadap perubahan iklim serta berkelanjutan dalam jangka panjang. Pendekatan yang digunakan mencakup konservasi wilayah pesisir, penguatan infrastruktur hijau, dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal dalam menghadapi risiko bencana.

Gambar III.7.
Kawasan Pertumbuhan Kecamatan Bonang



9. Kecamatan Karangawen

Kecamatan Karangawen merupakan salah satu dari 14 kecamatan yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Demak. Kecamatan ini terletak di 7°0'24" hingga 7°8'23" Lintang Selatan dan 110°30'36" hingga 110°37'10" Bujur Timur dengan luas wilayah sebesar 77,5 km². Wilayah Kecamatan Karangawen terbagi menjadi 12 desa dengan Desa Jragung menjadi desa dengan wilayah terbesar yaitu 27,12 km².

Secara administratif, Kecamatan Karanganyar memiliki batas wilayah dengan Kecamatan Guntur di sebelah utara, Kabupaten Grobogan di sebelah timur, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, serta Kecamatan Mranggen di sebelah barat.

A. Kedudukan Hierarki Struktur Ruang

Kedudukan hierarki struktur ruang mengacu pada tingkatan peran dan fungsi suatu wilayah dalam sistem struktur ruang, baik pada skala lokal, regional, maupun nasional. Konsep ini menjadi instrumen penting dalam perencanaan tata ruang karena menggambarkan pola interaksi antarwilayah serta kontribusi masing-masing wilayah terhadap pengembangan kawasan secara menyeluruh.

Dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Demak, Kecamatan Karangawen menempati posisi strategis sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sekaligus Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Fungsi PPK di wilayah ini diarahkan untuk melayani kegiatan berskala kecamatan maupun



beberapa desa di sekitarnya, mencerminkan perannya sebagai simpul pelayanan dan distribusi bagi wilayah sekitarnya. Sementara itu, fungsi PPL yang berlokasi di Desa Tlogorejo berperan dalam melayani kegiatan berskala antar desa, terutama dalam mendukung akses terhadap pelayanan dasar serta kegiatan ekonomi lokal. Penetapan Kecamatan Karangawen dalam dua tingkatan hierarki ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki potensi dan peran penting dalam mendukung sistem jaringan pelayanan di Kabupaten Demak, khususnya dalam mengintegrasikan pembangunan antarwilayah melalui pendekatan spasial yang efisien dan berkelanjutan.

10. Kecamatan Wonosalam

Secara geografis, Kecamatan Wonosalam terletak di antara 6°52'4" hingga 6°58'23" Lintang Selatan dan 110°35'34" hingga 110°43'22" Bujur Timur. Kecamatan Wonosalam berbatasan langsung dengan Kecamatan Demak di bagian utara, Kecamatan Gajah dan Dempet di bagian timur, Kecamatan Kebonagung di bagian selatan dan Kecamatan Karang Tengah di bagian barat.

A. Kedudukan Hierarki Struktur Ruang

Dalam kerangka penataan ruang wilayah Kabupaten Demak, Kecamatan Wonosalam menempati posisi strategis dalam sistem hierarki struktur ruang sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sekaligus memiliki beberapa titik sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Kedudukan ini memberikan gambaran bahwa Wonosalam tidak hanya berperan sebagai pusat administrasi kecamatan, tetapi juga menjadi simpul utama dalam distribusi pelayanan publik dan pengembangan wilayah.

a. Sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Sebagai PPK, Kecamatan Wonosalam memiliki tanggung jawab dan peran dalam menyelenggarakan pelayanan yang menjangkau skala kecamatan hingga beberapa desa di sekitarnya. Fungsi ini mencakup:

- Pelayanan administrasi pemerintahan, seperti kantor kecamatan, kepolisian, dan unit layanan publik lainnya.
- Pusat kegiatan ekonomi, termasuk pasar tradisional, fasilitas perdagangan, dan kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
- Fasilitas sosial dan pendidikan, seperti sekolah menengah, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), tempat ibadah, dan ruang publik

b. Sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Selain sebagai PPK, Kecamatan Wonosalam juga memiliki peran sebagai PPL yang berkonsentrasi di Desa Kendaldoyong dan Desa Trengguli. Kedua desa tersebut ditetapkan sebagai PPL karena memiliki potensi dan kapasitas dalam menyediakan layanan dasar kepada wilayah di sekitarnya. Fungsi PPL mencakup:

- Penyediaan fasilitas pendidikan dasar dan kesehatan tingkat pertama.
- Aktivitas ekonomi lokal berbasis komunitas desa dan pertanian.
- Fasilitas pelayanan keagamaan, sosial, dan sarana olahraga.
- Peran dalam penguatan ketahanan wilayah perdesaan dan konektivitas antar wilayah dalam kecamatan.

Dengan kedudukan ganda sebagai PPK dan PPL, Kecamatan Wonosalam memainkan peran penting dalam sistem struktur ruang Kabupaten Demak. Peran ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat ketahanan wilayah dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

B. Rencana Kawasan Strategis

Dalam konteks perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Demak, Kecamatan Wonosalam ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Daerah yang memiliki arti penting dari sudut pandang kepentingan pertumbuhan ekonomi. Penetapan ini didasarkan pada posisi geografis Kecamatan Wonosalam yang sangat strategis, yaitu berada pada koridor jalan arteri primer yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Demak dengan wilayah eksternal seperti Kabupaten Semarang, Kota Semarang, dan Kabupaten Grobogan. Koridor jalan ini tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi utama, tetapi juga sebagai poros pertumbuhan ekonomi yang mampu memicu peningkatan aktivitas masyarakat, investasi, dan konektivitas antarwilayah.

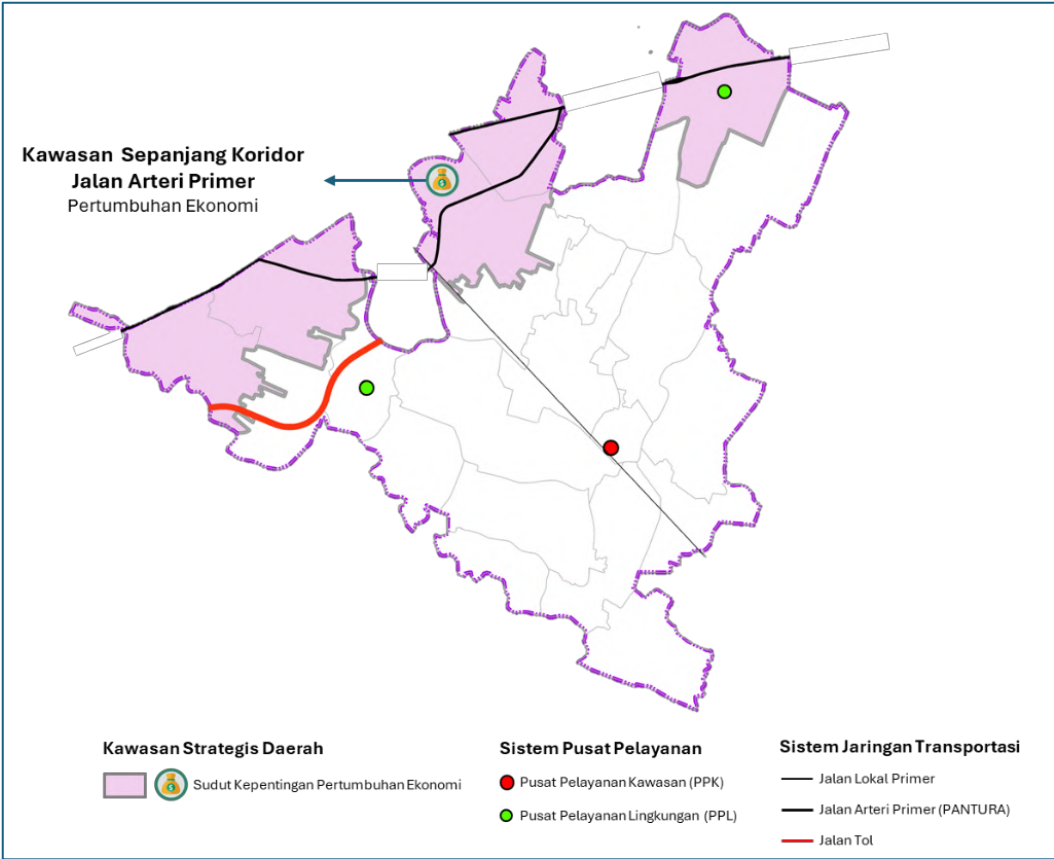
Sebagai kawasan strategis dari aspek ekonomi, Kecamatan Wonosalam diarahkan untuk menjadi lokus pengembangan sektor perdagangan, jasa, industri kecil-menengah, dan permukiman terencana. Ruang sepanjang koridor jalan arteri primer memiliki karakteristik khas sebagai ruang tumbuhnya pusat-pusat kegiatan ekonomi lokal maupun regional, dengan keberadaan pasar tradisional, fasilitas logistik, dan jaringan pelayanan dasar yang terus berkembang. Selain itu, kawasan ini juga menjadi titik simpul distribusi barang dan mobilitas penduduk yang tinggi, sehingga sangat potensial untuk pengembangan klaster ekonomi lokal, kawasan transit perdagangan, serta sentra usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis potensi desa.

Arah kebijakan pengembangan kawasan strategis ini ditujukan untuk mendorong transformasi ekonomi wilayah secara bertahap namun terstruktur. Pemerintah daerah diharapkan memberikan perhatian khusus dalam bentuk dukungan kebijakan, insentif pengembangan infrastruktur, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di sepanjang jalur strategis ini. Hal ini dapat mencakup penguatan jaringan jalan, penyediaan fasilitas umum dan sosial, serta regulasi pemanfaatan ruang yang mengarahkan pertumbuhan secara terkendali. Pengembangan kawasan strategis ini juga perlu didukung dengan konservasi

lingkungan dan pengendalian pemanfaatan ruang, agar tetap selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan setempat.

Kawasan strategis Kecamatan Wonosalam tidak hanya berfungsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga menjadi bagian integral dari strategi pembangunan wilayah Kabupaten Demak secara menyeluruh. Dengan memperkuat peranannya dalam sistem struktur ruang regional, kawasan ini diharapkan mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja, akses pasar, dan peningkatan kualitas hidup. Dengan demikian, Rencana Kawasan Strategis Kecamatan Wonosalam merupakan salah satu pilar penting dalam pencapaian pembangunan wilayah yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

Gambar III.8.
Kawasan Pertumbuhan Kecamatan Wonosalam



11. Kecamatan Karanganyar

Kecamatan Karanganyar merupakan salah satu dari 14 kecamatan yang membentuk wilayah administrasi Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Wilayah ini memiliki letak geografis yang cukup strategis, yaitu berada pada kisaran koordinat antara 110°42'53" hingga 110°50'19" Bujur Timur dan 6°47'28" hingga 6°53'53" Lintang Selatan. Posisi ini menempatkan Kecamatan Karanganyar di bagian timur Kabupaten Demak, dengan akses langsung ke wilayah kabupaten tetangga dan jaringan transportasi regional. Dari sisi batas administratif,



Kecamatan Karanganyar berbatasan langsung dengan Kabupaten Kudus di sebelah utara dan timur, berbatasan dengan Kecamatan Gajah di selatan, serta berbatasan dengan Kecamatan Mijen di bagian barat.

A. Kedudukan Hierarki Struktur Ruang

Dalam sistem struktur ruang wilayah Kabupaten Demak, Kecamatan Karanganyar memiliki peran penting sebagai salah satu simpul pelayanan wilayah yang mendukung pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah secara berjenjang. Berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Demak, Kecamatan Karanganyar ditetapkan dalam hierarki struktur perkotaan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan sekaligus sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Penetapan ini menegaskan fungsi ganda wilayah ini dalam melayani kegiatan masyarakat pada skala yang lebih luas, baik di tingkat kecamatan maupun antar desa.

Sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Kecamatan Karanganyar memiliki peran strategis dalam memberikan layanan dan aksesibilitas terhadap fasilitas umum dan sosial bagi masyarakat dari beberapa desa di sekitarnya. Fungsi ini mencakup penyediaan layanan pendidikan menengah, fasilitas kesehatan tingkat pertama dan menengah, pusat pemerintahan kecamatan, fasilitas perdagangan, dan infrastruktur dasar seperti jaringan jalan dan transportasi. Keberadaan PPK ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pelayanan antarwilayah serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah hinterland-nya. Sementara itu, sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), Kecamatan Karanganyar, yang pusat konsentrasinya berada di Desa Cangkring, berfungsi untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat pada skala antar desa. Desa Cangkring dipandang strategis karena letaknya yang relatif sentral terhadap wilayah-wilayah desa lain di Kecamatan Karanganyar, serta memiliki potensi sumber daya manusia dan infrastruktur yang mendukung fungsi pelayanan tersebut. Di tingkat PPL, pelayanan yang disediakan lebih bersifat lokal, seperti pendidikan dasar, posyandu, pasar desa, serta layanan administrasi dan ekonomi berbasis komunitas.

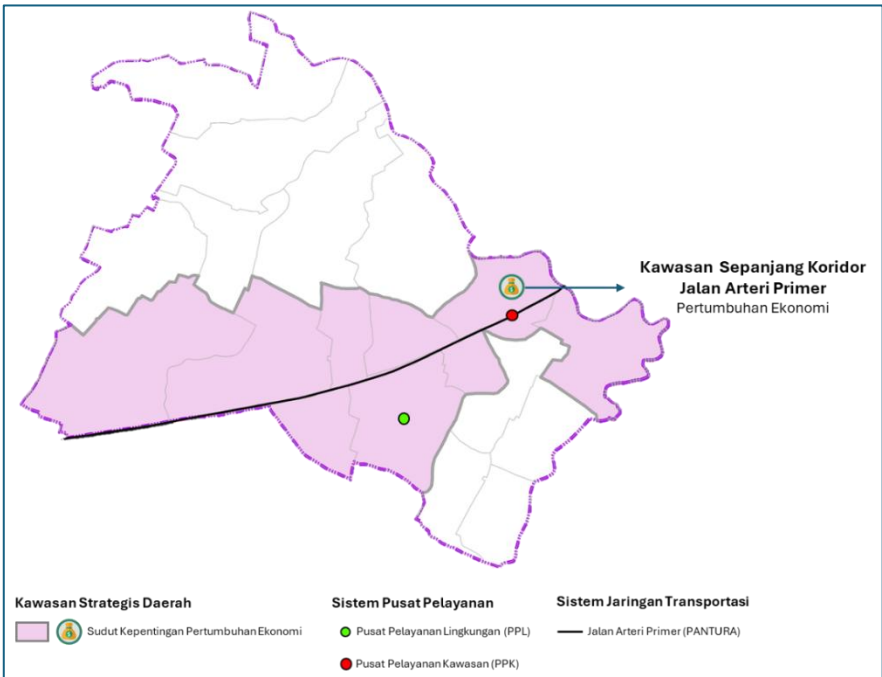
Penempatan Desa Cangkring sebagai simpul pelayanan lingkungan memberikan dampak positif terhadap mobilitas penduduk dan pertumbuhan ekonomi lokal. Desa ini berkembang sebagai kawasan dengan konsentrasi aktivitas penduduk yang lebih tinggi dibanding desa-desa lain, yang ditandai dengan adanya pusat perdagangan kecil, sentra UMKM, serta aktivitas sosial dan budaya masyarakat. Dengan demikian, Desa Cangkring memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi pusat pelayanan terpadu berbasis desa yang mendukung struktur perkotaan Kecamatan Karanganyar secara keseluruhan.

B. Rencana Kawasan Strategis

Dalam kerangka perencanaan pembangunan wilayah Kabupaten Demak, Kecamatan Karanganyar ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Daerah yang memiliki arti penting dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Penetapan ini didasarkan pada posisi geografis dan jaringan infrastruktur transportasi yang dimiliki, terutama keberadaan koridor jalan arteri primer yang melintasi wilayah ini dan berfungsi sebagai tulang punggung pergerakan barang dan jasa antara Kabupaten Demak dan Kabupaten Kudus serta daerah lain di kawasan Pantura Timur Jawa Tengah.

Kawasan sepanjang koridor jalan arteri primer di Kecamatan Karanganyar memiliki potensi besar sebagai zona pertumbuhan ekonomi baru yang dapat menggerakkan sektor-sektor produktif masyarakat. Jalan arteri primer ini menghubungkan berbagai pusat kegiatan ekonomi, baik di dalam maupun di luar Kabupaten Demak, sehingga menciptakan aksesibilitas tinggi terhadap pasar, logistik, dan mobilitas tenaga kerja. Hal ini menjadikan kawasan tersebut sangat potensial untuk dikembangkan menjadi pusat perdagangan, jasa, pergudangan, dan bahkan kawasan industri berskala kecil dan menengah (IKM).

Gambar III.9.
Kawasan Pertumbuhan Kecamatan Karanganyar



12. Kecamatan Mijen

Kecamatan Mijen merupakan salah satu wilayah administratif yang berada di dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Wilayah ini memiliki posisi yang cukup strategis karena terletak di bagian barat laut Kabupaten Demak dan menjadi salah satu kawasan penghubung antarwilayah kabupaten. Dari sisi geografis, Kecamatan Mijen berada di antara 6⁰ 45' 47" hingga 6⁰ 52' 2" Lintang Selatan dan 110⁰ 39' 33" hingga 110⁰ 45' 34" Bujur Timur.



Secara administratif, Kecamatan Mijen memiliki batas wilayah yang langsung bersinggungan dengan beberapa kawasan penting di sekitarnya. Di sebelah utara, Mijen berbatasan langsung dengan Kabupaten Jepara, yang merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi dan industri kreatif di Jawa Tengah. Di bagian timur, wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Karanganyar, yang juga menjadi kawasan strategis dalam perencanaan wilayah Kabupaten Demak. Sementara itu, di sebelah selatan, Kecamatan Mijen berbatasan dengan Kecamatan Demak, yang merupakan pusat pemerintahan kabupaten, sedangkan di bagian barat, wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Wedung, salah satu kawasan pesisir yang memiliki potensi kelautan dan perikanan.

A. Kedudukan Hierarki Struktur Ruang

Dalam kerangka penataan ruang wilayah Kabupaten Demak, Kecamatan Mijen memiliki peran penting dalam sistem hierarki struktur ruang sebagai bagian dari upaya pemerataan pelayanan dan penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Demak, Kecamatan Mijen ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sekaligus sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Sebagai PPK, Kecamatan Mijen berperan melayani aktivitas sosial dan ekonomi dengan skala kecamatan atau mencakup beberapa desa di sekitarnya. Peran ini mencakup fungsi pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan, serta fasilitas umum lainnya yang menjangkau penduduk lintas desa. Fungsi ini sangat relevan dengan posisi geografis Mijen yang strategis, karena berada di antara pusat-pusat kegiatan penting di Kabupaten Demak serta berbatasan langsung dengan Kabupaten Jepara.

Selain sebagai PPK, Kecamatan Mijen juga memiliki fungsi sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang berkonsentrasi di Desa Bakung. Fungsi PPL bertujuan melayani kebutuhan masyarakat dalam skala lebih kecil, yaitu antar desa atau lingkungan lokal. Di tingkat PPL, pelayanan lebih diarahkan pada penyediaan fasilitas pendidikan dasar, pelayanan kesehatan tingkat pertama, pasar desa, dan kegiatan ekonomi kerakyatan seperti sentra pertanian atau industri rumah tangga.

13. Kecamatan Kebonagung

Kecamatan Kebonagung merupakan salah satu wilayah administratif yang terletak di bagian selatan Kabupaten Demak. Secara geografis, kecamatan ini berada pada koordinat antara $110^{\circ} 40' 4''$ hingga $110^{\circ} 45' 45''$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 57' 50''$ hingga $7^{\circ} 3' 15''$ Lintang Selatan. Letak geografis ini menunjukkan bahwa Kebonagung menempati wilayah yang strategis di antara batas Kabupaten Demak dan wilayah tetangganya. Dari segi administratif, Kecamatan Kebonagung berbatasan langsung dengan Kecamatan Dempet, Wonosalam, dan Guntur di

bagian utara, yang menjadikannya terhubung dengan pusat-pusat kegiatan sosial-ekonomi lokal. Sementara itu, di bagian selatan, wilayah ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Grobogan, yang memberikan potensi interaksi antar wilayah baik dalam aspek mobilitas penduduk, perdagangan, maupun pemanfaatan sumber daya alam.

A. Kedudukan Hierarki Struktur Ruang

Dalam struktur tata ruang wilayah Kabupaten Demak, Kecamatan Kebonagung memiliki peran penting dalam kedudukan hierarki struktur ruang perkotaan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan sekaligus sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Sebagai PPK, Kecamatan Kebonagung menjalankan fungsi pelayanan terhadap kegiatan sosial, ekonomi, dan administratif yang berskala kecamatan maupun mencakup beberapa desa di sekitarnya. Fungsi ini mencakup penyediaan fasilitas umum seperti pusat pemerintahan kecamatan, pendidikan menengah, pasar kecamatan, serta fasilitas kesehatan tingkat pertama, yang secara keseluruhan menjadi simpul aktivitas utama bagi masyarakat di wilayah sekitarnya.

Sementara itu, sebagai PPL yang berlokasi di Desa Werdoyo, Kecamatan Kebonagung juga menjalankan peran strategis dalam mendukung kegiatan pelayanan antar desa dalam satu kawasan lingkungan yang lebih kecil. PPL berfungsi sebagai simpul pelayanan dasar dan interaksi masyarakat antar desa yang mencakup fasilitas pendidikan dasar, layanan kesehatan dasar, fasilitas keagamaan, dan kegiatan ekonomi lokal seperti pasar desa dan pusat kerajinan atau pertanian rakyat.

Kombinasi peran sebagai PPK dan PPL ini menunjukkan bahwa Kecamatan Kebonagung memiliki posisi penting dalam pengembangan struktur ruang wilayah, baik sebagai pusat pertumbuhan lokal maupun sebagai penghubung antar wilayah desa. Keberadaan pusat-pusat pelayanan tersebut tidak hanya mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat, tetapi juga memperkuat jaringan permukiman dan konektivitas antarwilayah dalam konteks pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kabupaten Demak.

14. Kecamatan Wedung

Kecamatan Wedung adalah salah satu wilayah administratif yang terletak di bagian barat laut Kabupaten Demak. Secara geografis, wilayah ini berada pada koordinat antara 110° 32' 3" hingga 110° 40' 28" Bujur Timur dan 6° 42' 21" hingga 6° 50' 8" Lintang Selatan. Letaknya yang strategis menjadikan Kecamatan Wedung memiliki karakter geografis yang khas, yakni meliputi kawasan pesisir yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sisi barat.



Dari sisi administratif, Kecamatan Wedung dikelilingi oleh beberapa wilayah yang turut membentuk dinamika sosial dan ekonomi setempat. Di bagian utara, Wedung berbatasan langsung dengan Kabupaten Jepara, yang memungkinkan adanya interaksi lintas daerah, khususnya dalam bidang perdagangan, perikanan, dan transportasi. Di sebelah timur, wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Mijen, sementara di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bonang. Posisi tersebut menjadikan Kecamatan Wedung sebagai penghubung antara kawasan pesisir utara dan wilayah pedalaman Kabupaten Demak.

A. Kedudukan Hierarki Struktur Ruang

Kecamatan Wedung memiliki peran penting dalam struktur tata ruang wilayah Kabupaten Demak, yang tercermin melalui kedudukannya dalam hierarki struktur ruang sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Sebagai PPK, Kecamatan Wedung berfungsi sebagai pusat kegiatan yang melayani kebutuhan masyarakat dalam skala kecamatan atau mencakup beberapa desa di sekitarnya. Fungsi ini ditunjang oleh keberadaan fasilitas pelayanan dasar seperti pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, serta sarana transportasi yang memungkinkan aksesibilitas antardesa. Peran sebagai PPK juga menjadikan Kecamatan Wedung sebagai simpul penggerak pertumbuhan wilayah dan pusat distribusi aktivitas sosial-ekonomi di kawasan pesisir timur Kabupaten Demak.

Selain itu, Kecamatan Wedung juga memiliki fungsi sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), yang lebih terfokus pada pelayanan kegiatan skala antar desa. Dalam konteks ini, Desa Buko dan Desa Bungo menjadi titik konsentrasi pelayanan lokal yang mendukung kebutuhan masyarakat setempat, seperti pelayanan administrasi, layanan sosial, serta pusat aktivitas ekonomi mikro. Peran PPL ini bersifat komplementer terhadap PPK, di mana keduanya bersama-sama menciptakan jaringan pelayanan yang menyeluruh dan merata di wilayah kecamatan. Dengan demikian, struktur ruang di Kecamatan Wedung dirancang untuk mendorong keterpaduan pembangunan, memperkuat pusat-pusat pertumbuhan lokal, dan mendukung konektivitas antarkawasan secara berkelanjutan.

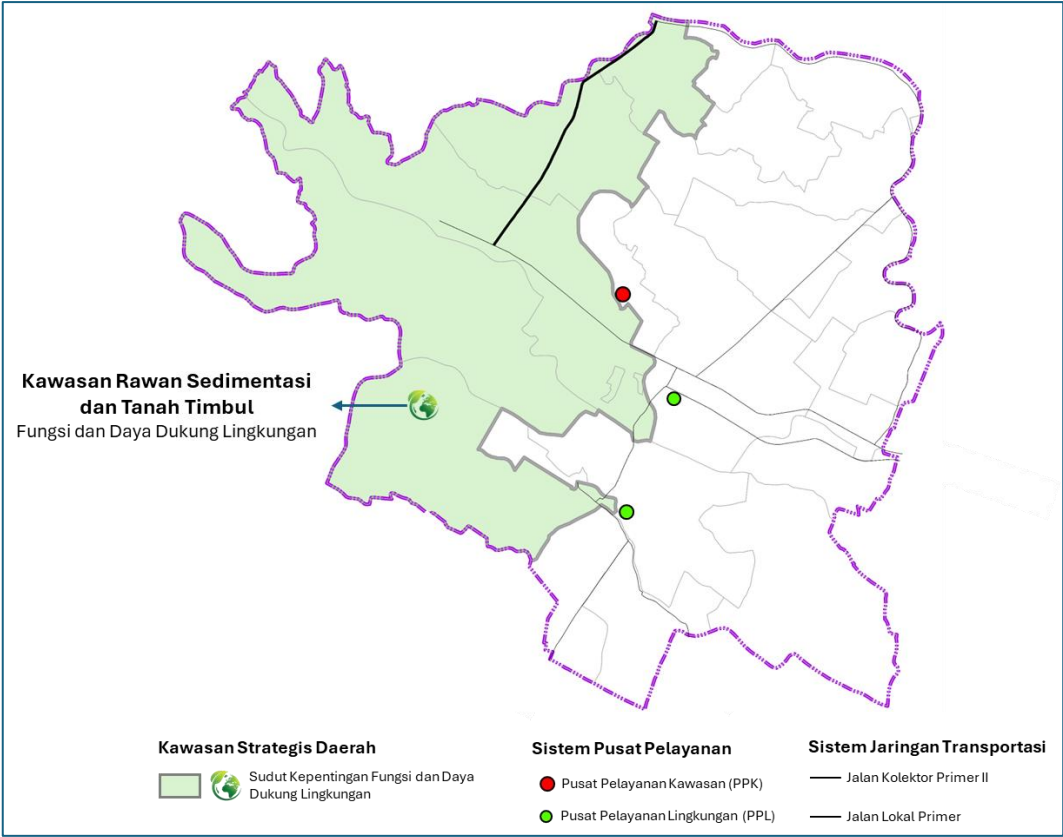
B. Rencana Kawasan Strategis

Rencana Kawasan Strategis Kecamatan Wedung ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Daerah yang memiliki nilai penting dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Penetapan ini didasarkan pada kondisi geografis dan ekologis Kecamatan Wedung yang berada di wilayah pesisir utara Kabupaten Demak, yang secara alami sangat dipengaruhi oleh proses-proses dinamika pesisir, seperti sedimentasi dan pembentukan tanah timbul.

Kawasan ini termasuk dalam wilayah yang mengalami perubahan morfologi lahan secara signifikan akibat sedimentasi yang terus berlangsung dari waktu ke waktu, terutama di muara sungai dan sepanjang garis pantai yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Fenomena tanah timbul di wilayah ini menciptakan ruang baru yang secara alami berpotensi dimanfaatkan, namun di sisi lain juga menuntut pengelolaan yang cermat untuk menjaga stabilitas lingkungan pesisir.

Sebagai kawasan strategis dari aspek lingkungan hidup, wilayah ini memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan dan pengelolaan ruang, terutama dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, dan zona sempadan pantai. Pengelolaan kawasan strategis ini harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan agar tidak menimbulkan kerusakan ekologis yang dapat berdampak pada keberlanjutan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Gambar III.10.
Kawasan Pertumbuhan Kecamatan Wedung



BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan kerangka pendanaan pembangunan daerah serta program perangkat daerah yang mencakup indikasi program dan pagu indikatif program guna mencapai visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029. Selain itu, bab ini menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, dengan memuat target indikasi program dan pagu indikatif sesuai periodisasi RPJMD.

Kerangka pendanaan mencerminkan kapasitas riil keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Demak untuk periode 2025-2029, sedangkan belanja daerah merupakan kebutuhan anggaran yang diperlukan guna membiayai pembangunan selama periode tersebut.

Indikasi program merujuk pada program-program yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan pembangunan tahun 2025-2029. Sementara itu, pagu indikatif merupakan gambaran kebutuhan pendanaan yang tersedia dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disusun beserta kebutuhan pendanaannya selanjutnya dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Rumusan target kinerja program dalam setiap urusan pemerintahan, baik bidang wajib maupun pilihan, disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD Kabupaten Demak, APBD Provinsi, APBN, serta sumber pendanaan lainnya.

Rencana program dan kegiatan prioritas Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2026-2029 berisi program, kegiatan dan subkegiatan untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu penyusunan RKPD tahun 2030 dan Renja Perangkat Daerah 2030 yang akan menjadi tanggungjawab Kepala Daerah Periode 2030-2034. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat

Daerah. Uraian program pembangunan tiap urusan/unsur adalah sebagai berikut:

XX. Non Urusan

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini merupakan program yang dilaksanakan secara rutin oleh seluruh perangkat daerah dengan indikator tingkat kepuasan layanan kesekretariatan. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Terdapat kegiatan khusus pada Dinas Kesehatan yaitu Peningkatan Pelayanan BLUD serta pada Sekretariat Daerah dengan kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, Penataan Organisasi, dan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Pada Sekretariat DPRD juga terdapat tambahan kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dan Layanan Administrasi DPRD.

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

1) Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini melaksanakan prioritas Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

Program ini juga dimaksudkan untuk memenuhi standar pelayanan minimal di bidang pendidikan yaitu peningkatan pelayanan dasar pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal/kesetaraan. Tolak ukur yang ditetapkan yaitu tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD, tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar, tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama serta tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan



menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

2) Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diukur dengan Persentase muatan lokal yang telah memiliki silabus dan kurikulum Pendidikan Dasar dan Persentase muatan lokal yang telah memiliki silabus dan kurikulum PAUD dan PNF.

3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diukur dengan persentase tenaga pendidik bersertifikat profesi serta indeks distribusi guru.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan; dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan

1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diukur dengan persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan, Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna, Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Prevalensi Wasting, Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar, Prevalensi Obesitas > 18 tahun, Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Persentase Depresi yang mendapatkan Layanan pada usia ≥ 15 Tahun, Cakupan Penemuan Kasus TB (Dengan Satuan, dan angka Keberhasilan Pengobatan TB).

2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diukur dengan persentase tenaga kesehatan berkompetensi di fasilitas pelayanan kesehatan dan Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi.

3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini diukur dengan persentase sarana pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan serta sarana produksi makanan dan minuman sesuai ketentuan, persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar, persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.

4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diukur dengan persentase rumah tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup.

**c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.**

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Program ini diukur dengan persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan persentase sarana prasarana pengendali banjir dalam kondisi baik.
- 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Program ini diukur dengan persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (PDAM dan Non PDAM).
- 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Program ini diukur dengan persentase rumah tangga yang terlayani akses sanitasi layak.
- 4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
Program ini diukur dengan persentase drainase perkotaan yang tertangani.
- 5) Program Penataan Bangunan Gedung
Program ini diukur dengan rasio kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kabupaten
- 6) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Program ini diukur dengan luas kawasan bangunan dan lingkungan yang tertata dengan baik.
- 7) Program Penyelenggaraan Jalan
Program ini diukur dengan panjang jalan dalam kondisi mantap.
- 8) Program Pengembangan Jasa Konstruksi.
Program ini diukur dengan rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih.
- 9) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Program ini diukur dengan persentase kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

**d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

- 1) Program Pengembangan Perumahan
Program ini diukur dengan persentase penanganan rumah tidak layak huni akibat bencana.
- 2) Program Kawasan Permukiman
Program ini diukur dengan Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani.
- 3) Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
Program ini diukur dengan persentase rumah tidak layak huni yang ditangani.
- 4) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)



Program ini diukur persentase lingkungan perumahan dan permukiman yang dibangun atau ditingkatkan PSUnya.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat; dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1) Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Program ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Peran Satpol PP dibutuhkan untuk menertibkan pedagang kaki lima dan menjaga kondusivitas wilayah untuk penciptaan iklim berusaha yang aman dan nyaman. Indikator keberhasilan program ini yaitu Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan.

2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diukur dengan cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran dan persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

3) Program Penanggulangan Bencana

Program ini diukur dengan persentase masyarakat yang menerima pelayanan informasi serta pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, persentase penanganan tanggap darurat bencana, dan persentase penanganan pascabencana.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial; dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1) Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diukur dengan persentase PSKS yang diberdayakan.

2) Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diukur dengan persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.

3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diukur dengan cakupan penduduk miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

4) Program Penanganan Bencana

Program ini diukur dengan persentase korban bencana yang pulih fungsi sosialnya.

5) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diukur dengan persentase taman makam pahlawan yang terawat.

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja; dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

- 1) Program Perencanaan Tenaga Kerja
Program ini diukur dengan persentase ketersediaan dokumen perencanaan tenaga kerja mikro dan makro
- 2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program ini diukur dengan persentase pencari kerja yang diberi pelatihan dan persentase tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi.
- 3) Program Penempatan Tenaga Kerja
Program ini diukur dengan persentase tenaga kerja yang ditempatkan
- 4) Program Hubungan Industrial
Program ini diukur dengan persentase perkara perselisihan perusahaan-pekerja yang terselesaikan dan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- 1) Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Program ini diukur dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan.
- 2) Program Perlindungan Perempuan
Program ini diukur dengan Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif.
- 3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Program ini diukur dengan persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif.
- 4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
Program ini diukur dengan Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan
- 5) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
Program ini diukur dengan Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA).
- 6) Program Perlindungan Khusus Anak
Program ini diukur dengan persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan; dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program ini diukur dengan jumlah infrastruktur kemandirian pangan.

- 2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- Program ini diukur dengan ketersediaan pangan strategis.

- 3) Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diukur dengan persentase desa rawan pangan.

- 4) Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diukur dengan persentase keamanan pangan segar dari bahan pangan yang diuji.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan; dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

Program ini diukur dengan persentase pelaksanaan rencana aksi gugus tugas reforma agraria.

- 2) Program Penatagunaan Tanah

Program ini diukur dengan persentase tanah pemkab yang bersertifikat.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

- 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Indikator dari program ini yaitu ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup.

- 2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diukur dengan persentase penurunan frekuensi kejadian pencemaran lingkungan.

- 3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Program ini diukur dengan Indeks Hijau Biru Indonesia (IHBI)

- 4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini diukur dengan Persentase Limbah B3 yang terkelola.

- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diukur dengan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH.



6) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diukur dengan persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

7) Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diukur dengan timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1) Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diukur dengan persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP elektronik.

2) Program Pencatatan Sipil

Program ini diukur dengan cakupan kepemilikan akta kelahiran balita, cakupan kepemilikan akta nikah, cakupan kepemilikan akta kematian, cakupan kepemilikan akta cerai.

3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diukur dengan persentase institusi/lembaga/badan hukum yang difasilitasi pemanfaatan data kependudukan

g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1) Program Peningkatan Kerja Sama Desa

Program ini diukur dengan peningkatan jumlah kerja sama desa yang difasilitasi.

2) Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini diukur dengan persentase fasilitasi tata kelola desa.

3) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini diukur dengan persentase fasilitasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

h. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1) Program Pengendalian Penduduk

Program ini diukur dengan angka kelahiran remaja umur 15 – 19 tahun (ASFR 15-19)



2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diukur dengan persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) dan persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi.

3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diukur dengan persentase desa/kelurahan yang memiliki kelompok ketahanan keluarga.

i. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan; dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diukur dengan persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten.

j. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika; dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika

1) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diukur dengan indeks PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diukur dengan Persentase Aplikasi e-Government yang Terintegrasi dengan Portal Daerah.

k. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

1) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diukur dengan persentase koperasi yang berkualitas.

2) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diukur dengan pertumbuhan UMKM dan jumlah produk tersertifikasi halal.

3) Program Pengembangan UMKM

Program ini diukur dengan persentase usaha mikro menjadi usaha kecil.

l. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal; dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diukur dengan jumlah nilai investasi PMDN dan PMA.

2) Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diukur dengan persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota.



3) Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diukur dengan rata – rata lama pengurusan perizinan berusaha.

4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diukur dengan persentase perusahaan yang telah dilakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diukur dengan persentase data investasi daerah yang dipublikasikan.

m. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga; dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga

1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diukur dengan Cakupan Organisasi Kepemudaan yang Dibina.

2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini diukur dengan persentase jumlah atlet berprestasi.

3) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini diukur dengan persentase organisasi pramuka aktif

n. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik; dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

1) Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

Program ini diukur dengan indeks SDI (Satu Data Indonesia).

o. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian; dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

1) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Program ini diukur dengan indeks keamanan informasi.

p. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan; dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1) Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diukur dengan Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/ mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir.

2) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diukur dengan Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilestarikan.

3) Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini diukur dengan persentase peningkatan kunjungan museum.



q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan; dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

1) Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini diukur dengan rasio kunjungan masyarakat ke perpustakaan.

2) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini diukur dengan persentase peningkatan koleksi nasional dan naskah kuno.

r. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan; dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

1) Program Pengelolaan Arsip

Program ini diukur dengan persentase perangkat daerah yang memanfaatkan aplikasi pengolahan arsip digital

2) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini diukur dengan persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan; yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan

1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diukur dengan produksi perikanan tangkap

2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diukur dengan produksi perikanan budidaya

3) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diukur dengan produksi pengolahan hasil perikanan

4) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program ini diukur persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata; dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata

1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diukur dengan jumlah tamu wisatawan mancanegara dan jumlah tamu wisatawan nusantara.

2) Program Pemasaran Pariwisata

Program ini diukur dengan persentase kegiatan kalender event yang dipromosikan ke luar daerah.

3) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini diukur dengan persentase sub sektor ekonomi kreatif yang dibina dan persentase tenaga kerja pariwisata yang bersertifikat.



c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian; dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan

- 1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Program ini diukur dengan persentase alsintan pertanian dalam kondisi baik, persentase alsintan perkebunan dalam kondisi baik serta persentase alsintan peternakan dalam kondisi baik.
- 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Program ini diukur dengan persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik.
- 3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Program ini diukur dengan jumlah kasus penyakit hewan yang terkonfirmasi.
- 4) Program Penyuluhan Pertanian
Program ini diukur dengan persentase kelompok tani yang dibina
- 5) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Program ini diukur dengan persentase luas puso pertanian yang dikendalikan.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan; dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

- 1) Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
Program ini diukur dengan persentase toko swalayan yang direkomendasi.
- 2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Program ini diukur dengan persentase kualitas sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik serta persentase PKL yang tertata
- 3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Program ini diukur dengan disparitas harga.
- 4) Program Pengembangan Ekspor
Program ini diukur dengan Pertumbuhan Nilai Ekspor Luar Negeri.
- 5) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Program ini diukur dengan persentase Alat-alat, Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku
- 6) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Program ini diukur dengan persentase kepatuhan pelaku usaha yang telah mengikuti sosialisasi produk legal dalam negeri

e. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian; dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini diukur dengan persentase ketersediaan dokumen perencanaan industri

2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Program ini diukur dengan persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini diukur dengan persentase ketersediaan informasi industri yang lengkap dan terkini

f. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi; dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

1) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Program ini diukur dengan jumlah calon transmigran yang terdaftar

4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

a. Sekretariat Daerah; dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah

1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini diukur dengan Persentase kebijakan bidang administrasi tata pemerintahan yang difasilitasi, Persentase fasilitasi kebijakan urusan kesejahteraan rakyat, Indeks Reformasi Hukum, Indeks Kualitas Kebijakan, Nilai Aksi HAM Daerah, dan Persentase Kerjasama Daerah yang difasilitasi.

2) Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini diukur dengan Persentase kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD yang difasilitasi, Capaian Progres Pekerjaan Konstruksi Daerah, Indeks Tata Kelola Pengadaan, Persentase kebijakan urusan perekonomian yang difasilitasi, dan Persentase kebijakan urusan SDA yang difasilitasi.

b. Sekretariat DPRD; dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD

1) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini diukur dengan persentase penetapan ranperda tahun N dan persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan; dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diukur dengan Persentase keselarasan program RKPD



dengan program RPJMD.

2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Keberhasilan program ini diukur dengan indikator Persentase Kesesuaian Renstra - Renja dan RKPD - Renja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dan Persentase Kesesuaian Renstra - Renja dan RKPD - Renja bidang perekonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan

b. Keuangan; dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah.

1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diukur dengan skor kesesuaian pagu program dokumen perencanaan dan penganggaran, persentase tata kelola keuangan pemerintahan daerah sesuai kaidah perundangan, dan persentase laporan SKPD yang telah diselesaikan sesuai SAP.

2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diukur dengan persentase barang milik daerah yang dimanfaatkan.

3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diukur dengan deviasi realisasi PAD terhadap target PAD dalam APBD.

c. Kepegawaian; dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1) Program Kepegawaian Daerah

Program ini diukur dengan persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya, persentase tingkat kedisiplinan, persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya, serta persentase formasi kebutuhan ASN yang terisi.

d. Pendidikan dan Pelatihan; dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini diukur dengan persentase implementasi rencana program pengembangan kompetensi.

e. Penelitian dan Pengembangan; dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

1) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini diukur dengan persentase riset yang dilaksanakan sesuai rencana induk riset dan persentase inovasi yang mendapatkan HAKI.

2) Program Riset dan Inovasi Daerah



Program ini diukur dengan persentase hasil riset yang menjadi rekomendasi kebijakan serta persentase peningkatan partisipasi masyarakat dan perangkat daerah dalam berinovasi.

6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

a. Inspektorat Daerah; dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah

1) Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diukur dengan tindaklanjut rekomendasi BPK tahun anggaran sebelumnya

2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diukur dengan Indeks Manajemen Risiko

7. Unsur Kewilayahan

a. Kecamatan; dilaksanakan oleh seluruh Kecamatan di Kabupaten Demak yang berjumlah 14 (empat belas) Kecamatan

1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diukur dengan persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik.

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diukur dengan persentase lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif.

3) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program ini diukur dengan cakupan keamanan wilayah .

4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diukur dengan persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diukur dengan persentase desa yang tertib administrasi.

8. Unsur Pemerintahan Umum

a. Kesatuan Bangsa dan Politik; dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini diukur dengan cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan

2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini diukur dengan rasio masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik

3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini diukur dengan persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif



- 4) Program Pembinaan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program ini diukur dengan persentase masyarakat yang telah mendapatkan pembinaan tentang ketahanan ekonomi, sosial dan masyarakat

- 5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini diukur dengan jumlah potensi konflik sosial yang teridentifikasi

Rincian program yang mencakup semua urusan beserta pagu indikatif terdapat pada lampiran buku ini.

4.2 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

Penetapan Indikator Kinerja dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terbagi menjadi dua yakni Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang menentukan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029. Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator yang menentukan target penyelenggaraan pemerintahan daerah selama pelaksanaan pembangunan jangka menengah. Beberapa indikator yang tercantum merupakan Indikator Utama Pembangunan (IUP) pada RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2045.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka menengah daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah yang telah dirumuskan. Berikut ini penetapan Indikator Kinerja Utama pada pembangunan Kabupaten Demak tahun 2025-2029.

Tabel IV.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Demak Tahun 2025-2030

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	74,57	75,42	75,94	76,60	77,54	78,72	79,21
2	Indeks Reformasi Birokrasi*	Angka	86,58	87,00	87,50	88,80	89,00	89,30	89,50
3	Indeks Integritas Nasional*	Angka	77,39	78,50	78,55	78,60	78,65	78,70	78,75
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,06	4,85-5,32	5,10-6,00	6,50-7,10	7,00-7,80	7,50-8,00	7,90-8,30
5	Indeks Layanan Infrastruktur daerah	Angka	34,83	35,55	37,25	40,3	42,67	44,05	46,76
6	Indeks Gini	Angka	0,314	0,264-0,292	0,299-0,313	0,297-0,312	0,296-0,311	0,294-0,310	0,293-0,309
7	Indeks Harmoni Indonesia	Angka	n/a	6,95	6,98	7,00	7,02	7,04	7,07
8	Kontribusi Penurunan emisi GRK Kumulatif*	Ton CO2eq	102.378,04	1.399.991	2.001.680,70	2.603.370,40	3.205.060,10	3.806.749,80	4.408.439,50
9	PDRB per kapita*	Juta Rp/ Tahun	28,3	29,58-29,99	31,96-32,51	34,87-35,73	38,04-39,27	41,50-43,16	45,28-47,43
10	Tingkat Kemiskinan*	%	11,89	11,64-10,39	11,38-10,04	10,56-9,35	9,74-8,83	8,92-8,31	8,40-7,79

Keterangan

*: Indikator Utama Pembangunan (IUP)

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Kinerja pembangunan suatu daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Daerah. Penetapan Indikator Kinerja Daerah beserta targetnya dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Demak diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel IV.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2030

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	Aspek Geografi Dan Demografi								
1	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan*	%	0	0,5	1	2	3	4	5
2	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten*	Angka	59,27	60,52	61,77	63,02	64,27	65,52	66,77
3	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman*	%	5,79	10	15,00	20,00	25,00	30,00	32,00
4	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman	%	20,22	22,5	25	30	35	43	45
5	Indeks Ketahanan Pangan*	Angka	90,47	90,62	90,78	90,93	91,08	91,23	91,39
6	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)*	%	7,59	7,32	6,90	6,31	5,36	4,43	3,19
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah*	Angka	56,26	72,60	72,64	72,69	72,73	72,77	72,82

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
8	Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif*	TonCO 2eq	102.378,04	1.399.991,00	2.001.680,70	2.603.370,40	3.205.060,10	3.806.749,80	4.408.439,50
9	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah*	%	17,88	23,00	26,35	29,70	33,05	36,40	39,75
10	Indeks Risiko Bencana*	Angka	91,76	89,03-87,77	87,90-86,11	86,76-84,45	85,63-82,79	84,49-81,13	83,36-79,47
11	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,07	1,05	1,03	1,00	0,98	0,96	0,94
II	Aspek Kesejahteraan Masyarakat								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,06	4,85-5,32	5,10-6,00	6,50-7,10	7,00-7,80	7,50-8,00	7,90-8,30
2	Tingkat Kemiskinan*	%	11,89	11,64-10,39	11,38-10,04	10,56-9,35	9,74-8,83	8,92-8,31	8,40-7,79
3	PDRB Per Kapita*	Juta Rp/ Tahun	28,30	29,58-29,99	31,96-32,51	34,87-35,73	38,04-39,27	41,50-43,16	45,28-47,43
4	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia*	%	21,70	22,09-22,29	22,29-22,58	22,49-22,87	22,69-23,16	22,89-23,45	23,09-23,74
5	Tingkat Pengangguran Terbuka*	%	4,75	4,4-5,3	4,34-4,64	4,23-4,53	4,11-4,41	3,98-4,30	3,79-4,19
6	Indeks Gini	Angka	0,314	0,264-0,292	0,299-0,313	0,297-0,312	0,296-0,311	0,294-0,310	0,293-0,309
7	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	74,57	75,42	75,94	76,60	77,54	78,72	79,21
8	Usia Harapan Hidup*	Tahun	75,79	75,91	76,08	76,3	76,59	77,11	77,43
9	Jumlah Kasus Kematian Ibu*	Kasus	8	12	12	11	11	10	10
10	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita*	%	10	7,50	7,32	7,14	6,95	6,77	6,59
11	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)*	%	89,5	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
12	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)*	%	90,5	93,00	94,00	95,00	96,00	96,00	99,00

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
13	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional*	%	99,4	97,90	98,75	98,79	98,83	98,87	98,91
14	Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka	7,46	7,46	7,40	7,30	7,20	7,10	7,00
15	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persen	97,8	97	97	98	99	99	100
16	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan*	%	42,71	43,00	43,50	44,54	46,04	47,54	49,04
17	Literasi Membaca SD/Sederajat *	%	85,53	87,08	87,86	88,63	89,41	90,18	90,96
18	Literasi Membaca SMP/Sederajat*	%	78,62	81,26	82,58	83,90	85,22	86,54	87,86
19	Numerasi SD/Sederajat *	%	78,82	82,68	84,60	86,52	88,44	90,37	92,29
20	Numerasi SMP/Sederajat*	%	74,42	78,49	80,53	82,56	84,60	86,63	88,67
21	Rata-Rata lama sekolah (RLS)	Tahun	8,28	9,37	9,50	9,64	9,77	9,91	10,04
22	Harapan Lama Sekolah*	Tahun	13,36	14,00	14,17	14,27	14,37	14,47	14,57
23	Proporsi Penduduk Berusia 15 tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi*	%	6,84	7,00	7,16	7,33	7,49	7,66	7,82
24	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun*	%	86,41	93,69	94,01	94,32	94,64	94,95	95,27
25	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	64,88	65,50	66,68	67,58	68,48	69,38	70,28
26	Indeks Harmoni Indonesia	Angka	n/a	6,95	6,98	7,00	7,02	7,04	7,07
27	Nilai kinerja kebudayaan	Angka	57,78	58,28	58,88	59,43	59,98	60,53	61,08
28	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar	%	80,23	82,32	83,14	83,96	84,78	85,61	86,43

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum)								
5	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara *	Orang	248	298	349	355	375	390	410
6	Rasio Kewirausahaan Daerah*	%	2,15	2,74	3,05	3,24	3,42	3,47	3,64
7	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB*	%	1,741	1,82	1,88	1,90	1,95	1,99	2,03
8	Return on Aset (ROA) BUMD*	%	3,19	3,50	3,56	3,63	3,69	3,75	3,81
9	Kapabilitas Inovasi*	Angka	1,95	2,09	2,23	2,36	2,50	2,64	2,73
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	72,36	72,54	72,72	72,90	73,09	73,27	73,45
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan*	%	58,56	59,16	59,62	60,07	60,53	60,98	61,44
12	Disparitas Harga*	%	0,373	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10
13	Pembentukan Modal Tetap Bruto*	%	28,98	29,08	29,09	29,09	29,10	29,11	29,11
14	Pertumbuhan PMTB	%	7,10	7,11	7,12	7,13	7,14	7,15	7,16
15	Indeks Layanan Infrastruktur daerah	Angka	34,83	35,55	37,25	40,3	42,67	44,05	46,76
16	Indeks Kinerja Infrastruktur Daerah	Angka	86,92	85,44	86,73	87,48	88,23	88,98	89,72
17	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak*	%	80,32	80,42	80,52	80,62	80,72	80,78	80,83
18	Indeks Desa	Angka	0,7458	0,7533	0,7608	0,7684	0,7761	0,7838	0,7917
19	Persentase Desa Mandiri*	%	18,52	27,98	29,22	30,86	32,10	33,74	35,39
20	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan	%	81,48	85,25	85,75	86,25	86,75	91,60	91,65

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Kabupaten/Kota*								
21	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota*	%	15	15	18	25	30	32	38
22	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet*	%	84,96	87,69	89,06	90,43	91,79	93,16	94,53
23	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB*	%	0,63	0,94	0,93	0,91	0,90	0,89	0,87
24	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB*	%	NA	4,57	4,58	4,59	4,60	4,61	4,62
25	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB*	%	NA	4,16	4,17	4,18	4,19	4,20	4,21
26	Indeks Zakat Nasional	Poin	0,57	0,60	0,63	0,66	0,69	0,72	0,75
27	Indeks Akses Keuangan Daerah	poin	3,92	3,99	4,03	4,06	4,10	4,14	4,15
IV	Aspek Pelayanan Umum								
1	Indeks Reformasi Hukum*	Angka	97,92	97,92	97,95	97,98	98,00	98,03	98,05
2	Indeks Reformasi Birokrasi*	Angka	86,58	87,00	87,50	88,80	89,00	89,30	89,50
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*	Angka	3,93	3,98	2,05	2,10	2,10	2,15	2,15
4	Nilai SAKIP	Angka	69,10	69,2	70,00	70,30	70,50	70,70	71,00
5	Indeks Pelayanan Publik*	Angka	4,47	3,5	3,7	4,1	4,3	4,5	4,75
6	Indeks Integritas Nasional*	Angka	77,39	78,50	78,55	78,60	78,65	78,70	78,75
7	Kapasitas Institusi	Angka	4,89	4,89	4,90	4,90	4,90	4,91	4,91

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
8	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Angka Kejadian Konflik Sosial	Kasus	0	0	0	0	0	0	0
10	Jumlah Kejadian Konflik SARA*	Kasus	0	0	0	0	0	0	0
11	Indeks Daya Saing Daerah*	Angka	3,66	3,70	3,74	3,78	3,82	3,86	3,90
12	Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Angka	3,023	3,07	3,075	3,080	3,100	3,120	3,140
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88,48	88,60	88,65	88,70	88,75	88,80	88,85
14	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	82,53	82,60	82,70	82,80	82,90	83,00	83,10
15	Indeks Sistem Merit	Angka	0,705	0,705	0,650	0,650	0,660	0,660	0,670

*: Indikator Utama Pembangunan (IUP)

Tabel IV.4
Penetapan Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Demak Tahun 2025-2030

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar									
a	Pendidikan								
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	80,19	100	100	100	100	100	100
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,67	100	100	100	100	100	100
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	99,2	100	100	100	100	100	100
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	18,77	100	100	100	100	100	100
5	Iklim Keamanan SD	angka	72,90	74,81	75,61	76,41	77,21	78,01	78,81
6	Iklim Keamanan SMP	angka	66,07	69,81	70,61	71,41	72,21	73,01	73,81
7	Iklim Kebhinekaan SD	angka	74,06	73,83	74,63	75,43	76,23	77,03	77,83
8	Iklim Kebhinekaan SMP	angka	72,01	71,91	72,71	73,51	74,31	75,11	75,91
9	Iklim Inklusivitas SD	angka	56,14	60,17	60,97	61,77	62,57	63,37	64,17
10	Iklim Inklusivitas SMP	angka	55,35	58,17	58,97	59,77	60,57	61,37	62,17
11	Persentase Sekolah yang	%	82,31	82,81	83,31	83,81	84,31	84,81	85,31

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Terakreditasi minimal B								
b	Kesehatan								
12	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Per 1.000 Penduduk	0,930	0,917	1,054	1,123	1,204	1,195	1,248
13	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100
14	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	100	100	100
15	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100	100	100	100
16	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	100	100	100
17	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
18	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
19	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
20	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
21	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	sesuai standar								
22	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
23	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
24	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
25	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
C	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
26	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	%	57,51	19	29	39	49	60	70
27	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	%	43,79	27,68	36,74	45,81	54,87	63,94	73
28	Rasio luas daerah irigasi	%	97,11	97,23	97,36	97,48	97,60	97,73	97,85

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi								
29	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	92,26	92,42	92,58	92,73	92,89	93,05	93,2
30	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	5,79	10	15,00	20,00	25,00	30,00	32,00
31	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	100	100	100	100	100	100	100
32	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	81,48	85,25	85,75	86,25	86,75	91,60	91,65
33	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	50,00	55,7	57,7	59,7	61,7	63,7	65,7
34	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100	100	100
D	Perumahan Rakyat								
35	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
36	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/ kota	%	100	100	100	100	100	100	100
37	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100
38	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	3,04	2,97	2,92	2,87	2,83	2,79	2,78
39	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100	100	100	100	100	100	100
F	Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
40	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100
41	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100
42	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
43	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
44	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
45	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100
46	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15	15	15	15	15	15	15
G	Sosial								
47	Tingkat Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100
48	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	%	100	100	100	100	100	100	100
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar									
a	Tenaga Kerja								
49	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	75	75	75	75	75	75	75
50	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	49,92	50,31	50,69	51,08	51,47	51,86	52,24
51	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rp/Tenaga Kerja	33,07	33,29	33,51	33,7	33,9	34,08	34,25
52	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit,	%	92,65	94	94,5	95	95,5	96	96,5

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).								
53	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/ kota	%	82,75	83,00	83,25	83,50	83,75	84,00	84,25
b	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
54	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	27,66	27,93	28,21	28,5	28,78	29,07	29,36
55	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100
56	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	9,36	8,42	7,58	6,82	6,14	5,52	4,97
c	Pangan								
57	Persentase Cadangan Pangan	%	16,13	7,81	9,38	10,94	12,5	14,06	15,63
d	Pertanahan								
58	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	100
59	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	0	0	0	0	0	0	0

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
60	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	%	100	100	100	100	100	100	100
61	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	0	0	0	0	0	0	0
62	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	0	100	100	100	100	100	100
63	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100	100	100	100
e	Lingkungan Hidup								
64	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Angka	56,26	72,6	72,64	72,69	72,73	72,77	72,82
65	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	18,96	24,97	30,97	36,98	42,99	48,99	55
66	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100
f	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
67	Perekaman KTP elektronik	%	98,7	98,73	98,75	98,8	98,85	98,9	98,95
68	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	59,91	60	61	62	63	64	65

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
69	Kepemilikan akta kelahiran	%	98,65	98,7	98,75	98,8	98,85	98,9	98,95
70	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	100	100	100	100	100	100	100
g	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
71	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	57,14	33,33	50	100	100	100	100
72	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	44,44	42,02	18,52	20	25	27,27	30
73	Persentase desa mandiri	%	18,52	27,98	29,22	30,86	32,1	33,74	35,39
h	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
74	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2,02	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
75	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	73,77	73,78	73,79	73,80	73,81	73,82	73,82
76	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	6,23	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5	8,4
i	Perhubungan								
77	Rasio konektivitas	Angka	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
78	V/C RASIO di Jalan Kabupaten/ Kota	Angka	0,38	0,38	0,38	0,38	0,39	0,4	0,41
j	Komunikasi dan Informatika								
79	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100
80	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan	%	13,33	70	76	82	88	94	100

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	terintegrasi								
81	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ kota	%	100	100	100	100	100	100	100
k	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
82	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	66,20	62,10	62,69	62,69	62,69	62,7	62,7
83	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	62,56	63,19	63,82	64,46	65,1	65,75	66,41
1	Penanaman Modal								
84	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/ kota	%	12,53	12,55	12,57	12,60	12,63	12,65	12,68
m	Kepemudaan dan Olahraga								
85	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	26,63	26,7	26,85	27	27,15	27,3	27,44
86	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	30	30,3	30,7	31	31,5	31,7	32
87	Peningkatan prestasi olahraga	%	12	15	18	21	24	27	30
n	statistik								
88	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
89	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
o	persandian								
90	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	86,82	87,5	62,09	62,64	63,18	63,73	64,27
p	kebudayaan								
91	Terlestariannya Cagar Budaya	%	66,67	100	100	100	100	100	100
q	Perpustakaan								
92	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	75,26	76,25	77,26	78,26	79,26	80,26	81,26
93	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	64,88	65,5	66,68	67,58	68,48	69,38	70,28
r	Kearsipan								
94	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	91,65	91,85	92,05	92,25	92,45	92,65	92,85
95	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan	%	83,33	83,54	83,88	84	84,24	84,36	84,55



No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	kesejahteraan rakyat								
Urusan Pilihan									
a	Kelautan dan Perikanan								
96	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/ kota	%	102,85	100	100	100	100	100	100
b	pariwisata								
97	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/ Kota	%	40,51	20	22	24	26	27	28
98	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	42,53	6,1	6,5	6,9	7,3	7,5	7,7
99	Tingkat hunian akomodasi	%	50,07	51,32	52,6	53,92	55,26	56,65	58,06
100	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2,37	2,4	2,52	2,7	2,87	3,05	3,22
101	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	1,25	1,26	1,27	1,28	1,3	1,32	1,33
c	Pertanian								
102	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	614,41	620,55	626,76	633,03	639,36	645,75	652,21
103	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-13,15	-12,51	-12,97	-13,49	-14,07	-14,46	-15,15
104	produksi daging	Ton	50.660,26	51.718,48	52.781,98	53.846,29	54.910,45	55.976,49	57.041,44
105	produksi Telur	Ton	2.216,61	3.586,67	3.615,05	3.643,70	3.672,60	3.701,74	3.731,15
106	Populasi Ternak	AU (Animal Unit)	500.890,60	504.945,53	505.539,17	506.134,73	506.731,92	507.330,03	507.929,78

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
d	Perdagangan								
107	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	%	100	98,95	98,96	98,97	98,98	98,99	99,00
108	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	60,4	63,42	66,59	69,92	73,42	77,09	80,95
109	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	%	133,22	100	100	100	100	100	100
e	Perindustrian								
110	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/ kota	%	1,41	1,42	1,43	1,44	1,45	1,46	1,47
111	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	131,31	100	100	100	100	100	100
112	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
113	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	100	100	100
114	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/ kota	%	100	100	100	100	100	100	100
115	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Angka	125	125	125	125	125	125	125
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan									
a	Perencanaan dan keuangan								
116	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	7,61	7,58	7,54	7,50	7,46	7,43	7,39
117	Rasio PAD	%	22	22,22	22,44	22,67	22,89	23,12	23,35
118	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Angka	3,023	3,07	3,075	3,08	3,1	3,12	3,14
119	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Angka	3,000	3,020	3,040	3,060	3,080	3,100	3,120
120	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer	%	67,52	68,20	68,88	69,57	70,27	70,97	71,68

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	expenditures)								
121	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
b	Pengadaan								
122	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	0	0	0	0
123	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	50,32	48,66	48,5	48	47	46	45
124	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	48,42	44,11	45	45,5	45,6	46	47
125	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	27,11	27,15	27,2	27,25	27,3	27,35	27,4
c	Kepegawaian								
126	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	65,48	65,48	65,49	65,50	65,51	65,52	65,53
127	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	15,88	15,88	15,9	15,9	16	16	16,1
128	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	38,22	38,22	38,23	38,24	38,25	38,26	38,27

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
d	Manajemen Keuangan								
129	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	0,67	0,65	0,62	0,59	0,56	0,53	0,5
130	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	22,8	4,94	4,50	4,00	3,75	3,50	3,25
131	Assets Management	%	4	4	4	4	4	4	4
132	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	5,12	4,69	4,25	3,81	3,37	2,94	2,50
e	Transparansi dan Partisipasi Publik								
133	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%	97,56	97,97	98,37	98,78	99,19	99,59	100
134	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	100	100	100	100	100	100	100



BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari tahapan pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Demak periode 2025-2045. RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang akan menjadi acuan, pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Demak lima tahun ke depan agar senantiasa selaras, terpadu dan searah dengan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan pembangunan nasional.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 ditentukan oleh dukungan yang solid dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak serta kerjasama yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Demak dengan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya. Tidak kalah penting komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Demak serta kerjasama dengan *stakeholders* pembangunan lainnya.

Dokumen ini juga merupakan implementasi dari Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati/Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 yang disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak dan pemangku kepentingan secara runut dan jelas dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini. Untuk itu, menjadi penting dipahami oleh segenap pihak terkait tentang bagaimana mengoperasionalkan RPJMD ini, baik dalam tahapan normal maupun masa transisi, agar dokumen RPJMD ini benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah dalam koordinasi Bappeda.

5.1. Pedoman Transisi

Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029, perlu disusun RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2030-2034 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah pedoman bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2030. Pedoman transisi demikian dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah

agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kabupaten Demak maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

- 1) RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya.
- 2) RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode berikutnya.
- 3) RKPD masa transisi di tahun 2030 menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode saat ini 2025-2029, dikarenakan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 memuat hingga tahun 2030.

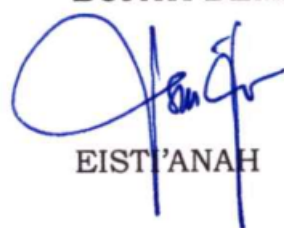
5.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Demak serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan lima tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, transparansi, inovasi, kerjasama, dan rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029. Dalam hal ini, penting untuk menyusun kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 sebagai aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2030. Adapun tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kaidah pelaksanaan RPJMD Demak Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 kepada masyarakat;

2. Seluruh OPD/unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029, Bapperida Kabupaten Demak berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029 ke dalam Renstra PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
4. Setiap PD berkewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Demak yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD dengan berpedoman pada RPJMD ini;
5. RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun RKPD setiap tahun selama 5 tahun masa kepemimpinan bupati yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Bapperida Kabupaten Demak dan selanjutnya RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
6. Bapperida Kabupaten Demak melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah;
7. Pelaksanaan pembangunan daerah agar mengedepankan prinsip – prinsip pengarusutamaan gender dan inklusi sosial;
8. Manajemen Risiko harus disusun dan diterapkan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi potensi hambatan atau ancaman yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran RPJMD;
9. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 dilakukan pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BUPATI DEMAK,

EIST'ANAH

LAMPIRAN

Program Perangkat Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2025 - 2029

2026-02-12

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.665.198.572.380		1.654.777.971.501		1.646.459.881.041		1.640.790.191.301		1.679.595.612.137		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				786.183.473.820		800.062.152.962		797.017.311.895		796.091.684.417		804.436.708.165		
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				786.183.473.820		800.062.152.962		797.017.311.895		796.091.684.417		804.436.708.165		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					592.646.042.103		603.396.434.585		607.323.248.236		611.158.580.023		615.087.815.127	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Meningkatnya Kepuasan Layanan Perangkat Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Dindikbud (Dengan Satuan:Angka)	80,60	80,63	80,73		80,83		80,93		81,36		81,88		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					192.232.431.717		195.120.718.377		188.149.063.659		183.478.104.394		187.803.893.038	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (Dengan Satuan:%)	80,19	100	100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (Dengan Satuan:%)	99,67	100	100		100		100		100		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		
	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13 -15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (Dengan Satuan:%)	99,20	100	100		100		100		100		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		
	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Dengan Satuan:%)	18,77	100	100		100		100		100		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					150.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Meningkatnya kurikulum berbasis karakter	Persentase muatan lokal yang telah memiliki silabus dan kurikulum (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					1.155.000.000		1.245.000.000		1.245.000.000		1.155.000.000		1.245.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Meningkatnya kapasitas dan daya saing tenaga pendidik dan kependidikan	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikat Profesi (Dengan Satuan:%)	67.78	67.80	67.82		67.84		67.86		67.88		67.90		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kapasitas dan daya saing tenaga pendidik dan kependidikan	Indeks Distribusi Guru (Dengan Satuan:Angka)	0.74	0.74	0.78		0.81		0.84		0.87		0.89		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				603.043.021.387		579.684.753.965		592.313.027.297		600.005.952.987		609.162.289.888		
	DINAS KESEHATAN DAERAH				603.043.021.387		579.684.753.965		592.313.027.297		600.005.952.987		609.162.289.888		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					471.740.552.387		447.782.284.965		461.410.558.297		469.753.483.987		477.259.820.888	Dinas Kesehatan Daerah
	Meningkatnya Kepuasan Layanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan Daerah (Dengan Satuan:Angka)	91,73	91,73	91,74		91,76		91,78		91,80		91,85		Dinas Kesehatan Daerah
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					128.252.825.500		128.852.825.500		127.852.825.500		127.202.825.500		128.852.825.500	Dinas Kesehatan Daerah
	MENINGKATNYA PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Wasting (Dengan Satuan:Persen)	4,04	4,03	4,02		4,01		4,00		3,99		3,98		Dinas Kesehatan Daerah
	MENINGKATNYA PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata persentase capaian SPM Bidang Kesehatan urusan Pengendalian Penyakit (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		Dinas Kesehatan Daerah		
	MENINGKATNYA PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna (Dengan Satuan:Persen)	83,52	86,81	90,11		93,41		96,70		98,90		100,00		Dinas Kesehatan Daerah
	MENINGKATNYA PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (Dengan Satuan:Persen)	79,13	80,00	80,10		80,20		80,30		80,40		80,50		Dinas Kesehatan Daerah
	MENINGKATNYA PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata persentase capaian SPM Bidang Kesehatan urusan Kesehatan Masyarakat (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan Daerah
	MENINGKATNYA PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan Daerah
	MENINGKATNYA PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Obesitas > 18 tahun (Dengan Satuan:Persen)	22,50	22,50	22,50		22,50		22,50		22,50		22,50		Dinas Kesehatan Daerah
	MENINGKATNYA PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (Dengan Satuan:Persen)	NA	30,00	40,00		50,00		60,00		70,00		80,00		Dinas Kesehatan Daerah
	MENINGKATNYA PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Penemuan Kasus TB (Dengan Satuan:Persen)	85,00	90,00	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	MENINGKATNYA PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (Dengan Satuan:Persen)	90,05	93,00	94,00		95,00		96,00		96,00		99,00		Dinas Kesehatan Daerah
	MENINGKATNYA PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Depresi yang mendapatkan Layanan pada usia ≥ 15 Tahun (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100				
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1.321.639.500		1.321.639.500		1.321.639.500		1.321.639.500		1.321.639.500	Dinas Kesehatan Daerah
	Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan dan pelayanan fasilitas	Persentase tenaga kesehatan berkompetensi di fasilitas pelayanan kesehatan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan Daerah
	Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan dan pelayanan fasilitas	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Dengan Satuan:Angka)	1,94	1,94	1,98		2,00		2,02		2,04		2,06		
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					721.239.000		721.239.000		721.239.000		721.239.000		721.239.000	Dinas Kesehatan Daerah
	Meningkatnya jaminan keamanan, kualitas ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase sarana pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan serta sarana produksi makanan dan minuman sesuai ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan Daerah
	Meningkatnya jaminan keamanan, kualitas ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)	NA	83	85		88		92		95		96		
	Meningkatnya jaminan keamanan, kualitas ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					1.006.765.000		1.006.765.000		1.006.765.000		1.006.765.000		1.006.765.000	Dinas Kesehatan Daerah
	Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam promosi Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase rumah tangga PHBS (Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat) (Dengan Satuan:Persen)	93,55	93,55	93,55		93,55		93,55		93,55		93,55		Dinas Kesehatan Daerah
	Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam promosi Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup (Dengan Satuan:Persen)	NA	30	35		40		45		50		55		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				184.731.930.709		183.966.047.217		165.902.004.891		150.589.822.141		172.079.517.564		
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				184.731.930.709		183.966.047.217		165.902.004.891		150.589.822.141		172.079.517.564		
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					23.407.631.787		23.582.435.217		24.809.012.891		25.746.830.141		26.536.525.564	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kepuasan layanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dengan Satuan:angka)	93	93,10	93,20		93,30		93,40		93,50		93,60		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				75.631.306.922		76.350.000.000		60.200.000.000		53.200.000.000		62.550.000.000		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Sumber Daya Air	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	88,07	88,07	89,78		90,98		92,19		93,40		94,61		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Sumber Daya Air	Persentase sarana prasarana pengendali banjir dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	19	25	34		42		49		55		60		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Meningkatnya Layanan Akses Air Minum Perpipaan	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (PDAM dan Non PDAM) (Dengan Satuan:%)	74,15	74,15	74,18		74,21		74,24		74,27		74,30		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					1.900.000.000		1.900.000.000		3.900.000.000		2.650.000.000		1.900.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Meningkatnya Layanan Air Limbah	Persentase rumah tangga yang terlayani akses sanitasi layak (Dengan Satuan:%)	83,33	83,78	84,43		84,50		84,56		84,62		84,68		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					11.150.000.000		9.700.000.000		7.700.000.000		5.700.000.000		9.700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Meningkatnya kinerja drainase perkotaan	Persentase drainase perkotaan yang tertangani (Dengan Satuan:%)	92,20	92,80	94,36		95,92		97,48		99,04		100		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					21.525.000.000		21.525.000.000		21.525.000.000		21.525.000.000		21.525.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Meningkatnya kepatuhan bangunan gedung	Rasio kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kabupaten (Dengan Satuan:angka)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Meningkatnya penataan bangunan dan lingkungannya	Luas kawasan bangunan dan lingkungan yang tertata dengan baik (Dengan Satuan:Ha)	0	0	0		0,2		0,2		0,2		0,2		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					46.281.492.000		45.831.492.000		42.731.492.000		36.731.492.000		44.731.492.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Meningkatnya penyelenggaraan jalan	Panjang Jalan dalam kondisi mantap (Dengan Satuan:Km)	750,074	751,357	752,024		755,784		759,563		763,361		767,178		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Meningkatnya kualitas tenaga kerja konstruksi	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih (Dengan Satuan:angka)	52,85	55,70	57,70			59,70		61,70		63,70		65,70	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					1.486.500.000		1.627.120.000		1.586.500.000		1.586.500.000		1.686.500.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Meningkatnya kepatuhan penataan ruang	Persentase kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (Dengan Satuan:%)	0	65	70			75		80		85		90	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				40.008.982.104		39.071.876.803		40.135.400.448		43.049.559.330		41.264.359.801		
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				40.008.982.104		39.071.876.803		40.135.400.448		43.049.559.330		41.264.359.801		
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.769.882.104		8.642.776.803		8.706.300.448		8.748.544.958		8.804.775.385	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Meningkatkan kepuasan layanan perangkat daerah	IKM Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	84,82	85,00	85,50			86,00		86,50		87,00		87,50	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					2.504.100.000		2.634.100.000		2.734.100.000		1.734.100.000		2.734.100.000	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Tersedianya perumahan rumah layak huni dan terjangkau bagi korban bencana	Presentase penanganan rumah tidak layak huni akibat bencana (Dengan Satuan:%)	58,13	61,88	64,38			66,88		69,38		71,88		74,38	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					1.520.000.000		1.020.000.000		1.220.000.000		1.140.000.000		990.000.000	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Berkurangnya kawasan permukiman kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani (Dengan Satuan:%)	48,55	48,81	49,13			49,61		49,94		50,04		50,46	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					3.410.000.000		3.440.000.000		3.140.000.000		2.091.914.372		3.400.484.416	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Meningkatnya jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses Rumah Layak Huni	Presentase rumah tidak layak huni yang ditangani (Dengan Satuan:%)	4,67	6,92	8,41			8,84		9,13		9,39		9,81	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					23.805.000.000		23.335.000.000		24.335.000.000		29.335.000.000		25.335.000.000	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Presentase lingkungan perumahan dan permukiman yang dibangun atau ditingkatkan PSUnya (Dengan Satuan:%)	6,30	9,76	13,22			16,68		20,14		23,61		27,07	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				24.485.280.311		25.145.904.451		24.587.934.833		24.591.385.519		25.476.270.711		
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				15.408.700.938		15.891.302.034		15.274.729.141		15.408.990.519		16.044.094.511		

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.833.421.808		10.896.772.904		10.939.024.013		10.954.661.389		11.278.426.864	Satuan Polisi Pamong Praja
	Meningkatnya Kepuasan Layanan Satpol PP	Indeks kepuasan masyarakat Satpol PP (Dengan Satuan:Angka)	87,26	87,50	87,52		87,55		87,60		87,65		87,70		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					4.067.744.130		4.376.529.130		3.830.529.130		4.000.829.130		4.035.667.647	Satuan Polisi Pamong Praja
	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap PERDA dan PERKADA	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan oleh Satpol PP (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					507.535.000		618.000.000		505.175.998		453.500.000		730.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	Meningkatnya Layanan Pencagahan Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja
	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					9.076.579.373		9.254.602.417		9.313.205.692		9.182.395.000		9.432.176.200	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.076.579.373		7.134.602.417		7.193.205.692		7.152.395.000		7.312.176.200	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya kepuasaan layanan BPBD	Indeks kepuasan masyarakat BPBD (Dengan Satuan:Angka)	92,14	92,17	92,20		92,23		92,26		92,29		92,32		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					2.000.000.000		2.120.000.000		2.120.000.000		2.030.000.000		2.120.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanggulangan bencana	Persentase Masyarakat yang menerima pelayanan informasi serta pencegahan dan kesiapsiagaan bencana (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					26.745.884.049		26.847.236.103		26.504.201.677		26.461.786.907		27.176.466.008	
	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					26.745.884.049		26.847.236.103		26.504.201.677		26.461.786.907		27.176.466.008	

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.604.877.749		8.632.944.803		8.289.910.377		7.987.495.607		8.483.940.699	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya kepuasan layanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Dinas Sosial P2PA (Dengan Satuan:Angka)	89.00	89.03	89.04		89.05		89.06		89.07		89.08		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					840.000.000		842.000.000		843.000.000		1.094.000.000		845.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Meiningkatnya pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang diberdayakan (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1.391.715.000		1.398.000.000		1.405.000.000		1.412.000.000		1.184.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya rehabilitasi sosial PPKS	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					15.015.531.300		15.030.291.300		15.020.291.300		15.020.291.300		15.198.525.309	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Cakupan penduduk miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (Dengan Satuan:%)	65,59	67,47	71,65		71,80		74,68		74,83		78,92		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					858.760.000		909.000.000		911.000.000		913.000.000		1.430.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya pemulihan sosial dan perlindungan korban bencana	Persentase korban bencana yang pulih fungsi sosialnya (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makam pahlawan yang terkelola dengan baik (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				188.216.487.843		196.149.901.256		195.506.554.569		189.311.919.616		198.386.110.298		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				14.578.732.933		14.884.568.574		14.706.262.570		14.613.823.507		15.004.260.053		
	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN DEMAK				14.578.732.933		14.884.568.574		14.706.262.570		14.613.823.507		15.004.260.053		

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.190.732.733		9.665.318.374		9.649.262.370		9.393.823.307		9.629.259.853	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Demak
	Meningkatnya kepuasan layanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak (Dengan Satuan:Angka)	87,97	87,97	88,00		88,50		89,00		89,50		90,00		Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Demak
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					125.000.000		30.000.000		30.000.000		40.000.000		100.000.000	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Demak
	Tersedianya dokumen perencanaan tenaga kerja mikro dan makro	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tenaga kerja mikro dan makro (Dengan Satuan:Persen)	50	100	100		100		100		100		100		Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Demak
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					2.402.000.200		2.611.000.200		2.411.000.200		2.411.000.200		2.611.000.200	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Demak
	meningkatnya kompetensi pencari kerja	Persentase pencari kerja yang diberi pelatihan (Dengan Satuan:Persen)	5,73	7,09	8,00		9,03		9,26		9,71		9,94		Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Demak
	meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi (Dengan Satuan:Persen)	49,92	50,31	50,69		51,08		51,47		51,86		52,24		Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Demak
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					398.000.000		302.000.000		348.000.000		493.000.000		443.000.000	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Demak
	meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (Dengan Satuan:Persen)	82,75	83,00	83,25		83,5		83,75		84,00		84,25		Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Demak
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					2.463.000.000		2.276.250.000		2.268.000.000		2.276.000.000		2.221.000.000	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Demak
	Meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja	Persentase perkara perselisihan perusahaan-pekerja yang terselesaikan (Dengan Satuan:Persen)	83,33	83,33	83,33		83,33		83,33		83,33		83,33		Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Demak
	Meningkatnya Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Dengan Satuan:Persen)	42,71	43,00	43,50		44,54		46,04		47,54		49,04		Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Demak
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					1.735.000.000		1.895.000.000		1.950.000.000		2.005.000.000		1.803.531.982	
	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					1.735.000.000		1.895.000.000		1.950.000.000		2.005.000.000		1.803.531.982	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					430.000.000		440.000.000		445.000.000		450.000.000		455.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (Dengan Satuan:%)	58,56	59,16	59,62		60,07		60,53		60,98		61,44	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		413.531.982	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					640.000.000		790.000.000		840.000.000		890.000.000		640.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya peran kelembagaan peningkatan kualitas keluarga	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif (Dengan Satuan:%)	70	80	80		100		100		100		100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		100.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan (Dengan Satuan:%)	80	90	90		90		95		95		95	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					140.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Terjaminnya pemenuhan hak anak secara kompehensif	Persentase Sekolah yang lulus evaluasi sekolah ramah anak (Dengan Satuan:%)	100	70,00	100		100		100		100		100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, pelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten tertangani (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				18.935.419.596		19.130.500.981		19.326.561.480		19.377.827.784		19.673.796.752		
	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				18.935.419.596		19.130.500.981		19.326.561.480		19.377.827.784		19.673.796.752		
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.190.419.596		18.343.500.981		18.509.561.480		18.587.827.784		18.803.796.752	Dinas Pertanian Dan Pangan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Kepuasan Layanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pertanian dan Pangan (Dengan Satuan:Angka)	91,41	91,42	91,43		91,46		91,49		91,52		91,55		Dinas Pertanian Dan Pangan
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	Dinas Pertanian Dan Pangan
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Jumlah infrastruktur kemandirian pangan (Dengan Satuan:Unit)	544	546	548		550		552		554		556		Dinas Pertanian Dan Pangan
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					615.000.000		657.000.000		687.000.000		655.000.000		735.000.000	Dinas Pertanian Dan Pangan
	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Ketersediaan Pangan Strategis (Dengan Satuan:Ton)	632.052	652.060	652.595		653.734		658.487		660.547		662.621		Dinas Pertanian Dan Pangan
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					35.000.000		35.000.000		35.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Pertanian Dan Pangan
	Menurunnya Daerah Rawan Pangan	Persentase desa rawan pangan (Dengan Satuan:%)	27,71	27,31	26,50		25,00		24,89		24,09		23,39		Dinas Pertanian Dan Pangan
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	Dinas Pertanian Dan Pangan
	Meningkatnya pengawasan keamanan pangan	Persentase Keamanan Pangan Segar dari bahan pangan yang diuji (Dengan Satuan:%)	91,57	91,59	91,61		91,63		91,65		91,67		91,69		Dinas Pertanian Dan Pangan
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Meningkatnya sinkronisasi dan koordinasi reforma agraria	Persentase pelaksanaan rencana aksi gugus tugas reforma agraria (Dengan Satuan:%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Meningkatnya penatagunaan tanah aset pemkab	Persentase tanah pemkab yang bersertifikat (Dengan Satuan:%)	98,00	98,30	98,42		98,83		99,23		99,62		99,89		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				22.306.139.463		28.262.416.927		28.389.957.166		26.898.772.807		28.948.876.605		
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				22.306.139.463		28.262.416.927		28.389.957.166		26.898.772.807		28.948.876.605		

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.831.139.463		16.957.416.927		17.084.957.166		17.113.772.807		17.343.876.605	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya Kepuasan Layanan Dinas Lingkungan Hidup	IKM Dinas Lingkungan Hidup (Dengan Satuan:Angka)	87,37	87,82	88,12		88,42		88,72		89,02		89,32		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					5.000.000		6.000.000		5.000.000		6.000.000		5.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya kualitas perencanaan lingkungan hidup	Ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup (Dengan Satuan:Dokumen)	3	1	2		2		1		2		1		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					520.000.000		319.000.000		320.000.000		319.000.000		320.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya pengendalian dan pemantauan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase penurunan frekuensi kejadian pencemaran Lingkungan (Dengan Satuan:%)	36,84	40,70	44,56		48,42		52,28		56,14		60,00		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					870.000.000		3.350.000.000		3.350.000.000		2.250.000.000		3.450.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya pengembangan Ruang terbuka Hijau (RTH)	Indeks Hijau Biru Indonesia (IHBI) (Dengan Satuan:Ha)	N/A	4.880,35	4.885,90		4.891,44		4.896,99		4.902,53		4.908,08		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang dikelola (Dengan Satuan:%)	92,84	93,00	93,20		93,40		93,60		93,80		94,00		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Dengan Satuan:%)	14,29	15,00	30,00		45,00		60,00		75,00		90,00		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					3.930.000.000		7.480.000.000		7.480.000.000		7.060.000.000		7.680.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya pengelolaan persampahan yang terpadu dan berkelanjutan	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (Dengan Satuan:%)	17,88	23,00	26,35		29,70		33,05		36,40		39,75		Dinas Lingkungan Hidup
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				11.042.574.709		10.903.079.708		10.964.189.757		10.825.910.907		11.088.249.268		
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				11.042.574.709		10.903.079.708		10.964.189.757		10.825.910.907		11.088.249.268		
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.333.588.209		8.180.279.708		8.241.389.757		8.111.110.907		8.365.449.268	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya kepuasan layanan Dindikcapil	IKM Dindikcapil (Dengan Satuan:angka)	91,43	91,45	91,50		91,55		91,60		91,65		91,70		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					2.377.259.300		2.386.200.000		2.386.200.000		2.378.200.000		2.386.200.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya tata kelola data kependudukan	Persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP elektronik. (Dengan Satuan:%)	98.7	98.73	98.75		98.80		98.85		98.90		98.95		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL					144.727.200		149.600.000		149.600.000		149.600.000		149.600.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya tata kelola data pencatatan sipil	Cakupan kepemilikan akta nikah (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya tata kelola data pencatatan sipil	Cakupan kepemilikan akta kelahiran balita (Dengan Satuan:%)	98,93	98,94	98,95		98,97		99		99,05		99,10		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya tata kelola data pencatatan sipil	Cakupan kepemilikan akta kematian (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
	Meningkatnya tata kelola data pencatatan sipil	Cakupan kepemilikan akta cerai (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					187.000.000		187.000.000		187.000.000		187.000.000		187.000.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Menyediakan data kependudukan yang valid dan realiable	Persentase institusi/lembaga/badan hukum yang difasilitasi pemanfaatan data kependudukan (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				18.451.274.800		19.552.040.682		19.600.253.768		18.597.906.484		19.875.354.328		
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				18.451.274.800		19.552.040.682		19.600.253.768		18.597.906.484		19.875.354.328		
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.379.004.780		8.087.110.613		8.428.373.001		8.387.639.190		8.363.134.308	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kepuasan layanan Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Angka)	91,90	91,95	92,00		92,05		92,10		92,15		92,20		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					110.000.000		125.000.000		135.000.000		120.000.000		135.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya kerja sama desa	Peningkatan Jumlah Kerja sama Desa yang difasilitasi (Dengan Satuan:presentase)	99,31%	99,31%	99,32%		99,33%		99,34%		99,35%		99,36%		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					8.907.270.020		10.104.930.069		9.851.880.767		8.960.267.294		10.162.220.020	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Presentase Fasilitasi tata kelola Desa (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					1.055.000.000		1.235.000.000		1.185.000.000		1.130.000.000		1.215.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa (LKD) (Dengan Satuan:%)	96,64	96,64	96,65		96,66		96,67		96,68		96,69		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				13.863.640.830		13.981.155.230		13.901.905.230		13.823.905.230		13.866.806.630		
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					484.303.550		554.303.550		484.303.550		454.303.550		489.303.550	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya Pelaksanaan pembangunan kependudukan	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR 15-19) (Dengan Satuan:%)	7,22	11,60	11,40		11,30		11,20		11,00		10,90		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					6.907.821.580		6.950.335.980		6.951.085.980		6.913.085.980		6.886.303.080	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Presentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (MCPR) (Dengan Satuan:%)	73,77	73,77	73,78		73,79		73,80		73,81		73,82		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Presentase Kebutuhan Ber KB yang tidak Terpenuhi(unmet need) (Dengan Satuan:%)	6,23	8,9	8,8		8,7		8,6		8,5		8,4		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					6.471.515.700		6.476.515.700		6.466.515.700		6.456.515.700		6.491.200.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	persentase desa/kelurahan yang memiliki kelompok Ketahanan Keluarga (Dengan Satuan:%)	95,01	95,01	95,02		95,03		95,04		95,05		95,06		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				41.951.401.563		42.718.321.538		41.547.464.380		38.679.398.650		42.114.152.264		
	DINAS PERHUBUNGAN				41.951.401.563		42.718.321.538		41.547.464.380		38.679.398.650		42.114.152.264		
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.381.981.063		9.278.962.538		9.422.311.900		9.389.284.755		9.663.586.340	Dinas Perhubungan
	Meningkatnya Kepuasan Layanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Perhubungan (Dengan Satuan:Angka)	89,20	89,20	89,35		89,52		89,87		89,92		90,11		Dinas Perhubungan
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					32.569.420.500		33.439.359.000		32.125.152.480		29.290.113.895		32.450.565.924	Dinas Perhubungan
	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten (Dengan Satuan:%)	15	15	18		25		30		32		38		Dinas Perhubungan
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				11.206.224.763		11.167.328.192		11.137.172.655		11.060.765.563		11.322.114.400		
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				11.206.224.763		11.167.328.192		11.137.172.655		11.060.765.563		11.322.114.400		
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.631.224.763		8.747.328.192		8.737.172.655		8.785.765.563		8.907.114.400	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Meningkatnya Kepuasan Layanan Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika (Dengan Satuan:Angka)	90,33	90,35	90,37		90,39		90,41		90,43		90,45		Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					1.860.000.000		1.860.000.000		1.910.000.000		1.860.000.000		1.860.000.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi Publik	Indeks PPID (Dengan Satuan:Angka)	NA	70,00	70,50		71,00		71,50		72,00		72,50		Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					715.000.000		560.000.000		490.000.000		415.000.000		555.000.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi e-gov yang terintegrasi dengan portal daerah (Dengan Satuan:%)	69,00	70,00	76,00		82,00		88,00		94,00		100		Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				2.121.265.000		2.121.885.000		2.121.885.000		2.131.885.000		2.131.885.000		
	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				2.121.265.000		2.121.885.000		2.121.885.000		2.131.885.000		2.131.885.000		
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					575.535.000		575.535.000		575.535.000		575.535.000		575.535.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas (Dengan Satuan:%)	66,20	62,10	62,69		62,69		62,69		62,70		62,70		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					1.066.350.000		1.066.350.000		1.066.350.000		1.066.350.000		1.066.350.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	Meningkatnya Jumlah UMKM	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal (Dengan Satuan:Produk)	NA	250	275		450		750		800		850		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	Meningkatnya Jumlah UMKM	Pertumbuhan UMKM (Dengan Satuan:%)	4,25	4,25	5,10		5,35		5,62		5,90		6,19		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					479.380.000		480.000.000		480.000.000		490.000.000		490.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	Meningkatnya UMKM yang Naik Kelas	Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil (Dengan Satuan:%)	3,48	3,48	3,48		3,49		3,50		3,51		3,52		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				6.906.389.896		6.961.625.296		7.017.413.049		6.873.758.680		7.280.667.767		
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				6.906.389.896		6.961.625.296		7.017.413.049		6.873.758.680		7.280.667.767		
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.556.652.788		6.518.461.188		6.574.248.941		6.498.594.572		6.837.503.659	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya Kepuasan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dengan Satuan:Angka)	91,02	91,40	91,41		91,42		91,43		91,44		91,45		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					34.607.000		34.607.000		34.607.000		32.607.000		34.607.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya iklim investasi	Jumlah nilai investasi PMDN dan PMA (Dengan Satuan:Miliar Rupiah)	3,952	4,448	5,007		5,638		6,350		7,153		8,060		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					56.573.000		150.000.000		150.000.000		100.000.000		150.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya jumlah investasi	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (Dengan Satuan:%)	12,53	12,55	12,57			12,60		12,63		12,65		12,68	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					125.104.608		125.104.608		125.104.608		115.104.608		125.104.608	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya kemudahan perizinan	Rata-rata lama pengurusan perizinan berusaha (Dengan Satuan:hari)	1	1	1			1		1		1		1	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					54.972.500		54.972.500		54.972.500		54.972.500		54.972.500	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Adanya Pendampingan kepatuhan LKPM	Persentase perusahaan yang telah dilakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal (Dengan Satuan:%)	15,15	15,15	15,52			15,88		16,23		16,29		16,34	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					78.480.000		78.480.000		78.480.000		72.480.000		78.480.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Tersedianya data investasi daerah	Persentase data investasi daerah yang dipublikasikan (Dengan Satuan:%)	100	100	100			100		100		100		100	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					15.624.086.324		14.857.036.438		15.055.466.053		14.854.379.964		15.423.783.014	
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					15.624.086.324		14.857.036.438		15.055.466.053		14.854.379.964		15.423.783.014	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.509.486.324		5.550.640.438		5.821.176.093		5.531.097.104		5.770.407.326	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
	Meningkatnya Kepuasan Layanan Perangkat Daerah	IKM Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak (Dengan Satuan:Angka)	92,25	92,25	92,50			92,70		92,90		93,10		93,30	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					654.600.000		882.000.000		756.000.000		479.000.000		759.000.000	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Cakupan Organisasi Kepemudaan yang Dibina (Dengan Satuan:Angka)	82,00	82,00	84,00			86,00		88,00		90,00		92,00	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					8.427.400.000		7.391.396.000		7.445.289.960		7.811.282.860		7.861.375.688	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase jumlah atlet berprestasi (Dengan Satuan:%)	57,00	60,00	65,00			66,00		68,00		70,00		72,00	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					1.032.600.000		1.033.000.000		1.033.000.000		1.033.000.000		1.033.000.000	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
	Meningkatnya Kapasitas Kepramukaan	Persentase organisasi pramuka aktif (Dengan Satuan:%)	96,00	96,00	96,00		97,00		97,00		98,00		98,00		Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				100.000.000		108.000.000		118.000.000		110.000.000		105.000.000		
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				100.000.000		108.000.000		118.000.000		110.000.000		105.000.000		
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					100.000.000		108.000.000		118.000.000		110.000.000		105.000.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Satu Data	Indeks Satu Data Indonesia (Dengan Satuan:Angka)	57,63	62,63	67,63		72,63		77,63		82,63		87,63		Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				150.000.000		155.000.000		170.000.000		160.000.000		150.000.000		
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					150.000.000		155.000.000		170.000.000		160.000.000		150.000.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Indeks Keamanan Informasi (Dengan Satuan:Angka)	560	565	570		575		580		585		590		Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				2.284.696.883		2.344.696.883		2.344.696.883		2.344.696.883		2.344.696.883		
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				2.284.696.883		2.344.696.883		2.344.696.883		2.344.696.883		2.344.696.883		
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					1.410.000.000		1.410.000.000		1.410.000.000		1.410.000.000		1.410.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Meningkatnya pengembangan kebudayaan	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/ mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir* (Dengan Satuan:%)	18,25	18,96	19,39		19,82		20,25		20,68		21,11		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilestarikan (Dengan Satuan:%)	18,15	18,21	18,97		19,74		20,50		21,26		22,02		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					674.696.883		734.696.883		734.696.883		734.696.883		734.696.883	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Peningkatan Kunjungan ke Museum (Dengan Satuan:%)	10	11	12		14		16		17		18		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				6.365.641.083		6.513.245.807		6.580.326.578		6.459.888.157		6.658.935.352		
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				6.365.641.083		6.513.245.807		6.580.326.578		6.459.888.157		6.658.935.352		

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.472.641.083		5.530.245.807		5.513.338.898		5.453.888.157		5.675.935.352	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	Meningkatnya kepuasan layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perpustakan dan Kearsipan (Dengan Satuan:Angka)	87,56	87,70	87,85		88,00		88,15		88,25		88,50		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					795.045.500		885.045.500		969.033.180		913.045.500		885.045.500	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Rasio kunjungan masyarakat ke perpustakaan (Dengan Satuan:Angka)	0,22	0,23	0,24		0,26		0,27		0,28		0,29		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					97.954.500		97.954.500		97.954.500		92.954.500		97.954.500	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	Meningkatnya ketersediaan koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase peningkatan koleksi nasional dan naskah kuno (Dengan Satuan:%)	0	3,57	8,99		13,44		16,27		17,60		17,87		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				444.000.000		444.000.000		425.000.000		344.000.000		444.000.000		
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					404.000.000		404.000.000		385.000.000		309.000.000		404.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	Meningkatnya pengelolaan arsip dinamis dan statis	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan aplikasi pengolahan arsip digital (Dengan Satuan:%)	17,07	26,83	39,02		53,66		70,73		90,24		100,00		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					40.000.000		40.000.000		40.000.000		35.000.000		40.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip (Dengan Satuan:%)	9,76	19,51	31,71		46,34		63,41		80,49		100,00		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				77.792.786.957		80.819.133.140		79.373.640.687		79.021.498.107		80.491.244.102		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				10.279.832.108		10.116.460.617		9.963.555.412		9.561.121.154		10.059.162.554		
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				10.279.832.108		10.116.460.617		9.963.555.412		9.561.121.154		10.059.162.554		
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.459.832.108		5.530.960.617		5.541.555.412		5.499.121.154		5.673.662.554	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Meningkatnya kepuasan layanan Dinas Kelautan dan Perikanan	IKM Dinas Kelautan dan Perikanan (Dengan Satuan:Angka)	91,65	91,65	91,70		91,75		91,80		91,85		91,90		Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					1.160.000.000		1.355.000.000		1.249.000.000		1.104.000.000		1.355.000.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap (Dengan Satuan:Ton)	9.108	9.134,97	9.162,37		9.189,86		9.217,43		9.245,08		9.272,82		Dinas Kelautan Dan Perikanan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					2.330.000.000		1.905.500.000		1.864.000.000		1.594.000.000		1.705.500.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Meningkatnya produksi Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya (Dengan Satuan:Ton)	50.842	51.873,06	52.910,52		53.968,73		55.048,10		56.149,07		57.272,05		Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					60.000.000		70.000.000		60.000.000		60.000.000		70.000.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Meningkatnya kepatuhan Sumber daya Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (Dengan Satuan:%)	30	40	50		55		60		65		70		Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					1.270.000.000		1.255.000.000		1.249.000.000		1.304.000.000		1.255.000.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	produksi pengolahan hasil perikanan (Dengan Satuan:Ton)	22.010	22.520	23.420		24.380		25.403		26.495		27.660		Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				8.742.232.571		9.212.731.648		8.943.735.716		8.445.249.824		9.222.279.073		
	DINAS PARIWISATA				8.742.232.571		9.212.731.648		8.943.735.716		8.445.249.824		9.222.279.073		
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.452.232.571		6.486.611.648		6.522.443.016		6.438.957.124		6.687.189.073	Dinas Pariwisata
	Meningkatnya kepuasan layanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Dengan Satuan:Angka)	91,10	92,53	92,80		93,00		93,20		93,40		93,50		Dinas Pariwisata
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					703.880.000		970.000.000		750.000.000		480.000.000		875.000.000	Dinas Pariwisata
	Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara; (Dengan Satuan:Orang)	248	298	349		355		375		390		410		Dinas Pariwisata
	Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Tamu Wisatawan Nusantara; (Dengan Satuan:Orang)	3.913.112	4.114.832	5.382.146		5.651.255		5.933.815		6.230.510		6.542.035		Dinas Pariwisata
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					1.276.120.000		1.286.120.000		1.326.292.700		1.216.292.700		1.290.090.000	Dinas Pariwisata
	Terlaksananya Promosi dan Pemasaran Pariwisata	Persentase kegiatan kalender event yang dipromosikan ke luar daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Pariwisata
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					310.000.000		470.000.000		345.000.000		310.000.000		370.000.000	Dinas Pariwisata
	Meningkatnya pengembangan sub sektor ekonomi kreatif	Persentase sub sektor ekonomi kreatif yang dibina (Dengan Satuan:%)	17,00	23,00	38,46		53,85		69,23		84,62		100		Dinas Pariwisata
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata	Persentase Tenaga Kerja Pariwisata yang Bersertifikat (Dengan Satuan:%)	10,00	13,79	14,50		15,00		15,50		16,00		16,50		Dinas Pariwisata
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				27.268.844.000		27.340.674.000		27.613.194.000		29.382.194.000		28.108.194.000		

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				27.268.844.000		27.340.674.000		27.613.194.000		29.382.194.000		28.108.194.000		
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					19.452.844.000		19.744.674.000		19.747.194.000		19.582.194.000		19.747.194.000	Dinas Pertanian Dan Pangan
	Tersedianya Alat mesin Pertanian	Persentase alsintan pertanian dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	85,00	86,00	87,00		88,00		89,00		90,00		91,00		Dinas Pertanian Dan Pangan
	Tersedianya Alat mesin Pertanian	Persentase alsintan perkebunan dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	85,00	86,00	87,00		88,00		89,00		90,00		91,00		Dinas Pertanian Dan Pangan
	Tersedianya Alat mesin Pertanian	Persentase alsintan peternakan dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	85,00	86,00	87,00		88,00		89,00		90,00		91,00		Dinas Pertanian Dan Pangan
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					6.700.000.000		6.545.000.000		6.815.000.000		8.784.000.000		7.310.000.000	Dinas Pertanian Dan Pangan
	Tersedianya Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	90,00	90,00	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		Dinas Pertanian Dan Pangan
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					115.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000	Dinas Pertanian Dan Pangan
	Terkendalnya Hama Penyakit Ternak	Jumlah kasus penyakit hewan yang terkonfirmasi (Dengan Satuan:Ekor)	1295	1133	986		853		733		627		532		Dinas Pertanian Dan Pangan
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					210.000.000		210.000.000		210.000.000		175.000.000		210.000.000	Dinas Pertanian Dan Pangan
	Terkendalnya dan tertanggulangnya bencana pertanian	Persentase luas puso pertanian yang dikendalikan (Dengan Satuan:%)	49,00	50,00	50,00		50,00		50,00		50,00		50,00		Dinas Pertanian Dan Pangan
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					791.000.000		716.000.000		716.000.000		716.000.000		716.000.000	Dinas Pertanian Dan Pangan
	Meningkatnya kapasitas SDM Pertanian	Persentase kelompok tani yang dibina (Dengan Satuan:%)	25,21	26,23	27,23		28,23		29,23		30,23		31,23		Dinas Pertanian Dan Pangan
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				30.518.878.278		33.086.266.875		31.925.155.559		30.699.933.129		32.095.608.475		
	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				30.518.878.278		33.086.266.875		31.925.155.559		30.699.933.129		32.095.608.475		
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.096.588.377		12.711.080.132		12.958.919.445		13.060.922.161		13.406.343.954	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	Meningkatnya Kepuasan Layanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Demak	Indek Kepuasan Masyarakat (Dengan Satuan:Angka)	89,52	89,75	89,80		89,85		89,90		90,00		90,10		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					15.400.000		15.400.000		15.400.000		15.400.000		15.400.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Kemudahan Perizinan Bagi Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Toko Swalayan yang Direkomendasi (Dengan Satuan:%)	98,92	98,95	98,96		98,97		98,98		98,99		99,00		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					17.487.439.901		19.428.786.743		18.019.836.114		16.673.610.968		17.723.864.521	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Kualitas Sarana Distribusi Perdagangan Dalam Kondisi Baik (Dengan Satuan:%)	55,56	55,56	61		66		72		77		83		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase PKL Yang Ditata (Dengan Satuan:%)	NA	15,00	16,50		31,60		46,60		61,60		75,10		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					590.000.000		593.500.000		593.500.000		607.500.000		607.500.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	Meningkatnya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Disparitas Harga (Dengan Satuan:%)	0,373	±10	±10		±10		±10		±10		±10		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					88.450.000		95.000.000		95.000.000		97.500.000		97.500.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Perdagangan	Pertumbuhan Nilai Ekspor Luar Negeri (Dengan Satuan:%)	0,23	0,23	0,25		0,27		0,29		0,31		0,33		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					186.000.000		187.500.000		187.500.000		190.000.000		190.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	Meningkatnya Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat - Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku (Dengan Satuan:%)	133,22	100	100		100		100		100		100		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah Mengikuti Sosialisasi Produk Legal Dalam Negeri (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				903.000.000		993.000.000		848.000.000		853.000.000		936.000.000		
	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN DEMAK				903.000.000		993.000.000		848.000.000		853.000.000		936.000.000		
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					848.000.000		948.000.000		803.000.000		793.000.000		881.000.000	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Demak

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersedianya dokumen perencanaan industri	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan industri (Dengan Satuan:Persen)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Demak
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					15.000.000		15.000.000		15.000.000		20.000.000		15.000.000	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Demak
	Meningkatnya Pemantauan Perkembangan Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Demak
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					40.000.000		30.000.000		30.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Demak
	Tersedianya Informasi Perkembangan Industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (Dengan Satuan:Angka)	125	125	125		125		125		125		125		Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Demak
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				80.000.000		70.000.000		80.000.000		80.000.000		70.000.000		
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					80.000.000		70.000.000		80.000.000		80.000.000		70.000.000	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Demak
	meningkatkan layanan transmigrasi	jumlah calon transmigran yang terdaftar (Dengan Satuan:Kepala Keluarga)	7	15	15		15		15		15		15		Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Demak
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				136.369.712.110		136.902.313.698		137.245.148.380		146.431.783.551		148.465.272.371		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				63.317.948.133		63.801.850.155		64.061.498.276		68.698.455.020		68.931.768.629		
	SEKRETARIAT DAERAH				63.317.948.133		63.801.850.155		64.061.498.276		68.698.455.020		68.931.768.629		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					38.027.698.133		39.103.879.365		39.412.314.776		40.218.546.720		43.281.628.229	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Lingkup Setda	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Angka)	90,07	90,07	90,45		90,70		90,85		91,00		91,20		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Lingkup Setda	Persentase kegiatan pimpinan yang terfasilitasi (Dengan Satuan:Persentase)	93,83	100	100		100		100		100		Sekretariat Daerah		
	Meningkatnya Kematangan Organisasi	Nilai Kematangan Organisasi (Dengan Satuan:Angka)	38,02	38,05	38,27		38,42		38,60		38,78		38,90		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya Kualitas Kinerja PD	Persentase kualitas Pelaporan Kinerja PD kategori "Baik" (Dengan Satuan:Persentase)	26,83	28,00	30,00		32,53		34,44		36,89		38,00		Sekretariat Daerah

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Tata Kelola Pelayanan Publik	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki IPP kategori "Pelayanan Prima" pada PEKPP Mandiri (Dengan Satuan:Persentase)	4,00	4,00	5,00		10,00		15,00		20,00		25,00		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya perencanaan di Sekretariat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang tersusun (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					23.440.250.000		22.847.970.790		22.799.183.500		26.629.908.300		23.800.140.400	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase kebijakan bidang administrasi tata pemerintahan yang difasilitasi (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase fasilitasi kebijakan urusan kesejahteraan rakyat (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100		100		100		100		Sekretariat Daerah		
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Indeks Reformasi Hukum (Dengan Satuan:Angka)	97,92	97,92	97,95		97,98		98,00		98,03		98,05		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Indeks Kualitas Kebijakan (Dengan Satuan:Angka)	66,88	66,90	67,00		68,00		69,00		70,00		71,00		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Nilai Aksi HAM Daerah (Dengan Satuan:Angka)	100	92	92,20		92,40		92,60		92,80		93,00		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase Kerjasama Daerah yang difasilitasi (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					1.850.000.000		1.850.000.000		1.850.000.000		1.850.000.000		1.850.000.000	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD yang difasilitasi (Dengan Satuan:Persentase)	71,00	71,00	71,00		71,00		71,00		71,00		71,00		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan perekonomian dan pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) (Dengan Satuan:Angka)	78,00	79,00	81,00		82,00		83,00		85,00		85,00		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan urusan perekonomian yang difasilitasi (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan urusan SDA yang difasilitasi (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan perekonomian dan pembangunan	Capaian Progres Pekerjaan Konstruksi Daerah (Dengan Satuan:Angka)	96	95	95		95		95		95		95		Sekretariat Daerah
4.02	SEKRETARIAT DPRD				73.051.763.977		73.100.463.543		73.183.650.104		77.733.328.531		79.533.503.742		

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	SEKRETARIAT DPRD				73.051.763.977		73.100.463.543		73.183.650.104		77.733.328.531		79.533.503.742		
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					47.519.761.759		46.940.076.574		47.080.997.886		51.379.836.000		53.105.008.031	Sekretariat DPRD
	Meningkatnya kepuasan layanan Sekretariat DPRD	IKM Sekretariat DPRD (Dengan Satuan:Angka)	84,13	85,00	85,15		85,25		85,50		85,75		86,00		Sekretariat DPRD
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					25.532.002.218		26.160.386.969		26.102.652.218		26.353.492.531		26.428.495.711	Sekretariat DPRD
	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Dengan Satuan:%)	100	60	65		70		75		80		80		Sekretariat DPRD
	Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		Sekretariat DPRD		
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				512.909.387.016		514.186.588.568		518.932.950.105		520.853.632.640		527.136.909.781		
5.01	PERENCANAAN				12.007.791.504		12.376.060.417		12.237.309.891		13.544.931.484		16.588.051.069		
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH				12.007.791.504		12.376.060.417		12.237.309.891		13.544.931.484		16.588.051.069		
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.687.579.004		7.922.130.704		7.793.774.882		8.020.366.484		8.437.773.321	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
	Meningkatnya kepuasan layanan Bapperida	Indeks Kepuasan Masyarakat Bapperida (Dengan Satuan:Angka)	91,65	91,69	91,73		91,77		91,81		91,85		91,89		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					2.416.212.500		2.137.279.713		2.076.840.000		3.042.915.000		5.438.627.748	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
	Terpenuhinya keselarasan RKPD dengan RPJMD	Persentase keselarasan program RKPD dengan program RPJMD (Dengan Satuan:Persen)	99,19		98,47		98,47		98,47		98,47		98,47		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1.904.000.000		2.316.650.000		2.366.695.009		2.481.650.000		2.711.650.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
	Terpenuhinya keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan PD	Persentase Kesesuaian Renstra - Renja dan RKPD - Renja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (Dengan Satuan:Persen)	98,78		99,38		99,38		99,38		99,38		99,38		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
	Terpenuhinya keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan PD	Persentase Kesesuaian Renstra - Renja dan RKPD - Renja bidang perekonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan (Dengan Satuan:Persen)	98,78		99,38		99,38		99,38		99,38		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah		
5.02	KEUANGAN				490.013.868.396		490.759.077.206		495.661.509.272		496.435.219.717		498.536.488.870		

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH				490.013.868.396		490.759.077.206		495.661.509.272		496.435.219.717		498.536.488.870		
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					27.750.379.561		28.520.588.371		29.323.020.437		30.296.730.882		32.398.000.035	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
	meningkatnya kepuasan layanan Perangkat Daerah	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PERANGKAT DAERAH (Dengan Satuan:ANGKA)	90.30	90.31	90.32		90.33		90.35		90.36		90.37		Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					424.992.365.600		424.967.365.600		429.067.365.600		428.867.365.600		428.867.365.600	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
	Terpenuhinya keselarasan proses perencanaan dan penganggaran	Skor Kesesuaian Pagu Program dokumen perencanaan dan penganggaran (Dengan Satuan:Angka)	0,58	0,80	0,80		0,80		0,80		0,80		0,80		Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
	Terlaksananya penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan yang baik	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintahan daerah sesuai kaidah perundangan (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah		
	terselesaikannya Laporan Keuangan seluruh SKPD sesuai SAP	persentase laporan SKPD yang telah diselesaikan sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah		
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
	Meningkatnya barang milik daerah yang dimanfaatkan	Persentase barang milik daerah yang dimanfaatkan (Dengan Satuan:%)	7	7	7		7		7		7		7		Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					36.271.123.235		36.271.123.235		36.271.123.235		36.271.123.235		36.271.123.235	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
	Meningkatnya realisasi PAD	Revenue Mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (Dengan Satuan:%)	22,8	4,94	4,50		4,00		3,75		3,50		3,25		Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
5.03	KEPEGAWAIAN				9.145.814.116		9.194.130.945		9.143.180.942		8.917.971.439		9.518.509.842		
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				9.145.814.116		9.194.130.945		9.143.180.942		8.917.971.439		9.518.509.842		
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.065.764.116		8.014.517.445		8.060.211.754		8.031.616.439		8.274.832.842	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya kepuasan layanan BKPSDM	Indeks Kepuasan Masyarakat BKPSDM (Dengan Satuan:Angka)	90,53	90,60	90,65		91,02		91,04		91,06		91,08		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1.080.050.000		1.179.613.500		1.082.969.188		886.355.000		1.243.677.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya (Dengan Satuan:%)	80,7	80,73	80,75		80,80		80,85		80,90		80,95		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya pembinaan disiplin pegawai	Persentase tingkat kedisiplinan (Dengan Satuan:%)	96,50	96,55	97,00		97,00		98,00		98,00		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
	Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya (Dengan Satuan:%)	80,00	80,50	81,00		82,00		83,00		84,00		85,00		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Terpenuhinya kebutuhan formasi ASN	Persentase formasi kebutuhan ASN yang terisi (Dengan Satuan:%)	86,66	86,67	86,68		86,70		86,72		86,74		86,76		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		550.000.000		
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		550.000.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Terlaksananya Rencana Pengembangan Kompetensi	Persentase Implementasi Rencana Program Pengembangan Kompetensi (Dengan Satuan:%)	85,37	86,00	86,36		87,36		88,36		89,36		90,36		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.291.913.000		1.407.320.000		1.440.950.000		1.505.510.000		1.943.860.000		
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH				1.291.913.000		1.407.320.000		1.440.950.000		1.505.510.000		1.943.860.000		
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					324.033.000		330.000.000		330.000.000		430.000.000		430.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
	Terlaksananya riset sesuai rencana induk riset	Persentase riset yang dilaksanakan sesuai rencana induk riset (Dengan Satuan:Persen)	0	0	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
	Meningkatnya inovasi yang mendapatkan HAKI	Persentase Inovasi yang mendapatkan HAKI (Dengan Satuan:Persen)	0	0	33,33		66,67		77,78		83,33		86,67		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					967.880.000		1.077.320.000		1.110.950.000		1.075.510.000		1.513.860.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
	Tersusunya Hasil Riset yang menjadi rekomendasi kebijakan	Persentase Hasil Riset yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (Dengan Satuan:persen)	46,15	100	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Berinovasi	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Berinovasi (Dengan Satuan:persen)	162,24	-21,09	3,00		3,50		4,00		4,50		5,00		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				14.474.782.432		14.562.832.819		14.651.763.710		14.591.583.910		14.832.302.312		

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				14.474.782.432		14.562.832.819		14.651.763.710		14.591.583.910		14.832.302.312		
	INSPEKTORAT DAERAH				14.474.782.432		14.562.832.819		14.651.763.710		14.591.583.910		14.832.302.312		
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.714.984.432		11.801.112.819		11.890.043.710		11.831.785.910		12.072.504.312	Inspektorat Daerah
	Meningkatnya Kepuasan Layanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat di Perangkat Daerah (Dengan Satuan:angka)	91,00	91,50	91,80		91,85		91,90		91,95		92,00		Inspektorat Daerah
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					1.505.875.000		1.503.600.000		1.503.600.000		1.505.875.000		1.505.875.000	Inspektorat Daerah
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan	Tindakanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran sebelumnya (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Inspektorat Daerah
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					1.253.923.000		1.258.120.000		1.258.120.000		1.253.923.000		1.253.923.000	Inspektorat Daerah
	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Indeks Manajemen Risiko (Dengan Satuan:Angka)	2,98	2,99	3,00		3,01		3,02		3,03		3,04		Inspektorat Daerah
7	UNSUR KEWILAYAHAN				49.760.775.833		50.091.536.844		50.425.605.468		51.563.014.779		51.103.798.180		
7.01	KECAMATAN				49.760.775.833		50.091.536.844		50.425.605.468		51.563.014.779		51.103.798.180		
	KECAMATAN MRANGGEN				2.568.183.984		2.585.229.449		2.602.445.369		2.669.833.448		2.637.395.408		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.173.098.984		2.203.764.449		2.220.360.369		2.135.835.598		2.262.310.408	Kecamatan Mranggen
	Meningkatnya kepuasan layanan perangkat daerah	IKM Perangkat Daerah (Dengan Satuan:angka)	84,07	84,25	84,35		84,45		84,60		84,75		84,90		Kecamatan Mranggen
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					93.880.000		98.880.000		99.500.000		93.880.000		107.500.000	Kecamatan Mranggen
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik Kecamatan Mranggen (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Mranggen
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					82.000.000		67.500.000		67.500.000		37.500.000		52.500.000	Kecamatan Mranggen
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif di Kecamatan Mranggen (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Mranggen
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					111.300.000		111.300.000		111.300.000		298.832.850		111.300.000	Kecamatan Mranggen

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Keamanan Wilayah	Cakupan keamanan wilayah Kecamatan Mranggen (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Mranggen
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					73.785.000		73.785.000		73.785.000		73.785.000		73.785.000	Kecamatan Mranggen
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kecamatan Mranggen (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Mranggen
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					34.120.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Kecamatan Mranggen
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi di Kecamatan Mranggen (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Mranggen
	KECAMATAN KARANGAWEN				3.248.274.750		3.272.808.310		3.297.587.206		3.372.613.891		3.347.890.842		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.933.524.450		2.971.608.310		3.002.387.206		2.954.413.891		3.029.290.842	Kecamatan Karangawen
	Meningkatnya Kepuasan Layanan Kecamatan Karangawen	IKM Kecamatan Karangawen (Dengan Satuan:Angka)	94,94	94,95	94,96		94,97		94,98		94,99		95,00		Kecamatan Karangawen
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					55.650.000		57.000.000		58.000.000		158.000.000		60.000.000	Kecamatan Karangawen
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik di Kecamatan Karangawen (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Karangawen
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					24.824.400		27.000.000		23.000.000		28.000.000		28.000.000	Kecamatan Karangawen
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif di Kecamatan Karangawen (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Karangawen
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					106.250.800		106.600.000		106.600.000		106.600.000		108.600.000	Kecamatan Karangawen
	Meningkatnya Keamanan Wilayah	Cakupan keamanan wilayah di Kecamatan Karangawen (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Karangawen
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					56.725.100		55.000.000		47.600.000		62.600.000		60.000.000	Kecamatan Karangawen
	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan karangawen (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Karangawen

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					71.300.000		55.600.000		60.000.000		63.000.000		62.000.000	Kecamatan Karangawen
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa yang tertib administrasi di kecamatan karangawen (Dengan Satuan:%)	100	100	100			100		100		100			Kecamatan Karangawen
	KECAMATAN GUNTUR				3.042.846.779		3.065.134.997		3.087.646.097		3.160.382.308		3.133.345.882		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.649.104.779		2.645.910.097		2.668.421.197		2.656.951.408		2.714.120.982	Kecamatan Guntur
	Meningkatnya Kepuasan Layanan Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Angka)	83,99	84,25	84,50			84,75		85		85,25		85,50	Kecamatan Guntur
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					55.300.000		55.300.000		55.300.000		55.300.000		55.300.000	Kecamatan Guntur
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik (Dengan Satuan:%)	100	100	100			100		100		100			Kecamatan Guntur
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					43.122.200		43.122.200		43.122.200		43.122.200		43.122.200	Kecamatan Guntur
	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif di Kecamatan Guntur (Dengan Satuan:%)	100	100	100			100		100		100			Kecamatan Guntur
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					119.282.900		144.665.800		144.665.800		244.665.800		144.665.800	Kecamatan Guntur
	Meningkatnya keamanan wilayah	Cakupan keamanan wilayah di Kecamatan Guntur (Dengan Satuan:%)	100	100	100			100		100		100			Kecamatan Guntur
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					54.525.300		54.525.300		54.525.300		54.525.300		54.525.300	Kecamatan Guntur
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kecamatan Guntur (Dengan Satuan:%)	100	100	100			100		100		100		1000	Kecamatan Guntur
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					121.511.600		121.611.600		121.611.600		105.817.600		121.611.600	Kecamatan Guntur
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Guntur (Dengan Satuan:%)	100	100	100			100		100		100			Kecamatan Guntur
	KECAMATAN SAYUNG				3.471.957.373		3.498.536.697		3.525.381.814		3.602.495.383		3.579.880.087		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.200.761.575		3.199.511.697		3.216.881.814		3.209.745.383		3.262.130.087	Kecamatan Sayung

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Kepuasan Layanan Kecamatan Sayung	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sayung (Dengan Satuan:Angka)	90.24	91	91.41		91.42		91.43		91.44		91.45	Kecamatan Sayung	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				69.793.500		61.000.000		61.000.000		61.000.000		76.000.000	Kecamatan Sayung	
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik di Kec.Sayung (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100	Kecamatan Sayung	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				10.245.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	Kecamatan Sayung	
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan kecamatan sayung yang aktif (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100	Kecamatan Sayung	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				107.552.398		139.525.000		139.000.000		233.250.000		133.250.000	Kecamatan Sayung	
	Meningkatnya keamanan wilayah kecamatan sayung	Cakupan Keamanan Wilayah Kecamatan Sayung (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100	Kecamatan Sayung	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				48.493.400		45.000.000		55.000.000		45.000.000		55.000.000	Kecamatan Sayung	
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kecamatan sayung (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100	Kecamatan Sayung	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				35.111.500		18.500.000		18.500.000		18.500.000		18.500.000	Kecamatan Sayung	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa yang tertib administrasi kecamatan sayung (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100	Kecamatan Sayung	
	KECAMATAN KARANGTENGAH				3.055.435.955		3.077.563.002		3.099.911.320		3.172.483.121		3.145.280.640		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.744.263.955		2.761.963.002		2.784.311.320		2.779.883.121		2.812.680.640	Kecamatan Karangtengah	
	Meningkatnya Kepuasan Layanan Kecamatan Karangtengah	IKM Kecamatan Karangtengah (Dengan Satuan:Angka)	91,33	91,66	91,67		91,68		91,69		91,70		91,71	Kecamatan Karangtengah	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				54.747.200		60.000.000		65.000.000		60.000.000		65.000.000	Kecamatan Karangtengah	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Karangtengah yang baik (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100	Kecamatan Karangtengah	

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					42.672.200		45.000.000		45.000.000		37.000.000		45.000.000	Kecamatan Karangtengah
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan Kecamatan Karangtengah yang aktif (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Karangtengah
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					116.597.200		115.600.000		115.600.000		215.600.000		115.600.000	Kecamatan Karangtengah
	Meningkatnya keamanan wilayah	Cakupan keamanan wilayah Kecamatan Karangtengah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Karangtengah
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					33.694.400		35.000.000		35.000.000		35.000.000		40.000.000	Kecamatan Karangtengah
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kecamatan Karangtengah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Karangtengah
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					63.461.000		60.000.000		55.000.000		45.000.000		67.000.000	Kecamatan Karangtengah
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa yang tertib administrasi di Kecamatan Karangtengah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Karangtengah
	KECAMATAN WONOSALAM					2.688.664.191		2.707.308.583		2.726.139.419		2.795.158.564		2.764.367.899	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.226.664.191		2.215.308.583		2.224.139.419		2.225.158.564		2.282.367.899	Kecamatan Wonosalam
	Meningkatnya Kepuasan Layanan Kecamatan Wonosalam	IKM Kecamatan Wonosalam (Dengan Satuan:Angka)	86,00	87,00	87,15		87,30		87,45		87,60		87,75		Kecamatan Wonosalam
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					100.000.000		100.000.000		110.000.000		88.000.000		100.000.000	Kecamatan Wonosalam
	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik Kecamatan Wonosalam (Dengan Satuan:%)	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Wonosalam
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000	Kecamatan Wonosalam
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif pada Kecamatan Wonosalam (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Wonosalam
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					132.000.000		132.000.000		132.000.000		232.000.000		132.000.000	Kecamatan Wonosalam

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Keamanan Wilayah	Cakupan keamanan wilayah Kecamatan Wonosalam (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Wonosalam
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					45.000.000		45.000.000		55.000.000		50.000.000		45.000.000	Kecamatan Wonosalam
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Wonosalam	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kecamatan Wonosalam (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Wonosalam
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					90.000.000		120.000.000		110.000.000		105.000.000		110.000.000	Kecamatan Wonosalam
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi pada Kecamatan Wonosalam (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Wonosalam
	KECAMATAN DEMPET				2.575.069.628		2.593.092.199		2.611.294.997		2.679.679.822		2.648.248.495		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.108.753.062		2.092.423.633		2.140.626.431		2.083.958.621		2.169.494.072	Kecamatan Dempet
	Meningkatnya Kepuasan Layanan Kecamatan Dempet	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Dempet (Dengan Satuan:Angka)	84.56	84,6	84.70		84.90		85.10		85.30		85.50		Kecamatan Dempet
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					110.806.000		115.806.000		105.806.000		115.806.000		105.806.000	Kecamatan Dempet
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Prersentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Baik (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Dempet
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					95.000.000		95.000.000		95.000.000		100.000.000		95.000.000	Kecamatan Dempet
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif Kecamatan Dempet (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Dempet
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					112.750.000		112.750.000		112.750.000		212.750.000		112.750.000	Kecamatan Dempet
	Meningkatnya Keamanan wilayah	Cakupan keamanan wilayah Kecamatan Dempet (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Dempet
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					85.648.000		85.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	Kecamatan Dempet
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kecamatan Dempet (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Dempet
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					62.112.566		92.112.566		82.112.566		92.165.201		90.198.423	Kecamatan Dempet

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Dempet (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Dempet
	KECAMATAN GAJAH				2.893.223.416		2.914.648.588		2.936.288.011		3.008.143.829		2.980.218.205		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.379.129.616		2.439.503.188		2.433.642.611		2.450.153.429		2.508.927.805	Kecamatan Gajah
	Meningkatnya Kepuasan Layanan Kecamatan Gajah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Gajah (Dengan Satuan:Angka)	84,56	84,66	84,76		84,86		84,96		85,06		85,16		Kecamatan Gajah
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					134.032.700		134.232.700		134.032.700		134.232.700		134.032.700	Kecamatan Gajah
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Gajah	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang baik di Kecamatan Gajah (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Gajah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					103.008.400		54.800.000		85.500.000		45.000.000		66.000.000	Kecamatan Gajah
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Gajah	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang aktif di Kecamatan Gajah (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Gajah
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					116.712.700		116.712.700		116.712.700		216.712.700		116.712.700	Kecamatan Gajah
	Meningkatnya keamanan wilayah Kecamatan Gajah	Cakupan Keamanan Wilayah Kecamatan Gajah (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Gajah
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					42.440.000		47.500.000		47.500.000		47.500.000		50.000.000	Kecamatan Gajah
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Gajah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Gajah (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Gajah
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					117.900.000		121.900.000		118.900.000		114.545.000		104.545.000	Kecamatan Gajah
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Gajah	Persentase Desa yang Tertib Administrasi di Kecamatan Gajah (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Gajah
	KECAMATAN KARANGANYAR				2.992.036.163		3.013.553.212		3.035.285.432		3.107.234.974		3.079.404.012		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.551.267.063		2.560.967.412		2.614.732.332		2.538.609.174		2.578.803.412	Kecamatan Karanganyar

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Kepuasan Layanan Kecamatan Karanganyar	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karanganyar (Dengan Satuan:Angka)	87,21	87,89	87,99		88,20		88,35		88,45		88,70		Kecamatan Karanganyar
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				99.188.000		101.188.000		101.188.000		100.188.000		100.188.000		Kecamatan Karanganyar
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik Kecamatan Karanganyar (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Karanganyar
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				61.990.500		67.107.200		35.074.500		38.647.200		80.372.000		Kecamatan Karanganyar
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif Kecamatan Karanganyar (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Karanganyar
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				151.581.500		151.581.500		151.581.500		297.081.500		171.581.500		Kecamatan Karanganyar
	Meningkatnya Keamanan Wilayah	Cakupan Keamanan Wilayah Kecamatan Karanganyar (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Karanganyar
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				49.179.000		55.379.000		55.379.000		55.379.000		58.379.000		Kecamatan Karanganyar
	Menigkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kecamatan Karanganyar (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Karanganyar
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				78.830.100		77.330.100		77.330.100		77.330.100		90.080.100		Kecamatan Karanganyar
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Karanganyar (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Karanganyar
	KECAMATAN MIJEN				2.535.957.250		2.552.853.510		2.569.918.733		2.637.154.608		2.604.562.842		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.063.651.850		2.097.614.310		2.114.679.533		2.097.154.608		2.149.323.642		Kecamatan Mijen
	Meningkatnya Kepuasan Layanan Perangkat Daerah	IKM Kecamatan Mijen (Dengan Satuan:Angka)	88,68	88,88	89,08		89,28		89,48		89,68		89,88		Kecamatan Mijen
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				100.271.300		100.271.300		100.271.300		99.000.000		100.271.300		Kecamatan Mijen
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik Kecamatan Mijen (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Mijen

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					67.374.400		73.374.400		72.374.400		70.000.000		73.374.400	Kecamatan Mijen
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif di Kec. Mijen (Dengan Satuan:%)	100	100	100			100		100		100			Kecamatan Mijen
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					147.905.200		147.905.200		147.905.200		245.000.000		147.905.200	Kecamatan Mijen
	Meningkatnya Keamanan Wilayah	Cakupan keamanan wilayah Kecamatan Mijen (Dengan Satuan:%)	100	100	100			100		100			100		Kecamatan Mijen
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					69.950.000		71.950.000		71.950.000		69.000.000		71.950.000	Kecamatan Mijen
	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kecamatan Mijen (Dengan Satuan:%)	100	100	100			100		100			100		Kecamatan Mijen
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					86.804.500		61.738.300		62.738.300		57.000.000		61.738.300	Kecamatan Mijen
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi di Kecamatan Mijen (Dengan Satuan:%)	100	100	100			100		100			100		Kecamatan Mijen
	KECAMATAN DEMAK				12.062.283.931		12.122.059.147		12.182.432.115		12.393.408.813		12.304.995.278		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.543.402.731		8.756.139.147		8.816.512.115		8.827.488.813		8.935.075.278	Kecamatan Demak
	Meningkatnya kepuasan layanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Demak (Dengan Satuan:Angka)	91,00	91,01	91,02			91,03		91,04		91,05		91,06	Kecamatan Demak
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		14.000.000	Kecamatan Demak
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik pada Kecamatan Demak (Dengan Satuan:%)	100		100			100		100		100			Kecamatan Demak
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.352.093.900		1.340.000.000		1.340.000.000		1.340.000.000		1.340.000.000	Kecamatan Demak
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan pada Kecamatan Demak	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif pada Kecamatan Demak (Dengan Satuan:%)	100	100	100			100		100		100			Kecamatan Demak
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					409.800.000		289.800.000		289.800.000		489.800.000		289.800.000	Kecamatan Demak

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya keamanan wilayah	Cakupan keamanan wilayah Kecamatan Demak (Dengan Satuan:%)	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Demak
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					310.600.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000		310.000.000	Kecamatan Demak
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kecamatan Demak (Dengan Satuan:%)	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Demak
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					1.436.387.300		1.416.120.000		1.416.120.000		1.416.120.000		1.416.120.000	Kecamatan Demak
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa yang tertib administrasi pada Kecamatan Demak (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Demak
	KECAMATAN BONANG				2.907.463.622		2.928.146.946		2.949.037.103		3.020.136.162		2.991.446.211		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.465.463.622		2.486.146.946		2.505.037.103		2.476.136.162		2.547.446.211	Kecamatan Bonang
	Meningkatnya Kepuasan Layanan Kecamatan Bonang	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bonang (Dengan Satuan:Angka)	91,39	92	92,17		92,21		92,34		92,42		92,56		Kecamatan Bonang
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					81.000.000		81.000.000		81.000.000		81.000.000		81.000.000	Kecamatan Bonang
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik pada Kecamatan Bonang (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Bonang
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					100.000.000		100.000.000		102.000.000		102.000.000		102.000.000	Kecamatan Bonang
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif Kecamatan Bonang (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Bonang
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					125.000.000		125.000.000		125.000.000		225.000.000		125.000.000	Kecamatan Bonang
	Meningkatnya keamanan wilayah	Cakupan keamanan wilayah Kecamatan Bonang (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Bonang
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					61.000.000		61.000.000		61.000.000		61.000.000		61.000.000	Kecamatan Bonang
	Meningkatnya Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kecamatan Bonang (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Bonang
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	Kecamatan Bonang

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa yang tertib administrasi pada Kecamatan Bonang (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Bonang
	KECAMATAN WEDUNG				3.076.025.338		3.098.800.404		3.121.803.221		3.195.036.066		3.168.501.239		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.780.811.338		2.560.800.404		2.580.803.221		2.601.036.066		2.621.501.239	Kecamatan Wedung
	Meningkatnya Kepuasan layanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Wedung. (Dengan Satuan:Angka)	88.60	88.60	88.61		88.63		88.66		88.70		88.72		Kecamatan Wedung
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					73.840.000		147.000.000		149.000.000		101.000.000		153.000.000	Kecamatan Wedung
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik Kecamatan Wedung . (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Wedung
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					45.000.000		126.000.000		127.000.000		128.000.000		129.000.000	Kecamatan Wedung
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif di kecamatan wedung (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Wedung
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					103.000.000		125.000.000		125.000.000		225.000.000		125.000.000	Kecamatan Wedung
	Meningkatnya keamanan wilayah	Cakupan keamanan wilayah Kecamatan Wedung (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Wedung
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					20.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Kecamatan Wedung
	Menigkatanya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kecamatan Wedung (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Wedung
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					53.374.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Kecamatan Wedung
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Wedung (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Wedung
	KECAMATAN KEBONAGUNG				2.643.353.453		2.661.801.800		2.680.434.631		2.749.253.790		2.718.261.140		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.296.733.953		2.221.801.800		2.212.934.631		2.159.253.790		2.238.261.140	Kecamatan Kebonagung

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kepuasan layanan Kecamatan Kebonagung	IKM Kecamatan Kebonagung (Dengan Satuan:Angka)	84,36	84.60	84,80		85,00		85,20		85,40		85,50		Kecamatan Kebonagung
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					68.285.000		85.000.000		85.000.000		190.000.000		80.000.000	Kecamatan Kebonagung
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik di Kecamatan Kebonagung (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Kebonagung
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					59.221.500		65.000.000		75.000.000		80.000.000		70.000.000	Kecamatan Kebonagung
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif di Kecamatan Kebonagung (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Kebonagung
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					104.956.500		125.000.000		130.000.000		130.000.000		135.000.000	Kecamatan Kebonagung
	Meningkatnya keamanan wilayah	Cakupan keamanan wilayah di Kecamatan Kebonagung (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Kebonagung
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					49.835.500		50.000.000		52.500.000		60.000.000		60.000.000	Kecamatan Kebonagung
	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Kebonagung (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Kebonagung
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					64.321.000		115.000.000		125.000.000		130.000.000		135.000.000	Kecamatan Kebonagung
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa yang tertib administrasi di Kecamatan Kebonagung (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Kebonagung
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				14.964.743.151		15.004.278.550		38.744.209.304		54.284.539.364		15.025.272.726		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				14.964.743.151		15.004.278.550		38.744.209.304		54.284.539.364		15.025.272.726		
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				14.964.743.151		15.004.278.550		38.744.209.304		54.284.539.364		15.025.272.726		
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.336.371.351		4.488.295.550		4.534.610.304		4.545.788.364		4.552.833.726	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Meningkatnya kepuasan layanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Angka)	92,29	93,30	93,33		93,36		93,39		93,41		93,44		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					2.130.000.000		1.760.000.000		1.713.616.000		2.025.000.000		1.875.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2026		2027		2028		2029		2030		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan (Dengan Satuan:%)	73	74	75		76,5		77,5		78		80		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					3.506.472.000		3.675.233.000		27.375.233.000		42.603.001.000		3.676.472.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Meningkatnya kesadaran berpolitik yang baik	Rasio masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik (Dengan Satuan:%)	73	74	74,42		74,56		74,72		74,84		74,98		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					2.778.750.000		2.588.750.000		2.588.750.000		2.588.750.000		2.593.967.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Meningkatnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persesntase Organisai masyarakat yang aktif (Dengan Satuan:%)	71	71,3	71,5		72		72,5		73		73,5		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					515.000.000		745.000.000		765.000.000		765.000.000		550.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Meningkatnya Pembinaan tentang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase masyarakat yang telah mendapatkan pembinaan tentang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (Dengan Satuan:%)	70	71	72		73		74		75		76		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					1.698.149.800		1.747.000.000		1.767.000.000		1.757.000.000		1.777.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Meningkatnya kewaspadaan terhadap konflik sosial	Persentase potensi konflik sosial yang teridentifikasi (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
			TOTAL:	2.659.687.247.722	2.662.494.556.376		2.681.339.753.264		2.696.848.163.268		2.715.036.521.907				

METADATA INDIKATOR KINERJA RPJMD

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka menengah daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah yang telah dirumuskan. Berikut ini penetapan Indikator Kinerja Utama pada pembangunan Kabupaten Demak tahun 2025-2029.

1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia
Satuan	Angka
Definisi Operasional	IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
Formulasi Perhitungan	$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$
Intepretasi	Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

1.2 Indeks Reformasi Birokrasi

Nama Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi.								
Satuan	Angka								
Definisi Operasional	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah , baik pusat maupun daerah. IRB disusun oleh Kementerian PANRB sebagai bagian dari evaluasi tahunan terhadap kualitas tata kelola pemerintahan.								
Formulasi Perhitungan	Mulai tahun 2023, IRB mengacu pada PermenPANRB No. 3 Tahun 2023, yang menyederhanakan penilaian ke dalam 3 area utama: <table><tr><td>Area Penilaian</td><td>Substansi yang Dinilai</td></tr><tr><td>Kontekstualisasi</td><td>Komitmen pimpinan, kebijakan reformasi birokrasi, dan kondisi spesifik instansi</td></tr><tr><td>Pelaksanaan RB</td><td>Perubahan pada 8 area perubahan (Organisasi, SDM, Ketatalaksanaan, Akuntabilitas, dll.)</td></tr><tr><td>Hasil RB</td><td>Dampak terhadap peningkatan layanan, efisiensi birokrasi, dan persepsi publik</td></tr></table>	Area Penilaian	Substansi yang Dinilai	Kontekstualisasi	Komitmen pimpinan, kebijakan reformasi birokrasi, dan kondisi spesifik instansi	Pelaksanaan RB	Perubahan pada 8 area perubahan (Organisasi, SDM, Ketatalaksanaan, Akuntabilitas, dll.)	Hasil RB	Dampak terhadap peningkatan layanan, efisiensi birokrasi, dan persepsi publik
Area Penilaian	Substansi yang Dinilai								
Kontekstualisasi	Komitmen pimpinan, kebijakan reformasi birokrasi, dan kondisi spesifik instansi								
Pelaksanaan RB	Perubahan pada 8 area perubahan (Organisasi, SDM, Ketatalaksanaan, Akuntabilitas, dll.)								
Hasil RB	Dampak terhadap peningkatan layanan, efisiensi birokrasi, dan persepsi publik								
Interpretasi	Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Kategori dalam pencapaian reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:								

1.3 Indeks Integritas Nasional

Nama Indikator	Indeks Integritas Nasional
Satuan	Angka
Definisi Operasional	Indeks Integritas Nasional merupakan pemetaan risiko korupsi dan capaian upaya pencegahan korupsi yang dilakukan seluruh K/L/PD. Berdasarkan hasil ukuran tersebut menjadi dasar untuk menyusun perbaikan sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi.
Formulasi Perhitungan	Perhitungan Indeks Integritas dilakukan dengan menggabungkan penilaian dari tiga sudut pandang, yaitu penilaian internal, penilaian eksternal, dan penilaian eksper/ahli. 1. Penilaian internal dihitung berdasarkan penilaian pegawai pada masing-masing lokus survei terkait integritas unit kerja dan/atau organisasi. formula: $(0,1707 X1 + 0,1619 X2 + 0,1288 X3 + 0,1396 X4 + 0,1184 X5 + 0,1602 X6 + 0,1204 X7)$ 2. Penilaian eksternal berasal penilaian para pengguna layanan publik di lokus survei. formula: $0,0817 X1 + 0,0814 X2 + 0,0832 X3 + 0,0845 X4 + 0,0763 X5 + 0,0863 X6 + 0,0881 X7 + 0,0859 X8 + 0,0872 X9 + 0,0804 X10 + 0,0888 X11 + 0,0762 X12$ 3. Penilaian eksper/ahli dihitung berdasarkan penilaian beberapa narasumber atau eksper/ahli yang dianggap memiliki pengetahuan komprehensif terkait masalah integritas dan korupsi pada K/L/PD tertentu formula: $0,3285 X1 + 3115 X2 + 3599 X3$ Formula penghitungan indeks integritas nasional $0,305 X1 + 0,328 X2 + 0,367 X3 - 0,20 (0,58X4 + 0,42X5)$ dimana: X1 Indeks Penilaian Internal X2 Indeks Penilaian Eksternal X3 Indeks Penilaian Eksper X4 Prevalensi Korupsi X5 Integritas Pelaksanaan SPI
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Indeks Integritas Nasional maka capaian upaya pencegahan korupsi semakin baik dan risiko korupsi semakin kecil. Begitu pula sebaliknya
Sumber Data	Survei Penilaian Integritas KPK RI
Frekuensi	Tahunan

1.4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten

Nama Indikator	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
Satuan	%
Definisi Operasional	Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Pertumbuhan Ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu
Formulasi Perhitungan	$Pertumbuhan\ Ekonomi = \frac{PDRB\ ADHK_t + PDRB\ ADHK_{t-1}}{PDRB\ ADHK_{t-1}} \times 100\%$ PDRB ADHK= PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1. t = periode
Interpretasi	Pertumbuhan Ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

1.5 Indeks Layanan Infrastruktur Daerah

Nama Indikator	Indeks Layanan Infrastruktur Daerah
Satuan	indeks
Definisi Operasional	Indeks Layanan Infrastruktur Daerah adalah nilai rata-rata capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan dan kawasan permukiman, serta urusan perhubungan dalam satu periode penilaian. Indeks ini dihitung dari rata-rata persentase dan nilai indeks pada sepuluh indikator layanan infrastruktur dasar yang menggambarkan kondisi, cakupan, dan kualitas infrastruktur kewenangan kabupaten
Formulasi Perhitungan	Rata-rata capaian kinerja 3 Perangkat Daerah : - Rata-Rata capaian Infrastruktur Dinputaru : - Persentase jalan dalam kondisi baik - Persentase jalan dalam kondisi mantap - Indeks kinerja sistem irigasi kewenangan kabupaten - Luas wilayah banjir yang tertangani - Persentase drainase dalam kondisi baik - Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman - Persentase rumah tangga yang terlayani akses air minum - Rata-Rata capaian Infrastruktur Dinhub : - Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan - Rata-Rata capaian Infrastruktur Dinperkim : - Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha - Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah
Interpretasi	Semakin tinggi angkanya, semakin tinggi kepuasan Masyarakat terhadap layanan infrastuktur

Sumber Data	Penilaian Mandiri
Frekuensi	Tahunan

1.6 Rasio Gini

Nama Indikator	Rasio Gini
Satuan	angka
Definisi Operasional	Rasio Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk
Formulasi Perhitungan	$GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_{i-1}]$ Ket : f_i = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i. Y_i = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i.
Intepretasi	suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai Koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai Koefisien Gininya makin mendekati satu
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

1.7 Indeks Harmoni Indonesia

Nama Indikator	Indeks Harmoni Indonesia												
Satuan	Angka												
Definisi Operasional	Indeks Harmoni Indonesia secara umum merujuk pada ukuran yang menilai tingkat kerukunan, toleransi, dan kohesi sosial dalam suatu komunitas atau wilaya.												
Formulasi Perhitungan	Mengukur indeks dengan aspek sebagai berikut: <table><tr><th>Aspek</th><th>Contoh Indikator</th></tr><tr><td>Kerukunan antar komunitas</td><td>Jumlah konflik sosial</td></tr><tr><td>Keamanan sosial</td><td>Persepsi rasa aman di lingkungan</td></tr><tr><td>Toleransi budaya dan etnis</td><td>Partisipasi dalam kegiatan lintas budaya</td></tr><tr><td>Keharmonisan keluarga</td><td>Angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga</td></tr><tr><td>Partisipasi sosial</td><td>Kegiatan gotong royong, organisasi kemasyarakatan aktif</td></tr></table>	Aspek	Contoh Indikator	Kerukunan antar komunitas	Jumlah konflik sosial	Keamanan sosial	Persepsi rasa aman di lingkungan	Toleransi budaya dan etnis	Partisipasi dalam kegiatan lintas budaya	Keharmonisan keluarga	Angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga	Partisipasi sosial	Kegiatan gotong royong, organisasi kemasyarakatan aktif
Aspek	Contoh Indikator												
Kerukunan antar komunitas	Jumlah konflik sosial												
Keamanan sosial	Persepsi rasa aman di lingkungan												
Toleransi budaya dan etnis	Partisipasi dalam kegiatan lintas budaya												
Keharmonisan keluarga	Angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga												
Partisipasi sosial	Kegiatan gotong royong, organisasi kemasyarakatan aktif												
Intepretasi	Semakin tinggi nilai Indeks Harmoni suatu daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan kerukunan masyarakatnya												
Sumber Data	BPS												
Frekuensi	Tahunan												

1.8 Penurunan Emisi GRK Kumulatif

Nama Indikator	Penurunan Emisi GRK Kumulatif
Satuan	TonCO ₂ eq
Definisi Operasional	Penurunan emisi GRK dihitung dari kegiatan yang secara langsung menurunkan emisi gas rumah kaca pada empat sektor/sub sektor prioritas yaitu energi, AFOLU (<i>Agriculture Forest and Other Land Use</i>), limbah, dan IPPU (<i>Industrial Processes and Production Use</i>).
Formulasi Perhitungan	Data diolah dari nilai rekapitulasi dari pelaporan aksi PRK yang telah "Disetujui" atau "Difinalisasi" di titik tahun tertentu. Penurunan ini merupakan penurunan kumulatif.
Interpretasi	Capaian penurunan emisi GRK Kabupaten/Kota didapat dari implementasi dan pelaporan aksi penurunan emisi GRK oleh K/L dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) pada Aplikasi Perencanaan Pemantauan Aksi Rendah Karbon Nasional (AKSARA)
Sumber Data	Aplikasi AKSARA BAPPENAS
Frekuensi	Tahunan

1.9 Harapan Lama Sekolah (HLS)

Nama Indikator	Harapan Lama Sekolah
Satuan	tahun
Definisi	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.
Rumus Perhitungan	$Harapan\ Lama\ Sekolah = FK \sum_{i=7}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan: FK = Faktor koreksi E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang berkolah pada tahun t P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (7, 8, ..., n)
Interpretasi	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal: HLS Indonesia pada tahun 2022 sebesar 13,10 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau setara dengan Diploma I.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

1.10 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Nama Indikator	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun
Satuan	Tahun
Definisi	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang

	dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut: - Tidak punya ijazah = 0 tahun; - SD = 6 tahun; - SMP = 9 tahun; - SMA = 12 tahun; - D1/D2 = 14 tahun; - D3 = 15 tahun; - D4 = 16 tahun; - S1 = 17 tahun; - S2 = 19 tahun; - S3 = 22 tahun. Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini: a. Tidak pernah sekolah = 0 tahun; - Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1; - Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1; - Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir; Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1
Rumus Perhitungan	Rata – rata Lama Sekolah 15+ $= \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$ Keterangan: P_{15+} = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke- i
Interpretasi	Misal: RLS 15+ Indonesia tahun 2022 = 9,08 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,08 tahun atau telah menamatkan kelas IX.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

1.11 Usia Harapan Hidup (UHH)

Nama Indikator	Usia Harapan Hidup (UHH)
Satuan	Tahun
Definisi	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu

Rumus Perhitungan	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (<i>Age Specific Death Rate/ASDR</i>) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program <i>Micro Computer Program for Demographic Analysis</i> (MCPDA) atau Mortpack
Interpretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

1.12 Nilai Kinerja Kebudayaan

Nama Indikator	Nilai Kinerja Kebudayaan
Satuan	Persentase
Definisi Operasional	Nilai kinerja kebudayaan merupakan penilaian kinerja kebudayaan dari budaya benda dan budaya tak benda serta kesenian
Formulasi Perhitungan	Rata-rata capaian Indikator: - Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan - Persentase Cagar budaya (CB) dan Warisan Budaya tak Benda (WBTB) dilestarikan
Interpretasi	Semakin tinggi nilai menandakan bahwa sejauh mana aspek-aspek kebudayaan berkontribusi terhadap pembangunan
Sumber Data	Penilaian Mandiri
Frekuensi	Tahunan

1.13 Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Nama Indikator	Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Satuan	level
Definisi Operasional	Level maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) merujuk pada tingkat kematangan implementasi pengendalian intern di instansi pemerintah, sebagaimana diatur oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Maturitas SPIP dinilai berdasarkan sejauh mana instansi mengintegrasikan sistem pengendalian intern dalam seluruh proses manajemen dan operasional.
Formulasi Perhitungan	Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari lima bagian sesuai dengan unsur Sistem Pengendalian Intern: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Masing-masing bagian berisi suatu daftar faktor utama yang harus dipertimbangkan saat mengevaluasi Sistem Pengendalian Intern terkait dengan masing-masing unsurnya

Interpretasi	Level	Nama Level	Penjelasan
	Level 1	Belum Berkembangkan (Inisial)	Sistem pengendalian intern belum dilaksanakan secara memadai. Kegiatan belum terdokumentasi dengan baik. Risiko belum diidentifikasi dan tidak ada pengendalian yang sistematis.
	Level 2	Berkembang (Repeatable)	Instansi mulai melaksanakan pengendalian intern dasar. Ada beberapa dokumentasi, namun belum konsisten atau belum terstandarisasi. Risiko mulai dikenali, tetapi belum ada analisis formal.
	Level 3	Terdefinisi (Defined)	Sistem pengendalian intern telah ditetapkan dan dilaksanakan secara terstruktur. Proses identifikasi dan manajemen risiko mulai dijalankan. Prosedur terdokumentasi dan mulai terintegrasi.
	Level 4	Terkelola dan Terukur (Managed and Measurable)	Sistem pengendalian intern telah menjadi bagian dari manajemen organisasi. Pengendalian dan manajemen risiko dilakukan secara proaktif dan berbasis data. Sudah ada pengukuran kinerja pengendalian.
	Level 5	Optimal (Optimized)	SPIP telah terintegrasi sepenuhnya dalam budaya organisasi. Inovasi dan peningkatan berkelanjutan diterapkan. Organisasi memiliki kemampuan adaptasi tinggi terhadap risiko dan perubahan.
Sumber Data	BPKP		
Frekuensi	Tahunan		

1.14 Indeks Kepuasan Masyarakat	
Nama Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat
Satuan	Angka
Definisi Operasional	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. IKM menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pelayanan publik dan mendorong reformasi birokrasi yang berorientasi pada kepuasan pengguna layanan
Formulasi Perhitungan	Komponen IKM (Berdasarkan PermenPANRB No. 14 Tahun 2017) 1. Pengukuran Semesteran Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut: $\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$ N = bobot nilai per unsur Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur $\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$ Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut: $\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: $\text{SKM Unit pelayanan} \times 25$

	Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk: a. Menambah unsur yang dianggap relevan; b. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1. 2. Pengukuran Tahunan Merupakan rata-rata nilai dari semester 1 dan 2, dengan rumus sebagai berikut: $\frac{\text{Nilai semester 1} + \text{Nilai Semester 2}}{2}$ Unsur pelayanan terdiri dari: 1 Persyaratan layanan 2 Prosedur layanan 3 Waktu pelayanan 4 Biaya/tarif pelayanan 5 Produk spesifikasi jenis layanan 6 Kompetensi pelaksana layanan 7 Perilaku pelaksana layanan 8 Penanganan pengaduan 9 Sarana dan prasarana pelayanan															
Interpretasi	<table><tr><th>Rentang Nilai</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja</th></tr><tr><td>88,31 – 100,00</td><td>A (Sangat Baik)</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>76,61 – 88,30</td><td>B (Baik)</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>65,00 – 76,60</td><td>C (Kurang Baik)</td><td>Cukup Memuaskan</td></tr><tr><td>< 65,00</td><td>D (Tidak Baik)</td><td>Tidak Memuaskan</td></tr></table>	Rentang Nilai	Mutu Pelayanan	Kinerja	88,31 – 100,00	A (Sangat Baik)	Sangat Memuaskan	76,61 – 88,30	B (Baik)	Memuaskan	65,00 – 76,60	C (Kurang Baik)	Cukup Memuaskan	< 65,00	D (Tidak Baik)	Tidak Memuaskan
Rentang Nilai	Mutu Pelayanan	Kinerja														
88,31 – 100,00	A (Sangat Baik)	Sangat Memuaskan														
76,61 – 88,30	B (Baik)	Memuaskan														
65,00 – 76,60	C (Kurang Baik)	Cukup Memuaskan														
< 65,00	D (Tidak Baik)	Tidak Memuaskan														
Sumber Data	Penilaian Mandiri															
Frekuensi	Tahunan															

1.15 Indeks Pelayanan Publik	
Nama Indikator	Indeks Pelayanan Publik.
Satuan	Angka
Definisi	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.
Rumus Perhitungan	Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. Penentuan nilai indeks dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: Menentukan Nilai untuk Setiap Indikator Setiap pertanyaan dalam kuesioner memiliki bobot yang

	disesuaikan dengan bobot per aspek. Nilai per indikator merupakan nilai pada formulir F-02 atau F-03 dikali dengan bobot indikator. Nilai per indikator F02: Nilai F02 x bobot per indikator Nilai per indikator F03: Nilai F03 x bobot per indikator b. Menentukan Nilai Setiap Aspek Nilai indeks tidak hanya bertujuan memberikan hasil akhir nilai saja, tetapi juga dapat dijadikan dasar perbaikan pelayanan, dengan melihat aspek-aspek yang membutuhkan perbaikan. Nilai aspek diperoleh dengan menjumlahkan nilai per indikator dalam satu aspek. Nilai per aspek: $\sum$ nilai per indikator c. Menentukan Nilai Indeks Formulir Setelah nilai indikator dan nilai aspek diketahui, maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai indeks dari masing-masing formulir dengan rumus sebagai berikut: Nilai Indeks Formulir: $\sum (Nilai\ per\ aspek_n \times bobot\ aspek_n)$ d. Menentukan Nilai Indeks Pelayanan Publik Selanjutnya untuk melakukan perhitungan nilai indeks pelayanan publik dari F02 dan F03 digunakan rumus sebagai berikut: Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks Formulir- 02+25% Nilai Indeks Formulir-03.																														
Interpretasi	Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 1. Keadilan (<i>Fairness</i>); 2. Partisipasi (<i>Participation</i>) 3. Akuntabilitas (<i>Accountability</i>) 4. Transparansi (<i>Transparency</i>) 5. Berdayaguna (<i>Useful</i>) 6. Aksesibilitas (<i>Assessibility</i>) Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi: <table><tr><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Makna</th></tr><tr><td>0 – 1,00</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr><tr><td>1,01 – 1,50</td><td>E</td><td>Sangat Buruk</td></tr><tr><td>1,51 – 2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>2,01 – 2,50</td><td>C-</td><td>Cukup (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>2,51 – 3,00</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>3,01 – 3,50</td><td>B-</td><td>Baik (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>3,51 – 4,00</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4,01 – 4,50</td><td>A-</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>4,51 – 5,00</td><td>A</td><td>Pelayanan Prima</td></tr></table>	Range Nilai	Kategori	Makna	0 – 1,00	F	Gagal	1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk	1,51 – 2,00	D	Buruk	2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)	2,51 – 3,00	C	Cukup	3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)	3,51 – 4,00	B	Baik	4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik	4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima
Range Nilai	Kategori	Makna																													
0 – 1,00	F	Gagal																													
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk																													
1,51 – 2,00	D	Buruk																													
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)																													
2,51 – 3,00	C	Cukup																													
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)																													
3,51 – 4,00	B	Baik																													
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik																													
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima																													
Sumber Data	- LKE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. - Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2023																														
Frekuensi	Tahunan																														

1.16 Nilai SAKIP

Nama Indikator	Nilai SAKIP																								
Satuan	Indeks (angka)																								
Definisi	Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah merupakan proses evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah daerah menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja dalam pengelolaan pemerintahan.																								
Rumus Perhitungan	Penilaian SAKIP meliputi beberapa komponen utama, antara lain: - Perencanaan Kinerja: Evaluasi terhadap dokumen perencanaan strategis dan rend pemerintah daerah. - Pengukuran Kinerja: Penilaian terhadap indikator kinerja utama (IKU) dan sistem yang digunakan. KKP +2 - Pelaporan Kinerja: Evaluasi terhadap laporan kinerja instansi pemerintah daerah, Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). - Evaluasi Internal: Penilaian terhadap mekanisme evaluasi internal yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja.																								
Interpretasi	Hasil penilaian SAKIP diberikan dalam bentuk skor dan predikat sebagai berikut: <table><tr><th>Skor</th><th>Predikat</th><th>Interpretasi</th></tr><tr><td>90–100</td><td>AA (Sangat Memuaskan)</td><td>Kinerja sangat baik, efisiensi tinggi, dan sistem manajemen kinerja andal.</td></tr><tr><td>80–89,99</td><td>A (Memuaskan)</td><td>Kinerja baik dengan sistem manajemen kinerja yang efektif.</td></tr><tr><td>70–79,99</td><td>BB (Sangat Baik)</td><td>Kinerja cukup baik dengan beberapa area perlu perbaikan.</td></tr><tr><td>60–69,99</td><td>B (Baik)</td><td>Kinerja memadai namun masih banyak area yang perlu ditingkatkan.</td></tr><tr><td>50–59,99</td><td>CC (Cukup)</td><td>Kinerja kurang memadai, perlu perbaikan signifikan.</td></tr><tr><td>30–49,99</td><td>C (Kurang)</td><td>Kinerja rendah, banyak aspek yang perlu dibenahi.</td></tr><tr><td>0–29,99</td><td>D (Sangat Kurang)</td><td>Kinerja sangat rendah, sistem manajemen kinerja tidak berjalan.</td></tr></table>	Skor	Predikat	Interpretasi	90–100	AA (Sangat Memuaskan)	Kinerja sangat baik, efisiensi tinggi, dan sistem manajemen kinerja andal.	80–89,99	A (Memuaskan)	Kinerja baik dengan sistem manajemen kinerja yang efektif.	70–79,99	BB (Sangat Baik)	Kinerja cukup baik dengan beberapa area perlu perbaikan.	60–69,99	B (Baik)	Kinerja memadai namun masih banyak area yang perlu ditingkatkan.	50–59,99	CC (Cukup)	Kinerja kurang memadai, perlu perbaikan signifikan.	30–49,99	C (Kurang)	Kinerja rendah, banyak aspek yang perlu dibenahi.	0–29,99	D (Sangat Kurang)	Kinerja sangat rendah, sistem manajemen kinerja tidak berjalan.
Skor	Predikat	Interpretasi																							
90–100	AA (Sangat Memuaskan)	Kinerja sangat baik, efisiensi tinggi, dan sistem manajemen kinerja andal.																							
80–89,99	A (Memuaskan)	Kinerja baik dengan sistem manajemen kinerja yang efektif.																							
70–79,99	BB (Sangat Baik)	Kinerja cukup baik dengan beberapa area perlu perbaikan.																							
60–69,99	B (Baik)	Kinerja memadai namun masih banyak area yang perlu ditingkatkan.																							
50–59,99	CC (Cukup)	Kinerja kurang memadai, perlu perbaikan signifikan.																							
30–49,99	C (Kurang)	Kinerja rendah, banyak aspek yang perlu dibenahi.																							
0–29,99	D (Sangat Kurang)	Kinerja sangat rendah, sistem manajemen kinerja tidak berjalan.																							
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.																								
Frekuensi	Tahunan																								

1.17 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Nama Indikator	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
Satuan	Indeks
Definisi Operasional	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah instrumen pengukuran kinerja tata kelola keuangan pemerintah daerah , yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menilai sejauh

	mana pemerintah daerah mengelola keuangan secara efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil .	
Formulasi Perhitungan	Dimensi	Penjelasan Singkat
	1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	Menilai konsistensi antara RKPD, KUA-PPAS, dan APBD.
	2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	Mengukur prioritas belanja pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi.
	3. Transparansi keuangan daerah	Melihat sejauh mana dokumen anggaran dan realisasi dipublikasikan dan dapat diakses publik.
	4. Penyerapan anggaran dan realisasi keuangan	Mengukur efektivitas pelaksanaan anggaran.
	5. Kondisi keuangan daerah	Rasio kemandirian fiskal, PAD, belanja pegawai, dan rasio utang.
	6. Opini BPK atas laporan keuangan daerah	Kualitas LKPD berdasarkan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Interpretasi	Nilai IPKD	Kategori Kinerja
	80–100	Sangat Baik
	66–79	Baik
	51–65	Cukup
	35–50	Kurang
	< 35	Sangat Kurang
Sumber Data	Penilaian Mandiri	
Frekuensi	Tahunan	

1.18 Indeks Sistem Merit

Nama Indikator	Indeks Sistem Merit																				
Satuan	indeks																				
Definisi Operasional	Indeks Sistem Merit adalah alat ukur yang digunakan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah (pusat dan daerah) menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara) secara objektif, adil, dan berdasarkan kompetensi																				
Formulasi Perhitungan	<table><tr><td>No</td><td>Aspek Penilaian</td></tr><tr><td>1</td><td>Perencanaan kebutuhan ASN</td></tr><tr><td>2</td><td>Pengadaan ASN</td></tr><tr><td>3</td><td>Pengembangan karier</td></tr><tr><td>4</td><td>Promosi dan mutasi</td></tr><tr><td>5</td><td>Manajemen kinerja</td></tr><tr><td>6</td><td>Penggajian, penghargaan, dan disiplin</td></tr><tr><td>7</td><td>Perlindungan dan pelayanan hukum</td></tr><tr><td>8</td><td>Sistem informasi ASN</td></tr></table> Setiap aspek memiliki indikator yang dinilai dengan bobot tertentu			No	Aspek Penilaian	1	Perencanaan kebutuhan ASN	2	Pengadaan ASN	3	Pengembangan karier	4	Promosi dan mutasi	5	Manajemen kinerja	6	Penggajian, penghargaan, dan disiplin	7	Perlindungan dan pelayanan hukum	8	Sistem informasi ASN
No	Aspek Penilaian																				
1	Perencanaan kebutuhan ASN																				
2	Pengadaan ASN																				
3	Pengembangan karier																				
4	Promosi dan mutasi																				
5	Manajemen kinerja																				
6	Penggajian, penghargaan, dan disiplin																				
7	Perlindungan dan pelayanan hukum																				
8	Sistem informasi ASN																				

Interpretasi	Nilai	Kategori
	80–100	Baik (Tinggi)
	51–79	Cukup (Sedang)
	≤ 50	Kurang (Rendah)
Sumber Data	LKE KemenpanRB	
Frekuensi	Tahunan	

1.19 Pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah (Pertanian, Industri, Perdagangan, Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum)

Nama Indikator	Pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah (Pertanian, Industri, Perdagangan, Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum)
Satuan	%
Definisi Operasional	Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Pertanian, Industri, Perdagangan, Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum, yang mencerminkan nilai tambah sektor Pertanian, Industri, Perdagangan, Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum terhadap PDRB
Formulasi Perhitungan	$\frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor Pertanian, Industri, Perdagangan, Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum yang ada dalam PDRB, semakin tinggi nilai ekonominya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

1.20 Pertumbuhan PMTB

Nama Indikator	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)
Satuan	%
Definisi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB Kab/Kota

Rumus Perhitungan	$\frac{PMTB}{PDRB\ ADHK} \times 100\%$ Keterangan: PMTB = Total Pembentukan Modal Tetap Bruto berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) PDRB ADHK = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Interpretasi	PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (<i>financial leasing</i>), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (<i>financial leasing</i>). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Triwulanan dan Tahunan

1.21 PDRB per kapita

Nama Indikator	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten
Satuan	Juta Rupiah
Definisi Operasional	PDRB Perkapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
Formulasi Perhitungan	PDRB Per Kapita = PDRB ADHB /populasi PDRB ADHB = PDRB Atas Dasar harga Berlaku Populasi = Jumlah Penduduk Regional t = periode
Interpretasi	Semakin tinggi PDRB per kapita menunjukkan tingkat produktivitas dan kesejahteraan masyarakat
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

1.22 Indeks Kinerja Infrastruktur Daerah

Nama Indikator	Indeks Kinerja Infrastruktur Daerah
Satuan	indeks
Definisi Operasional	Indeks Kinerja Infrastruktur adalah suatu ukuran komposit yang digunakan untuk menilai cakupan, kualitas, aksesibilitas, dan keberlanjutan layanan infrastruktur dasar di suatu wilayah. Indeks ini sering dikembangkan dalam konteks pemantauan pembangunan berkelanjutan, perencanaan wilayah, atau evaluasi kinerja layanan publik oleh pemerintah
Formulasi	capaian program :

Perhitungan	1. Program Pengelolaan SDA 2. Program SPAM 3. Program SPAL 4. Program Drainase 5. Program Bangunan Gedung 6. Program Pengembangan Jasa Konstruksi 7. Program Penyelenggaraan Jalan
Interpretasi	Semakin tinggi kinerja infrastruktur semakin optimal pembangunan infrastruktur
Sumber Data	Penilaian mandiri
Frekuensi	Tahunan

1.23 Tingkat Kemiskinan

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan
Satuan	%
Definisi Operasional	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhandasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapitaper bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)
Formulasi Perhitungan	Banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia (Sesuaiperhitungan BPS)
Intepretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

1.24 Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)
Satuan	Angka
Definisi Operasional	IBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia
Formulasi Perhitungan	Penghitungan IBangga menggunakan pendekatan tiga dimensi yang dibentuk dari 17 variabel. Langkah langkah penghitungan IBangga: 1. menghitung nilai agregasi masing masing variabel di level provinsi dan kabupaten/kota; 2. menghitung skor disetiap dimensi; 3. menghitung IBangga
Interpretasi	Nilai IBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: 1. IBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40; 2. IBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40–70; 3. IBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70
Sumber Data	BKKBN

Frekuensi	Tahunan

1.25 Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan

Nama Indikator	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan
Satuan	%
Definisi Operasional	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) yang Dapat Diselesaikan adalah indikator kinerja yang menggambarkan efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atau perangkat daerah terkait dalam menangani dan menyelesaikan laporan atau kejadian gangguan trantibum di wilayahnya
Formulasi Perhitungan	$\text{Persentase Penyelesaian Gangguan Trantibum} = \left(\frac{\text{Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah gangguan trantibum yang terjadi}} \right) \times 100\%$
Interpretasi	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) yang Dapat Diselesaikan menggambarkan keamanan lingkungan. Semakin banyak gangguan yang diselesaikan, kedamaian lingkungan dapat tercapai
Sumber Data	Penilaian Mandiri oleh Satpol PP
Frekuensi	Tahunan

1.26 Angka Kejadian Konflik Sosial

Nama Indikator	Angka Kejadian Konflik Sosial
Satuan	Angka
Definisi Operasional	Angka Kejadian Konflik Sosial adalah indikator kuantitatif yang menunjukkan jumlah insiden konflik yang terjadi dalam suatu wilayah dalam periode waktu tertentu (biasanya per tahun). Konflik sosial yang dimaksud mencakup perselisihan antarindividu, antarkelompok, antarwarga, atau antara warga dan pemerintah, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal.
Formulasi Perhitungan	Angka Kejadian Konflik Sosial=Jumlah kasus konflik sosial yang tercatat dalam satu tahun
Interpretasi	Semakin rendah angka kejadian, dapat mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mencegah dan meredam konflik
Sumber Data	Penilaian Mandiri
Frekuensi	Tahunan

1.27 Indeks Desa

Nama Indikator	Indeks Desa
Satuan	Indeks
Definisi Operasional	Indeks Desa adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai tingkat perkembangan atau kemajuan suatu desa berdasarkan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Di Indonesia, Indeks Desa umumnya merujuk pada Indeks Desa Membangun (IDM) yang

	dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).	
Formulasi Perhitungan	Komponen	Keterangan
	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	Mengukur kualitas pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, modal sosial, dan permukiman.
	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	Mengukur akses masyarakat terhadap kegiatan ekonomi, ketersediaan sarana prasarana ekonomi, serta diversifikasi mata pencaharian.
	Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL)	Mengukur kondisi dan pengelolaan lingkungan, rawan bencana, serta kualitas sanitasi dan air bersih.
Interpretasi	Nilai IDM	Kategori Desa
	0,00 – 0,49	Desa Tertinggal
	0,50 – 0,59	Desa Berkembang
	0,60 – 0,69	Desa Maju
	0,70 – 1,00	Desa Mandiri
Sumber Data	Kemendes PDTT	
Frekuensi	Tahunan	

1.28 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah		
Satuan	Angka		
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)).		
Rumus Perhitungan	Perhitungan IKLH Kabupaten/Kota yang tidak memiliki gambut adalah(PermenLHK No.27/2021): IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)		
Interpretasi	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
	Nomor	Kategori	Angka Rentang
	1	Sangat Baik	90 ≤ x ≤ 100
	2	Baik	70 ≤ x < 90
	3	Sedang	50 ≤ x < 70
	4	Kurang	25 ≤ x < 50
	5	Sangat Kurang	0 ≤ x < 25
Sumber Data	Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, tutupan lahan, tutupan ekosistem gambut, dan air laut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		

Frekuensi	Data pemantauan yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH adalah data pemantauan tahun berjalan dengan durasi pemantauan 1 tahun

1.29 Indeks Risiko Bencana

Nama Indikator	Indeks Risiko Bencana
Satuan	angka
Definisi	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.
Rumus Perhitungan	$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$ Keterangan Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (<i>magnitude</i>) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Kapasitas (<i>Capacity</i>) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana
Interpretasi	Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan. Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut: - Indeks <13 adalah Rendah - Indeks 13 - 144 adalah Sedang - Indeks >144 adalah Tinggi
Sumber Data	BNPB
Frekuensi	Tahunan

2. Indikator Kinerja Daerah

Kinerja pembangunan suatu daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Daerah. Penetapan Indikator Kinerja Daerah beserta targetnya dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Demak diuraikan dalam beberapa tabel sebagai berikut.

2.1 Indeks Ketahanan Pangan

Nama Indikator	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
Satuan	Angka
Definisi Operasional	Ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah
Formulasi Perhitungan	1. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan z-score dan distance to scale (0-100); 2. Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator; 3. Mengelompokkan wilayah ke dalam 6 kelompok berdasarkan <i>cut off point</i> IKP
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Indeks Ketahanan Pangan menggambarkan semakin baik kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah
Sumber Data	Badan Pangan Nasional (BAPANAS)

2.2 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Nama Indikator	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan
Satuan	%
Definisi Operasional	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah (on premises); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023

Formulasi Perhitungan	PASMPP= (JRTASMPP:JRT) x 100% PASMPP: Persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan. JRTASMPP: Jumlah RT dengan akses air siap minum JP PDAM (telah aman/diuji sesuai Permenkes pada SR/sample setiap JDB/JDL) JRT: Jumlah RT dengan akses air minum JP PDAM
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kinerja fasilitasi pemerintah daerah dalam penyediaan akses air minum perpipaan untuk rumah tangga di perkotaan yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah.
Sumber Data	1. Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga oleh Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan 2. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS PDAM

2.3 Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten

Nama Indikator	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Satuan	Angka
Definisi Operasional	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi mengamanatkan bahwa evaluasi kinerja sitem irigasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi kinerja sistem irigasi yang meliputi prasarana fisik, produktifitas tanaman, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi dan kondisi kelembagaan P3A. Penetapan kriteria penilaian kinerja sistem irigasi digambarkan dalam indeks sebagai berikut : Nilai indeks antara: 80 – 100 Kinerja Sangat Baik Nilai indeks antara : 70 – 79 Kinerja Baik Nilai indeks antara : 55 – 69 Kinerja Kurang dan Perlu Perhatian Nilai indeks antara : < 54 Kinerja Jelek dan Perlu Perhatian
Formulasi Perhitungan	Mengacu ePAKSI Ditjen SDA Kementerian PUPR, penetapan kriteria penilaian kinerja sistem irigasi maka ditetapkan bobot maksimal penilaian setiap Aspek dan Indikatornya sebagai berikut: 1. Aspek Kondisi Prasaran Fisik (bobot maksimal 45) 2. Aspek Produktifitas Tanam (bobot maksimal 15) 3. Aspek Sarana Penunjang (bobot maksimal 10) 4. Aspek Organisasi Personalia (bobot maksimal 15) 5. Aspek Dokumentasi (bobot maksimal 5) 6. Aspek Kondisi P3A yang mencakup indikator (bobot maksimal 10) Total nilai semua aspek maksimal 100
Interpretasi	Indikator ini mengukur kinerja irigasi guna mendukung ketahanan pangan
Sumber Data	ePAKSI Ditjen SDA Kemen PUPR

2.4 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Nama Indikator	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)
Satuan	%
Definisi Operasional	Estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, dimana konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat yang dinyatakan dalam bentuk persentase
Formulasi Perhitungan	Membandingkan antara konsumsi kalori per kapita dan MDER. Nilai PoU merupakan proporsi penduduk yang konsumsi kalornya di bawah MDER terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan $PoU = \int_{x < MDER}^1 f(x)dx$ Keterangan: PoU : Proporsi populasi yang mengalami ketidacukupan konsumsi pangan dibawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal. MDER : Kebutuhan minimum energi yang diukur dengan kkal (<i>Minumum Dietary Energy Requirement</i>) f(x) : Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu
Interpretasi	Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya
Sumber Data	BPS

2.5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
Satuan	angka
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air(IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)).
Rumus Perhitungan	Perhitungan IKLH Kabupaten/Kota yang tidak memiliki gambut adalah(PermenLHK No.27/2021): $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$

Interpretasi	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
	Nomor	Kategori	Angka Rentang
	1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
	2	Baik	$70 \leq x < 90$
	3	Sedang	$50 \leq x < 70$
	4	Kurang	$25 \leq x < 50$
	5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$
Sumber Data	Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, tutupan lahan, tutupan ekosistem gambut, dan air laut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah		
Frekuensi	Data pemantauan yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH adalah data pemantauan tahun berjalan dengan durasi pemantauan 1 tahun		

2.6 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Nama Indikator	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
Satuan	%
Definisi Operasional	Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)
Formulasi Perhitungan	PSA = ((JRTST+JRTIPLT) : JRSTS) x 100% PSA = Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman JRTST = Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T JRTIPLT = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) JRSTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat
Sumber Data	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS 2. Data Infrastruktur Kementerian PUPR



2.7 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Nama Indikator	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
Satuan	%
Definisi Operasional	Timbulan Sampah Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan: 1. Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, <i>vermi composting</i>, <i>biodigester</i>, dan sebagainya; 2. Daur ulang materi (<i>material recovery</i>) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memroses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan Pendaaur ulang rantai akhir. Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta. Catatan: Mengacu pada definisi global dari UN-Habitat, bahwa makna dari <i>waste recovery</i> sepadan dengan kegiatan pengolahan sampah. Pemulihan (<i>recovery</i>) itu sendiri merupakan setiap kegiatan yang secara prinsip utamanya adalah sampah memiliki fungsi untuk mengganti bahan material lain untuk memenuhi fungsi tertentu, dalam alur produksi atau ekonomi yang lebih luas. Kegiatan pengolahan sampah menjadi energi dan/atau bahan bakar lainnya tidak dihitung ke dalam indikator sampah terolah.

Formulasi Perhitungan	Langkah ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah Terdapat dua alternatif menghitung jumlah sampah terolah: Cara (1) $SO = ST - MFPA + RDP$ Keterangan: SO: Sampah terolah (ton/hari) ST: Sampah terkumpul (ton/hari) MFPA: Sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari) RPD: Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) Cara (2) $SO = MFPD + DPA - RPD$ Keterangan: SO: Sampah terolah (ton/hari) MFPD: Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan daur ulang sampah (ton/hari) DPA: Material daur ulang yang diambil dari fasilitas pemrosesan akhir oleh sektor informal (ton/hari) RPD: Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) Langkah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah $TS = TP \times (TPRT + TPNRT)$ Keterangan: TS: Timbulan sampah (kg/hari) TP: Total populasi (orang) TPRT: Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari) TPNRT: Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari) Dalam Laporan Neraca Pengelolaan Sampah (dari SIPSN), data yang digunakan untuk menghitung indikator ini adalah: Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) = $\frac{[(\text{Jumlah Pendaوران Ulang Sampah (data IIc)} + \text{Pengolahan (data IIIf)})]}{\text{Timbulan Sampah (data I)}} \times 100$
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengolahan sampah di Kabupaten/Kota
Sumber Data	Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2.8 Penurunan Intensitas Emisi GRK

Nama Indikator	Penurunan intensitas emisi GRK (%)
Satuan	%
Definisi	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut.

	Penurunan intensitas emisi GRK untuk memperlihatkan sinergitas antara upaya penurunan emisi dengan pertumbuhan ekonomi.
Rumus Perhitungan	Intensitas emisi GRK (<i>ton CO2e/2010 IDR</i>) $IE_t = TE_t / PDRB_t$ IE_t = Intensitas emisi GRK pada tahun t (<i>ton CO2e/2010 IDR miliar</i>) TE_t = Total tingkat emisi GRK pada tahun t (<i>ton CO2e</i>) $PDRB_t$ = Produk Domestik Regional Bruto tahun t (<i>2010 IDR miliar</i>) t = titik tahun perhitungan Penurunan intensitas emisi GRK (%) $\%IE_t = (IE_t - IEB_t) / IEB_t$ $\%IE_t$ = Persentase intensitas emisi GRK pada tahun t IE_t = Intensitas emisi GRK pada tahun t (<i>ton CO2e/2010 IDR miliar</i>) IEB_t = Intensitas emisi GRK <i>baseline</i> tahun t (<i>ton CO2e/2010 IDR miliar</i>) t = titik tahun perhitungan
Interpretasi	Persentase penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
Sumber Data	1. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK): Laporan AKSARA, Kementerian PPN/Bappenas; Produk Domestik Regional Bruto (Harga Konstan 2010):BPS.
Frekuensi	Tahunan

2.9 Indeks Risiko Bencana

Nama Indikator	Indeks Risiko Bencana
Satuan	angka
Definisi	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.
Rumus Perhitungan	$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$ Keterangan Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (<i>magnitude</i>) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.

	Kapasitas (<i>Capacity</i>) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana
Interpretasi	Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan. Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut: - Indeks <13 adalah Rendah - Indeks 13 - 144 adalah Sedang - Indeks >144 adalah Tinggi
Sumber Data	BNPB
Frekuensi	Tahunan

2.10 Jumlah Penduduk

Nama Indikator	Jumlah Penduduk
Satuan	orang
Definisi Operasional	Jumlah penduduk adalah total jumlah individu yang tinggal di suatu wilayah administratif tertentu, seperti desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, atau negara, pada waktu tertentu. Data ini merupakan salah satu indikator demografis utama yang digunakan dalam perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pengambilan kebijakan
Formulasi Perhitungan	Perhitungan penduduk yang mendiami suatu wilayah
Interpretasi	Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi, dan infrastruktur lainnya.
Sumber Data	BPS
Frekuensi	tahunan

2.11 Laju Pertumbuhan Penduduk

Nama Indikator	Laju Pertumbuhan Penduduk
Satuan	%
Definisi Operasional	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) adalah indikator demografis yang menunjukkan persentase kenaikan jumlah penduduk dalam periode waktu tertentu , biasanya dihitung per tahun . LPP mencerminkan dinamika kependudukan yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi .



Formulasi Perhitungan	$LPP\ (\%) = \left(\frac{P_t - P_0}{P_0} \right) \times \frac{1}{t} \times 100$ Keterangan: P_t = Jumlah penduduk pada akhir periode P_0 = Jumlah penduduk pada awal periode t = Jumlah tahun antara periode	
Interpretasi	LPP (%)	Kategori Pertumbuhan
	< 0,5%	Sangat Rendah
	0,5 – <1,0%	Rendah
	1,0 – <1,5%	Sedang
	1,5 – <2,0%	Tinggi
	≥ 2,0%	Sangat Tinggi
Sumber Data	BPS	
Frekuensi	tahunan	

2.12 Rasio Penduduk (Rasio Jenis Kelamin)

Nama Indikator	Rasio Penduduk (Rasio Jenis Kelamin)	
Satuan	%	
Definisi Operasional	Rasio jenis kelamin (sex ratio) adalah indikator demografis yang menunjukkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan dalam suatu wilayah dan periode tertentu. Nilai ini biasanya dinyatakan dalam jumlah laki-laki per 100 perempuan .	
Formulasi Perhitungan	$\text{Sex Ratio} = \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk Laki-laki}}{\text{Jumlah Penduduk Perempuan}} \right) \times 100$	
Interpretasi	Nilai Sex Ratio	Makna
	= 100	Jumlah laki-laki dan perempuan seimbang
	> 100	Jumlah laki-laki lebih banyak
	< 100	Jumlah perempuan lebih banyak
Sumber Data	BPS	
Frekuensi	tahunan	

2.13 Kepadatan Penduduk

Nama Indikator	Kepadatan Penduduk	
Satuan	Jiwa/km	
Definisi Operasional	Kepadatan penduduk adalah indikator demografis yang menunjukkan jumlah rata-rata penduduk yang mendiami setiap satuan luas wilayah (biasanya per kilometer persegi). Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah geografis	
Formulasi Perhitungan	Kepadatan Penduduk = $\frac{\text{Jumlah Penduduk}}{\text{Luas Wilayah (km}^2\text{)}}$	
Interpretasi	Nilai Kepadatan	Makna
	Tinggi	Wilayah padat penduduk, biasanya kota atau pusat ekonomi
	Sedang	Wilayah dengan distribusi penduduk relatif seimbang
	Rendah	Wilayah dengan sebaran penduduk jarang, biasanya daerah pedesaan, pegunungan, atau perairan
Sumber Data	BPS	
Frekuensi	Tahunan	

2.14 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Nama Indikator	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota	
Satuan	%	
Definisi Operasional	Pertumbuhan ekonomi adalah proses perkembangan kondisi perekonomian di suatu negara untuk menjadi lebih baik selama jangka waktu tertentu. Perkembangan tersebut diharapkan mengalami peningkatan pendapatan yang dapat disebabkan oleh kenaikan produksi barang dan jasa.	
Formulasi Perhitungan	$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$ PDB = PDB tahun t PDB t-1= Produk domestik Bruto tahun sebelumnya t = periode	
Intepretasi	Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi menunjukkan keberhasilan pembangunan suatu daerah	
Sumber Data	BPS	
Frekuensi	Tahunan	

2.15 Tingkat Kemiskinan

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan
Satuan	%
Definisi Operasional	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhandasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapitaper bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)
Formulasi Perhitungan	Banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia (Sesuaiperhitungan BPS)
Intepretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

2.16 PDRB Per Kapita

Nama Indikator	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten
Satuan	Juta Rupiah
Definisi Operasional	PDRB Perkapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
Formulasi Perhitungan	$\text{PDRB Per Kapita} = \frac{\text{PDRB ADHB}}{\text{populasi}}$ $\text{PDRB ADHB} = \text{PDRB Atas Dasar harga Berlaku Populasi} = \text{Jumlah Penduduk Regional}$ $t = \text{periode}$
Interpretasi	Semakin tinggi PDRB per kapita menunjukkan tingkat produktivitas dan kesejahteraan masyarakat
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

2.17 Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia

Nama Indikator	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia
Satuan	%
Definisi Operasional	Ukuran ketimpangan yang mengacu pada persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah. Adapun kriteria tingkat ketimpangan berdasarkan Ukuran Bank Dunia adalah sebagai berikut: 1. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan tinggi. 2. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dikatakan terdapatketimpangan moderat/ sedang/ menengah.

	3. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan ketimpangan rendah		
Formulasi Perhitungan	Sesuai perhitungan BPS		
Interpretasi	Kelompok	Pengeluaran per Kapita per Hari (PPP, USD)	Deskripsi
	Sangat Miskin	< 1,90 USD	Di bawah garis kemiskinan ekstrem global
	Rentan (Hampir Miskin)	1,90 – < 3,20 USD	Rentan jatuh miskin
	Menengah Bawah	3,20 – < 5,50 USD	Kelompok pekerja informal/berpendapatan rendah
	Menengah Atas – Atas	≥ 5,50 USD	Di atas ambang menengah global
Sumber Data	BPS		
Frekuensi	Tahunan		

2.18 Tingkat Pengangguran Terbuka

Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Satuan	%
Definisi	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Rumus Perhitungan	$\frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Keterangan: TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (<i>supply</i>) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak memanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

2.19 Indeks Gini

Nama Indikator	Rasio Gini
Satuan	angka
Definisi Operasional	Rasio Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk
Formulasi Perhitungan	$GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_{i-1}]$ Ket : f_i = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i. Y_i = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i.
Intepretasi	suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai Koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai Koefisien Gininya makin mendekati satu
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

2.20 Indeks Pembangunan Manusia

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia
Satuan	Angka
Definisi Operasional	IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
Formulasi Perhitungan	$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$
Intepretasi	Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

2.21 Usia Harapan Hidup

Nama Indikator	Usia Harapan Hidup (UHH)
Satuan	Tahun
Definisi Operasional	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu
Formulasi Perhitungan	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (<i>Age Specific Death Rate/ASDR</i>) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program <i>Micro Computer Program for Demographic Analysis</i> (MCPDA) atau Mortpack
Interpretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
Sumber Data	BPS



2.22 Jumlah Kasus Kematian Ibu

Nama Indikator	Jumlah Kasus Kematian Ibu
Satuan	Kasus
Definisi Operasional	Banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan
Formulasi Perhitungan	Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama
Interpretasi	Indikator Jumlah Kasus Kematian Ibu adalah ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Kasus kematian ibu sangat penting karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara atau wilayah. Kasus kematian ibu yang rendah di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: 1. Kualitas Pelayanan Kesehatan: Kasus kematian ibu yang rendah biasanya mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan antenatal, persalinan, dan pasca persalinan; 2. Akses Pelayanan Kesehatan: Kasus kematian ibu yang rendah juga bisa mencerminkan akses yang baik ke pelayanan kesehatan. Ini bisa berarti bahwa fasilitas kesehatan mudah dijangkau dan terjangkau oleh masyarakat; 3. Pendidikan Kesehatan: Kasus kematian ibu yang rendah bisa mencerminkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya pelayanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan; 4. Status Gizi: Kasus kematian ibu yang rendah juga bisa mencerminkan status gizi ibu yang baik. Gizi yang baik selama kehamilan sangat penting untuk mencegah komplikasi yang bisa mengancam nyawa ibu; 5. Kesadaran Masyarakat: Kasus kematian ibu yang rendah juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.
Sumber Data	Pelaporan MPDN (Dinkes)

2.23 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita

Nama Indikator	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita
Satuan	%
Definisi Operasional	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010. a. Sangat pendek: Zscore < -3,0 b. Pendek: Zscore ≥ -3,0 s/d Zscore < -2,0
Formulasi Perhitungan	1. Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%); 2. Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%)
Interpretasi	Prevalensi stunting yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk: 1. Kekurangan Gizi: Stunting adalah indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi stunting yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama; 2. Akses Pelayanan Kesehatan: Prevalensi stunting yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak; 3. Kemiskinan: Stunting sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan stunting; 4. Pendidikan: Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi stunting. Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak; 5. Faktor Lingkungan: Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi stunting
Sumber Data	Survey Kesehatan Indonesia (SKI)

2.24 Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)

Nama Indikator	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)
Satuan	%
Definisi Operasional	Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu

Formulasi Perhitungan	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu
Interpretasi	Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting: 1. Penemuan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis; 2. Pengobatan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis
Sumber Data	Pelaporan (Dinkes)

2.25 Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)

Nama Indikator	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)
Satuan	%
Definisi Operasional	Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap
Formulasi Perhitungan	Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan
Interpretasi	Ini adalah indikator penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah
Sumber Data	Pelaporan (Dinkes)

2.26 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional

Nama Indikator	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional
Satuan	%
Definisi Operasional	Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah
Formulasi Perhitungan	Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia dikali 100%

Interpretasi	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: 1. Akses Pelayanan Kesehatan: Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan; 2. Kesadaran Masyarakat: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas; 3. Komitmen Pemerintah Daerah: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional; 4. Pencapaian <i>Universal Health Coverage</i> (UHC): Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian <i>Universal Health Coverage</i> (UHC), yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan
Sumber Data	BPJS Kesehatan

2.27 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Nama Indikator	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Satuan	%
Definisi Operasional	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja (Pekerja Penerima Upah/PPU, Jasa Konstruksi, dan Pekerja Bukan Penerima Upah/BPU yang memiliki Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja (Penduduk bekerja yang berusia 15-65 tahun)
Formulasi Perhitungan	$\left(\frac{\text{Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah semesta penduduk bekerja}}\right) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko- risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak
Sumber Data	BPJS Ketenagakerjaan

2.28 Literasi Membaca SD/Sederajat

Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan SD yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: i) Literasi membaca
Satuan	%
Definisi	Jumlah satuan pendidikan di Kab/Kota X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di kab/Kota X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca yang diselenggarakan oleh Kementerian

	Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek.
Rumus Perhitungan	$\frac{\sum_{i=1}^n \text{satdik min. SKM}}{n}$ Keterangan: <i>satdik min. SKM</i> = Satuan pendidikan SD yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca <i>n</i> = Jumlah satuan pendidikan
Interpretasi	Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.
Sumber Data	Asesmen Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Frekuensi	Tahunan

2.29 Literasi Membaca SMP/Sederajat

Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan SMP yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: i) Literasi membaca
Satuan	%
Definisi	Jumlah satuan pendidikan di Kab/Kota X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di kab/Kota X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas VIII, yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek.
Rumus Perhitungan	$\frac{\sum_{i=1}^n \text{satdik min. SKM}}{n}$ Keterangan: <i>satdik min. SKM</i> = Satuan pendidikan SMP yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca <i>n</i> = Jumlah satuan pendidikan

Interpretasi	Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.
Sumber Data	Asesmen Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Frekuensi	Tahunan

2.30 Numerasi SD/Sederajat

Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan SD yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: i) Numerasi
Satuan	%
Definisi	Jumlah satuan pendidikan di Kab/Kota X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di kab/Kota X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek.
Rumus Perhitungan	$\frac{\sum_{i=1}^n \text{satdik min. SKM}}{n}$ Keterangan: <i>satdik min. SKM</i> = Satuan pendidikan SD yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi <i>n</i> = Jumlah satuan pendidikan
Interpretasi	Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.
Sumber Data	Asesmen Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Frekuensi	Tahunan

2.31 Numerasi SMP/Sederajat

Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan SMP yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: i) Numerasi
Satuan	%
Definisi	Jumlah satuan pendidikan di Kab/Kota X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di kab/Kota X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas VIII, yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek.
Rumus Perhitungan	$\frac{\sum_{i=1}^n \text{satdik min. SKM}}{n}$ Keterangan: <i>satdik min. SKM</i> = Satuan pendidikan SMP yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi <i>n</i> = Jumlah satuan pendidikan
Interpretasi	Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.
Sumber Data	Asesmen Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Frekuensi	Tahunan

2.32 Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun

Nama Indikator	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun
Satuan	Tahun
Definisi	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut: a. Tidak punya ijazah = 0 tahun; b. SD = 6 tahun;

	c. SMP = 9 tahun; d. SMA = 12 tahun; e. D1/D2 = 14 tahun; f. D3 = 15 tahun; g. D4 = 16 tahun; h. S1 = 17 tahun; i. S2 = 19 tahun; j. S3 = 22 tahun. Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini: a. Tidak pernah sekolah = 0 tahun; 2. Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1; 3. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1; 4. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir; Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1
Rumus Perhitungan	$Rata - rata Lama Sekolah 15+ = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$ Keterangan: P_{15+} = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke- i
Interpretasi	Misal: RLS 15+ Indonesia tahun 2022 = 9,08 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,08 tahun atau telah menamatkan kelas IX.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

2.33 Harapan Lama Sekolah

Nama Indikator	Harapan Lama Sekolah
Satuan	tahun
Definisi	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.
Rumus Perhitungan	$Harapan Lama Sekolah = FK \sum_{i=7}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan: FK = Faktor koreksi pesantren E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang berkolah pada tahun P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (7, 8, ..., n)

Interpretasi	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal: HLS Indonesia pada tahun 2022 sebesar 13,10 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau setara dengan Diploma I.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

2.34 Proporsi Penduduk Berusia 15 tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Nama Indikator	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi
Satuan	%
Definisi Operasional	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi. Yang dimaksud jenjang pendidikan tinggi meliputi: DI s.d.DIV; S1; S2; S2 Terapan atau S3
Formulasi Perhitungan	Jumlah penduduk 15 th ke atas yang lulus/berijazah pendidikan tinggi DIBAGI Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas DIKALI 100%
Interpretasi	Nilai maksimal indikator 100% dan merupakan indikator "positif"
Sumber Data	BPS

2.35 Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun

Nama Indikator	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun
Satuan	%
Definisi Operasional	1. Merupakan cakupan penduduk usia 5-6 tahun yang pernah atau sedang mengikuti pendidikan pra sekolah; 2. Pendidikan pra sekolah menurut BPS digolongkan menjadi Taman Kanak- Kanak (TK), Raudatul Athfal atau Bustanul Athfal (BA), PAUD/PAUD Terintegrasi BKB/Taman Posyandu, dan sejenisnya, Kelompok Bermain (KB), dan Taman Penitipan Anak (TPA)
Formulasi Perhitungan	Jumlah penduduk usia 5 - 6 tahun yang pernah atau sedang mengikuti pendidikan pra sekolah DIBAGI Jumlah penduduk usia 5 - 6 tahun pada wilayah bersangkutan DIKALI 100%
Interpretasi	Nilai maksimal indikator 100% dan merupakan indikator "positif"
Sumber Data	BPS

2.36 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
Satuan	%
Definisi Operasional	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan literasi di kalangan masyarakat suatu daerah. Indeks ini dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) sebagai alat ukur untuk menilai kapasitas literasi yang

	mendukung kemajuan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan masyarakat.	
Formulasi Perhitungan	Dimensi	Indikator (contoh) 
	1. Ketersediaan bahan bacaan	Jumlah buku per kapita, jumlah koleksi perpustakaan, akses internet literasi
	2. Akses dan layanan perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan, jam layanan, keterjangkauan lokasi
	3. Kecakapan literasi masyarakat	Tingkat kemampuan membaca, menulis, dan penggunaan informasi
	4. Budaya baca	Frekuensi membaca, minat baca, kegiatan literasi berbasis masyarakat
Interpretasi	Skor IPLM	Kategori
	≥ 75	Sangat Baik
	60–74,99	Baik
	45–59,99	Cukup
	< 45	Kurang
	Nilai akhir IPLM biasanya berada dalam rentang 0–100, semakin tinggi nilainya, semakin baik pembangunan literasi di daerah tersebut.	
Sumber Data	BPS	
Frekuensi	Tahunan	

2.37 Indeks Harmoni Indonesia

Nama Indikator	Indeks Harmoni	
Satuan	Angka	
Definisi Operasional	Indeks Harmoni secara umum merujuk pada ukuran yang menilai tingkat kerukunan, toleransi, dan kohesi sosial dalam suatu komunitas atau wilaya.	
Formulasi Perhitungan	Mengukur indeks dengan aspek sebagai berikut:	
	Aspek	Contoh Indikator
	Kerukunan antar komunitas	Jumlah konflik sosial
	Keamanan sosial	Persepsi rasa aman di lingkungan
	Toleransi budaya dan etnis	Partisipasi dalam kegiatan lintas budaya
	Keharmonisan keluarga	Angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga
	Partisipasi sosial	Kegiatan gotong royong, organisasi kemasyarakatan aktif
Intepretasi	Semakin tinggi nilai Indeks Harmoni suatu daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan kerukunan masyarakatnya	
Sumber Data	BPS	
Frekuensi	Tahunan	

2.38 Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan

Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan
Satuan	%
Definisi Operasional	1. Cakupan satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok Bahasa Jawa dan atau guru/tenaga pendidik yang mengajar ekskul kesenian dan atau kegiatan/kurikulum yang mengarusutamakan kebudayaan; 2. Satuan Pendidikan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota meliputi PAUD, SD dan SMP baik negeri maupun swasta, pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan; 3. Guru Lokal Bahasa Daerah adalah Guru S1/D4 dengan kualifikasi pendidikan Bahasa Daerah/Sastra Jawa; 4. Guru Kesenian adalah Guru dengan kualifikasi pendidikan seni S1/D4 dari perguruan tinggi universitas atau institut kesenian; 5. Kegiatan yang mengarusutamakan kebudayaan baik dalam kurikulum pelajaran maupun ekstra kurikuler; 6. Indikator tersebut tercapai jika memenuhi 2 dari 3 komponen yang dipersyaratkan: a) Guru yang mengajar mulok bahasa daerah, b) Guru yang mengajar seni budaya, dan c) Melaksanakan kegiatan pengarusutamaan kebudayaan di sekolah (baik melalui kurikulum atau ekskul)
Formulasi Perhitungan	Jumlah satuan pendidikan negeri dan swasta, pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan kewenangan kabupaten/kota (PAUD, SD dan SMP) yang memenuhi 2 dari 3 komponen yang dipersyaratkan DIBAGI Jumlah seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta, pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan kewenangan kabupaten/kota (PAUD, SD dan SMP) DIKALI 100%
Interpretasi	Nilai maksimal indikator 100% dan merupakan indikator "positif"
Sumber Data	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pendidikan

2.39 Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan

Nama Indikator	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan
Satuan	%
Definisi Operasional	1. Cakupan CB dan WBTB yang mendapatkan intervensi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan/atau pembinaan; 2. Definisi/makna dilestarikan mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (CB)
Formulasi Perhitungan	Jumlah Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan DIBAGI Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) dan Karya Budaya DIKALI 100%
Interpretasi	1. Indikator ini menggambarkan sejauh mana upaya yang dilakukan untuk melestarikan warisan budaya yang ada di Jawa Tengah beserta nilai pentingnya; 2. Indikator ini merupakan indikator proxy dari pembentuk komponen Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) pada Dimensi Warisan Budaya; 3. Nilai maksimal indikator 100%, merupakan indikator "positif"

Sumber Data	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kebudayaan

2.40 Jumlah pengunjung tempat bersejarah

Nama Indikator	Jumlah pengunjung tempat bersejarah
Satuan	Orang
Definisi Operasional	Jumlah pengunjung pada lokasi dan/atau bangunan bersejarah yang memiliki nilai penting ilmu pengetahuan, pendidikan, keagamaan, dan kebudayaan, seperti museum, bangunan bersejarah, masjid, klenteng, gereja, makam, monumen, candi, situs, kawasan, dan lainnya
Formulasi Perhitungan	Jumlah pengunjung pada lokasi dan/atau bangunan bersejarah yang memiliki nilai penting ilmu pengetahuan, pendidikan, keagamaan, dan kebudayaan
Interpretasi	- Indikator ini menggambarkan sejauh mana masyarakat mempunyai kepedulian dan mengapresiasi warisan budaya dan sejarah Jawa Tengah; - Indikator ini merupakan indikator proxy dari pembentuk komponen Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) pada Dimensi Warisan Budaya; - Tidak ada batasan nilai maksimal terhadap indikator ini, namun tren diharapkan meningkat dari tahun ke tahun; - Merupakan indikator "positif"
Sumber Data	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kebudayaan

2.41 Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/ mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir

Nama Indikator	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir
Satuan	%
Definisi Operasional	- Cakupan kelompok kesenian yang terdaftar dan berperan serta aktif setiap tahunnya dalam kegiatan/acara yang menampilkan pertunjukan atau festival kesenian; - Pertunjukan atau festival kesenian dapat berskala internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan selama para pelaku seni tersebut memperoleh penghasilan/pendapatan/honor
Formulasi Perhitungan	Jumlah kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir DIBAGI Jumlah total keseluruhan kelompok kesenian yang tercatat DIKALI 100%
Interpretasi	- Indikator ini menggambarkan sejauh mana para pelaku seni di Jawa Tengah dapat menjadikan kegiatan seni budaya sebagai salah satu sumber pendapatan/kesejahteraan; - Indikator ini merupakan indikator proxy dari pembentuk komponen Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) pada Dimensi Ekonomi Budaya dan Dimensi Ekspresi Budaya; Nilai maksimal indikator 100%, merupakan indikator "positif"
Sumber Data	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kebudayaan

2.42 Tingkat pemanfaatan perpustakaan

Nama Indikator	Tingkat pemanfaatan perpustakaan
Satuan	%
Definisi Operasional	1. Tingkat pemanfaatan perpustakaan dihitung dengan banyaknya pemus- taka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan per hari di tahun tersebut dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama dikali 100%; 2. Jumlah pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan berasal dari kunjungan harian perpustakaan (onsite dan online) dan kunjungan pemustaka yang terlibat dalam kegiatan perpustakaan; 3. Jumlah penduduk merupakan rilis BPS pada tahun yang sama; 4. Yang dimaksud dengan perpustakaan adalah perpustakaan kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, Perguruan Tinggi dan Khusus
Formulasi Perhitungan	(Jumlah pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan per hari dalam setahun baik onsite maupun online/ Jumlah penduduk kabupaten/kota pada tahun yang sama) x 100%
Interpretasi	1. Indikator ini menggambarkan sejauh mana perpustakaan dimanfaatkan oleh penduduk; 2. Indikator ini merupakan indikator proxy dari pembentuk komponen Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) pada Dimensi Budaya Literasi ; 3. Nilai maksimal indikator 100%, merupakan indikator "positif"
Sumber Data	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perpustakaan dan BPS

2.43 Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)
Satuan	Angka
Definisi Operasional	IBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia
Formulasi Perhitungan	Penghitungan IBangga menggunakan pendekatan tiga dimensi yang dibentuk dari 17 variabel. Langkah langkah penghitungan IBangga: - menghitung nilai agregasi masing masing variabel di level provinsi dan kabupaten/kota; - menghitung skor disetiap dimensi; - menghitung Ibangga
Interpretasi	Nilai IBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: - IBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40; - IBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40–70; - IBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70
Sumber Data	BKKBN

2.44 Indeks Ketimpangan Gender

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Satuan	angka
Definisi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.
Rumus Perhitungan	Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut: - Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki $G_p = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} \times (PR_p \times SE_p)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_p}$ $G_L = \sqrt[3]{1 \times (PR_L \times SE_L)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_L}$ - Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki- laki dengan rata-rata harmonic $HARM(G_p, G_L) = \left[\frac{(G_p)^{-1} + (G_L)^{-1}}{2} \right]^{-1}$ - Menghitung indeks masing – masing dimensi $IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}} + 1 \right)}{2}$ $IPK = \frac{TPAK_p + TPAK_L}{2}$ $IP = \frac{\left(\sqrt{PR_p \times SE_p} + \sqrt{PR_L \times SE_L} \right)}{2}$ - Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik $G_{p,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$ - Menghitung Indeks Kesenjangan Gender $Indeks\ Kesenjangan\ Gender = \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$ - Menghitung Indeks Ketimpangan Gender $IKG = 1 - \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$ Keterangan:

	G_p G_l MTF MHPK20 PR_p PR_l SE_p SE_l TPAK_p TPAK_l HARM(G_p, G_l) IKR IP IPK G_{VL} IKG = Indeks Perempuan = Indeks Laki-laki = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun = Persentase perempuan di legislatif = Persentase laki-laki di legislatif = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas = Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja = Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja = Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik = Indeks dimensi kesehatan reproduksi = Indeks dimensi pemberdayaan = Indeks dimensi pasar tenaga kerja = Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik = Indeks Ketimpangan Gender
Interpretasi	IKG bernilai antara 0 - 1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, dan Sekretaris Dewan (Sekwan)
Frekuensi	Tahunan

2.45 Angka Ketergantungan

Nama Indikator	Angka Ketergantungan
Satuan	%
Definisi Operasional	Angka Ketergantungan adalah indikator demografis yang menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk usia non-produktif (yaitu penduduk usia 0–14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun). Indikator ini menunjukkan beban ekonomi yang harus ditanggung oleh kelompok usia produktif untuk mendukung kelompok usia yang tidak bekerja atau belum mandiri secara ekonomi.
Formulasi Perhitungan	Dependency Ratio = $\left(\frac{\text{Penduduk usia 0–14 + usia 65 ke atas}}{\text{Penduduk usia 15–64}} \right) \times 100$
Interpretasi	Jika Angka Ketergantungan = 50 , artinya setiap 100 orang usia produktif harus menanggung 50 orang usia non-produktif . Semakin tinggi angka ketergantungan, semakin besar beban ekonomi pada kelompok usia kerja
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

2.46 Rasio PDRB Industri Pengolahan

Nama Indikator	Rasio PDRB Industri Pengolahan
Satuan	%
Definisi Operasional	Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari lapangan usaha Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB
Formulasi Perhitungan	Rasio PDRB Industri Pengolahan = Nilai Tambah Lapangan Usaha Industri Pengolahan/Nilai PDRB Kabupaten Kota X 100 %
Interpretasi	Rasio lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah lapangan usaha industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan, semakin tinggi

	proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, ceteris paribus.
Sumber Data	BPS

2.47 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Nama Indikator	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)
Satuan	%
Definisi	Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi: 1. Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan 2. Penyediaan Jasa Makan dan Minum.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Nilai Tambah Penyediaan AKmamin}}{\text{Nilai PDRB Provinsi}} \times 100$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB regional, ceteris paribus. Ke depan, perlu ada pemutakhiran dari aktivitas-aktivitas yang terkait pariwisata.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik Daerah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Frekuensi	Tahunan

2.48 LPE Kategori Industri Pengolahan

Nama Indikator	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan
Satuan	%
Definisi Operasional	Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan,yang mencerminkan nilai tambah sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB
Formulasi Perhitungan	$\frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$
Intepretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor Industri Pengolahan yang ada dalam PDRB, semakin tinggi nilai ekonominya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

2.49 LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Nama Indikator	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Satuan	%
Definisi Operasional	Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan,yang mencerminkan nilai tambah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB

Formulasi Perhitungan	$\frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$
Intepretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang ada dalam PDRB, semakin tinggi nilai ekonominya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

2.50 Kontribusi PDRB Kabupaten Demak Terhadap Provinsi Jawa Tengah

Nama Indikator	Kontribusi PDRB Kabupaten Demak terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah
Satuan	%
Definisi Operasional	Menghitung kontribusi perekonomian Kabupaten Demak terhadap perekonomian Provinsi Jawa Tengah
Formulasi Perhitungan	$\text{Kontribusi PDRB Kab. Demak} = \frac{PDRB\ ADHB_{Demak}}{PDRB\ ADHB_{Jawa\ Tengah}} \times 100\%$ Keterangan: PDRB ADHB: Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Interpretasi	Semakin besar persentase Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah menandakan semakin besar peran demak dalam perekonomian Jawa Tengah
Sumber Data	BPS

2.51 Pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah (Pertanian, Industri, Perdagangan, Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum)

Nama Indikator	Pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah (Pertanian, Industri, Perdagangan, Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum)
Satuan	%
Definisi Operasional	Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Pertanian, Industri, Perdagangan, Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum, yang mencerminkan nilai tambah sektor Pertanian, Industri, Perdagangan, Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum terhadap PDRB
Formulasi Perhitungan	$\frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor Pertanian, Industri, Perdagangan, Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum yang adalah PDRB, semakin tinggi nilai ekonominya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah
Sumber Data	BPS

Frekuensi	Tahunan

2.52 Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara

Nama Indikator	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara
Satuan	Orang
Definisi Operasional	Jumlah tamu wisatawan mancanegara
Formulasi Perhitungan	Data Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara di daerah
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah tamu wisatawan mancanegara di daerah tertentu maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata
Sumber Data	BPS, Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pariwisata
Frekuensi	Tahunan

2.53 Rasio Kewirausahaan Daerah

Nama Indikator	Rasio Kewirausahaan Daerah
Satuan	%
Definisi Operasional	Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran
Formulasi Perhitungan	$(\text{Berusaha dibantu buruh tetap daerah} / \text{total angkatan kerja daerah}) \times 100\%$
Interpretasi	Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha
Sumber Data	BPS dan Sektoral (Kemenkop RI, Diskopukm Provinsi dan Diskopumkm Kab/kota

2.54 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Nama Indikator	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB
Satuan	%
Definisi Operasional	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap

	tahun
Formulasi Perhitungan	$(\text{Volume Usaha Koperasi Daerah} / \text{PDRB ADHB}) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut
Sumber Data	BPS dan Sektoral (Kemenkop RI, Diskopukm Provinsi dan Diskopukm Kab/kota)

2.55 Return on Aset (ROA) BUMD

Nama Indikator	Return on Aset (ROA) BUMD
Satuan	%
Definisi Operasional	Return On Asset (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Return On Asset (ROA) dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan.
Formulasi Perhitungan	$(\text{Agregat laba bersih seluruh BUMD} / \text{Agregat aset seluruh BUMD}) \times 100\%$ Catatan: BUMD dalam hal ini adalah seluruh BUMD yang saham mayoritasnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota, dan tidak termasuk BUMD yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
Interpretasi	Return On Asset (ROA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan.
Sumber Data	Laporan Keuangan BUMD, BPS

2.56 Kapabilitas Inovasi

Nama Indikator	Kapabilitas Inovasi
Satuan	Angka
Definisi Operasional	1. Jumlah nilai dari indikator pembentuk Pilar 12 dari Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kapabilitas Inovasi; 2. Merupakan indikator pembentuk Pilar 12. Kapabilitas Inovasi level Kabupaten/Kota antara lain keanekaragaman tenaga kerja, publikasi ilmiah, aplikasi kekayaan intelektual, belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, aplikasi merk dagang
Formulasi	Sesuai perhitungan BRIN

Perhitungan	
Interpretasi	1. Kapabilitas inovasi menggambarkan kemampuan dalam mengembangkan produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan melalui penerapan proses- proses secara tepat serta cepat dalam menanggapi perubahan teknologi; 2. Penjelasan rinci dimensi dan indikator pembentuk daya saing, termasuk metadatanya dapat diakses di tautan https://awan.brin.go.id/s/jg296fjXHYCBPRZ
Sumber Data	BRIN

2.57 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	
Satuan	%	
Definisi Operasional	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator ketenagakerjaan yang menunjukkan persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi , baik yang sedang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan (pengangguran)	
Formulasi Perhitungan	$TPAK \text{ (\%)} = \left(\frac{\text{Angkatan Kerja}}{\text{Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas)}} \right) \times 100$	
Interpretasi	Nilai TPAK (%)	Interpretasi
	≥ 70%	Sangat tinggi (aktif secara ekonomi)
	60–69%	Tinggi
	50–59%	Sedang
	< 50%	Rendah
Sumber Data	BPS	
Frekuensi	Tahunan	

2.58 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	
Satuan	%	
Definisi Operasional	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas	
Formulasi Perhitungan	(Jumlah angkatan kerja perempuan/Jumlah penduduk perempuan usia 15 th keatas) x 100%	

Interpretasi	TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (labor supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja. Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksi pasokan tenaga kerja, menetapkan kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial
Sumber Data	Sakernas BPS

2.59 Indeks Inovasi Daerah

Nama Indikator	Indeks Inovasi Daerah													
Satuan	indeks													
Definisi Operasional	Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah ukuran kuantitatif yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menilai kapasitas dan kinerja pemerintah daerah dalam menciptakan, menerapkan, dan mengembangkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indeks ini digunakan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan													
Formulasi Perhitungan	<table><tr><th>Kategori</th><th>Subkategori</th><th></th></tr><tr><td>1. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan</td><td>Digitalisasi birokrasi, perizinan, pelayanan administratif</td><td></td></tr><tr><td>2. Inovasi Pelayanan Publik</td><td>Inovasi kesehatan, pendidikan, sosial, dan layanan langsung ke masyarakat</td><td></td></tr><tr><td>3. Inovasi Daerah Lainnya</td><td>Ekonomi kreatif, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan lingkungan, dll.</td><td></td></tr></table>	Kategori	Subkategori		1. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	Digitalisasi birokrasi, perizinan, pelayanan administratif		2. Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi kesehatan, pendidikan, sosial, dan layanan langsung ke masyarakat		3. Inovasi Daerah Lainnya	Ekonomi kreatif, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan lingkungan, dll.		
Kategori	Subkategori													
1. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	Digitalisasi birokrasi, perizinan, pelayanan administratif													
2. Inovasi Pelayanan Publik	Inovasi kesehatan, pendidikan, sosial, dan layanan langsung ke masyarakat													
3. Inovasi Daerah Lainnya	Ekonomi kreatif, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan lingkungan, dll.													
Interpretasi	<table><tr><th>Nilai IID</th><th>Kategori Daerah</th></tr><tr><td>≥ 60</td><td>Sangat Inovatif</td></tr><tr><td>51–59</td><td>Inovatif</td></tr><tr><td>≤ 50</td><td>Kurang Inovatif</td></tr></table>	Nilai IID	Kategori Daerah	≥ 60	Sangat Inovatif	51–59	Inovatif	≤ 50	Kurang Inovatif					
Nilai IID	Kategori Daerah													
≥ 60	Sangat Inovatif													
51–59	Inovatif													
≤ 50	Kurang Inovatif													
Sumber Data	Kemendagri													
Frekuensi	Tahunan													

2.60 Disparitas Harga

Nama Indikator	Disparitas Harga
Satuan	%
Definisi Operasional	Disparitas harga adalah perbedaan harga atas suatu harga komoditas bahan pokok tertentu antardaerah. 13 Komoditas Bapok (Barang Pokok): 1. Beras Medium 2. Gula Pasir 3. Minyak Goreng Kemasan Sederhana 4. Daging Sapi Paha Belakang 5. Daging Ayam Ras 6. Telur Ayam Ras 7. Tepung Terigu 8. Kedelai Impor 9. Cabe Merah Keriting 10. Cabe Rawit Merah 11. Bawang Merah 12. Bawang Putih Impor Kating 13. Ikan Kembung
Formulasi Perhitungan	$\frac{(\text{Harga komoditas di kabupaten kota} - \text{Harga komoditas di provinsi})}{\text{Harga komoditas di provinsi}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin kecil nilai disparitas berarti semakin kecil perbedaan harga komoditas di Kabupaten/Kota dengan harga di Provinsi untuk komoditas yang sama. Kecilnya nilai disparitas dapat diartikan adanya perbaikan dan efisiensi sistem distribusi barang antar wilayah dan menurunnya kesenjangan harga suatu komoditas antarwilayah
Sumber Data	Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Tahunan di tingkat Kabupaten/Kota Kementerian Perdagangan, melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP)

2.61 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Nama Indikator	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)
Satuan	%
Definisi Operasional	1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB 2. Total PMTB berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) 3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan
Formulasi	$\frac{\text{PMTB}}{\text{PDRB}} \times 100\%$

Perhitungan	
Interpretasi	PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (<i>financial leasing</i>), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (<i>financial leasing</i>). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan
Sumber Data	BPS

2.62 Pertumbuhan PMTB

Nama Indikator	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)
Satuan	%
Definisi	Pembentukan Modal TetapBruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB Kab/Kota
Rumus Perhitungan	$\frac{PMTB}{PDRB\ ADHK} \times 100\%$ Keterangan: PMTB = Total Pembentukan Modal Tetap Bruto berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) <i>PDRB ADHK</i> = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Interpretasi	PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (<i>financial leasing</i>), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (<i>financial leasing</i>). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Triwulanan dan Tahunan

2.63 Net Ekspor Barang dan Jasa

Nama Indikator	Net Ekspor Barang dan Jasa
Satuan	%
Definisi Operasional	Ekspor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi untuk periode waktu yang lama umurnya ditetapkan minimal satu tahun. Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basisi akrual Dimana untukm barang dicatat sat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabean, sednagkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan. Ekspor barang dan jasa (% PDRB) merupakan share ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Kab/Kota
Formulasi Perhitungan	$Ekspor\ Barang\ dan\ Jasa\ (\%PDRB) = \frac{Ekspor\ Barang\ dan\ Jasa}{PDRB\ ADHK} \times 100\%$ Keterangan: Ekspor Barang dan Jasa = Total Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) PDRB ADHK = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Interpretasi	Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap PDB suatu negara. PDB adalah ukuran nilai total produski dalam suatu daerah dalam satu periode. Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produdk-produk domestic di pasar intgernaional. Meningkatkan penjualan dan membuak peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika ekspor barang dan jasa emngalami peningkatan maka pemndapatan negara juga mengalami peningkatan karena peningkatan penjualan dan penerimaan deviden. Peningkatan pendataan ini emndorongninvestasi, inovasi dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang dna jasa yang diekspor. Selain itu ekspor juga meningkatkan efiseinesi dan daya saing industry dalam negeri untuk dapat bersaing di pasar global.
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

2.64 Indeks Kinerja Infrastruktur Daerah

Nama Indikator	Indeks Kinerja Infrastruktur Daerah
Satuan	indeks
Definisi Operasional	Indeks Kinerja Infrastruktur adalah suatu ukuran komposit yang digunakan untuk menilai cakupan, kualitas, aksesibilitas, dan keberlanjutan layanan infrastruktur dasar di suatu wilayah. Indeks ini sering dikembangkan dalam konteks pemantauan pembangunan berkelanjutan, perencanaan wilayah, atau evaluasi kinerja layanan publik oleh pemerintah

Formulasi Perhitungan	capaian program : 8. Program Pengelolaan SDA 9. Program SPAM 10. Program SPAL 11. Program Drainase 12. Program Bangunan Gedung 13. Program Pengembangan Jasa Konstruksi 14. 7. Program Penyelenggaraan Jalan
Interpretasi	Semakin tinggi kinerja infrastruktur semakin terdiri dari masing-masing urusan infrastruktur antara lain: PUPR, Perumahan dan kawasan permukiman dan perhubungan.
Sumber Data	Penilaian mandiri
Frekuensi	Tahunan

2.65 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Nama Indikator	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak
Satuan	%
Definisi Operasional	Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: 1. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; 2. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut: 1. Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat; 2. Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2$ m²; 3. Memiliki akses air minum layak; 4. Memiliki akses sanitasi layak
Formulasi Perhit	Menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak). $PHLTB \text{ (proksi)} = \frac{JRTHLTB \text{ (proksi)}}{(JRT \times 100)}$ - PHLTB (proksi): Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; - RTHLTB (proksi): jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; - JRT: Jumlah rumah tangga

Interpretasi	Indikator ini untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS

2.66 Indeks Desa

Nama Indikator	Indeks Desa											
Satuan	indeks											
Definisi Operasional	Indeks Desa adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai tingkat perkembangan atau kemajuan suatu desa berdasarkan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Di Indonesia, Indeks Desa umumnya merujuk pada Indeks Desa Membangun (IDM) yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).											
Formulasi Perhitungan	<table><tr><th>Komponen</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>Indeks Ketahanan Sosial (IKS)</td><td>Mengukur kualitas pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, modal sosial, dan permukiman.</td></tr><tr><td>Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)</td><td>Mengukur akses masyarakat terhadap kegiatan ekonomi, ketersediaan sarana prasarana ekonomi, serta diversifikasi mata pencaharian.</td></tr><tr><td>Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL)</td><td>Mengukur kondisi dan pengelolaan lingkungan, rawan bencana, serta kualitas sanitasi dan air bersih.</td></tr></table>		Komponen	Keterangan	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	Mengukur kualitas pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, modal sosial, dan permukiman.	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	Mengukur akses masyarakat terhadap kegiatan ekonomi, ketersediaan sarana prasarana ekonomi, serta diversifikasi mata pencaharian.	Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL)	Mengukur kondisi dan pengelolaan lingkungan, rawan bencana, serta kualitas sanitasi dan air bersih.		
Komponen	Keterangan											
Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	Mengukur kualitas pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, modal sosial, dan permukiman.											
Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	Mengukur akses masyarakat terhadap kegiatan ekonomi, ketersediaan sarana prasarana ekonomi, serta diversifikasi mata pencaharian.											
Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL)	Mengukur kondisi dan pengelolaan lingkungan, rawan bencana, serta kualitas sanitasi dan air bersih.											
Interpretasi	<table><tr><th>Nilai IDM</th><th>Kategori Desa</th></tr><tr><td>0,00 – 0,49</td><td>Desa Tertinggal</td></tr><tr><td>0,50 – 0,59</td><td>Desa Berkembang</td></tr><tr><td>0,60 – 0,69</td><td>Desa Maju</td></tr><tr><td>0,70 – 1,00</td><td>Desa Mandiri</td></tr></table>		Nilai IDM	Kategori Desa	0,00 – 0,49	Desa Tertinggal	0,50 – 0,59	Desa Berkembang	0,60 – 0,69	Desa Maju	0,70 – 1,00	Desa Mandiri
Nilai IDM	Kategori Desa											
0,00 – 0,49	Desa Tertinggal											
0,50 – 0,59	Desa Berkembang											
0,60 – 0,69	Desa Maju											
0,70 – 1,00	Desa Mandiri											
Sumber Data	Kemendes PDTT											
Frekuensi	Tahunan											

2.67 Persentase Desa Mandiri

Nama Indikator	Persentase Desa Mandiri
Satuan	%
Definisi Operasional	1. Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa dan dikelola oleh Kementerian Desa PDTT; 2. Jumlah perbandingan desa dengan kategori "mandiri" dengan jumlah keseluruhan desa yang dihitung berdasarkan hasil perhitungan Indeks Desa dengan sumber data Potensi Desa (PODES) dengan mencakup 6 (enam) dimensi yaitu layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa; 3. Indeks Desa dihitung oleh BPS menggunakan sumber data updating PODES 2019. Data jumlah desa mengikuti daftar yang dikeluarkan Kemendagri, hasil perhitungan Indeks Desa pada Bulan Juli setiap tahunnya; 4. Pemanfaatan Indeks Desa diarahkan pada pemanfaatan Indeks Desa dalam dokumen perencanaan nasional dan daerah, pengalokasian Dana Desa, dan penyusunan kebijakan pembangunan Desa Lainnya; 5. Menurut UU No. 6 Tahun 2014, Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik
Formulasi Perhitungan	Sesuai perhitungan BPS Perhitungan Indeks Desa $ID=\sqrt[6]{D1 \times D2 \times D3 \times D4 \times D5 \times D6}$ Keterangan: ID: Indeks Desa D: Dimensi
Interpretasi	Semakin tingginya jumlah desa mandiri menunjukkan tingkat pembangunan desa yang semakin baik yang didukung dengan komponen pendukung yang termuat dalam 6 (enam) dimensi pengukurannya; Mandiri: Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan yang sudah sangat baik
Sumber Data	BPS dan Kementerian Desa PDTT

2.68 Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota

Nama Indikator	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota
Satuan	%

Definisi Operasional	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap merupakan persentase dari panjang jalan Kabupaten/Kota yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan kabupaten/kota. Perhitungan kondisi jalan mengacu pada SE Menteri 01/ SE/2023, SE Dirjen No 22/ SE/Db/ 2021, Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penggunaan Aplikasi <i>Provincial/Kabupaten Road Management System</i> Di Provinsi Jawa Tengah, pengambilan data kondisi jalan dilakukan
Formulasi Perhitungan	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap (Kewenangan Kabupaten/Kota) = (Panjang jalan kabupaten/kota yang dijaga dalam kondisi permukaan mantap / total panjang jalan kabupaten/kota) x 100% Keterangan: - Panjang jalan kabupaten/kota kondisi mantap = Panjang jalan kabupaten/kota kondisi baik + panjang jalan kabupaten/kota sedang (dalam km); Total panjang jalan kabupaten/kota dalam km dengan metode visual dan IRI, analisa hasil penilaian kondisi jalan tersebut diperoleh dari aplikasi PKRMS
Interpretasi	
Sumber Data	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pekerjaan Umum

2.69 Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota

Nama Indikator	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten
Satuan	%
Definisi Operasional	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota adalah indikator yang mengukur jumlah ruas jalan kabupaten/kota dengan pemenuhan minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal perlengkapan jalan dibandingkan dengan jumlah total ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota. Pemenuhan minimal perlengkapan jalan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pemenuhan minimal perlengkapan jalan adalah tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, <i>guardrill</i>, penerangan jalan umum (PJU) dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) pada jalan kabupaten/kota minimal sebesar 60% dari total kebutuhan ideal untuk masing-masing perlengkapan jalan dimaksud untuk 1 (satu) ruas jalan. Jenis dan ruang lingkup rambu, marka, <i>guardrill</i> dan APILL sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Formulasi Perhitungan	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota = (Jumlah ruas jalan kabupaten/kota dengan pemenuhan minimal perlengkapan jalan dari

	total kebutuhan ideal perlengkapan jalan / Jumlah total ruas jalan kewenangan kabupaten/kota) x 100%
Interpretasi	Indikator Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan (fasilitas keselamatan) jalan secara tuntas di 1 ruas jalan untuk setiap jenis perlengkapan jalan yang dimungkinkan berbeda- beda kebutuhannya (jenis dan/atau jumlahnya) pada setiap ruas jalannya. Hal ini berkontribusi untuk meningkatkan tingkat keselamatan pengguna jalan di ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka mengurangi potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menjadi indikator ditingkat provinsi (Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dalam 1 Juta Keberangkatan)
Sumber Data	Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perhubungan

2.70 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Nama Indikator	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
Satuan	%
Definisi Operasional	Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)
Formulasi Perhitungan	PSA = ((JRTST+JRТИPLT) : JRТS) x 100% PSA = Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman JRTST = Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T JRTИPLT = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat
Sumber Data	- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS - Data Infrastruktur Kementerian PUPR

2.71 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet

Nama Indikator	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet
Satuan	%
Definisi Operasional	Rumah tangga dengan akses internet merupakan rumah tangga dengan minimal terdapat satu anggota rumah tangga yang mengakses internet, baik melalui jaringan tetap atau seluler. Rumah tangga dengan akses internet berarti bahwa internet tersedia untuk digunakan oleh semua anggota rumah tangga kapan saja
Formulasi Perhitungan	Jumlah rumah tangga dengan minimal satu anggota rumah tangga yang mengakses internet DIBAGI total rumah tangga DIKALI 100%
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya maka dapat digambarkan semakin baik kondisi akses internet di masyarakat
Sumber Data	BPS

2.72 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Nama Indikator	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
Satuan	%
Definisi Operasional	1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 2. PDRB adalah penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan; 3. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah
Formulasi Perhitungan	$\text{(Penerimaan pajak daerah / PDRB)} \times 100\%$
Interpretasi	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah
Sumber Data	BPS, SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah), LRA (Laporan Realisasi Anggaran)

2.73 Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB

Nama Indikator	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB
Satuan	%
Definisi Operasional	1. Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten kota. Kepemilikan yang dimaksud adalah Pemda kabupaten kota memiliki saham atas Bank Umum dan Bank Perekonomian rakyat tersebut.; 2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan; 3. Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%) adalah persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu daerah terhadap PDRB daerah tersebut pada suatu waktu tertentu
Formulasi Perhitungan	(Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota dibagi PDRB) x 100%
Interpretasi	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%) menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan pada bank milik kabupaten/kota terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai Total DPK/PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio Total DPK/PDRB (%), menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah
Sumber Data	Total DPK pada bank Milik Kabupaten/Kota: Laporan Keuangan (Audited) Perbankan PDRB: BPS

2.74 Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB

Nama Indikator	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB
Satuan	%
Definisi Operasional	1. Total Kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten kota. Kepemilikan yang dimaksud adalah Pemda kabupaten kota memiliki saham atas Bank Umum dan Bank Perekonomian rakyat tersebut; 2. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun (ADHB). 3. Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang

	disalurkan oleh perbankan di suatu daerah terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) daerah tersebut pada suatu waktu tertentu
Formulasi Perhitungan	$(\text{Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB}) \times 100\%$
Interpretasi	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%) menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%) menunjukkan semakin berfungsinya perbankan milik daerah sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian daerah tersebut.
Sumber Data	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota: Laporan Keuangan (<i>Audited</i>) Perbankan PDRB: BPS

2.75 Indeks Reformasi Hukum

Nama Indikator	Indeks Reformasi Hukum
Satuan	Angka
Definisi Operasional	Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, regulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional
Formulasi Perhitungan	Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagai berikut: 1. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%; 2. Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yang berkualitas, dengan bobot 25%; 3. Kualitas re-regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasil reviu, dengan bobot 35%; 4. Penataan database PUU, dengan bobot 15%
Interpretasi	Kategori Nilai/Angka Predikat 1. AA: >90 - 100 Istimewa 2. A: >80 - 90 Sangat Baik 3. BB : >70 - 80 Baik 4. B: >60 - 70 Cukup Baik 5. CC: >50 - 60 Cukup 6. 6. C: >30 - 50 Buruk 7. D: 0 - 30 Sangat Buruk
Sumber Data	Kementerian Hukum dan HAM

2.76 Indeks Reformasi Birokrasi

Nama Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi
Satuan	Angka

Definisi Operasional	Indeks Reformasi Birokrasi adalah indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah.
Formulasi Perhitungan	Indeks Reformasi Birokrasi dinilai oleh Kemenpan RB dengan melihat pelaksanaan dua jenis Reformasi Birokrasi yaitu RB General dan RB Tematik. RB General memiliki bobot 100 RB Tematik memiliki bobot 20 sehingga total Indeks RB memiliki bobot 120
Interpretasi	Dengan meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi yang ada didaerah, diharapkan perwujudan demokrasi substansial atas asas kesetaraan dan kualitas kebijakan yang dihasilkan akan semakin membaik
Sumber Data	Kementerian PAN-RB

2.77 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Nama Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Satuan	Angka
Definisi Operasional	Definisi SEB Buku I: SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Adapun Definisi Operasional (Kepmen PANRB No. 739 Th 2023): Instrumen Evaluasi SPBE terdiri dari 4 (empat) Domain: - Domain Kebijakan Internal - Domain Tata Kelola SPBE - Domain Manajemen SPBE - Domain Layanan SPBE Ruang lingkup Indikator Evaluasi SPBE: - Domain Kebijakan SPBE, terdiri dari 1 (satu) Aspek, yaitu Penguatan Kebijakan SPBE Internal yang memiliki turunan 10 (sepuluh) Indikator; - Domain Tata Kelola SPBE, terdiri dari 3 (tiga) Aspek, yaitu: - Aspek Perencanaan Strategis, memiliki turunan 4 (empat) Indikator; - Aspek TIK, memiliki turunan 4 (empat) Indikator; - Aspek Penyelenggara SPBE, memiliki turunan 2 (dua) Indikator; - Domain Manajemen SPBE, terdiri dari 2 (dua) Aspek, yaitu: - Aspek Penerapan Manajemen, memiliki turunan 8 (delapan) Indikator; - Aspek TIK, memiliki turunan 3 (tiga) Indikator; - Domain Layanan SPBE, terdiri dari 1 Aspek, yaitu: - Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, memiliki turunan 10 (sepuluh) Indikator; - Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik, memiliki turunan 6 (enam) Indikator.



Formulasi Perhitungan	Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut: Rumus Indeks SPBE (dapat dilihat pada SEB Buku I Pedoman Penyelarasan Muatan RPJPD dengan RPJPN) Langkah Perhitungan: 1. dilakukan perhitungan tingkat kematangan indikator-indikator pada 4 domain SPBE. Domain tersebut adalah Domain Kebijakan, Domain Tata Kelola, Domain Manajemen dan, Domain Layanan; 2. Masing-masing tingkat kematangan dikelompokkan/skor dalam 5 tingkatan (1 sampai dengan 5); 3. Hasil perhitungan dijumlah; 4. Jumlah hasil perhitungan tingkat kematangan pada masing-masing domain dikalikan bobot pada masing-masing domain. Bobot tersebut adalah Domain Layanan SPBE 45 %, Domain Kebijakan Internal SPBE 13 %, Domain Tata Kelola 25 % dan, Domain Manajemen SPBE 17 %; dan 5
Interpretasi	Ukuran Tingkat Kematangan: 1. Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu); 2. Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua); 3. Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga); 4. Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat); dan 5. Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima). Penghitungan Nilai Indeks Tingkat Kematangan SPBE Nilai indeks: 1. Nilai Indeks Aspek, nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE pada suatu aspek, dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai tingkat kematangan indikator dan bobot indikator, yang dibagi dengan bobot aspek tersebut; 2. Nilai Indeks Domain, nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE pada domain tertentu, dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks aspek dan bobot aspek, yang dibagi dengan bobot domain tersebut; 3. Nilai Indeks SPBE, nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan, dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Bobot Domain: Domain 1 - Kebijakan Internal SPBE : 13,00% Domain 2 - Tata Kelola SPBE : 25,00% Domain 3 - Manajemen SPBE : 16,50% Domain 4 - Layanan SPBE : 45,50% Total Bobot : 100,00%

	Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat sebagai berikut: 1. 4,2 – 5,0 Memuaskan 2. 3,5 – < 4,2 Sangat Baik 3. 2,6 – < 3,5 Baik 4. 1,8 – < 2,6 Cukup 5. < 1,8 Kurang
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kepmen PAN RB No. 739 Tahun 2023 tentang Juknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023

2.78 Nilai SAKIP

Nama Indikator	Penilaian SAKIP																								
Satuan	Indeks (angka)																								
Definisi	Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah merupakan proses evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah daerah menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja dalam pengelolaan pemerintahan.																								
Rumus Perhitung	Penilaian SAKIP meliputi beberapa komponen utama, antara lain: Perencanaan Kinerja: Evaluasi terhadap dokumen perencanaan strategis dan rencana kerja instansi pemerintah daerah. Pengukuran Kinerja: Penilaian terhadap indikator kinerja utama (IKU) dan sistem pengukuran kinerja yang digunakan. KKP +2 Pelaporan Kinerja: Evaluasi terhadap laporan kinerja instansi pemerintah daerah, termasuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Evaluasi Internal: Penilaian terhadap mekanisme evaluasi internal yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja.																								
Interpretasi	Hasil penilaian SAKIP diberikan dalam bentuk skor dan predikat sebagai berikut: <table><tr><th>Skor</th><th>Predikat</th><th>Interpretasi</th></tr><tr><td>90–100</td><td>AA (Sangat Memuaskan)</td><td>Kinerja sangat baik, efisiensi tinggi, dan sistem manajemen kinerja andal.</td></tr><tr><td>80–89,99</td><td>A (Memuaskan)</td><td>Kinerja baik dengan sistem manajemen kinerja yang efektif.</td></tr><tr><td>70–79,99</td><td>BB (Sangat Baik)</td><td>Kinerja cukup baik dengan beberapa area perlu perbaikan.</td></tr><tr><td>60–69,99</td><td>B (Baik)</td><td>Kinerja memadai namun masih banyak area yang perlu ditingkatkan.</td></tr><tr><td>50–59,99</td><td>CC (Cukup)</td><td>Kinerja kurang memadai, perlu perbaikan signifikan.</td></tr><tr><td>30–49,99</td><td>C (Kurang)</td><td>Kinerja rendah, banyak aspek yang perlu dibenahi.</td></tr><tr><td>0–29,99</td><td>D (Sangat Kurang)</td><td>Kinerja sangat rendah, sistem manajemen kinerja tidak berjalan.</td></tr></table>	Skor	Predikat	Interpretasi	90–100	AA (Sangat Memuaskan)	Kinerja sangat baik, efisiensi tinggi, dan sistem manajemen kinerja andal.	80–89,99	A (Memuaskan)	Kinerja baik dengan sistem manajemen kinerja yang efektif.	70–79,99	BB (Sangat Baik)	Kinerja cukup baik dengan beberapa area perlu perbaikan.	60–69,99	B (Baik)	Kinerja memadai namun masih banyak area yang perlu ditingkatkan.	50–59,99	CC (Cukup)	Kinerja kurang memadai, perlu perbaikan signifikan.	30–49,99	C (Kurang)	Kinerja rendah, banyak aspek yang perlu dibenahi.	0–29,99	D (Sangat Kurang)	Kinerja sangat rendah, sistem manajemen kinerja tidak berjalan.
Skor	Predikat	Interpretasi																							
90–100	AA (Sangat Memuaskan)	Kinerja sangat baik, efisiensi tinggi, dan sistem manajemen kinerja andal.																							
80–89,99	A (Memuaskan)	Kinerja baik dengan sistem manajemen kinerja yang efektif.																							
70–79,99	BB (Sangat Baik)	Kinerja cukup baik dengan beberapa area perlu perbaikan.																							
60–69,99	B (Baik)	Kinerja memadai namun masih banyak area yang perlu ditingkatkan.																							
50–59,99	CC (Cukup)	Kinerja kurang memadai, perlu perbaikan signifikan.																							
30–49,99	C (Kurang)	Kinerja rendah, banyak aspek yang perlu dibenahi.																							
0–29,99	D (Sangat Kurang)	Kinerja sangat rendah, sistem manajemen kinerja tidak berjalan.																							

Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Frekuensi	Tahunan

2.79 Indeks Pelayanan Publik

Nama Indikator	Indeks Pelayanan Publik.
Satuan	Angka
Definisi	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.
Rumus Perhitungan	Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. Penentuan nilai indeks dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: e. Menentukan Nilai untuk Setiap Indikator Setiap pertanyaan dalam kuesioner memiliki bobot yang disesuaikan dengan bobot per aspek. Nilai per indikator merupakan nilai pada formulir F-02 atau F-03 dikali dengan bobot indikator. Nilai per indikator F02: Nilai F02 x bobot per indikator Nilai per indikator F03: Nilai F03 x bobot per indikator f. Menentukan Nilai Setiap Aspek Nilai indeks tidak hanya bertujuan memberikan hasil akhir nilai saja, tetapi juga dapat dijadikan dasar perbaikan pelayanan, dengan melihat aspek-aspek yang membutuhkan perbaikan. Nilai aspek diperoleh dengan menjumlahkan nilai per indikator dalam satu aspek. Nilai per aspek: $\sum \text{nilai per indikator}$ g. Menentukan Nilai Indeks Formulir Setelah nilai indikator dan nilai aspek diketahui, maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai indeks dari masing-masing formulir dengan rumus sebagai berikut: Nilai Indeks Formulir: $\sum (\text{Nilai per aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)$ h. Menentukan Nilai Indeks Pelayanan Publik Selanjutnya untuk melakukan perhitungan nilai indeks pelayanan publik dari F02 dan F03 digunakan rumus sebagai berikut: Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks Formulir-02+25% Nilai Indeks Formulir-03.
Interpretasi	Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 7. Keadilan (<i>Fairness</i>); 8. Partisipasi (<i>Participation</i>) 9. Akuntabilitas (<i>Accountability</i>)

	10. Transparansi (Transparency) 11. Berdayaguna (Useful) 12. Aksesibilitas (Assessibility) Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi: <table><tr><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Makna</th></tr><tr><td>0 – 1,00</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr><tr><td>1,01 – 1,50</td><td>E</td><td>Sangat Buruk</td></tr><tr><td>1,51 – 2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>2,01 – 2,50</td><td>C-</td><td>Cukup (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>2,51 – 3,00</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>3,01 – 3,50</td><td>B-</td><td>Baik (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>3,51 – 4,00</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4,01 – 4,50</td><td>A-</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>4,51 – 5,00</td><td>A</td><td>Pelayanan Prima</td></tr></table>	Range Nilai	Kategori	Makna	0 – 1,00	F	Gagal	1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk	1,51 – 2,00	D	Buruk	2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)	2,51 – 3,00	C	Cukup	3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)	3,51 – 4,00	B	Baik	4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik	4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima
Range Nilai	Kategori	Makna																													
0 – 1,00	F	Gagal																													
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk																													
1,51 – 2,00	D	Buruk																													
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)																													
2,51 – 3,00	C	Cukup																													
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)																													
3,51 – 4,00	B	Baik																													
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik																													
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima																													
Sumber Data	- LKE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. - Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2023																														
Frekuensi	Tahunan																														

2.80 Rasio konektivitas kabupaten

Nama Indikator	Rasio Konektivitas
Satuan	Angka
Definisi	Rasio konektivitas adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan tingkat keterhubungan dalam suatu sistem, jaringan, atau infrastruktur perhubungan.
Rumus Perhitungan	Rasio konektivitas Kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) Rasio Konektivitas Kabupaten = (1 x 70) + (0.5 x 30) o IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten tersebut) IK1 (Angkutan Jalan) = 9 x 1 IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten tersebut) IK2 (ASDP) = 3 x 0,5 3 Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) - Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP - Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) - Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil - Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan : Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)

	Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)
Interpretasi	Semakin tinggi nilai rasio konektivitas, maka semakin berhasil pelayanan angkutan. Bobot Trayek atau Lintas : a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5
Sumber Data	Kementerian Perhubungan
Frekuensi	Tahunan

2.81 Indeks Integritas Nasional

Nama Indikator	Indeks Integritas Nasional
Satuan	Angka
Definisi Operasional	Indeks Integritas Nasional merupakan pemetaan risiko korupsi dan capaian upaya pencegahan korupsi yang dilakukan seluruh K/L/PD. Berdasarkan hasil ukuran tersebut menjadi dasar untuk menyusun perbaikan sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi.
Formulasi Perhitungan	Perhitungan Indeks Integritas dilakukan dengan menggabungkan penilaian dari tiga sudut pandang, yaitu penilaian internal, penilaian eksternal, dan penilaian eksper/ahli. 4. Penilaian internal dihitung berdasarkan penilaian pegawai pada masing-masing lokus survei terkait integritas unit kerja dan/atau organisasi. formula: $(0,1707 X1 + 0,1619 X2 + 0,1288 X3 + 0,1396 X4 + 0,1184 X5 + 0,1602 X6 + 0,1204 X7)$ 5. Penilaian eksternal berasal penilaian para pengguna layanan publik di lokus survei. formula: $0,0817 X1 + 0,0814 X2 + 0,0832 X3 + 0,0845 X4 + 0,0763 X5 + 0,0863 X6 + 0,0881 X7 + 0,0859 X8 + 0,0872 X9 + 0,0804 X10 + 0,0888 X11 + 0,0762 X12$ 6. Penilaian eksper/ahli dihitung berdasarkan penilaian beberapa narasumber atau eksper/ahli yang dianggap memiliki pengetahuan komprehensif terkait masalah integritas dan korupsi pada K/L/PD tertentu formula: $0,3285 X1 + 3115 X2 + 3599 X3$ Formula penghitungan indeks integritas nasional $0,305 X1 + 0,328 X2 + 0,367 X3 - 0,20 (0,58X4 + 0,42X5)$ dimana: X1 Indeks Penilaian Internal X2 Indeks Penilaian Eksternal X3 Indeks Penilaian Eksper X4 Prevalensi Korupsi X5 Integritas Pelaksanaan SPI
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Indeks Integritas Nasional maka capaian upaya pencegahan korupsi semakin baik dan risiko korupsi semakin kecil. Begitu pula sebaliknya
Sumber Data	Survei Penilaian Integritas KPK RI

Frekuensi	Tahunan

2.82 Kapasitas Institusi

Nama Indikator	Kapasitas Institusi																																																
Satuan	Angka																																																
Definisi Operasional	Institusi memberikan ketentuan dalam bentuk peraturan tertulis (kebijakan) dan tidak tertulis (norma perilaku) yang memengaruhi pelaku ekonomi dalam membuat keputusan yang optimal. Keberadaan institusi yang kuat tidak hanya memfasilitasi transaksi ekonomi secara efisien, namun juga mencegah terjadinya sengketa sehingga menciptakan iklim bisnis yang kondusif.																																																
Formulasi Perhitungan	<table><tr><th>INDIKATOR 2022</th><th>INDIKATOR 2023</th><th>SUMBER DATA</th></tr><tr><td>1. Kejadian pungutan liar</td><td>Kejadian pungutan liar</td><td>KemenkoPolhukam</td></tr><tr><td>2. Tingkat pembunuhan</td><td>Tingkat pembunuhan</td><td>Mabes Polri</td></tr><tr><td>3. Kejadian teror*</td><td>Jumlah Penangkapan Terduga Teroris*</td><td>BNPT</td></tr><tr><td>4. Keandalan layanan kepolisian*</td><td>Keandalan layanan kepolisian*</td><td>Mabes Polri</td></tr><tr><td>5. Modal sosial*</td><td>Modal sosial*</td><td>BPS</td></tr><tr><td>6. Transparansi anggaran</td><td>Transparansi anggaran</td><td>BPK</td></tr><tr><td>7. Kebebasan PERS*</td><td>Kebebasan PERS*</td><td>Dewan Pers Indonesia</td></tr><tr><td>8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</td><td>Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</td><td>KemenPAN-RB</td></tr><tr><td>9. Kinerja instansi pemerintah</td><td>Kinerja instansi pemerintah</td><td>KemenPAN-RB</td></tr><tr><td>10. Pelaksanaan reformasi birokrasi</td><td>Pelaksanaan reformasi birokrasi</td><td>KemenPAN-RB</td></tr><tr><td>11. Upaya pencegahan korupsi</td><td>Upaya pencegahan korupsi</td><td>KPK</td></tr><tr><td>12. Hak atas kepemilikan</td><td>Hak atas kepemilikan</td><td>Mabes Polri</td></tr><tr><td>13. Kualitas administrasi pertanahan</td><td>Kualitas administrasi pertanahan</td><td>Kementerian ATR/BPN</td></tr><tr><td>14. Stabilitas kebijakan berbisnis*</td><td>Pindah ke pilar 4</td><td></td></tr><tr><td>15. Tingkat pengelolaan lingkungan</td><td>Tingkat pengelolaan lingkungan</td><td>KLHK</td></tr></table>	INDIKATOR 2022	INDIKATOR 2023	SUMBER DATA	1. Kejadian pungutan liar	Kejadian pungutan liar	KemenkoPolhukam	2. Tingkat pembunuhan	Tingkat pembunuhan	Mabes Polri	3. Kejadian teror*	Jumlah Penangkapan Terduga Teroris*	BNPT	4. Keandalan layanan kepolisian*	Keandalan layanan kepolisian*	Mabes Polri	5. Modal sosial*	Modal sosial*	BPS	6. Transparansi anggaran	Transparansi anggaran	BPK	7. Kebebasan PERS*	Kebebasan PERS*	Dewan Pers Indonesia	8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	KemenPAN-RB	9. Kinerja instansi pemerintah	Kinerja instansi pemerintah	KemenPAN-RB	10. Pelaksanaan reformasi birokrasi	Pelaksanaan reformasi birokrasi	KemenPAN-RB	11. Upaya pencegahan korupsi	Upaya pencegahan korupsi	KPK	12. Hak atas kepemilikan	Hak atas kepemilikan	Mabes Polri	13. Kualitas administrasi pertanahan	Kualitas administrasi pertanahan	Kementerian ATR/BPN	14. Stabilitas kebijakan berbisnis*	Pindah ke pilar 4		15. Tingkat pengelolaan lingkungan	Tingkat pengelolaan lingkungan	KLHK
INDIKATOR 2022	INDIKATOR 2023	SUMBER DATA																																															
1. Kejadian pungutan liar	Kejadian pungutan liar	KemenkoPolhukam																																															
2. Tingkat pembunuhan	Tingkat pembunuhan	Mabes Polri																																															
3. Kejadian teror*	Jumlah Penangkapan Terduga Teroris*	BNPT																																															
4. Keandalan layanan kepolisian*	Keandalan layanan kepolisian*	Mabes Polri																																															
5. Modal sosial*	Modal sosial*	BPS																																															
6. Transparansi anggaran	Transparansi anggaran	BPK																																															
7. Kebebasan PERS*	Kebebasan PERS*	Dewan Pers Indonesia																																															
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	KemenPAN-RB																																															
9. Kinerja instansi pemerintah	Kinerja instansi pemerintah	KemenPAN-RB																																															
10. Pelaksanaan reformasi birokrasi	Pelaksanaan reformasi birokrasi	KemenPAN-RB																																															
11. Upaya pencegahan korupsi	Upaya pencegahan korupsi	KPK																																															
12. Hak atas kepemilikan	Hak atas kepemilikan	Mabes Polri																																															
13. Kualitas administrasi pertanahan	Kualitas administrasi pertanahan	Kementerian ATR/BPN																																															
14. Stabilitas kebijakan berbisnis*	Pindah ke pilar 4																																																
15. Tingkat pengelolaan lingkungan	Tingkat pengelolaan lingkungan	KLHK																																															
Interpretasi	Institusi yang kuat merupakan pendorong fundamental bagi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.																																																
Sumber Data	Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)																																																

2.83 Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan

Nama Indikator	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan
Satuan	%
Definisi Operasional	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) yang Dapat Diselesaikan adalah indikator kinerja yang menggambarkan efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atau perangkat daerah terkait dalam menangani dan menyelesaikan laporan atau kejadian gangguan trantibum di wilayahnya
Formulasi Perhitungan	$\text{Persentase Penyelesaian Gangguan Trantibum} = \left(\frac{\text{Jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah gangguan trantibum yang terjadi}} \right) \times 100\%$
Interpretasi	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) yang Dapat Diselesaikan menggambarkan keamanan lingkungan. Semakin banyak gangguan yang diselesaikan, kedamaian lingkungan dapat tercapai
Sumber Data	Penilaian Mandiri oleh Satpol PP

2.84 Angka Kejadian Konflik Sosial

2.85 Jumlah Kejadian Komflik SARA

2.86 Indeks Daya Saing Daerah

Nama Indikator	Indeks Daya Saing Daerah
Satuan	Angka
Definisi Operasional	IDSD sendiri merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.

2.87 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)



2.88 Indeks Kepuasan Masyarakat

Nama Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat
Satuan	Angka
Definisi Operasional	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. IKM menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pelayanan publik dan mendorong reformasi birokrasi yang berorientasi pada kepuasan pengguna layanan
Formulasi Perhitungan	Komponen IKM (Berdasarkan PermenPANRB No. 14 Tahun 2017) 1. Pengukuran Semesteran Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut: $\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$ N = bobot nilai per unsur Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur $\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$ Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut: $\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: $\text{SKM Unit pelayanan} \times 25$ Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk: - Menambah unsur yang dianggap relevan; - Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1. 2. Pengukuran Tahunan Merupakan rata-rata nilai dari semester 1 dan 2, dengan rumus sebagai berikut: $\frac{\text{Nilai semester 1} + \text{Nilai Semester 2}}{2}$ Unsur pelayanan terdiri dari: - Persyaratan layanan - Prosedur layanan

	3 Waktu pelayanan 4 Biaya/tarif pelayanan 5 Produk spesifikasi jenis layanan 6 Kompetensi pelaksana layanan 7 Perilaku pelaksana layanan 8 Penanganan pengaduan 9 Sarana dan prasarana pelayanan		
Interpretasi	Rentang Nilai	Mutu Pelayanan	Kinerja
	88,31 – 100,00	A (Sangat Baik)	Sangat Memuaskan
	76,61 – 88,30	B (Baik)	Memuaskan
	65,00 – 76,60	C (Kurang Baik)	Cukup Memuaskan
	< 65,00	D (Tidak Baik)	Tidak Memuaskan
Sumber Data	Penilaian Mandiri		
Frekuensi	Tahunan		

2.89 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Nama Indikator	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	
Satuan	Indeks	
Definisi Operasional	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah instrumen pengukuran kinerja tata kelola keuangan pemerintah daerah, yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mengelola keuangan secara efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil.	
Formulasi Perhitungan	Dimensi	Penjelasan Singkat
	1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	Menilai konsistensi antara RKPD, KUA-PPAS, dan APBD.
	2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	Mengukur prioritas belanja pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi.
	3. Transparansi keuangan daerah	Melihat sejauh mana dokumen anggaran dan realisasi dipublikasikan dan dapat diakses publik.
	4. Penyerapan anggaran dan realisasi keuangan	Mengukur efektivitas pelaksanaan anggaran.
	5. Kondisi keuangan daerah	Rasio kemandirian fiskal, PAD, belanja pegawai, dan rasio utang.
	6. Opini BPK atas laporan keuangan daerah	Kualitas LKPD berdasarkan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Interpretasi	Nilai IPKD	Kategori Kinerja
	80–100	Sangat Baik
	66–79	Baik
	51–65	Cukup
	35–50	Kurang
	< 35	Sangat Kurang
Sumber Data	Penilaian Mandiri	

Frekuensi	Tahunan

2.90 Indeks Sistem Merit

Nama Indikator	Indeks Sistem Merit	
Satuan	indeks	
Definisi Operasional	Indeks Sistem Merit adalah alat ukur yang digunakan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah (pusat dan daerah) menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara) secara objektif, adil, dan berdasarkan kompetensi	
Formulasi Perhitungan	No Aspek Penilaian 1 Perencanaan kebutuhan ASN 2 Pengadaan ASN 3 Pengembangan karier 4 Promosi dan mutasi 5 Manajemen kinerja 6 Penggajian, penghargaan, dan disiplin 7 Perlindungan dan pelayanan hukum 8 Sistem informasi ASN Setiap aspek memiliki indikator yang dinilai dengan bobot tertentu	
Interpretasi	Nilai	Kategori
	80–100	Baik (Tinggi)
	51–79	Cukup (Sedang)
	≤ 50	Kurang (Rendah)
Sumber Data	LKE KemenpanRB	
Frekuensi	Tahunan	

3. Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Demak

3.1 Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD

Nama Indikator	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100 \%$

3.2 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar

Nama Indikator	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar}}{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100 \%$

	Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi yang bersangkutan

3.3 Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama

Nama Indikator	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama ----- x 100 % Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan

3.4 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

Nama Indikator	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum Menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan ----- x 100 % Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan

3.5 Iklim keamanan SD

Nama Indikator	Iklim keamanan SD
Satuan	Angka
Definisi Operasional	Kondisi satuan pendidikan yang kondusif yang memberikan rasa aman (secara fisik dan psikologis), seperti tidak adanya perundungan dan hukuman fisik pada Bentuk Pendidikan SD
Formulasi Perhitungan	Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar Jenjang SD

3.6 Iklim keamanan SMP

Nama Indikator	Iklim keamanan SMP
Satuan	Angka
Definisi Operasional	Kondisi satuan pendidikan yang kondusif yang memberikan rasa aman (secara fisik dan psikologis), seperti tidak adanya perundungan dan hukuman fisik Bentuk Pendidikan SMP
Formulasi Perhitungan	Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar Jenjang SMP

3.7 Iklim kebhinekaan SD

Nama Indikator	Iklim kebhinekaan SD
Satuan	Angka
Definisi Operasional	Kondisi sekolah yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan Bentuk Pendidikan SD
Formulasi Perhitungan	Nilai rerata iklim kebhinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar Jenjang SD

3.8 Iklim kebinekaan SMP

Nama Indikator	Iklim kebhinekaan SMP
Satuan	Angka
Definisi Operasional	Kondisi sekolah yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan Bentuk Pendidikan SMP
Formulasi Perhitungan	Nilai rerata iklim kebhinekaan berdasarkan survei lingkungan belajar Jenjang SMP

3.9 Iklim inklusivitas SD

Nama Indikator	Iklim inklusivitas SD
Satuan	Angka
Definisi Operasional	Kondisi yang disediakan oleh sekolah untuk menyediakan layanan bagi siswa dengan disabilitas dan cerdas istimewa dan berbakat istimewa Bentuk Pendidikan SD
Formulasi Perhitungan	Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar Jenjang SD

1.1 Iklim inklusivitas SMP

Nama Indikator	Iklim inklusivitas SMP
Satuan	Angka
Definisi Operasional	Kondisi yang disediakan oleh sekolah untuk menyediakan layanan bagi siswa dengan disabilitas dan cerdas istimewa dan berbakat istimewa Bentuk Pendidikan SMP
Formulasi Perhitungan	Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar Jenjang SMP

1.2 Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B

Nama Indikator	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B
Satuan	%
Definisi Operasional	Pesentase jumlah sekolah jenjang TK/RA, jenjang SD/MI dan jenjang SMP/ MTs yang terakreditasi minimal B dibanding dengan jumlah total sekolah jenjang TK/RA, jenjang SD/MI dan jenjang SMP/ MTs
Formulasi Perhitungan	Jumlah sekolah jenjang TK/RA, jenjang SD/MI dan jenjang SMP/ MTs yang terakreditasi minimal B dibanding dengan jumlah total sekolah jenjang TK/RA, jenjang SD/MI dan jenjang SMP/ MTs

1.1 Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan

Nama Indikator	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan}}{\text{Jumlah Penduduk di kabupaten/kota}} \times 100 \%$

1.2 Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi

Nama Indikator	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah RS Rujukan yang Terakreditasi}}{\text{Jumlah RS di kabupaten/kota}} \times 100 \%$

1.3 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil

Nama Indikator	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Kesehatan}}{\text{Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota}} \times 100 \%$

1.4 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Nama Indikator	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan}}{\text{Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota}} \times 100 \%$

1.5 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Nama Indikator	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota}} \times 100 \%$

1.6 Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Nama Indikator	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah bayi balita di kabupaten/kota}} \times 100 \%$

1.1 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Nama Indikator	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah anak usia Pendidikan dasar di kabupaten/kota}} \times 100 \%$

1.2 Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Nama Indikator	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota.}} \times 100 \%$

1.3 Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Nama Indikator	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota}} \times 100 \%$

1.4 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Nama Indikator	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota}} \times 100 \%$

1.5 Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Nama Indikator	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita DM di kabupaten/kota

1.6 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Nama Indikator	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota

1.7 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Nama Indikator	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota

1.8 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar

Nama Indikator	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar ----- x 100 % Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota.

1.9 Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota

Nama Indikator	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) ----- x 100 % Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)

1.10 Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota

Nama Indikator	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) ----- x 100 % Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)

1.11 Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi

Nama Indikator	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting ----- x 100 % luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota

1.12 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota

Nama Indikator	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota. ----- x 100 % Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut.

1.13 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

Nama Indikator	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD ----- x 100 % Jumlah rumah di Kabupaten

**1.14** Rasio kepatuhan IMB kab/ kota

Nama Indikator	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya}}{\text{Jumlah IMB yang berlaku}} \times 100 \%$

1.15 Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota

Nama Indikator	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap}}{\text{Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota}} \times 100 \%$

1.16 Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi

Nama Indikator	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota}} \times 100 \%$

1.17 Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi

Nama Indikator	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi kecelakaan konstruksi}}{\text{Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya}} \times 100 \%$

1.18 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota

Nama Indikator	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n}}{\text{Jumlah total rumah korban bencana}} \times 100 \%$

	Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n

1.1 Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota

Nama Indikator	Fasilitas hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni -----x 100 % Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan

1.2 Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani

Nama Indikator	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) ----- x 100 % Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha

1.3 Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

Nama Indikator	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Jumlah unit rumah tidak layak huni ----- x 100 % Jumlah total unit rumah kabupaten/kota

1.4 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

Nama Indikator	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU ----- x 100 % Jumlah unit rumah kab/kota

1.5 Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

Nama Indikator	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan
Satuan	%
Formulasi	Jumlah pengaduan yang ditangani ----- x 100 %



Perhitungan	Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk

1.6 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

Nama Indikator	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$

1.7 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

Nama Indikator	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
Satuan	orang
Formulasi Perhitungan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

1.8 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Nama Indikator	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana
Satuan	orang
Formulasi Perhitungan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana

1.9 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Nama Indikator	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Satuan	orang
Formulasi Perhitungan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

1.10 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Nama Indikator	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan/Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota}} \times 100 \%$

1.11 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran

Nama Indikator	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran
Satuan	menit
Formulasi Perhitungan	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran

1.12 Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)

Nama Indikator	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ----- x 100 % Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis

1.13 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota

Nama Indikator	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran ----- x 100 % Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota

1.14 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja

Nama Indikator	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD ----- x 100% Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota

1.15 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

Nama Indikator	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi ----- x 100% Jumlah tenaga kerja keseluruhan

1.16 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Nama Indikator	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100\%$

1.17 Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).

Nama Indikator	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah Perusahaan}} \times 100\%$

1.18 Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota

Nama Indikator	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencaker yang terdaftar}} \times 100\%$

1.19 Persentase ARG pada belanja langsung APBD

Nama Indikator	Persentase ARG pada belanja langsung APBD
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD}}{\text{Jumlah seluruh belanja langsung APBD}} \times 100\%$

1.20 Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten

Nama Indikator	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kot yang didampingi}}{\text{Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)}} \times 100\%$

1.21 Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)

Nama Indikator	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)
Satuan	per 100.000 penduduk perempuan
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100.000$

1.22 Persentase Cadangan Pangan

Nama Indikator	Persentase Cadangan Pangan
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan}}{\text{Jumlah target cadangan pangan yang ditetapkan}} \times 100\%$

1.23 Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan

Nama Indikator	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi}}{\text{seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi}} \times 100\%$

1.24 Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum

Nama Indikator	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}}{\text{Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}} \times 100\%$

1.25 Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.

Nama Indikator	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin Lokasi}}{\text{Luas izin lokasi yang diterbitkan}} \times 100\%$

1.26 Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

Nama Indikator	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha; ----- x 100% Jumlah penerima tanah obyek landreform

1.27 Tersedianya tanah untuk masyarakat

Nama Indikator	Tersedianya tanah untuk masyarakat
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah ----- x 100% Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan

1.28 Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi

Nama Indikator	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Jumlah sengketa tanah Garapan yang ditangani ----- x 100% jumlah pengaduan sengketa tanah garapan

1.29 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah																				
Satuan	angka																				
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air(IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)).																				
Rumus Perhitungan	Perhitungan IKLH Kabupaten/Kota yang tidak memiliki gambut adalah(PermenLHK No.27/2021): IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)																				
Interpretasi	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup <table><tr><th>Nomor</th><th>Kategori</th><th>Angka Rentang</th></tr><tr><td>1</td><td>Sangat Baik</td><td>$90 \leq x \leq 100$</td></tr><tr><td>2</td><td>Baik</td><td>$70 \leq x < 90$</td></tr><tr><td>3</td><td>Sedang</td><td>$50 \leq x < 70$</td></tr><tr><td>4</td><td>Kurang</td><td>$25 \leq x < 50$</td></tr><tr><td>5</td><td>Sangat Kurang</td><td>$0 \leq x < 25$</td></tr></table>			Nomor	Kategori	Angka Rentang	1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$	2	Baik	$70 \leq x < 90$	3	Sedang	$50 \leq x < 70$	4	Kurang	$25 \leq x < 50$	5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$
Nomor	Kategori	Angka Rentang																			
1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$																			
2	Baik	$70 \leq x < 90$																			
3	Sedang	$50 \leq x < 70$																			
4	Kurang	$25 \leq x < 50$																			
5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$																			

1.30 Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota

1.31 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota

1.32 Perekaman KTP elektronik

1.33 Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA

Nama Indikator	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA ----- x 100% Jumlah anak usia 0-17 tahun

**1.34** Kepemilikan akta kelahiran

Nama Indikator	Kepemilikan akta kelahiran
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir}}{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun}} \times 100\%$

1.35 Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama

Nama Indikator	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$

1.36 Persentase pengentasan desa tertinggal

Nama Indikator	Persentase pengentasan desa tertinggal
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun)}} \times 100\%$

1.37 Persentase peningkatan status desa mandiri

Nama Indikator	Persentase peningkatan status desa mandiri
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa berkembang (perawal tahun)}} \times 100\%$

1.38 Persentase desa mandiri

Nama Indikator	Persentase desa mandiri
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah desa mandiri yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa mandiri (perawal tahun)}} \times 100\%$

1.39 TFR (Angka Kelahiran Total)

Nama Indikator	TFR (Angka Kelahiran Total)											
Satuan	Rasio Angka kelahiran total											
Formulasi Perhitungan	<table><tr><th>Nilai TFR</th><th>Interpretasi</th></tr><tr><td>≥ 3,0</td><td>Tinggi (banyak anak)</td></tr><tr><td>2,1 – 2,9</td><td>Sedang (pengganti populasi + sedikit lebih)</td></tr><tr><td>2,1</td><td>Tingkat Pengganti (replacement level)</td></tr><tr><td>< 2,1</td><td>Rendah (menuju penurunan populasi)</td></tr></table> Nilai TFR = 2,1 dianggap sebagai tingkat ideal untuk mempertahankan jumlah penduduk tetap, tanpa bertambah atau berkurang drastis dalam jangka panjang		Nilai TFR	Interpretasi	≥ 3,0	Tinggi (banyak anak)	2,1 – 2,9	Sedang (pengganti populasi + sedikit lebih)	2,1	Tingkat Pengganti (replacement level)	< 2,1	Rendah (menuju penurunan populasi)
Nilai TFR	Interpretasi											
≥ 3,0	Tinggi (banyak anak)											
2,1 – 2,9	Sedang (pengganti populasi + sedikit lebih)											
2,1	Tingkat Pengganti (replacement level)											
< 2,1	Rendah (menuju penurunan populasi)											

1.40 Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)

Nama Indikator	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah peserta KB Aktif Modern}}{\text{Jumlas Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$

1.41 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

Nama Indikator	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlas Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$

1.42 Rasio konektivitas kabupaten/kota

Nama Indikator	Rasio konektivitas kabupaten/kota
Satuan	Angka
Formulasi Perhitungan	Rasio konektivitas Kabupaten atau Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) o IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut) o IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut) Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) - Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP

	- Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) - Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil - Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan: 1. Wilayah yang Tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) 2. Wilayah yang Tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) 3. Wilayah yang Tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) 4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas: a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5

1.43 V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota

Nama Indikator	V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota
Satuan	Angka
Formulasi Perhitungan	V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota

1.44 Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo

Nama Indikator	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo ----- x 100% Jumlah OPD



1.45 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

Nama Indikator	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah Layanan Publik}} \times 100\%$

1.46 Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota

Nama Indikator	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$

1.47 Meningkatnya Koperasi yang berkualitas

Nama Indikator	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$

1.48 Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha

Nama Indikator	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha}}{\text{Jumlah usaha mikro keseluruhan}} \times 100\%$

1.49 Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota

Nama Indikator	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{(\text{Jumlah investasi tahun } n - \text{jumlah investasi tahun } n-1) \text{ di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah investasi tahun } n-1 \text{ di kabupaten/kota}} \times 100\%$

**1.50** Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri

Nama Indikator	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota}} \times 100\%$

1.51 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan

Nama Indikator	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota}}{\text{jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota}} \times 100\%$

1.52 Peningkatan prestasi olahraga

Nama Indikator	Peningkatan prestasi olahraga
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional}}{\text{jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota}} \times 100\%$

1.53 Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

Nama Indikator	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan Pembangunan daerah}}{\text{jumlah OPD}} \times 100\%$

1.54 Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah

Nama Indikator	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah}}{\text{jumlah OPD}} \times 100\%$

1.55 Tingkat keamanan informasi pemerintah

Nama Indikator	Tingkat keamanan informasi pemerintah
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Jumlah nilai per area keamanan informasi ----- x 100% Jumlah area penilaian

1.56 Terlestarikannya Cagar Budaya

Nama Indikator	Terlestarikannya Cagar Budaya
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan ----- x 100% Jumlah cagar budaya yang terdata

1.57 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat

Nama Indikator	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Indikator ini mengukur kombinasi dari: 1. Akses terhadap bahan bacaan – ketersediaan buku, perpustakaan, dan platform digital. 2. Intensitas membaca – frekuensi dan durasi masyarakat membaca setiap minggu/bulan. 3. Minat dan motivasi membaca – alasan membaca dan tujuan personal. 4. Lingkungan pendukung literasi – peran keluarga, sekolah, komunitas, dan teknologi.

1.58 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat																
Satuan	indeks																
Formulasi Perhitungan	<table><tr><th>Dimensi</th><th>Indikator (contoh)</th><th></th></tr><tr><td>1. Ketersediaan bahan bacaan</td><td>Jumlah buku per kapita, jumlah koleksi perpustakaan, akses internet literasi</td><td></td></tr><tr><td>2. Akses dan layanan perpustakaan</td><td>Jumlah kunjungan ke perpustakaan, jam layanan, keterjangkauan lokasi</td><td></td></tr><tr><td>3. Kecakapan literasi masyarakat</td><td>Tingkat kemampuan membaca, menulis, dan penggunaan informasi</td><td></td></tr><tr><td>4. Budaya baca</td><td>Frekuensi membaca, minat baca, kegiatan literasi berbasis masyarakat</td><td></td></tr></table>		Dimensi	Indikator (contoh)		1. Ketersediaan bahan bacaan	Jumlah buku per kapita, jumlah koleksi perpustakaan, akses internet literasi		2. Akses dan layanan perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan, jam layanan, keterjangkauan lokasi		3. Kecakapan literasi masyarakat	Tingkat kemampuan membaca, menulis, dan penggunaan informasi		4. Budaya baca	Frekuensi membaca, minat baca, kegiatan literasi berbasis masyarakat	
Dimensi	Indikator (contoh)																
1. Ketersediaan bahan bacaan	Jumlah buku per kapita, jumlah koleksi perpustakaan, akses internet literasi																
2. Akses dan layanan perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan, jam layanan, keterjangkauan lokasi																
3. Kecakapan literasi masyarakat	Tingkat kemampuan membaca, menulis, dan penggunaan informasi																
4. Budaya baca	Frekuensi membaca, minat baca, kegiatan literasi berbasis masyarakat																

1.59 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)

Nama Indikator	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$T = (a + i + s + j) / 4$ T= tingkat ketersediaan arsip

	a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN

1.60 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat

Nama Indikator	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$ T= tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan Pertanggung jawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah kabupaten/kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK I = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK

1.61 Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)

Nama Indikator	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)
Satuan	ton
Formulasi Perhitungan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)

1.62 Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan

Nama Indikator	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan
Satuan	orang
Formulasi Perhitungan	$(\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1) \div \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1 \times 100\%$

1.63 Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota

Nama Indikator	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1} \times 100\%$

1.64 Tingkat hunian akomodasi

Nama Indikator	Tingkat hunian akomodasi
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$

1.65 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku

Nama Indikator	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku

1.66 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD

Nama Indikator	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD

1.67 Produktivitas pertanian per hektar per tahun

Nama Indikator	Produktivitas pertanian per hektar per tahunProduktivitas pertanian per tahun
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun}}{\text{luas panen}} \times 100\%$

1.68 Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular

Nama Indikator	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t)} - \text{jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}}{\text{Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}} \times 100\%$

1.69 Produksi Daging

Nama Indikator	Produksi Daging
Satuan	Ton
Formulasi Perhitungan	$\sum \text{Jumlah Produksi Daging Ternak Besar, Kecil dan Unggas}$

1.70 Produksi Telur

Nama Indikator	Produksi Telur
Satuan	Ton
Formulasi Perhitungan	$\sum \text{Jumlah Produksi Telur Ayam, Itik dan Puyuh}$

1.71 Populasi Ternak

Nama Indikator	Produksi Ternak
Satuan	AU (Animal Unit)
Formulasi Perhitungan	1 Ternak Besar = 1 AU 1 Ternak Kecil = 0,14 AU 100 Ekor Unggas = 1 AU

1.72 Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)

Nama Indikator	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota}} \times 100\%$

1.73 Persentase kinerja realisasi pupuk

Nama Indikator	Persentase kinerja realisasi pupuk
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{RDKK}} \times 100\%$

1.74 Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku

Nama Indikator	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	$\frac{\text{jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan}}{\text{}} \times 100\%$

	jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota

1.75 Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota

Nama Indikator	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan ----- x 100% jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota

1.76 Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK

Nama Indikator	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan yang disepakati dengan capaian pada akhir tahun tersebut, dan setiap sasaran memiliki bobot 20%. Dokumen perencanaan pembangunan industri daerah terdiri dari: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota (satuan persentase) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian sasaran Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 20%, dengan rumus: Capaian × Bobot = hasil capaian sasaran. Contoh perhitungan: ○ Jika capaian 100% maka perhitungan $(100\% \times 20\%) = 20\%$; ○ Jika capaian 90% maka perhitungan $(90\% \times 20\%) = 18\%$; ○ Jika capaian 80% maka perhitungan $(80\% \times 20\%) = 16\%$; ○ dst. 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota (satuan persentase) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian sasaran Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 20%, dengan rumus: Capaian × Bobot = hasil capaian sasaran. Contoh perhitungan: ○ Jika capaian 100% maka perhitungan $(100\% \times 20\%) = 20\%$; ○ Jika capaian 90% maka perhitungan $(90\% \times 20\%) = 18\%$; ○ Jika capaian 80% maka perhitungan $(80\% \times 20\%) = 16\%$; ○ dst. 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota (satuan orang) diperoleh dengan mengalikan

	persentase capaian Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 15%, dengan rumus: Capaian × Bobot = hasil capaian sasaran. Contoh perhitungan: ○ Jika capaian 100% maka perhitungan $(100\% \times 20\%) = 20\%$; ○ Jika capaian 90% maka perhitungan $(90\% \times 20\%) = 18\%$; ○ Jika capaian 80% maka perhitungan $(80\% \times 20\%) = 16\%$; ○ dst. 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota (satuan US\$) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 20%, dengan rumus: Capaian × Bobot = hasil capaian sasaran. Contoh perhitungan: ○ Jika capaian 100% maka perhitungan $(100\% \times 20\%) = 20\%$; ○ Jika capaian 90% maka perhitungan $(90\% \times 20\%) = 18\%$; ○ Jika capaian 80% maka perhitungan $(80\% \times 20\%) = 16\%$; ○ dst. 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas yang terdiri dari Penanaman Modal Asing (satuan US\$) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (satuan Rp) Kabupaten/Kota diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota dengan bobot maksimal sebesar 20%, dengan rumus: Capaian × Bobot = hasil capaian sasaran. Contoh perhitungan: ○ Jika capaian 100% maka perhitungan $(100\% \times 20\%) = 20\%$; ○ Jika capaian 90% maka perhitungan $(90\% \times 20\%) = 18\%$; ○ Jika capaian 80% maka perhitungan $(80\% \times 20\%) = 16\%$; ○ dst.

1.77 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait

Nama Indikator	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan -----x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan



1.78 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait

Nama Indikator	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan -----x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan

1.79 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota

Nama Indikator	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan -----x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan

1.80 Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini

Nama Indikator	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini
Satuan	unit
Formulasi Perhitungan	Tersedianya informasi industry dengan batas waktu 0-6 bulan - Tersedianya informasi industry dengan batas waktu 7-12 bulan - Informasi produksi dan kapasitas produksi - Informasi bahan baku dan bahan penolong - Informasi bahan bakar/ energy - Informasi tenaga kerja - Informasi investasi

1.81 Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan

Nama Indikator	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan ----- x 100 % Jumlah APBD

1.82 Rasio PAD

Nama Indikator	Rasio PAD
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Jumlah PAD ----- X 100% Jumlah APBD non migas

1.83 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Nama Indikator	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Satuan	level
Formulasi Perhitungan	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP

1.84 Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Nama Indikator	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Satuan	elvel
Formulasi Perhitungan	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP

1.85 Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)

Nama Indikator	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures ----- X 100% jumlah belanja APBD

1.86 Opini Laporan Keuangan

Nama Indikator	Opini Laporan Keuangan
Satuan	predikat
Formulasi Perhitungan	Opini Laporan Keuangan

1.87 Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama

Nama Indikator	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n ----- X 100%

	jumlah kontrak keseluruhan tahun n

1.88 Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif

Nama Indikator	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif ----- X 100% Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif

1.89 Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan

Nama Indikator	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan ----- X 100% total belanja langsung

1.90 Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah

Nama Indikator	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah -----X 100% Jumlah pengadaan yang dilakukan

1.91 Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Nama Indikator	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas ----- X 100% Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah

1.92 Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Nama Indikator	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) ----- X 100% seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

1.93 Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Nama Indikator	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi ----- X 100% seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

1.94 Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD

Nama Indikator	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi ----- X 100% total belanja APBD dikurangi satu

1.95 Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD

Nama Indikator	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi ----- X 100% dibagi total PAD dalam APBD dikurangi satu

1.96 Manajemen Aset

Nama Indikator	Manajemen Aset
Formulasi Perhitungan	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak

1.97 Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya

Nama Indikator	Manajemen Aset
Formulasi Perhitungan	Nilai realisasi SiLPA -----x 100% Total belanja anggaran tahun sebelumnya

1.98 Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya

Nama Indikator	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Nilai realisasi SiLPA ----- X 100% total belanja anggaran tahun sebelumnya.

1.99 Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)

Nama Indikator	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda ----- X 100% Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda

1.100 Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)

Nama Indikator	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)
Satuan	%
Formulasi Perhitungan	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda ----- X 100% total jumlah dokumen yang telah dirinci